Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 69 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1516);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

43. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

44. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);

45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

46. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

50. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

54. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);

55. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

4. Walikota adalah Walikota Surabaya.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kota Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);

b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

(1) PD melaksanakan evaluasi serta membuat laporan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai berikut :

a. laporan setiap bulan, meliputi indikator kinerja dan kelompok sasaran pada level kegiatan dan subkegiatan;

b. laporan setiap triwulan dan tahunan, meliputi indikator kinerja dan kelompok sasaran pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui aplikasi *e-planning* paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan dan triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan terhadap usulan kegiatan dan anggaran yang diajukan oleh PD untuk tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan evaluasi serta membuat laporan evaluasi setiap triwulan dan tahunan terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan menggunakan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

(3) Laporan evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya

Pasal 7

(1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta kegiatan dan subkegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar xv
BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum ..... I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 10
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..... I - 13
II BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1
2.1 Kondisi Umum Daerah ..... II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 49
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 178
2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ..... II - 191
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... II - 193
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II - 445
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II - 445
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... II - 446
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Surabaya ..... III - 5
3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2023 dan Tahun 2024 ..... III - 18
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III - 22

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III - 23
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III - 33
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III - 37
3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah ..... III - 39
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV - 1
4.1 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV - 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV - 1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... IV - 5
4.2.1 Isu Strategis ..... IV - 5
4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Surabaya ..... IV - 15
4.2.3 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 ..... IV - 25
4.2.4 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan ..... IV - 27
4.2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..... IV -772
4.2.6 Inovasi Unggulan ..... IV -843
4.2.7 Kebijakan Pencapaian SPM ..... IV -846
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V - 1
5.1 Rencana Program ..... V - 1
5.2 Kerangka Pendanaan ..... V - 333
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VI - 1
6.1 Indikator Kinerja Utama ..... VI - 1
6.2 Indikator Kinerja Kunci ..... VI - 5
BAB VII PENUTUP ..... VII- 1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan ..... II - 7
Tabel II.2 Luasan Kawasan RTH Tahun 2018 - 2022..... II - 8
Tabel II.3 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022..... II - 14
Tabel II.4 Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 14
Tabel II.5 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan..... II - 15
Tabel II.6 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2022 ..... II - 17
Tabel II.7 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama ..... II - 18
Tabel II.8 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022 ..... II - 18
Tabel II.9 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022 ..... II - 20
Tabel II.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 - 2022..... II - 21
Tabel II.11 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 - 2022 (dalam persen) ..... II - 22
Tabel II.12 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 - 2022 (dalam Juta Rp).... II - 24
Tabel II.13 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 - 2022 (dalam Juta Rp).... II - 25
Tabel II.14 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ..... II - 26
Tabel II.15 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita

Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 28
Tabel II.16 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022..... II - 30
Tabel II.17 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 31
Tabel II.18 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022..... II - 33
Tabel II.19 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 33
Tabel II.20 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 34
Tabel II.21 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 34
Tabel II.22 Pengeluaran per Kapita disesuaikan di Kota Surabaya
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 35
Tabel II.23 Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022.... II - 36
Tabel II.24 Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 38
Tabel II.25 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 39
Tabel II.26 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap
Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 39
Tabel II.27 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 40
Tabel II.28 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 41
Tabel II.29 Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang)
Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 41
Tabel II.30 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
(menurut Kecamatan) Tahun 2018 - 2022..... II - 42
Tabel II.31 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 44
Tabel II.32 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 44
Tabel II.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 46

Tabel II.34 TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 47
Tabel II.35 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 47
Tabel II.36 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya
Tahun 2022 ..... II - 49
Tabel II.37 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut
Kecamatan 2022 ..... II - 69
Tabel II.38 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut
Kecamatan 2022 ..... II - 71
Tabel II.39 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2018 - 2022 .... II - 73
Tabel II.40 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS)
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 74
Tabel II.41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 74
Tabel II.42 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2022..... II - 75
Tabel II.43 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 .. II - 77
Tabel II.44 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang
Pendidikan Tahun 2022..... II - 78
Tabel II.45 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang
Pendidikan Tahun 2022..... II - 78
Tabel II.46 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2022 II - 78
Tabel II.47 Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 79
Tabel II.48 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani
dari 24 Jam Tahun 2018 - 2022..... II - 80
Tabel II.49 Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya 2022 ..... II - 80
Tabel II.50 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2018 - 2022..... II - 82
Tabel II.51 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2018 - 2022..... II - 82
Tabel II.52 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2018 - 2022..... II - 83
Tabel II.53 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2018 - 2022 ..... II - 84

Tabel II.54 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2018-2022 II - 84
Tabel II.55 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 85
Tabel II.56 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022..... II - 85
Tabel II.57 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 86
Tabel II.58 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 86
Tabel II.59 Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mendapatkan Jaminan Kesehatan Tahun 2018 - 2022 ..... II - 88
Tabel II.60 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2018 - 2022..... II - 89
Tabel II.61 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... II - 90
Tabel II.62 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Tahun 2018 – 2022..... II–90
Tabel II.63 Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015-2022. II–91
Tabel II.64 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2018 –2022 ..... II–92
Tabel II.65 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2018 – 2022 ..... II–92
Tabel II.66 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Tahun 2018 – 2022 ..... II–93
Tabel II.67 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–95
Tabel II.68 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa II–95
Tabel II.69 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–98
Tabel II.70 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–98
Tabel II.71 Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis Tahun 2018 – 2022 ..... II–99
Tabel II.72 Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2018 – 2022..... II–100

Tabel II.73 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–101
Tabel II.74 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–101
Tabel II.75 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–102
Tabel II.76 PMKS Penduduk non Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–103
Tabel II.77 PSKS Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–103
Tabel II.78 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–104
Tabel II.79 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–104
Tabel II.80 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir II–105
Tabel II.81 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–106
Tabel II.82 Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–107
Tabel II.83 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–107
Tabel II.84 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–108
Tabel II.85 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–109
Tabel II.86 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–109
Tabel II.87 KDRT Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–110
Tabel II.88 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–111
Tabel II.89 Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tahun 2018 – 2022 ..... II–111
Tabel II.90 Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–112
Tabel II.91 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2018-2022 II–112
Tabel II.92 Pola Pangan Harapan Tahun 2018 – 2022 ..... II–113

Tabel II.93 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022.. II–114
Tabel II.94 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2018 – 2022 ..... II–115
Tabel II.95 Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat Tahun 2018 – 2022 ..... II–116
Tabel II.96 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–116
Tabel II.97 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–117
Tabel II.98 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2018 – 2022 ..... II–118
Tabel II.99 Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022..... II–118
Tabel II.100 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2018-2022 II–119
Tabel II.101 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–120
Tabel II.102 Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2018 – 2022 ..... II–121
Tabel II.103 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018 – 2022 II–122
Tabel II.104 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022.. II–123
Tabel II.105 Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2018 – 2022 ..... II–125
Tabel II.106 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2018 – 2022 ..... II–126
Tabel II.107 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–126
Tabel II.108 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022..... II–128
Tabel II.109 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 II–128
Tabel II.110 Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–129
Tabel II.111 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 . II–130
Tabel II.112 Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022..... II–131

Tabel II.113 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–132
Tabel II.114 Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–133
Tabel II.115 Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum (Angkutan Kota dan Bus) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022..... II–134
Tabel II.116 Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2018 – 2022 . II–135
Tabel II.117 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–135
Tabel II.118 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–136
Tabel II.119 Pemasangan Weather Information Display Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–136
Tabel II.120 Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–137
Tabel II.121 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022..... II–137
Tabel II.122 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Daring Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022..... II–138
Tabel II.123 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2018 – 2022..... II–139
Tabel II.124 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 II–140
Tabel II.125 Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–140
Tabel II.126 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022..... II–141
Tabel II.127 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–142
Tabel II.128 Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2018 – 2022..... II–142
Tabel II.129 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2018-2022 II–143
Tabel II.130 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–144
Tabel II.131 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–144

Tabel II.132 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–146
Tabel II.133 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–148
Tabel II.134 Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2022 ..... II–148
Tabel II.135 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–149
Tabel II.136 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–151
Tabel II.137 Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–151
Tabel II.138 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–152
Tabel II.139 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2018 – 2022 ..... II–153
Tabel II.140 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2018 – 2022 ..... II–155
Tabel II.141 Perkembangan Nilai Tambah Sektor Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 – 2022 ..... II–156
Tabel II.142 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2018-2022 II–156
Tabel II.143 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–158
Tabel II.144 Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2018-2022 . II–158
Tabel II.145 Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata Tahun 2018 – 2022 ..... II–159
Tabel II.146 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–160
Tabel II.147 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–160
Tabel II.148 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–161
Tabel II.149 Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2018 – 2022 ..... II–161
Tabel II.150 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 .. II–162

Tabel II.151 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–162
Tabel II.152 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2018 – 2022 ..... II–163
Tabel II.153 Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–163
Tabel II.154 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–163
Tabel II.155 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 II–164
Tabel II.156 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2018 – 2022 ..... II–165
Tabel II.157 SOP Dievaluasi Tahun 2018 – 2022 ..... II–165
Tabel II.158 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2018 – 2022 ..... II–166
Tabel II.159 Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–166
Tabel II.160 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–167
Tabel II.161 MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2022 ..... II–168
Tabel II.162 MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2022. II–168
Tabel II.163 MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2018 – 2022 ..... II–169
Tabel II.164 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ... II–171
Tabel II.165 Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–172
Tabel II.166 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2018 – 2022 ..... II–172
Tabel II.167 Rata – Rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Tahun 2018 – 2022 ..... II–173
Tabel II.168 Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–174
Tabel II.169 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2018 – 2022 ..... II–174

Tabel II.170 Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–175
Tabel II.171 Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–175
Tabel II.172 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–176
Tabel II.173 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–177
Tabel II.174 Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022..... II–177
Tabel II.175 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–178
Tabel II.176 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022.. II–178
Tabel II.177 Perkembangan PDRB Kategori Tranportasi dan Pergudangan Tahun 2018 – 2022 ..... II–179
Tabel II.178 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–180
Tabel II.179 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–181
Tabel II.180 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–181
Tabel II.181 Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–182
Tabel II.182 Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–182
Tabel II.183 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–184
Tabel II.184 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–185
Tabel II.185 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2018-2022 II–185
Tabel II.186 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2018-2022. II–185
Tabel II.187 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2018 – 2022... II–187
Tabel II.188 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–188
Tabel II.189 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–189

Tabel II.190 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022 ..... II–189
Tabel II.191 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–190
Tabel II.192 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya
Tahun 2022 ..... II–191
Tabel II.193 Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan,
Kegiatan, dan Kinerja Hasil Program sampai dengan
Akhir Tahun 2022 ..... II–193
Tabel II.194 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan
Tahun 2022 Kota Surabaya..... II–195
Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2021 dan Tahun 2022* (dalam juta) ..... III - 6
Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2021 dan Tahun 2022* ..... III - 8
Tabel III.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 dan Tahun 2022*
(dalam persen) ..... III - 10
Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2021 dan
Tahun 2022* ..... III - 12
Tabel III.5 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2018
–Tahun 2022 ..... III - 15
Tabel III.6 Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 .... III - 16
Tabel III.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2021 - 2022 ..... III - 17
Tabel III.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2021 s.d Tahun 2025..... III - 30
Tabel III.9 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya
Tahun 2021 s.d Tahun 2025..... III - 36
Tabel III.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Surabaya Tahun 2021 s.d Tahun 2025 ..... III - 38
Tabel IV.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ..... IV - 3
Tabel IV.2 Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Prioritas
Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur ..... IV - 22

Tabel IV.3 Keselerasan Indikator Makro Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024 ..... IV - 23
Tabel IV.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 ..... IV - 25
Tabel IV.5 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan ..... IV - 27
Tabel IV.6 Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2024 ..... IV - 560
Tabel IV.7 Keterkaitan Program Pembangunan Nasional dengan RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 ..... IV - 694
Tabel IV.8 Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 ..... IV - 773
Tabel IV.9 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan ..... IV - 847
Tabel IV.10 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024 ..... IV - 847
Tabel IV.11 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan..... IV - 850
Tabel IV.12 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024..... IV - 851
Tabel IV.13 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang..... IV - 853
Tabel IV.14 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024 ..... IV - 853
Tabel IV.15 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman ..... IV - 854
Tabel IV.16 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ..... IV - 854
Tabel IV.17 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat..... IV - 856
Tabel IV.18 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 ..... IV - 857

Tabel IV.19 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ..... IV - 859
Tabel IV.20 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024 ..... IV - 860

Tabel V.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024..... V - 8
Tabel V.2 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2024 V..... - 333
Tabel VI.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 ..... VI - 3
Tabel VI.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2026..... VI - 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Grafik Curah Hujan Kota Surabaya Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023 ..... II – 2
Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya ..... II – 4
Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya ..... II – 5
Gambar II.4 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya .... II – 9
Gambar II.5 Peta Sesar Kendeng ..... II – 11
Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara ... II – 12
Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya ..... II – 12
Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Surabaya, 2022 ..... II – 13
Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia ..... II – 16
Gambar II.10 Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2018 – 2022 ..... II – 29
Gambar II.11 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2021 ..... II – 44
Gambar II.12 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2018 – 2022 ..... II – 45
Gambar II.13 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2018–2022 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, diolah, 2023 II – 48
Gambar II.14 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya 2022 ..... II – 82
Gambar II.15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan 2022 ... II – 83
Gambar II.16 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi 2022 ..... II – 87
Gambar II.17 Persentase Atlet Berprestasi ..... II – 147
Gambar II.18 Nilai Terhadap Pelayanan dan Kemampuan Petugas TBM/Perpusatakaan dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng ..... II – 154
Gambar II.19 Perangkat Smart Water Level ..... II – 186

Gambar III.1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 - 2022 (persen) ..... III - 10
Gambar IV.1 Visi, Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ..... IV - 6
Gambar IV.2 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur ..... IV - 13

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 69 Tahun 2023
TANGGAL : 10 Juli 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, RPJPD Kota Surabaya, Perubahan RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024, hasil evaluasi

capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2022, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, penelaahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta tindak lanjut Rekomendasi Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 berdasarkan surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 050 / 10.750 /201.2/2023 tanggal 22 Juni 2023.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan RKPD;
b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
c. Penyusunan Rancangan RKPD;
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
f. Penetapan.

Muatan dalam dokumen RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan terhadap dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020. Setelah pertumbuhan ekonomi terkontraksi pada -4,85% di tahun 2020, selaras dengan penanganan pandemi Covid-19 baik melalui upaya kuratif maupun pencegahan penularan melalui pembatasan dan vaksinasi yang masif, pemulihan ekonomi terus dilakukan. Upaya tersebut membawa dampak positif dengan pertumbuhan ekonomi yang terus

membaik hingga pada tahun 2021 tumbuh pada angka 4,29% dan pada tahun 2022 tumbuh 6,51%. Kondisi perekonomian terus bertumbuh sesuai dengan prediksi dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 bahwa perekonomian akan terus pulih pada tahun 2023, membawa pada proyeksi positif di tahun 2024 sehingga pemulihan ekonomi yang telah menjadi tema dan prioritas sejak tahun 2021 hingga 2023 dapat diperkuat dengan dukungan peningkatan kualitas tata Kota, sistem transportasi terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026. Di sisi lain, persentase kemiskinan yang meningkat selama terjadinya pandemi Covid-19 terus membaik menjadi 4,72% di tahun 2022 namun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2019 berada pada angka 4,52%. Demikian pula pada tingkat pengangguran terbuka yang membaik di tahun 2022 menjadi 7,62% namun belum kembali pulih pada sebelum terjadinya pandemi di tahun 2019 sebesar 5,47%. Oleh sebab itu pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap harus dilakukan di tahun 2024. Terjadinya pandemic Covid-19 yang disikapi dengan pembelajaran jarak jauh telah meningkatkan risiko terjadnya *learning loss* pada siswa yakni berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis, hal ini sejalan dengan data Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya yang sejak tahun 2020 bertumbuh dengan lambat. Berdasarkan pertimbangan atas kondisi di Kota Surabaya tersebut, maka pada tahun 2024 penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya diarahkan pada tema "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia"***

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1516);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
44. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);

45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
50. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

54. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
55. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Dokumen RKPD Kota Surabaya 2024 merupakan proses akhir dalam tahapan penyusunan RKPD berdasarkan telaahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) tahun 2024.

Secara substansial, RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun 2024.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

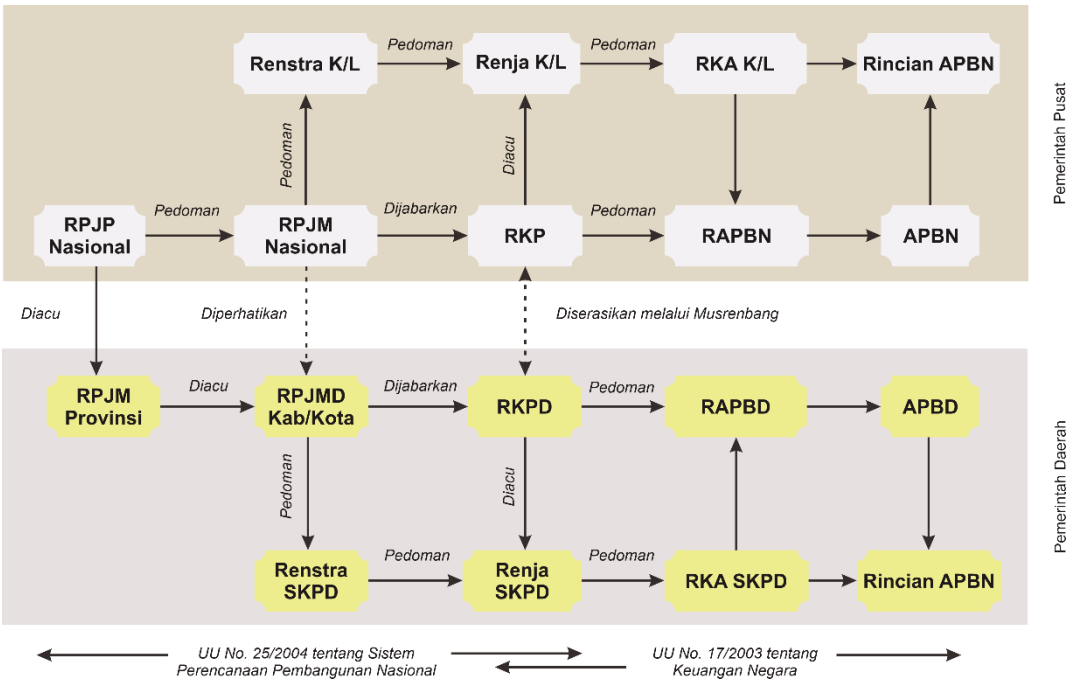

Gambar I.1
Alur Penyusunan RKPD

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, RPJPD, Perubahan RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024, program prioritas nasional dalam RKP 2023, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2022, hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2022, visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta tindak lanjut hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dokumen Rancangan Akhir RKPD 2024 sesuai dengan surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 050 / 10.750 /201.2/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Rekomendasi Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 yang kemudian dilanjutkan Penetapan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2024.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, latar belakang penyusunan RKPD serta proses penyusunan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kota.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu menguraikan hasil evaluasi RKPD tahun 2022, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan dokumen RKPD tahun 2023 sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Menjelaskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dalam bentuk tabel yang disertai dengan penjelasan dan analisis untuk menjelaskan kondisi dan perkembangan pencapaian indikator TPB/SDGs.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada

RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Surabaya

Menjelaskan kondisi ekonomi Kota Surabaya sebagai pertimbangan arah kebijakan ekonomi

3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2023 dan Tahun 2024

Menggambarkan prospek perekonomian Kota Surabaya di tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai bahan pertimbangan keputusan arah kebijakan ekonomi di Kota Surabaya

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2024 pada masing-masing jenis pendapatan daerah

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Uraian Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Uraian setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Penjelasan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2024, dengan memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil. Penentuan prioritas tersebut dilakukan melalui sinkronisasi keselarasan tema dan prioritas pada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan pada Rakortekrenbang, dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah pada tahun rencana. Selain itu, dijabarkan juga kebijakan dan inovasi yang akan dilakukan

untuk mendukung prioritas tersebut, sasaran pembangunan, serta inovasi unggulan.

4.2.1 Isu Strategis

Uraian kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang

4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Surabaya

Penjelasan mengenai prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah

4.2.3 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

Menggambarkan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi.

4.2.4 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan

Uraian Program dan kegiatan terkait pemenuhan atau dukungan terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kota Surabaya

4.2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Rincian saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

4.2.6 Inovasi Unggulan

Penjabaran bentuk-bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2.7 Kebijakan Pencapaian SPM

Ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5.1 Rencana Program

Memberikan uraian tentang program dan kegiatan sasaran dan prioriras pembangunan daerah

5.2 Kerangka Pendanaan

Bagian ini menjelaskan pendanaan yang disusun berdasarkan hasil analisa keuangan dengan mempertimbangkan regulasi dan kondisi terkini terkait pandemi Covid-19.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Mengemukakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan

6.2 Indikator Kinerja Kunci

Bagian ini menjelaskan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah.

VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d. 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d. 112°54' Bujur Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau bahwa luas wilayah Kota Surabaya seluas 335,925 km^2. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Di Tahun 2022, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yakni sebesar 426,9 mm, dengan temperatur berkisar antara 20°C hingga 36°C. Gambar II.1 menunjukkan grafik curah hujan Kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

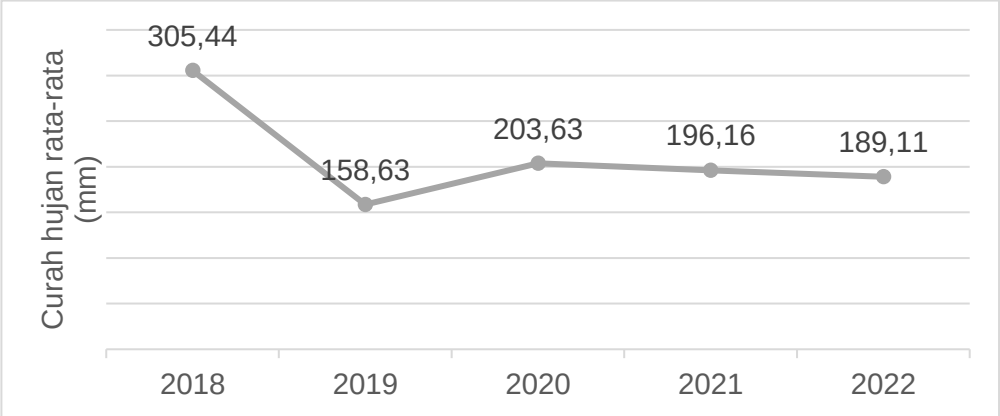

Gambar II.1 Grafik Curah Hujan Kota Surabaya

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan, 153 kelurahan, 1.360 rukun warga (RW) dan 9.145 rukun tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan yang secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;

3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Suroboyo yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

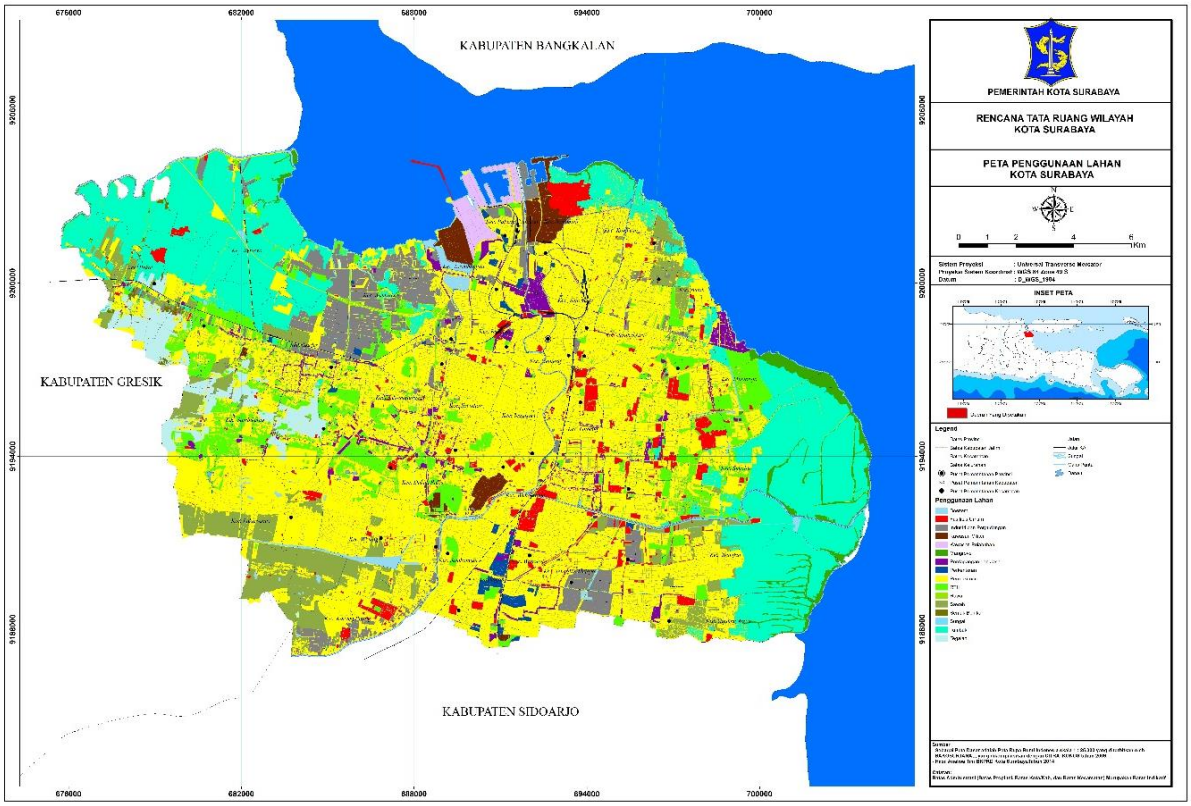

Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, permukiman menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 48% atau 16.057 hektar. Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Gambar II.2 menunjukkan Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya.

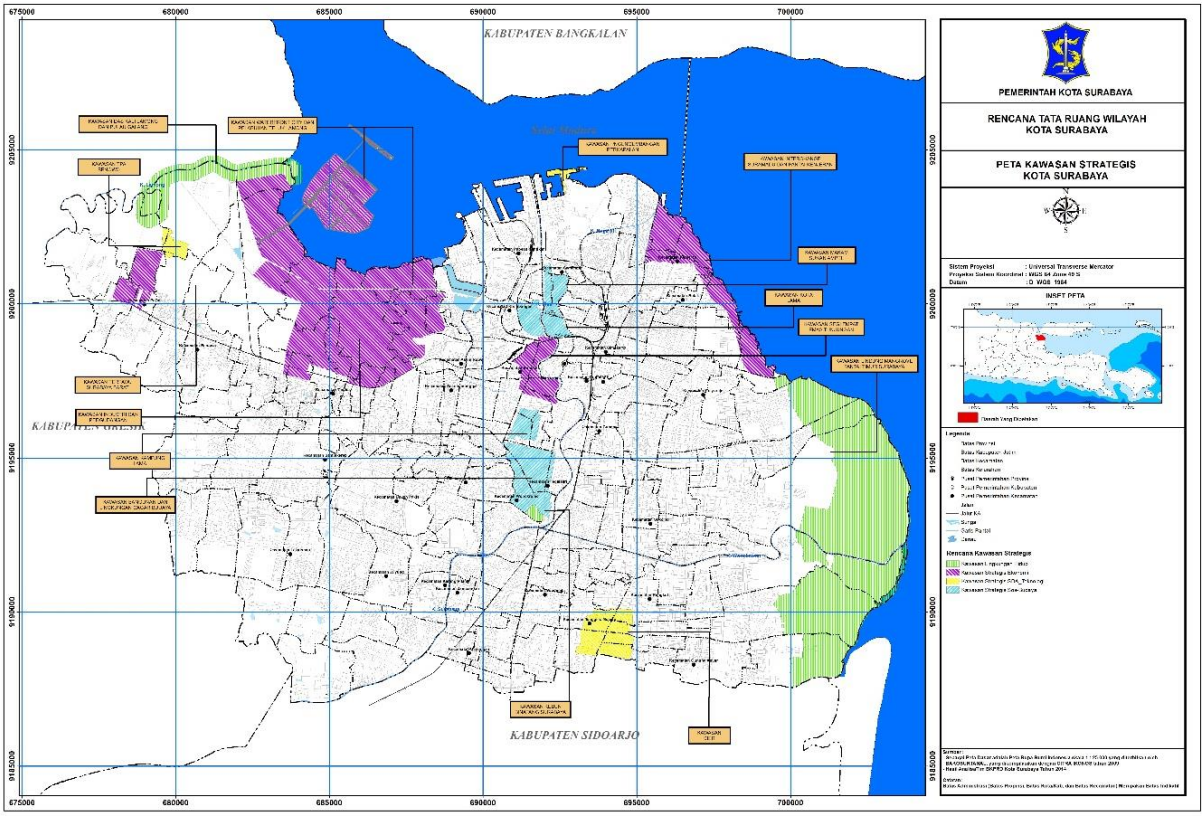

Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun. Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan. Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang

sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970-an dengan karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon "Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan". Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang sebesar 33% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Motor sebesar 26% dari total PDRB Kecamatan Bulak.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan *mixed-use* pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjang Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangon, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala internasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II.1
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Genteng	59
2	Krembangan	54
3	Pabean Cantian	33
4	Tegalsari	27
5	Wonokromo	24
6	Bubutan	19
7	Gubeng	12
8	Semampir	10
9	Sawahan	9
10	Simokerto	8
11	Tambaksari	7
12	Lakarsantri	2
13	Dukuh Pakis	1

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
14	Wonocolo	1
15	Gayungan	1
16	Bulak	1
Jumlah		**268**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2023

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS) di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo dengan luas lahan 15,3 Ha yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.

- Kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada Tabel II.2. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.

Tabel II.2
Luasan Kawasan RTH Tahun 2018 – 2022

No	Jenis RTH	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kawasan lindung dan pesisir timur	4.548,59	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.570,33
2	Taman hutan raya	55,81	57,55	66,03	66,03	66,03
Total (Ha)		4.604,40	4.624,95	4.636,36	4.636,36	4.636,36

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

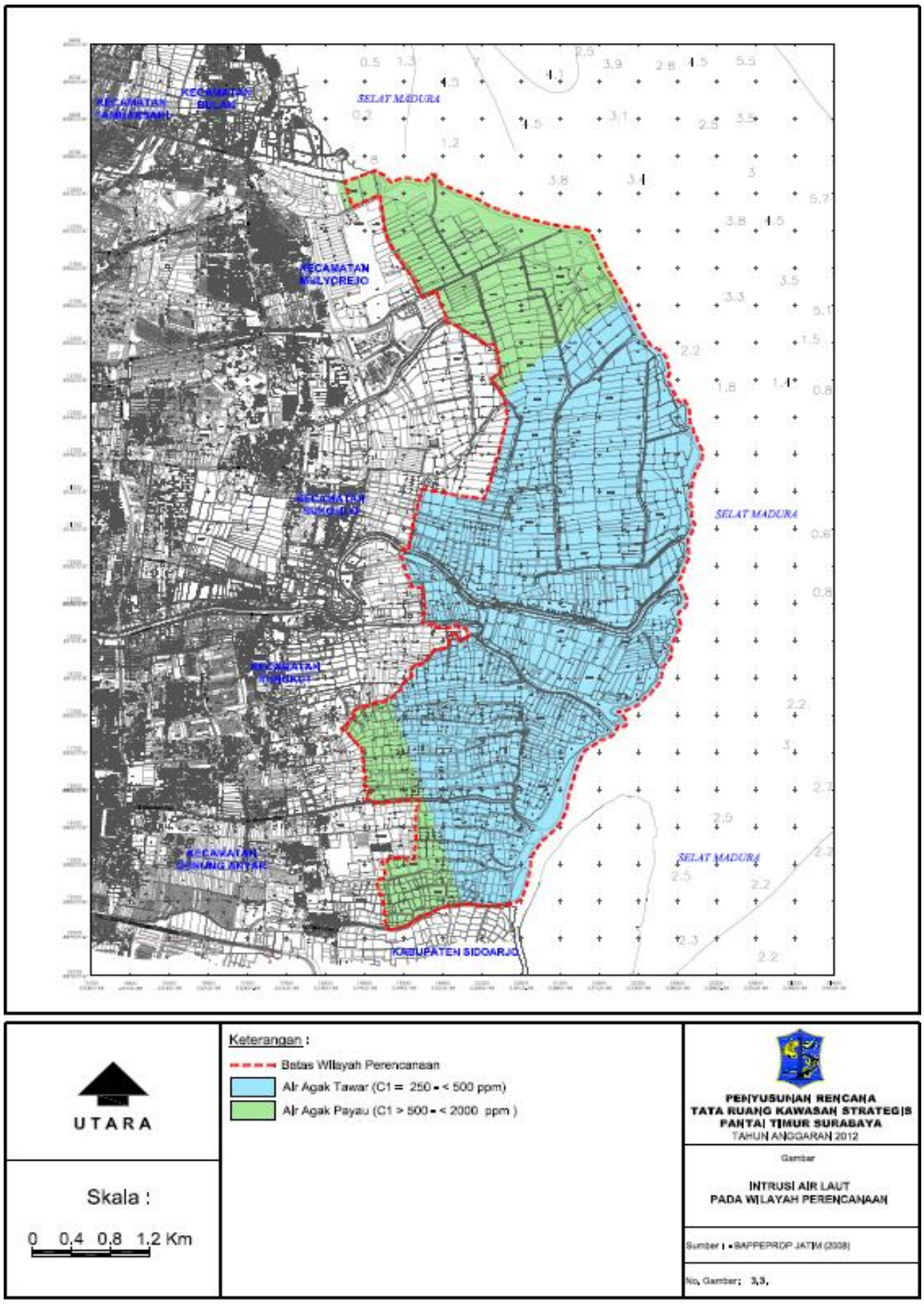

Gambar II.4 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada Tabel II.2.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentinganpendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) da-tau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: *"Waste to Energy".*

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/ Reklamasi di Teluk Lamong.

2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga "relatif aman" dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.5.

Gambar II.5
Peta Sesar Kendeng
Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut.

Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara

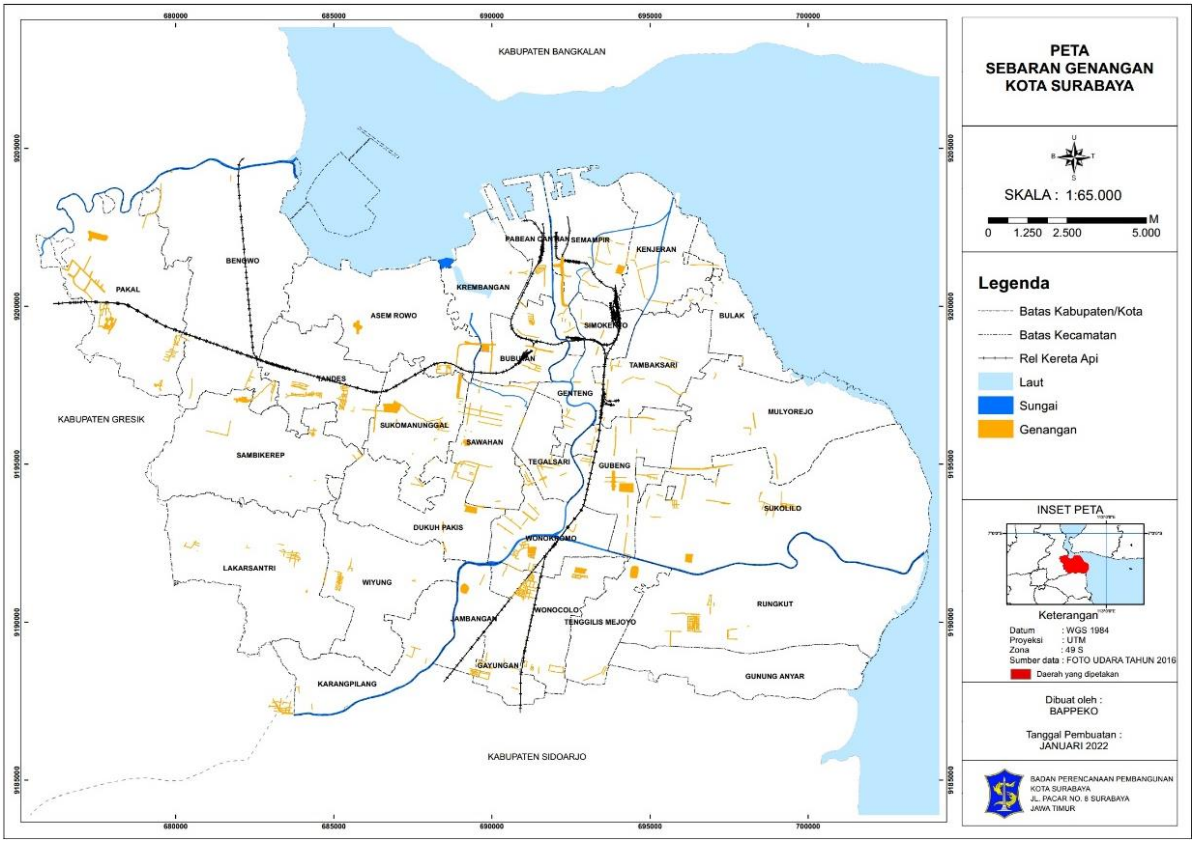

Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk,

kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

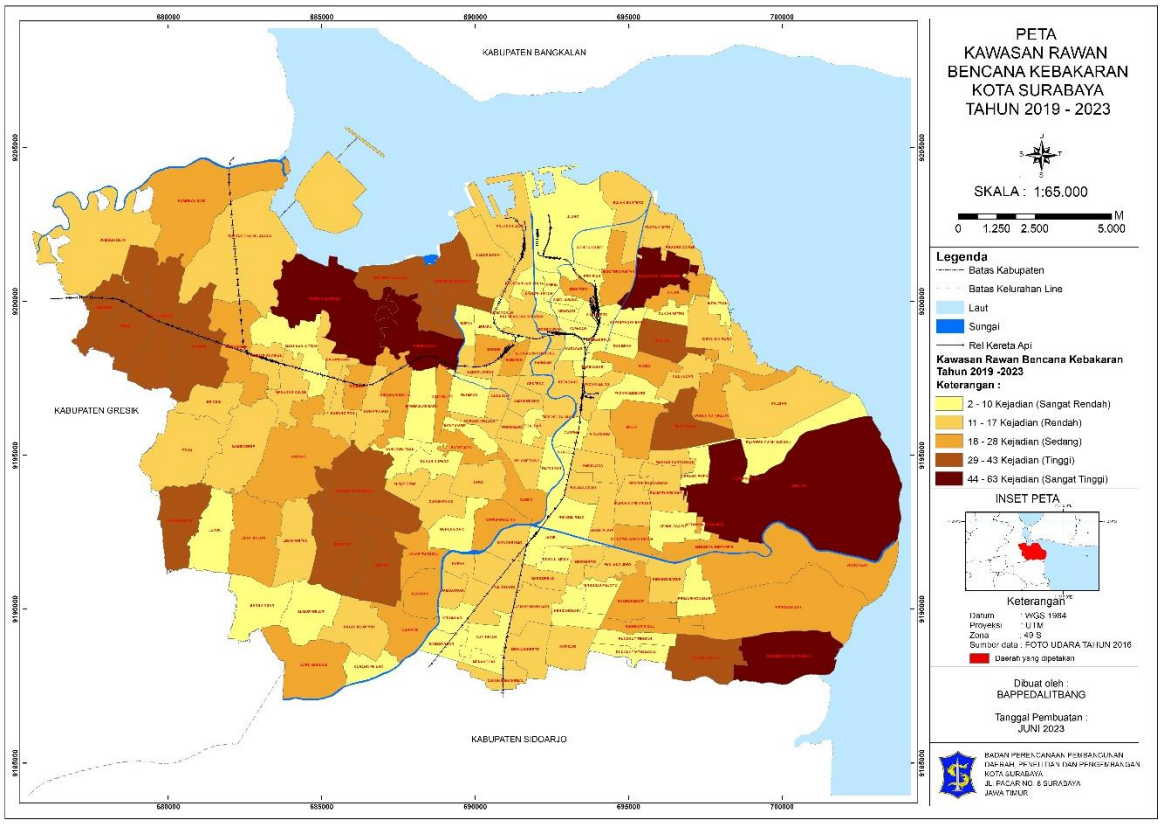

Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2023

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan beberapa strategi dalam pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran. Salah satu strategi efektif yang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan risiko bencana kebakaran adalah dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Selain itu,

dalam rangka mengurangi kejadian bencana kebakaran pada bangunan gedung, perlu dilakukan proteksi terhadap bangunan gedung terutama pada wilayah dengan intensitas pemanfaatan bangunan yang cukup tinggi. Untuk itu, upaya aktif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah dengan melakukan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung, baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II.3
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banjir/ Pasang Air Laut	0	0	0	0	0
2	Angin Puting Beliung/ Angin Kencang	3	7	2	4	0
3	Kebakaran	496	515	608	705	589
4	Gempa Bumi	0	0	0	0	0
5	Gelombang Tinggi	0	0	0	0	0
6	Cuaca Ekstrim	0	0	0	0	0

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2023

Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2019 telah membentuk 154 Kelurahan Tangguh bencana. Kelurahan tangguh bencana ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Kota Surabaya dalam upaya mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi dampak bencana. Data kelurahan Tangguh bencana Tahun 2018 – 2022 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4
Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	47	154	154	154	154

Sumber: BPBD Kota Surabaya, 2023

Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan mitigasi bencana dengan melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada seluruh elemen masyarakat serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana. Terkait dengan tanggap darurat bencana,Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kapasitas Command Center 112 dan menyediakan 7 lokasi posko terpadu dan 34 lokasi pos pantau yang dapat memaksimalkan penanganan kejadian kedaruratan sampai dengan 7 menit, serta melakukan kegiatan pasca bencana dengan memberikan bantuan logistik kepada korban bencana yang membutuhkan.

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting dalam proses pembangunan, karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2022 sebesar 2.987.863 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.5. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km^2 yaitu Kecamatan Bubutan, Kenjeran, Sawahan, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Oleh karenanya, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel II.5
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Asem Rowo	15,01	47.437	3.161
2	Benowo	26,65	71.033	2.666
3	Bubutan	3,91	97.707	25.015
4	Bulak	6,24	46.350	7.432
5	Dukuh Pakis	10,27	59.293	5.773
6	Gayungan	5,91	43.617	7.378
7	Genteng	4,09	58.601	14.321
8	Gubeng	7,93	133.900	16.887
9	Gunung Anyar	10,15	60.535	5.962
10	Jambangan	4,12	53.639	13.022
11	Karang Pilang	9,39	74.931	7.980
12	Kenjeran	8,52	177.561	20.842
13	Krembangan	8,60	114.674	13.327
14	Lakarsantri	18,69	63.017	3.371
15	Mulyorejo	17,37	86.824	4.997
16	Pabean Cantian	5,48	74.810	13.660
17	Pakal	18,58	60.877	3.277
18	Rungkut	22,94	120.067	5.233
19	Sambikerep	17,42	66.796	3.835
20	Sawahan	7,16	199.548	27.884
21	Semampir	9,07	181.226	19.987
22	Simokerto	2,63	92.832	35.298
23	Sukolilo	30,18	113.876	3.774
24	Sukomanunggal	9,40	104.271	11.090
25	Tambaksari	8,97	226.136	25.222
26	Tandes	9,98	91.784	9.196
27	Tegalsari	4,33	98.484	22.727
28	Tenggilis Mejoyo	5,81	58.695	10.105
29	Wiyung	12,32	74.224	6.026
30	Wonocolo	6,54	79.559	12.157
31	Wonokromo	8,28	155.559	18.795

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023, diolah

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin, meliputi 1.508.148 jiwa atau 50,48% penduduk perempuan dan 1.479.715 jiwa atau 49,52% penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, atau lebih dikenal sebagai piramida penduduk, dapat dilihat pada Gambar II.9.

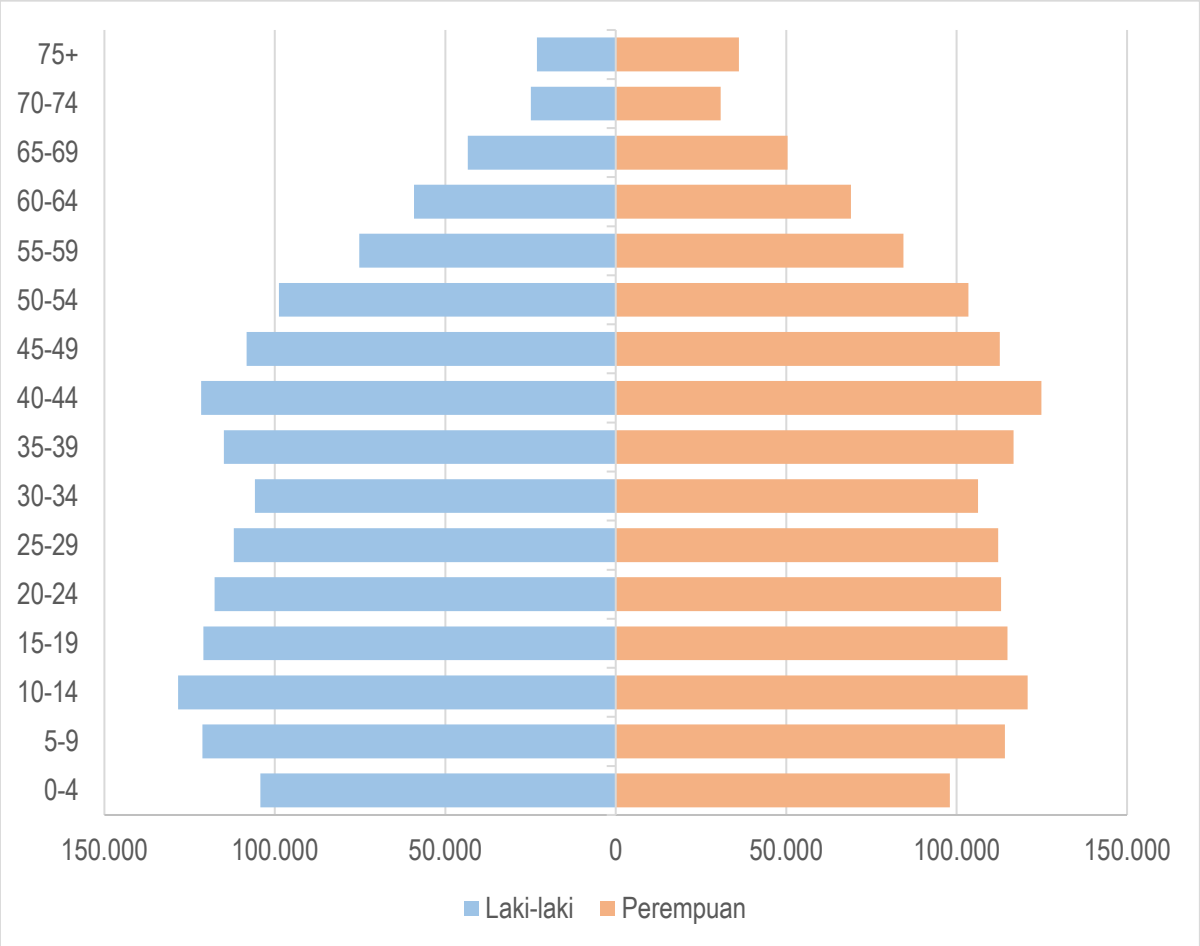

Gambar II.9 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2022 yaitu usia 3-6 tahun sebanyak 179.967 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 294.723 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 148.205 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 138.558 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.6
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2022

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	3.347	5.045	2.607	2.300
2	Benowo	4.369	7.380	3.754	3.522
3	Bubutan	5.755	9.475	4.823	4.658
4	Bulak	2.961	4.789	2.429	2.310
5	Dukuh Pakis	3.459	5.710	2.821	2.603
6	Gayungan	2.453	4.177	2.140	2.084
7	Genteng	3.213	5.434	2.875	2.670
8	Gubeng	7.189	12.062	6.252	6.082
9	Gunung Anyar	3.755	6.016	2.957	2.673
10	Jambangan	3.317	5.460	2.704	2.541
11	KarangPilang	4.375	7.126	3.567	3.434
12	Kenjeran	12.557	19.107	9.428	8.501
13	Krembangan	6.993	11.589	5.710	5.317
14	LakarSantri	3.919	6.235	3.243	3.002
15	Mulyorejo	4.933	8.132	4.088	3.894
16	Pabean Cantian	4.558	7.357	3.775	3.527
17	Pakal	3.831	6.090	3.114	3.019
18	Rungkut	7.294	11.845	5.649	5.325
19	Sambikerep	3.977	6.652	3.293	3.081
20	Sawahan	11.154	19.381	9.850	9.376
21	Semampir	12.529	19.893	9.867	8.615
22	Simokerto	5.592	9.255	4.557	4.229
23	Sukolilo	7.002	11.002	5.464	5.036
24	Sukomanunggal	6.294	10.253	4.989	4.645
25	TambakSari	13.053	21.822	10.982	10.173
26	Tandes	5.475	9.330	4.737	4.387
27	Tegalsari	5.551	9.442	4.719	4.446
28	Tenggilis Mejoyo	3.548	5.569	2.861	2.598
29	Wiyung	4.270	7.037	3.471	3.423
30	Wonocolo	4.784	7.679	3.868	3.657
31	Wonokromo	8.460	14.379	7.611	7.430
Jumlah		**179.967**	**294.723**	**148.205**	**138.558**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel berikut.

Tabel II.7
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

Agama	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Islam	85,11%	85,35%	85,51%	85,70%	85,83%	85,99%
2. Kristen	9,12%	8,98%	8,89%	8,75%	8,68%	8,59%
3. Katholik	3,96%	3,94%	3,91%	3,90%	3,87%	3,83%
4. Budha	1,50%	1,45%	1,42%	1,40%	1,37%	1,34%
5. Hindu	0,28%	0,25%	0,24%	0,22%	0,22%	0,22%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pada tahun 2022, Kota Surabaya masih didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,99% sedangkan sisanya sebesar 14,17% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 82 jenis pekerjaan, yang paling banyak adalah penduduk dengan status Belum/tidak bekerja, sebesar 30,25 persen. Posisi kedua ditempati oleh Karyawan swasta yakni sebesar 26,47 persen, dan di posisi ketiga adalah Mengurus rumah tangga sebesar 17,68 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.8
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Belum / Tidak Bekerja	903.833	30,25015
2	Karyawan Swasta	791.078	26,47638
3	Mengurus Rumah Tangga	528.428	17,68582
4	Pelajar Mahasiswa	457.563	15,31406
5	Wiraswasta	156.561	5,23990
6	Pegawai Negeri Sipil	36.614	1,22542
7	Guru	23.045	0,77129
8	Pensiunan	17.335	0,58018
9	Tentara Nasional Indonesia	10.561	0,35346

No	Pekerjaan	Jumlah	%
10	Pedagang	7.240	0,24231
11	Dosen	6.353	0,21263
12	Dokter	6.313	0,21129
13	Karyawan BUMN	6.233	0,20861
14	Buruh Harian Lepas	5.312	0,17779
15	Kepolisian RI	4.302	0,14398
16	Petani Pekebun	3.082	0,10315
17	Perawat	2.878	0,09632
18	Perdagangan	2.723	0,09114
19	Karyawan Honorer	2.293	0,07674

No	Pekerjaan	Jumlah	%
20	Sopir	1.941	0,06496
21	Tukang Batu	1.411	0,04722
22	Nelayan Perikanan	1.079	0,03611
23	Bidan	931	0,03116
24	Karyawan BUMD	669	0,02239
25	Industri	508	0,01700
26	Pembantu Rumah Tangga	504	0,01687
27	Pendeta	497	0,01663
28	Tukang Jahit	492	0,01647
29	Apoteker	428	0,01432
30	Mekanik	399	0,01335
31	Pelaut	327	0,01094
32	Buruh Tani Perkebunan	304	0,01017
33	Transportasi	277	0,00927
34	Konstruksi	264	0,00884
35	Tukang Kayu	261	0,00874
36	Pengacara	242	0,00810
37	Wartawan	223	0,00746
38	Notaris	206	0,00689
39	Konsultan	180	0,00602
40	Biarawati	158	0,00529
41	Tukang Las Pandai Besi	154	0,00515
42	Seniman	147	0,00492
43	Arsitek	130	0,00435
44	Tukang Listrik	117	0,00392
45	Buruh Nelayan Perikanan	90	0,00301
46	Juru Masak	80	0,00268
47	Akuntan	79	0,00264
48	Penata Rias	75	0,00251
49	Ustadz Mubaligh	71	0,00238
50	Penata Rambut	63	0,00211

No	Pekerjaan	Jumlah	%
51	Psikiater Psikolog	58	0,00194
52	Tukang Sol Sepatu	57	0,00191
53	Peneliti	46	0,00154
54	Tukang Cukur	44	0,00147
55	Pastor	32	0,00107
56	Peternak	29	0,00097
57	Pilot	19	0,00064
58	Penata Busana	19	0,00064
59	Anggota DPRD Kabupaten Kota	17	0,00057
60	Perancang Busana	17	0,00057
61	Penterjemah	15	0,00050
62	Buruh Peternakan	15	0,00050
63	Penyiar Radio	15	0,00050
64	Imam Masjid	14	0,00047
65	Tabib	10	0,00033
66	Anggota DPRD Provinsi	9	0,00030
67	Penyiar Televisi	9	0,00030
68	Pialang	8	0,00027
69	Tukang Gigi	6	0,00020
70	Anggota DPR RI	6	0,00020
71	Paraji	4	0,00013
72	Perangkat Desa	4	0,00013
73	Anggota Kabinet Kementerian	3	0,00010
74	Paranormal	2	0,00007
75	Promotor Acara	2	0,00007
76	Gubernur	2	0,00007
77	Walikota	2	0,00007
78	Wakil Walikota	2	0,00007
79	Kepala Desa	2	0,00007
80	Bupati	1	0,00003
81	Lainnya	3.340	0,11179

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada tabel di bawah ini. Penduduk Kota Surabaya paling banyak (27,55 persen), merupakan lulusan SMA-sederajat. Posisi kedua adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 26,50 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD-sederajat sebanyak 14,07 persen.

Tabel II.9
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
Tidak/Belum Sekolah	826.282	27,65
Belum Tamat SD/setara	216.222	7,24
Tamat SD/setara	410.743	13,75
SMP/setara	350.871	11,74
SMA/setara	813.443	27,22
D1/D2	16.901	0,57
D3/Sarjana Muda	40.381	1,35
D4/S1	290.887	9,74
S2	20.615	0,69
S3	1.518	0,05
Total	**2.987.863**	**100,00**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.15. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2022, terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali pada kategori pertambangan dan penggalian. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tinggi hingga 2 digit pada masa akhir pandemi ini di antaranya kategori transportasi dan pergudangan; serta kategori jasa lainnya.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertambangan dan penggalian; kategori jasa pendidikan; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta kategori jasa keuangan dan asuransi. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori

pertambangan dan penggalian. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun ini dikarenakan semakin terbatasnya lahan pertambangan dan penggalian yang ada di Surabaya.

Tabel II.10
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – 2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,44	-0,90	-4,90	1,11	3,46
B	Pertambangan dan Penggalian	1,06	0,09	-6,34	0,08	-1,98
C	Industri Pengolahan	4,93	5,43	-1,15	3,90	6,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,07	0,41	-6,25	6,10	8,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,32	3,92	4,02	5,63	2,13
F	Konstruksi	6,28	5,45	-5,39	4,38	6,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,36	5,89	-8,57	7,37	6,95
H	Transportasi dan Pergudangan	7,56	7,62	-4,98	2,05	14,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,80	7,67	-10,87	2,08	8,48
J	Informasi dan Komunikasi	6,83	7,49	7,19	6,00	3,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,84	3,49	0,23	0,49	1,68
L	Real Estate	5,78	6,09	2,00	1,63	4,07
M,N	Jasa Perusahaan	7,12	6,84	-7,11	1,97	5,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,17	3,64	-2,33	-0,12	0,16
P	Jasa Pendidikan	6,24	6,66	2,75	0,59	0,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,81	7,64	8,75	5,17	1,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,18	5,94	-16,30	2,76	13,26
PDRB		**6,20**	**6,10**	**-4,85**	**4,29**	**6,51**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2023. *) data sementara*

Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -4,85 persen. Namun seiring dengan melandainya jumlah kasus penularan yang terjadi di Surabaya Raya, dan didukung oleh kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kembalinya perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, hal tersebut dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di normal yang baru dengan inovasi berupa pemanfaatan teknologi informasi, di antaranya *online marketplace* seperti ePeken.

Secara keseluruhan laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya bergerak positif sehingga pada tahun 2022 tercapai pada angka 6,51. Kendati demikian, belum seluruh sektor kembali pulih pada kondisi sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 utamanya pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu, dalam pelaksananaan anggaran tahun 2023 tetap difokuskan pada pemulihan ekonomi utamanya sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data rilis BPS, perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dan terlepas dari kontraksi sebagaimana terjadi di tahun 2020 yang lalu. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.11
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2018 – 2022 (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi	2018	2019	2020	2021	2022*
Surabaya	6,19	6,10	-4,85	4,29	6,51
Jawa Timur	5,47	5,53	-2,33	3,57	5,34
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,31

*Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2023. *) data sementara*

2.1.2.1.1.1 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010, mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tabels* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2022, sebesar Rp655.616.221,58 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020, sebesar Rp554.509.457,38 juta. Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut, pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang bervariasi namun masih lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja sektor tertinggi yang

berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2022 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp184.610.467,40 juta atau sebesar 28,16%. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp126.030.898,75 juta atau sebesar 19,22% sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel II.12.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp390.936.424,98 juta meningkat menjadi sebesar Rp434.268.341,12 juta di tahun 2022. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2022 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp122.122.627,45 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp84.567.579,11 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp62.076.385,35 juta seperti dapat dilihat pada Tabel II.13 berikut.

Tabel II.12
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – 2022 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022*	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	913.363,56	0,17	928.398,16	0,16	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16	982.815,39	0,15
B	Pertambangan dan Penggalian	32.568,38	0,01	33.531,33	0,01	31.943,8	0,01	32.761,34	0,01	33.392,98	0,01
C	Industri Pengolahan	101.196.564,52	18,78	109.245.937,20	18,81	107.416.294,34	19,37	113.544.581,14	19,24	126.030.898,75	19,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.311.134,20	0,43	2.362.300,29	0,41	2.237.615,57	0,40	2.417.167,25	0,41	2.742.046,30	0,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	771.856,00	0,14	791.147,83	0,14	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15	932.750,33	0,14
F	Konstruksi	52.920.129,31	9,82	54.649.310,30	9,41	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36	61.408.502,94	9,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.167.327,31	27,68	161.141.233,33	27,75	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70	184.610.467,40	28,16
H	Transportasi dan Pergudangan	28.811.194,17	5,35	31.240.415,60	5,38	29.794.090,41	5,37	30.520.260,56	5,17	36.260.418,47	5,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.056.324,46	16,15	95.537.038,24	16,45	85.618.582,64	15,44	91.418.079,71	15,49	102.248.698,97	15,60
J	Informasi dan Komunikasi	28.390.748,22	5,27	30.770.585,80	5,30	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98	36.541.720,23	5,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.140.646,05	5,22	29.413.339,89	5,06	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18	33.950.422,52	5,18
L	Real Estate	13.775.255,11	2,56	14.947.568,30	2,57	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68	16.599.139,83	2,53
M,N	Jasa Perusahaan	13.571.273,11	2,52	14.930.184,77	2,57	14.116.912,06	2,55	14.543.157,97	2,46	15.772.593,51	2,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.345.115,74	1,36	8.154.990,77	1,40	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41	8.486.026,22	1,29
P	Jasa Pendidikan	12.897.475,91	2,39	14.007.607,77	2,41	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49	14.866.084,13	2,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.053.612,67	0,75	4.443.228,45	0,77	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88	5.508.115,81	0,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.599.869,06	1,41	8.159.192,66	1,40	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24	8.642.127,81	1,32
Produk Domestik Regional Bruto		**538.954.457,78**	**100**	**580.756.010,69**	**100**	**554.509.457,38**	**100**	**590.227.966,81**	**100**	**655.616.221,58**	**100**

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2023

*Catatan: *) data sementara*

Tabel II.13
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – 2022 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022*	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	581.426,57	0,15	576.221,53	0,14	547.994,9	0,14	554.054,70	0,14	573.236,82	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	20.762,58	0,01	20.782,09	0,01	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00	19.094,55	0,01
C	Industri Pengolahan	73.328.747,38	18,93	77.312.368,81	18,81	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47	84.567.579,11	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.540.006,38	0,40	1.546.272,08	0,38	1.449.668,99	0,37	1.538.145,90	0,38	1.661.665,76	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	583.121,24	0,15	605.979,60	0,15	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16	680.003,79	0,16
F	Konstruksi	38.480.421,60	9,93	40.576.452,62	9,87	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83	42.633.575,68	9,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109.870.324,37	28,37	116.343.590,22	28,31	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00	122.122.627,45	28,12
H	Transportasi dan Pergudangan	19.046.861,58	4,92	20.497.977,43	4,99	19.477.422,82	4,98	19.875.912,40	4,87	22.684.941,35	5,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.419.739,39	15,08	62.898.688,76	15,30	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03	62.076.385,35	14,29
J	Informasi dan Komunikasi	25.613.455,86	6,61	27.531.903,71	6,70	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67	32.264.418,48	7,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.541.116,14	4,79	19.187.832,54	4,67	19.231.210,98	4,92	19.324.709,70	4,74	19.648.801,34	4,52
L	Real Estate	10.165.858,67	2,62	10.784.959,46	2,62	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74	11.634.820,68	2,68
M,N	Jasa Perusahaan	8.867.969,79	2,29	9.474.538,92	2,31	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	2,20	9.490.093,03	2,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.697.025,94	1,21	4.867.861,44	1,18	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16	4.756.347,15	1,10
P	Jasa Pendidikan	9.064.164,83	2,34	9.668.100,19	2,35	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45	10.001.195,71	2,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.023.591,50	0,78	3.254.593,89	0,79	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91	3.782.452,79	0,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.495.449,09	1,42	5.821.770,58	1,42	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23	5.671.102,07	1,31
Produk Domestik Regional Bruto		**387.340.042,93**	**100**	**410.969.893,87**	**100**	**390.936.424,98**	**100**	**407.726.799,20**	**100**	**434.268.341,12**	**100**

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2023

*Catatan: *) data sementara*

Tabel II.14
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022*	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,15	0,16	0,14	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
C	Industri Pengolahan	18,78	18,93	18,81	18,81	19,37	19,54	19,24	19,47	19,22	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,43	0,40	0,41	0,38	0,40	0,37	0,41	0,38	0,42	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16	0,14	0,16
F	Konstruksi	9,82	9,93	9,41	9,87	9,37	9,82	9,36	9,83	9,37	9,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,68	28,37	27,75	28,31	26,92	27,20	27,70	28,00	28,16	28,12
H	Transportasi dan Pergudangan	5,35	4,92	5,38	4,99	5,37	4,98	5,17	4,87	5,53	5,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,15	15,08	16,45	15,30	15,44	14,34	15,49	14,03	15,60	14,29
J	Informasi dan Komunikasi	5,27	6,61	5,30	6,70	6,00	7,55	5,98	7,67	5,57	7,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,22	4,79	5,06	4,67	5,26	4,92	5,18	4,74	5,18	4,52
L	Real Estate	2,56	2,62	2,57	2,62	2,77	2,81	2,68	2,74	2,53	2,68
M,N	Jasa Perusahaan	2,52	2,29	2,57	2,31	2,55	2,25	2,46	2,20	2,41	2,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,36	1,21	1,40	1,18	1,49	1,22	1,41	1,16	1,29	1,10
P	Jasa Pendidikan	2,39	2,34	2,41	2,35	2,62	2,54	2,49	2,45	2,27	2,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,78	0,77	0,79	0,88	0,91	0,88	0,91	0,84	0,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,41	1,42	1,40	1,42	1,25	1,25	1,24	1,23	1,32	1,31
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2023. *) data sementara*

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Di samping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2018-2022 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 26-28 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut menjadikan kategori industri pengolahan sebagai kategori lapangan usaha paling dominan kedua dengan nilai kontribusi 18-19 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 15-16 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.1.2 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat

kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2018 – 2022.

Tabel II.15
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022*
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Milyar Rp)	538.845,46	580.488,53	554.509,46	590.227,97	655.616,22
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	186,74	200,43	193,01	204,92	227,08
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Milyar Rp)	387.303,94	410.879,31	390.936,42	407.726,80	434.268,34
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	134,22	141,87	136,07	141,56	150,41
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu orang)	2.886	2.897	2.873	2.880	2.887

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2023. *) data sementara*

Pada tabel di atas, PDRB per kapita Kota Surabaya, dapat dilihat bahwa ADHB dan ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, meski mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini karena dampak adanya pandemi Covid-19. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.2 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2022, sampai dengan bulan Desember, tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 6,59%. Angka tersebut jauh meningkat bila dibandingkan dengan

inflasi di tahun 2021 sebesar 2,71 persen, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

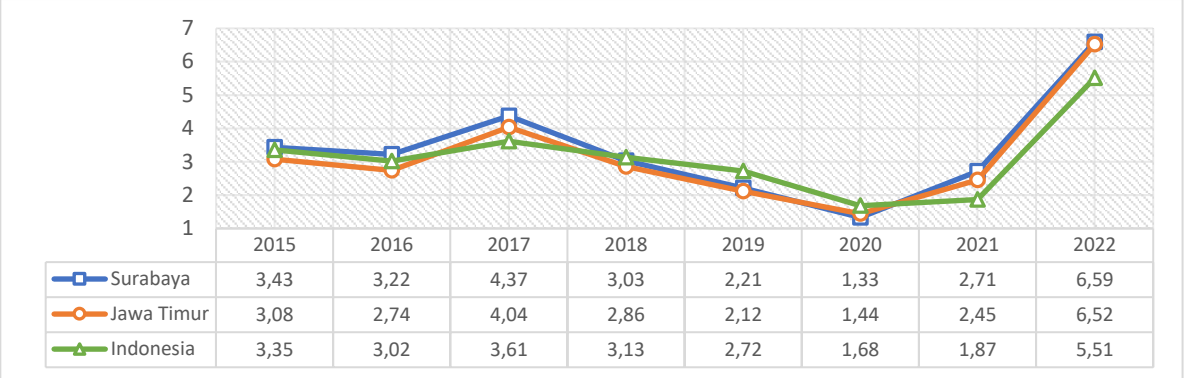

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Surabaya	3,43	3,22	4,37	3,03	2,21	1,33	2,71	6,59
Jawa Timur	3,08	2,74	4,04	2,86	2,12	1,44	2,45	6,52
Indonesia	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Gambar II.10
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2018 – 2022
Sumber: BPS Kota Surabaya, diolah, 2022

Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum dalam grafik di atas. Meski rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional, namun pada periode tertentu nilai inflasi tersebut bisa tinggi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga tetap perlu dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Surabaya.

Peningkatan inflasi tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa peningkatan inflasi global akibat meningkatnya harga komoditas global yang selanjutnya kemudian berdampak terhadap harga-harga produk dalam negeri. Di samping itu, meningkatnya inflasi juga merefleksikan meningkatnya harga akibat meningkatnya permintaan. Berdasarkan kelompok jenis barang dan jasa pembentuk inflasi, pada tahun 2022, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Transportasi, serta Penyediaan Makan dan Minuman/restoran. Salah satu faktor utamanya adalah peningkatan harga bahan bakar (BBM) baik BBM subsidi serta BBM non subsidi secara bertahap selama beberapa periode di tahun 2022 sebagai dampak penyesuaian harga minyak dunia yang mengalami kenaikan akibat konflik yang mengarah pada krisis pangan dan energi. Kenaikan BBM juga menimbulkan dampak rambatan yang menyebabkan meningkatnya tarif angkut logistik yang turut mendorong peningkatan inflasi pada subkelompok lain, khususnya kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran.

Dalam rangka pengendalian inflasi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, serta tetap menjaga komunikasi yang efektif bersama TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).

2.1.2.1.3 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. bayBerdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional, versi Bulan September yang dirilis BPS, indeks gini Kota Surabaya memiliki angka yang sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan keduanya. Meski demikian, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menurunkan angka rasio gini, dengan strategi yang berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

Tabel II.16
Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Indeks Gini	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Surabaya	0,358	0,406	0,344	0,351	0,388
Jawa Timur	0,379	0,369	0,366	0,364	0,371
Nasional	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

2.1.2.1.4 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2018 sebesar Rp530.178 dan meningkat menjadi Rp567.474 pada tahun 2019. Jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2018 sebanyak 140.810 jiwa menjadi 130.550 jiwa pada tahun 2019. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp567.474 menjadi Rp592.137, seiring dengan jumlah penduduk miskin yang juga bertambah dari tahun 2019 sebanyak 130.550 menjadi 145.670 jiwa, sehingga angka kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2020 naik menjadi 5,02 persen. Sedangkan pada tahun 2021, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp611.466 dan angka kemiskinan juga meningkat menjadi 5,23 persen. Namun yang terjadi di tahun 2022, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp652.540, tetapi angka kemiskinan turun menjadi 4,72 persen. Kondisi tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 dan 2021 masih berlangsung pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan daya serap tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2022 (berdasarkan rilis Maret 2023 BPS) angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 4,72 sebagai dampak dari intervensi-intervensi kemiskinan yang dilakukan secara masif oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selengkapnya angka dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.17
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	Lingkup	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kemiskinan (persen)	Surabaya	4,88	4,51	5,02	5,23	4,72
	Jawa Timur	10,98	10,37	11,09	11,40	10,38
	Nasional	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)	Surabaya	530.178	567.474	592.137	611.466	652.540
	Jawa Timur	373.574	397.687	416.001	429.133	460.909
	Nasional	401.220	425.250	454.652	472.525	505.469
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Surabaya	140,81	130,55	145,67	152,489	138,21
	Jawa Timur	4.332,59	4.112,25	4.419,10	4.572,73	4.181,29
	Nasional	25.949,80	25.144.72	26.424,02	27.542,77	26.161,16

Sumber: BPS, Maret 2023

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat 0% (nol persen) pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu rumah tangga yang mendapatkan penghasilan sebesar 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity)* per hari. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 69.330 jiwa (2,39%), terus menurun di tahun 2021, sebanyak 35.020 jiwa (1,20%), hingga tahun 2022, sebanyak 23.530 jiwa (0,80%). Kota Surabaya sedang berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, di antaranya dengan menetapkan data kemiskinan ekstrem melalui SK Walikota No. 188.45/556/436.1.2/2022 tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Kota Surabaya Tahun 2022, yakni sejumlah 23.530 jiwa pada 5.310 KK. Salah satu bentuk intervensi bagi mereka adalah dengan mendorong pembukaan lapangan kerja padat karya untuk peningkatan kemandirian ekonomi.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2022. IPM Kota Surabaya meningkat dari 81,74 pada tahun 2018 menjadi 82,74 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya rata-rata tumbuh sebesar 0,3% per tahun. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan

tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi, dan merupakan angka tertinggi level Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama 5 tahun terakhir, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.18
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IPM Kota Surabaya	81,74	82,22	82,23	82,31	82,74
IPM Provinsi Jawa Timur	70,77	71,5	71,71	72,14	72,75
IPM Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022

2.1.2.2.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan hidup sehat dapat diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.19
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Angka Harapan Hidup (AHH)	2018	2019	2020	2021	2022
AHH Kota Surabaya (tahun)	73,98	74,13	74,18	74,18	74,47
AHH Provinsi Jawa Timur (tahun)	70,97	71,18	71,30	71,38	71,74
AHH Nasional (tahun)	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

AHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 73,98 tahun dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 74,13 tahun, serta meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 74,18 tahun. Kemudian di tahun 2021, meski kondisi pandemi, AHH penduduk Kota Surabaya dapat dipertahankan di 74,18 tahun. Sedangkan pada tahun 2022 AHH penduduk Kota Surabaya sebesar 74,47 tahun. Perkembangan yang positif ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warganya melalui UHC (*universal health coverage*), yang didukung oleh para pemangku kepentingan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, seperti rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan milik swasta lainnya.

2.1.2.2.1.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur melalui RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah). Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.20
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2018	2019	2020	2021	2022
RLS Kota Surabaya (tahun)	10,46	10,47	10,49	10,50	10,51
RLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	7,39	7,59	7,78	7,88	8,03
RLS Nasional (tahun)	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.21
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

Harapan Lama Sekolah (HLS)	2018	2019	2020	2021	2022
HLS Kota Surabaya (tahun)	14,78	14,79	14,80	14,81	14,83
HLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	13,10	13,16	13,19	13,36	13,37
HLS Nasional (tahun)	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya di tahun 2022 berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA, yakni melebihi tingkat Diploma-3 (D3) namun masih belum mencapai Diploma-4 (D4) atau Strata-1 (S1). Adapun penyebab utama yang secara signifikan dapat mempengaruhi HLS dan RLS antara lain karena faktor tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan tempat tinggal yang jauh dari lokasi satuan pendidikan. Penyebab anak tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi di antaranya karena menikah/mengurus rumah tangga, merasa pendidikan cukup dan telah bekerja. Untuk faktor tempat tinggal yang jauh dari lokasi

satuan pendidikan, dialami oleh kebanyakan anak pada usia 16 tahun ke atas atau usia belajar setingkat SMA/SMK sesuai dengan data rata-rata lama sekolah siswa di Surabaya yang pendidikannya terhenti saat usia 16-17 tahun. Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menambah jumlah satuan pendidikan setingkat SMA/SMK.

Meski mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah masih belum dapat memenuhi harapan lama sekolah. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pelaksanaan pemberian beasiswa bagi pelajar SMA/SMK, bahkan hingga Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan indeks pendidikan warga Kota Surabaya. Langkah yang paling efektif adalah dengan memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah, sehingga nilai Harapan Lama Sekolah akan naik serta memperhatikan penduduk produktif usia 25 tahun ke atas yang tidak/putus sekolah agar bisa kembali sekolah dan memiliki ijazah sebagai suatu langkah menaikan nilai Rata rata Lama Sekolah.

2.1.2.2.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak didapat melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat di kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.22
Pengeluaran per Kapita disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Pengeluaran Per Kapita	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Surabaya (Rp .000)	17.157	17.854	17.755	17.826	18.345
Provinsi Jawa Timur (Rp .000)	11.380	11.739	11.601	11.707	11.992
Nasional (Rp .000)	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022

Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Surabaya mencapai 18,345 juta rupiah per tahun. Tentu angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional, karena tingginya kebutuhan hidup di kota besar yang selaras dengan perkembangan kemajuan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya.

2.1.2.2.2 Indeks Harmoni Sosial

Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks ini menekankan pada keselarasan perpaduan antara keyakinan dan

tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial yang ditandai dengan adanya solidaritas dalam masyarakat yang beragam tersebut. Indeks Budaya Lokal disusun oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indeks komposit yang tersusun atas 4 komponen, yakni: (1) persentase masyarakat yang pemahaman lingkungan hidupnya meningkat, (2) jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan, (3) peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan (4) persentase rumah sehat. Kemudian, Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan dengan hasil survei terhadap partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan.

Nilai Indeks Budaya Lokal dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dapat menggambarkan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan Indeks Kepedulian Sosial dapat menggambarkan tingkat kepedulian antar masyarakat dalam lingkup sosial sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dianggap penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terutama pada zaman modernisasi sekarang, di mana dengan berkembangnya teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, beserta lingkungan hidup yang mendukung aktivitas masyarakat.

Tabel II.23
Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Harmoni Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	80,08
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	N/A	N/A	N/A	N/A	48,01
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	97,67
1.c	Indeks Budaya Lokal	78,39	82,42	88,56	89,67	89,97

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Pencapaian Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2022 sebesar 80,08% tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan ragam dan frekuensi event budaya lokal, kepedulian lingkungan, serta penguatan karakter kebangsaan dan kerukunan antar masyarakat di Kota Surabaya. Keberhasilan tersebut di antaranya merupakan hasil dari rutinnya pelaksanaan event, festival serta parade dengan tema seni dan budaya serta sejarah yang diadakan di Kota Surabaya, seperti Parade Juang, Festival Rujak Uleg, Perobekan Bendera, Heroic Track, Sekolah Kebangsaan, Surabaya Vaganza, Cak dan Ning, Parade Budaya serta Sedekah Bumi. Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh upaya edukasi lingkungan kepada masyarakat, baik pelajar maupun pelaku usaha mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di antaranya pembinaan bank sampah di 470 lokasi dan 40 kampung *zero waste*, serta diadakannya perlombaan lingkungan seperti Surabaya *Smart City*, ECO school, ECO campus dan ECO pesantren. Kemudian, pencapaian Indeks Harmoni Sosial tersebut juga terwujud melalui upaya pemantapan karakter kebangsaan dan ideologi pancasila, serta penguatan kerukunan antar masyarakat melalui forum kerukunan umat beragama, mediasi konflik umat beragama, serta sosialisasi anti narkotika dan koordinasi operasi gabungan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Seiring dengan upaya dalam mengurangi potensi konflik, Pemerintah Kota Surabaya juga senantiasa berupaya penuh dalam meningkatkan nilai kesalehan sosial dalam bermasyarakat. Salah satu langkah strategis dalam meraih hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kepedulian sosial di masyarakat yang diukur dalam Indeks Kepedulian Sosial. Indeks Kepedulian Sosial merupakan suatu sinergi yang menggabungkan antara nilai sosial kemanusiaan, ketuhanan, budi pekerti serta kepatuhan terhadap peraturan negara.

2.1.2.2.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi kasar.

Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sudah sebesar 100 persen sejak tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 2.157.098 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 2.458.655, pada tahun 2020 sebanyak 2.460.443 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 2.295.394 jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 2.300.947 jiwa dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.24
Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bisa Membaca dan Menulis	2.157.098	2.458.655	2.460.443	2.295.394	2.300.947
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	2.157.098	2.458.655	2.460.443	2.295.394	2.300.947
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Dari data pada tabel di atas, penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. APM jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 97,24 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,17 persen. APM jenjang SD/MI pada tahun 2019 sebesar 98,88 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 84,58 persen. Pada tahun 2020, APM jenjang SD/MI sebesar 98,46 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,58 persen. Sedangkan pada tahun 2021 APM jenjang SD/MI sebesar 100,82 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,34 persen. Kemudian pada tahun 2022 APM jenjang SD/MI sebesar 91,37 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 80,77 persen. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.25
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	APM SD/MI (persen)	97,24	98,88	98,46	100,82	91,37
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	274.104	291.907	295.357	299.814	269.289
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	286.373	303.021	299.966	297.369	294.723
2	APM SMP/MTs (persen)	87,17	84,58	87,58	87,34	80,77
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	118.636	123.398	126.874	129.763	119.705
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.554	146.952	144.872	148.573	148.205

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.26
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio APM SD/MI (persen)	101,73	94,34	92,73	99,80	94,04
2.	Rasio APM SMP/MTs (persen)	105,49	100,04	90,59	103,13	94,00

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.27
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	APK PAUD (persen)	66,36	68,07	69,36	69,59	57,05
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang PAUD	119.047	125.941	124.883	123.269	102.666
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	179.389	185.012	180.053	177.135	179.967
2.	APK SD/MI (persen)	103,79	105,86	104,30	106,90	106,37
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang SD/MI	287.830	310.982	312.873	317.885	313.505
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	286.373	303.021	299.966	297.369	294.723
3.	APK SMP/MTs (persen)	94,39	86,49	98,93	110,64	108,47
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang SMP/MTs	129.136	135.629	143.329	164.376	160.764
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.554	146.952	144.872	148.573	148.205

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Pada tahun 2022, terdapat 1.973 lembaga PAUD yang tidak aktif izin operasionalnya karena sudah tidak ada proses belajar mengajar dan/atau masalah internal yayasan. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pembinaan kepada lembaga PAUD untuk meningkatkan ketertiban lembaga PAUD sehingga kegiatan belajar mengajar PAUD dapat terlaksana dengan optimal.

2.1.2.2.4 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan status gizi masyarakat. Utamanya pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2018 sebesar 0,14 persen, pada tahun 2019 menurun menjadi 0,12 dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 0,11 persen, serta pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 0,10 persen. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2022, persentasenya sebesar 0,10 persen. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel II.28
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	254	224	196	148	123
2	Jumlah balita yang ditimbang	181.842	183.286	178.043	148.720	126.113
3	Persentase (persen)	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Tabel II.29
Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	15.274	15.060	14.813	6.348	850
2	Jumlah balita yang ditimbang	181.842	180.328	178.043	148.720	126.113
3	Persentase (persen)	8,39	8,35	8,32	4,27	0,67

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Tabel II.30
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2018 – 2022

No	Kecamatan	2018			2019			2020			2021			2022		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	4	3.369	0,12%	3	3.228	0,09%	3	2.875	0,10%	12	3.257	0,37%	4	3.504	0,11%
2	Kec. Benowo	4	4.559	0,09%	4	4.392	0,09%	1	4.577	0,02%	1	3.475	0,03%	3	3.017	0,10%
3	Kec. Bubutan	3	5.989	0,05%	1	5.793	0,02%	3	5.567	0,05%	4	5.008	0,08%	5	4.212	0,12%
4	Kec. Bulak	4	2.839	0,14%	5	2.802	0,18%	2	2.774	0,07%	6	2.645	0,23%	4	2.458	0,16%
5	Kec. Dukuh Pakis	4	3.293	0,12%	3	3.148	0,10%	1	3.084	0,03%	6	2.167	0,28%	5	1.771	0,28%
6	Kec. Gayungan	2	2.338	0,09%	4	2.249	0,18%	1	2.210	0,05%	1	1.828	0,05%	3	1.501	0,20%
7	Kec. Genteng	11	3.257	0,34%	11	3.265	0,34%	7	3.211	0,22%	5	3.181	0,16%	1	2.850	0,04%
8	Kec. Gubeng	0	7.268	0,00%	0	7.592	0,00%	2	6.878	0,03%	1	6.056	0,02%	2	3.506	0,06%
9	Kec. Gunung Anyar	2	3.483	0,06%	0	4.087	0,00%	2	3.895	0,05%	0	3.383	0,00%	2	1.305	0,15%
10	Kec. Jambangan	3	3.587	0,08%	0	3.529	0,00%	2	3.479	0,06%	0	3.280	0,00%	0	1.838	0,00%
11	Kec. Karang Pilang	2	4.347	0,05%	5	4.372	0,11%	5	4.390	0,11%	0	4.552	0,00%	3	1.982	0,15%
12	Kec. Kenjeran	15	11.822	0,13%	15	14.034	0,11%	12	13.647	0,09%	8	10.635	0,08%	10	9.711	0,10%
13	Kec. Krembangan	2	7.987	0,03%	2	7.832	0,03%	4	7.480	0,05%	3	6.197	0,05%	11	6.068	0,18%
14	Kec. Lakarsantri	9	3.670	0,25%	4	4.158	0,10%	4	4.209	0,10%	5	2.857	0,18%	3	2.952	0,10%
15	Kec. Mulyorejo	4	5.589	0,07%	0	5.616	0,00%	4	5.513	0,07%	3	2.368	0,13%	1	2.158	0,05%
16	Kec. Pabean Cantian	5	4.357	0,11%	2	4.249	0,05%	1	4.195	0,02%	1	3.478	0,03%	2	3.980	0,05%
17	Kec. Pakal	16	4.394	0,36%	36	4.093	0,88%	20	3.895	0,51%	8	3.841	0,21%	2	3.793	0,05%

No	Kecamatan	2018			2019			2020			2021			2022		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
18	Kec. Rungkut	8	7.304	0,11%	8	7.163	0,11%	5	7.154	0,07%	2	5.186	0,04%	6	3.056	0,20%
19	Kec. Sambikerep	5	4.229	0,12%	5	3.400	0,15%	2	4.350	0,05%	4	3.317	0,12%	2	2.960	0,07%
20	Kec. Sawahan	14	12.380	0,11%	15	12.064	0,12%	21	11.869	0,18%	10	10.349	0,10%	3	10.046	0,03%
21	Kec. Semampir	24	11.740	0,20%	21	11.680	0,18%	10	11.719	0,09%	11	9.578	0,11%	12	8.537	0,14%
22	Kec. Simokerto	9	5.694	0,16%	8	3.626	0,22%	3	3.754	0,08%	7	4.887	0,14%	4	4.102	0,10%
23	Kec. Sukolilo	2	6.540	0,03%	3	6.845	0,04%	7	6.760	0,10%	1	4.759	0,02%	5	2.879	0,17%
24	Kec. Sukomanunggal	60	6.657	0,90%	59	6.405	0,92%	43	6.387	0,67%	22	5.558	0,40%	1	5.156	0,02%
25	Kec. Tambaksari	18	12.229	0,15%	6	11.963	0,05%	9	12.227	0,07%	6	10.767	0,06%	9	8.616	0,10%
26	Kec. Tandes	4	6.108	0,07%	4	6.263	0,06%	5	6.125	0,08%	2	5.864	0,03%	2	4.066	0,05%
27	Kec. Tegalsari	7	5.884	0,12%	7	5.646	0,12%	7	5.594	0,13%	12	3.960	0,30%	3	3.906	0,08%
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	0	3.022	0,00%	0	3.058	0,00%	1	2.947	0,03%	0	2.714	0,00%	0	2.376	0,00%
29	Kec. Wiyung	3	4.318	0,07%	3	4.316	0,07%	1	4.324	0,02%	3	2.395	0,13%	6	3.132	0,19%
30	Kec. Wonocolo	5	4.859	0,10%	4	4.925	0,08%	3	4.959	0,06%	2	4.261	0,05%	1	4.262	0,02%
31	Kec. Wonokromo	5	8.730	0,06%	4	8.535	0,05%	5	7.995	0,06%	2	6.917	0,03%	8	6.413	0,12%
Total		**254**	**181.842**	**0,14%**	**242**	**180.328**	**0,13%**	**196**	**178.043**	**0,11%**	**148**	**148.720**	**0,10%**	**123**	**126.113**	**0,10%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2023

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel II.31
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	31	25	24	17	16
2	Kelahiran Hidup	42.474	42.145	41.814	40.158	40.012
3	AKI per 100.000 KH	72,99	59,32	57,40	42,33	39,99

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup terus berkurang dari tahun 2018 sebesar 79,99 menjadi 39,99 pada tahun 2022. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 sebesar 5,04 terus berkurang menjadi 4,35 pada tahun 2022. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan bawaan.

Tabel II.32
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi lahir meninggal	214	211	208	199	174
2	Kelahiran Hidup	42.474	42.145	41.814	40.158	40.012
3	AKB per 1.000 KH	5,04	5,01	4,97	4,96	4,35

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

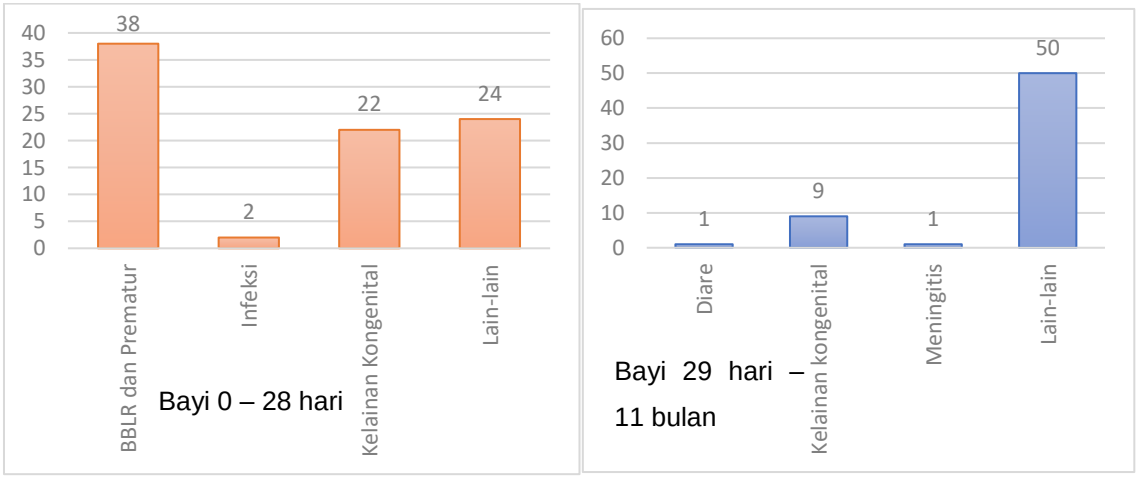

Gambar II.11
Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2021
Sumber: Dinas Kesehatan, 2023 diolah

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi di bawah target bahkan capaiannya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

Selain permasalahan di atas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah *stunting* (kerdil) di mana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi Balita *Stunting* menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2018 sebesar 8,92 persen menjadi hanya 4,52 persen pada tahun 2021, serta pada tahun 2022, tercatat sebesar 1,55 persen. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan dan penurunan *stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Program pencegahan dan penanganan balita stunting termasuk balita gizi buruk dan gizi kurang di Kota Surabaya berjalan dengan baik, didukung dengan adanya pemanfaatan Kader Surabaya Hebat dalam melaksanakan monitoring dan pendampingan setiap balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, juga didukung dengan adanya sistem Aplikasi Sayang Warga yang memudahkan pendataan dan monitoring secara *realtime* perkembangan balita dari waktu ke waktu. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mewujudkan *zero stunting* di Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

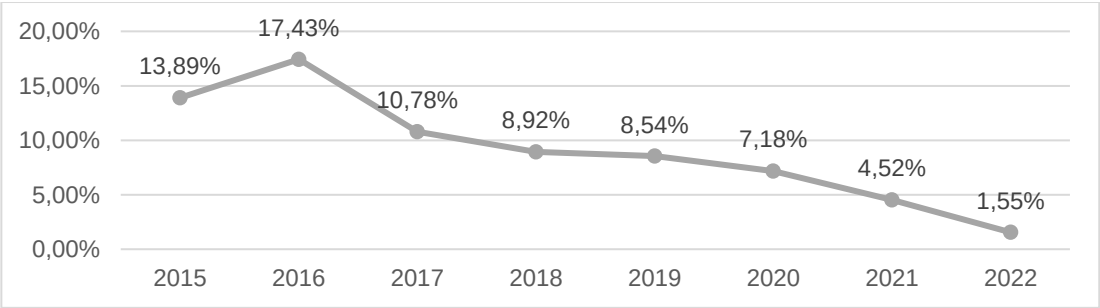

Gambar II.12 Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

2.1.2.2.5 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2021 mempunyai tren meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,68 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja yang utamanya banyak terjadi ketika pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Namun pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 7,62 persen, hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi pengangguran akibat terjadinya pandemi Covid-19 dengan melakukan penguatan sektor UMKM, pemulihan wisata, dan program padat karya. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 – 2022.

Tabel II.33
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	93.096	130.459	154.933	152.273	125.276
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.520.041	2.222.469	1.582.564	1.572.888	1.643.314
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,12	5,87	9,79	9,68	7,62

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2023

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.468.094 menjadi 2.222.469 di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 berdampak pada naiknya TPT Kota Surabaya sampai dengan 9,79 persen. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan

hubungan kerja merupakan akibat dari terdampaknya perekonomian Kota Surabaya, Indonesia dan global secara umum karena pembatasan sosial dalam skala besar. Meski kondisi pandemi masih berlanjut di tahun 2021, namun TPT Kota Surabaya dapat diturunkan menjadi 7,62 persen di akhir tahun 2022.

Tabel II.34
TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022

TPT	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Surabaya	6,12	5,87	9,79	9,68	7,62
Jawa Timur	3,91	3,82	5,84	5,74	5,49
Nasional	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber data: BPS, 2023 (Pengukuran Bulan Agustus 2022)

Dalam kurun 5 tahun terakhir angka TPT kota Surabaya cukup fluktuatif. Namun pada tahun 2020 angka TPT sangat tinggi. Angka TPT di Provinsi Jawa Timur dan Nasional juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak adanya pandemi Covid-19.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.35
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Grup Kesenian	611	731	771	743	806
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	42	42	42	42	45
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	5	5

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah

satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2018 sebanyak 611 grup kesenian, tahun 2019 meningkat menjadi 731 grup kesenian dan sampai dengan tahun 2022 jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tercatat menjadi 806 grup kesenian. Pembinaan seni dan budaya juga dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pelaksanaan penampilan/pertunjukan seni di ruang publik. Adapun even pertunjukan seni dan budaya yang diadakan di antaranya Festival Rujak Uleg, Parade Surabaya Juang, Sedekah Bumi, Festival Cipta Karya Tari, Surabaya Cross Culture, Surabaya Vaganza, Festival Layang-Layang, Pemilihan Duta Wisata Cak dan Ning Suroboyo serta fasilitasi tampilan seni di ruang-ruang publik lainnya.

Selain itu, dalam melestarikan budaya lokal, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menciptakan rasa memiliki disertai kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal ini diukur dalam indeks budaya lokal yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari hasil survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan bernilai kebangsaan. Adapun pencapaian indeks budaya lokal pada tahun 2018 hingga 2022, dapat dilihat pada gambar berikut.

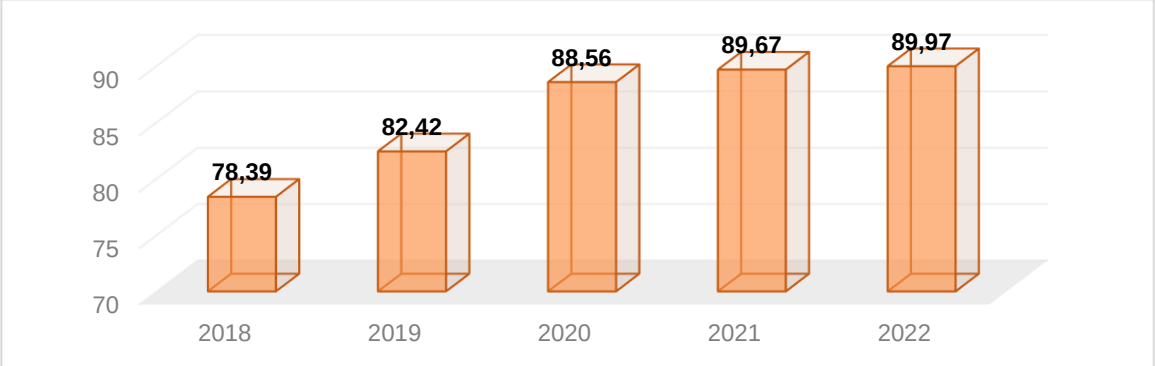

Gambar II.13 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2018–2022

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2022 realisasinya 89,97%. Angka realisasi tersebut terus meningkat dari realisasi tahun 2018 sebesar 78,39%. Peningkatan Indeks Budaya Lokal tersebut menunjukkan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang semakin membaik.

Jumlah cabang olahraga yang dibina sampai dengan tahun 2022 sebanyak 45 cabang olahraga. Pada tahun 2022 sejumlah 416 orang atlet dari 31 cabang

olahraga meraih prestasi di kejuaraan skala provinsi, nasional dan internasional. Dengan keterbatasan even kejuaraan pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19, capaian tersebut cukup memuaskan. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan tahun 2022, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 5 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo, dan gedung indoor *Surabaya Sport Center* (SSC), serta Gelora Pancasila. Selain itu, lapangan olahraga juga tersebar di permukiman penduduk maupun sekolah-sekolah, baik itu lapangan olahraga yang dibangun pemerintah kota maupun milik swasta. Sampai dengan tahun 2022 lapangan olahraga yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya berjumlah 603 lapangan terdiri dari lapangan berbagai macam cabang olahraga termasuk olahraga renang dan panjat tebing. Pembinaan atlet juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pemusatan latihan dan pelaksanaan even kejuaraan tingkat kota seperti Piala Walikota.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk Tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.36
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2022

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
URUSAN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA					**98,54 %**
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**				**97,15%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	89.861	89.861	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**17,15%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1. Buku Gambar	88.678	88.678	0	100%
	2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	88.678	88.678	0	100%
	3. Alat Mewarnai	88.678	88.678	0	100%
	4. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	2.398	1.768	630	73,73%
	5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7.694	4.224	3.470	54,90%
	6. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	-	-	-	85,5%
	7. Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-IV/S1	-	-	-	81,91%
2	**Pendidikan Dasar**				**99,83 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	443.946	443.946	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19,83%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian
	1. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1.031	1.021	10	99,03%
	2. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2.056	2.047	9	99,56%
	3. Buku Teks Pelajaran	293.968	293.968	0	100%
	4. Perlengkapan Belajar	293.968	293.968	0	100%
	5. jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	14.064	14.064	0	100%
	6. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	293.968	293.968	0	100%
	7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	18.659	18.220	439	97,65%
	8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	1.222	1.187	35	97,14%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	9. Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	-	-	-	62,63%
	10. Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-	-	-	45,32%
	11. Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	-	-	-	74,77%
	12. Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	-	-	-	74,77%
	13. Indeks Iklim Keamanan SD	-	-	-	72,99%
	14. Indeks Iklim Kebinekaan SD	-	-	-	71,87%
	15. Indeks Inklusivitas SD	-	-	-	57,26%
	16. Indeks Iklim Keamanan SMP	-	-	-	72,66%
	17. Indeks Iklim Kebinekaan SMP	-	-	-	69,91%
	18. Indeks Inklusivitas SMP	-	-	-	57,38%
3	**Pendidikan Kesetaraan**				**98,65%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	4.563	4.563	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18,65%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian
	1. Modul Belajar	2.792	2.792	0	100%
	2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2.792	2.792	0	100%
	3. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	478	416	62	87,03%
	4. jumlah rombongan belajar di PKBM	395	395	0	100%
	5. Perlengkapan Belajar	2.792	2.792	0	100%
	6. PKBM Terakreditasi minimal C	34	25	9	73,53%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	34	29	5	85,29%
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	34	34	0	100%
URUSAN KESEHATAN KOTA SURABAYA					**98,44%**
1	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	44.012	44.182	0	100,39%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	44.012	44.182	0	100,39%
	2. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	44.012	44.182	0	100,39%
	3. Vaksin Tetasus Difetri (Td)	44.012	45.699	0	103,83%
	4. Tablet Tambah Darah	44.012	44.182	0	100,39%
	5. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	44.012	44.182	0	100,39%
	6. Dokter/dokter spesialis kebidanan	5.252	5.252	0	100%
	7. Bidan	3.373	3.373	0	100%
	8. Perawat	13.478	13.478	0	100%
2	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	42.014	42.019	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	42.014	42.019	0	100,01%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	2. Formulir Partograf	42.014	42.019	0	100,01%
	3. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	42.014	42.019	0	100,01%
	4. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	5.252	5.252	0	100%
	5. Bidan	3.373	3.373	0	100%
	6. Perawat	13.478	13.478	0	100%
3	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	40.012	41.930	0	104,79%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	40.012	41.930	0	104,79%
	2. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	40.012	41.930	0	104,79%
	3. Vaksin Hepatitis B0	40.012	40.363	0	100,88%
	4. Salep/tetes mata antibiotik	40.012	41.930	0	104,79%
	5. Vitamin K1 injeksi	40.012	41.930	0	104,79%
	6. Formulir bayi baru lahir	40.012	41.930	0	104,79%
	7. Dokter/dokter spesialis Anak	5.245	5.245	0	100%
	8. Bidan	3.373	3.373	0	100%
	9. Perawat	13.478	13.478	0	100%
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**				**97,40%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**77,94%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	164.909	160.663	4.246	97,43%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19,46%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Peralatan Anafilaktik	63	63	0	100%
	2. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	164.909	160.663	4.246	97,43%
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	164.909	160.663	4.246	97,43%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	4. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	164.909	160.663	4.246	97,43%
	5. Vaksin Imunisasi Lanjutan:* DPT -HB -Hib * Campak Rubella	42.078	43.092	0	102,41%
	6. Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	41.901	41.692	209	99,50%
	7. Vitamin A Biru	41.901	34.937	6.964	83,38%
	8. Vitamin A Merah	164.909	138.691	26.218	84,10%
	9. Jarum Suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	83.979	84.784	0	100,96%
	10. Bidan	3.373	3.373	0	100%
	11. Dokter	5.167	5.167	0	100%
	12. Perawat	13.478	13.478	0	100%
	13. Ahli Gizi	533	533	0	100%
	14. Guru PAUD	11.943	11.943	0	100%
	15. Kader Kesehatan	27.489	27.489	0	100%
5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	331.551	415.739	0	125,39%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Kuesioner Skrining Kesehatan	331.551	415.739	0	125,39%
	2. Buku Pemantauan Kesehatan	65	65	0	100%
	3. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	756	756	0	100%
	4. Buku Raport Kesehatanku	331.551	415.739	0	125,39%
	5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	756	756	0	100%
	6. Dokter/Dokter gigi	7.007	7.007	0	100%
	7. Bidan	3.373	3.373	0	100%
	8. Perawat	13.478	13.478	0	100%
	9. Ahli Gizi	533	533	0	100%
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	63	63	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	11. Guru	25.764	25.764	0	100%
	12. Kader Kesehatan	27.489	27.489	0	100%
6	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	2.048.586	2.081.701	0	101,62%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	63	63	0	100%
	2. * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	2.048.586	2.081.701	0	101,62%
	3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	756	756	0	100%
	4. Perawat	13.478	13.478	0	100%
	5. Dokter	5.167	5.167	0	100%
	6. Bidan	3.373	3.373	0	100%
	7. Ahli Gizi	533	533	0	100%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	63	63	0	100%
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	27.489	27.489	0	100%
7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	303.328	312.280	0	102,95%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	303.328	312.280	0	102,95%
	2. Buku Kesehatan Lansia	63	63	0	100%
	3. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	303.328	312.280	0	102,95%
	4. Dokter	5.167	5.167	0	100%
	5. Bidan	3.373	3.373	0	100%
	6. Perawat	13.478	13.478	0	100%
	7. Ahli Gizi	533	533	0	100%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	63	63	0	100%
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	27.489	27.489	0	100%
8	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**				**96,17%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**76,17%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	740.719	705.270	35.449	95,21%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	63	63	0	100%
	2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	756	756	0	100%
	3. Tensimeter	126	126	0	100%
	4. Dokter	5.167	5.167	0	100%
	5. Bidan	3.373	3.373	0	100%
	6. Perawat	13.478	13.478	0	100%
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	63	63	0	100%
9	**Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	96.732	106.654	0	110,26%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)	756	756	0	100%
	2. * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	96.732	106.654	0	110.26%
	3. Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	63	63	0	100%
	4. Dokter	5.167	5.167	0	100%
	5. Bidan	3.373	3.373	0	100%
	6. Perawat	13.478	13.478	0	100%
	7. Ahli Gizi	533	533	0	100%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	63	63	0	100%
10	**Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat**				**88,04%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**68,04%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	7.320	6.226	1.094	85,05%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	63	63	0	100%
	2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	3	3	0	100%
	3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	756	756	0	100%
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	63	63	0	100%
	5. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	63	63	0	100%
11	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**				**99,68%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	60.804	77.685	0	127,76%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19,68%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	60.804	77.685	0	127,76%
	2. Catridge Tes Cepat Molekuler Reagen Zn TB	60.804	77.685	0	127,76%
	3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan	11.000	8.706	2.294	79,15%
	4. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	63	63	0	100%
	5. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	63	63	0	100%
	6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan	756	756	0	100%
	7. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	60.804	60.804	0	100%
	8. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	1.796	1.796	0	100%
	9. Penata Rontgen	618	618	0	100%
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	274.89	27.489	0	100%
	11. Tenaga kesehatan masyarakat	63	63	0	100%
	12. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	125	125	0	100%
	13. Perawat	13.478	13.478	0	100%
12	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	51.607	61.275	0	118,73%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	51.607	61.275	0	118,73%
	2. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	63	63	0	100%
	3. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	51.607	61.275	0	118,73%
	4. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	51.607	61.275	0	118,73%
	5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	55	55	0	100%
	6. Perawat	13.478	13.478	0	100%
	7. Bidan	3.373	3.373	0	100%
	8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	1.796	1.796	0	100%
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	63	63	0	100%
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	27.489	27.489	0	100%
URUSAN PEKERJAAN UMUM KOTA SURABAYA					**97,88%**
1	**Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari**				**98,49%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**79,88%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari	2.880.284	2.875.889	4.395	99,85%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18,61%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.555 orang	1.447 orang	108 orang	93,05%
	2. Jaringan Perpipaan				
	3. Jaringan bukan perpipaan				
	4. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbau)				
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**				**97,28%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**79,69%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.127.124	1.122.822	4.302	99,62%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**17,59%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	375	395	0	105,33%
	2. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	1.110.749	1.102.484	8.265	99,26%
	3. Kualitas pelayanan air limbah domestik	375	395	0	105,33%
	4. Sub-Sistem pengolahan setempat	375	395	0	105,33%
	5. Sub-Sistem pengangkutan	126	126	0	100%
	6. Sub-Sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	69.304	19.619	49.685	28,31%
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SURABAYA					**100%**
1	**Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	13	13	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	13	13	0	100%
	2. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	3. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	-	-	-	-
	4. bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-
2	**Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	26	26	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	-	-	-	-
	2. Subsidi Uang Sewa	-	-	-	-
	3. Penyediaan rumah layak huni	26	26	0	100%
URUSAN TRANTIBUM KOTA SURABAYA					**100%**
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	1.340	1.340	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	-	-	-	-
	2. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	-	-	-	-
	3. Standar operasional prosedur Satpol PP	37	37	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	180	180	0	100%
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	2176	2176	0	100%
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1340	1340	0	100%
2	**Pelayanan Informasi Rawan bencana**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	34.430	34.430	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana	1	1	0	100%
	2. identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan rawan bencana	0	0	0	100%
	3. melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	500	500	0	100%
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	100%
	5. identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	33.929	33.929	0	100%
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	10	10	0	100%
	2. peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM)	100	100	0	100%
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	309	309	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	309	309	0	100%
	2. pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	309	309	0	100%
	3. melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	100	100	0	100%
	4. respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/ wabah zoonosis prioritas	-	-	-	-
	5. pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	309	309	0	100%
5	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**				**99,03%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	613	613	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19,03%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1 .Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	613	613	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	21	21	0	100%
	3 .Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	24	21	3	88%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	810	754	56	93%
URUSAN SOSIAL KOTA SURABAYA					**100%**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	821	821	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	13	13	0	100%
	2. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	107	107	0	100%
	3. Akses ke Layanan Pendidikan	106	106	0	100%
	4. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	13	13	0	100%
	5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13	13	0	100%
	6. Layanan Rujukan	6	6	0	100%
	7. Layanan Data dan Pengaduan	11	11	0	100%
	8. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	4	4	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	9. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100%
	10. Penyediaan Permakanan	106	106	0	100%
	11. Penyediaan Sandang	59	59	0	100%
	12. Penyediaan Alat bantu	8	8	0	100%
	13. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	267	267	0	100%
	14. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	106	106	0	100%
	15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100%
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	796	796	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Akses ke Layanan Pendidikan	96	96	0	100%
	2. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	4	4	0	100%
	3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4	4	0	100%
	4. Layanan Rujukan	6	6	0	100%
	5. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	4	4	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	6. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100%
	7. Layanan Data dan Pengaduan	3	3	0	100%
	8. Penyediaan Permakanan	96	96	0	100%
	9. Penyediaan Sandang	96	96	0	100%
	10. Penyediaan Alat bantu	8	8	0	100%
	11. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	288	288	0	100%
	12. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	96	96	0	100%
	13. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	4	4	0	100%
	14. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	89	89	0	100%
	15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100%
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1.386	1.386	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	128	128	0	100%
	2. Akses ke Layanan Pendidikan Penyediaan	185	185	0	100%
	3. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	5	5	0	100%
	4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5	5	0	100%
	5. Layanan Data dan Pengaduan	3	3	0	100%
	6. Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	4	4	0	100%
	7. Penyediaan Permakanan	185	185	0	100%
	8. Penyediaan Sandang	185	185	0	100%
	9. Penyediaan Alat bantu	60	60	0	100%
	10. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	428	428	0	100%
	11. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	185	185	0	100%
	12. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	5	5	0	100%
	13. Layanan Rujukan	6	6	0	100%
	14. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100%
	15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100%
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	144.676	144.676	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100%
	2. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	561	561	0	100%
	3. Akses ke Layanan Pendidikan	773	773	0	100%
	4. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	273	273	0	100%
	5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	273	273	0	100%
	6. Layanan Rujukan	1.052	1.052	0	100%
	7. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100%
	8. Layanan Data dan Pengaduan	1	1	0	100%
	9. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	4	4	0	100%
	10. Penyediaan Permakanan	773	773	0	100%
	11. Penyediaan Sandang	773	773	0	100%
	12. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	139.140	139.140	0	100%
	13. Penyediaan Alat bantu	5	5	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	14. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	773	773	0	100%
	15. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	273	273	0	100%
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	274	274	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM)	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Penyediaan Permakanan	265	265	0	100%
	2. Penyediaan Sandang	93	93	0	100%
	3. Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	56	56	0	100%
	4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	30	30	0	100%
	5. Pelayanan Dukungan Psikososial	9	9	0	100%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

Meski SPM Kota Surabaya Tahun 2022 secara rata-rata pada 6 urusan tercapai 99,14%, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, di antaranya adalah diperlukannya perbaikan komunikasi dan kerjasama antar perangkat instansi pemerintahan, baik di internal Pemerintah Kota Surabaya maupun dengan instansi pemerintahan lainnya.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data APM per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.37
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan
Tahun 2022

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Asemrowo	5.045	3.784	75,00%	2.607	1.615	61,95%
Benowo	7.380	6.682	90,54%	3.754	3.113	82,92%
Bubutan	9.475	8.370	88,34%	4.823	1.800	37,32%
Bulak	4.789	5.930	123,83%	2.429	2.368	97,49%
Dukuh Pakis	5.710	5.750	100,7%	2.821	3.214	113,93%
Gayungan	4.177	5.348	128,03%	2.140	2.080	97,2%
Genteng	5.434	5.712	105,12%	2.875	5.095	177,22%
Gubeng	12.062	12.582	104,31%	6.252	3.980	63,66%
Gunung Anyar	6.016	4.442	73,84%	2.957	1.772	59,93%
Jambangan	5.460	4.773	87,42%	2.704	3.572	132,1%
Karangpilang	7.126	6.060	85,04%	3.567	2.864	80,29%
Kenjeran	19.107	16.991	88,93%	9.428	8.065	85,54%
Krembangan	11.589	12.168	105,00%	5.710	6.974	122,14%
Lakarsantri	6.235	8.315	133,36%	3.243	4.266	131,54%
Mulyorejo	8.132	9.840	121,00%	4.088	5.074	124,12%
Pabean Cantian	7.357	4.024	54,7%	3.775	1.430	37,88%
Pakal	6.090	7.030	115,44%	3.114	2.933	94,19%
Rungkut	11.845	10.440	88,14%	5.649	4.467	79,08%
Sambikerep	6.652	6.218	93,48%	3.293	3.734	113,39%
Sawahan	19.381	14.372	74,16%	9.850	3.903	39,62%
Semampir	19.893	18.035	90,66%	9.867	4.844	49,09%
Simokerto	9.255	6.489	70,11%	4.557	2.964	65,04%
Sukolilo	11.002	11.595	105,39%	5.464	6.216	113,76%
Sukomanunggal	10.253	9.480	92,46%	4.989	5.622	112,69%
Tambaksari	21.822	16.141	73,97%	10.982	5.328	48,52%
Tandes	9.330	10.490	112,43%	4.737	3.112	65,7%
Tegalsari	9.442	9.091	96,28%	4.719	2.511	53,21%
Tenggilis Mejoyo	5.569	4.967	89,19%	2.861	2.561	89,51%
Wiyung	7.037	6.568	93,34%	3.471	2.561	73,78%
Wonocolo	7.679	7.071	92,08%	3.868	4.415	114,14%
Wonokromo	14.379	10.531	73,24%	7.611	7.252	95,28%
Total	**294.723**	**269.289**	**90,95%**	**148.205**	**119.705**	**80,77%**

Sumber: Dinas Pendidikan, diolah, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data APK per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Dari data di bawah terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

Tabel II.38
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	3.347	1.656	49,48%	5.045	4.396	87,14%	2.607	2.193	84,12%
Benowo	4.369	2.896	66,29%	7.380	7.669	103,92%	3.754	4.240	112,95%
Bubutan	5.755	2.963	51,49%	9.475	10.027	105,83%	4.823	2.427	50,32%
Bulak	2.961	1.765	59,61%	4.789	7.013	146,44%	2.429	3.153	129,81%
Dukuh Pakis	3.459	2.414	69,79%	5.710	6.753	118,27%	2.821	4.406	156,19%
Gayungan	2.453	1.485	60,54%	4.177	6.094	145,89%	2.140	2.725	127,34%
Genteng	3.213	2.224	69,22%	5.434	6.563	120,78%	2.875	6.837	237,81%
Gubeng	7.189	4.220	58,7%	12.062	14.552	120,64%	6.252	5.268	84,26%
Gunung Anyar	3.755	2.689	71,61%	6.016	5.117	85,06%	2.957	2.337	79,03%
Jambangan	3.317	1.642	49,5%	5.460	5.445	99,73%	2.704	4.679	173,04%
Karangpilang	4.375	2.731	62,42%	7.126	7.016	98,46%	3.567	3.750	105,13%
Kenjeran	12.557	6.165	49,1%	19.107	19.873	104,01%	9.428	10.912	115,74%
Krembangan	6.993	3.713	53,1%	11.589	14.179	122,35%	5.710	9.262	162,21%
Lakarsantri	3.919	2.513	64,12%	6.235	9.453	151,61%	3.243	5.704	175,89%
Mulyorejo	4.933	4.143	83,99%	8.132	11.382	139,97%	4.088	6.949	169,99%
Pabean Cantian	4.558	1.823	40,00%	7.357	4.751	64,58%	3.775	1.902	50,38%
Pakal	3.831	2.733	71,34%	6.090	8.040	132,02%	3.114	3.854	123,76%
Rungkut	7.294	4.485	61,49%	11.845	12.316	103,98%	5.649	5.940	105,15%
Sambikerep	3.977	2.199	55,29%	6.652	7.301	109,76%	3.293	5.128	155,72%
Sawahan	11.154	5.398	48,4%	19.381	16.663	85,98%	9.850	5.255	53,35%
Semampir	12.529	5.349	42,69%	19.893	20.914	105,13%	9.867	6.637	67,26%

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Simokerto	5.592	3.739	66,86%	9.255	7.692	83,11%	4.557	4.103	90,04%
Sukolilo	7.002	4.112	58,73%	11.002	13.545	123,11%	5.464	8.421	154,12%
Sukomanunggal	6.294	3.827	60,8%	10.253	11.053	107,8%	4.989	7.521	150,75%
Tambaksari	13.053	6.655	50,98%	21.822	19.102	87,54%	10.982	7.168	65,27%
Tandes	5.475	4.389	80,16%	9.330	12.067	129,34%	4.737	4.182	88,28%
Tegalsari	5.551	2.803	50,5%	9.442	10.619	112,47%	4.719	3.407	72,2%
Tenggilis Mejoyo	3.548	2.172	61,22%	5.569	5.830	104,69%	2.861	3.381	118,18%
Wiyung	4.270	2.843	66,58%	7.037	7.562	107,46%	3.471	3.543	102,07%
Wonocolo	4.784	2.519	52,65%	7.679	8.344	108,66%	3.868	6.007	155,3%
Wonokromo	8.460	4.401	52,02%	14.379	12.174	84,67%	7.611	9.473	124,46%
Total	**179.967**	**102.666**	57,05%	**294.723**	**313.505**	**106,37%**	**148.205**	**160.764**	**108,47%**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022 diolah

2.1.3.1.1.3 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. AL untuk jenjang SD/MI tahun 2018 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2022. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2018 sebesar 100 persen, dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2022. Perkembangan Angka Kelulusan jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.39
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2018 – 2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100	100
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	44.223	46.127	41.677	41.182	44.039
1.2	Jumlah Siswa SD/MI Kelas 6	44.223	46.127	41.677	41.182	44.039
2.	AL SMP/MTs (persen)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	42.282	40.965	38.403	37.413	38.131
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs Kelas 9	42.282	40.965	38.403	37.413	38.131

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah di jenjang masing-masing.

2.1.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak

mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2018 APS di jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan konsisten sampai dengan tahun 2022. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2018 sebesar 0,00% dan konsisten sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.40
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0	0
1.1	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0	0
1.2	Jumlah Siswa SD/MI	287.830	309.427	312.873	317.885	313.505
2.	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0	0
2.1	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0	0
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs	129.136	134.215	143.329	156.083	160.764

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

2.1.3.1.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.41
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Ketersediaan SD/MI	1:339	1:356	1:325	1:358	1:358
1.1.	Jumlah gedung sekolah	846	851	857	831	823
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	286.373	303.021	278.601	297.369	294.723
2.	Rasio Ketersediaan SMP/MTs	1:350	1:357	1:357	1:372	1:371
2.1.	Jumlah gedung sekolah	404	412	413	399	399
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	141.554	146.952	147.458	148.573	148.205

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

Tabel II.42
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	7	8	15	5.045	1:336	3	2	5	2.607	1:521
Benowo	14	5	19	7.380	1:388	4	2	6	3.754	1:626
Bubutan	28	2	30	9.475	1:316	8	0	8	4.823	1:603
Bulak	12	6	18	4.789	1:266	5	2	7	2.429	1:347
Dukuh Pakis	21	1	22	5.710	1:260	12	1	13	2.821	1:217
Gayungan	14	1	15	4.177	1:278	5	1	6	2.140	1:357
Genteng	20	1	21	5.434	1:259	12	0	12	2.875	1:240
Gubeng	24	5	29	12.062	1:416	13	0	13	6.252	1:481
Gununganyar	15	1	16	6.016	1:376	8	1	9	2.957	1:329
Jambangan	7	5	12	5.460	1:455	7	3	10	2.704	1:270
Karangpilang	12	3	15	7.126	1:475	9	0	9	3.567	1:396
Kenjeran	18	20	38	19.107	1:503	14	6	20	9.428	1:471
Krembangan	31	7	38	11.589	1:305	17	2	19	5.710	1:301
Lakarsantri	22	5	27	6.235	1:231	10	2	12	3.243	1:270
Mulyorejo	24	0	24	8.132	1:339	15	0	15	4.088	1:273
Pabean Cantian	14	4	18	7.357	1:409	6	0	6	3.775	1:629
Pakal	15	6	21	6.090	1:290	8	3	11	3.114	1:283
Rungkut	24	5	29	11.845	1:408	10	2	12	5.649	1:471
Sambikerep	16	6	22	6.652	1:302	16	3	19	3.293	1:173
Sawahan	41	0	41	19.381	1:473	13	1	14	9.850	1:704
Semampir	34	28	62	19.893	1:321	16	10	26	9.867	1:380
Simokerto	18	6	24	9.255	1:386	9	3	12	4.557	1:380
Sukolilo	32	1	33	11.002	1:333	17	2	19	5.464	1:288
Sukomanunggal	27	1	28	10.253	1:366	17	2	19	4.989	1:263
Tambaksari	36	10	46	21.822	1:474	18	3	21	10.982	1:523
Tandes	20	11	31	9.330	1:301	13	2	15	4.737	1:316
Tegalsari	30	2	32	9.442	1:295	11	0	11	4.719	1:429
Tenggilis Mejoyo	18	1	19	5.569	1:293	7	0	7	2.861	1:409
Wiyung	15	2	17	7.037	1:414	11	0	11	3.471	1:316
Wonocolo	18	2	20	7.679	1:384	9	1	10	3.868	1:387
Wonokromo	33	8	41	14.379	1:351	20	2	22	7.611	1:346

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah baik di jenjang SD dan di jenjang SMP semakin meningkat di setiap tahunnya. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah, ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Kenjeran dengan nilai rasio sebesar 1:503, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Lakarsantri dengan nilai rasio sebesar 1:231. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Sawahan memiliki rasio tertinggi yaitu 1:704 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:173.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2022 terdapat 377 sekolah SMP/sederajat yang telah terakreditasi, terdiri dari 242 sekolah yang terakreditasi A, 122 sekolah terakreditasi B dan terdapat 13 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/sederajat terdapat 802 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 513 sekolah yang terakreditasi A, 253 sekolah terakreditasi B dan 36 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2022, terdapat 305 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 72 lembaga, dan sebanyak 233 lembaga sisanya belum terakreditasi. Fakta bahwa masih adanya sekolah di jenjang SD maupun SMP yang terakreditasi

C, kemudian masih adanya lembaga kursus/pelatihan yang belum terakreditasi ini penting untuk diperbaiki kembali guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan untuk menjawab tantangan global seperti saat ini. Pada tahun 2022 terdapat SILPA BOS sebesar Rp1.480.494.065,25. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena rencana pengadaan barang tidak dapat memenuhi minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana diamanatkan oleh Perpres nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Di samping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2022 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 1.742 peserta, sebanyak 441 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 100%. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 2.369 peserta, sebanyak 801 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 100%. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 4.854 peserta, sebanyak 3.012 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus.

2.1.3.1.1.6 Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II.43
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Guru SD/MI	1:21	1:19	1:24	1:23	1:21
1.1.	Guru SD/MI	14.132	13.798	12.806	13.725	15.522
1.2.	Murid SD/MI	287.830	310.283	312.873	317.885	313.505
2.	Rasio Guru SMP/MTs	1:18	1:19	1:23	1:23	1:20
2.1.	Guru SMP/MTs	7524	6.887	6.250	6.862	8.167
2.2.	Murid SMP/MTs	129.136	134.215	143.329	156.083	160.764

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.44
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2022

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	8	0	7	0	0	164	26	0	205
SD	99	2	36	10	4	3.196	482	1	3.830
SMP	38	1	6	14	1	1.173	366	2	1.601
Total	145	3	49	24	5	4.536	874	3	5.636

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Tabel II.45
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2022

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	650	39	88	49	6	3.763	133	0	4.728
SD	1.620	33	57	127	14	9.265	415	5	11.536
SMP	1.018	21	10	104	8	4.953	450	3	6.567
Total	3.288	93	155	280	28	17.981	998	8	22.831

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Pada tabel jumlah guru di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, sehingga masih sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas para pengajar baik PNS maupun Non PNS di jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP.

Tabel II.46
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2022

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD	3.332	2.791	6.123	4.009	9.331	13.340	677	6.540	7.217
2	SMP	1.498	1.835	3.333	1.653	4.859	6.512	155	3.024	3.179
Jumlah		**4.830**	**4.626**	**9.456**	**5.662**	**14.190**	**19.852**	**832**	**9.564**	**10.396**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 6.982 guru SD/MI/setara dan 3.132 guru SMP/MTs/setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi

mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel berikut. Meski semua penderita telah ditangani, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun, utamanya penyakit hipertensi dan diabetes melitus, serta penyakit menular covid-19, menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Data penderita penyakit menular dan tidak menular selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.47
Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tahun 2018 – 2022

No	Penyakit	2018	2019	2020	2021	2022
1.	TBC	3.003	7.950	4.151	4.628	8.218
2.	COVID-19	0	N/A	18.164	67.073*	77.739
3.	HIV/AIDS	1.096	1.343	786	749	828
4.	Kusta	97	97	47	45	91
5.	DBD	321	277	73	111	195
6.	Hipertensi	399.435	720.378*	724.582*	737.258	740.719
7.	Diabetes Melitus	N/A	94.076	94.624	96.279	96.773

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023
*Keterangan: *) dihitung berdasarkan estimasi*

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, melakukan berbagai upaya, yang salah satunya melalui layanan cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.48
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	49	4	154	154	154
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	49	4	154	154	154
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Kejadian Luar Biasa tahun 2020 dan 2021 adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di 154 kelurahan. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sesuai Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022-2026, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi kurang dari 20 jam.

Untuk kasus Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021, 31 Kecamatan di kota Surabaya telah membentuk Kampung Tangguh Wani Covid-19 di tiap RW-nya sebagai upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam pencegahan persebaran Covid-19. Data Kampung Tangguh Covid-19 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.49
Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh
1	Asemrowo	17
2	Benowo	26
3	Bubutan	44
4	Bulak	21
5	Dukuh Pakis	31
6	Gayungan	28
7	Genteng	51
8	Gubeng	51
9	Gunung Anyar	29
10	Jambangan	26
11	Karangpilang	29
12	Kenjeran	37
13	Krembangan	43
14	Lakarsantri	29

No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh
15	Mulyorejo	52
16	Pakal	26
17	Pabean Cantian	52
18	Rungkut	74
19	Sambikerep	31
20	Sawahan	68
21	Simokerto	48
22	Semampir	49
23	Sukolilo	67
24	Sukomanunggal	36
25	Tambaksari	73
26	Tandes	51
27	Tegalsari	48
29	Tenggilis Mejoyo	25
29	Wiyung	34
30	Wonocolo	44
31	Wonokromo	58

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, 2023

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m^2/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan dimasyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada gambar di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

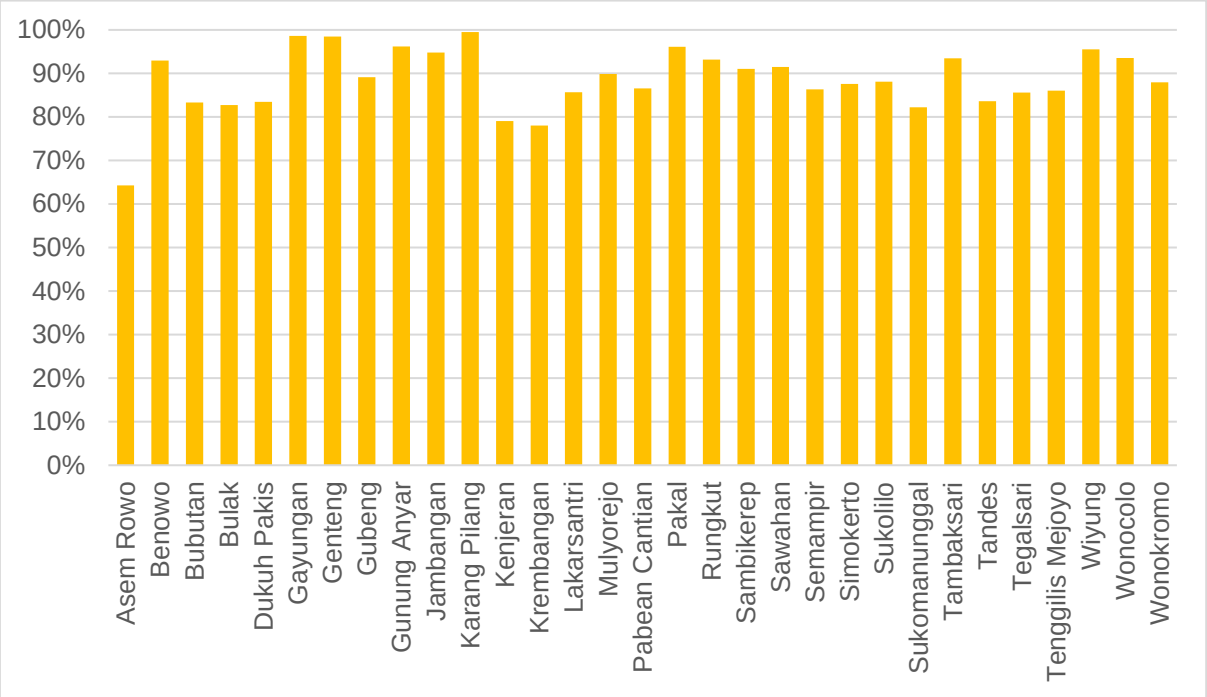

Gambar II.14
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya 2022
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2023

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2022 seluruh kelurahan memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.50
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	154	154
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Tabel II.51
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.791	42.783	35.657	42.100	42.019
2	Jumlah ibu nifas	44.598	44.252	43.904	42.164	42.014
3	Persentase (persen)	95,95	96,68	81,22	99,85	100,01

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Tabel II.52
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	41.070	40.813	40.448	42.248	41.931
2	Jumlah bayi	42.003	41.646	42.034	42.708	41.901
3	Persentase (persen)	97,78%	98.00%	96,23%	98,92%	100,1%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

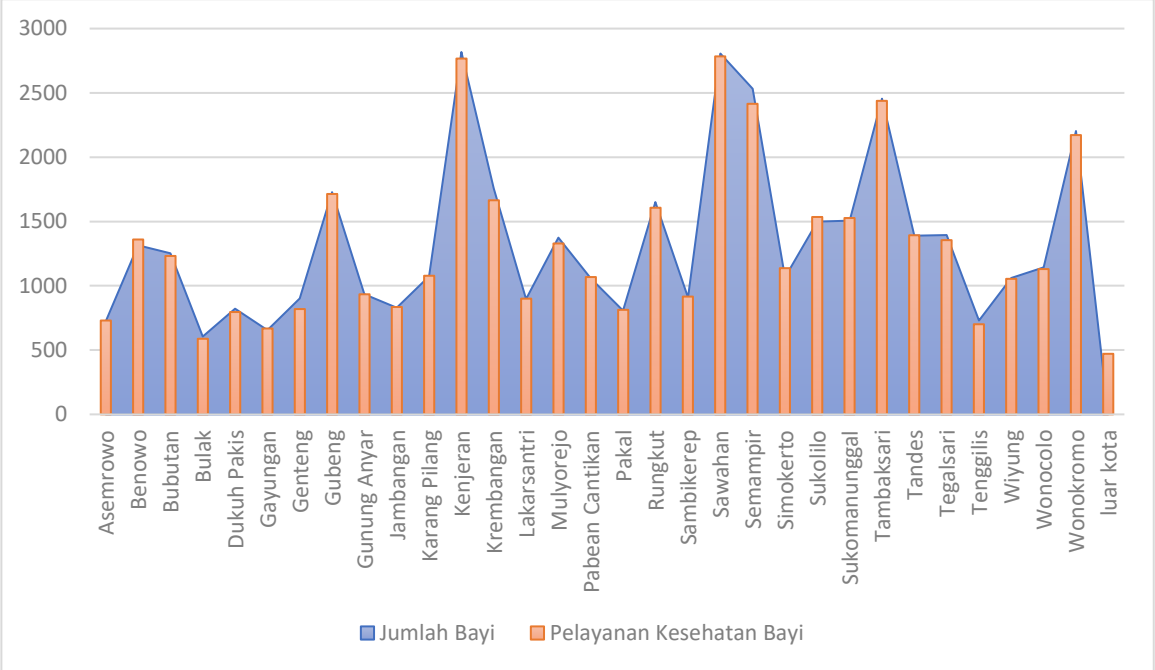

Gambar II.15
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan 2022
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2023

Pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar di atas adalah di Kecamatan Kenjeran. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Gayungan.

Tabel II.53
Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	254	242	196	148	123
2	Jumlah balita gizi buruk	254	242	196	148	123
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Sejak tahun 2018 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita di wilayahnya masing-masing. Di tahun 2019 dan 2020 jumlah posyandu balita sebanyak 2.776 dan 2.764. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah posyandu balita sebanyak 2.764 posyandu dan pada tahun 2022 sebanyak 2.731 posyandu. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.54
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah posyandu	2.797	2.776	2.764	2.734	2.731
2	Jumlah balita	211.564	209.706	207.881	208.175	206.810
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	13,25	13,37	13,30	13,1	13,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2023

Dari data tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1.000 penduduk berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2017, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 21 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 60 puskesmas. Jika

ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2022 sejumlah 2.987.863 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 47.426 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya belum mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.55
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	352	286	348	358	442
3	Jumlah pustu	59	59	59	59	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.56
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863
2.	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	3	4	5	5	5
3.	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	4	4	4	3	3
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7	7
5.	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2	2
6.	Rumah Sakit Swasta	43	43	42	43	43
Jumlah Rumah Sakit (Terakreditasi)		**59 (N/A)**	**59 (N/A)**	**60 (N/A)**	**60 (56)**	**60 (59)**
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		**0,0191**	**0,0187**	**0,0209**	**0,0209**	**0,0209**

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah dokter sebanyak 4.295 orang, dengan rasio

1,38 per 1000 penduduk. Pada tahun 2019, jumlah dokter sebanyak 2.093 orang, dengan rasio 0,66 per 1000 penduduk. Pada tahun 2020, jumlah dokter sebanyak 2.066 orang, dengan rasio 1,44 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2021 , jumlah dokter sebanyak 7.484, dengan rasio 2,52 per 1000 penduduk. Sedangkan pada Tahun 2022 , jumlah dokter sebanyak 8.158, dengan rasio 2,73 per 1000 penduduk, Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota Surabaya masih belum mencukupi. Selain kecukupan kuantitas SDM Kesehatan, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.57
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863
2	Jumlah dokter	4.295	2.093	1.561	7.484	8.158
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	1,38	0,66	0,53	2,52	2,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2023

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pencapaian SPM di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.58
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Instansi	2018	2019	2020	2021	2022
IKM RSUD Bhakti Dharma Husada	86,41	86,43	88,76	79,89	87,46
IKM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	87,72	88,80	83,48	88,85	87,49
SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	86,73	77,98	81,55	86,39	86,87
SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	82,65	83,67	82,83	84,85	91,57

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2023

Dari tabel pencapaian nilai IKM dan SPM di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie di atas, dapat dinilai masih tergolong baik, namun cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,

seperti adanya proses renovasi gedung yang menghambat pelayanan kesehatan. Meski begitu, tentu hal ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 terdapat 16 puskesmas telah dilakukan akreditasi diantaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Dukuh Kupang. Pada tahun 2017, terdapat 44 puskesmas yang dilaksanakan akreditasi, dan sisanya di tahun 2018. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian akreditasi di semua puskesmas.Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna. Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.16
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi 2022

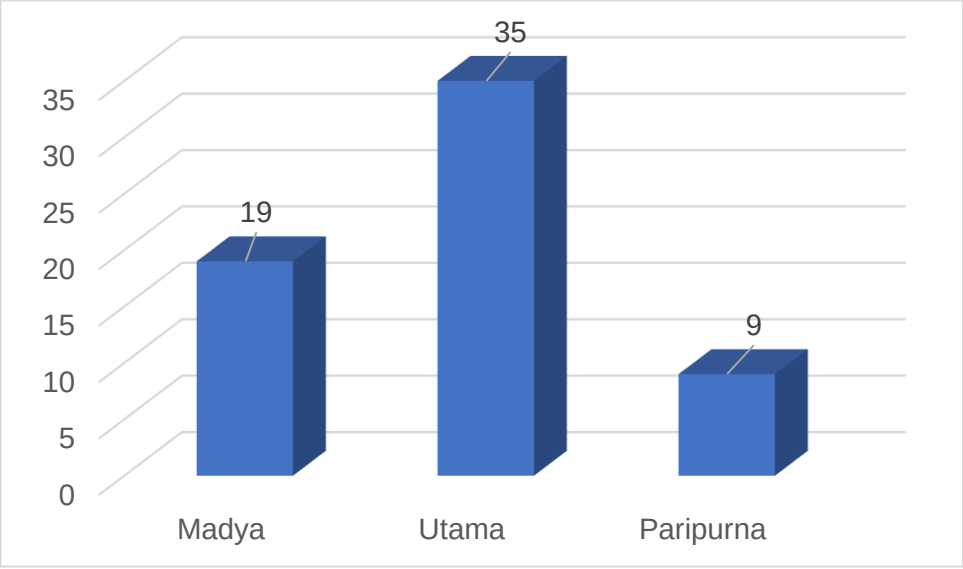

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 diolah

Selain peningkatan mutu, aksesibilitas pelayanan kesehatan, juga diupayakan melalui pemberian jaminan kesehatan, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2017 telah ditetapkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan survei yang dilakukan secara berkala untuk memperbarui data tersebut. Pada tahun 2017 dan 2018, terdata sebanyak 291.686 orang MBR dan lebih dari 99 persennya telah mendapatkan jaminan kesehatan. Kemudian di tahun 2019, jumlah MBR diperbarui menjadi 799.540 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan MBR turun menjadi 84,17 persen, meski jumlah MBR yang mendapatkan jaminan bertambah menjadi 672 ribu orang. Lalu di tahun 2020, cakupan jaminan kesehatan untuk MBR kembali ditingkatkan menjadi 92,55 persen, meski jumlah data MBR juga kembali dilakukan pembaruan menjadi 822.105 orang. Kemudian di tahun 2021 jumlah MBR diperbarui menjadi 1.566.307 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan MBR turun menjadi 69,80 persen, meski jumlah MBR yang mendapatkan jaminan bertambah menjadi 1.093.374 orang. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota untuk menjamin akses hidup sehat bagi penduduknya. Selengkapnya tentang data perkembangan cakupan jaminan kesehatan bagi MBR dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.59
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah MBR	291.686	799.540	822.105	1.566.307	935.329
2	Jumlah MBR mendapatkan jaminan kesehatan	290.153	672.998	760.882	1.093.374	534.383
3	Persentase (%)	99,47	84,17	92,55	69,80	57,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2023

Dalam rangka mencapai Bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan), Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha meningkatkan capaian kelurahan yang bebas BABS. Peningkatan yang terjadi, dari tahun 2017 sebanyak 35 persen atau sejumlah 54 kelurahan hingga tahun 2021 sebanyak 48,7 persen atau sejumlah 75 kelurahan. Permasalahan yang paling sering ditemui dalam penanganan BABS menuju kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) adalah banyaknya rumah yang berada pada tanah ilegal dan tidak adanya lahan yang tersedia untuk dilakukan

pembangunan jamban sehat sehingga sulit untuk dilakukan intervensi dalam memperoleh bantuan baik dari pemerintah dan/atau swasta.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan untuk menjamin makanan olahan yang dijual di masyarakat memenuhi syarat kebersihan (higienis sanitasi). Hasil pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Masih adanya 10 persen lebih TPM yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi merupakan masalah yang cukup penting untuk segera diperbaiki.

Tabel II.60
Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah TPM	1.700	1.834	1.846	1.797	2.369
2	Jumlah TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	1.114	1.380	1.408	1.532	2.104
3	Persentase (%)	65,53	75,25	76,27	85,25	88,81

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2023

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2021, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,54; di mana jalan Kota Surabaya sepanjang 1.697.394 meter melayani jumlah penduduk sebesar 2.970.952 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottleneck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada tahun 2018, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.678,86 km dari panjang jalan 1.692,53 km, dengan persentase 99,19%. Pada tahun 2019, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.683,11 km dari panjang jalan 1.694,38 km, dengan persentase 99,33%. Sedangkan pada tahun 2020, panjang jalan kondisi baik juga meningkat menjadi 1.686,88 km dari panjang jalan 1.697,39 km, dengan persentase 99,38%. Pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, panjang jalan kondisi baik menjadi 1.686,88 km dari panjang jalan 1.697,39 km, dengan persentase 99,38%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.61
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.678,86	1.683,11	1.686,88	1.686,88	1.686,88
Panjang Jalan (Km)	1.692,53	1.694,38	1.697,39	1.697,39	1.697,39
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	99,19%	99,33%	99,38%	99,38%	99,38%

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, bidang pekerjaan umum juga dituntut untuk menyediakan layanan air bersih, sanitasi, dan air minum layak di kawasan permukiman penduduk. Untuk meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan air bersih, bekerjasama dengan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Data cakupan penduduk dengan akses air bersih, sanitasi dan air minum layak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.62
Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	97,97%	98,10%	98,27%	98,27%	98,48%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	99,54%	99,48%	99,12%	99,12%	99,6%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	98,97%	99,90%	99,46%	99,46%	99,46%

Sumber: Dinas Sosial dan PDAM Surya Sembada, 2023

2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan melalui integrasi RTRW dengan rencana induk dan rencana-rencana sektoral lainnya.

Rencana induk sektoral mutlak dibutuhkan untuk menjawab perkembangan kota yang pesat dan dinamis. Sepanjang periode 2016-2022, rencana induk yang telah disusun, beserta kebutuhan rencana induk yang masih diperlukan untuk disusun ke depannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.63
Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2022

Uraian	Tahun Penyusunan
1. Rencana Induk Air Minum	2015
2. Rencana Induk Kereta Api	2015
3. Rencana Induk Pelabuhan	2015
4. Rencana induk Bandara	2015
5. Masterplan Permakaman	2016
6. Masterplan RTH	2016
7. Masterplan Permukiman (RP3KP)	2016
8. Masterplan Sarpras Kebakaran	2016
9. Masterplan Drainase	2017
10. Masterplan Air Limbah	2018
11. Masterplan Transportasi	2019
12. Masterplan RPPLH	2020
13. Masterplan Energi	2021
14. Masterplan Persampahan	*(belum disusun)*
15. Masterplan Industri	*(belum disusun)*
16. Strategi Sanitasi Kota	2019
17. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	*(belum disusun)*
18. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	2015
19. Rencana Induk Sistem Drainase Lingkungan di Perkotaan	*(belum disusun)*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.64
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2018 –2022

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah Tinggal	7.638	4.923	5.723	5.783	6.615	5.983
2	Non Rumah Tinggal	1.717	1.773	1.944	1.807	1.572	1.616
3	Reklame	1.576	1.148	454	436	101	105
Total		10.931	7.844	8.121	8.026	8.288	3.238

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

Tabel II.65
Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah bangunan yang dikenakan sanksi administratif	29 persil	9 persil	401 persil	412 persil	150 persil

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfataan ruang kota dapat diindikasikan dengan jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana-prasarananya kurang.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 24 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Karena itu, sejak tahun 2017, seluruh luas kawasan prioritas berhasil ditingkatkan kualitasnya hingga semua kawasan tersebut memiliki kualitas permukiman yang sesuai standar. Meski demikian, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan permukiman tetap harus dilakukan guna meningkatkan derajat hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.66
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.648	1.090	461	623	929

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

Dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kegiatan “Dandan Omah” yaitu perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat Kota Surabaya.

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022, kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah menjadi layak huni, sehat dan aman dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan kegiatan pembangunan berdasarkan partisipasi warga (*community-based development*), yang pelaksanaan kegiatannya dioptimalkan melalui pemberdayaan warga setempat.

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.67
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pemohon Rusun	1.633	2.105	1.141	1.234	363

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi, hingga pada tahun 2022, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 109 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 23 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.68
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m^2)	Keterangan
1	URIP SUMOHARJO	Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng	21	3	$\pm$ 3.500	Dibangun 1983 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m^2)	Keterangan
2	DUPAK BANGUNREJO	Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun 1992 (APBN)
3	SOMBO	Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto	18	8	± 41.044	Dibangun 1993 (APBN)
		Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto	24	2		Dibangun 2020 (APBD)
4	PENJARINGANSARI	Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	18	3	± 32.350	Dibangun 1995 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	21	6		Dibangun 2003 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap III)	24	2		Dibangun 2009 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap IV)	24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	WARUGUNUNG	Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang	21	10	± 29.845	Dibangun 1996 (APBD)
6	WONOREJO	Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	21	2	± 5.466	Dibangun 2003 (APBN)
		Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	21	4		Dibangun 2006 (APBN)
7	TANAH MERAH	Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap I)	21	4	± 28.810	Dibangun 2007 (APBN)
		Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap II)	24	4		Dibangun 2009 (APBN)
8	RANDU	Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun 2007 (APBN)
9	GRUDO	Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	PESAPEN	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011 (APBN)
11	JAMBANGAN I	Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	24	1	± 2.977	Dibangun 2011 (APBN)
12	JAMBANGAN II	Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	24	1		Dibangun 2017 (APBD)
13	SIWALANKERTO	Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap I)	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
		Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap II)	24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14	ROMOKALISARI	Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap I)	24	4	± 25.000	Dibangun 2012 (APBN)
		Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap II)	24	4		Dibangun 2013 (APBN)
		Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap III)	24	2		Dibangun 2014 (APBN)
15	BANDAREJO	Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
16	DUKUH MENANGGAL	Keluraham Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap I)	24	2	± 14.388	Dibangun 2016 (APBN)
		Keluraham Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap II)	36	2		Dibangun 2020 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m^2)	Keterangan
17	KEPUTIH	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap I)	36	4	± 258.140	Dibangun 2016 (APBN)
		Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap II)	36	2		Dibangun 2017 (APBN)
		Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap III)	36	2		Dibangun 2018 (APBN)
18	TAMBAK WEDI	Jalan Tambak Wedi, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	36	2	±	Dibangun 2017 (APBN)
19	TAMBAK WEDI II	Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	36	2	±	Dibangun 2020 (APBN)
20	INDRAPURA	Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian	24	2	± 5.466	Dibangun 2019 (APBD)
21	BABAT JERAWAT	Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	24	2	± 4.129	Dibangun 2019 (APBD)
22	GUNUNGANYAR SAWAH	Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar	24	2	± 14.150	Dibangun 2019 (APBD)
		Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar (Blok B)	36	2		Dibangun 2020 (APBD)
23	PAKAL BENOWO	Jalan Kauman Baru, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal	24	2	± 29.900	Dibangun 2022 (APBD)
JUMLAH				**109**		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi

dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum pada Tabel II.35 di atas, upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja SPM, antara lain:

1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani sebanyak 14.818 orang melalui aktivitas penegakan perda sesuai SOP menggunakan sarana prasarana serta SDM Satpol PP sesuai standar.
2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan cara melakukan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana kepada sejumlah 56.328 orang dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada 820 orang.
3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kepada sebanyak 324 orang. Aktivitas yang mendukung pelayanan tersebut antara lain, pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana, melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, respon cepat penyakit KLB dan/atau wabah zoonosis, serta pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.
4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, antara lain melalui layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak sebanyak 38 orang. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan sebanyak 8 orang.

2.1.3.1.5.1 Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.69
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	677	781	781	783	978
2	Jumlah penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,18	2,47	2,62	2,63	3,27

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Tabel II.70
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	24.095	16.382	5.274	4.124	5.767
2	Jumlah pelanggaran K3	24.095	16.382	5.274	4.124	7.810
3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	73,84

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2017, sebanyak 41.111 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2018, jumlah pelanggaran menurun menjadi 24.095 dan kesemuanya

telah dapat diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pelanggaran menurun menjadi 16.382 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran sebanyak 5.274 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah pelanggaran sebanyak 4.124 dan pelanggaran telah diselesaikan. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada tabel berikut. Khusus di tahun 2020, jumlah pelanggaran terbesar adalah pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19, yakni sebanyak 829 pelanggar.

Tabel II.71
Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa	236	227	215	297	403
2	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa yang Mengarah Kejadian Anarkis	11	13	10	8	5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis. Pada tahun 2018, hanya ada 11 kejadian anarkis dari 236 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk tahun 2019, hanya ada 13 kejadian anarkis dari 227 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2020, ada 10 kejadian anarkis dari 215 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2021 ada 8 kejadian anarkis dari 297 jumlah kejadian. Pada tahun 2022, terdapat 5 kejadian anarkis dari 403 kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.5.2 Penanganan Bencana Kebakaran

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II.72
Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2018 – 2022

No	Penyebab	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hubungan Listrik	107	75	157	200	219
2	Api Terbuka	301	186	220	246	212
3	Api Mekanis	4	0	0	0	0
4	Dalam Penyelidikan	70	254	241	257	158
5	Tidak Ada Keterangan	14	0	0	2	0
Total		496	515	617	705	589

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2023

Penyebab kebakaran di tahun 2022, dari total 589 kejadian, sebagian besarnya karena kelalaian manusia. Dari sumber api terbuka sebanyak 212 kejadian, sebagian besar disebabkan karena kelalaian dalam meninggalkan sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang di buang sembarangan. Sedangkan dari sumber listrik sebanyak 219 kejadian, sebagian besarnya karena hubungan arus pendek

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal, termasuk operasional Command Center 112 yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan segala kejadian kedaruratan sehingga pelayanan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.73
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit	496	515	617	705	589
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	496	515	617	705	589
3	Persentase penanganan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2023

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan waktu respon yang telah ditentukan.

Tabel II.74
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	74	86	86	86	86
2	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	21	21	21	21	21
3	Jumlah Penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863
4	Cakupan Pelayanan WMK	93%	94%	95,6%	95,6%	95,6%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2023

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu

hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

2.1.3.1.6.1 PMKS yang Ditangani

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa,dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel II.75
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PMKS yang ada	58.129	77.808	73.176	62.243	64.933
2	Jumlah PMKS yang ditangani	36.098	46.765	44.435	31.516	34.180
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	62,09	60,10	60,72	50,63	48,48

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2023

Secara umum, jumlah PMKS menurun dari tahun 2019 sebanyak 77.808 orang menjadi 73.176 orang pada tahun 2020 dan menjadi 62.243 orang di Tahun 2021. Prosentase PMKS yang ditangani sepanjang tahun 2019-2020 semakin meningkat yaitu dari 60,10 persen menjadi 60,72 persen dan pada tahun 2021 sebesar 50,63 persen. Sedangkan tahun 2022 jumlah PMKS yang ada sejumlah 64.933 orang dan prosentase PMKS yang ditangani sebesar 48,48 persen. PMKS yang ditangani yang dimakaus yakni PMKS yang ada di UPTD yang dimiliki Dinsos dan mendapat penanganan mulai dari permakanan hingga penanganan sosial lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PMKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial

melalui pemberian permakanan, pembinaan maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Selain PMKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PMKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PMKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Banyaknya pendatang ini rentan menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah PMKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.76
PMKS Penduduk non Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS non Surabaya	650	669	1.137	1.252	1.409

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS. PSKS merupakan komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari berkurangnya PMKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.77
PSKS Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total PSKS	3.312	1.551	1.090	1.159	3.855
PSKS Aktif	N/A	1.016	645	996	2.443

Sumber: Dinas Sosial, 2023

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat hingga tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas,

yaitu sebesar 1.520.041 pada tahun 2018 menjadi 1.566.846 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 1.582.564. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan menjadi 1.572.888 hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan Agustus) pada tahun 2016 digeser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.78
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.520.041	1.566.846	1.582.564	1.572.888	1.643.314
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.269.293	2.283.861	2.325.749	2.337.229	2.348.058
3	Rasio angkatan kerja	0,67	0,69	0,68	0,67	0,69

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2023

2.1.3.2.1.1 Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.79
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	226	235	347	283	120
2	Jumlah Sengketa Selesai	120	112	125	117	120
3	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.782	10.592
4	Rasio sengketa	1,77	1,84	2,72	2,21	1,13

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2021

Pada tahun 2018 terdapat 226 sengketa, yang sebagian besarnya dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi. Tahun 2019 naik menjadi 235 sengketa dengan kasus yang sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 347 kasus, hal ini dipicu oleh

gelombang PHK yang cukup besar dikarenakan banyak perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 jumlah sengketa mengalami penurunan menjadi sebesar 283 sengketa. Kemudian pada tahun 2022 jumlah sengketa sengketa semakin menurun menjadi 120 sengketa.

2.1.3.2.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK, sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.80
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2022
1	Tidak/belum pernah sekolah	3.740
2	Tidak/belum tamat SD	
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	31.703
5	SMA	71.131
6	SMK	
7	Diploma I/II/III/Akademi	18.702
8	Universitas	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.288 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 5.805 orang. Pada tahun 2019, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 9.235 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 6.065 orang. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 4.507 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 2.570 orang. Pada tahun 2021, pencari kerja yang difasilitasi sebesar 5.132 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 2.815

orang. Sedangkan paada tahun 2021, pencari kerja yang difasilitasi sebesar 7.291 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 7.291 orang Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.81
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	5.805	6.065	2.570	2.815	7.291
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	8.288	9.235	4.507	5.132	7.291

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2022

Penurunan jumlah pencari kerja yang difasilitasi maupun ditempatkan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020 dan juga di tahun 2021 yang berdampak pada turunnya permintaan tenaga kerja dari perusahaan. Diharapkan kegiatan fasilitasi yang terus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Salah satu hal yang masih menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah penempatan peserta pelatihan pada pasar kerja. Penyerapan tenaga kerja hasil pelatihan Pemerintah Kota Surabaya masih tergolong rendah. Data peserta pelatihan yang ditempatkan pada pasar kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.82
Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah peserta pelatihan	920	1085	126	441	732
Peserta pelatihan ditempatkan	560	14	3	0	147
Persentase peserta pelatihan yang ditempatkan (%)	19,50	1,29	2,38	0	20,08

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2023

2.1.3.2.1.3 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga

kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.83
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	6.689	7.801	9.335	12.746	8.573
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.780	10.592
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen)	52,33	61,03	73,03	99,73	80,94

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2023

Pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 6.689 perusahaan atau 52,33% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 7.801 perusahaan atau 61,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 9.335 perusahaan atau 73,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Untuk tahun 2021 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 12.780 perusahaan atau 99,73% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menurun menjadi 8.573 perusahaan atau 80,94% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender sejatinya dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sejak tahun 2017 hingga 2021, nilai IPG cenderung meningkat dikarenakan keterkaitannya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya yang semakin meningkat. Sedangkan nilai IDG dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena IDG menitikberatkan pada partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sejauh ini, di Kota Surabaya, pembentukan nilai IDG lebih banyak dipengaruhi faktor alami dari kemampuan individu. Karenanya masih diperlukan strategi-strategi khusus dalam percepatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan politik.

Tabel II.84
Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,57	93,68	93,70	93,90	94,21
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,29	83,88	82,86	82,82	83,20

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, 2023

2.1.3.2.2.1 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2018 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 21.365 orang dan di tahun 2019, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 24.476 orang. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 29.380 orang. Kemudian di tahun 2021 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.167 orang. Dan untuk tahun 2022 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 7.494 orang. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.85
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pekerja Perempuan	587.684	617.965	600.845	312.338	N/A

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	21.365	24.476	29.380	12.167	7.494
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota (%)	3,63	3,96	4,89	3,89	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2023

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.2.2 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2019, sebesar 617.965 orang atau 94,05% dari jumlah angkatan kerja perempuan dan menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 600.845 orang. Kemudian di tahun 2021 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 312.338 orang atau 53,43%. Salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi Covid-19 yang memaksa banyak perusahaan untuk melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.86
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	617.096	657.039	655.746	584.465	663.404
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	587.684	617.965	600.845	312.338	632.797
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	95,23	94,05	91,63	53,43	95,38

Sumber : BPS dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2023

2.1.3.2.2.3 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/Atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.87
KDRT Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Tangga	953.888	974.740	957.188	974.298	974.298
2	Jumlah KDRT	37	10	13	34	75
3	Rasio KDRT	1:25.781	1:97.474	1:73.630	1:28.656	1:12.991

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2023

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada tabel di atas jumlah KDRT pada tahun 2018 sebanyak 37 kejadian dan sempat menurun di 2019 dengan 10 kasus. Akan tetapi di tahun 2020 hingga tahun 2022 jumlah kasusnya cenderung meningkat. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak. Meski demikian, kualitas pelayanan pengaduan tersebut masih perlu ditingkatkan karena nilai kepuasan terhadap pelayanan PPTP2A di tahun 2020 masih sebesar 84 persen. Meski sudah baik, namun pada tahun 2018 hingga 2019 kualitas pelayanan masih sebesar 72,7 persen dan 75,43 persen berturut-turut.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang). Untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.88
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	123	342	235	138	192

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	123	342	235	138	192
3	Penyelesaian pengaduan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2023

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penguatan terhadap peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak sebagai salah satu upaya untuk menekan angka permasalahan perempuan dan anak. Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak pada tahun 2018-2022 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.89
Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak (lembaga)	56	62	63	70	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2017, terdapat 15 kecamatan yang responsif gender dan 50 kelurahan ramah anak, dan sampai dengan tahun 2018, terdapat 19 kecamatan yang responsif gender dan 81 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2020 terdapat 31 kecamatan sudah responsif gender dan 119 kelurahan ramah anak. Sampai dengan tahun 2022, seluruh 31 kecamatan sudah responsif gender dan 153 kelurahan ramah anak. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pengarusutamaan gender adalah pemberdayaan ekonomi bagi

perempuan usia produktif. Jumlah perempuan usia produktif yang mengikuti pemberdayaan ekonomi tahun 2018 – 2022 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.90
Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perempuan mengikuti pemberdayaan ekonomi	177	197	0	50	14

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya meningkat yaitu pada tahun 2018 sebesar 521,49 kg/kapita/th. Pada tahun 2019 menjadi 310,95 kg/kapita/th. Selanjutnya pada tahun 2020 menjadi 216,55 kg/kapita/th, kemudian pada tahun 2021 menjadi 248,28 kg/kapita/th dan pada tahun 2022 sebesar 210,75 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun.

Tabel II.91
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	1.613.871.200	982.443.190	643.307.412	737.617.453	629.700.570
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	521,49	310,95	216,55	248,28	210,75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup

dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat disampaikan bahwa Pola Pangan Harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2018 mencapai 96,76. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 95,5 maka capaian kinerjanya mencapai 101,32%. Namun, pada tahun 2019 PPH masyarakat kota Surabaya menurun menjadi 96,1. Hal ini dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan kota Surabaya dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein. Pada tahun 2020 PPH masyarakat Kota Surabaya meningkat lagi menjadi 96,25, kemudian pada tahun 2021 PPH masyarakat Kota Surabaya meningkat menjadi 94,48. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 94,16.

Tabel II.92
Pola Pangan Harapan Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pola Pangan Harapan	96,76	96,1	96,25	94,48	94,16

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Selain permasalahan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keamanan pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat Surabaya. Setiap tahun dilakukan survei dan pengambilan sampel pangan segar untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman. Hasil pengambilan sampel pangan segar Kota Surabaya pada tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.93
Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sampel pangan segar	1.920	2.003	2.060	2.061	1.500
Jumlah sampel tidak memenuhi syarat keamanan	210	210	44	149	60

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

2.1.3.2.4 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem

jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada tahun 2018, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,27 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pada tahun 2019, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,36 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Selanjutnya pada tahun 2020, tanah aset yang bersertifikat selain jalan dan saluran telah mencapai 32,07 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran. Sedangkan untuk tahun 2021 tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 37,34 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran. Terkini pada tahun 2022 tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 47,78 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran. Pengamanan administrasi berupa pencatatan/inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur. Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur diantaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Selanjutnya, Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur diantaranya pemanfaatan tanah untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain.

Tabel II.94
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018*	2019*	2020**	2021**	2022***
Jumlah Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	1.317	1.323	1.130	1.410	1.804
Total aset pemerintah	6.497	6.497	3.523	3.776	3.776
Persentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat (%)	20,27	20,36	32,07	37,34	47,78

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022
*Total aset 2018-2019 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya
**Total aset 2020-2021 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT
*** Total aset 2022 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh BPKAD

Sementara itu, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat sampai dengan tahun 2018 mencapai 15.247.124 m^2 dan sampai dengan tahun 2019 luas lahan aset yang bersertifikat menjadi 16.337.822 m^2. Sedangkan sampai dengan tahun 2020, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat mencapai 16.798.212 m^2 dan sampai dengan tahun 2021 luas lahan aset yang bersertifikat meningkat menjadi 17.763.111 m^2. Kemudian pada tahun 2022, luas lahan aset yang bersertifikat kembali bertambah menjadi seluas 19.372.065 m^2. Data luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.95
Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018*	2019*	2020*8	2021**	2022***
Akumulasi Luas Lahan Aset Bersertifikat (m^2)	15.247.124	16.337.822	16.798.212	17.763.111	19.372.065
Jumlah Luas Wilayah Aset (m^2)	63.173.396	64.552.306	37.824.454	37.778.702	37.778.702
Presentase Luas Lahan Aset Bersertifikat (%)	24,14	25,31	44,41	47,02	51,28

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022
*Total aset 2018-2019 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya
**Total aset 2020-2021 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT
*** Total aset 2022 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh BPKAD

Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat ke depannya, terdapat peningkatan aktivitas pergerakan orang atau barang di Kota Surabaya. Aktivitas pergerakan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Untuk mendorong pengembangan perekonomian dan

pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Surabaya, diperlukan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur bagi kepentingan umum seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat, Jalan Lingkar Luar Timur, Kebun Raya Mangrove di Wonorejo dan Gunung Anyar, TPA Benowo, serta Makam Waru Gunung.

Untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana bagi kepentingan umum tersebut, perlu dilakukan pengadaan tanah. Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya telah membebaskan lahan seluas 12,3 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan lahan seluas 11,8 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur. Untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur tidak terlepas dari kontribusi pengembang yang terkena rencana pembangunan tersebut. Adapun untuk RTH Kebun Raya Mangrove Wonorejo luas yang telah dibebaskan sebesar 2,08 Ha dan untuk Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar sebesar 2,24 Ha. Lahan yang telah dibebaskan hingga akhir tahun 2020 untuk sarana kebersihan TPA Benowo seluas 22,6 Ha. Adapun lahan yang telah dibebaskan untuk lokasi makam Waru Gunung seluas 3,31 Ha.

Tabel II.96
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	30	30	33	44	30
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	2	6	2	28	16
3.	Persen Kasus yang Diselesaikan	6,67%	20%	6,06%	63,64%	53,33%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya pada tahun 2017 sebanyak 3.234,41 ton/hari, pada tahun 2018 sebanyak 2.164,43 ton/hari, pada tahun 2019 sebanyak 2.224,27 ton/hari, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 2.222,62 ton/hari. Pada tahun 2021 sebanyak 1.752,50 ton/hari, sedangkan pada tahun 2022 volume produksi sampah adalah 1.792,72 ton/hari, sebagaimana rekap data pada tabel berikut.

Tabel II.97
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Volume Produksi Sampah (ton/hari)	2.164,43	2.224,27	2.222,62	1.752,50	1.792,72
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.666,83	1.969,87	1.958,41	1.585,26	1.601

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Data terkait jumlah TPS tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.98
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863
2	Jumlah TPS (unit)	185	187	187	190	190
3	Jumlah TPS 3R	3	4	9	9	9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Perlunya pengetahuan tentang peduli lingkungan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan pada peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jika dilihat pada tabel di bawah naik setiap tahunnya. Namun tetap diperlukan adanya

peningkatan kerjasama dalam pengembangan pemasaran daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah plastik.

Tabel II.99
Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan kebersihan	922	1.028	1.082	909	1.113

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 mencapai 21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,46 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2017 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,75 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.275,27 Ha. Pada tahun 2018 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93 Ha. Pada tahun 2019 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,91 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.329,82 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,99 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 22,00 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.359,77 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.100
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2018 – 2022

No.	Jenis RTH Publik	2018	2019	2020	2021	2022
1	RTH makam	283,53	283,53	283,53	284,95	284,95
2	RTH lapangan dan stadion	355,86	359,86	360,58	361,08	361,08

No.	Jenis RTH Publik	2018	2019	2020	2021	2022
3	RTH telaga/ waduk/ boezem	192,08	196,29	198,23	198,23	198,23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.548,59	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.570,33
6	RTH hutan	55,81	57,55	66,03	66,03	66,03
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.646,10	1.672,75	1.672,75	1.672,75	1.673,65
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		**7.287,48**	**7.345,82**	**7.356,96**	**7.358,87**	**7.359,77**
Luas Kota Surabaya		**33.451**	**33.451**	**33.451**	**33.451**	**33.451**
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		**21,79**	**21,96**	**21,99**	**22,00**	**22,00**

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih perlu untuk dimanfaatkan atau difungsikan secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*.

Keberadaan industri dan tempat usaha yang semakin pesat di kota Surabaya berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, saluran drainase, polusi udara, dan kebisingan. Di kota Surabaya kasus dugaan pencemaran lingkungan masih terjadi. Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2018 adalah sebanyak 66 kasus dan sebanyak 66 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2019, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 59 kasus, dan sebanyak 59 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 43 kasus, dan sebanyak 43 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2021, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 51 kasus, dan sebanyak 51 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah

kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 44 kasus, dan sebanyak 44 kasus dapat ditangani.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.101
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah permasalahan lingkungan	66	59	43	51	44
2	Jumlah permasalahan lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota	66	59	43	51	44
3	Persentase permasalahan lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Berikut merupakan ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan di kota Surabaya. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa dengan terus meningkatnya ketaatan/kepatuhan para pengusaha terhadap aspek lingkungan serta meningkatnya kualitas sistem pengawasan dampak lingkungan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.102
Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	200	200	200	200	254
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis	200	200	180	190	129

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, *mall*, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari

kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penaatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perizinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian dan sistem kontrol bersama.

Pembuangan limbah domestik dan industri di sepanjang Kali Surabaya mengakibatkan kondisi fisik sungai mengalami pencemaran yang akan semakin berat. Keberadaan Kali Surabaya penting bagi keberlangsungan perekonomian dan kelangsungan hidup bagi masyarakat, industri, dan niaga di sekitar bantaran kali. Selain itu Kali Surabaya menjadi sumber air baku PDAM Surabaya dan konsumen PDAM Surabaya bergantung pada kondisi kualitas air Kali Surabaya. Menurunnya kualitas air baku Kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air, panjang pipa PDAM di Kota Surabaya adalah 5.812,62 km^2.

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun pada tahun 2018 terdapat surat edaran Menteri LHK Nomor

5.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024 dimana komponen IKTL digantikan dengan komponen IKL (Indeks Kualitas Lahan).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 67,78 masih menggunakan metode lama. Sedangkan nilai IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang telah menggunakan metode baru, masing-masing sebesar 68,29 dan 71,43. Sedangkan di tahun 2022, menggunakan metode baru, IKLH Kota Surabaya mencapai 55,97, lebih rendah dari capaian IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 69,92 dan 72,42. Selengkapnya nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.103
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021		2022	
IKLH Kota Surabaya	61,34	61,43	60,96	67,78	N/A*	67,78	55,97*
IKLH Provinsi Jawa Timur	66,36	67,10	67,04	-	68,29*	-	69,92*
IKLH Nasional	71,67	66,55	70,27	-	71,43*	-	72,42*

*Sumber data: DLH Surabaya, 2023. *) hasil perhitungan KLHK metode baru*

Kota Surabaya menambahkan indikator persampahan dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup sehingga menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). Berikut merupakan pencapaian IKLHS Kota Surabaya pada tahun 2018 – 2022.

Tabel II.104
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Indeks	2018	2019	2020	2021		2022	
Indeks Kualitas Air (IKA)	57,62	57,68	56,05	58,18	N/A*	57,91	49,15*
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,26	90,30	90,35	90,28	74,38*	90,55	75,76*
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	42,44	42,45	42,63	42,63	22,56*	42,64	31,07*
Indeks Persampahan	74,98	75,09	75,84	76,62	N/A	82,91	N/A
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	64,91	64,97	65,08	65,71	N/A	70,82	N/A

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2023. *) hasil perhitungan KLHK metode baru.*

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan;
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2018 sampai 2022, dimana pada tahun 2018 IKLHS sebesar 64,91, dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 IKLHS telah mencapai 70,82. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungannya, baik melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang bagus serta manajemen pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau dan pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan yang sangat baik. Pada tahun 2022, IKLHS mengalami kenaikan yang signifikan karena salah satu unsur pembentuk nilai KLHS yaitu indeks persampahan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan beroperasinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara

optimal terutama di TPA Benowo meliputi PSEL, *Buffer zone*, IPAL, dan penutupan membrane pada area *landfill*.

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

Tabel II.105
Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2018 – 2022

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PJU LED	Unit	13.499	19.589	20.598	20.598	96.252
Solar cell di Sekolah Adiwiyata	Unit	28	29	29	29	29
Solar cell di gedung pemerintah	Lokasi	19	28	35	40	40
Kincir Angin	Unit	8	8	8	8	8
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	18	18	4	8	21
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	24	59	71	77	77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk melanjutkan upaya konversi dan konservasi energi dengan mendorong pihak swasta atau masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi. Untuk pengusahaan konservasi energi oleh kegiatan/usaha swasta sudah mulai didorong mulai tahun 2017, dengan 11 kegiatan/usaha yang diaudit di tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2021, setiap tahunnya menambahkan 11 kegiatan/usaha yang telah diaudit penerapan konservasi energinya. Tentunya hal ini masih jauh dari pengawasan yang menyeluruh dikarenakan jumlah kegiatan/usaha yang masih sedikit. Sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkat.

Namun, dalam hal pemanfaatan energi terbarukan bagi sektor swasta masih belum mempunyai payung hukum. Karena itu, perlu diciptakan instrumen pendukung di antaranya berupa peraturan daerah dalam rangka mendorong percepatan dimulainya upaya pemanfaatan energi terbarukan ini oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.106
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2018	2.348.598	2.020.291
2019	2.355.489	2.108.476
2020	2.188.680	2.147.337
2021	2.217.423	2.181.345

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2022	2.251.947	2.204.168

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2023

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.107
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelahiran (berdasarkan data SIAK)	70.502	45.248	51.368	75.253	40.012
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	91.006	45.248	51.368	75.253	40.012
3	Jumlah kematian (berdasarkan data SIAK)	20.504	45.248	23.212	42.717	30.960
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	20.504	45.248	23.212	42.717	30.960

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Berdasarkan tabel penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) di atas, menunjukkan bahwa seluruh penduduk lahir berdasarkan data SIAK memperoleh akta kelahiran, dimana anak yang dilahirkan di seluruh rumah sakit, puskesmas, dan beberapa bidan di Kota Surabaya (yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) akan otomatis mendapatkan akta kelahiran. Untuk anak yang dilahirkan di luar kota Surabaya dan selain rumah sakit, puskesmas, dan bidan di kota Surabaya, maka akta kelahiran anak tersebut diurus secara pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik di Siola dan mobil pelayanan keliling oleh dispendukcapil yang beroperasi di beberapa titik lokasi, antara lain: di RT, RW, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan taman kota (tempat publik). Hal yang sama juga berlaku pada penduduk yang meninggal, di mana penduduk meninggal dapat diurus di kantor kelurahan/kecamatan.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2019 adalah 8.483 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 829.725 jiwa. Selanjutnya

kepemilikan KIA sampai tahun 2020 yaitu 197.486 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 752.020 jiwa. Kemudian pada tahun 2021 kepemilikan KIA bertambah menjadi 368.802 jiwa, dari 768.210 jiwa (jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun). Sedangkan di tahun 2022, kepemilikan KIA sebesar 419.071 jiwa, atau sebesar 56,94 persen dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun, yakni 735.900 jiwa.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran.

2.1.3.2.7.1 Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2017 sebesar 66.425 atau sebesar 12,97 persen dari jumlah PUS 512.066. Di tahun 2018, jumlah akseptor KB sebesar 67.972 atau sebesar 13,23 persen dari jumlah PUS sebesar 513.412. Pada tahun 2019, jumlah akseptor KB meningkat sebesar 426.024 atau 80,94 persen. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah akseptor KB juga meningkat sebesar 434.983 atau 82,37 persen. Pada tahun 2021, jumlah akseptor KB sebesar 429.350 atau 81,33 persen. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.108
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	513.412	526.329	528.086	527.912	325.405
2	Jumlah Akseptor KB	67.972	426.024	434.983	429.350	309.150
3	Rasio Akseptor KB (persen)	13,23	80,94	82,37	81,33	95

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Adapun angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 415.241 pasangan, Tahun 2017 sebanyak 416.634 pasangan, Tahun 2018 sebanyak 412.170 pasangan, Tahun 2019 sebanyak 416.205 pasangan, dan Tahun 2020 sebanyak

434.983 pasangan. Meski fluktuatif namun terjadi peningkatan yang cukup besar dari tahun 2019 ke tahun 2020. Data mCPR di tahun 2021 adalah sebanyak 435.479 pasangan, sedangkan untuk tahun 2022 angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) adalah 303.968 pasangan.

Sedangkan angka *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2017 mencapai 13,62; Tahun 2018 mencapai 21,98; dan Tahun 2019 mencapai 19,88. Sedangkan data ASFR untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 juga belum dapat disajikan pada *web* resmi BPS Kota Surabaya.

2.1.3.2.7.2 Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.109
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	513.412	526.329	528.086	527.912	325.405
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	412.170	426.024	434.983	429.350	306.896
3	Cakupan Peserta KB Aktif	80,28	80,94	82,37	81,33	94,31

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2023

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2017 terdapat 512.066 PUS, tahun 2018 terdapat 513.412 PUS, tahun 2019 terdapat 526.329 PUS, dan tahun 2020 terdapat 528.086 dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 434.983. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 527.912 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 429.350. Untuk tahun 2022 terdapat 325.405 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 306.896.

Program KB bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan terciptanya keluarga sejahtera. Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari tingkat kepesertaan masyarakat pada program KB. Jika dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi, Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (*unmet need*), dan Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dimana banyak fasilitas kesehatan yang membatasi layanannya sekaligus banyak peserta KB yang membatasi interaksi dengan orang lain.

Tabel II.110
Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	13.180	1.271	712	937	627
2	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB	101.555	100.576	93.103	98.562	69.610
3	Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	334	15	12	14	204

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2023

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.111
***Total Fertility Rate* (TFR) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total Fertility Rate (TFR)	1,731	1,729	1,705	N/A	1,831

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2023 (diolah). Catatan: Tahun 2019 merupakan data olahan Susenas.

2.1.3.2.7.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2017, sebanyak 724 BKB, 209 BKR, dan 42 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2018, terdapat 1000 BKB, 232 BKR, dan 97 BKL yang aktif melakukan kegiatan, tahun 2019 terdapat 1000 BKB, 233 BKR dan 100 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Sedangkan sampai dengan tahun 2020 terdapat 1000 BKB yang aktif melakukan kegiatan. Untuk tahun 2021 terdapat 675 BKB, 50 BKR, dan 150 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.7.4 Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga. Selain itu, kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Pada tahun 2017, dari 1.017 PMKS yang dilatih,

695 orang atau sebesar 68,34% di antaranya berproduksi. Sedangkan dari 695 orang yang telah berproduksi sebanyak 508 orang atau sebesar 73,09 % yang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta. Sedangkan di tahun 2018, dari 464 orang yang dibina, 335 orang diantaranya telah berproduksi dan sebanyak 277 orang telah menghasilkan omzet di atas 1 juta atau sebesar 82,68%. Tahun 2019 terdapat 190 PMKS yang dilatih dan dalam masa belajar untuk melakukan produksi, dan pada tahun 2020 terdapat 23 yang didampingi. Pada tahun 2021 akan dilaksanakan pendampingan pada 50 orang, dan pada tahun 2022 terdapat 14 orang yang didampingi. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.112
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	464	190	23	50	638

*Sumber: * Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018-2021*
***Dinas Sosial, 2022*

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel di atas. Kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki total 15 terminal angkutan darat yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan/atau angkutan kota (angkot). Jumlah angkutan darat di Kota Surabaya sendiri terus menurun sejak tahun 2018 menjadi 8.001 kendaraan, berlanjut ke tahun 2019, menjadi 7.349 kendaraan, lalu tahun 2020 menjadi 1.999 kendaraan, kemudian tahun 2021 ini menjadi 1.870 kendaraan, dan tahun 2022 menjadi 1.210 kendaraan. Dalam rangka peningkatkan

pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi. Detil jumlah terminal dan angkutan darat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.113
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	2	2	2	2	2
2	Jumlah Terminal Tipe B	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Tipe C	11	11	11	11	13
4	Jumlah Angkutan Darat	8.001	7.349	1.999	1.870	1.051

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian izin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian izin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.114
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan	3.341	2435	3.257	2.869	563
3	Rasio Izin Trayek	0,0011	0,00077	0,00109	0,00096	0,00019

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Pada tahun 2018, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.341 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.094.732 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,0011. Pada tahun 2019, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.435 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.159.481 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00077. Sedangkan pada tahun 2020, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.257 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.730 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00109. Pada tahun 2021, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.869 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.952. Sedangkan pada tahun 2022 izin

trayek yang dikeluarkan sebanyak 563 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.987.863, sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00019.

Tren penurunan jumlah izin trayek yang dikeluarkan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan angkutan umum yang sudah berakhir masa berlaku pajaknya tidak bisa balik nama kendaraan, dikarenakan persyaratan wajib berbadan usaha. Penyebab berikutnya adalah menurunnya jumlah penumpang angkutan umum setiap tahun diakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi serta persaingan dengan kendaraan berbasis aplikasi sehingga membuat pendapatan pemilik dan pengemudi angkutan hanya mencukupi untuk pemenuhan bahan bakar, sehingga pemilik tidak mampu melakukan perawatan kendaraan yang berakibat pada angkutan umum yang tidak laik jalan. Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek disebabkan juga oleh banyaknya kendaraan taksi dan angkot yang berubah menjadi plat hitam, yakni sebanyak 16 dan 23 kendaraan angkutan umum pada tahun 2018 dan 2019 secara berurutan.

Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek, Pemerintah Kota Surabaya selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan memperpendek waktu tunggu kendaraan umum di terminal atau halte. Rata-rata waktu tunggu angkutan umum di Kota Surabaya dari tahun ke tahun semakin singkat. Pada tahun 2018, rata-rata waktu tunggu untuk Angkutan Kota (angkot) adalah 15,24 menit, pada tahun 2019 rata-rata waktu tunggunya menjadi 14,14 menit, pada tahun 2020 turun lagi menjadi 12,61 menit, pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 12,61 menit, dan pada tahun 2022 rata-rata waktu tunggu angkutan kota (angkot) adalah 12,71 menit. Sedangkan rata-rata waktu tunggu untuk bus pada tahun 2018 adalah 21 menit, kemudian turun menjadi 19,82 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 13 menit, begitu juga pada tahun 2021 menjadi 13 menit, dan pada tahun 2022 rata-rata waktu tunggu untuk bus adalah 18,95 menit. Rata-rata waktu tunggu kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.115
Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata waktu tunggu angkutan kota (menit)	15,24	14,14	12,61	12,61	12,71
Rata-rata waktu tunggu bus (menit)	21,00	19,82	13,00	13	18,95

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan pada pengguna angkutan umum, Pemerintah Kota Surabaya juga memperhatikan *load factor* angkutan umum. *Load factor* adalah rasio jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk per satuan waktu tertentu. *Load factor* menggambarkan kebutuhan/*demand* dibandingkan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi angka *load factor* kendaraan umum maka semakin efisien pula biaya operasionalnya. Pada tahun 2018, rata-rata *load factor* angkutan kota (angkot) di Kota Surabaya adalah sebesar 29,60, kemudian naik menjadi 34,37 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai *load factor* angkutan kota mengalami penurunan yang cukup siginifikan akibat menurunnya jumlah penumpang/pengguna angkutan umum karena penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Namun pada tahun 2021 nilai *load factor* angkutan kota mengalami kenaikan menjadi 33,02, begitu juga pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 33,92.

Begitupun dengan nilai *load factor* bus, yang menunjukkan tren serupa. Load factor bus pada tahun 2018 berada pada angka 36,14, kemudian naik menjadi 42,06 pada tahun 2019, turun menjadi 40,58 pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 44,65. Jika dibandingkan dengan penurunan *load factor* angkutan kota, penurunan *load factor* bus di tahun 2020 relatif lebih kecil. Sedangkan pada tahun 2022 nilai *load factor* bus adalah 57,45. Data terkait *load factor* kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.116
Rata-Rata *Load Factor* Angkutan Umum Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Load factor angkutan kota (persen)	29,6	34,37	29,69	33,02	33,92
Load factor bus (persen)	36,1	42,06	40,58	44,65	57,45

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji Kir yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2018 sebanyak 150.494 kendaraan, sementara sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 149.446 kendaraan. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan umum yang lulus

uji sebanyak 141.663 kendaraan. Pada tahun 2021, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 135.905 kendaraan. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 132.719 kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.117
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	46.989	47.605	45.582	43.135	43.870
2	Jumlah kendaraan wajib uji kir	155.450	157.768	159.116	151.064	143.605
3	Jumlah kendaraan yang diuji kir	158.619	158.249	147.708	142.532	136.735
4	Jumlah kendaraan lulus uji kir	150.494	149.446	141.663	135.905	132.719

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana sampai dengan tahun 2017 berjumlah 13.974 unit. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.337 unit. Sampai dengan tahun 2019, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.915 unit, sedangkan sampai dengan tahun 2020 pemasangan rambu mencapai 17.439 unit. Pada tahun 2021, pemasangan rambu meningkat menjadi 18.140 unit. Sampai dengan tahun 2022, pemasangan rambu meningkat menjadi 19.261 unit. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II.118
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	16.337	16.915	17.439	18.140	19.261

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Selain memberikan kenyamanan dan keselamatan transportasi darat Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemasangan dan pemeliharaan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) yang dapat digunakan oleh nelayan-

nelayan di pesisir Kota Surabaya sebagai pertimbangan ketika akan berlayar. Peralatan tersebut telah bekerja sama dengan BMKG untuk memberikan data cuaca secara riil yang bertujuan untuk menunjang keselamatan kepada nelayan. Pemasangan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) telah dilaksanakan pada tahun 2018 dipasang sejumlah 3 unit dan tahun 2019 sejumlah 3 unit lagi sehingga menjadi 6 unit. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keselamatan kepada nelayan agar tetap menjaga keselamatan ketika berlayar.

Tabel II.119
Pemasangan *Weather Information Display* Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pemasangan *Weather Information Display*	3	6	6	6	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keselamatan perlintasan sebidang karena kondisi rel kereta api di Kota Surabaya akan menjadi jalur ganda (*Double Track*) secara keseluruhan yang akan meningkatkan frekuensi jadwal dari kereta api. Tahun 2018, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemeliharaan dan operasional perlintasan sebidang pada lokasi Margorejo, Tandes (1 pos), dan A. Yani - Royal Plaza. Pada tahun 2019, bertambah 2 lokasi perlintasan yaitu Ketintang dan Singapur. Pada tahun 2022 bertambah 1 lokasi lagi yaitu Pakal. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keselamatan kepada operator perlintasan sebidang serta masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan di perlintasan sebidang.

Tabel II.120
Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Lokasi Perlintasan Sebidang yang dioperasikan	3	5	5	5	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap SKPD. Pada tahun 2018 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah

sebanyak 29 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 1.542 unit. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.653 unit. Demikian juga pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower, dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.753 unit. Sejak tahun 2019 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower, dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.838 unit. Sedangkan pada tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower, dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.938 unit. Selain menggunakan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II.121
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Menara (Tower) (unit)	29	0	0	0	0
Alat Komunikasi (HT)	1.542	2.653	2.753	2.838	2.938

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Pemerintah Kota Surabaya sejak awal telah memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat *http://www.surabaya.go.id*. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain menggunakan website resmi milik Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan aplikasi/sistem pelayanan perijinan sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan.

Sedangkan pada tahun 2018 hingga 2022, setiap tahunnya terdapat 10 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perijinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.122
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Daring Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	10	10	10	10	10
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melaui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.1 Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2018 jumlah anggota koperasi mencapai 266.396 Orang. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 271.267 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah anggota koperasi turun menjadi 221.968 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan menjadi 256.946 orang. Pada tahun 2022 anggota koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 153.809 dengan rincian jenis kelamin Laki-laki sejumlah 88.038 orang dan Perempuan sejumlah

65.771 orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.123
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota koperasi	266.396	271.267	221.968	256.946	153.809

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2023

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2018 jumlah koperasi meningkat menjadi 1.750 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.487 koperasi. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah koperasi kembali meningkat sebanyak 1.784 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.521 koperasi, sedangkan pada tahun 2020, jumlah koperasi kembali mengalami peningkatan menjadi 1.817 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.554 koperasi. Untuk tahun 2021 jumlah koperasi meningkat sebanyak 1.834 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.571 koperasi. Pada tahun 2022 jumlah koperasi meningkat menjadi 2.002 koperasi, namun koperasi yang aktif mengalami penurunan menjadi 598 koperasi. Secara rinci, koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.124
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi	1.750	1.784	1.817	1.834	2.002
2	Jumlah koperasi aktif	1.487	1.521	1.554	1.571	598
3	Persen koperasi aktif	84,97	85,26	85,52	85,66	29,87

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2023

Sedangkan jumlah koperasi per jenis usaha di Kota Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.125
Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Angkutan Darat	13	13	13	13	17
Jasa Angkutan Laut	1	1	1	1	0
Jasa Lain-Lain	87	90	91	105	681
KJKS	23	23	23	23	18

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kopinkra	7	7	7	7	7
Kopkar	325	326	327	328	377
Kopma	21	21	21	21	22
Koppas	14	21	24	24	15
Koppontren	22	22	22	22	23
Kopwan	171	171	171	171	142
KPRI	185	185	185	186	183
KSP	106	107	108	110	114
KSU	617	639	666	665	238
KUD	5	5	5	5	5
Pemuda	4	4	4	4	6
Perikanan	4	4	4	4	0
Pertanian	4	4	4	4	5
PK 5	33	33	33	33	26
Primkopabri	12	12	12	12	12
Primkopad	18	18	18	18	18
Primkopal	17	17	17	17	17
Primkopau	1	1	1	1	1
Primkoppol	11	11	11	11	11
Primkoptama	30	30	30	30	30
Profesi	18	18	18	18	26
Sekunder	1	1	1	1	1
Kelompok Koperasi	1	-	-	-	-
Nelayan	-	-	-	-	5
Tenaga Kerja Bongkar	-	-	-	-	2
TOTAL	**1.751**	**1.784**	**1.817**	**1.834**	**2.002**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2023

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 volume usaha koperasi mencapai 2.092 milyar dari 1.487 koperasi, dan pada tahun 2019 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2.128 milyar dari 1.521 koperasi. Sedangkan pada tahun 2020 volume usaha koperasi turun menjadi 1.864 milyar dari 1.554 koperasi dan pada tahun 2021 volume usaha koperasi meningkat menjadi 2.147 milyar dari 1.571 koperasi. Pada tahun 2022 volume usaha koperasi turun menjadi 1.412 milyar karena jumlah koperasi aktif RAT mengalami

penurunan menjadi 598 koperasi namun secara rasio meningkat menjadi 2,36. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.126
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi Aktif	1.487	1.521	1.554	1.571	598
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	2.092	2.128	1.864	2.147	1.412
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif	1,41	1,40	1,20	1,37	2,36

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2023

2.1.3.2.10.2 Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Sampai dengan tahun 2022 jumlah UMKM tercatat sebanyak 26.854 di mana sebanyak 22.924 merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.127
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah seluruh UMKM	26.854	26.854	26.854	26.854	26.854
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	22.924	22.924	22.924	22.924	22.924
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2023

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap 5.363 pelaku UMKM dengan berbagai macam intervensi di antaranya pendampingan pengurusan merek 125 UMKM, pendampingan sertifikasi halal 100 UMKM, pelatihan 62 UMKM, fasilitasi kemitraan/kerjasama 136 UMKM, fasilitasi pemasaran berupa pameran/bazar/gelar produk 2.188 UMKM, dan pemasaran secara *online* melalui e-Peken 2.752 UMKM.

Pembinaan dan pengembangan berdasarkan intervensi yang dilakukan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.128
Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2018 – 2022

Intervensi	2018	2019	2020	2021	2022
Merek	118	250	140	200	125
Halal	105	200	70	165	100
Pelatihan UMKM	448	769	88	505	62
Fasilitas Kemitraan/Kerjasama	156	45	187	260	136
Pameran/Bazar/Gelar Produk	897	893	9	346	2.188
Pemasaran Online Peken	-	-	-	-	2.752
Total	**1.724**	**2.157**	**494**	**1.476**	**5.363**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2023

Dengan upaya tersebut di atas maka sebanyak 5.363 UMKM binaan yang naik kelas sampai dengan akhir Desember 2022 omsetnya mencapai Rp 59.172.648.579. Detil upaya peningkatan UMKM naik kelas tersebut dilakukan dengan:

1. Penguatan produk yang dilakukan melalui fasilitasi pengurusan merek dan sertifikat halal, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas UMKM atas kualitas sebuah produk yang dihasilkan;
2. Peningkatan manajemen kelembagaan melalui pelatihan, yang akan meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan dalam mengelola dan mengembangkan UMKM;
3. Peningkatan permodalan dengan fasilitasi kemitraan/ kerjasama;
4. Peningkatan pemasaran dengan pameran/ bazar/ gelar produk dan pemasaran *online* e-Peken.

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.11.1 PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun

penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya.

Tabel II.129
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Proyek PMDN	251	119	541	1.764	63.361
Jumlah Proyek PMA	42	3	124	233	339
Total	**293**	**122**	**655**	**1.997**	**63.700**

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Penanaman Modal di Kota Surabaya menunjukkan bahwa investasi di Kota Surabaya pada tahun 2018 tercatat sejumlah 293 proyek. Tahun 2019 tercatat menurun menjadi 122 proyek, sedangkan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 655 proyek, dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 1.997 proyek. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 3.008 proyek.

Sedangkan untuk nilai investasi PMA dan PMDN, pada tahun 2018 sebesar Rp4.740,23 Miliar, kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp19.219,90 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp22.152,03 Miliar. Di tahun 2021 nilai investasi PMA dan PMDN sebesar Rp29.037,08 Miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 34.897,81 Miliar.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perizinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.130
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persetujuan (USD Juta)	774,57	379,90	-	-	-
1.1	Jumlah Proyek	293	122	665	1.997	63.700
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	10.379,22	5.689,61	384,95	-	-
2	Realisasi (USD Juta)	53,28	1.281,32	-	-	-

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2.1	Jumlah Proyek	122	379	588	1.844	63.700
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	5.690,23	19.219,90	22.152,03	29.037,08	34.897,81

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, di mana rekap tabel dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.131
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PMA/PMDN	122	379	588	1.844	63.700
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	10.607	37.040	8.500	19.523	207.921
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	86,94	97,73	14,46	10,59	3,18

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.607 orang dari 122 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 86,94. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 123.705 orang dari 6081 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 20,34. Untuk tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 19.523 orang dari 1.844 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 10,59. Tahn 2022 terdapat peningkata baik jumlah proyek maupun jumlah tenaga kerja yang terserap masing-msing 63.700 proyek dan 207.921 tenaga kerja dengan rasio 3,18.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka *(outdoor)* maupun tertutup *(indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 393 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Pada tahun 2018, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota mengalami peningkatan menjadi 479 lapangan olahraga. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 630 lapangan olahraga. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 665 lapangan olahraga. Untuk tahun 2021, jumlah lapangan olahraga tersebut masih sejumlah 665 lapangan olahraga. Kemudian pada tahun 2022 jumlah lapangan olahraga menurun menjadi 615 lapangan olahraga. Rincian jumlah lapangan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.132
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah lapangan olahraga	479	630	665	665	615
2	Jumlah penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 6.461	1 : 5.015	1:4.467	1:4.467	1:4.858

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2023

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk mewujudkan pemerataan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan

masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus.

Pada tahun 2016, nilai persentasi atlet yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95%, dari 847 orang atlet olahraga yang dibina sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional, nasional maupun internasional. Sementara pada tahun 2017, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 81,24% terdapat 581 orang atlet yang dibina dan sejumlah 472 orang di antaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sampai dengan tahun 2018, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 92,11% terdapat 2307 orang atlet yang dibina dan sejumlah 2125 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 98,04% terdapat 2,852 orang atlet yang dibina dan sejumlah 2,796 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya pada tahun 2020, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,32%. Pada tahun 2021 tidak ada agenda kejuaraan olahraga dikarenakan pendemi Covid-19.

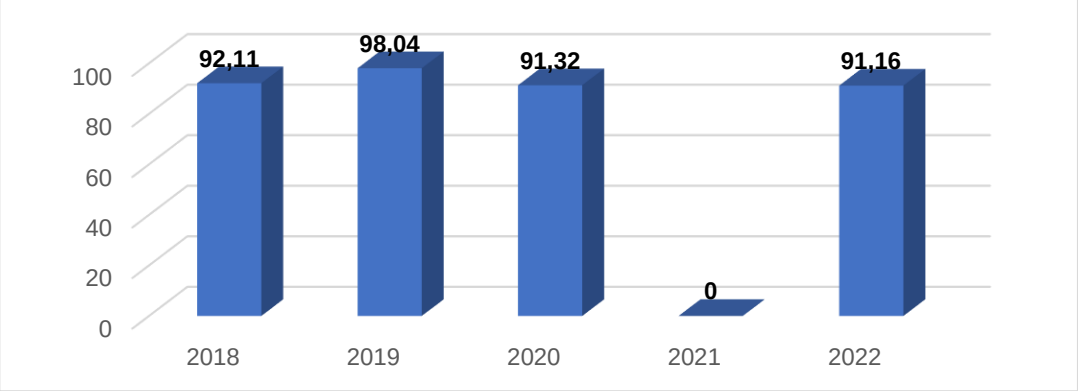

Gambar II.17 Persentase Atlet Berprestasi

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2023

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitannya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja.

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV

AIDS). Pada tahun 2017 terdapat sejumlah 787 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara sampai dengan tahun 2018 terdapat sejumlah 1.244 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan sampai dengan tahun 2019 terdapat sejumlah 1.732 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah 799 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk tahun 2021 terdapat sejumlah 1.000 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2022 terdapat tambahan 170 orang pemuda yang menjadi kader anti kenakalan remaja.

2.1.3.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Statistik Sektoral Kota Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

Tabel II.133
Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Dokumen	2018	2019	2020	2021	2022
1.	PDRB Kota Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	PDRB Kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada	-
3.	Statistik Sektoral Kota Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2023

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di Perangkat Daerah masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing Perangkat Daerah, seperti Dinas Sosial terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Sekretariat Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 maupun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

2.1.3.2.14 Persandian

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Persandian dilaksanakan utamanya untuk menjamin keamanan data dan sistem informasi yang mendukung pelayanan publik, serta seluruh proses pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya secara berkala melakukan pengawasan sistem keamanan informasi untuk melindungi sistem informasi yang ada.

Tabel II.134
Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2022

No.	Uraian	2021	2022
1	Jumlah serangan	56	240
2	Jumlah penanganan serangan	56	240
3	Persentase penanganan serangan	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Dalam pelaksanaannya sistem keamanan informasi Kota Surabaya dapat menangani serangan *cyber* dengan perangkat teknologi yang dimiliki, namun seiring perkembangan teknologi sistem keamanan informasi perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan infomasi.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Di sisi lain,

banyaknya penyelenggaran festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.135
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	984	805	520	4	74

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Tahun 2018, festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 984 festival, dan pada tahun 2019, jumlah festival seni dan budaya menurun menjadi 805 kali karena beberapa festival melakukan kolaborasi menjadi satu festival yang lebih besar. Sedangkan di tahun 2020 penyelenggaraan festival seni dan budaya berkurang drastis menjadi hanya 502 kali. Kemudian pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi hanya 4 festival seni dan budaya yang diselenggarakan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Dan pada tahun 2022 penyelenggaraan festival seni budaya meningkat menjadi 74 kali.

2.1.3.2.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

2.1.3.2.15.3 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018 tidak ada penambahan cagar budaya

yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Sedangkan pada tahun 2019, ada penambahan Bangunan Cagar Budaya sebanyak 4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya pada tahun 2019 menjadi 277 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Selanjutnya pada tahun 2020, Situs dan Kawasan Cagar Budaya menjadi 288 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Pada tahun 2021, terdapat penambahan 1 Bangunan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sampai dengan tahun 2021 sebanyak 289 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 289 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II.136
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	273	277	288	289	289
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	273	277	288	289	289
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Karya seni tidak sebatas fenomena keindahan saja, tetapi juga adalah sebuah ekspresi, tepatnya objektifikasi manusia pada ruang dan waktu dimana ia berada. Segala bentuk hasil cipta manusia adalah fakta budaya yang seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat luas melalui suatu pagelaran budaya. Kelompok seni yang terdaftar sebanyak 498 pada tahun 2016, yang selanjutnya dilatih dan dibimbing hingga kelompok seni tersebut layak tampil di depan publik. Kelompok seni layak tampil dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya perkembangan di bidang seni dan minat seni masyarakat di Kota Surabaya.

Adapun kelompok seni yang telah dibina dan layak tampil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.137
Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelompok seni layak tampil	287	399	406	415	423
Jumlah kelompok seni belum layak tampil	211	99	92	92	292
Jumlah kelompok seni binaan	498	498	498	507	715

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2023

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/Atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata; menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM; menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM; menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota; melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/l*eaflet*, spanduk, *banner, billboard*, media cetak dan elektronik; melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan; melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Perpustakaan di Kota Surabaya milik Pemerintah Kota sampai dengan tahun 2022 berjumlah sama yaitu 2 perpustakaan. Selain itu terdapat 61 Perpustakaan milik non Pemda yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Data

yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.138
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2	2	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	61	61	61	61	65

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Perpustakaan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung layanan baca sebanyak 6.545.199 orang. Pada tahun 2019, jumlah ini meningkat menjadi 6.715.104 pengunjung dan seluruhnya meminjam buku. Jumlah pengunjung terus meningkat hingga tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, pengunjung perpustakaan turun menjadi 162.050. Pada tahun 2022 jumlah pengunjung meningkat menjadi 455.619 orang. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Peningkatan kunjungan tersebut tidak lepas dari terus bertambahnya koleksi buku yang dimiliki layanan baca milik Pemerintah Kota, yakni sebanyak 448.840 judul dengan 541.781 eksemplar sampai dengan tahun 2022. Jumlah koleksi buku dan kunjungan di layanan baca milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.139
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koleksi buku (eksemplar)	524.941	529.151	533.361	537.571	541.781
Kunjungan layanan baca per bulan (kali)	6.545.199	6.715.104	7.718.590	162.050	455.619

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Mengacu kepada sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, meningkatkan kualitas pembangunan manusia dilakukan salah satunya dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Dan pada tahun 2022,

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan minat dan budaya baca melalui peningkatan kualitas dan kuantitas even literasi, di antaranya Bercerita Surabaya, kegiatan mendongeng siswa SD, kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

Barometer keberhasilan perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat guna, hal ini sangat dipengaruhi oleh prosedur prosedur didalam perpustakaan tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Adapun hasil survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 adalah 97,5. Survey pelayanan kearsipan ini dilaksanakan secara langsung kepada responden melalu *Google Form.*

Gambar II.18

Nilai Terhadap Pelayanan dan Kemampuan Petugas TBM/Perpusatakaan dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng

2.1.3.2.17 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.140
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	899	641	580	583	78
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	284	432	531	583	78
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	43,89	67,39	91,55	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Pada tahun 2018 sebanyak 284 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 432 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Pada tahun 2020, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 531 lembaga. Sedangkan, pada tahun 2021, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menjadi 583 lembaga dan prosentasenya meningkat menjadi 100 persen. Untuk tahun 2022, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata

kearsipan sesuai ketentuan menjadi 78 lembaga dan persentasenya menjadi 100 persen.

Peningkatan yang signifikan didukung oleh adanya pendampingan dan pembinaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu juga didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan. Pada tahun 2020, dilakukan pembinaan sistem kearsipan kepada 84 SDN di Kota Surabaya.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2017, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 473 arsip. Dan di tahun 2018, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 876 arsip. Pada tahun 2019, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 352 arsip. Selanjutnya, pada tahun 2020, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 537 arsip dan pada tahun 2021, jumlah arsip yang diakuisisi sebanyak 175 arsip. Dengan demikian, persentase arsip diakuisi sebesar 139,88% terhadap target 1.725 arsip diakusisi.

2.1.3.3 Urusan Pilihan Pemerintahan

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada kedua tabel di bawah ini.

Tabel II.141
Perkembangan Nilai Tambah Sektor Usaha Kelautan dan Perikanan
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total Nilai Tambah PDRB (miliar rupiah)	538.845,46	580.488,53	554.509,46	590.227,97	655.616,22
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan (miliar rupiah)	913,36	928,40	889,33	917,60	982,81

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB (persen)	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sepanjang tahun 2018 hingga 2022 relatif stabil pada kisaran 0,15-0,17 persen, meski cenderung menurun kontribusinya. Menurunnya kontribusi sub kategori perikanan tersebut dikarenakan peningkatan nilai tambah PDRB lebih besar daripada peningkatan nilai tambah sub kategori perikanan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.142
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perikanan Laut	8.151,50	7.165,30	8.057,63	7.805,50	8057,49
2.	Perikanan Tambak	8.291,32	8.504,92	8.442,47	9.054.271,20	9349,56
Jumlah		**16.576,83**	**15.670,22**	**16.500,11**	**9.062.076,7**	**17.407,07**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat untuk jumlah produksi perikanan laut dan tambak mengalami kenaikan di tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan, fasilitasi sarana dan pemasaran bagi pembudidaya ikan.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018, kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya sebanyak 29.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.728.194 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 27.575.125 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 28.827.160 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.901.671 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 26.925.489 wisatawan. Kemudian pada tahun 2020, adanya pandemi virus Covid-19, membuat kunjungan wisatawan menurun drastis

menjadi sebanyak 10.681.318 kunjungan saja, dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 319.082 dan wisatawan nusantara sebanyak 10.362.236 kunjungan. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan sebanyak 9.335.841 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 100.767 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 9.235.074 wisatawan. Sedangkan sampai tahun 2022, kunjungan wisatawan sebanyak 14.237.215 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 565.998 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 13.671.217 wisatawan. Dengan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Tabel II.143
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.728.194	1.901.671	319.082	100.767	565.998
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	27.575.125	26.925.489	10.362.236	9.235.074	13.671.217
Jumlah		**29.283.022**	**28.827.160**	**10.681.318**	**9.335.841**	**14.237.215**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2023

Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini menyebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya. Terjadi penurunan jumlah kunjungan di obyek wisata di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19 seperti yang dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.144
Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ODTW yang berhasil dikembangkan	6	10	11	13	13

Jumlah ODTW yang dikelola	13	14	14	15	15

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2023

Untuk menggerakan roda perekonomian Kota Surabaya, pemerintah terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu fokus pembangunan di Kota Surabaya yang memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki perananan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat mengentaskan kemiskinan.

Pembangunan sektor pariwisata di Kota Surabaya saat ini menggunakan pendekatan kepariwisataan inklusif. Hal itu dituangkan dalam sasaran pembangunan pariwisata tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Tujuan dari sasaran pembangunan pariwisata inklusif yakni meningkatkan usaha lokal dalam perindustrian pariwisata dan meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal.

Sinergitas dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* di Surabaya tentu memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan objek wisata. Kolaborasi antar *stakeholder* tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Hingga tahun 2022 terjadi peningkatan kesepakatan *stakeholder* di bidang pariwisata Surabaya yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga fokus untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif di Kota Surabaya. Terdapat beberapa program kegiatan yang disiapkan untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya pendampingan, fasilitasi kerjasama, fasilitasi sarana dan prasarana, branding dan promosi serta penyediaan ruang-ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Kota Surabaya seperti di Balai Pemuda, *coworking space* (koridor siola) serta di ruang-ruang terbuka kota yang tersebar di seluruh wilayah. *Event-event* pertunjukan hasil produk ekonomi kreatif juga rutin dilaksanakan untuk membantu branding dan promosi produk. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada, pada tahap awal Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan subsektor Film, Animasi, Video, Musik, *Fashion* serta Aplikasi untuk dikembangkan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga membantu memfasilitasi pelaku usaha kreatif untuk berkembang melalui kerja sama antar pihak baik itu pemerintah maupun swasta. Terdapat

beberapa kesepakatan di Bidang Pariwisata yang berhasil dilaksanakan, tentunya kerjasama ini sangat berdampak bagi pelaku usaha kreatif.

Tabel II.145
Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Akumulasi jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan	3	7	7	9	14

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2022

2.1.3.3.3 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.146
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total Nilai Tambah PDRB (miliar rupiah)	538.845,46	580.488,53	554.509,46	590.227,97	655.616,22
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian (miliar rupiah)	913,36	928,40	889,33	917,60	982,81
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB (persen)	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,16%, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan kota Surabaya serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

Tabel II.147
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	10.130,64	9.685,21	12.042,85	8.082,50	6.156,69
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.844	1.750	1.854,90	1.242,8	955,15
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,44	5,53	6,49	6,51	6,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2023

Pada tabel di bawah ini disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di kota Surabaya dari tahun 2018 – 2022.

Tabel II.148
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	10.130,64	9.685,21	12.042,85	8.076,12	8.156,78
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	400,49	109,54	323,86	162,219	154,95
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	471	528,10	307,33	N/A	37,48
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	352,24	718,40	855,91	202,8	151,55
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	3.182,5	2.083,50	3.781,61	6763,71	10.111,78

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2023

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2021 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu padi dan buah, sedangkan produksi sayur dan jagung mengalami penurunan. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana tabel di atas.

Untuk menjamin kualitas dan kesehatan hewan ternak, Pemerintah Kota Surabaya membuka pelayanan untuk pengobatan hewan ternak di Kota Surabaya. Data intervensi pengobatan dan vaksin hewan ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.149
Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ternak	27.390	47.516	91.609	23.870	21.753
Jumlah ternak diintervensi	25.039	43.332	81.398	21.128	19.509

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ternak yang diintervensi (%)	91,42	91,19	88,85	88,51	89,68

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.150
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Pasar Modern	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Supermarket	61	67	63	83	83	90
2	Minimarket	566	593	601	709	709	573
3	Departement Store	9	12	12	13	13	16
4	Mall/Plaza	33	34	34	34	34	38
Total		**669**	**669**	**728**	**839**	**839**	**717**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2023

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (Usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II.151
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1			-	-	Pasar Sememi
2					Gunung Anyar
3	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)				Pegirian
4		Pasar Penjaringansari (lanjutan)			Keputih

No	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
5					Burung Dolly Lanjutan
6					Jambangan
7					Gembong Asih
8	Pasar Kapasari				Penjaringan Sari
9	Pasar Kutisari	Pasar Kutisari (lanjutan)			Dupak
10		Pasar Burung Dolly			Kutisari
11		Pasar Loak Gembong (rehab)			Nambangan Lanjutan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2022

Tabel II.152
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2018 – 2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Selatan	17	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28	28
Total	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**

Sumber: Sekretariat Daerah, 2022

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan izin usaha perdagangan dan industri, yang baru dimulai di tahun 2021 menggunakan OSS-RBA terpusat, sehingga data jumlah usaha menjadi lebih akurat. Sebagaimana pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa jumlah usaha di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel II.153
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Perusahaan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perdagangan	13.887	9.336	13.562	691	1.054
2	Industri	185	139	253	208	356
Total		**14.072**	**9.475**	**13.815**	**899**	**1.410**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di

dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

Aktivitas perdagangan di Kota Surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor yang tercermin dari tabel berikut.

Tabel II.154
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Ekspor (juta USD)	18.120,06	17.278,97	17.278,97	22.780,68	20.735,89
Nilai Impor (juta USD)	17.368,05	15.382,23	15.382,23	19.568,40	21.466,32
Nilai Ekspor Bersih (juta USD)	752,02	1.896,74	1.896,74	3.212,27	-730,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan perkembangannya, neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2022 tercatat defisit sebesar US$ 730.431.357. Hal tersebut didorong oleh permintaan eksternal, yaitu sebesar US$ 20.735.891.937 dan impor sebesar US$ 21.466.323.294. Adanya peningkatan nilai realisasi impor Kota Surabaya tahun 2022 dapat merefleksikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Surabaya pada tahun 2022 lebih produktif dibanding pada tahun 2021 yang ditunjukkan dari permintaan para pelaku usaha akan input produksi yang menunjang kebutuhan produksi selama tahun 2022. Sedangkan lebih rendahnya realisasi ekspor di tahun 2022, dipengaruhi oleh perlambatan kinerja ekonomi mitra dagang Kota Surabaya akibat ancaman resesi global. Di samping itu, adanya kebijakan untuk tarif ekspor maupun bea keluar untuk komoditas tertentu turut menjadi faktor yang memengaruhi turunnya kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2022.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.155
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	A
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	70,03	73,47	75,13	75,34	80,31

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023

Pada tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP untuk Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 70,03 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya selalu mendapatkan predikat kinerja tingkat BB. Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan predikat kinerja tingkat A. Meski demikian, nilai evaluasi SAKIP terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada tahun 2021 sebanyak 361 jenis pelayanan, dan 215 jenis pelayanan atau 59,56 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP). Kemudian pada tahun 2022 terdapat sebanyak 215 jenis pelayanan dan 131 jenis pelayanan atau 60,93 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II.156
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	329	329	361	215
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	124	172	182	215	131
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP (%)	37,69	52,28	55,32	59,56	60,93

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Sedangkan untuk SOP yang dievaluasi tiap tahun bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.157
SOP Dievaluasi Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah SOP	868	868	868	906	1.446
SOP dievaluasi	76	561	10	68	123

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari keseluruhan 906 SOP yang ada, 40 di antaranya telah dilakukan evaluasi pada tahun 2017. Pada tahun 2018, terdapat 76 SOP lagi yang dievaluasi, sedangkan di tahun 2019 ada 561 SOP dievaluasi. Selanjutnya di tahun 2020 ada 10 SOP dievaluasi, di tahun 2021 ada 68 SOP yang dievaluasi, dan di tahun 2022 dari 1.446 SOP telah dilakukan evaluasi sebanyak 123 SOP.

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus melakukan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Sejak tahun 2018 hingga 2021, setiap tahunnya terdapat 12 produk hukum yang dievaluasi. Sementara itu, produk hukum baru yang diselesaikan tiap tahunnya mencapai 100% terhadap rancangan produk hukum di tahun tersebut. Jumlah keseluruhan produk hukum baru yang bisa diselesaikan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 sebanyak 540 produk hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.158
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah rancangan produk hukum	89	75	72	149	155
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	89	75	72	149	155
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Selain itu, pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi hal yang penting dalam rangka mendukung pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Rekap

kinerja BUMD Kota Surabaya sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.159
Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Nama BUMD	2018	2019	2020	2021	2022
PDAM Surya Sembada	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Pasar Surya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Rumah Potong Hewan	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP
PT BPR Surya Artha Utama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PT Surya Karsa Utama	WTP	WDP	WDP	TMP	N/A

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya yang kinerjanya belum maksimal. Beberapa BUMD yang telah memiiki kinerja baik yang ditunjukkan dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 antara lain PDAM Surya Sembada, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, dan PT. BPR Surya Artha Utama.

2.1.3.4.1.2 Pelayanan Publik

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.160
Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata nilai SKM Pelayanan	83,74	82,43	86,05	88,37	90,76

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Pelaksanaan *survey* kepuasan masyarakat telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Rata-rata nilai SKM sepanjang tahun 2018 hingga 2022, mayoritas berada di atas nilai 80, yakni “Baik”. Meski demikian, nilai tersebut selalu naik dan turun setiap tahunnya. Artinya, masih dibutuhkan usaha yang lebih inovatif lagi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

2.1.3.4.1.3 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2022 terdapat 20 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 MoU atau 100% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 11 MoU dan keseluruhan 11 MoU memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.161
MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga
2022

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti 2022	20
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan 2022	20

No.	Uraian	Jumlah
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti 2022	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Tabel II.162
MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri 2022

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti 2022	11
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri keseluruhan 2022	11
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti 2022	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari beberapa Kerjasama tersebut, setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Data jumlah Kerjasama yg dievaluasi bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel II.163
MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kerjasama	215	262	161	125	246
Jumlah kerjasama dievaluasi	21	27	29	21	36

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

2.1.3.4.1.4 Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Di samping menjalankan bisnis secara profesional, BUMD juga dituntut untuk dapat berkontribusi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. Beberapa BUMD yang berkontribusi pada tahun 2018 – 2022, yakni:

1) PDAM Surya Sembada

   Pada tahun 2021, PDAM Surya Sembada berkomitmen untuk membantu percepatan pemulihan pandemi Covid melalui pemberian bantuan alat kesehatan senilai Rp5.772.990.000.

2) PT BPR Surya Artha Utama (SAU)

   Sejak tahun 2021, PT BPR Surya Artha Utama mendukung upaya penguatan UMKM di Kota Surabaya sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi, melalui pemberian kredit kepada UMKM dengan suku bunga 3% per tahun dengan plafon Rp2.500.000, melalui Program PUSPITA dan Kredit Padat Karya. Selain itu, di tahun 2022, PT BPR-SAU

mendukung pengembangan pasar melalui bantuan pemasangan *signage* di Pasar Penjaringan Sari dan Pasar Keputih.

3) PT SIER (*Surabaya Industrial Estate Rungkut*)

   Meski Pemerintah Kota Surabaya hanya memiliki 25% saham, PT SIER tetap berkomitmen melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk memberikan bantuan dalam rangka percepatan pemulihan Kota Surabaya di masa pandemi melalui bantuan alat kesehatan senilai Rp203.000.000. Selain itu, PT SIER juga secara rutin memberikan beasiswa kepada warga Kota Surabaya yang berpenghasilan rendah dalam rangka mendukung program pendidikan di Kota Surabaya. Selain itu, PT SIER juga secara konsisten mendukung pemulihan ekonomi melalui pembinaan bagi warga sekitar kawasan industri SIER.

4) PT BPD Jatim

   Meski Pemerintah Kota Surabaya hanya memiliki 2,13% saham, PT BPD Jatim, sejak 2021, juga memberikan bantuan kepada usaha mikro kecil binaan Pemerintah Kota Surabaya berupa barang dan uang. PT BPD Jatim juga mendukung digitalisasi transaksi daerah melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam hal pembayaran ePeken melalui QRIS. Selain itu, PT BPD Jatim juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui pembinaan UMKM oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melalui pemberian bantuan CSR berupa alat jahit.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana

program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2021, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.164
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Jenis Dokumen	2018	2019	2020	2021	2022
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 102 program. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020, telah dilakukan *review* terhadap RPJMD 2016-2021 untuk dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021, namun dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka khusus untuk tahun 2021 dilaksanakan pemetaan program sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga terdapat perubahan jumlah program dalam RPJMD Tahun 2021. Akan tetapi, meski jumlah program berkurang, namun esensi program, berupa indikator-indikator versi *Review* RPJMD 2016-2021, seluruhnya tetap dimasukkan ke 121 program hasil konversi.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Sehingga pada tahun 2022 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 123 program.

Tabel II.165
Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	102	102	177	177	123
2	Jumlah Program RKPD	102	102	177	121	124
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100*	100*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022
*Keterangan: *) Jumlah program RKPD 2021 menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020*

Sementara itu, tingkat capaian keberhasilan program pada tahun 2018 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 98,04%. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020, tingkat capaian keberhasilan program meningkat menjadi 99,02%, dan di tahun 2021 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 98,13%. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 95,27%. Data tingkat capaian keberhasilan program pembangunan tahun 2018 - 2022 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.166
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (%)	98,04	99,02	99,02	98,13	99,21

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2023

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2020 mencapai 90,18%. Sedangkan pada tahun 2021, rata-rata penyerapan anggaran mencapai 80,17%, dan pada akhir tahun 2022 rata-rata penyerapan anggaran mencapai 88,83%.

Tabel II.167
Rata – Rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	90,19	95,95	90,18	80,17	88,83

Sumber: Sekretariat Daerah, diolah, 2023

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistim. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil diidentifikasi meliputi pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah merumuskan sistem pengembangan pola karier pegawai dan saat ini dalam proses pengesahan menjadi peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak kalah pentingnya dalam memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi konstribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job* dan *on the job training*. Pada tahun 2018, jumlah pegawai yang berkompeten

sebanyak 4.834 pegawai, kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 5.803 pegawai. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.503 pegawai, pada tahun 2021 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.725 pegawai dan di tahun 2022 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 6.088 pegawai. Di bawah ini terdapat jumlah data pegawai yang kompeten.

Tabel II.168
Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pegawai kompeten	4.834	5.803	4.503	4.725	4.572
2	Jumlah pegawai belum kompeten	3.341	2.734	2.033	1.636	70

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

Sejak tahun 2018, jumlah pegawai belum kompeten menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2022, pegawai yang sudah difasilitasi peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, diklat dan lain sebagainya telah berhasil memanfaatkannya dengan baik sehingga jumlah pegawai yang belum kompeten relatif lebih sedikit dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Mengingat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis, diupayakan untuk memperkecil jumlah pegawai yang belum kompeten.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pejabat struktural, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II.169
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah pejabat struktural	1.577	1.580	1.461	1.414	1.197
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.255	1.174	1.048	944	624
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural (%)	78,24	74,30	71,73	66,76	52,13

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

2.1.3.5.3 Pengelolaan Perbatasan

Tahapan pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah pada tahun 2016–2019 meliputi sosialisasi pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan lalu dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan garis batas di atas peta serta penetapan ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Agar batas daerah tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas. Sedangkan pada tahun 2020, penegasan batas wilayah dilakukan dengan mengukur dan menetapkan batas wilayah melalui Perwali. Data penegasan wilayah Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut.

Tabel II.170
Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
Sudah dilakukan penegasan wilayah	0	0	10	16	22

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Dalam melaksanakan setiap kegiatan di instansi pemerintahan memerlukan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan melalui kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang berjalan. Dalam menjalankan setiap kegiatan tata kelola administrasi seringkali adanya pelanggaran yang terjadi di Perangkat Daerah. Karena itu, diperlukan pengawasan untuk mengurangi pelanggaran di setiap tahunnya. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.171
Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pelanggaran tata kelola administrasi	73	38	24	19	0

Sumber: Inspektorat Daerah, 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas, tahun 2018 sampai tahun 2021 pelanggaran tata kelola administrasi mengalami penurunan. Dari 73 pelanggaran di tahun 2018, menjadi 19 pelanggaran di tahun 2021. Mulai di tahun 2022, jumlah pelanggaran dapat dicegah melalui pengawasan sebelum pelaporan tata kelola administrasi

sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran tata kelola administrasi. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari sistem informasi elektronik yang membantu mengakselerasi dan mempermudah proses pengawasan dan pemeriksaan.

Selain itu, unsur pengawasan internal juga diperlukan untuk mendisiplinkan aparatur. Banyaknya pelanggaran disiplin aparatur, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi jumlah pelanggaran.

Tabel II.172
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Jenis Hukuman Disiplin	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	5	2	8	13	37
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	3	2	7	0	27
Jumlah Hukuman Disiplin Berat	10	23	15	24	80
Total Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan	18	27	30	37	144

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.7.1 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakat lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak

berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Jumlah Ormas Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.173
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Ormas Aktif	25	21	15	38	27
2	Jumlah Ormas Terdaftar	167	167	167	167	104

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan akhir tahun 2022, kegiatan pembinaan terhadap ormas terhadap 27 lembaga.

2.1.3.7.2 Penanganan Potensi Konflik

Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk salah satu faktor yang sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan manusia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintah kota Surabaya melakukan upaya pengawasan terhadap potensi konflik yang bisa terjadi di masyarakat. Data potensi konflik selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.174
Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah potensi konflik	236	227	215	297	403
2	Jumlah konflik	11	13	10	8	5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Guna mengurangi risiko potensi konflik ini, partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kerukunan antar elemen di masyarakat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.175
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita				Total	
	Makanan	%	Non Makanan	%		
2018	776.985	40,94	1.120.876	59,06	1.897.861	100%
2019	742.013	36,60	1.285.586	63,40	2.027.599	100%
2020	777.725	41,39	1.101.421	58,61	1.879.146	100%
2021	810.743	41,52	1.141.846	54,48	1.952.589	100%
2022	819.124	41,60	1.149.824	58,40	1.968.948	100%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun pandemi 2020 dan 2021. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut.

Tabel II.176
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja (orang)	1.520.041	1.566.846	1.582.564	1.572.888	1.643.314
PDRB (Juta Rp)	538.845.465	580.488.529	554.509.457	590.227.967	655.616.222
Produktivitas (Juta Rp per orang)	354,49	370,48	350,39	375,25	398,96

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II.177
Perkembangan PDRB Kategori Tranportasi dan Pergudangan
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB ADHK (miliar rupiah)	19.046,86	20.497,98	19.477,42	19.875,91	22.684,94
Laju Pertumbuhan (persen)	7,56	7,62	-4,98	2,05	14,14

Sumber : BPS Kota Surabaya diolah, 2023

2.1.4.2 Fokus Infrastruktur Kewilayahan

2.1.4.2.1 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota mengukur keberhasilan dalam peningkatan kualitas infrastruktur kota. Indeks Infrastruktur Kota menggambarkan implementasi penataan ruang kota yang terintegrasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi.

Pola perhitungan Indeks Infrastruktur Kota pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi dan perbaikan pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan diperlukan penyesuaian komponen perhitungan untuk mengakomodir aspek infrastruktur kota yang masih perlu

ditingkatkan pada periode 2021-2026. Sehingga formulasi perhitungan antara tahun 2020-2021 dengan tahun 2022 berbeda, dan capaiannya tidak dapat disejajarkan.

Pada tahun 2022, realisasi Indeks Infrastruktur Kota Surabaya adalah sebesar 0,672. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas jalan dan prasarana melalui pembangunan pedestrian dan pelaksanaan overlay (pelapisan ulang aspal) pada 2.072 ruas jalan, peningkatan konektivitas jalan melalui pembangunan jalan baru (Jalan Lingkar Luar Barat). Penanganan genangan dilakukan melalui pembangunan dan/rehabilitasi sistem drainase pada 353 lokasi, penambahan kapasitas dan pembangunan rumah pompa baru sebanyak 4 unit, serta pengerukan saluran primer, sekunder dan tersier sebanyak 1.192 lokasi. Selanjutnya, penyediaan hunian layak juga telah dilakukan melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat miskin sebanyak 107 blok rusunawa dan pembangunan baru 2 blok rusunawa yang tuntas pada akhir 2022, Program Dandan Omah sebagai upaya rehabilitasi terhadap rumah tapak tidak layak huni sebanyak 929 rumah, fasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan sebanyak 22 lokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik. Selain itu dari sisi penataan ruang dan penyediaan tanah telah dilakukan pelayanan penataan ruang dan bangunan yang terintegrasi serta berbasis teknologi. Sedangkan dari aspek transportasi, keberhasilan tersebut didukung oleh penyediaan layanan angkutan umum perkotaan dengan penyediaan angkutan suroboyo bus sebanyak 28 unit yang melayani 3 rute layanan dan kerjasama Kementerian Perhubungan melalui Teman Bus sebanyak 17 unit yang melayani 1 rute serta pengadaan angkutan feeder sebanyak 52 unit yang dioperasikan di tahun 2023, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2017, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II.178
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2022

Tabel II.179
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2018 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II.180
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2022

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di

Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk terus menyediakan fasilitas jalan yang memadai dengan memperhatikan perkembangan volume lalu lintas harian pada ruas jalan utama di Kota Surabaya. Hal ini diukur melalui V/C ratio yaitu perhitungan volume per jam tertinggi untuk memperkirakan volume per jam desain (yaitu volume per jam tertinggi ke-n) untuk keperluan desain yang ideal. Pada tahun 2022, terdapat 49 jalan kewenangan kota dan 2 jalan kewenangan nasional yang memiliki V/C Ratio ≤0,90 dari total 51 ruas jalan yang disampling. Semakin kecil nilai V/C ratio pada suatu ruas jalan maka semakin baik pula fungsi jalan tersebut. Rata-rata V/C ratio di beberapa ruas jalan di Kota Surabaya terbukti semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya adalah 0,56. Kemudian turun menjadi 0,54 pada tahun 2019, dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 0,47 dan di tahun 2021 menjadi 0,42. Namun pada tahun 2022 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya mengalami kenaikan menjadi 0,75. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota antara lain dengan menyediakan alternatif rute perjalanan serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Rata-rata V/C ratio jalan di Kota Surabaya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel II.181
Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata V/C Ratio	0,56	0,54	0,47	0,42	0,75

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Tabel II.182
Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jl. Adityawarman	kota	0,28	0,3	0,28	0,295	0,54
2	Jl. Bengawan	kota	0,15	0,16	0,13	0,155	0,69
3	Jl. Blauran	kota	1,03	0,95	0,72	0,57	0,71
4	Jl. Bubutan	kota	0,54	0,67	0,4	0,82	0,81
5	Jl. Citra Raya Unesa	kota	0,55	0,51	0,4	0,27	0,72
6	Jl. Darmo	kota	0,55	0,47	0,5	0,545	0,88

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2018	2019	2020	2021	2022
7	Jl. Dharmahusada Utara VIII	kota	0,17	0,14	0,12	0,065	0,58
8	Jl. Dharmawangsa	kota	0,32	0,38	0,34	0,27	0,89
9	Jl. Dinoyo	kota	0,25	0,13	0,28	0,195	0,69
10	Jl. Diponegoro	kota	0,51	0,44	0,42	0,45	0,58
11	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	kota	0,43	0,43	0,42	0,49	0,86
12	Jl. Dr.Soetomo	kota	0,37	3,19	0,42	0,3	0,61
13	Jl. Embong Malang	kota	0,52	0,37	0,44	0,55	0,65
14	Jl. Gemblongan	kota	0,58	0,61	0,48	0,53	0,95
16	Jl. Gubeng pojok	kota	0,73	0,34	0,47	0,28	0,65
17	Jl. Gubernur Suryo	kota	1,59	0,91	0,67	0,32	0,69
18	Jl. Hayam Wuruk	kota	0,26	0,26	0,17	0,14	0,52
19	Jl. Indragiri	kota	0,27	0,2	0,18	0,375	0,69
20	Jl. Indrapura	kota	0,94	0,55	0,83	0,8	0,76
21	Jl. Jagir Wonokromo	kota	0,32	0,29	0,18	0,315	0,61
22	Jl. Jakarta	kota	0,54	0,66	0,6	0,385	0,80
23	Jl. Joyoboyo	kota	0,46	0,64	0,22	0,545	0,78
24	Jl. Kapuas	kota	0,05	0,01	0,01	0,035	0,64
25	Jl. Kayoon	kota	0,43	0,23	0,23	0,25	0,64
26	Jl. Kedungdoro	kota	0,29	0,23	0,27	0,41	0,82
27	Jl. Kejawan Putih Tambak	kota	0,31	0,13	0,27	0,2	0,71
28	Jl. Kembang Jepun	kota	0,75	0,36	0,57	0,55	0,74
29	Jl. Kertajaya Indah	kota	0,36	0,58	0,45	0,53	0,74
30	Jl. Kusuma Bangsa	kota	0,69	0,63	0,49	0,47	0,75
31	Jl. Laguna Kejawan Putih Tambak	kota	0,31	0,23	0,22	0,25	0,67
32	Jl. Mayjend HR. Muhammad	kota	0,63	0,34	0,26	0,565	0,72
34	Jl. Mayjend Sungkono	kota	0,52	0,43	0,44	0,475	0,92
35	Jl. Ngagel	kota	0,44	0,46	0,5	0,27	0,70
36	Jl. Pahlawan	kota	1,09	0,74	1,11	0,53	0,80
37	Jl. Pemuda	kota	0,78	0,51	0,79	0,83	0,86
38	Jl. Perak Barat	nasional	0,68	0,85	0,63	0,71	1,03
39	Jl. Perak Timur	nasional	0,88	0,87	0,54	0,41	1,16
40	Jl. Polisi Istimewa	kota	0,19	0,19	0,16	0,22	0,79
41	Jl. Prof. Dr. Moestopo	kota	0,75	0,66	0,72	0,565	0,88
42	Jl. Rajawali	kota	0,96	0,85	0,83	0,51	0,76
43	Jl. Raya ITS	kota	0,34	0,58	0,19	0,23	0,49
44	Jl. Stasiun Wonokromo	kota	0,51	0,29	0,5	0,42	0,77
45	Jl. Sumatra	kota	0,55	0,52	0,37	0,02	0,72
46	Jl. Tunjungan	kota	0,85	0,82	1,03	0,58	0,66
47	Jl. Urip Sumoharjo	kota	0,66	0,89	0,55	0,475	0,87
48	Jl. Jendral Basuki Rachmat	kota	1,34	1,18	1,38	1,2	0,82
49	Jl. Jembatan Merah/ Jl. Veteran	kota	0,95	0,86	1,01	1,05	0,71

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2018	2019	2020	2021	2022
50	Jl. Panglima Sudirman	kota	0,74	0,22	0,96	0,27	0,85
51	Jl. Keputran	kota	0,12	0,12	0,05	0,035	0,72
Rata-rata di jalan kewenangan kota			**0,56**	**0,55**	**0,48**	**0,43**	**0,73**
Rata-rata total			**0,56**	**0,54**	**0,47**	**0,42**	**0,75**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Pada tabel di atas, meskipun rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang semakin menurun, namun masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,95 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Meningkatnya volume kendaraan di Kota Surabaya menyebabkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat tetap tertib saat berkendara, pemasangan rambu dan lain-lain. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.183
Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	1.191	1.345	874	932	1.263

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Mengingat Kota Surabaya adalah kota besar dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, seringkali Kota Surabaya menjadi tempat jujukan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kepadatan masyarakat di Kota Surabaya antara siang hari dan malam hari. Pada malam hari, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2.987.863 jiwa, sementara pada siang hari bisa menjadi 2 kali lipat karena masyarakat dari Kabupaten/Kota sekitar yang memiliki pekerjaan di Kota Surabaya. Hal ini membuat akses keluar masuk Kota Surabaya sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya agar dapat memberikan alternatif moda transportasi

bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih moda transportasi.

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya secara umum mengalami penurunan. Pada 2018 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,43 menit, hingga tahun 2022 ini rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 19,88 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.184
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	22,43	22,01	22,22	22,04	19,12

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Meski lama genangan makin menurun, namun rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya secara umum cukup fluktuatif. Pada tahun 2018, rata-rata tinggi genangan sebesar 12,49 cm. Turun menjadi 9,20 cm di tahun 2019, namun naik kembali di tahun 2020 menjadi 10,92 cm hingga tahun 2022 ini. Untuk menangani permasalahan ini, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya di antaranya melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, pembangunan rumah pompa, serta pemeliharaan rutin saluran drainase berupa pengerukan. Selengkapnya data tinggi genangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.185
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	12,49	9,20	10,92	10,92	10,92

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 697,79 ha. Hingga pada Tahun 2021, luas wilayah genangan Kota Surabaya terus

menurun menjadi sebesar 452,57 hektar. Kemudian pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 432,09 hektar, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.186
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Wilayah Genangan (ha)	697,79	688,96	462,64	452,57	432,09

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 67 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut. Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.

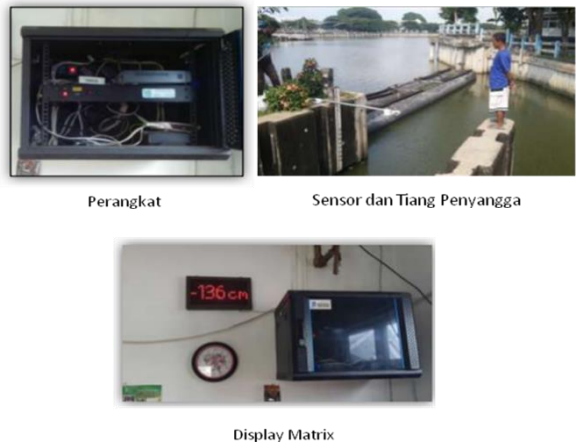

Gambar II.19
Perangkat Smart Water Level

2.1.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota di antaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2022, jumlah PJU yang terpasang sebanyak 96.252 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II.187
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PJU terpasang (titik per tahun)	5.372	6.090	6.400	1.324	3.002

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban pemeliharaan dan tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban pemeliharaan dan tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan/ konservasi energi kota.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*), yaitu penilaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil (*Results*), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penilaian BB (78,13). Sedangkan pada tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memberikan nilai BB (78,38). Baru di tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan nilai A (80,14). Meski mendapat A, namun nilai 80,14 dapat dikatakan masih jauh harapan. Hal ini disebabkan antara lain karena kurang optimalnya penerjemahan pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan, sehingga pengukuran kinerja individu yang dilakukan belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi. Selain itu, belum optimalnya pelaporan kinerja dan laporan hasil evaluasi yang kurang menjelaskan rekomendasi yang mendorong perbaikan kinerja.

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.188
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bidang Politik	67	78	64	67	99
2	Bidang Ekonomi	64	68	81	142	161
3	Bidang Sosial Budaya	105	81	70	87	151
Jumlah unjuk rasa		**236**	**227**	**215**	**296**	**411**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2018 ke 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan kejadian unjuk rasa sebanyak 296 kejadian dan didominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi. Di tahun 2022, jumlah

kejadian kembali meningkat dengan cukup signifikan. Tetapi meskipun angka unjuk rasa tersebut meningkat, keseluruhan unjuk rasa bisa tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Hal ini menunjukan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan bisa dikendalikan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada tabel di berikut ini, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya.

Tabel II.189
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	0	1	0	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	1	0	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0	0	1

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2023

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.190
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah lulusan D4/S1	303.549	305.315	303.41	287.516	290.887
2	Jumlah lulusan S2	21.010	21.363	21.179	19.976	20.615

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah lulusan S3	1.353	1.376	1.405	1.412	1.518
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	325.912	328.054	325.994	308.904	313.020
5	Jumlah penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,105	0,104	0,109	0,104	0,105

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

2.1.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II.191
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	672.334	700.826	688.478	675.558	686.916
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	216.158	229.491	186.272	193.749	208.815
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	888.492	930.317	874.750	869.307	895.731
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.206.240	2,229,164	2.095.980	2.101.645	2.092.132
6	Rasio ketergantungan	0,402	0,417	0,417	0,414	0,428

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada Tahun 2022 antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun meningkat 3,04% dari tahun 2021. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) turun sebesar 0,45% dari tahun 2021. Sehingga rasio ketergantungan meningkat menjadi sebesar 0,428 yang artinya, setiap 100 orang yang berusia produktif/bekerja mempunyai tanggungan sebanyak 42 hingga 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (*SDGs*) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang berkolaborasi dengan kebijakan perencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun capaian SDGs di Kota Surabaya pada tahun 2022, adalah sebagai berikut.

Tabel II.192
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya Tahun 2022

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	24	10	3	11	-
2	Tanpa Kelaparan	8	5	-	2	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	12	1	20	1
4	Pendidikan Berkualitas	18	4	-	11	3
5	Kesetaraan Gender	8	7	1	-	-
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	3	-	1	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	5	-	-	3	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	15	4	-	6	5
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	8	1	-	4	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	4	2	1	-

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	9	4	1	2	2
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertangung Jawab	2	-	1	1	-
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	-	-	1	-
14	Ekosistem Lautan	2	-	-	1	1
15	Ekosistem Daratan	7	4	-	-	3
16	Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh	12	5	2	2	3
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	7	2	1	3	1
Grand Total		**172**	**65**	**12**	**69**	**26**

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023

Mengacu tabel di atas, sebanyak 77 indikator dari 172 indikator atau sebesar 44,76% indikator TPB/SDGs memiliki relevansi/kesesuaian dengan indikator kinerja RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan seluruhnya telah mencapai predikat Tercapai dan Akan Tercapai untuk target tahun 2022. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program pembangunan dan kegiatan prioritas utamanya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi. Sebanyak 76 program dari 148 program pembangunan Kota Surabaya serta 109 kegiatan dari 1.666 kegiatan Pemerintah Kota Surabaya mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaksanaan TPB dengan dukungan APBD Tahun 2022 sebesar Rp4,129 triliun.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya untuk menyediakan data realisasi/kondisi terkini atas 95 indikator lainnya, dan sebanyak 26 indikator di antaranya Tidak Tersedia Data, antara lain disebabkan antara lain berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, data tersebut bukan merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota untuk penyediaannya, atau belum tersedia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 dan realisasi tahun kedua RPJMD 2021-2026 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta dari laporan pertanggungjawaban APBD Akhir Tahun Anggaran 2022, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2023, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program sampai dengan triwulan I tahun 2023, secara umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.193
Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan, Kegiatan, dan Kinerja Hasil Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2023

No.	Jenis Pencapaian Indikator Kinerja	Program (indikator kinerja *outcome*)		Kegiatan (indikator kinerja *output*)		Sub Kegiatan (indikator kinerja *output*)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Realisasi indikator kinerja dengan capaian Sangat Rendah, Rendah dan Sedang (<76%)	155	30,57	444	49,12	1.632	85
2.	Realisasi indikator kinerja dengan capaian Tinggi (76%≤90%)	11	2,17	16	1,77	47	2,45
3.	Realisasi indikator kinerja dengan capaian Sangat Tinggi (91%≤110%)	286	56,41	423	46,79	207	10,78
4.	Realisasi indikator kinerja dengan capaian >110%	55	10,85	21	2,32	34	1,77
Total		**507**	**100**	**1.666**	**100**	**2.079**	**100**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2023

Berdasarkan rekapitulasi di atas, sebanyak 2.231 indikator dari 3.331 indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan atau sebesar 66,98% indikator belum memenuhi capaian kinerja minimal, yakni 76%. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, faktor penghambat dari banyaknya capaian indikator yang belum memenuhi capaian kinerja minimal tersebut antara lain:

1. Kondisi lapangan (cuaca, teknis dan warga sekitar) sehingga pelaksanaan pekerjaan mengalami hambatan;
2. Belum banyaknya masyarakat yang melakukan pengajuan pelayanan perizinan/non-perizinan di triwulan I;
3. Triwulan I merupakan tahapan persiapan atau adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan, dan hasil kinerja berkaitan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di triwulan-triwulan selanjutnya.

Oleh karena itu, tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan di triwulan berikutnya antara lain:

1. Pemantauan dan penyesuaian *timeline* target kinerja yang proporsional dengan mengedepankan kondisi terkini, alokasi kebutuhan dan proyeksi capaian target kinerja;
2. Intensif melakukan koordinasi dengan pemangku kegiatan/sub kegiatan dan melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan capaian target sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi serta meningkatkan kinerja pelayanan perizinan/non-perizinan dan reformasi birokrasi.

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dijelaskan pada tabel berikut ini tentang Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2023.

Tabel II.194
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023 (TW I) Kota Surabaya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.065.645.443		79.754.243		954.203.307		74.367.740		7.79%		871.910.170		81.82%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94.13 %		91.83 %		91.75 %		93.27 %		101.66 %		93.27 %		99.09%		Dinas Pendidikan	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.442.377		1.383.541		1.454.571		179.748		12.36%		1.563.289		35.19%		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan		N/A		3 kegiatan		1 kegiatan		33.33 %		1 kegiatan		33.33 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.442.377		1.383.541		1.454.571		179.748		12.36%		1.563.289		35.19 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.029.406.176		774.531.587		932.972.775		71.547.123		7.67%		846.078.710		82.19%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.029.406.176		774.531.587		932.972.775		71.547.123		7.67%		846.078.710		82.19 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5929 Orang/bulan		100%		5929 Orang/bulan		6323 Orang/bulan		106.65 %		6323 Orang/bulan		106.65 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.331.194		647.495		737.204		28.622		3.88%		676.117		50.79%		
			Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		94.36 %		100%		66.67 %		66.67 %		66.67 %		66.67 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.331.194		647.495		737.204		28.622		3.88%		676.117		50.79 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		19 jenis		12 Paket		18 Paket		150.00 %		18 Paket		150.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.870.126		2.751.879		2.386.622		59.364		2.49%		2.811.243		57.72%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		71.27 %		100%		75%		75.00 %		75%		75.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.870.126		2.751.879		2.386.622		59.364		2.49%		2.811.243		57.72 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	768 Unit		59 jenis		964 Unit		301 Unit		31.22 %		301 Unit		39.19 %		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.595.570		18.227.928		16.652.135		2.552.883		15.33%		20.780.811		81.19%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		94.36 %		100%		93.42 %		93.42 %		93.42 %		93.42 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.477.487		2.018.449		2.213.214		197.649		8.93%		2.216.098		89.45 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		2 Laporan		50.00 %		2 Laporan		50.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			23.118.083		16.209.479		14.438.921		2.355.234		16.31%		18.564.713		80.30 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		4 laporan		1 Laporan		2 Laporan		200.00 %		2 Laporan		200.00 %		Dinas Pendidikan	
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.278.141.505		105.229.475		1.062.553.084		65.870.929		6.20%		1.118.165.676		87.48%		
			Persentase SD terakreditasi minimal B	95.04 %		94.55 %		93.69 %		92.58 %		98.82 %		92.58 %		97.41%		Dinas Pendidikan	
			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	57%		15.54 %		28%		5.33 %		19.04 %		5.33 %		9.35%		Dinas Pendidikan	
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pendidikan	
			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		84.04 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pendidikan	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	97.44 %		95.04 %		96.79 %		95.17 %		98.33 %		95.17 %		97.67%		Dinas Pendidikan	
			Persentase lembaga PAUD berkualitas	84.85 %		82.32 %		83.71 %		82.97 %		99.12 %		82.97 %		97.78%		Dinas Pendidikan	
			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100%		100.00 %		85%		100%		117.65 %		100%		100.00%		Dinas Pendidikan	
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	91.43 %		100.00 %		87.60 %		97.14 %		110.89 %		97.14 %		106.25%		Dinas Pendidikan	
			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%		99.42 %		100%		99.83 %		99.83 %		99.83 %		99.83%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			642.779.016		558.708.662		543.653.165		32.031.852		5.89%		590.740.514		91.90%		
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan		4 laporan		4 laporan		1 laporan		25.00 %		1 laporan		25.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga		N/A		692 Lembaga		173 Lembaga		25.00 %		173 Lembaga		25.00 %		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		90.57 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			102.209.068		14.261.442		25.647.000		13.600		0.05%		14.275.042		13.97 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	19 Unit		8 Lokasi		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			188.257		130.800		173.000		25.600		14.80%		156.400		83.08 %		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan		260 lembaga		259 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			6.043.654		1.255.151		1.838.667		95.661		5.20%		1.350.812		22.35 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	73986 Peserta Didik		13 kali		73986 Peserta Didik		55197 Peserta Didik		74.60 %		55197 Peserta Didik		74.60 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.16	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**			7.328.937		5.574.225		3.116.551		8.400		0.27%		5.582.625		76.17 %		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket		56 lembaga		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.29	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**			148.042.295		211.948.784		215.450.220		8.400		0.00%		211.957.184		143.17 %		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan		285 lembaga		587 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.27	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**			30.802.004		681.421		595.349		56.200		9.44%		737.621		2.39 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang		N/A		3135 Orang		541 Orang		17.26 %		541 Orang		17.26 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.21	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**			320.687.503		319.700.499		290.998.446		31.762.612		10.92%		351.463.111		109.60 %		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik		691 lembaga		85997 Peserta Didik		29538 Peserta Didik		34.35 %		29538 Peserta Didik		34.35 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.23	**Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik**			320.597		228.222		399.446		47.780		11.96%		276.002		86.09 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	649 Satuan Pendidikan		643 lembaga		649 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.12	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			27.156.702		4.928.118		5.434.485		13.600		0.25%		4.941.718		18.20 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	205 Unit		266 Lokasi		125 Unit		25 Unit		20.00 %		25 Unit		12.20 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			362.852.051		312.049.131		308.871.232		10.705.994		3.47%		322.755.124		88.95%		
			Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga		312 Lembaga		305 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		90.57 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan		4 laporan		4 laporan		1 laporan		25.00 %		1 laporan		25.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.12	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			68.139.379		6.389.132		17.878.082		14.900		0.08%		6.404.032		9.40 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		3 lokasi		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.41	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**			441.521		266.600		389.756		23.000		5.90%		289.600		65.59 %		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	258 Satuan Pendidikan		305 Lembaga		255 Satuan Pendidikan		159 Satuan Pendidikan		62.35 %		159 Satuan Pendidikan		61.63 %		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			4.584.334		2.265.022		3.364.530		179.496		5.33%		2.444.518		53.32 %		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2280 Peserta Didik		18 kali		2000 Peserta Didik		726 Peserta Didik		36.30 %		726 Peserta Didik		31.84 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			6.779.353		12.781.912		3.118.500		39.600		1.27%		12.821.512		189.13 %		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		63 Lembaga		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			80.429.498		126.650.648		127.225.000		8.400		0.01%		126.659.048		157.48 %		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan		63 lembaga		272 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			13.494.310		435.230		587.397		48.200		8.21%		483.430		3.58 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang		N/A		1013 Orang		377 Orang		37.22 %		377 Orang		37.22 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			170.635.719		161.602.047		150.755.194		10.327.798		6.85%		171.929.845		100.76 %		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37574 Peserta Didik		312 lembaga		40574 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			243.465		233.590		251.900		56.200		22.31%		289.790		119.03 %		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	39248 Peserta Didik		300 lembaga		39248 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			18.104.473		1.424.950		5.300.874		8.400		0.16%		1.433.350		7.92 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit		60 lokasi		17 Unit		16 Unit		94.12 %		16 Unit		88.89 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			155.588.380		107.244.223		130.630.212		9.087.183		6.96%		116.331.406		74.77%		
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan		4 laporan		4 laporan		2 laporan		50.00 %		2 laporan		50.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan		4 laporan		4 laporan		2 laporan		50.00 %		2 laporan		50.00 %		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			716.291		484.273		1.176.674		8.400		0.71%		492.673		68.78 %		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan		467 lembaga		2355 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD			742.276		6.929.742		1.656.766		8.400		0.51%		6.938.142		934.71 %		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket		2 Lembaga		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD			69.014.400		59.896.940		61.943.480		0		0.00%		59.896.940		86.79 %		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan		2539 lembaga		2479 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			8.420.251		203.323		3.569.141		8.400		0.24%		211.723		2.51 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang		N/A		3092 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			161.215		244.518		5.026.816		910.110		18.11%		1.154.628		716.20 %		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik		2 Lembaga		209 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			76.002.570		39.485.427		56.838.356		8.151.873		14.34%		47.637.300		62.68 %		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88978 Peserta Didik		2644 lembaga		88678 Peserta Didik		100126 Peserta Didik		112.91 %		100126 Peserta Didik		112.53 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			531.376		0		418.979		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		N/A		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			116.922.057		74.292.732		79.398.475		14.045.900		17.69%		88.338.632		75.55%		
			Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari		1.27 hari		5 hari		1.08 hari		21.60 %		1.08 hari		164.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		1 laporan		25.00 %		1 laporan		25.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			135.748		70.000		130.084		8.400		6.46%		78.400		57.75 %		
			Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	293 Satuan Pendidikan		153 lembaga		293 Satuan Pendidikan		94 Satuan Pendidikan		32.08 %		94 Satuan Pendidikan		32.08 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			297.779		87.120		319.480		0		0.00%		87.120		29.26 %		
			Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket		1 lembaga		2 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			6.791.865		3.881.578		4.539.360		0		0.00%		3.881.578		57.15 %		
			Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan		30 lembaga		27 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			113.511		60.110		101.751		8.400		8.26%		68.510		60.36 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		96 orang		250 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			849.600		540.327		4.733.363		562.700		11.89%		1.103.027		129.83 %		
			Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	45 Peserta Didik		1 lembaga		30 Peserta Didik		50 Peserta Didik		166.67 %		50 Peserta Didik		111.11 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			108.733.554		69.653.597		69.574.437		13.466.400		19.36%		83.119.997		76.44 %		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2822 Peserta Didik		N/A		2792 Peserta Didik		50 Peserta Didik		1.79 %		50 Peserta Didik		1.77 %		Dinas Pendidikan	
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			134.346.197		3.839.753		33.322.143		5.362.800		16.09%		43.760.332		32.57%		
			Rasio Guru/ Murid jenjang SD	0.05		0.05		0.05		0.16		320.00 %		0.16		320.00%		Dinas Pendidikan	-
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	0.05		0.05		0.05		0.06		120.00 %		0.06		120.00%		Dinas Pendidikan	-
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			134.346.197		38.397.532		33.322.143		5.362.800		16.09%		43.760.332		32.57%		
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada enjang sekolah dasar	12685 orang		N/A		12685 orang		11268 orang		88.83 %		11268 orang		88.83 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada enjang sekolah menengah	7725 orang		5926 orang		7725 orang		5958 orang		77.13 %		5958 orang		77.13 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			133.374.035		38.239.001		32.704.832		5.330.400		16.30%		43.569.401		32.67 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	350 Laporan		497 lembaga		350 Laporan		700 Laporan		200.00 %		700 Laporan		200.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			972.162		158.530		617.311		32.400		5.25%		190.930		19.64 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
4	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.121.682.948		106.346.137		1.260.366.556		117.728.788		9.34%		1.181.190.157		105.31%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	83%		86.87 %		82.88 %		83.84 %		101.16 %		83.84 %		101.01%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		85.54 %		100%		88%		88.00 %		88%		88.00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	84%		90.48 %		82%		88.89 %		108.40 %		88.89 %		105.82%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		91.63 %		87.88 %		85.75 %		97.58 %		85.75 %		97.44%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		92.34 %		88%		93.22 %		105.93 %		93.22 %		104.74%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			374.216.829		358.499.713		441.355.391		23.929.061		5.42%		382.428.774		102.19%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			35.732.522		42.785.406		60.377.804		2.826.838		4.68%		45.612.244		127.65 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan		100%		192 Orang/bulan		203 Orang/bulan		105.73 %		203 Orang/bulan		105.73 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			71.091.174		73.013.480		99.171.245		5.226.233		5.27%		78.239.713		110.06 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan		100%		395 Orang/bulan		415 Orang/bulan		105.06 %		415 Orang/bulan		92.22 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			267.393.133		242.700.827		281.806.343		15.875.990		5.63%		258.576.818		96.70 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1174 Orang/bulan		100%		1174 Orang/bulan		1146 Orang/bulan		97.61 %		1146 Orang/bulan		97.61 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			8.082.258		2.068.876		1.343.242		114.443		8.52%		2.183.320		27.01%		
			Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%		64.73 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.07.10	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			8.082.258		2.068.876		1.343.242		114.443		8.52%		2.183.320		27.01 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		6 jenis		4 Unit		2 Unit		50.00 %		2 Unit		50.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			266.965.244		206.128.640		207.399.248		28.947.468		13.96%		235.076.107		88.05%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		90.62 %		100%		84.43 %		84.43 %		84.43 %		84.43 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.134.015		0		19.275.489		1.407.009		7.30%		1.407.009		8.21 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			72.073.629		36.065.058		2.310.182		190.917		8.26%		36.255.975		50.30 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			45.112.416		37.103.021		3.480.500		230.000		6.61%		37.333.021		82.76 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			132.645.183		132.960.561		182.333.077		27.119.541		14.87%		160.080.102		120.68 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		7 jenis		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			472.418.617		496.764.141		610.268.675		64.737.815		10.61%		561.501.956		118.86%		
			Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	3 jenis		N/A		3 jenis		3 jenis		100.00 %		3 jenis		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			304.879.739		229.219.119		292.316.172		21.654.650		7.41%		250.873.769		82.29 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		14 jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			166.477.578		149.679.087		190.946.366		23.641.854		12.38%		173.320.941		104.11 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		12 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.061.298		61.333.092		127.006.136		19.441.309		15,31%		80.774.400		7,610.91%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (63 puskesmas)	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		Dinas Kesehatan	
5	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			804.001.170		72.922.242		966.772.979		77.447.581		8.01%		806.669.997		100.33%		
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82.65 %		91.31 %		82.50 %		31.1 %		37.70 %		31.1 %		37.63%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Jaminan Kesehatan	98.00 %		98.48 %		96.97 %		32.2 %		33.21 %		32.2 %		32.86%		Dinas Kesehatan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	60%		69.84 %		55%		69.84 %		126.98 %		69.84 %		116.40%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	84.13 %		96.83 %		79.37 %		95.24 %		119.99 %		95.24 %		113.21%		Dinas Kesehatan	
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98.08 %		100.00 %		98.08 %		100%		101.96 %		100%		101.96%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	
			Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%		100.82 %		100%		101.65 %		101.65 %		101.65 %		101.65%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Rumah Sehat	88.22 %		88.32 %		88.19 %		88.38 %		100.22 %		88.38 %		100.18%		Dinas Kesehatan	
			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%		96.75 %		100%		82%		82.00 %		82%		82.00%		Dinas Kesehatan	
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.100 %		0.05 %		0.103 %		0.06 %		141.75 %		0.06 %		140.00%		Dinas Kesehatan	
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99.07 %		99.59 %		99.04 %		22.98 %		23.20 %		22.98 %		23.20%		Dinas Kesehatan	
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	100%		97.47 %		98%		100.62 %		102.67 %		100.62 %		100.62%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99.21 %		97.35 %		99.18 %		22.95 %		23.14 %		22.95 %		23.13%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			253.625.877		245.561.800		401.636.494		972.824		0.24%		246.534.624		97.20%		
			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit		63 Puskesmas		64 Unit		64 Unit		100.00 %		64 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen		N/A		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%		N/A		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	14 unit		15 Bangunan		15 unit		0 unit		0.00 %		0 unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit		N/A		64 Unit		63 Unit		98.44 %		63 Unit		98.44 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			110.381.289		366.600		204.535.550		80.600		0.04%		447.200		0.41 %		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		2 Bangunan		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			20.455.226		15.435.515		8.182.795		308.426		3.77%		15.743.941		76.97 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit		38 Jenis		33 Unit		13 Unit		39.39 %		13 Unit		39.39 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			8.332.225		3.828.802		56.735.448		8.400		0.01%		3.837.202		46.05 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit		2 Kelompok		70 Unit		3 Unit		4.29 %		3 Unit		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1.772.987		159.583.523		26.603.271		5.600		0.02%		159.589.123		9,001.14 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		1 kelompok		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1.388.852		5.002.000		4.657.481		0		0.00%		5.002.000		360.15 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		1 Jenis		30 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			77.584.596		29.130.900		13.961.099		55.900		0.40%		29.186.800		37.62 %		
			Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket		62 Jenis		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			9.093.726		1.111.477		1.459.174		450.903		30.90%		1.562.380		17.18 %		
			Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket		4 Jenis		2 Paket		1 Paket		50.00 %		1 Paket		50.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			682.517		372.500		472.805		0		0.00%		372.500		54.58 %		
			Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		1 Jenis		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			101.369		117.155		109.800		13.600		12.39%		130.755		128.99 %		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit		5 Dokumen		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit			103.983		0		25.674.050		0		0.00%		0		0.00 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		N/A		1 Unit		1 Unit		100.00 %		1 Unit		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			926.120		105.450		250.937		0		0.00%		105.450		11.39 %		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		1 Bangunan		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			22.802.988		27.131.325		58.994.084		49.395		0.08%		27.180.720		119.20 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit		13 Bangunan		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			492.155.472		482.726.634		564.219.333		76.334.134		13.53%		559.060.768		113.59%		
			Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa		123676 jiwa		54669 jiwa		0 jiwa		0.00 %		0 jiwa		0.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	100 Dokumen		N/A		100 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan		N/A		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan		N/A		1 kegiatan		3 kegiatan		300.00 %		3 kegiatan		300.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan		N/A		4 kegiatan		4 kegiatan		100.00 %		4 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan		N/A		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas		1 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi		N/A		700 Lokasi		185 Lokasi		26.43 %		185 Lokasi		26.43 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan		N/A		3 kegiatan		3 kegiatan		100.00 %		3 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan		N/A		2 kegiatan		3 kegiatan		150.00 %		3 kegiatan		150.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan		154 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		100.00 %		153 Kelurahan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas		1 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas		1 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas		1 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit		N/A		63 Unit		63 Unit		100.00 %		63 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di puskesmas	2 kegiatan		N/A		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	**Operasional Pelayanan Puskesmas**			773.640		1.196.155		47.903.382		5.274.021		11,01%		6.470.173		836.33 %		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (63 puskesmas)	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.35	**Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota**			2.924.783		0		3.250.000		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	63 Unit		N/A		63 Unit		189 Unit		300.00 %		189 Unit		300.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.37	**Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah**			445.667		691.613		609.120		55.916		9.18%		747.529		167.73 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen		11 Kegiatan		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**			19.478.405		3.005.025		1.204.827		17.800		1.48%		3.022.825		15.52 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		154 Kelurahan		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**			973.287		630.082		2.024.694		0		0.00%		630.082		64,74%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (63 puskesmas)	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		8.33 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.26	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**			434.139.730		399.848.530		451.888.330		69.998.243		15.49%		469.846.773		108.22 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		1175129 jiwa		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.14	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana**			175.559		555.301		695.988		90.082		12.94%		645.383		367.62 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen		10 Kegiatan		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**			4.191.821		6.128.823		31.207.222		50.706		0.16%		6.179.529		147.42 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		196 Balita		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**			1.582.749		1.915.760		1.352.118		0		0.00%		1.915.760		121,04%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (63 puskesmas)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			3.281.051		138.000		125.000		0		0.00%		138.000		4.21 %		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41553 Orang		1137 Kunjungan		41885 Orang		7748 Orang		18.50 %		7748 Orang		18.65 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			9.146.714		6.917.428		2.912.206		551.227		18.93%		7.468.655		81.65 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43532 Orang		126 Puskesmas		43881 Orang		12264 Orang		27.95 %		12264 Orang		28.17 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			211.050		5.206.122		1.350.846		0		0.00%		5.206.122		2,466.77%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (63 puskesmas)	43532 Orang		5 Kegiatan		43881 Orang		12294 Orang		28.02%		12294 Orang		28.24%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.942.877		610.882		705.891		89.162		12.63%		700.044		23.79 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.743.398		4.051.968		2.577.699		0		0		4.051.968		147,70%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (63 puskesmas)	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria			0		0		25.388		0		0.00%		0		0.00 %		
			umlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	N/A		N/A		10 orang		0 orang		0.00 %		0 orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)			0		0		765.345		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	N/A		N/A		205 orang		81 orang		39.51 %		81 orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			211.050		967.650		322.245		0		0.00%		967.650		458.49%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (63 puskesmas)	104247 orang		1 Kegiatan		104247 Orang		18532 Orang		17.78%		18532 Orang		17.78%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		126.391		1.111.726		45.200		4.07%		171.591		5,122.59 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1235 orang		2 Orang		1235 orang		18532 orang		1,500.57 %		18532 orang		1,500.57 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0		0		888.444		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	N/A		N/A		666 orang		183 orang		27.48 %		183 orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		792.362		3.081.824		73.112		2.37%		865.474		25,837.35 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang		9 Kegiatan		60480 Orang		15936 Orang		26.35 %		15936 Orang		26.34 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			211.050		7.739.818		1.086.510		0		0.00%		7.739.818		3,667.29%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (63 puskesmas)	60509 orang		129 Orang		60484 orang		15480 orang		25.59%		15480 orang		25.58%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			4.295.627		141.000		103.261		8.400		8.13%		149.400		3.48 %		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337268 Orang		1 Kegiatan		314690 Orang		75072 Orang		23.86 %		75072 Orang		22.26 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			3.226.155		1.390.766		1.417.942		26.000		1.83%		1.416.766		43.92 %		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2034759 Orang		63 Puskesmas		2041119 Orang		369794 Orang		18.12 %		369794 Orang		18.17 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			18.866		0		149.917		1.300		0.87%		1.300		6.89 %		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749560 Orang		N/A		744435 Orang		120757 Orang		16.22 %		120757 Orang		16.11 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			315.144		203.914		418.182		38.369		9.18%		242.283		76.88 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen		63 Puskesmas		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			438.104		331.396		384.038		14.600		3.80%		345.996		78.98 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		68 Kegiatan		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			422.037		0		6.657.218		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (63 puskesmas)	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			363.311		223.925		196.092		20.196		10.30%		244.121		67.19%		
			Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi		3 Aplikasi		3 Aplikasi		0 Aplikasi		0.00 %		0 Aplikasi		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			363.311		223.925		196.092		20.196		10.30%		244.121		67.19 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5 Dokumen		1 Aplikasi		5 Dokumen		1 Dokumen		20.00 %		1 Dokumen		20.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			57.856.510		710.057		721.060		120.427		16.70%		830.484		1.44%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga		123 Lembaga		122 Lembaga		82 Lembaga		67.21 %		82 Lembaga		67.21 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			47.189.112		369.462		533.000		104.327		19.57%		473.789		1.00 %		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit		63 Puskesmas		63 Unit		63 Unit		100.00 %		63 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			10.667.398		0		188.060		16.100		8.56%		16.100		0.15 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
6	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			7.196.679		2.114.834		11.513.935		50.172		0.44%		21.198.511		294.56%		
			Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	53.52 %		43.31 %		48.49 %		100%		206.23 %		100%		186.85%		Dinas Kesehatan	-
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			7.196.679		21.148.340		11.513.935		50.172		0.44%		21.198.511		294.56%		
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang		3024 Orang		63 Orang		65 Orang		103.17 %		65 Orang		103.17 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			3.841.543		614.990		1.718.935		50.172		2.92%		665.161		17.31 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		28 Kali		1 Dokumen		3 Dokumen		300.00 %		3 Dokumen		300.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			3.355.136		0		9.795.000		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1794 Orang		N/A		1794 Orang		65 Orang		3.62 %		65 Orang		3.62 %		Dinas Kesehatan	
7	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			2.790.371		51.766		467.543		8.400		1.80%		526.061		18.85%		
			Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kesehatan	-
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			2.790.371		495.098		467.543		8.400		1.80%		503.498		18.04%		
			Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT		215 PIRT		217 PIRT		43 PIRT		19.82 %		43 PIRT		19.82 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			2.790.371		495.098		467.543		8.400		1.80%		503.498		18.04 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit		2458 Sampel		150 Unit		41 Unit		27.33 %		41 Unit		27.33 %		Dinas Kesehatan	
8	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			66.842.725		12.983.988		167.034.305		41.130.066		24.62%		170.969.945		255.78%		
			Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	-
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.118.740		195.052		156.741		8.400		5.36%		203.452		2.01%		
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan		154 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		100.00 %		153 Kelurahan		99.35 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			10.118.740		195.052		156.741		8.400		5.36%		203.452		2.01 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen		65 Puskesmas		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			56.723.985		129.644.827		166.877.564		41.121.666		24.64%		170.766.493		301.05%		
			Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan		N/A		6 Kegiatan		4 Kegiatan		66.67 %		4 Kegiatan		66.67 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			54.013.675		124.958.372		164.795.814		41.121.666		24.95%		166.080.038		307.48 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		8 Jenis		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2.710.308		421.994		2.081.759		0		0.00%		421.994		15.57%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (63 puskesmas)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
9	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			135.419.812		11.703.998		124.832.672		20.004.131		16.02%		137.044.109		101.20%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%		95.31 %		92%		98.02 %		106.54 %		98.02 %		103.18%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86.75 %		90.00 %		86.00 %		91.31 %		106.17 %		91.31 %		105.26%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			344.372		130.686		234.961		48.100		20.47%		178.786		51.92%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			344.372		130.686		234.961		48.100		20.47%		178.786		51.92 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.347.173		45.430.818		46.697.018		2.345.515		5.02%		47.776.333		81.88%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			58.347.173		45.430.818		46.697.018		2.345.515		5.02%		47.776.333		81.88 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan		100%		197 Orang/bulan		185 Orang/bulan		93.91 %		185 Orang/bulan		93.91 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.691.809		6.576.438		6.531.141		950.888		14.56%		7.527.327		70.40%		
			Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%		87.21 %		100%		83.96 %		83.96 %		83.96 %		83.96 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.691.809		6.576.438		6.531.141		950.888		14.56%		7.527.327		70.40 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		87.21 %		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66.036.458		64.902.036		71.369.553		16.659.627		23.34%		81.561.664		123.51%		
			Jumlah Kendaraan dinas operasional atau apangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	332 unit		315 unit		321 unit		31 unit		9.66 %		31 unit		9.34 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			34.268.991		37.691.908		40.573.406		12.994.152		32.03%		50.686.061		147.91 %		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		91.49 %		6 Unit		2 Unit		33.33 %		2 Unit		33.33 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			17.184.882		13.319.810		15.250.331		1.722.657		11.30%		15.042.466		87.53 %		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	76 Unit		72 unit		73 Unit		7 Unit		9.59 %		7 Unit		9.21 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.582.585		13.890.319		15.545.817		1.942.818		12.50%		15.833.137		108.58 %		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	243 Unit		243 unit		243 Unit		24 Unit		9.88 %		24 Unit		9.88 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
10	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			50.157.841		6.903.974		52.954.827		8.529.909		16.11%		77.569.644		154.65%		
			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.157.841		69.039.735		52.954.827		8.529.909		16.11%		77.569.644		154.65%		
			Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	64 unit		60 unit		61 unit		13 unit		21.31 %		13 unit		20.31 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir			50.157.841		69.039.735		52.954.827		8.529.909		16.11%		77.569.644		154.65 %		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	285 Unit		264 unit		266 Unit		26 Unit		9.77 %		26 Unit		9.12 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
11	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			9.306.760		827.311		8.580.134		712.907		8.31%		8.986.022		96.55%		
			Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	923 m3		1,041.00 m3		906 m3		228 m3		25.17 %		228 m3		24.70%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.306.760		8.273.115		8.580.134		712.907		8.31%		8.986.022		96.55%		
			angkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan		2 kelurahan		2 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		3 Jenis		75.00 %		3 Jenis		75.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			7.156.794		7.101.988		6.404.457		686.227		10.71%		7.788.216		108.82 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	96 Unit		96 lokasi		96 Unit		24 Unit		25.00 %		24 Unit		25.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			2.149.966		0		2.175.677		26.679		1.23%		26.679		1.24 %		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga		N/A		50 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga		0.00 %		0 Rumah Tangga		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
12	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			582.830.777		53.957.910		728.954.367		13.565.183		1.86%		553.144.286		94.91%		
			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			582.830.777		539.579.103		728.954.367		13.565.183		1.86%		553.144.286		94.91%		
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1223 lokasi		1318 lokasi		1127 lokasi		224 lokasi		19.88 %		224 lokasi		18.32 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen		90 dokumen		80 dokumen		5 dokumen		6.25 %		5 dokumen		6.25 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi		232 Lokasi		200 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			103.393.336		80.697.111		70.962.518		12.002.676		16.91%		92.699.787		89.66 %		
			Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	29000 M		1192 lokasi		60000 M		12591 M		20.99 %		12591 M		43.42 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			125.161.494		111.356.071		173.135.225		42.250		0.02%		111.398.321		89.00 %		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M		232 Lokasi		10000 M		0 M		0.00 %		0 M		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			246.834.073		230.454.863		357.682.344		113.864		0.03%		230.568.727		93.41 %		
			Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	6000 M		75 lokasi		5000 M		0 M		0.00 %		0 M		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			8.038.411		13.019.051		8.271.494		837.654		10.13%		13.856.705		172.38 %		
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	50 Dokumen		60 dokumen		50 Dokumen		5 Dokumen		10.00 %		5 Dokumen		10.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan			89.285.275		94.057.443		102.959.458		517.642		0.50%		94.575.085		105.92 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	3300 M		51 lokasi		2700 M		0 M		0.00 %		0 M		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.03	**Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan**			10.118.188		9.994.564		15.943.327		51.098		0.32%		10.045.661		99.28 %		
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	30 Dokumen		30 dokumen		30 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
13	1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			3.183.407		274.527		3.598.652		429.307		11.93%		3.174.578		99.72%		
			Persentase rekomendasi pemanfaatan alan dan saluran oleh pihak lain	11%		7.35 %		7%		0.74 %		10.57 %		0.74 %		6.73%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			3.183.407		2.745.271		3.598.652		429.307		11.93%		3.174.578		99.72%		
			Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas		267 berkas		240 berkas		60 berkas		25.00 %		60 berkas		25.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	14 Dokumen		13 Dokumen		12 Dokumen		4 Dokumen		33.33 %		4 Dokumen		28.57 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01.02	**Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			1.412.391		950.339		983.835		105.644		10.74%		1.055.983		74.77 %		
			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14 Sistem Jaringan		23 Dokumen		12 Sistem Jaringan		4 Sistem Jaringan		33.33 %		4 Sistem Jaringan		28.57 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01.03	**Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			1.771.015		1.794.932		2.614.816		323.663		12.38%		2.118.595		119.63 %		
			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	240 Sistem Jaringan		267 berkas		240 Sistem Jaringan		60 Sistem Jaringan		25.00 %		60 Sistem Jaringan		25.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
14	1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			315.023.875		28.350.704		343.237.414		8.159.548		2.38%		291.666.589		92.59%		
			Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	91.25 %		90.45 %		90.48 %		57.14 %		63.15 %		57.14 %		62.62%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	90%		83.24 %		82%		87.93 %		107.23 %		87.93 %		97.70%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Persentase bangunan yang ber IMB	2.69 %		1.92 %		2.20 %		0.53 %		24.09 %		0.53 %		19.70%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**			315.023.875		283.507.041		343.237.414		8.159.548		2.38%		291.666.589		92.59%		
			Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1907 Lokasi		N/A		1872 Lokasi		0 Lokasi		0.00 %		0 Lokasi		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	248 Bangunan		302 Bangunan		243 Bangunan		40 Bangunan		16.46 %		40 Bangunan		16.13 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1768 Berkas		N/A		1736 Berkas		805 Berkas		46.37 %		805 Berkas		45.53 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.13	**Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**			38.016.233		43.964.024		41.679.639		4.465.157		10.71%		48.429.182		127.39 %		
			Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	164 Unit		183 Bangunan		175 Unit		40 Unit		22.86 %		40 Unit		24.39 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.09	**Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan**			3.517.554		1.513.713		1.483.141		253.164		17.07%		1.766.878		50.23 %		
			Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1861 Unit		N/A		1861 Unit		459 Unit		24.66 %		459 Unit		24.66 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.03.08.2.01.01	**Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG**			6.187.321		2.702.008		2.583.162		503.639		19.50%		3.205.648		51.81 %		
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.03	**Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota**			744.126		479.400		612.944		112.400		18.34%		591.800		79.53 %		
			Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		3 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.02	**Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**			8.725.773		234.847.895		4.378.674		245.700		5.61%		235.093.595		2,694.24 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	65 Dokumen		N/A		59 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.12	**Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			257.832.869		0		292.499.855		2.579.487		0.88%		2.579.487		1.00 %		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	141 Unit		N/A		137 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
15	1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			610.347.180		59.108.780		633.466.859		8.946.974		1.41%		600.034.777		98.31%		
			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	12.000 meter		29,053.34 meter		10850 meter		0 meter		0.00 %		0 meter		0.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
			Luas jalan yang diperbaiki	210000 m2		472,008.75 m2		150000 m2		45557.1 m2		30.37 %		45557.1 m2		21.69%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			610.347.180		591.087.803		633.466.859		8.946.974		1.41%		600.034.777		98.31%		
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	338 lokasi		272 lokasi		309 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen		212 dokumen		165 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi		N/A		2 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1.501 lokasi		3918 lokasi		1081 lokasi		753 lokasi		69.66 %		753 lokasi		50,17 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.05	**Pembangunan Jalan**			273.886.986		283.074.392		390.505.891		216.865		0.06%		283.291.257		103.43 %		
			Panjang Jalan yang Dibangun	12 KM		N/A		10.85 KM		0 KM		0.00 %		0 KM		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.02	**Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan**			221.175.434		199.142.291		132.223.789		343.324		0.26%		199.485.615		90.19 %		
			Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	5550 M²		4 lokasi		5550 M²		0 M²		0.00 %		0 M²		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.11	**Pemeliharaan Rutin Jalan**			87.885.919		84.359.260		84.039.485		8.109.053		9.65%		92.468.314		105.21 %		
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	40 KM		3917 lokasi		45 KM		20.57 KM		45.71 %		20.57 KM		51.43 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.23	**Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan**			14.182.828		9.244.657		12.593.692		112.497		0.89%		9.357.154		65.98 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	67 Dokumen		69 dokumen		65 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.01	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**			7.385.767		12.422.391		12.761.626		165.235		1.29%		12.587.627		170.43 %		
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	70 Dokumen		143 dokumen		100 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.09	**Rehabilitasi Jalan**			5.830.246		0		1.342.375		0		0.00%		0		0.00 %		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM		N/A		0.8 KM		0 KM		0.00 %		0 KM		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
16	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			982.825		55.194		655.567		71.259		10.87%		623.195		63.41%		
			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	100%		103.00 %		93%		24.76 %		26.62 %		24.76 %		24.76%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**			982.825		551.936		655.567		71.259		10.87%		623.195		63.41%		
			Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis		N/A		5 jenis		1 jenis		20.00 %		1 jenis		20.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			982.825		551.936		655.567		71.259		10.87%		623.195		63.41 %		
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	120 Orang		103 perusahaan		105 Orang		26 Orang		24.76 %		26 Orang		21.67 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
17	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			14.227.131		373.115		5.346.035		677.265		12.67%		4.408.411		30.99%		
			Persentase pelayanan penataan ruang	96%		98.35 %		95%		35.15 %		37.00 %		35.15 %		36.61%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota			3.956.284		1.836.120		3.122.589		420.983		13.48%		2.257.103		57.05%		
			Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			3.956.284		1.836.120		3.122.589		420.983		13.48%		2.257.103		57.05 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			10.270.847		1.895.026		2.223.446		256.283		11.53%		2.151.309		20.95%		
			Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			2.713.270		895.428		668.327		133.533		19.98%		1.028.961		37.92 %		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang			7.557.576		999.598		1.555.119		122.750		7.89%		1.122.348		14.85 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen		154 Kelurahan		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
18	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.352.356		3.235.513		36.116.390		1.716.548		4.75%		34.071.674		60.46%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.5 %		92.06 %		88%		92.93 %		105.60 %		92.93 %		103.83%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.425		60.432		88.553		15.600		17.62%		76.032		63.14%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.425		60.432		88.553		15.600		17.62%		76.032		63.14 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 dokumen		7 Dokumen		1 Dokumen		14.29 %		1 Dokumen		12.50 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			43.233.748		25.583.648		25.852.116		980.153		3.79%		26.563.801		61.44%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			43.233.748		25.583.648		25.852.116		980.153		3.79%		26.563.801		61.44 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		100%		81 Orang/bulan		76 Orang/bulan		93.83 %		76 Orang/bulan		93.83 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.664.298		4.688.552		7.103.264		482.123		6.79%		5.170.676		53.50%		
			Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis		15 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		100.00 %		3 Jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.664.298		4.688.552		7.103.264		482.123		6.79%		5.170.676		53.50 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		100%		15 Paket		11 Paket		73.33 %		11 Paket		73.33 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.333.885		2.022.494		3.072.457		238.672		7.77%		2.261.166		67.82%		
			Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis		N/A		2 Jenis		2 Jenis		100.00 %		2 Jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.333.885		2.022.494		3.072.457		238.672		7.77%		2.261.166		67.82 %		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit		100%		98 Unit		53 Unit		54.08 %		53 Unit		54.08 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
19	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			40.719.101		2.043.314		18.507.250		2.753.250		14.88%		23.186.386		56.94%		
			Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%		70.72 %		75%		71.35 %		95.13 %		71.35 %		71.35%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			40.719.101		20.433.137		18.507.250		2.753.250		14.88%		23.186.386		56.94%		
			Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5157 Unit Hunian		N/A		5157 Unit Hunian		5157 Unit Hunian		100.00 %		5157 Unit Hunian		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			40.719.101		20.433.137		18.507.250		2.753.250		14.88%		23.186.386		56.94 %		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 Dokumen		105 blok		105 Dokumen		105 Dokumen		100.00 %		105 Dokumen		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
20	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			18.599.004		3.793.147		137.498.483		18.539.620		13.48%		56.471.090		303.62%		
			Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	100%		103.22 %		92%		6.48 %		7.04 %		6.48 %		6.48%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			18.599.004		37.931.470		137.498.483		18.539.620		13.48%		56.471.090		303.62%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			18.599.004		37.931.470		137.498.483		18.539.620		13.48%		56.471.090		303.62 %		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	405 Unit Rumah		929 unit		2700 Unit Rumah		175 Unit Rumah		6.48 %		175 Unit Rumah		43.21 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
21	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			96.664.080		6.846.162		32.936.761		1.415.821		4.30%		69.877.436		72.29%		
			Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%		111.11 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			96.664.080		68.461.615		32.936.761		1.415.821		4.30%		69.877.436		72.29%		
			Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi		10 lokasi		7 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			96.664.080		68.461.615		32.936.761		1.415.821		4.30%		69.877.436		72.29 %		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah		10 Bangunan		7 Unit Rumah		0 Unit Rumah		0.00 %		0 Unit Rumah		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
22	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.260.047		120.431		1.847.257		325.999		17.65%		1.530.314		121.45%		
			Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	100%		24.66 %		40%		32.88 %		82.20 %		32.88 %		32.88%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.260.047		1.204.315		1.847.257		325.999		17.65%		1.530.314		121.45%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen		12 dokumen		11 dokumen		3 dokumen		27.27 %		3 dokumen		25.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			1.260.047		1.204.315		1.847.257		325.999		17.65%		1.530.314		121.45 %		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan		12 dokumen		11 Laporan		6 Laporan		54.55 %		6 Laporan		50.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
23	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			96.085.239		7.332.734		78.064.945		5.520.562		7.07%		78.847.900		82.06%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%		95.86 %		93%		95.6 %		102.80 %		95.6 %		100.63%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%		93.11 %		88%		96.2 %		109.32 %		96.2 %		109.32%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98%		97.86 %		96.5 %		98.17 %		101.73 %		98.17 %		100.17%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79.722.492		62.755.882		66.242.082		3.332.805		5.03%		66.088.687		82.90%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.585.968		29.325.250		29.925.784		1.626.599		5.44%		30.951.849		82.35 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan		100%		132 Orang/bulan		125 Orang/bulan		94.70 %		125 Orang/bulan		94.70 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.269.993		8.119.846		9.599.248		349.406		3.64%		8.469.251		69.02 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		100%		25 Orang/bulan		25 Orang/bulan		100.00 %		25 Orang/bulan		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			29.866.532		25.310.785		26.717.050		1.356.801		5.08%		26.667.587		89.29 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan		100%		111 Orang/bulan		105 Orang/bulan		94.59 %		105 Orang/bulan		94.59 %		Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.872.334		4.670.906		6.083.281		1.106.179		18.18%		5.777.085		84.06%		
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			773.782		527.622		718.009		144.139		20.07%		671.761		86.82 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		100%		2 Paket		2 Paket		100.00 %		2 Paket		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.659.697		2.163.046		2.341.704		524.402		22.39%		2.687.449		161.92 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		68.29 %		17 Paket		6 Paket		35.29 %		6 Paket		35.29 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.438.855		1.980.237		3.023.568		437.637		14.47%		2.417.875		54.47 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		64.32 %		17 Paket		4 Paket		23.53 %		4 Paket		23.53 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.490.413		5.900.550		5.739.582		1.081.578		18.84%		6.982.128		73.57%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		92.06 %		100%		86%		86.00 %		86%		86.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket		N/A		3 paket		3 paket		100.00 %		3 paket		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		88.17 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.935.520		1.374.399		1.291.590		249.210		19.29%		1.623.608		83.88 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		92.06 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.004.199		2.527.856		2.961.696		581.706		19.64%		3.109.562		77.66 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Bulan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.550.694		1.998.295		1.486.296		250.663		16.86%		2.248.958		63.34 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		88.17 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
24	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			37.177.337		2.713.882		46.894.469		5.268.812		11.24%		32.407.629		87.17%		
			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Persentase PPNS yang dibina	100%		96.67 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			34.779.392		24.183.526		39.882.649		4.859.192		12.18%		29.042.718		83.51%		
			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali		N/A		192 Kali		53 Kali		27.60 %		53 Kali		27.60 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	116 Titik/Lokasi		92 Titik/Lokasi		98 Titik/Lokasi		98 Titik/Lokasi		100.00 %		98 Titik/Lokasi		84.48 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1520 Orang		1340 Orang		1150 Orang		300 Orang		26.09 %		300 Orang		19.74 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		100.00 %		11 Lembaga		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.06	**Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			527.904		482.832		946.068		212.924		22.51%		695.756		131.80 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen		293 Kali		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.01	**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**			31.434.907		20.722.542		35.985.076		4.052.663		11.26%		24.775.205		78.81 %		
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	10080 Kasus		10205 Objek		10080 Kasus		2466 Kasus		24.46 %		2466 Kasus		24.46 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.02	**Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**			2.167.280		1.839.383		1.660.505		380.934		22.94%		2.220.317		102.45 %		
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Kasus		43 Penertiban		36 Kasus		5 Kasus		13.89 %		5 Kasus		13.89 %		Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			464.625		889.143		863.860		109.685		12.70%		998.827		214.98 %		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	978 Orang		200 Kali		978 Orang		299 Orang		30.57 %		299 Orang		30.57 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada			124.031		138.779		238.409		35.663		14.96%		174.442		140.64 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		79 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			60.646		110.848		188.730		67.323		35.67%		178.170		293.79 %		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2 Dokumen		18 SOP		18 Dokumen		4 Dokumen		22.22 %		4 Dokumen		200.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			2.282.865		2.847.760		6.802.495		374.140		5.50%		3.221.900		141.13%		
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek		N/A		94 Objek		28 Objek		29.79 %		28 Objek		29.79 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek		N/A		4230 Objek		1042 Objek		24.63 %		1042 Objek		24.63 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.865.433		1.678.786		2.821.713		247.724		8.78%		1.926.510		103.27 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan		1042 Objek		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			417.432		470.451		876.822		126.416		14.42%		596.867		142.99 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan		280 Objek		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			0		0		3.103.960		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	N/A		N/A		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		N/A		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			115.079		107.531		209.325		35.480		16.95%		143.011		124.27%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	65 Orang		N/A		80 Orang		22 Orang		27.50 %		22 Orang		33.85 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			115.079		107.531		209.325		35.480		16.95%		143.011		124.27 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan		87 Orang		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
25	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			48.680.383		4.478.739		27.785.584		4.254.025		15.31%		49.041.414		100.74%		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%		52.73 %		100%		99.71 %		99.71 %		99.71 %		99.71%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%		97.82 %		100%		94.67 %		94.67 %		94.67 %		94.67%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			20.320.538		19.768.220		2.163.958		287.103		13.27%		20.055.324		98.69%		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan		N/A		42 Kegiatan		6 Kegiatan		14.29 %		6 Kegiatan		14.29 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			3.318.289		949.005		1.180.639		190.983		16.18%		1.139.988		34.35 %		
			Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1650 Orang		1650 orang		1650 Orang		350 Orang		21.21 %		350 Orang		21.21 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			16.669.689		18.583.044		787.231		87.720		11.14%		18.670.764		112.00 %		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	31 Kawasan		10 Kali		30 Kawasan		6 Kawasan		20.00 %		6 Kawasan		19.35 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			332.559		236.172		196.088		8.400		4.28%		244.572		73.54 %		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit		5 jenis		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			28.359.846		25.019.168		25.621.626		3.966.922		15.48%		28.986.090		102.21%		
			Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis		N/A		10 Jenis		10 Jenis		100.00 %		10 Jenis		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			26.091.537		23.039.300		23.171.624		3.658.109		15.79%		26.697.409		102.32 %		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4497 Orang		11 jenis		4497 Orang		3863 Orang		85.90 %		3863 Orang		85.90 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			2.268.308		1.979.869		2.450.002		308.813		12.60%		2.288.681		100.90 %		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang		4 Jenis		467 Orang		235 Orang		50.32 %		235 Orang		50.32 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
26	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			64.034.041		8.057.070		80.102.841		6.554.199		8.18%		87.124.899		136.06%		
			Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-
			Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	46		45.41		48		8.7		181.88 %		8.7		181.09%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			62.884.592		79.695.753		79.142.506		6.379.938		8.06%		86.075.691		136.88%		
			Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas		N/A		656 Petugas		0 Petugas		0.00 %		0 Petugas		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			42.696.091		36.934.124		28.014.954		5.364.695		19.15%		42.298.819		99.07 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		635 Orang		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			1.006.458		756.046		609.099		105.088		17.25%		861.135		85.56 %		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang		10 Kali		10 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			10.493.247		35.715.454		43.271.465		162.036		0.37%		35.877.490		341.91 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	910 Unit		1567 Unit		806 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			8.688.797		6.290.129		7.246.987		748.118		10.32%		7.038.247		81.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen		220 Unit		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			550.836		339.995		485.339		84.937		17.50%		424.932		77.14%		
			Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	520 Berkas		N/A		460 Berkas		100 Berkas		21.74 %		100 Berkas		19.23 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			550.836		339.995		485.339		84.937		17.50%		424.932		77.14 %		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen		520 Bangunan/Gedung		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			598.613		534.953		474.996		89.324		18.81%		624.277		104.29%		
			Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	110 Kegiatan		N/A		80 Kegiatan		16 Kegiatan		20.00 %		16 Kegiatan		14.55 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			598.613		534.953		474.996		89.324		18.81%		624.277		104.29 %		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1100 Orang		146 Kali		800 Orang		160 Orang		20.00 %		160 Orang		14.55 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
27	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.100.497		1.808.831		19.706.690		1.183.799		6.01%		19.272.112		79.97%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		89.88 %		88%		91.59 %		104.08 %		91.59 %		104.08%		Dinas Sosial	-
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.227.230		15.234.168		16.127.903		629.806		3.91%		15.863.974		82.51%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.227.230		15.234.168		16.127.903		629.806		3.91%		15.863.974		82.51 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		100%		45 Orang/bulan		43 Orang/bulan		95.56 %		43 Orang/bulan		95.56 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.354.427		1.508.488		2.275.064		303.236		13.33%		1.811.724		76.95%		
			Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%		76.82 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.354.427		1.508.488		2.275.064		303.236		13.33%		1.811.724		76.95 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		103 unit		12 Paket		16 Paket		133.33 %		16 Paket		133.33 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.518.840		1.345.657		1.303.724		250.757		19.23%		1.596.414		63.38%		
			Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.518.840		1.345.657		1.303.724		250.757		19.23%		1.596.414		63.38 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
28	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			8.489.757		514.939		6.961.675		1.238.809		17.79%		6.388.198		75.25%		
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88.98 %		76.61 %		85.95 %		110.5 %		128.56 %		110.5 %		124.19%		Dinas Sosial	-
			Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%		81.82 %		82.35 %		100%		121.43 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			8.489.757		5.149.389		6.961.675		1.238.809		17.79%		6.388.198		75.25%		
			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	372 orang		N/A		359 orang		518 orang		144.29 %		518 orang		139.25 %		Dinas Sosial	
			Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	7 jenis		N/A		5 jenis		4 jenis		80.00 %		4 jenis		57.14 %		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			6.940.781		4.290.146		5.727.922		1.013.772		17.70%		5.303.918		76.42 %		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	597 Orang		N/A		577 Orang		341 Orang		59.10 %		341 Orang		57.12 %		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			1.548.976		859.243		1.233.753		225.037		18.24%		1.084.280		70.00 %		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga		N/A		10 Lembaga		6 Lembaga		60.00 %		6 Lembaga		50.00 %		Dinas Sosial	
29	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			67.098.483		2.989.997		151.889.260		32.251.415		21.23%		62.151.380		92.63%		
			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-
			Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			45.567.674		14.430.343		135.376.997		29.473.658		21.77%		43.904.002		96.35%		
			Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			5.917.303		0		4.656.514		728.653		15.65%		728.653		12.31 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang		N/A		130 Orang		96 Orang		73.85 %		96 Orang		73.85 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			37.558.454		14.190.140		16.199.846		1.435.567		8.86%		15.625.707		41.60 %		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	215 Orang		N/A		215 Orang		212 Orang		98.60 %		212 Orang		98.60 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan			1.615.342		0		739.923		121.759		16.46%		121.759		7.54 %		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		N/A		40 Orang		48 Orang		120.00 %		48 Orang		120.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			476.574		240.203		430.448		9.283		2.16%		249.486		52.35 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang		1654 orang		795 Orang		408 Orang		51.32 %		408 Orang		51.32 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan			0		0		113.350.266		27.178.397		23.98%		27.178.397		0.00 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		N/A		23364 Orang		21136 Orang		90.46 %		21136 Orang		N/A		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			21.530.809		15.469.622		16.512.263		2.777.756		16.82%		18.247.378		84.75%		
			Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			17.475.588		12.461.326		13.963.980		2.295.119		16.44%		14.756.445		84.44 %		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1100 Orang		1073 orang		1100 Orang		919 Orang		83.55 %		919 Orang		83.55 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan			4.055.221		3.008.296		2.548.283		482.638		18.94%		3.490.934		86.08 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang		4784 kali		4716 Orang		1233 Orang		26.15 %		1233 Orang		26.15 %		Dinas Sosial	
30	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			10.901.678		2.335.854		26.680.875		1.327.831		4.98%		24.686.373		226.45%		
			Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%		87.75 %		87%		96.76 %		111.22 %		96.76 %		111.22%		Dinas Sosial	-
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			10.901.678		23.358.542		26.680.875		1.327.831		4.98%		24.686.373		226.45%		
			Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			116.497		0		4.332.997		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2229 Orang		N/A		630 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			5.865.631		14.272.137		17.766.290		368.050		2.07%		14.640.187		249.59 %		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83899 Keluarga		27 kali		98479 Keluarga		60112 Keluarga		61.04 %		60112 Keluarga		71.65 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4.681.621		5.253.804		4.218.988		859.381		20.37%		6.113.185		130.58 %		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	534731 Orang		12 kali		802097 Orang		219427 Orang		27.36 %		219427 Orang		41.04 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			237.929		180.071		362.600		100.400		27.69%		280.471		117.88 %		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	264931 keluarga		24 data		264931 keluarga		72578 keluarga		27.40 %		72578 keluarga		27.40 %		Dinas Sosial	
31	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			1.980.041		208.369		1.633.492		183.863		11.26%		2.267.555		114.52%		
			Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.980.041		2.083.691		1.633.492		183.863		11.26%		2.267.555		114.52%		
			Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis		N/A		3 Jenis		3 Jenis		100.00 %		3 Jenis		100.00 %		Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.980.041		2.083.691		1.633.492		183.863		11.26%		2.267.555		114.52 %		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam		3 jenis		7 Makam		7 Makam		100.00 %		7 Makam		100.00 %		Dinas Sosial	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
32	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.606.977		1.338.496		14.044.117		785.943		5.60%		14.170.900		97.01%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		93.88 %		92%		94.87 %		103.12 %		94.87 %		99.86%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.701.619		11.683.096		12.370.260		472.105		3.82%		12.155.202		95.70%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.701.619		11.683.096		12.370.260		472.105		3.82%		12.155.202		95.70 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		100%		31 Orang/bulan		30 Orang/bulan		96.77 %		30 Orang/bulan		96.77 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.905.358		1.701.861		1.673.857		313.838		18.75%		2.015.699		105.79%		
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.596.618		1.432.504		1.291.403		240.223		18.60%		1.672.727		104.77 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		93.87 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			308.739		269.356		382.454		73.615		19.25%		342.971		111.09 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		95.45 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
33	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			11.303.582		786.522		10.545.941		351.179		3.33%		8.216.396		72.69%		
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	85.02 %		83.06 %		79.02 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	91.7 %		98.36 %		90.2 %		98.96 %		109.71 %		98.96 %		107.92%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			6.876.862		4.694.035		7.246.301		131.461		1.81%		4.825.496		70.17%		
			Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			434.813		363.442		560.449		58.221		10.39%		421.663		96.98 %		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga		130 Orang		12 Lembaga		3 Lembaga		25.00 %		3 Lembaga		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			6.442.049		4.330.593		6.685.853		73.240		1.10%		4.403.833		68.36 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang		732 Orang		720 Orang		96 Orang		13.33 %		96 Orang		13.33 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			305.648		534.433		308.188		30.400		9.86%		564.833		184.80%		
			Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			305.648		534.433		308.188		30.400		9.86%		564.833		184.80 %		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan		1 Dokumen		50 Perusahaan		0 Perusahaan		0.00 %		0 Perusahaan		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.121.071		2.636.749		2.991.451		189.318		6.33%		2.826.068		68.58%		
			Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan		N/A		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			4.121.071		2.636.749		2.991.451		189.318		6.33%		2.826.068		68.58 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen		912 Orang		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
34	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			3.690.000		255.661		2.895.607		591.516		20.43%		3.148.123		85.31%		
			Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	5%		2.03 %		2.5 %		-100%		-4,000.00 %		-100%		-2,000.00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			2.280.264		1.787.445		2.031.009		464.327		22.86%		2.251.772		98.75%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan		N/A		9 laporan		3 laporan		33.33 %		3 laporan		33.33 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.02	**Pelayanan antar Kerja**			24.068		51.256		78.214		9.700		12.40%		60.956		253.27 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2150 Orang		60 orang		1900 Orang		204 Orang		10.74 %		204 Orang		9.49 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.03	**Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**			1.151.313		655.638		629.129		98.894		15.72%		754.532		65.54 %		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1500 Orang		1000 orang		1000 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.05	**Perluasan Kesempatan Kerja**			1.104.883		1.080.551		1.323.666		355.733		26.87%		1.436.283		129.99 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang		532 orang		250 Orang		188 Orang		75.20 %		188 Orang		75.20 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**			338.718		290.115		391.272		48.801		12.47%		338.915		100.06%		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	7 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		14.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03.03	**Job Fair/Bursa Kerja**			338.718		290.115		391.272		48.801		12.47%		338.915		100.06 %		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	350 Orang		4 Kali		200 Orang		55 Orang		27.50 %		55 Orang		15.71 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**			1.071.018		479.047		473.326		78.389		16.56%		557.436		52.05%		
			Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	7 Laporan		2 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		14.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04.01	**Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)**			1.071.018		479.047		473.326		78.389		16.56%		557.436		52.05 %		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang		100 Orang		200 Orang		50 Orang		25.00 %		50 Orang		14.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
35	2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			2.216.940		219.350		2.495.577		425.782		17.06%		2.619.280		118.15%		
			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	60%		21.02 %		30%		22.75 %		75.83 %		22.75 %		37.92%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	15.04 %		15.63 %		13.14 %		13.08 %		99.54 %		13.08 %		86.97%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			1.358.206		1.253.780		1.459.190		208.538		14.29%		1.462.319		107.67%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			62.206		46.300		44.132		9.150		20.73%		55.450		89.14 %		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan		270 Berkas		220 Perusahaan		76 Perusahaan		34.55 %		76 Perusahaan		34.55 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			1.296.000		1.207.480		1.415.059		199.388		14.09%		1.406.869		108.55 %		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			858.734		939.717		1.036.387		217.244		20.96%		1.156.962		134.73%		
			Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			525.521		618.587		631.735		118.338		18.73%		736.925		140.23 %		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara		500 Orang		50 Perkara		14 Perkara		28.00 %		14 Perkara		28.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			333.213		321.130		404.652		98.906		24.44%		420.037		126.06 %		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara		120 Kasus		110 Perkara		24 Perkara		21.82 %		24 Perkara		21.82 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
36	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.557.497		1.273.315		13.603.211		1.005.299		7.39%		13.738.453		78.25%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		93.04 %		100%		95.51 %		95.51 %		95.51 %		95.51%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.968.828		9.754.549		10.546.574		367.799		3.49%		10.122.347		78.05%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.968.828		9.754.549		10.546.574		367.799		3.49%		10.122.347		78.05 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		100%		24 Orang/bulan		24 Orang/bulan		100.00 %		24 Orang/bulan		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.012.046		2.579.648		2.548.679		515.309		20.22%		3.094.957		77.14%		
			Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		93.56 %		100%		72.18 %		72.18 %		72.18 %		72.18 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.012.046		2.579.648		2.548.679		515.309		20.22%		3.094.957		77.14 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		23 Rekening		17 Paket		13 Paket		76.47 %		13 Paket		260.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			576.622		398.958		507.959		122.191		24.06%		521.149		90.38%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%		63.96 %		100%		66.67 %		66.67 %		66.67 %		66.67 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			576.622		398.958		507.959		122.191		24.06%		521.149		90.38 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		20 Rekening		16 Laporan		8 Laporan		50.00 %		8 Laporan		133.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
37	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			2.324.452		169.633		1.483.743		176.699		11.91%		1.873.027		80.58%		
			Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%		102.94 %		100%		3.13 %		3.13 %		3.13 %		3.13%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**			782.126		594.261		540.586		88.816		16.43%		683.077		87.34%		
			Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.01.03	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG**			782.126		594.261		540.586		88.816		16.43%		683.077		87.34 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah		58 Lembaga		58 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0.00 %		0 Perangkat Daerah		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**			467.797		313.054		321.424		39.557		12.31%		352.611		75.38%		
			Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		600 Orang		600 Orang		136 Orang		22.67 %		136 Orang		22.67 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.02.02	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**			467.797		313.054		321.424		39.557		12.31%		352.611		75.38 %		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi		4 Kali		31 Organisasi		1 Organisasi		3.23 %		1 Organisasi		3.23 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.074.529		789.013		621.733		48.326		7.77%		837.339		77.93%		
			Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan		N/A		12 Kegiatan		1 Kegiatan		8.33 %		1 Kegiatan		4.76 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.074.529		789.013		621.733		48.326		7.77%		837.339		77.93 %		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang		1132 Orang		740 Orang		72 Orang		9.73 %		72 Orang		9.73 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
38	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			538.911		48.096		621.939		117.593		18.91%		598.550		111.07%		
			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	100%		32.26 %		48.38 %		48.39 %		100.02 %		48.39 %		48.39%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			105.528		173.139		200.200		26.200		13.09%		199.339		188.90%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah pengaduan dan layanan rujukan anjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus		38 kasus		20 kasus		16 kasus		80.00 %		16 kasus		80.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.02.01	**Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**			105.528		111.500		200.200		26.200		13.09%		137.700		130.49 %		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang		38 kasus		20 Orang		16 Orang		80.00 %		16 Orang		80.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			433.382		272.663		421.739		91.393		21.67%		364.056		84.00%		
			Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	31 kecamatan		10 kecamatan		15 kecamatan		0 kecamatan		0.00 %		0 kecamatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03.04	**Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			433.382		272.663		421.739		91.393		21.67%		364.056		84.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		133 orang		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
39	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			619.665		52.953		1.121.808		134.715		12.01%		664.242		107.19%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	283		322.00		245		0		0.00 %		0		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			619.665		529.527		1.121.808		134.715		12.01%		664.242		107.19%		
			Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			619.665		529.527		1.121.808		134.715		12.01%		664.242		107.19 %		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan		2 lembaga		3 Layanan		2 Layanan		66.67 %		2 Layanan		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
40	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			468.442		26.464		285.277		35.491		12.44%		300.131		64.07%		
			Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			468.442		264.640		285.277		35.491		12.44%		300.131		64.07%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga		58 Lembaga		58 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.05.2.01.01	**Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota**			468.442		264.640		285.277		35.491		12.44%		300.131		64.07 %		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		2 Kali		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
41	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			3.918.987		211.745		3.429.210		417.560		12.18%		2.535.006		64.69%		
			Persentase Kelurahan Layak Anak	100%		61.69 %		60.38 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			911.497		401.630		799.665		36.973		4.62%		438.602		48.12%		
			Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.01.01	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			911.497		401.630		799.665		36.973		4.62%		438.602		48.12 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	21 Organisasi		42 Kelurahan		20 Organisasi		0 Organisasi		0.00 %		0 Organisasi		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**			3.007.491		1.715.816		2.629.545		380.587		14.47%		2.096.404		69.71%		
			Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.02.03	**Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			1.431.215		514.310		1.035.345		130.271		12.58%		644.581		45.04 %		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		447 Lembaga		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.02.01	**Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.576.276		1.201.506		1.594.200		250.317		15.70%		1.451.823		92.10 %		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		2 Lembaga		20 Orang		22 Orang		110.00 %		22 Orang		220.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
42	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			1.549.369		124.382		1.114.293		212.431		19.06%		1.456.251		93.99%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	100%		32.26 %		48.38 %		48.39 %		100.02 %		48.39 %		48.39%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.549.369		1.095.556		1.114.293		212.431		19.06%		1.307.987		84.42%		
			Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	31 lembaga		10 lembaga		15 lembaga		15 lembaga		100.00 %		15 lembaga		48.39 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus		154 kasus		150 kasus		55 kasus		36.67 %		55 kasus		36.67 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			192.248		191.418		105.474		21.530		20.41%		212.948		110.77 %		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Layanan		154 kasus		150 Layanan		55 Layanan		36.67 %		55 Layanan		36.67 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.357.120		904.139		1.008.818		190.901		18.92%		1.095.040		80.69 %		
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		154 kasus		150 Orang		55 Orang		36.67 %		55 Orang		36.67 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
43	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.817.816		2.081.511		24.690.333		1.406.100		5.69%		22.221.211		82.86%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		93.70 %		93.5 %		93.78 %		100.30 %		93.78 %		98.72%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.173.111		16.452.095		18.979.478		724.486		3.82%		17.176.581		77.47%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.173.111		16.452.095		18.979.478		724.486		3.82%		17.176.581		77.47 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		100%		49 Orang/bulan		48 Orang/bulan		97.96 %		48 Orang/bulan		97.96 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.644.705		4.363.016		5.710.855		681.614		11.94%		5.044.630		108.61%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		91.34 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.681.649		3.275.699		3.463.616		540.828		15.61%		3.816.527		103.66 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		91.34 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			963.056		1.087.317		2.247.238		140.786		6.26%		1.228.103		127.52 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		63.32 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
44	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2.185.139		164.527		1.727.769		216.018		12.50%		1.861.288		85.18%		
			Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1.26		0.96		1.15		1.76		153.04 %		1.76		139.68%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			931.260		565.175		660.259		97.480		14.76%		662.655		71.16%		
			Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis		N/A		4 Jenis		1 Jenis		25.00 %		1 Jenis		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			931.260		565.175		660.259		97.480		14.76%		662.655		71.16 %		
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Dokumen		15 Kali		15 Dokumen		3 Dokumen		20.00 %		3 Dokumen		20.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			1.253.879		1.080.096		1.067.510		118.538		11.10%		1.198.634		95.59%		
			Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis		N/A		3 Jenis		2 Jenis		66.67 %		2 Jenis		66.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1.253.879		1.080.096		1.067.510		118.538		11.10%		1.198.634		95.59 %		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		40 Kali		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
45	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			973.715		69.417		861.561		134.988		15.67%		829.155		85.15%		
			Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97.91 %		96.00 %		97.88 %		99.62 %		101.78 %		99.62 %		101.75%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			973.715		694.166		861.561		134.988		15.67%		829.155		85.15%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			973.715		694.166		861.561		134.988		15.67%		829.155		85.15 %		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen		1500 sampel		36 Dokumen		6 Dokumen		16.67 %		6 Dokumen		16.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
46	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			153.598.241		1.178.041		127.922.219		281.706		0.22%		12.062.111		7.85%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	55265.71 M2		7,763.00 M2		42279.63 M2		0 M2		0.00 %		0 M2		0.00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			153.598.241		11.780.406		127.922.219		281.706		0.22%		12.062.111		7.85%		
			Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non nfrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi		N/A		1 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			153.598.241		11.780.406		127.922.219		281.706		0.22%		12.062.111		7.85 %		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 lokasi		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
47	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			98.611.737		6.092.517		59.060.737		4.268.409		7.23%		65.193.582		66.11%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%		88.00 %		86%		89.47 %		104.03 %		89.47 %		102.84%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			81.736.755		45.813.325		45.863.962		2.211.337		4.82%		48.024.661		58.76%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			81.736.755		45.813.325		45.863.962		2.211.337		4.82%		48.024.661		58.76 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan		100%		193 Orang/bulan		178 Orang/bulan		92.23 %		178 Orang/bulan		92.23 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.689.324		14.619.196		12.711.999		1.985.724		15.62%		16.604.920		105.84%		
			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		90.54 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			15.689.324		14.619.196		12.711.999		1.985.724		15.62%		16.604.920		105.84 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		90.54 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.185.658		492.653		484.777		71.348		14.72%		564.001		47.57%		
			Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%		79.15 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.185.658		492.653		484.777		71.348		14.72%		564.001		47.57 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		79.15 %		50 Unit		12 Unit		24.00 %		12 Unit		24.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
48	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			6.731.441		465.968		37.380.552		9.721.050		26.01%		14.380.729		213.64%		
			Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	50%		45.58 %		44%		44.44 %		101.00 %		44.44 %		88.88%		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	90%		100.00 %		84%		96.11 %		114.42 %		96.11 %		106.79%		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.963.234		2.023.950		2.569.102		482.785		18.79%		2.506.734		84.59%		
			Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			umlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan		3 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100.00 %		1 kegiatan		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1.002.892		529.332		949.837		168.932		17.79%		698.264		69.63 %		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen		1011 data		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			1.960.342		1.494.617		1.619.265		313.853		19.38%		1.808.470		92.25 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		23 lokasi		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			3.768.206		2.635.730		34.811.450		9.238.265		26.54%		11.873.995		315.11%		
			Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	3 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		100.00 %		2 stasiun		66.67 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			1.378.750		735.075		1.046.589		85.202		8.14%		820.277		59.49 %		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan		365 data		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			2.389.456		1.900.655		33.764.860		9.153.063		27.11%		11.053.718		462.60 %		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	300 Titik		300 unit		8000 Titik		1850 Titik		23.13 %		1850 Titik		616.67 %		Dinas Lingkungan Hidup	
49	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			114.572.766		8.872.087		109.850.564		12.035.530		10.96%		100.756.397		87.94%		
			Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	100%		101.42 %		99.24 %		101.42 %		102.20 %		101.42 %		101.42%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			114.572.766		88.720.867		109.850.564		12.035.530		10.96%		100.756.397		87.94%		
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.87 Ha		2.79 Ha		2.81 Ha		2.79 Ha		99.29 %		2.79 Ha		97.21 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.87 Ha		2.79 Ha		2.81 Ha		2.79 Ha		99.29 %		2.79 Ha		97.21 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			88.616.171		65.496.992		85.844.183		9.476.777		11.04%		74.973.770		84.61 %		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.90 Ha		463 lokasi		275.84 Ha		275.84 Ha		100.00 %		275.84 Ha		99.98 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			9.689.511		9.859.275		8.282.864		508.252		6.14%		10.367.527		107.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit		79 Lokasi		125 Unit		125 Unit		100.00 %		125 Unit		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			15.911.738		13.128.430		15.110.075		2.001.856		13.25%		15.130.286		95.09 %		
			Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	143.26 Ha		14 lokasi		143.26 Ha		143.26 Ha		100.00 %		143.26 Ha		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			355.347		236.170		613.443		48.645		7.93%		284.814		80.15 %		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		7 ekosistem		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
50	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			5.250.677		329.161		2.254.899		172.652		7.66%		3.464.259		65.98%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	100%		80.00 %		90%		90%		100.00 %		90%		90.00%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%		100.00 %		80%		100%		125.00 %		100%		125.00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**			779.119		274.327		370.217		50.171		13.55%		324.498		41.65%		
			Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas		214 berkas		250 berkas		51 berkas		20.40 %		51 berkas		20.40 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01.01	**Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**			779.119		274.327		370.217		50.171		13.55%		324.498		41.65 %		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen		220 Berkas		255 Dokumen		52 Dokumen		20.39 %		52 Dokumen		20.39 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			4.471.557		3.017.280		1.884.683		122.482		6.50%		3.139.761		70.22%		
			Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100.00 %		1 kegiatan		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan**			4.471.557		3.017.280		1.884.683		122.482		6.50%		3.139.761		70.22 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen		8 lokasi		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
51	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			4.000.329		135.920		1.904.052		260.046		13.66%		1.619.243		40.48%		
			Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	95%		50.79 %		60%		19%		31.67 %		19%		20.00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			4.000.329		1.359.197		1.904.052		260.046		13.66%		1.619.243		40.48%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek		432 obyek		432 obyek		109 obyek		25.23 %		109 obyek		25.23 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%		100%		80%		100%		125.00 %		100%		125.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.01	**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**			2.406.414		868.623		1.234.222		163.775		13.27%		1.032.398		42.90 %		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	350 Dokumen		N/A		275 Dokumen		46 Dokumen		16.73 %		46 Dokumen		13.14 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.03	**Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			1.593.914		490.574		669.830		96.271		14.37%		586.845		36.82 %		
			Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	254 Laporan		N/A		432 Laporan		109 Laporan		25.23 %		109 Laporan		42.91 %		Dinas Lingkungan Hidup	
52	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			8.194.978		501.260		2.355.301		503.753		21.39%		5.516.355		67.31%		
			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	71.81 %		100.86 %		55.66 %		62.23 %		111.80 %		62.23 %		86.66%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	63.84 %		55.77 %		57.74 %		57.03 %		98.77 %		57.03 %		89.33%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			8.194.978		5.012.602		2.355.301		503.753		21.39%		5.516.355		67.31%		
			Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis		1 jenis		1 jenis		2 jenis		200.00 %		2 jenis		200.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali		12 kali		12 kali		6 kali		50.00 %		6 kali		50.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.02	**Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup**			7.391.891		5.012.602		1.646.833		327.322		19.88%		5.339.924		72.24 %		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		6 Dokumen		50.00 %		6 Dokumen		50.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.03	**Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup**			803.086		0		708.468		176.431		24.90%		176.431		21.97 %		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1725 Orang		N/A		1560 Orang		825 Orang		52.88 %		825 Orang		47.83 %		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
53	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			687.892		32.594		4.268.109		8.400		0.20%		334.340		48.60%		
			Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	92.00 %		50.40 %		60.80 %		50.4 %		82.89 %		50.4 %		54.78%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			687.892		325.940		4.268.109		8.400		0.20%		334.340		48.60%		
			Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan		4 penghargaan		4 penghargaan		0 penghargaan		0.00 %		0 penghargaan		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			687.892		325.940		4.268.109		8.400		0.20%		334.340		48.60 %		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas		N/A		10 Entitas		0 Entitas		0.00 %		0 Entitas		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
54	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			732.771		30.866		376.997		41.385		10.98%		350.049		47.77%		
			Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	46 obyek		44.00 obyek		49 obyek		10 obyek		179.59 %		10 obyek		178.26%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			732.771		308.664		376.997		41.385		10.98%		350.049		47.77%		
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan			732.771		308.664		376.997		41.385		10.98%		350.049		47.77 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	46 Dokumen		44 Obyek		49 Dokumen		10 Dokumen		20.41 %		10 Dokumen		21.74 %		Dinas Lingkungan Hidup	
55	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			445.929.165		38.344.873		463.750.095		60.587.718		13.06%		444.036.451		99.58%		
			Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88.76 %		91.05 %		87.64 %		91.05 %		103.89 %		91.05 %		102.58%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	52%		74.62 %		50.5 %		54.08 %		107.09 %		54.08 %		104.00%		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5.12 %		2.56 %		2.56 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**			445.929.165		383.448.733		463.750.095		60.587.718		13.06%		444.036.451		99.58%		
			Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis		4 jenis		4 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		100.00 %		3 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.03	**Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota**			222.633.644		216.074.703		217.932.278		35.276.551		16.19%		251.351.254		112.90 %		
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	650430 Ton		N/A		650430 Ton		147338.4 Ton		22.65 %		147338.4 Ton		22.65 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.02	**Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali**			182.639.754		138.083.107		199.930.002		24.469.443		12.24%		162.552.551		89.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan		40 lokasi		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.07	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota**			40.655.768		29.290.923		45.887.815		841.724		1.83%		30.132.647		74.12 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	226 Unit		193 lokasi		226 Unit		229 Unit		101.33 %		229 Unit		101.33 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																	
56	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			26.618.623		2.193.238		50.624.820		3.028.669		5.98%		24.961.052		93.77%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87.58 %		88.91 %		86.22 %		90%		104.38 %		90%		102.76%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			16.846		31.200		13.000		2.600		20.00%		33.800		200.64%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		N/A		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.846		18.200		13.000		2.600		20.00%		20.800		123.47 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		12 dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.703.038		13.534.226		43.684.158		2.396.439		5.49%		15.930.666		101.45%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.703.038		13.534.226		43.684.158		2.396.439		5.49%		15.930.666		101.45 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan		100%		41 Orang/bulan		191 Orang/bulan		465.85 %		191 Orang/bulan		465.85 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.049.047		4.194.873		4.079.897		112.190		2.75%		4.307.063		42.86%		
			Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%		81.9 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.049.047		4.194.873		4.079.897		112.190		2.75%		4.307.063		42.86 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		81.9 %		3 Paket		3 Paket		100.00 %		3 Paket		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			849.692		3.674.323		2.847.765		517.439		18.17%		4.191.762		493.33%		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			849.692		3.674.323		2.847.765		517.439		18.17%		4.191.762		493.33 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		95.68 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
57	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			3.481.298		334.033		3.333.571		678.657		20.36%		4.018.989		115.45%		
			Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		105.26%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.655.892		2.543.640		2.431.418		479.368		19.72%		3.023.009		113.82%		
			Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas		325504 berkas		156000 berkas		21663 berkas		13.89 %		21663 berkas		13.89 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			2.655.892		2.543.640		2.431.418		479.368		19.72%		3.023.009		113.82 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen		325504 berkas		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			825.406		796.691		902.154		199.289		22.09%		995.980		120.67%		
			Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas		325504 berkas		156000 berkas		183732 berkas		117.78 %		183732 berkas		117.78 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			825.406		796.691		902.154		199.289		22.09%		995.980		120.67 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen		388497 berkas		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
58	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			1.969.905		203.938		2.603.264		533.937		20.51%		2.573.317		130.63%		
			Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		105.26%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			1.524.354		1.495.108		2.027.871		416.379		20.53%		1.911.486		125.40%		
			Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas		73753 berkas		36000 berkas		11288 berkas		31.36 %		11288 berkas		31.36 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			1.524.354		1.495.108		2.027.871		416.379		20.53%		1.911.486		125.40 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen		73753 berkas		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			445.551		544.273		575.393		117.558		20.43%		661.831		148.54%		
			Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas		129119 berkas		36000 berkas		42881 berkas		119.11 %		42881 berkas		119.11 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil			445.551		544.273		575.393		117.558		20.43%		661.831		148.54 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan		129119 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
59	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			2.941.983		304.106		3.026.542		523.953		17.31%		3.565.015		121.18%		
			Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	99%		97.87 %		96%		98.15 %		102.24 %		98.15 %		99.14%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	77%		79.10 %		68%		85.07 %		125.10 %		85.07 %		110.48%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	100%		54.55 %		40%		20%		50.00 %		20%		20.00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			431.627		446.047		940.215		181.574		19.31%		627.621		145.41%		
			Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	48000 data		N/A		48000 data		49692 data		103.53 %		49692 data		103.53 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			431.627		446.047		940.215		181.574		19.31%		627.621		145.41 %		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen		119798 data		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			653.293		628.726		721.499		138.782		19.24%		767.508		117.48%		
			Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga		12 Lembaga		5 Lembaga		1 Lembaga		20.00 %		1 Lembaga		20.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.06	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			362.799		358.263		376.943		68.100		18.07%		426.363		117.52 %		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen		11 Lembaga		5 Dokumen		1 Dokumen		20.00 %		1 Dokumen		20.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			290.494		270.463		344.556		70.682		20.51%		341.145		117.44 %		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen		9 Lembaga		5 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.857.063		1.966.289		1.364.828		203.597		14.92%		2.169.886		116.85%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan		N/A		32 unit layanan		32 unit layanan		100.00 %		32 unit layanan		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.04.01	**Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			1.857.063		1.966.289		1.364.828		203.597		14.92%		2.169.886		116.85 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan		32 unit layanan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
60	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			89.414		9.801		85.965		13.600		15.82%		111.610		124.82%		
			Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**			89.414		98.010		85.965		13.600		15.82%		111.610		124.82%		
			Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi		N/A		4 Informasi		0 Informasi		0.00 %		0 Informasi		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05.2.01.02	**Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain**			89.414		98.010		85.965		13.600		15.82%		111.610		124.82 %		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen		2 kali		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	
61	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			0		0		1.569.835		197.037		12.55%		197.037		0.00%		
			Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	0%		0.00		100%		100%		100.00 %		100%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			0		0		1.569.835		197.037		12.55%		197.037		0.00%		
			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A		N/A		53 Kegiatan		10 Kegiatan		18.87 %		10 Kegiatan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			0		0		1.569.835		197.037		12.55%		197.037		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A		N/A		53 Laporan		10 Laporan		18.87 %		10 Laporan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
62	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			393.981		35.020		528.200		22.900		4.34%		373.101		94.70%		
			Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	100%		24.51 %		46.07 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			231.497		190.085		292.235		5.600		1.92%		195.685		84.53%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	178 Orang		N/A		150 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.01.09	**Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal**			231.497		190.085		292.235		5.600		1.92%		195.685		84.53 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	89 Satuan Pendidikan		133 Orang		75 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			162.484		160.116		235.965		17.300		7.33%		177.416		109.19%		
			Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0.00 %		0 Perangkat Daerah		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.13	**Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB**			148.298		115.061		171.765		17.300		10.07%		132.361		89.25 %		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.11	**Penyediaan Data dan Informasi Keluarga**			14.186		0		64.200		0		0.00%		0		0.00 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
63	2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			10.106.307		588.849		11.825.168		403.476		3.41%		6.291.966		62.26%		
			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17.60 %		21.39 %		18.35 %		19.52 %		93.62 %		19.52 %		89.09%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	86%		92.74 %		83%		21.05 %		25.36 %		21.05 %		24.48%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**			357.857		495.160		932.283		16.335		1.75%		511.495		142.93%		
			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan		31 kecamatan		31 Kecamatan		31 Kecamatan		100.00 %		31 Kecamatan		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.06	**Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)**			178.928		0		523.000		16.335		3.12%		16.335		9.13 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.08	**Pengendalian Program KKBPK**			178.928		0		409.283		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		N/A		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			2.657.552		1.944.477		1.612.910		141.885		8.80%		2.086.361		78.51%		
			Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali		12 Kali		12 Kali		3 Kali		25.00 %		3 Kali		25.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.04	**Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**			1.797.554		824.146		598.400		70.730		11.82%		894.876		49.78 %		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang		1566 Orang		1566 Orang		1566 Orang		100.00 %		1566 Orang		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.03	**Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)**			859.998		1.120.331		1.014.510		71.155		7.01%		1.191.486		138.55 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan		12 kali		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			4.520.722		2.871.417		8.790.475		190.408		2.17%		3.061.825		67.73%		
			Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417096 Orang		303968 Orang		416957 Orang		206196 Orang		49.45 %		206196 Orang		49.44 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.01	**Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**			2.353.459		653.353		1.228.347		25.898		2.11%		679.251		28.86 %		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan		303968 Orang		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.03	**Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**			1.749.975		1.452.102		6.729.173		164.510		2.44%		1.616.612		92.38 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang		2184 orang		1950 Orang		432 Orang		22.15 %		432 Orang		22.15 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.06	**Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB**			417.288		765.963		832.955		0		0.00%		765.963		183.56 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit		37 Unit		19 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			2.570.177		577.436		489.500		54.848		11.20%		632.284		24.60%		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04.03	**Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB**			2.570.177		189.428		489.500		54.848		11.20%		244.276		9.50 %		
			Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	31 Kampung		31 Kecamatan		31 Kampung		31 Kampung		100.00 %		31 Kampung		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
64	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			4.687.035		1.079.183		17.040.520		622.486		3.65%		11.414.315		243.53%		
			Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun		28.00 tahun		20 tahun		0 tahun		0.00 %		0 tahun		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	55.76 %		85.53 %		43.37 %		0.01 %		0.02 %		0.01 %		0.02%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	44%		42.86 %		41%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.58 %		168.10 %		41.55 %		40.49 %		97.45 %		40.49 %		97.38%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			4.687.035		10.791.829		17.040.520		622.486		3.65%		11.414.315		243.53%		
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok		N/A		10 Kelompok		0 Kelompok		0.00 %		0 Kelompok		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.04	**Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**			608.785		310.173		536.221		44.514		8.30%		354.687		58.26 %		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1136 Orang		N/A		625 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.01	**Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)**			1.202.795		962.895		1.506.588		436.746		28.99%		1.399.641		116.37 %		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	57 Kelompok		160 keluarga		2263 Kelompok		2210 Kelompok		97.66 %		2210 Kelompok		3,877.19 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			412.985		642.765		360.000		0		0.00%		642.765		155.64 %		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38 Unit		N/A		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1.002.109		8.502.808		13.948.200		0		0.00%		8.502.808		848.49 %		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6642 Orang		31 kecamatan		6642 Orang		6463 Orang		97.31 %		6463 Orang		97.31 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1.460.361		373.188		689.511		141.226		20.48%		514.413		35.23 %		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		14 keluarga		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
65	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			93.715.342		6.986.233		77.139.141		6.143.465		7.96%		76.005.791		81.10%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%		91.96 %		92%		93.28 %		101.39 %		93.28 %		101.39%		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			73.040.321		55.583.796		59.520.884		3.395.918		5.71%		58.979.714		80.75%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			73.040.321		55.583.796		59.520.884		3.395.918		5.71%		58.979.714		80.75 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang/bulan		100%		287 Orang/bulan		270 Orang/bulan		94.08 %		270 Orang/bulan		94.08 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.949.269		6.245.177		7.557.915		800.721		10.59%		7.045.898		118.43%		
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.949.269		6.245.177		7.557.915		800.721		10.59%		7.045.898		118.43 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket		75.62 %		23 Paket		6 Paket		26.09 %		6 Paket		26.09 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.725.751		8.033.353		10.060.342		1.946.826		19.35%		9.980.179		67.77%		
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			14.725.751		8.033.353		10.060.342		1.946.826		19.35%		9.980.179		67.77 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		100%		3 Laporan		3 Laporan		100.00 %		3 Laporan		100.00 %		Dinas Perhubungan	
66	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			472.129.235		39.221.549		446.372.823		49.889.260		11.18%		442.104.752		93.64%		
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48.75 %		50.77 %		48.65 %		51.66 %		106.19 %		51.66 %		105.97%		Dinas Perhubungan	-
			Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	50 km/jam		40.21 km/jam		43 km/jam		0 km/jam		0.00 %		0 km/jam		0.00%		Dinas Perhubungan	-
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%		82.86 %		80%		86%		107.50 %		86%		107.50%		Dinas Perhubungan	-
			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%		80.25 %		80%		80.29 %		100.36 %		80.29 %		100.36%		Dinas Perhubungan	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			323.533.151		246.045.060		273.785.030		31.571.339		11.53%		277.616.399		85.81%		
			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		0 Lokasi		0.00 %		0 Lokasi		0.00 %		Dinas Perhubungan	
			Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		100.00 %		31 Kawasan		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			117.251.786		85.875.044		105.900.338		545.939		0.52%		86.420.983		73.71 %		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit		N/A		3000 Unit		237 Unit		7.90 %		237 Unit		7.90 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			28.689.292		11.721.511		22.906.246		8.400		0.04%		11.729.911		40.89 %		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit		2506 Unit		2500 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			35.134.102		28.371.855		31.445.836		984.867		3.13%		29.356.722		83.56 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit		5 Jenis		9000 Unit		2251 Unit		25.01 %		2251 Unit		25.01 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			142.457.971		120.076.651		113.532.611		30.032.132		26.45%		150.108.783		105.37 %		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	105252 Unit		N/A		96252 Unit		96252 Unit		100.00 %		96252 Unit		91.45 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			29.006.404		19.217.179		17.394.231		2.550.495		14.66%		21.767.673		75.04%		
			Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		13 Lokasi		92.86 %		13 Lokasi		92.86 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			29.006.404		19.217.179		17.394.231		2.550.495		14.66%		21.767.673		75.04 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	12 Unit		14 Jam		12 Unit		6 Unit		50.00 %		6 Unit		50.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			20.323.724		20.068.458		21.293.412		3.786.216		17.78%		23.854.674		117.37%		
			Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas		44 Berkas		60 Berkas		14 Berkas		23.33 %		14 Berkas		23.33 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			20.323.724		20.068.458		21.293.412		3.786.216		17.78%		23.854.674		117.37 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		1821 Titik		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8.140.371		10.714.509		9.731.669		1.101.481		11.32%		11.815.990		145.15%		
			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit		134918 Unit		134525 Unit		32853 Unit		24.42 %		32853 Unit		24.42 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8.140.371		10.714.509		9.731.669		1.101.481		11.32%		11.815.990		145.15 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit		138964 Unit		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			21.001.558		18.037.456		29.800.941		2.789.099		9.36%		20.826.555		99.17%		
			Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		100.00 %		7 Jenis		100.00 %		Dinas Perhubungan	
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		0 Lokasi		0.00 %		0 Lokasi		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			4.153.675		3.119.306		2.984.143		186.362		6.25%		3.305.668		79.58 %		
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13 Laporan		13 Dokumen		13 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			16.847.884		14.918.150		26.816.798		2.602.737		9.71%		17.520.887		103.99 %		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		365 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			65.033.247		74.742.348		90.292.878		7.837.045		8.68%		82.579.393		126.98%		
			Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor		4 Koridor		3 Koridor		7 Koridor		233.33 %		7 Koridor		233.33 %		Dinas Perhubungan	
			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang		75 Orang		75 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			32.542.203		39.569.835		36.899.897		190.714		0.52%		39.760.549		122.18 %		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		365 Kali		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			32.491.043		35.172.514		53.392.980		7.646.331		14.32%		42.818.845		131.79 %		
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit		N/A		72 Unit		88 Unit		122.22 %		88 Unit		122.22 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.090.782		3.390.481		4.074.663		253.586		6.22%		3.644.067		71.58%		
			Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		0 Jaringan		0.00 %		0 Jaringan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.090.782		3.390.481		4.074.663		253.586		6.22%		3.644.067		71.58 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		9 Dokumen		10 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perhubungan	
67	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			3.518.992		247.774		1.274.914		113.688		8.92%		2.591.430		73.64%		
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perhubungan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			3.518.992		2.477.742		1.274.914		113.688		8.92%		2.591.430		73.64%		
			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali		2 Kali		2 Kali		0 Kali		0.00 %		0 Kali		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota			3.518.992		2.477.742		1.274.914		113.688		8.92%		2.591.430		73.64 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		200 Orang		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
68	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			5.874.008		472.628		4.644.029		725.828		15.63%		5.452.103		92.82%		
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perhubungan	-
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			5.874.008		4.726.275		4.644.029		725.828		15.63%		5.452.103		92.82%		
			Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali		N/A		2 Kali		0 Kali		0.00 %		0 Kali		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			5.874.008		4.726.275		4.644.029		725.828		15.63%		5.452.103		92.82 %		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen		50 Orang		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
69	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.550.501		1.508.142		16.142.919		877.322		5.43%		15.958.746		86.03%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.58 %		91.15 %		89.55 %		92.17 %		102.93 %		92.17 %		102.89%		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.330.201		13.250.285		13.437.430		451.335		3.36%		13.701.620		89.38%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.330.201		13.250.285		13.437.430		451.335		3.36%		13.701.620		89.38 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		100%		37 Orang/bulan		35 Orang/bulan		94.59 %		35 Orang/bulan		94.59 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.996.579		1.310.054		1.765.222		336.593		19.07%		1.646.646		82.47%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		95.46 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.996.579		1.310.054		1.765.222		336.593		19.07%		1.646.646		82.47 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Jenis		4 Paket		4 Paket		100.00 %		4 Paket		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.223.721		521.085		940.267		89.395		9.51%		610.480		49.89%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		87.24 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.223.721		521.085		940.267		89.395		9.51%		610.480		49.89 %		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit		2 jenis		90 Unit		21 Unit		23.33 %		21 Unit		23.33 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
70	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			16.438.816		1.364.230		14.851.864		1.662.397		11.19%		15.304.700		93.10%		
			Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	89%		90.09 %		86%		90.64 %		105.40 %		90.64 %		101.84%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			16.438.816		13.642.304		14.851.864		1.662.397		11.19%		15.304.700		93.10%		
			Jumlah jenis kegiatan pengelolaan nformasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100.00 %		4 Jenis		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Kecepatan respon terhadap permohonan nformasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			2.943.703		2.181.695		1.803.858		217.577		12.06%		2.399.273		81.51 %		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen		100 Kali		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik			849.870		794.159		865.695		147.815		17.07%		941.974		110.84 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan nformasi Publik	12 Dokumen		52 Kali		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			12.645.244		10.666.449		12.182.311		1.297.005		10.65%		11.963.454		94.61 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
71	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			74.293.471		5.399.341		65.996.498		1.875.733		2.84%		55.869.148		75.20%		
			Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			31.347.122		28.109.014		55.977.900		814.996		1.46%		28.924.010		92.27%		
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			31.347.122		28.109.014		55.977.900		814.996		1.46%		28.924.010		92.27 %		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	415 Unit		249 lokasi		267 Unit		66 Unit		24.72 %		66 Unit		15.90 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			42.946.350		25.884.400		10.018.598		1.060.737		10.59%		26.945.138		62.74%		
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			498.811		391.377		424.740		110.667		26.06%		502.044		100.65 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen		58 PD		58 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			5.641.236		2.172.220		4.607.861		160.393		3.48%		2.332.613		41.35 %		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit		378 Kali		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			5.046.132		1.518.706		1.422.299		271.857		19.11%		1.790.562		35.48 %		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	190 Unit		190 Aplikasi		190 Unit		190 Unit		100.00 %		190 Unit		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			31.760.170		21.802.097		3.563.698		517.821		14.53%		22.319.918		70.28 %		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen		58 PD		58 Dokumen		15 Dokumen		25.86 %		15 Dokumen		25.86 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
72	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.889.705		2.924.812		31.299.853		1.991.935		6.36%		31.240.052		76.40%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		90.48 %		90%		92.05 %		102.28 %		92.05 %		98.98%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34.133.950		24.085.152		25.699.703		1.054.493		4.10%		25.139.645		73.65%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			34.133.950		24.085.152		25.699.703		1.054.493		4.10%		25.139.645		73.65 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan		100%		84 Orang/bulan		78 Orang/bulan		92.86 %		78 Orang/bulan		92.86 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.755.756		5.162.965		5.600.150		937.442		16.74%		6.100.407		90.30%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.759.388		3.953.434		4.269.799		837.081		19.60%		4.790.515		83.18 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		98.19 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			996.368		1.209.531		1.330.351		100.361		7.54%		1.309.892		131.47 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
73	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			778.729		32.288		436.636		49.553		11.35%		372.433		47.83%		
			Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	44%		15.90 %		23%		17.35 %		75.43 %		17.35 %		39.43%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			778.729		322.880		436.636		49.553		11.35%		372.433		47.83%		
			Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi		30 koperasi		30 koperasi		6 koperasi		20.00 %		6 koperasi		20.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			778.729		322.880		436.636		49.553		11.35%		372.433		47.83 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha		30 koperasi		30 Unit Usaha		6 Unit Usaha		20.00 %		6 Unit Usaha		20.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
74	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			1.063.751		67.396		673.560		125.296		18.60%		799.261		75.14%		
			Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	71%		86.02 %		68%		97.5 %		143.38 %		97.5 %		137.32%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			1.063.751		673.965		673.560		125.296		18.60%		799.261		75.14%		
			Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi		415 koperasi		415 koperasi		80 koperasi		19.28 %		80 koperasi		19.28 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.063.751		673.965		673.560		125.296		18.60%		799.261		75.14 %		
			Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	415 Unit Usaha		415 koperasi		415 Unit Usaha		80 Unit Usaha		19.28 %		80 Unit Usaha		19.28 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
75	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			565.398		39.525		344.272		8.521		2.48%		403.770		71.41%		
			Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	72%		14.38 %		29%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			565.398		395.249		344.272		8.521		2.48%		403.770		71.41%		
			Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang		179 Orang		103 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			565.398		395.249		344.272		8.521		2.48%		403.770		71.41 %		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang		179 orang		103 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
76	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			559.292		40.711		388.248		75.413		19.42%		482.526		86.27%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	100%		20.00 %		40%		20%		50.00 %		20%		20.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			559.292		407.113		388.248		75.413		19.42%		482.526		86.27%		
			Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi		83 koperasi		83 koperasi		0 koperasi		0.00 %		0 koperasi		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.06.2.01.01	**Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		559.292		407.113		388.248		75.413		19.42%		482.526		86.27 %		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	83 Orang		83 koperasi		83 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
77	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			3.423.539		285.214		2.482.558		424.815		17.11%		3.276.952		95.72%		
			Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	50%		10.65 %		19.95 %		4.79 %		24.01 %		4.79 %		9.58%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%		83.67 %		100%		75.51 %		75.51 %		75.51 %		75.51%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**			3.423.539		2.852.137		2.482.558		424.815		17.11%		3.276.952		95.72%		
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang		135 0rang		136 Orang		90 Orang		66.18 %		90 Orang		66.18 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	9 sentra		11 sentra		10 sentra		2 sentra		20.00 %		2 sentra		22.22 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			3.048.602		2.603.243		2.217.220		354.539		15.99%		2.957.783		97.02 %		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	9 Unit Usaha		11 sentra		10 Unit Usaha		2 Unit Usaha		20.00 %		2 Unit Usaha		22.22 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro			374.936		248.894		265.338		70.275		26.49%		319.169		85.13 %		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha		135 orang		136 Unit Usaha		90 Unit Usaha		66.18 %		90 Unit Usaha		66.18 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
78	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.548.127		100.453		2.997.218		204.511		6.82%		1.209.044		78.10%		
			Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	100%		52.24 %		64%		17.12 %		26.75 %		17.12 %		17.12%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			1.548.127		1.004.533		2.997.218		204.511		6.82%		1.209.044		78.10%		
			Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang		668 orang		500 orang		150 orang		30.00 %		150 orang		30.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			1.548.127		1.004.533		2.997.218		204.511		6.82%		1.209.044		78.10 %		
			Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha		668 orang		500 Unit Usaha		150 Unit Usaha		30.00 %		150 Unit Usaha		30.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
79	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.852.455		1.296.284		13.092.482		931.467		7.11%		13.894.307		87.65%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		90.26 %		90%		91.91 %		102.12 %		91.91 %		98.83%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.545.528		9.512.128		9.912.797		380.647		3.84%		9.892.775		73.03%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.545.528		9.512.128		9.912.797		380.647		3.84%		9.892.775		73.03 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		100%		27 Orang/bulan		27 Orang/bulan		100.00 %		27 Orang/bulan		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			2.306.927		3.450.712		3.179.686		550.820		17.32%		4.001.532		173.46%		
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%		78.37 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%		98.79 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			2.125.937		2.706.724		2.995.643		512.814		17.12%		3.219.538		151.44 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		98.79 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			180.990		743.988		184.043		38.006		20.65%		781.994		432.07 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		78.37 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
80	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			665.825		37.114		628.076		100.116		15.94%		471.258		70.78%		
			Jumlah Investor PMA/PMDN	230 Perusahaan		151.00 Perusahaan		170 Perusahaan		15 Perusahaan		8.82 %		15 Perusahaan		6.52%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**			665.825		371.142		628.076		100.116		15.94%		471.258		70.78%		
			Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	78%		72.81 %		72%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.02.02	**Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**			665.825		371.142		628.076		100.116		15.94%		471.258		70.78 %		
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen		5 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
81	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			738.216		62.771		606.959		69.585		11.46%		697.293		94.46%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%		58.82 %		55%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			738.216		627.708		606.959		69.585		11.46%		697.293		94.46%		
			Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor		221 Calon Investor / Investor		250 Calon Investor / Investor		0 Calon Investor / Investor		0.00 %		0 Calon Investor / Investor		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01.02	**Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**			738.216		627.708		606.959		69.585		11.46%		697.293		94.46 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		4 Pameran		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
82	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			5.864.492		403.030		3.676.141		740.080		20.13%		4.770.381		81.34%		
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%		99.33 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**			5.864.492		4.030.301		3.676.141		740.080		20.13%		4.770.381		81.34%		
			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	12000 Kegiatan usaha		N/A		11500 Kegiatan usaha		2253 Kegiatan usaha		19.59 %		2253 Kegiatan usaha		18.78 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			umlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	100000 berkas		N/A		85000 berkas		23983 berkas		28.22 %		23983 berkas		23.98 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.02	**Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**			1.092.027		823.751		958.231		179.519		18.73%		1.003.270		91.87 %		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	12000 Kegiatan Usaha		11734 Pelaku Usaha		11500 Kegiatan Usaha		2253 Kegiatan Usaha		19.59 %		2253 Kegiatan Usaha		18.78 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			4.772.465		3.206.550		2.717.910		560.561		20.62%		3.767.111		78.93 %		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	16000 Pelaku Usaha		90564 berkas		10000 Pelaku Usaha		3372 Pelaku Usaha		33.72 %		3372 Pelaku Usaha		21.08 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
83	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			1.056.164		81.624		926.817		113.225		12.22%		929.461		88.00%		
			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	46%		50.46 %		43%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.056.164		816.236		926.817		113.225		12.22%		929.461		88.00%		
			Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.500 perusahaan		1111 perusahaan		1200 perusahaan		201 perusahaan		16.75 %		201 perusahaan		13,40 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			283.670		257.796		319.283		0		0.00%		257.796		90.88 %		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	290 Pelaku Usaha		327 peserta		260 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0.00 %		0 Pelaku Usaha		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			772.494		558.440		607.534		113.225		18.64%		671.665		86.95 %		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2960 Kegiatan Usaha		N/A		2870 Kegiatan Usaha		644 Kegiatan Usaha		22.44 %		644 Kegiatan Usaha		21.76 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
84	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			377.020		24.520		210.426		41.296		19.63%		286.494		75.99%		
			umlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga		21.00 lembaga		20 lembaga		8 lembaga		40.00 %		8 lembaga		40.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			377.020		245.197		210.426		41.296		19.63%		286.494		75.99%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	500 perusahaan		309 perusahaan		350 perusahaan		96 perusahaan		27.43 %		96 perusahaan		19.20 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01.01	**Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**			377.020		245.197		210.426		41.296		19.63%		286.494		75.99 %		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		46167 data		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																	
85	2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			50.957.792		3.388.798		43.818.425		3.680.438		8.40%		37.568.420		73.72%		
			Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	28%		20.07 %		22%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	28%		20.11 %		22%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47.98 %		50.00 %		46.86 %		10.03 %		21.40 %		10.03 %		20.90%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			50.957.792		33.887.982		43.818.425		3.680.438		8.40%		37.568.420		73.72%		
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	24 jenis		N/A		23 jenis		3 jenis		13.04 %		3 jenis		12.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan		N/A		1 laporan		1 laporan		100.00 %		1 laporan		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.03	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			1.715.027		366.400		442.169		111.537		25.22%		477.937		27.87 %		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	820 Orang		34 kegiatan		825 Orang		465 Orang		56.36 %		465 Orang		56.71 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.02	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula**			1.758.202		813.975		673.609		117.499		17.44%		931.474		52.98 %		
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang		14 Kegiatan		500 Orang		100 Orang		20.00 %		100 Orang		20.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.07	**Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi**			45.009.330		30.845.757		41.038.487		3.206.470		7.81%		34.052.228		75.66 %		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	15849 Orang		16458 orang		3186 Orang		1785 Orang		56.03 %		1785 Orang		11.26 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.08	**Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda**			2.475.234		1.861.850		1.664.159		244.931		14.72%		2.106.782		85.11 %		
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	810 Orang		40 kegiatan		925 Orang		230 Orang		24.86 %		230 Orang		28.40 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
86	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			99.950.462		6.710.078		114.728.492		2.871.897		2.50%		69.972.680		70.01%		
			Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	28%		10.00 %		17%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	205 medali		354.00 medali		174 medali		0 medali		0.00 %		0 medali		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			24.739.225		10.732.328		39.036.737		58.000		0.15%		10.790.328		43.62%		
			Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	9 kecamatan		10 kecamatan		10 kecamatan		0 kecamatan		0.00 %		0 kecamatan		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			24.739.225		10.732.328		39.036.737		58.000		0.15%		10.790.328		43.62 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	84 Unit		30 unit		54 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			41.576.316		32.993.043		45.374.239		396.087		0.87%		33.389.131		80.31%		
			Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga		43 cabang olahraga		45 cabang olahraga		0 cabang olahraga		0.00 %		0 cabang olahraga		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota			41.576.316		32.993.043		45.374.239		396.087		0.87%		33.389.131		80.31 %		
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	700 Orang		50 kegiatan		642 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			33.634.920		23.375.412		30.317.515		2.417.810		7.97%		25.793.221		76.69%		
			Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	166 lokasi		263 lokasi		386 lokasi		112 lokasi		29.02 %		112 lokasi		67.47 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen		N/A		4 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			27.850.024		20.221.533		24.884.183		2.380.790		9.57%		22.602.322		81.16 %		
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	166 Unit		286 kali		386 Unit		112 Unit		29.02 %		112 Unit		67.47 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			5.784.896		3.153.879		5.433.332		37.020		0.68%		3.190.899		55.16 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7 Dokumen		12 kegiatan		7 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
87	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			695.275		48.789		575.786		47.862		8.31%		535.754		77.06%		
			Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			695.275		487.892		575.786		47.862		8.31%		535.754		77.06%		
			Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		100.00 %		5 Sektor		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			695.275		487.892		575.786		47.862		8.31%		535.754		77.06 %		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen		12 Kali		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
88	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			7.177.846		511.343		5.935.057		642.556		10.83%		5.755.983		80.19%		
			Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	41%		13.79 %		18%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.474.291		2.810.569		3.714.833		449.992		12.11%		3.260.561		72.87%		
			Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari		3.01 kali/per hari		3 kali/per hari		3 kali/per hari		100.00 %		3 kali/per hari		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.474.291		2.810.569		3.714.833		449.992		12.11%		3.260.561		72.87 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah		13 PD		13 Perangkat Daerah		3 Perangkat Daerah		23.08 %		3 Perangkat Daerah		23.08 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			2.703.556		2.302.857		2.220.224		192.564		8.67%		2.495.422		92.30%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali		N/A		6 Kali		6 Kali		100.00 %		6 Kali		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02.01	**Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			2.703.556		2.302.857		2.220.224		192.564		8.67%		2.495.422		92.30 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah		1576 Unit		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		100.00 %		58 Perangkat Daerah		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																	
89	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			51.347.778		3.507.888		27.452.805		2.016.790		7.35%		37.095.667		72.24%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		90.78 %		90%		92.59 %		102.88 %		92.59 %		99.56%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			32.124.462		20.682.777		21.422.140		954.845		4.46%		21.637.622		67.36%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			32.124.462		20.682.777		21.422.140		954.845		4.46%		21.637.622		67.36 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		100%		72 Orang/bulan		72 Orang/bulan		100.00 %		72 Orang/bulan		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			19.223.316		14.396.099		6.030.665		1.061.945		17.61%		15.458.044		80.41%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%		95.43 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		83.07 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			17.544.444		12.943.404		5.124.904		995.491		19.42%		13.938.895		79.45 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3 jenis		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.678.872		1.452.695		905.761		66.454		7.34%		1.519.150		90.49 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3 jenis		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
90	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			6.343.173		630.162		10.023.591		641.120		6.40%		6.942.736		109.45%		
			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	100%		60.00 %		70%		10%		14.29 %		10%		10.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.343.173		5.931.733		10.023.591		641.120		6.40%		6.572.852		103.62%		
			Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	480 kali		N/A		520 kali		97 kali		18.65 %		97 kali		20.21 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			6.343.173		5.931.733		10.023.591		641.120		6.40%		6.572.852		103.62 %		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek		451 kali		2 Objek		2 Objek		100.00 %		2 Objek		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
91	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			2.443.046		145.609		1.900.293		238.459		12.55%		1.694.548		69.36%		
			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	62.00 %		59.16 %		59.50 %		59.16 %		99.43 %		59.16 %		95.42%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.443.046		1.456.090		1.900.293		238.459		12.55%		1.694.548		69.36%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen		N/A		12 dokumen		3 dokumen		25.00 %		3 dokumen		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			2.443.046		1.456.090		1.900.293		238.459		12.55%		1.694.548		69.36 %		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	973 Orang		770 kali		860 Orang		666 Orang		77.44 %		666 Orang		68.45 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
92	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			1.292.538		98.173		1.904.514		8.400		0.44%		990.134		76.60%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase siswa yang memahami materi sejarah	80%		73.39 %		74%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			1.292.538		981.734		1.904.514		8.400		0.44%		990.134		76.60%		
			Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali		10 kali		10 kali		0 kali		0.00 %		0 kali		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.04.2.01.03	**Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah**			1.292.538		981.734		1.904.514		8.400		0.44%		990.134		76.60 %		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen		10 kali		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
93	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			1.514.094		128.650		1.201.930		264.376		22.00%		1.550.873		102.43%		
			Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92.04 %		95.86 %		92.04 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			1.514.094		1.286.498		1.201.930		264.376		22.00%		1.550.873		102.43%		
			Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	289 lokasi		266 lokasi		270 lokasi		70 lokasi		25.93 %		70 lokasi		24.22 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.05.2.02.01	**Pelindungan Cagar Budaya**			1.514.094		1.286.498		1.201.930		264.376		22.00%		1.550.873		102.43 %		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	289 Objek		266 lokasi		270 Objek		70 Objek		25.93 %		70 Objek		24.22 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
94	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			3.477.181		398.768		8.592.056		972.162		11.31%		4.959.842		142.64%		
			Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%		100.00 %		100%		22.22 %		22.22 %		22.22 %		22.22%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**			3.477.181		3.987.680		8.592.056		972.162		11.31%		4.959.842		142.64%		
			Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	8 lokasi		N/A		9 lokasi		9 lokasi		100.00 %		9 lokasi		112.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			223.926		414.981		450.849		17.741		3.94%		432.722		193.24 %		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit		2 lokasi		747 Unit		200 Unit		26.77 %		200 Unit		27.40 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			433.529		755.047		807.609		73.289		9.07%		828.336		191.07 %		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit		8 kegiatan		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			135.342		203.318		241.542		26.906		11.14%		230.224		170.11 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit		2 lokasi		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			2.684.384		2.614.334		7.092.056		854.226		12.04%		3.468.560		129.21 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	8 Unit		7 lokasi		9 Unit		9 Unit		100.00 %		9 Unit		112.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
95	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.264.534		1.666.805		17.287.152		1.130.945		6.54%		17.798.993		92.39%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.02 %		94.98 %		96.04 %		96.52 %		100.50 %		96.52 %		97.48%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.905.797		14.070.890		14.347.249		628.334		4.38%		14.699.224		92.41%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.905.797		14.070.890		14.347.249		628.334		4.38%		14.699.224		92.41 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		100%		45 Orang/bulan		41 Orang/bulan		91.11 %		41 Orang/bulan		91.11 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			227.838		168.045		222.735		57.363		25.75%		225.408		98.93%		
			Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		77.31 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			227.838		168.045		222.735		57.363		25.75%		225.408		98.93 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		77.31 %		10 Paket		7 Paket		70.00 %		7 Paket		70.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			754.718		499.833		806.680		91.000		11.28%		590.833		78.29%		
			Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		73.58 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			754.718		499.833		806.680		91.000		11.28%		590.833		78.29 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		73.58 %		19 Unit		19 Unit		100.00 %		19 Unit		135.71 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.376.181		1.929.281		1.910.488		354.248		18.54%		2.283.528		96.10%		
			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			214.853		231.425		330.708		73.732		22.30%		305.157		142.03 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		2 Laporan		16.67 %		2 Laporan		16.67 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.161.328		1.697.856		1.579.780		280.516		17.76%		1.978.371		91.53 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		2 Laporan		16.67 %		2 Laporan		16.67 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
96	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			32.318.230		1.591.379		17.855.976		2.951.400		16.53%		18.865.189		58.37%		
			Persentase event literasi yang diselenggarakan	100%		19.20 %		38.8 %		24.16 %		62.27 %		24.16 %		24.16%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	100%		57.92 %		67.21 %		57.92 %		86.18 %		57.92 %		57.92%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	100%		56.13 %		39.92 %		56.13 %		140.61 %		56.13 %		56.13%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			31.664.882		15.462.651		17.202.516		2.826.218		16.43%		18.288.869		57.76%		
			Jenis buku yang disediakan	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Tingkat Kepuasan Pemustaka	83.5 nilai		81.78 nilai		82 nilai		87.74 nilai		107.00 %		87.74 nilai		105.08 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga		251 Lembaga		230 Lembaga		271 Lembaga		117.83 %		271 Lembaga		117.83 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.05	**Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota**			241.070		172.731		297.742		56.963		19.13%		229.694		95.28 %		
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan		201 lembaga		200 Perpustakaan		203 Perpustakaan		101.50 %		203 Perpustakaan		101.50 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.04	**Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan**			76.506		64.843		123.410		37.131		30.09%		101.973		133.29 %		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan		50 lembaga		30 Perpustakaan		68 Perpustakaan		226.67 %		68 Perpustakaan		226.67 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.09	**Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka**			1.665.490		806.479		1.583.533		64.890		4.10%		871.368		52.32 %		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1505 Eksemplar		4210 Examplar		1498 Eksemplar		0 Eksemplar		0.00 %		0 Eksemplar		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.02	**Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			29.394.765		14.174.827		14.959.817		2.630.872		17.59%		16.805.698		57.17 %		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1505 Perpustakaan		1494 lokasi		1498 Perpustakaan		1516 Perpustakaan		101.20 %		1516 Perpustakaan		100.73 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.06	**Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			287.051		243.771		238.014		36.363		15.28%		280.135		97.59 %		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang		502 orang		500 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			653.349		451.138		653.460		125.181		19.16%		576.320		88.21%		
			Jumlah bibit penulis dan pendongeng	7429 orang		3637 orang		4477 orang		1327 orang		29.64 %		1327 orang		17.86 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.02.01	**Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat**			653.349		451.138		653.460		125.181		19.16%		576.320		88.21 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	260 Lokus		242 kali		245 Lokus		62 Lokus		25.31 %		62 Lokus		23.85 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
97	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			3.079.365		318.579		3.528.414		727.887		20.63%		3.913.678		127.09%		
			Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	17.98 %		10.35 %		12.12 %		10.94 %		90.26 %		10.94 %		60.85%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	30.01 %		27.93 %		28.25 %		29.23 %		103.47 %		29.23 %		97.40%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	100%		52.02 %		64.14 %		55.36 %		86.31 %		55.36 %		55.36%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			943.857		717.975		1.103.763		252.109		22.84%		970.084		102.78%		
			Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item		10226 item		9000 item		2250 item		25.00 %		2250 item		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	66 lembaga		48 lembaga		48 lembaga		0 lembaga		0.00 %		0 lembaga		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			783.408		562.950		851.487		202.664		23.80%		765.614		97.73 %		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas		19 Item		471 Berkas		117 Berkas		24.84 %		117 Berkas		24.84 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			160.449		155.025		252.276		49.444		19.60%		204.470		127.44 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan		66 Kali		66 Laporan		42 Laporan		63.64 %		42 Laporan		63.64 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			1.743.109		2.096.644		1.715.289		340.949		19.88%		2.437.593		139.84%		
			Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar		10020 Lembar		8640 Lembar		2160 Lembar		25.00 %		2160 Lembar		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			1.743.109		2.096.644		1.715.289		340.949		19.88%		2.437.593		139.84 %		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip		5 Kegiatan		300 Arsip		60 Arsip		20.00 %		60 Arsip		20.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			392.398		371.172		709.362		134.830		19.01%		506.002		128.95%		
			Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	9200 item		5298 item		6200 item		5598 item		90.29 %		5598 item		60.85 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	69 Lembaga		78 Lembaga		70 Lembaga		14 Lembaga		20.00 %		14 Lembaga		20.29 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			152.577		120.665		233.784		36.514		15.62%		157.179		103.02 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	69 Laporan		78 Lembaga		70 Laporan		14 Laporan		20.00 %		14 Laporan		20.29 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN			239.821		250.507		475.578		98.316		20.67%		348.823		145.45 %		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna		43 kali		100 Pengguna		772 Pengguna		772.00 %		772 Pengguna		772.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
98	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			178.274		6.584		137.000		18.800		13.72%		84.636		47.48%		
			Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	100%		97.76 %		39.96 %		12.99 %		32.51 %		12.99 %		12.99%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			178.274		65.836		137.000		18.800		13.72%		84.636		47.48%		
			Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			178.274		65.836		137.000		18.800		13.72%		84.636		47.48 %		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip		1656 Item arsip		880 Arsip		220 Arsip		25.00 %		220 Arsip		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
99	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			4.094.028		783.800		7.582.832		177.400		2.34%		8.015.398		195.78%		
			Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	50%		31.67 %		35%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			4.094.028		7.837.998		7.582.832		177.400		2.34%		8.015.398		195.78%		
			Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			4.094.028		7.837.998		7.582.832		177.400		2.34%		8.015.398		195.78 %		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	70 Unit		50 unit		55 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
100	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1.687.007		278.849		2.414.080		192.219		7.96%		2.980.710		176.69%		
			Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 orang/kelompok		22.00 orang/kelompok		25 orang/kelompok		22 orang/kelompok		88.00 %		22 orang/kelompok		55.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			379.056		318.938		508.539		85.686		16.85%		404.624		106.75%		
			Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	40 kali		32 kali		34 kali		9 kali		26.47 %		9 kali		22.50 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			379.056		318.938		508.539		85.686		16.85%		404.624		106.75 %		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40 Kelompok		875 orang		25 Kelompok		8 Kelompok		32.00 %		8 Kelompok		20.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.307.951		2.469.553		1.905.540		106.533		5.59%		2.576.086		196.96%		
			Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.307.951		2.469.553		1.905.540		106.533		5.59%		2.576.086		196.96 %		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	68 Unit		86 unit		53 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
101	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			45.590.707		157.857		187.583		46.247		24.65%		1.624.814		3.56%		
			Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	0 kasus		0.00 kasus		0 kasus		0 kasus		100.00 %		0 kasus		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			45.590.707		1.578.567		187.583		46.247		24.65%		1.624.814		3.56%		
			Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		25.00 %		3 Kali		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			45.590.707		1.578.567		187.583		46.247		24.65%		1.624.814		3.56 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 kali		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
102	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			820.823		73.226		2.148.265		250.602		11.67%		982.866		119.74%		
			Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	80%		61.20 %		65%		65%		100.00 %		65%		81.25%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			820.823		732.264		2.148.265		250.602		11.67%		982.866		119.74%		
			Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra		3 sentra		2 sentra		2 sentra		100.00 %		2 sentra		66.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			820.823		732.264		2.148.265		250.602		11.67%		982.866		119.74 %		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	250 Pelaku Usaha		250 pelaku usaha		180 Pelaku Usaha		180 Pelaku Usaha		100.00 %		180 Pelaku Usaha		72.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
103	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			6.263.210		551.331		8.179.758		943.346		11.53%		6.456.653		103.09%		
			Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	78.57 %		35.71 %		42.85 %		35.71 %		83.34 %		35.71 %		45.45%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			5.122.716		4.283.255		7.151.303		794.475		11.11%		5.077.731		99.12%		
			Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi		N/A		2 lokasi		2 lokasi		100.00 %		2 lokasi		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			5.122.716		4.126.208		7.151.303		794.475		11.11%		4.920.683		96.06 %		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		2 lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		100.00 %		2 Lokasi		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.140.494		1.230.052		1.028.455		148.871		14.48%		1.378.922		120.91%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.05	**Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**			150.212		0		309.539		25.179		8.13%		25.179		16.76 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Dokumen		N/A		60 Dokumen		14 Dokumen		23.33 %		14 Dokumen		23.33 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.03	**Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**			598.043		915.117		577.943		118.092		20.43%		1.033.209		172.76 %		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		1 lokasi		1 Lokasi		0 Lokasi		0.00 %		0 Lokasi		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.02	**Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**			392.238		314.935		140.973		5.600		3.97%		320.535		81.72 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
104	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			6.583.809		371.359		6.671.242		185.867		2.79%		3.899.459		59.23%		
			Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	47%		42.54 %		42.5 %		-100%		-235.29 %		-100%		-212.77%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			6.583.809		3.713.592		6.671.242		185.867		2.79%		3.899.459		59.23%		
			Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis		N/A		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.03.2.01.02	**Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota**			6.583.809		3.713.592		6.671.242		185.867		2.79%		3.899.459		59.23 %		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan		206 kali		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
105	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			2.802.104		220.165		3.801.399		397.426		10.45%		2.599.075		92.75%		
			Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	100%		66.67 %		80%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	28%		22.88 %		22%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	100%		25.00 %		40%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			822.352		536.729		617.758		152.413		24.67%		689.142		83.80%		
			Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat	1 laporan		N/A		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis		N/A		2 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			398.118		268.463		274.272		68.036		24.81%		336.499		84.52 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	80 Orang		3 kali		60 Orang		37 Orang		61.67 %		37 Orang		46.25 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			424.235		268.266		343.486		84.377		24.56%		352.642		83.12 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	300 Orang		6 kali		250 Orang		132 Orang		52.80 %		132 Orang		44.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			1.979.752		1.664.920		3.183.640		245.013		7.70%		1.909.933		96.47%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 Produk		3 Produk		4 Produk		0 Produk		0.00 %		0 Produk		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			1.979.752		1.664.920		3.183.640		245.013		7.70%		1.909.933		96.47 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250 Orang		20 Kali		200 Orang		54 Orang		27.00 %		54 Orang		21.60 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
106	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			7.660.760		693.474		7.343.645		566.897		7.72%		7.501.636		97.92%		
			Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	45 Orang		25.00 Orang		30 Orang		25 Orang		83.33 %		25 Orang		55.56%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			6.792.603		5.172.447		3.694.805		270.451		7.32%		5.442.898		80.13%		
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			6.792.603		5.172.447		3.694.805		270.451		7.32%		5.442.898		80.13 %		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		500 Orang		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			868.157		0		3.648.840		296.446		8.12%		296.446		34.15%		
			Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis		N/A		6 Jenis		4 Jenis		66.67 %		4 Jenis		66.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			868.157		1.762.292		3.648.840		296.446		8.12%		2.058.738		237.14 %		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
107	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			21.217.227		1.994.672		12.862.578		1.296.506		10.08%		21.243.223		100.12%		
			Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	35 Lokasi		14.00 Lokasi		19 Lokasi		14 Lokasi		73.68 %		14 Lokasi		40.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha		2.00 Ha		2 Ha		0 Ha		0.00 %		0 Ha		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			1.309.313		1.009.919		7.192.654		755.719		10.51%		1.765.639		134.85%		
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		1 Jenis		25.00 %		1 Jenis		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya			1.309.313		1.009.919		7.192.654		755.719		10.51%		1.765.639		134.85 %		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Laporan		4 Lokasi		16 Laporan		11 Laporan		68.75 %		11 Laporan		183.33 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			19.907.914		18.936.797		5.669.923		540.787		9.54%		19.477.584		97.84%		
			Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	13 Laporan		13 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		15.38 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			19.907.914		18.936.797		5.669.923		540.787		9.54%		19.477.584		97.84 %		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit		13 lokasi		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		15.38 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
108	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.140.798		99.221		2.754.062		162.821		5.91%		1.155.036		101.25%		
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89.5 %		89.68 %		89.5 %		69.37 %		77.51 %		69.37 %		77.51%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	8 kelompok		3.00 kelompok		5 kelompok		0 kelompok		0.00 %		0 kelompok		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			845.362		825.181		1.263.607		138.466		10.96%		963.648		113.99%		
			Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%		89.2 %		80%		81.8 %		102.25 %		81.8 %		102.25 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			845.362		825.181		1.263.607		138.466		10.96%		963.648		113.99 %		
			Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan		2803 ekor		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			295.436		167.033		1.490.455		24.355		1.63%		191.388		64.78%		
			Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	45 Unit		25 Unit		30 Unit		12 Unit		40.00 %		12 Unit		26.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			295.436		167.033		1.490.455		24.355		1.63%		191.388		64.78 %		
			Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan		8 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
109	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			113.553		10.562		152.647		14.113		9.25%		119.728		105.44%		
			Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			113.553		105.616		152.647		14.113		9.25%		119.728		105.44%		
			Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%		N/A		80%		100%		125.00 %		100%		125.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			113.553		105.616		152.647		14.113		9.25%		119.728		105.44 %		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen		92.36 %		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
110	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.709.423		238.783		2.633.091		317.759		12.07%		2.705.592		99.86%		
			Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
			Tingkat Produktivitas Pertanian	6.05 ton/ha		6.46 ton/ha		5.85 ton/ha		7.09 ton/ha		121.20 %		7.09 ton/ha		117.19%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			2.709.423		2.387.833		2.633.091		317.759		12.07%		2.705.592		99.86%		
			Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang		25 orang		25 orang		0 orang		0.00 %		0 orang		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali		N/A		7 kali		0 kali		0.00 %		0 kali		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			1.702.059		1.433.395		1.360.295		121.434		8.93%		1.554.829		91.35 %		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit		6 Kali		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1.007.364		954.438		1.272.795		196.325		15.42%		1.150.763		114.24 %		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit		5 kali		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
111	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			1.879.526		103.816		973.117		175.978		18.08%		1.214.143		64.60%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan	96%		100.00 %		93%		100%		107.53 %		100%		104.17%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			501.503		263.829		261.704		36.543		13.96%		300.371		59.89%		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			501.503		263.829		261.704		36.543		13.96%		300.371		59.89 %		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen		456 pelaku usaha		450 Dokumen		98 Dokumen		21.78 %		98 Dokumen		21.78 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			585.879		207.863		240.145		47.565		19.81%		255.428		43.60%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			585.879		207.863		240.145		47.565		19.81%		255.428		43.60 %		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen		556 Pelaku usaha		60 Dokumen		64 Dokumen		106.67 %		64 Dokumen		106.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			127.369		95.902		96.141		17.765		18.48%		113.667		89.24%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri			127.369		0		96.141		17.765		18.48%		17.765		13.95 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen		N/A		24 Dokumen		7 Dokumen		29.17 %		7 Dokumen		29.17 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.04	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri**			127.369		40.100		50.400		8.400		16.67%		48.500		38.08%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.04.02	**Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri**			127.369		0		50.400		8.400		16.67%		8.400		6.60 %		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen		N/A		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**			537.406		321.310		324.727		65.706		20.23%		387.016		72.02%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.05.01	**Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C**			537.406		321.310		324.727		65.706		20.23%		387.016		72.02 %		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen		400 Pelaku usaha		40 Dokumen		26 Dokumen		65.00 %		26 Dokumen		65.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
112	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			4.968.209		334.232		6.664.271		637.194		9.56%		3.979.510		80.10%		
			Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.03.2.02	**Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**			4.968.209		3.342.317		6.664.271		637.194		9.56%		3.979.510		80.10%		
			Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			4.968.209		3.342.317		6.664.271		637.194		9.56%		3.979.510		80.10 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen		N/A		611 Dokumen		151 Dokumen		24.71 %		151 Dokumen		24.71 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
113	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			1.309.691		68.590		911.914		173.154		18.99%		859.056		65.59%		
			Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			1.309.691		685.902		911.914		173.154		18.99%		859.056		65.59%		
			Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			425.952		249.511		343.179		65.116		18.97%		314.628		73.86 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		302 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			883.738		436.391		568.735		108.038		19.00%		544.429		61.61 %		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
114	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			2.045.562		106.380		1.500.345		117.212		7.81%		1.181.016		57.74%		
			Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			2.045.562		1.063.804		1.500.345		117.212		7.81%		1.181.016		57.74%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			1.898.815		954.911		1.389.250		95.303		6.86%		1.050.214		55.31 %		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	24290 Unit		24198 Unit		22880 Unit		7452 Unit		32.57 %		7452 Unit		30.68 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			146.747		108.893		111.095		21.909		19.72%		130.801		89.13 %		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang		5036 unit		1200 Orang		309 Orang		25.75 %		309 Orang		25.75 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
115	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			6.660.120		532.830		6.052.623		1.122.965		18.55%		6.451.260		96.86%		
			Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			6.660.120		5.328.295		6.052.623		1.122.965		18.55%		6.451.260		96.86%		
			Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			6.660.120		5.328.295		6.052.623		1.122.965		18.55%		6.451.260		96.86 %		
			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5220 UMKM		5363 orang		5220 UMKM		1045 UMKM		20.02 %		1045 UMKM		20.02 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
116	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			589.753		84.999		1.207.483		146.562		12.14%		996.547		168.98%		
			Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	26%		16.40 %		17%		4.86 %		28.59 %		4.86 %		18.69%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			589.753		849.985		1.207.483		146.562		12.14%		996.547		168.98%		
			Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			0		0		167.281		0		0.00%		0		0.00 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	N/A		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		N/A		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01.05	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**			589.753		734.070		1.040.202		146.562		14.09%		880.632		149.32 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen		550 Pelaku usaha		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
117	3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			331.422		25.860		502.147		97.058		19.33%		355.653		107.31%		
			Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	90%		99.77 %		82%		100%		121.95 %		100%		111.11%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**			331.422		258.596		502.147		97.058		19.33%		355.653		107.31%		
			Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.03.2.01.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**			331.422		258.596		502.147		97.058		19.33%		355.653		107.31 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen		457 Pelaku usaha		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
118	3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			213.589		21.226		378.881		62.802		16.58%		275.060		128.78%		
			Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan industri	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**			213.589		212.258		378.881		62.802		16.58%		275.060		128.78%		
			Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			213.589		212.258		378.881		62.802		16.58%		275.060		128.78 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen		1 dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH																	
119	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			262.195.831		21.013.525		202.054.769		22.033.513		10.90%		232.168.767		88.55%		
			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90%		100.00 %		85%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%		93.70 %		100%		94.88 %		94.88 %		94.88 %		94.88%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	98%		99.09 %		92%		99.63 %		108.29 %		99.63 %		101.66%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	75%		87.93 %		66.66 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%		100.00 %		97%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			91.628.677		62.085.264		66.418.503		2.166.547		3.26%		64.251.811		70.12%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			91.628.677		62.085.264		66.418.503		2.166.547		3.26%		64.251.811		70.12 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan		100%		157 Orang/bulan		164 Orang/bulan		104.46 %		164 Orang/bulan		104.46 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.083.838		19.873.689		3.328.598		27.900		0.84%		19.901.589		487.33%		
			Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			4.083.838		19.873.689		3.328.598		27.900		0.84%		19.901.589		487.33 %		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket		46335 Stel		5 Paket		1 Paket		20.00 %		1 Paket		20.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33.982.990		19.626.917		24.505.864		1.491.948		6.09%		21.118.865		62.15%		
			Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.982.990		19.626.917		24.505.864		1.491.948		6.09%		21.118.865		62.15 %		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1200 Unit		8526 Unit		1800 Unit		268 Unit		14.89 %		268 Unit		22.33 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.205.968		82.422.753		79.354.600		13.023.744		16.41%		95.446.497		151.01%		
			Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%		85.63 %		100%		81.25 %		81.25 %		81.25 %		81.25 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		93.71 %		93.71 %		93.71 %		93.71 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			52.008.578		76.878.553		73.837.527		11.701.843		15.85%		88.580.395		170.32 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.349.570		3.749.395		3.571.398		969.449		27.14%		4.718.845		74.32 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.847.821		1.794.805		1.945.675		352.452		18.11%		2.147.257		44.29 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		100%		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			9.302.988		8.446.555		9.438.779		0		0.00%		8.446.555		90.79%		
			Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			8.072.880		8.272.880		9.238.090		0		0.00%		8.272.880		102.48 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100.00 %		2 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.230.108		173.674		200.689		0		0.00%		173.674		14.12 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100.00 %		2 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			3.818.611		2.109.990		3.202.462		660.433		20.62%		2.770.423		72.55%		
			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit		253 unit		253 unit		253 unit		100.00 %		253 unit		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi		58 instansi		58 instansi		14 instansi		24.14 %		14 instansi		24.14 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi		N/A		58 instansi		14 instansi		24.14 %		14 instansi		24.14 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1.545.079		500.041		971.246		164.173		16.90%		664.214		42.99 %		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		253 kegiatan		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1.005.337		853.128		1.141.841		288.198		25.24%		1.141.326		113.53 %		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		58 kegiatan		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1.268.196		756.821		1.089.375		208.062		19.10%		964.884		76.08 %		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		58 kegiatan		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			56.172.758		15.570.085		15.805.965		4.662.941		29.50%		20.233.026		36.02%		
			Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			54.169.994		14.567.939		14.995.689		4.510.269		30.08%		19.078.208		35.22 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		100%		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			2.002.763		1.002.146		810.275		152.672		18.84%		1.154.818		57.66 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		116 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
120	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			40.046.015		4.256.397		139.183.624		18.381.829		13.21%		60.945.795		152.19%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	100%		100.00 %		92%		100%		108.70 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	
			Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari		1.00 hari		2 hari		0 hari		200.00 %		0 hari		200.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari		12.00 hari		14 hari		0 hari		200.00 %		0 hari		200.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	100%		70.97 %		77.42 %		70.97 %		91.67 %		70.97 %		70.97%		Sekretariat Daerah	
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	100%		100.00 %		98%		100%		102.04 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	100%		19.46 %		38.91 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	100%		100.00 %		83%		100%		120.48 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			14.579.943		7.126.025		8.839.582		2.215.143		25.06%		9.341.168		64.07%		
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	185 Lembaga		36 Lembaga		72 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen		2 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	31 Kecamatan		22 Kecamatan		24 Kecamatan		22 Kecamatan		91.67 %		22 Kecamatan		70.97 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5.403.004		3.659.472		3.808.554		1.148.529		30.16%		4.808.000		88.99 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen		2 Berkas		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan			4.813.183		2.024.070		2.997.579		417.532		13.93%		2.441.602		50.73 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		185 Peserta		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			4.363.756		1.442.484		2.033.449		649.082		31.92%		2.091.566		47.93 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		22 Kecamatan		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.931.081		26.429.128		115.753.219		14.366.577		12.41%		40.795.706		827.32%		
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.01	**Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**			3.101.912		25.596.364		25.878.506		4.549.809		17.58%		30.146.172		971.86 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.03	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat**			104.165		0		88.817.240		9.667.684		10.88%		9.667.684		9,281.08 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.02	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial**			1.725.003		832.764		1.057.474		149.085		14.10%		981.849		56.92 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			17.480.417		7.128.360		9.389.092		1.323.001		14.09%		8.451.362		48.35%		
			Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum		155 produk hukum		60 produk hukum		15 produk hukum		25.00 %		15 produk hukum		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum		155 rancangan produk hukum		60 rancangan produk hukum		15 rancangan produk hukum		25.00 %		15 rancangan produk hukum		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum		25 permasalahan hukum		20 permasalahan hukum		0 permasalahan hukum		0.00 %		0 permasalahan hukum		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**			8.163.200		2.402.206		2.925.108		548.191		18.74%		2.950.397		36.14 %		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus		25 permasalahan hukum		20 Kasus		0 Kasus		0.00 %		0 Kasus		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.01	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**			7.357.890		3.214.816		4.750.412		487.276		10.26%		3.702.091		50.31 %		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen		155 rancangan produk hukum		60 Dokumen		15 Dokumen		25.00 %		15 Dokumen		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.03	**Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**			1.959.326		1.511.338		1.713.572		287.535		16.78%		1.798.873		91.81 %		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen		155 produk hukum		60 Dokumen		15 Dokumen		25.00 %		15 Dokumen		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**			3.054.574		1.880.453		5.201.730		477.107		9.17%		2.357.561		77.18%		
			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga		N/A		11 Lembaga		3 Lembaga		27.27 %		3 Lembaga		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga		N/A		20 Lembaga		5 Lembaga		25.00 %		5 Lembaga		25.00 %		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga		N/A		31 Lembaga		6 Lembaga		19.35 %		6 Lembaga		18.75 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			171.358		0		399.842		88.527		22.14%		88.527		51.66 %		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			1.043.032		833.192		791.253		160.817		20.32%		994.009		95.30 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			1.840.185		1.047.261		4.010.636		227.764		5.68%		1.275.025		69.29 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
121	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			34.422.025		1.620.981		23.204.375		2.954.110		12.73%		19.163.924		55.67%		
			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	100%		100.00 %		80%		33.33 %		41.66 %		33.33 %		33.33%		Sekretariat Daerah	-
			Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	86%		86.91 %		84.5 %		0.82 %		0.97 %		0.82 %		0.95%		Sekretariat Daerah	-
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4.723.953		4.245.014		5.052.386		754.202		14.93%		4.999.216		105.83%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			2.272.753		1.865.735		2.032.088		242.195		11.92%		2.107.930		92.75 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		9 BUMD		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1.863.337		1.933.088		2.163.760		397.170		18.36%		2.330.259		125.06 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan		12 laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			587.864		446.190		856.539		114.837		13.41%		561.027		95.43 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 kali		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			16.052.307		7.454.449		12.682.633		1.199.800		9.46%		8.654.249		53.91%		
			Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen		3 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			8.427.767		1.761.008		9.535.867		781.492		8.20%		2.542.500		30.17 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan		17 dokumen		16 Laporan		3 Laporan		18.75 %		3 Laporan		18.75 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.02	**Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**			7.624.540		2.254.928		3.146.766		418.308		13.29%		2.673.236		35.06 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			13.527.842		4.510.351		5.271.196		976.708		18.53%		5.487.059		40.56%		
			Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	98%		100%		92%		100%		108.70 %		100%		102.04 %		Sekretariat Daerah	
			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		93.71 %		93.71 %		93.71 %		93.71 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**			11.720.292		342.705		431.288		70.800		16.42%		413.505		3.53 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		310 Dokumen		300 Orang		88 Orang		29.33 %		88 Orang		29.33 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			1.807.550		4.167.646		4.839.908		905.908		18.72%		5.073.554		280.69 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen		95.01 %		20 Dokumen		10 Dokumen		50.00 %		10 Dokumen		50.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**			117.922		0		198.159		23.400		11.81%		23.400		19.84%		
			Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan		N/A		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.01	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan**			117.922		0		198.159		23.400		11.81%		23.400		19.84 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**																	
122	4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			211.561.797		11.334.529		183.811.076		17.750.411		9.66%		131.095.700		61.97%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		89.05 %		92.5 %		91.05 %		98.43 %		91.05 %		96.86%		Sekretariat DPRD	-
	4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			15.979.496		13.950.541		14.936.079		10.532.156		70.51%		24.482.697		153.21%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.979.496		13.950.541		14.936.079		10.532.156		70.51%		24.482.697		153.21 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		100%		58 Orang/bulan		47 Orang/bulan		81.03 %		47 Orang/bulan		81.03 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			30.164.551		31.061.982		31.825.929		4.348.461		13.66%		35.410.443		117.39%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		72.19 %		72.19 %		72.19 %		72.19 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			30.164.551		31.061.982		31.825.929		4.348.461		13.66%		35.410.443		117.39 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Jenis		11 Paket		11 Paket		100.00 %		11 Paket		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.459.328		5.296.432		6.709.428		164.905		2.46%		5.461.336		100.04%		
			Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		100.00 %		1 Hari		0.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.459.328		5.296.432		6.709.428		164.905		2.46%		5.461.336		100.04 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit		83.37 %		204 Unit		56 Unit		27.45 %		56 Unit		27.45 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			96.495.857		18.656.013		81.326.586		2.411.770		2.97%		21.067.782		21.83%		
			Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		100.00 %		1 Hari		0.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			96.495.857		18.656.013		81.326.586		2.411.770		2.97%		21.067.782		21.83 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan		470 Kali		96 Laporan		24 Laporan		25.00 %		24 Laporan		25.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			59.974.263		42.331.010		45.059.551		0		0.00%		42.331.010		70.58%		
			Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			59.974.263		42.331.010		45.059.551		0		0.00%		42.331.010		70.58 %		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan		100%		50 Orang/Bulan		50 Orang/Bulan		100.00 %		50 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			3.488.302		2.049.311		3.953.503		293.120		7.41%		2.342.430		67.15%		
			Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari		1.46 Hari		2 Hari		1 Hari		50.00 %		1 Hari		0.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			3.488.302		2.049.311		3.953.503		293.120		7.41%		2.342.430		67.15 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan		67 Kali		36 Laporan		18 Laporan		50.00 %		18 Laporan		50.00 %		Sekretariat DPRD	
123	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			50.604.084		4.296.487		61.938.091		4.561.444		7.36%		47.526.312		93.92%		
			Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%		101.45 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat DPRD	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.204.429		1.233.574		4.202.904		337.321		8.03%		1.570.895		30.18%		
			Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			5.204.429		1.233.574		4.202.904		337.321		8.03%		1.570.895		30.18 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			23.981.751		21.494.787		25.291.011		3.742.069		14.80%		25.236.856		105.23%		
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang		82 Orang		50 Orang		22 Orang		44.00 %		22 Orang		44.00 %		Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD			1.976.169		482.000		1.650.000		138.000		8.36%		620.000		31.37 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen		18 Kali		2 Dokumen		5 Dokumen		250.00 %		5 Dokumen		250.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			22.005.582		21.012.786		23.641.011		3.604.069		15.24%		24.616.856		111.87 %		
			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen		4 Media		4 Dokumen		4 Dokumen		100.00 %		4 Dokumen		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			16.446.120		16.908.603		28.112.551		50.627		0.18%		16.959.229		103.12%		
			Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen		33.33 %		1 Dokumen		33.33 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			16.446.120		16.908.603		28.112.551		50.627		0.18%		16.959.229		103.12 %		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen		3 Kali		150 Dokumen		50 Dokumen		33.33 %		50 Dokumen		33.33 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			4.971.784		3.327.904		4.331.626		431.428		9.96%		3.759.332		75.61%		
			Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari		1 Hari		2 Hari		1 Hari		50.00 %		1 Hari		200.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			4.971.784		3.327.904		4.331.626		431.428		9.96%		3.759.332		75.61 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen		1060 Kali		36 Dokumen		27 Dokumen		75.00 %		27 Dokumen		75.00 %		Sekretariat DPRD	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5.01	PERENCANAAN																	
124	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35.308.369		2.455.026		25.585.522		1.222.045		4.78%		25.772.301		72.99%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.69 %		95.35 %		95.47 %		96.64 %		101.23 %		96.64 %		100.99%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			210.672		302.862		266.642		46.528		17.45%		349.390		165.85%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			210.672		302.862		266.642		46.528		17.45%		349.390		165.85 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			31.185.574		21.257.050		22.026.677		615.019		2.79%		21.872.070		70.14%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			31.185.574		21.257.050		22.026.677		615.019		2.79%		21.872.070		70.14 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan		100%		46 Orang/bulan		48 Orang/bulan		104.35 %		48 Orang/bulan		104.35 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			3.912.122		2.990.344		3.292.203		560.497		17.02%		3.550.841		90.77%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			3.386.893		2.606.705		2.714.584		503.245		18.54%		3.109.950		91.82 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		96.48 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			525.229		383.639		577.619		57.252		9.91%		440.891		83.94 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
125	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			3.929.602		334.627		2.948.867		728.512		24.70%		4.074.782		103.69%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			1.402.991		1.303.972		1.127.312		409.887		36.36%		1.713.860		122.16%		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen		N/A		6 dokumen		1 dokumen		16.67 %		1 dokumen		16.67 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.01.07	**Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**			1.402.991		1.303.972		1.127.312		409.887		36.36%		1.713.860		122.16 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		6 dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.519.411		1.162.650		1.203.092		159.883		13.29%		1.322.533		87.04%		
			Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD		N/A		58 PD		58 PD		100.00 %		58 PD		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.02.01	**Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.519.411		1.162.650		1.203.092		159.883		13.29%		1.322.533		87.04 %		
			Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	38 Masukan		58 PD		38 Masukan		38 Masukan		100.00 %		38 Masukan		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.007.199		879.648		618.462		158.742		25.67%		1.038.389		103.10%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD		N/A		58 PD		58 PD		100.00 %		58 PD		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1.007.199		879.648		618.462		158.742		25.67%		1.038.389		103.10 %		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		58 PD		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
126	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			10.791.670		569.063		6.286.287		913.752		14.54%		6.604.378		61.20%		
			Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98.63 %		97.63 %		98.36 %		97.83 %		99.46 %		97.83 %		99.19%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			3.064.620		1.656.461		2.147.471		311.567		14.51%		1.968.028		64.22%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan		N/A		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1.742.848		1.049.933		1.201.621		187.837		15.63%		1.237.770		71.02 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		2 dokumen		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1.321.772		606.528		945.850		123.730		13.08%		730.258		55.25 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 dokumen		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			3.728.973		1.717.861		1.816.419		320.019		17.62%		2.037.880		54.65%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan		N/A		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02.04	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**			2.300.253		851.799		963.873		159.233		16.52%		1.011.031		43.95 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02.08	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**			1.428.720		866.062		852.546		160.787		18.86%		1.026.849		71.87 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			3.998.078		2.316.305		2.322.396		282.166		12.15%		2.598.470		64.99%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan		N/A		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03.04	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**			2.288.163		1.152.539		1.112.313		139.491		12.54%		1.292.030		56.47 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03.08	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan**			1.709.914		1.163.765		1.210.083		142.675		11.79%		1.306.440		76.40 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.02	**KEUANGAN**																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
127	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			158.554.798		10.459.649		92.673.901		6.212.841		6.70%		110.809.331		69.89%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		91.40 %		91%		93.22 %		102.44 %		93.22 %		99.17%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		90.43 %		91%		95.25 %		104.67 %		95.25 %		101.33%		Badan Pendapatan Daerah	-
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			138.590.122		85.352.427		68.523.940		2.570.905		3.75%		87.923.331		63.44%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33.513.641		31.555.770		28.841.727		1.020.881		3.54%		32.576.651		97.20 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan		100%		83 Orang/bulan		78 Orang/bulan		93.98 %		78 Orang/bulan		93.98 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			105.076.481		53.796.656		39.682.213		1.550.024		3.91%		55.346.680		52.67 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan		100%		114 Orang/bulan		111 Orang/bulan		97.37 %		111 Orang/bulan		97.37 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			302.277		246.276		301.679		52.639		17.45%		298.914		98.89%		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			302.277		246.276		301.679		52.639		17.45%		298.914		98.89 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.257.261		660.581		830.873		46.343		5.58%		706.924		31.32%		
			Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.257.261		660.581		830.873		46.343		5.58%		706.924		31.32 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit		100%		200 Unit		200 Unit		100.00 %		200 Unit		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.380.438		11.996.948		16.280.723		2.392.732		14.70%		14.389.680		171.71%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		95.23 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		59.07 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.381.130		3.612.994		4.886.549		499.656		10.23%		4.112.650		172.72 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		95.23 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.702.468		5.357.846		5.824.793		1.373.559		23.58%		6.731.405		118.04 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52.856		677.317		1.149.360		126.070		10.97%		803.387		1,519.96 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		59.07 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			243.984		2.348.791		4.420.022		393.447		8.90%		2.742.238		1,123.94 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		86.34 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.024.700		6.340.259		6.736.686		1.150.223		17.07%		7.490.482		83.00%		
			Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			9.024.700		6.340.259		6.736.686		1.150.223		17.07%		7.490.482		83.00 %		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2240 Unit		2806 Unit		2660 Unit		738 Unit		27.74 %		738 Unit		32.95 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
128	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			23.003.236		927.755		45.022.665		1.234.661		2.74%		10.512.209		45.70%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Pendapatan Daerah	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			2.377.973		3.306.392		3.222.519		588.473		18.26%		3.894.865		163.79%		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen		N/A		7 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			570.265		561.367		740.666		27.900		3.77%		589.267		103.33 %		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			595.726		907.978		774.283		150.949		19.50%		1.058.927		177.75 %		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Laporan		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			637.253		1.158.065		865.305		150.387		17.38%		1.308.452		205.33 %		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Laporan		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			574.729		678.982		842.266		259.237		30.78%		938.219		163.25 %		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			3.181.881		2.160.022		2.541.247		438.390		17.25%		2.598.412		81.66%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen		N/A		4 dokumen		1 dokumen		25.00 %		1 dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen		N/A		244 Dokumen		63 Dokumen		25.82 %		63 Dokumen		25.82 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	104440 berkas		82675 berkas		90220 berkas		10969 berkas		12.16 %		10969 berkas		10.50 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.01	**Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**			625.752		533.184		565.757		121.459		21.47%		654.643		104.62 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen		244 Dokumen		244 Dokumen		63 Dokumen		25.82 %		63 Dokumen		25.82 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.05	**Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya**			376.596		369.174		417.613		81.636		19.55%		450.810		119.71 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.2.02.09	**Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait**			2.179.533		1.257.663		1.557.877		235.295		15.10%		1.492.958		68.50 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	104440 Dokumen		82675 Berkas		90220 Dokumen		10969 Dokumen		12.16 %		10969 Dokumen		10.50 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**			1.193.382		1.045.967		1.008.899		207.798		20.60%		1.253.765		105.06%		
			Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen		22 Dokumen		24 Dokumen		9 Dokumen		37.50 %		9 Dokumen		37.50 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.08	**Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**			1.193.382		1.045.967		1.008.899		207.798		20.60%		1.253.765		105.06 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen		22 Dokumen		24 Dokumen		9 Dokumen		37.50 %		9 Dokumen		37.50 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			16.250.000		2.765.167		38.250.000		0		0.00%		2.765.167		17.02%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%		70.23 %		25%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.08	**Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan**			500.000		0		500.000		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		100%		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.10	**Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota**			750.000		1.062.589		750.000		0		0.00%		1.062.589		141.68 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		100%		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.09	**Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak**			15.000.000		1.702.578		37.000.000		0		0.00%		1.702.578		11.35 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		70.23 %		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
129	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			50.448.426		3.948.339		31.224.920		5.896.887		18.89%		45.380.279		89.95%		
			Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33.3 %		26.75 %		61.8 %		16.93 %		27.39 %		16.93 %		50.84%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**			50.448.426		39.483.392		31.224.920		5.896.887		18.89%		45.380.279		89.95%		
			Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		7 Dokumen		23.33 %		7 Dokumen		23.33 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.10	**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**			10.102.386		22.240.406		16.824.845		3.445.174		20.48%		25.685.579		254.25 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen		7970 lokasi		7679 Dokumen		1718 Dokumen		22.37 %		1718 Dokumen		22.37 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.13	**Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**			3.138.336		4.822.901		3.418.406		601.417		17.59%		5.424.318		172.84 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang		58 Lembaga		60 Orang		60 Orang		100.00 %		60 Orang		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.07	**Pengamanan Barang Milik Daerah**			9.289.359		10.300.366		8.360.460		1.312.795		15.70%		11.613.161		125.02 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.09	**Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah**			27.918.345		2.119.719		2.621.209		537.502		20.51%		2.657.221		9.52 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan		30 Kasus/Obyek		30 Laporan		7 Laporan		23.33 %		7 Laporan		23.33 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
130	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			37.665.666		1.538.051		20.455.853		2.753.009		13.46%		18.133.522		48.14%		
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%		79.89 %		60%		164.96 %		274.93 %		164.96 %		274.93%		Badan Pendapatan Daerah	-
			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	73%		0.00 %		67%		27.49 %		41.03 %		27.49 %		37.66%		Badan Pendapatan Daerah	-
			Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	85%		56.96 %		82%		99.68 %		121.56 %		99.68 %		117.27%		Badan Pendapatan Daerah	-
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**			37.665.666		15.380.513		20.455.853		2.753.009		13.46%		18.133.522		48.14%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20.615 Objek Pajak		N/A		19426 Objek Pajak		5482 Objek Pajak		28.22 %		5482 Objek Pajak		26,59 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.14	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**			697.318		396.600		429.154		72.541		16.90%		469.141		67.28 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		12 bulan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.11	**Penagihan Pajak Daerah**			4.872.361		1.396.435		1.907.984		274.234		14.37%		1.670.669		34.29 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		549323 Objek Pajak		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.05	**Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**			17.564.766		4.865.863		6.983.612		847.807		12.14%		5.713.670		32.53 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		254734 Objek Pajak		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.13	**Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**			1.397.431		2.080.419		4.234.146		383.286		9.05%		2.463.705		176.30 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		78533 Objek Pajak		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.07	**Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**			13.133.790		6.641.196		6.900.957		1.175.140		17.03%		7.816.336		59.51 %		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20615 Obyek Pajak		832668 Objek Pajak		19426 Obyek Pajak		5482 Obyek Pajak		28.22 %		5482 Obyek Pajak		26.59 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**																	
131	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			19.003.190		1.584.165		17.249.562		931.344		5.40%		16.772.998		88.26%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		92.55 %		89%		93.99 %		105.61 %		93.99 %		105.61%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			16.673.062		14.146.374		15.505.295		570.373		3.68%		14.716.746		88.27%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			16.673.062		14.146.374		15.505.295		570.373		3.68%		14.716.746		88.27 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		100%		40 Orang/bulan		38 Orang/bulan		95.00 %		38 Orang/bulan		95.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			1.624.599		1.167.077		1.176.401		258.503		21.97%		1.425.580		87.75%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.624.599		1.167.077		1.176.401		258.503		21.97%		1.425.580		87.75 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		100%		28 Paket		20 Paket		71.43 %		20 Paket		71.43 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			705.530		528.203		567.865		102.468		18.04%		630.671		89.39%		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			705.530		528.203		567.865		102.468		18.04%		630.671		89.39 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		100%		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
132	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			7.304.388		457.074		6.291.279		1.094.662		17.40%		5.665.397		77.56%		
			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	95%		100.00 %		92%		97.77 %		106.27 %		97.77 %		102.92%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase pegawai yang disiplin	96.99 %		96.73 %		96.50 %		96.66 %		100.17 %		96.66 %		99.66%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	37.94 %		37.57 %		30.77 %		37.56 %		122.07 %		37.56 %		99.00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			2.823.680		921.422		2.446.500		239.919		9.81%		1.161.341		41.13%		
			Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	94%		99.95 %		91%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			2.014.416		323.300		1.740.036		82.906		4.76%		406.206		20.16 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		2 Tahap Seleksi		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.11	**Pengelolaan Data Kepegawaian**			483.991		355.949		411.097		98.683		24.00%		454.632		93.93 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		9659 Data pegawai		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.02	**Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN**			325.274		242.173		295.368		58.330		19.75%		300.503		92.38 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**			1.935.060		1.514.540		1.438.602		530.691		36.89%		2.045.231		105.69%		
			Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi abatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas		9659 berkas		8555 berkas		1206 berkas		14.10 %		1206 berkas		14.10 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.02	**Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**			695.225		484.502		455.425		91.203		20.03%		575.705		82.81 %		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen		8841 berkas		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.01	**Pengelolaan Mutasi ASN**			649.787		495.920		495.460		120.899		24.40%		616.819		94.93 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		805 berkas		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.03	**Pengelolaan Promosi ASN**			590.048		534.118		487.717		318.589		65.32%		852.707		144.51 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		13 berkas		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			2.545.648		2.134.773		2.406.176		324.051		13.47%		2.458.824		96.59%		
			Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis		2 jenis		2 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis		5 jenis		5 jenis		2 jenis		40.00 %		2 jenis		40.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		100.00 %		1 jenis		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.03	**Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			933.164		555.150		945.903		93.035		9.84%		648.185		69.46 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan		6 kali		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.02	**Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			684.603		664.029		628.466		113.549		18.07%		777.579		113.58 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5199 Dokumen		6364 orang		6138 Dokumen		5897 Dokumen		96.07 %		5897 Dokumen		113.43 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.08	**Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN**			927.881		915.594		831.808		117.467		14.12%		1.033.061		111.34 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan		5 jenis		5 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																	
133	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			9.535.107		656.705		6.788.121		285.119		4.20%		6.852.173		71.86%		
			Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	96%		98.31 %		94.5 %		100%		105.82 %		100%		104.17%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
	5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**			2.027.793		2.178.159		4.365.949		194.870		4.46%		2.373.029		117.03%		
			Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang		N/A		2232 orang		693 orang		31.05 %		693 orang		31.05 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.01.03	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum**			2.027.793		2.178.159		4.365.949		194.870		4.46%		2.373.029		117.03 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang		3574 orang		2232 Orang		693 Orang		31.05 %		693 Orang		31.05 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**			7.507.314		4.388.895		2.422.172		90.249		3.73%		4.479.144		59.66%		
			Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang		N/A		168 orang		63 orang		37.50 %		63 orang		37.50 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02.07	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**			7.507.314		4.388.895		2.422.172		90.249		3.73%		4.479.144		59.66 %		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan		927 orang		4 Laporan		2 Laporan		50.00 %		2 Laporan		50.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																	
134	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			689.355		98.503		1.577.177		267.046		16.93%		1.252.075		181.63%		
			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**			689.355		985.030		1.577.177		267.046		16.93%		1.252.075		181.63%		
			Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen		N/A		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.03	**Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif**			292.621		465.820		795.352		123.009		15.47%		588.829		201.23 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			396.735		519.210		781.825		144.037		18.42%		663.246		167.18 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH																	
135	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.555.889		2.353.256		22.070.096		1.039.074		4.71%		24.571.637		77.87%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		92.81 %		100%		96.82 %		96.82 %		96.82 %		96.82%		Inspektorat	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.567.135		22.183.677		19.970.068		705.638		3.53%		22.889.314		83.03%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.567.135		22.183.677		19.970.068		705.638		3.53%		22.889.314		83.03 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		100%		42 Orang/bulan		42 Orang/bulan		100.00 %		42 Orang/bulan		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			802.437		247.171		495.518		64.461		13.01%		311.632		38.84%		
			Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			802.437		247.171		495.518		64.461		13.01%		311.632		38.84 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		100%		2 Paket		3 Paket		150.00 %		3 Paket		150.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.186.316		1.101.716		1.604.510		268.975		16.76%		1.370.690		43.02%		
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		84.76 %		100%		93.65 %		93.65 %		93.65 %		93.65 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.186.316		1.101.716		1.604.510		268.975		16.76%		1.370.690		43.02 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		84.76 %		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Inspektorat	
136	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2.764.043		161.060		1.864.487		356.611		19.13%		1.967.211		71.17%		
			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Inspektorat	-
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Inspektorat	-
			Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%		76.92 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Inspektorat	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2.115.113		1.370.580		1.166.424		196.140		16.82%		1.566.720		74.07%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga		69 lembaga		65 lembaga		12 lembaga		18.46 %		12 lembaga		18.46 %		Inspektorat	
			Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen		N/A		17 Dokumen		1 Dokumen		5.88 %		1 Dokumen		5.88 %		Inspektorat	
			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	20 Rekomendasi		14 Rekomendasi		200 Rekomendasi		0 Rekomendasi		0.00 %		0 Rekomendasi		0.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.07	**Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**			1.440.287		970.100		319.681		66.000		20.65%		1.036.100		71.94 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen		70 Lembaga		200 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.02	**Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**			598.536		162.980		284.174		52.340		18.42%		215.320		35.97 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan		71 Kali		65 Laporan		12 Laporan		18.46 %		12 Laporan		18.46 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.04	**Reviu Laporan Keuangan**			36.351		117.100		280.827		37.900		13.50%		155.000		426.39 %		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan		7 Kali		7 Laporan		1 Laporan		14.29 %		1 Laporan		14.29 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.03	**Reviu Laporan Kinerja**			39.940		120.400		281.741		39.900		14.16%		160.300		401.35 %		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan		10 Kali		10 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**			648.930		240.020		698.063		160.471		22.99%		400.491		61.72%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga		24 lembaga		20 lembaga		4 lembaga		20.00 %		4 lembaga		20.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.02.01	**Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**			35.956		118.420		349.203		70.900		20.30%		189.320		526.53 %		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan		4 Kali		5 Laporan		1 Laporan		20.00 %		1 Laporan		20.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.02.02	**Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**			612.973		121.600		348.860		89.571		25.68%		211.171		34.45 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan		24 kali		20 Laporan		4 Laporan		20.00 %		4 Laporan		20.00 %		Inspektorat	
137	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			1.127.801		87.732		1.865.926		400.540		21.47%		1.277.860		113.31%		
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%		100.00 %		100%		3.33 %		3.33 %		3.33 %		3.33%		Inspektorat	-
			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Inspektorat	-
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%		100.00 %		100%		40%		40.00 %		40%		40.00%		Inspektorat	-
	6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**			522.100		363.300		613.443		142.400		23.21%		505.700		96.86%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen		7 dokumen		4 dokumen		2 dokumen		50.00 %		2 dokumen		50.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.01.02	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan**			78.860		119.900		303.805		39.900		13.13%		159.800		202.64 %		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 kali		4 Rekomendasi		1 Rekomendasi		25.00 %		1 Rekomendasi		25.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.01.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**			443.240		243.400		309.638		102.500		33.10%		345.900		78.04 %		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 kali		4 Rekomendasi		2 Rekomendasi		50.00 %		2 Rekomendasi		50.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**			605.701		514.020		1.252.483		258.140		20.61%		772.160		127.48%		
			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 Laporan		N/A		65 Laporan		2 Laporan		3.08 %		2 Laporan		3.08 %		Inspektorat	
			Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	49 Kali		N/A		43 Kali		30 Kali		69.77 %		30 Kali		61.22 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.03	**Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**			56.261		121.500		303.555		62.920		20.73%		184.420		327.79 %		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan		50 Kali		25 Kegiatan		4 Kegiatan		16.00 %		4 Kegiatan		16.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.04	**Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas**			36.045		122.160		303.533		50.300		16.57%		172.460		478.46 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14 perangkat daerah		12 Kali		8 perangkat daerah		2 perangkat daerah		25.00 %		2 perangkat daerah		14.29 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.02	**Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi**			70.353		121.060		303.555		78.300		25.79%		199.360		283.37 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah		21 Kali		10 perangkat daerah		24 perangkat daerah		240.00 %		24 perangkat daerah		240.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.01	**Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**			443.042		149.300		341.840		66.620		19.49%		215.920		48.74 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 perangkat daerah		60 Kali		65 perangkat daerah		2 perangkat daerah		3.08 %		2 perangkat daerah		3.08 %		Inspektorat	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7.01	**KECAMATAN**																	
138	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			627.261.662		76.248.561		799.375.084		58.457.397		7.31%		820.943.006		130.88%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.09 %		92.68 %		97.81 %		93.54 %		95.63 %		93.54 %		95.36%		Kec. Benowo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.82 %		93.57 %		98.44 %		95.08 %		96.59 %		95.08 %		95.25%		Kec. Bulak	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.93 %		92.18 %		96.59 %		94.41 %		97.74 %		94.41 %		97.40%		Kec. Sawahan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.10 %		95.65 %		98.86 %		96.44 %		97.55 %		96.44 %		97.32%		Kec. Sambikerep	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100.6 %		93.53 %		99.37 %		95.27 %		95.87 %		95.27 %		94.70%		Kec. Asemrowo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.58 %		94.54 %		98.30 %		95.05 %		96.69 %		95.05 %		96.42%		Kec. Jambangan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.46 %		93.86 %		98.39 %		95.83 %		97.40 %		95.83 %		97.33%		Kec. Wiyung	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.04 %		93.10 %		95.95 %		96.18 %		100.24 %		96.18 %		100.15%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26 %		92.81 %		97.03 %		94.95 %		97.86 %		94.95 %		97.62%		Kec. Sukolilo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.09 %		93.05 %		97.99 %		95.56 %		97.52 %		95.56 %		97.42%		Kec. Gunung Anyar	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.81 %		93.23 %		96.77 %		94.12 %		97.26 %		94.12 %		97.22%		Kec. Karangpilang	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26 %		92.94 %		97.24 %		95.54 %		98.25 %		95.54 %		98.23%		Kec. Lakarsantri	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.92 %		93.32 %		95.17 %		97.3 %		102.24 %		97.3 %		101.44%		Kec. Semampir	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.45 %		89.87 %		96.86 %		94.12 %		97.17 %		94.12 %		96.58%		Kec. Rungkut	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.76 %		96.43 %		98.71 %		97.26 %		98.53 %		97.26 %		98.48%		Kec. Kenjeran	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.44 %		93.99 %		97.30 %		95.49 %		98.14 %		95.49 %		98.00%		Kec. Krembangan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.19 %		91.71 %		96.00 %		93.07 %		96.95 %		93.07 %		96.76%		Kec. Bubutan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.35 %		91.92 %		98.05 %		93.39 %		95.25 %		93.39 %		94.96%		Kec. Tegalsari	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.43 %		93.07 %		97.24 %		95.41 %		98.12 %		95.41 %		97.93%		Kec. Wonocolo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.99 %		92.32 %		96.95 %		95.23 %		98.23 %		95.23 %		98.19%		Kec. Mulyorejo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.36 %		92.79 %		96.63 %		95.17 %		98.49 %		95.17 %		97.75%		Kec. Tandes	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.08 %		93.00 %		96.91 %		96.02 %		99.08 %		96.02 %		98.91%		Kec. Gubeng	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.92 %		94.84 %		97.86 %		96.47 %		98.58 %		96.47 %		98.52%		Kec. Sukomanunggal	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.65 %		92.75 %		98.39 %		94.21 %		95.75 %		94.21 %		94.54%		Kec. Gayungan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.15 %		93.56 %		97.44 %		96.01 %		98.53 %		96.01 %		97.82%		Kec. Tambaksari	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.48 %		91.42 %		97.35 %		93.7 %		96.25 %		93.7 %		96.12%		Kec. Pakal	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.36 %		94.40 %		97.97 %		96.26 %		98.25 %		96.26 %		97.86%		Kec. Wonokromo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.05 %		92.58 %		97.68 %		93.62 %		95.84 %		93.62 %		95.48%		Kec. Pabean Cantian	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.29 %		90.70 %		96.81 %		92.66 %		95.71 %		92.66 %		94.27%		Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.56 %		95.27 %		97.46 %		96.19 %		98.70 %		96.19 %		98.60%		Kec. Simokerto	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.70 %		92.56 %		97.40 %		96.14 %		98.71 %		96.14 %		98.40%		Kec. Genteng	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			546.130.426		581.657.334		628.610.457		27.683.821		4.40%		609.341.155		111.57%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bulak	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.940.971		18.318.119		19.615.816		859.520		4.38%		19.177.639		120.30 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan		100%		68 Orang/bulan		59 Orang/bulan		86.76 %		59 Orang/bulan		86.76 %		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			16.781.899		16.005.547		17.554.308		766.331		4.37%		16.771.878		99.94 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		100%		60 Orang/bulan		51 Orang/bulan		85.00 %		51 Orang/bulan		85.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.603.917		16.534.031		16.162.247		798.036		4.94%		17.332.067		111.08 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		100%		64 Orang/bulan		55 Orang/bulan		85.94 %		55 Orang/bulan		85.94 %		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			17.790.611		15.910.708		17.841.724		753.813		4.23%		16.664.521		93.67 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		100%		58 Orang/bulan		50 Orang/bulan		86.21 %		50 Orang/bulan		86.21 %		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.118.818		20.703.624		22.287.909		951.553		4.27%		21.655.177		113.27 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		100%		80 Orang/bulan		66 Orang/bulan		82.50 %		66 Orang/bulan		82.50 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.428.208		21.361.429		22.917.893		1.004.321		4.38%		22.365.750		115.12 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		100%		81 Orang/bulan		68 Orang/bulan		83.95 %		68 Orang/bulan		83.95 %		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			20.296.819		22.029.856		23.457.290		1.050.982		4.48%		23.080.838		113.72 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		100%		81 Orang/bulan		74 Orang/bulan		91.36 %		74 Orang/bulan		91.36 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.809.979		16.195.164		17.595.256		768.549		4.37%		16.963.714		107.30 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		100%		60 Orang/bulan		52 Orang/bulan		86.67 %		52 Orang/bulan		86.67 %		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.154.579		15.964.329		17.129.295		702.099		4.10%		16.666.427		109.98 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		100%		60 Orang/bulan		49 Orang/bulan		81.67 %		49 Orang/bulan		81.67 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.969.408		20.500.188		22.396.415		962.993		4.30%		21.463.181		107.48 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		100%		76 Orang/bulan		66 Orang/bulan		86.84 %		66 Orang/bulan		86.84 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.775.782		23.731.539		25.541.365		1.147.956		4.49%		24.879.496		114.25 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan		100%		89 Orang/bulan		78 Orang/bulan		87.64 %		78 Orang/bulan		87.64 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.215.176		21.113.219		22.460.587		949.808		4.23%		22.063.027		109.14 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		100%		76 Orang/bulan		65 Orang/bulan		85.53 %		65 Orang/bulan		85.53 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.466.465		17.497.915		19.148.516		811.996		4.24%		18.309.910		104.83 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		100%		63 Orang/bulan		54 Orang/bulan		85.71 %		54 Orang/bulan		85.71 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.466.930		18.392.512		19.826.222		863.353		4.35%		19.255.865		116.94 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan		100%		68 Orang/bulan		62 Orang/bulan		91.18 %		62 Orang/bulan		91.18 %		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.169.150		18.748.993		20.408.033		890.700		4.36%		19.639.693		108.09 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		100%		70 Orang/bulan		61 Orang/bulan		87.14 %		61 Orang/bulan		87.14 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.997.087		14.947.182		16.036.765		729.250		4.55%		15.676.433		112.00 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		100%		58 Orang/bulan		54 Orang/bulan		93.10 %		54 Orang/bulan		93.10 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.192.561		18.141.992		19.319.096		912.778		4.72%		19.054.770		117.68 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		100%		73 Orang/bulan		65 Orang/bulan		89.04 %		65 Orang/bulan		89.04 %		Kec. Gayungan	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.035.256		18.567.635		20.049.896		946.761		4.72%		19.514.395		129.79 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		100%		73 Orang/bulan		67 Orang/bulan		91.78 %		67 Orang/bulan		91.78 %		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.950.603		17.998.411		19.756.997		867.638		4.39%		18.866.049		111.30 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan		100%		67 Orang/bulan		61 Orang/bulan		91.04 %		61 Orang/bulan		91.04 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.653.687		22.731.869		24.876.584		1.082.729		4.35%		23.814.598		109.98 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan		100%		88 Orang/bulan		76 Orang/bulan		86.36 %		76 Orang/bulan		86.36 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.766.279		16.101.923		17.796.494		795.021		4.47%		16.896.944		107.17 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		100%		63 Orang/bulan		56 Orang/bulan		88.89 %		56 Orang/bulan		88.89 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.739.285		15.775.409		17.067.956		744.724		4.36%		16.520.133		104.96 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan		100%		59 Orang/bulan		52 Orang/bulan		88.14 %		52 Orang/bulan		88.14 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.615.151		16.558.059		18.051.739		785.368		4.35%		17.343.427		111.07 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		100%		63 Orang/bulan		57 Orang/bulan		90.48 %		57 Orang/bulan		90.48 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.957.215		18.560.721		21.691.248		883.294		4.07%		19.444.016		121.85 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		100%		72 Orang/bulan		62 Orang/bulan		86.11 %		62 Orang/bulan		86.11 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.279.561		22.331.088		24.054.069		1.043.204		4.34%		23.374.292		115.26 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan		100%		87 Orang/bulan		71 Orang/bulan		81.61 %		71 Orang/bulan		81.61 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.925.618		17.007.799		18.041.299		802.740		4.45%		17.810.540		111.84 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		100%		64 Orang/bulan		57 Orang/bulan		89.06 %		57 Orang/bulan		89.06 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.595.265		19.024.085		20.471.842		889.392		4.34%		19.913.477		113.18 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		100%		75 Orang/bulan		63 Orang/bulan		84.00 %		63 Orang/bulan		84.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.063.586		21.857.314		23.967.793		1.102.455		4.60%		22.959.769		127.11 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan		100%		87 Orang/bulan		77 Orang/bulan		88.51 %		77 Orang/bulan		88.51 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.822.509		16.968.534		17.981.419		808.221		4.49%		17.776.755		105.67 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		100%		65 Orang/bulan		56 Orang/bulan		86.15 %		56 Orang/bulan		86.15 %		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.104.845		15.845.761		17.027.904		753.161		4.42%		16.598.923		109.89 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		100%		55 Orang/bulan		50 Orang/bulan		90.91 %		50 Orang/bulan		90.91 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.443.205		26.232.380		28.076.482		1.255.075		4.47%		27.487.455		108.03 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan		100%		95 Orang/bulan		84 Orang/bulan		88.42 %		84 Orang/bulan		88.42 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			76.007.353		177.319.232		165.113.289		29.876.934		18.09%		207.196.166		272.60%		
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		94.12 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		91.74 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		93.79 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		79.54 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		96.99 %		100%		89%		89.00 %		89%		89.00 %		Kec. Jambangan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		95.95 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		84.78 %		100%		91.03 %		91.03 %		91.03 %		91.03 %		Kec. Wonocolo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		90.89 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		89.75 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		97.05 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	31 Paket		N/A		28 Paket		10 Paket		35.71 %		10 Paket		32.26 %		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		91.91 %		100%		91.03 %		91.03 %		91.03 %		91.03 %		Kec. Lakarsantri	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		98.57 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		87.5 %		100%		90%		90.00 %		90%		90.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		94.43 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket		N/A		29 Paket		18 Paket		62.07 %		18 Paket		62.07 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket		N/A		24 paket		20 paket		83.33 %		20 paket		83.33 %		Kec. Bulak	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		94.61 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		93.38 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		95.66 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		98.65 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		88.57 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		91.39 %		100%		81.85 %		81.85 %		81.85 %		81.85 %		Kec. Tambaksari	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		94.06 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		86.29 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		N/A		19 Paket		11 Paket		57.89 %		11 Paket		57.89 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		97.24 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.643.376		7.364.618		6.576.859		1.187.175		18.05%		8.551.793		323.52 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		95.66 %		15 Paket		17 Paket		113.33 %		17 Paket		113.33 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.909.831		5.214.934		5.038.814		911.795		18.10%		6.126.729		320.80 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		88.57 %		9 Paket		9 Paket		100.00 %		9 Paket		100.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.885.216		5.777.806		5.510.525		941.595		17.09%		6.719.400		356.43 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		79.54 %		20 Paket		23 Paket		115.00 %		23 Paket		115.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			816.940		3.197.743		2.976.422		527.749		17.73%		3.725.492		456.03 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		94.43 %		17 Paket		13 Paket		76.47 %		13 Paket		76.47 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.142.237		6.092.653		6.325.117		1.071.526		16.94%		7.164.179		334.43 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		100%		24 Paket		23 Paket		95.83 %		23 Paket		95.83 %		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.172.553		5.130.109		4.996.383		852.747		17.07%		5.982.855		275.38 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		98.57 %		19 Paket		10 Paket		52.63 %		10 Paket		52.63 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.029.400		6.513.231		6.396.489		1.245.813		19.48%		7.759.043		256.12 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		87.5 %		22 Paket		21 Paket		95.45 %		21 Paket		95.45 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.723.479		5.954.517		5.342.884		999.350		18.70%		6.953.867		255.33 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		89.75 %		15 Paket		15 Paket		100.00 %		15 Paket		100.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.734.121		4.703.426		4.390.942		831.235		18.93%		5.534.660		319.16 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		98.65 %		8 Paket		8 Paket		100.00 %		8 Paket		100.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.462.248		4.872.770		4.627.327		883.269		19.09%		5.756.039		393.64 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		97.13 %		19 Paket		11 Paket		57.89 %		11 Paket		57.89 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.775.956		6.172.043		5.815.389		1.113.607		19.15%		7.285.650		192.95 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		100%		15 Paket		11 Paket		73.33 %		11 Paket		73.33 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.448.920		5.653.446		5.278.940		896.266		16.98%		6.549.712		452.04 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket		90.89 %		36 Paket		16 Paket		44.44 %		16 Paket		44.44 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.786.799		5.963.000		5.445.960		943.600		17.33%		6.906.599		182.39 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		96.53 %		24 Paket		20 Paket		83.33 %		20 Paket		83.33 %		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			847.284		6.110.800		5.788.103		1.128.938		19.50%		7.239.738		854.46 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket		97.24 %		23 Paket		23 Paket		100.00 %		23 Paket		100.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.920.502		6.340.031		6.064.289		1.008.927		16.64%		7.348.959		251.63 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket		86.29 %		27 Paket		9 Paket		33.33 %		9 Paket		33.33 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.755.199		5.222.231		4.885.266		872.238		17.85%		6.094.468		221.20 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		91.91 %		8 Paket		8 Paket		100.00 %		8 Paket		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.729.368		5.918.114		5.333.246		933.538		17.50%		6.851.652		396.19 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		95.95 %		6 Paket		5 Paket		83.33 %		5 Paket		83.33 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.098.006		10.073.636		9.277.886		1.504.766		16.22%		11.578.402		227.12 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		91.39 %		20 Paket		20 Paket		100.00 %		20 Paket		100.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.367.996		4.207.672		3.816.780		730.731		19.15%		4.938.403		113.06 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		93.38 %		1 Paket		1 Paket		100.00 %		1 Paket		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.448.980		7.697.941		6.902.375		1.251.372		18.13%		8.949.313		365.43 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		93.79 %		19 Paket		14 Paket		73.68 %		14 Paket		73.68 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.807.210		4.426.722		4.139.244		772.167		18.65%		5.198.889		287.67 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		100%		22 Paket		19 Paket		86.36 %		19 Paket		86.36 %		Kec. Gayungan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			724.460		4.707.469		4.368.124		835.714		19.13%		5.543.182		765.15 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		94.61 %		17 Paket		19 Paket		111.76 %		19 Paket		111.76 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.840.899		6.865.471		6.084.142		1.137.850		18.70%		8.003.321		434.75 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		91.74 %		15 Paket		8 Paket		53.33 %		8 Paket		53.33 %		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.181.219		5.206.048		4.753.927		869.385		18.29%		6.075.434		514.34 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket		94.12 %		501 Paket		134 Paket		26.75 %		134 Paket		26.75 %		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.415.085		5.115.639		4.692.303		868.627		18.51%		5.984.266		93.28 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket		100%		28 Paket		10 Paket		35.71 %		10 Paket		32.26 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.007.331		4.248.725		3.722.721		698.182		18.75%		4.946.908		491.09 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		96.99 %		100 Paket		29 Paket		29.00 %		29 Paket		29.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.832.212		5.992.213		5.716.969		1.066.564		18.66%		7.058.776		385.26 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		94.06 %		10 Paket		18 Paket		180.00 %		18 Paket		180.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.827.863		5.322.103		4.488.027		874.705		19.49%		6.196.808		339.02 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		84.78 %		100 Paket		32 Paket		32.00 %		32 Paket		32.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			964.089		7.040.251		6.444.586		1.201.990		18.65%		8.242.240		854.93 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		97.05 %		10 Paket		12 Paket		120.00 %		12 Paket		120.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.109.517		5.735.202		5.752.022		977.539		16.99%		6.712.741		605.01 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		100%		12 Paket		12 Paket		100.00 %		12 Paket		100.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.599.059		4.478.669		4.161.225		737.976		17.73%		5.216.645		68.65 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		89.46 %		29 Paket		18 Paket		62.07 %		18 Paket		62.07 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.123.883		3.509.042		5.651.338		896.643		15.87%		4.405.685		85.98%		
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit		N/A		2 unit		4 unit		200.00 %		4 unit		200.00 %		Kec. Bulak	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		92.42 %		100%		75%		75.00 %		75%		75.00 %		Kec. Gubeng	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		92.59 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		73.68 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			umlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit		N/A		18 Unit		5 Unit		27.78 %		5 Unit		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		N/A		30 Unit		10 Unit		33.33 %		10 Unit		33.33 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		81.71 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		93.94 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		87.84 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		83.33 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		80%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		92.19 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		92.31 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		84.44 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		84.85 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		72.06 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		90%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		85.94 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		87.5 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		84.48 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		84.72 %		100%		81.25 %		81.25 %		81.25 %		81.25 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			200.239		128.192		217.471		30.039		13.81%		158.231		79.02 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit		87.84 %		36 Unit		2 Unit		5.56 %		2 Unit		5.56 %		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			170.767		98.629		175.459		32.257		18.38%		130.886		76.65 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		87.5 %		50 Unit		17 Unit		34.00 %		17 Unit		34.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			211.392		132.214		218.374		43.149		19.76%		175.363		82.96 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit		100%		34 Unit		7 Unit		20.59 %		7 Unit		20.59 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			140.091		108.017		141.705		26.929		19.00%		134.947		96.33 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit		84.85 %		65 Unit		11 Unit		16.92 %		11 Unit		16.92 %		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			148.255		61.172		151.703		18.656		12.30%		79.828		53.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		83.33 %		30 Unit		10 Unit		33.33 %		10 Unit		28.57 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			126.396		112.128		129.770		20.905		16.11%		133.033		105.25 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit		93.94 %		29 Unit		15 Unit		51.72 %		15 Unit		51.72 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			198.810		120.860		183.770		27.003		14.69%		147.863		74.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		80%		3 Unit		2 Unit		66.67 %		2 Unit		66.67 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			164.611		117.694		201.526		10.569		5.24%		128.263		77.92 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		72.06 %		5 Unit		5 Unit		100.00 %		5 Unit		100.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			110.587		99.643		146.743		29.797		20.31%		129.439		117.05 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		100%		5 Unit		5 Unit		100.00 %		5 Unit		100.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			301.827		164.989		269.338		50.995		18.93%		215.984		71.56 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		100%		6 Unit		4 Unit		66.67 %		4 Unit		66.67 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			156.241		100.873		156.234		34.065		21.80%		134.938		86.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		100%		5 Unit		4 Unit		80.00 %		4 Unit		80.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			190.228		148.253		200.708		29.807		14.85%		178.060		93.60 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		100%		2 Unit		4 Unit		200.00 %		4 Unit		200.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			194.913		150.744		199.190		35.148		17.65%		185.892		95.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		100%		7 Unit		9 Unit		128.57 %		9 Unit		128.57 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			161.471		71.905		126.679		18.623		14.70%		90.528		56.06 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		83.33 %		3 Unit		3 Unit		100.00 %		3 Unit		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			175.905		109.360		161.969		33.661		20.78%		143.021		81.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		92.59 %		4 Unit		4 Unit		100.00 %		4 Unit		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			232.980		110.846		269.549		17.007		6.31%		127.853		54.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		73.68 %		50 Unit		50 Unit		100.00 %		50 Unit		100.00 %		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			96.413		106.505		187.371		37.092		19.80%		143.597		148.94 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		100%		4 Unit		4 Unit		100.00 %		4 Unit		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			168.090		82.631		188.775		32.531		17.23%		115.162		68.51 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		81.71 %		5 Unit		9 Unit		180.00 %		9 Unit		180.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			139.792		99.914		131.708		12.950		9.83%		112.864		80.74 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		100%		6 Unit		4 Unit		66.67 %		4 Unit		66.67 %		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			141.228		110.747		150.778		34.696		23.01%		145.443		102.98 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit		92.19 %		19 Unit		18 Unit		94.74 %		18 Unit		94.74 %		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			105.600		94.273		105.859		23.655		22.35%		117.927		111.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		94.23 %		18 Unit		5 Unit		27.78 %		5 Unit		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			117.333		105.800		136.128		27.308		20.06%		133.108		113.44 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		85.94 %		100 Unit		26 Unit		26.00 %		26 Unit		26.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			305.712		129.044		307.429		32.088		10.44%		161.131		52.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		84.48 %		7 Unit		4 Unit		57.14 %		4 Unit		57.14 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			223.592		124.164		218.143		23.258		10.66%		147.421		65.93 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		84.72 %		100 Unit		33 Unit		33.00 %		33 Unit		33.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108.863		181.392		196.565		43.691		22.23%		225.082		206.76 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		92.42 %		60 Unit		19 Unit		31.67 %		19 Unit		31.67 %		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			160.370		93.646		184.470		26.053		14.12%		119.699		74.64 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		100%		5 Unit		2 Unit		40.00 %		2 Unit		40.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			95.506		99.047		159.556		23.879		14.97%		122.926		128.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		84.44 %		50 Unit		17 Unit		34.00 %		17 Unit		34.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			132.288		111.917		178.277		32.249		18.09%		144.166		108.98 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		92.31 %		4 Unit		3 Unit		75.00 %		3 Unit		75.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			162.335		107.863		175.204		29.054		16.58%		136.917		84.34 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		90%		60 Unit		20 Unit		33.33 %		20 Unit		33.33 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			133.688		105.413		205.947		25.218		12.24%		130.630		97.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		100%		3 Unit		4 Unit		133.33 %		4 Unit		133.33 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			148.363		121.169		174.942		34.314		19.61%		155.483		104.80 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		100%		5 Unit		9 Unit		180.00 %		9 Unit		180.00 %		Kec. Gayungan	
139	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.265.386		56.152		689.778		89.208		12.93%		650.724		51.42%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gununq Anyar	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Rungkut	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		94.74 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		80.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		85.71 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		96.88 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		85.37 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Jambangan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sawahan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		93.10 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.265.386		561.516		689.778		89.208		12.93%		650.724		51.42%		
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		23 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		25.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus		17 Kasus		45 Kasus		11 Kasus		24.44 %		11 Kasus		24.44 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		30 Kasus		24 Kasus		7 Kasus		29.17 %		7 Kasus		29.17 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus		73 Kasus		73 Kasus		18 Kasus		24.66 %		18 Kasus		24.66 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		47 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		25.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang		2 Topik		35 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus		44 Kasus		44 Kasus		15 Kasus		34.09 %		15 Kasus		34.09 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus		37 Kasus		37 Kasus		9 Kasus		24.32 %		9 Kasus		24.32 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		27 Kasus		20 Kasus		4 Kasus		20.00 %		4 Kasus		20.00 %		Kec. Tandes	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus		39 Kasus		62 Kasus		15 Kasus		24.19 %		15 Kasus		24.19 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus		70 Kasus		36 Kasus		9 Kasus		25.00 %		9 Kasus		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		3 Kasus		15.00 %		3 Kasus		15.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	19 Kasus		43 Kasus		34 Kasus		7 Kasus		20.59 %		7 Kasus		36.84 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34 Orang		N/A		33 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik		2 topik		2 topik		0 topik		0.00 %		0 topik		0.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus		12 Kasus		9 Kasus		3 Kasus		33.33 %		3 Kasus		33.33 %		Kec. Genteng	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		39 kasus		24 kasus		8 kasus		33.33 %		8 kasus		33.33 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	28 Kasus		41 Kasus		38 Kasus		4 Kasus		10.53 %		4 Kasus		14.29 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Laporan		19 Kasus		7 Laporan		2 Laporan		28.57 %		2 Laporan		28.57 %		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	4 Kasus		25 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		150.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		28 Kasus		20 Kasus		5 Kasus		25.00 %		5 Kasus		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		25 Kasus		12 Kasus		4 Kasus		33.33 %		4 Kasus		33.33 %		Kec. Pakal	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		1 Topik		50.00 %		1 Topik		50.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus		99 Kasus		144 Kasus		36 Kasus		25.00 %		36 Kasus		25.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus		8 Kasus		7 Kasus		9 Kasus		128.57 %		9 Kasus		128.57 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		6 kasus		25.00 %		6 kasus		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		1 Topik		50.00 %		1 Topik		50.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus		27 Kasus		150 Kasus		30 Kasus		20.00 %		30 Kasus		20.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus		21 Kasus		210 Kasus		5 Kasus		2.38 %		5 Kasus		2.38 %		Kec. Semampir	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus		6 Kasus		2 Kasus		1 Kasus		50.00 %		1 Kasus		50.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus		42 kasus		2 kasus		3 kasus		150.00 %		3 kasus		150.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus		N/A		24 kasus		1 kasus		4.17 %		1 kasus		4.17 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		6 kasus		25.00 %		6 kasus		25.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus		62 Kasus		88 Kasus		16 Kasus		18.18 %		16 Kasus		18.18 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		91 Kasus		12 Kasus		3 Kasus		25.00 %		3 Kasus		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			16.079		4.140		14.400		4.110		28.54%		8.250		51.31 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		2 Kali		120 Orang		57 Orang		47.50 %		57 Orang		47.50 %		Kec. Bubutan	
	7.01.05.2.01.02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			18.011		6.440		8.800		0		0.00%		6.440		35.76 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang		2 kali		35 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			11.883		11.060		3.710		3.710		100.00%		14.770		124.30 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	77 Orang		4 Kali		57 Orang		57 Orang		100.00 %		57 Orang		74.03 %		Kec. Genteng	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			13.399		5.320		6.160		0		0.00%		5.320		39.71 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang		4 kali		53 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			30.147		7.600		19.240		3.000		15.59%		10.600		35.16 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		4 Kali		120 Orang		30 Orang		25.00 %		30 Orang		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		10.230		9.080		0		0.00%		10.230		101.80 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang		4 kali		100 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			9.379		7.200		8.010		0		0.00%		7.200		76.77 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		3 kali		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		8.980		6.900		0		0.00%		8.980		89.36 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang		4 Kali		166 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		9.160		9.000		0		0.00%		9.160		91.15 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		5 kali		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			22.510		16.600		15.800		0		0.00%		16.600		73.75 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang		4 Kali		4 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			6.699		1.750		5.970		0		0.00%		1.750		26.12 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang		2 Kali		187 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.079		7.760		14.400		2.600		18.06%		10.360		64.43 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang		4 Kali		80 Orang		40 Orang		50.00 %		40 Orang		50.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			8.039		11.350		10.000		0		0.00%		11.350		141.18 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang		4 kali		418 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.749		10.100		10.692		0		0.00%		10.100		60.30 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang		5 Kali		561 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			51.920		8.420		6.000		3.000		50.00%		11.420		22.00 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang		2 Kali		94 Orang		47 Orang		50.00 %		47 Orang		50.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		3.980		5.000		2.500		50.00%		6.480		64.48 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43 Orang		4 kali		63 Orang		50 Orang		79.37 %		50 Orang		116.28 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			23.898		4.600		4.640		0		0.00%		4.600		19.25 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		4 kali		69 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			18.011		6.760		10.400		0		0.00%		6.760		37.53 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		4 Kali		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			7.933		5.890		5.800		0		0.00%		5.890		74.25 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang		4 kali		60 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		4.360		8.800		0		0.00%		4.360		43.39 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	52 Orang		4 kali		78 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wiyung	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			24.610		8.580		21.270		0		0.00%		8.580		34.86 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	123 Orang		4 kali		91 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		6.400		8.900		0		0.00%		6.400		63.69 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		2 Kali		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			32.616		26.900		2.400		0		0.00%		26.900		82.47 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang		10 Kali		230 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			29.707		13.600		22.900		0		0.00%		13.600		45.78 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		5 Kali		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.079		9.650		13.500		0		0.00%		9.650		60.02 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		5 Kali		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			2.512		3.620		2.300		0		0.00%		3.620		144.09 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34 Orang		2 kali		33 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			23.766		10.160		15.200		0		0.00%		10.160		42.75 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	58 Orang		4 Kali		63 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			33.671		16.170		20.560		0		0.00%		16.170		48.02 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang		4 kali		663 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.414		6.700		8.140		0		0.00%		6.700		40.82 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		4 Kali		69 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			5.025		2.000		3.260		0		0.00%		2.000		39.80 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	164 Orang		2 Kali		164 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.414		7.040		14.600		0		0.00%		7.040		42.89 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang		4 Kali		12 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		6.975		6.439		1.610		25.00%		8.585		106.79 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		43 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			29.778		4.292		6.439		1.610		25.00%		5.902		19.82 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan		19 kasus		7 Laporan		2 Laporan		28.57 %		2 Laporan		28.57 %		Kec. Krembangan	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			13.399		6.439		12.000		2.504		20.87%		8.943		66.74 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		25 kasus		1 Laporan		2 Laporan		200.00 %		2 Laporan		200.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			13.260		10.731		35.892		2.683		7.47%		13.414		101.16 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			53.595		22.356		8.585		2.146		25.00%		24.502		45.72 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		28 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		7.869		18.243		6.081		33.33%		13.950		138.82 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		30 kasus		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		6.439		7.200		2.146		29.81%		8.585		106.79 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan		44 kasus		6 Laporan		2 Laporan		33.33 %		2 Laporan		33.33 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		7.154		7.200		1.789		24.84%		8.943		111.24 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan		37 Kasus		37 Laporan		9 Laporan		24.32 %		9 Laporan		24.32 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		7.154		8.943		2.862		32.00%		10.016		99.67 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		25 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		0		9.000		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		24 kasus		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			22.510		2.862		8.000		2.862		35.77%		5.723		25.43 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28 Laporan		47 Kasus		38 Laporan		4 Laporan		10.53 %		4 Laporan		14.29 %		Kec. Jambangan	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			103.841		32.193		32.193		8.048		25.00%		40.241		38.75 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		73 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		7.154		7.200		2.146		29.81%		9.300		115.68 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		47 kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			25.917		20.925		20.000		4.471		22.36%		25.397		97.99 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		21 Kasus		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			103.841		3.935		7.154		1.431		20.00%		5.366		5.17 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		39 Kasus		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			100.121		15.023		19.316		2.146		11.11%		17.170		17.15 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		29 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			29.778		17.885		17.577		3.577		20.35%		21.462		72.07 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		7 Kasus		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			2.103		358		1.789		715		40.00%		1.073		51.04 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		10 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			13.399		12.162		8.585		0		0.00%		12.162		90.77 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		39 kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		4.292		8.943		2.146		24.00%		6.439		64.07 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		24 kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			21.770		17.170		16.800		4.114		24.49%		21.283		97.76 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		100 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			10.049		7.154		8.943		1.431		16.00%		8.585		85.43 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan		27 Kasus		5 Laporan		1 Laporan		20.00 %		1 Laporan		20.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			6.763		5.902		6.439		1.073		16.67%		6.975		103.14 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		17 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			7.149		5.366		6.439		1.610		25.00%		6.975		97.57 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		91 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			8.039		6.796		8.585		1.431		16.67%		8.227		102.34 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		70 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			3.350		6.260		3.000		358		11.92%		6.617		197.55 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		15 kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			16.308		0		10.000		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan		62 Kasus		88 Laporan		16 Laporan		18.18 %		16 Laporan		18.18 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			27.844		21.600		22.089		0		0.00%		21.600		77.58 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		45 kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			16.414		14.308		14.666		2.862		19.51%		17.170		104.61 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		30 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			15.550		11.983		11.983		2.862		23.88%		14.845		95.46 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		20 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			16.414		6.260		14.308		3.577		25.00%		9.837		59.93 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		23 Kasus		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
140	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			629.376.184		31.127.923		515.251.122		22.521.873		4.37%		333.801.099		53.04%		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sawahan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pakal	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Semampir	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		12.5 %		33.33 %		12.5 %		12.50%		Kec. Tegalsari	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gununq Anyar	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Simokerto	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wiyung	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Genteng	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		84.31 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tandes	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sawahan	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%		70.89 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Rungkut	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gayungan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Jambangan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		70.53 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Jambangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bulak	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Benowo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bubutan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12.50 %		37.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Rungkut	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gununq Anyar	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			623.077.437		310.802.146		504.484.909		22.410.133		4.44%		333.212.279		53.48%		
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan		2 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas		N/A		1 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		0.00 %		0 Pokmas/Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan		2 kelurahan		2 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan		8 kelurahan		8 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		100.00 %		1 Kelurahan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wiyung	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bulak	
			umlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga		N/A		5 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Bulak	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gayungan	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gayungan	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gubeng	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pakal	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bubutan	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Krembangan	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Tandes	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		N/A		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wiyung	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga		5 kelurahan		5 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		N/A		2 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sawahan	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sawahan	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Simokerto	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan		7 kelurahan		7 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tandes	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		N/A		1 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan		3 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.544.639		349.454		986.991		0		0.00%		349.454		9.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.767.659		383.455		1.753.675		0		0.00%		383.455		13.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 RW		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.520.370		169.553		2.127.343		0		0.00%		169.553		11.15 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit		12 RW		66 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			984.989		276.299		1.876.371		0		0.00%		276.299		28.05 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit		2 RW		24 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.551.881		361.358		1.987.373		0		0.00%		361.358		23.29 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		11 RW		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			5.348.168		575.141		633.587		0		0.00%		575.141		10.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		11 RW		27 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.777.698		396.794		1.542.645		0		0.00%		396.794		22.32 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		16 RW		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.658.766		910.449		1.073.360		0		0.00%		910.449		24.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 RW		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.787.980		1.127.753		1.585.068		0		0.00%		1.127.753		40.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		2 RW		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			4.459.209		545.065		2.123.282		0		0.00%		545.065		12.22 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		6 RW		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.505.701		571.287		1.632.490		0		0.00%		571.287		16.30 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		9 RW		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.436.054		432.446		1.933.946		0		0.00%		432.446		30.11 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 RW		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.675.411		8.487		1.798.049		0		0.00%		8.487		0.51 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		1 RW		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			998.221		470.902		1.598.849		0		0.00%		470.902		47.17 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		8 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.667.236		306.069		2.182.470		0		0.00%		306.069		18.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		4 RW		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.166.718		1.289.489		2.603.149		0		0.00%		1.289.489		59.51 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		3 RW		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.474.407		745.609		2.516.379		0		0.00%		745.609		21.46 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		10 RW		22 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.545.939		1.285.692		2.557.935		0		0.00%		1.285.692		36.26 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.577.259		665.181		1.636.038		0		0.00%		665.181		18.59 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		7 RW		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.776.235		1.453.995		2.543.102		0		0.00%		1.453.995		38.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		9 RW		16 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.611.036		867.657		2.089.388		0		0.00%		867.657		24.03 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		13 RW		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.934.527		1.480.904		2.060.485		0		0.00%		1.480.904		50.46 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		18 RW		17 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.157.876		700.735		1.665.346		0		0.00%		700.735		60.52 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			914.917		511.252		2.018.654		0		0.00%		511.252		55.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.059.580		479.164		1.820.803		0		0.00%		479.164		45.22 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			716.396		163.530		1.824.109		0		0.00%		163.530		22.83 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		5 RW		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			510.519		282.429		1.943.960		0		0.00%		282.429		55.32 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		2 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			497.724		139.500		1.754.911		0		0.00%		139.500		28.03 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.697.312		532.180		2.440.763		0		0.00%		532.180		31.35 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		6 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.393.201		937.737		1.469.859		0		0.00%		937.737		67.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		5 RW		15 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.567.015		300.288		1.882.940		0		0.00%		300.288		19.16 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		5 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			743.626		484.450		2.361.732		0		0.00%		484.450		65.15 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		2 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			393.697		223.252		2.179.131		0		0.00%		223.252		56.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.587.513		384.673		1.622.715		0		0.00%		384.673		24.23 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		6 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.786.345		518.229		1.984.188		0		0.00%		518.229		29.01 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.283.835		532.392		1.504.693		0		0.00%		532.392		23.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		10 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.790.793		497.388		1.944.537		0		0.00%		497.388		17.82 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		5 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.277.356		857.102		1.786.373		0		0.00%		857.102		37.64 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		8 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.398.685		1.172.874		1.510.088		0		0.00%		1.172.874		34.51 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		18 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.392.974		588.222		2.130.046		0		0.00%		588.222		42.23 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.453.097		1.344.493		3.086.495		0		0.00%		1.344.493		38.94 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		5 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.998.712		160.845		3.044.745		0		0.00%		160.845		4.02 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		9 RW		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.172.837		248.145		883.280		23.460		2.66%		271.605		8.56 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		13 RW		6 Unit		3 Unit		50.00 %		3 Unit		50.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.234.239		275.400		1.518.961		0		0.00%		275.400		8.52 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		8 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.703.650		328.607		1.649.554		0		0.00%		328.607		8.87 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		14 RW		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.064.205		820.953		1.831.293		0		0.00%		820.953		26.79 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		24 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.894.195		1.069.891		2.078.088		0		0.00%		1.069.891		36.97 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		20 RW		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.125.820		717.491		1.980.886		0		0.00%		717.491		22.95 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		21 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.986.633		2.793.466		2.251.230		0		0.00%		2.793.466		93.53 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		9 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.931.648		764.718		1.640.668		0		0.00%		764.718		26.08 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 RW		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.084.961		317.194		399.328		0		0.00%		317.194		15.21 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		10 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.995.477		1.248.610		1.926.506		0		0.00%		1.248.610		31.25 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		11 RW		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.855.743		335.337		1.298.708		0		0.00%		335.337		11.74 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		5 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.787.091		1.112.405		2.508.410		0		0.00%		1.112.405		23.24 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		11 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.839.386		1.012.705		2.146.866		0		0.00%		1.012.705		26.38 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.937.372		1.050.829		869.216		0		0.00%		1.050.829		21.28 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.906.513		1.406.636		3.038.641		0		0.00%		1.406.636		36.01 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 RW		14 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.822.107		3.908.867		2.900.818		0		0.00%		3.908.867		102.27 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		9 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.019.165		1.169.072		1.938.744		0		0.00%		1.169.072		57.90 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.446.203		964.298		2.254.950		0		0.00%		964.298		17.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		3 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.947.833		543.167		1.621.035		0		0.00%		543.167		18.43 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		12 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.902.278		656.558		1.658.999		0		0.00%		656.558		34.51 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.902.278		135.587		1.859.584		0		0.00%		135.587		7.13 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		6 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			951.139		91.649		1.023.700		0		0.00%		91.649		9.64 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.377.848		172.214		2.685.592		0		0.00%		172.214		7.24 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		12 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.377.848		770.026		1.972.392		0		0.00%		770.026		32.38 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		5 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.114.697		682.799		2.148.282		0		0.00%		682.799		21.92 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		8 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			343.974		258.130		1.928.378		0		0.00%		258.130		75.04 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			675.134		576.285		1.986.426		0		0.00%		576.285		85.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		4 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			949.596		191.752		2.024.454		0		0.00%		191.752		20.19 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.294.288		717.728		2.127.904		0		0.00%		717.728		16.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		4 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			560.418		153.596		2.147.006		0		0.00%		153.596		27.41 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		3 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			733.449		244.887		2.079.019		0		0.00%		244.887		33.39 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.314.486		182.494		1.054.940		0		0.00%		182.494		7.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.268.395		638.022		2.177.719		0		0.00%		638.022		28.13 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		8 RW		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.343.308		221.343		1.580.737		0		0.00%		221.343		16.48 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 RW		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.055.456		371.625		1.908.078		0		0.00%		371.625		35.21 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		7 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.764.212		3.048.783		2.865.120		0		0.00%		3.048.783		63.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		15 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.458.343		345.953		1.937.633		0		0.00%		345.953		14.07 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 RW		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.774.678		559.218		1.904.047		0		0.00%		559.218		20.15 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 RW		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.714.272		1.054.698		1.234.622		0		0.00%		1.054.698		28.40 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		11 RW		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.508.587		2.190.638		2.776.101		0		0.00%		2.190.638		48.59 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		13 RW		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.937.215		1.385.296		1.991.653		0		0.00%		1.385.296		47.16 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		7 RW		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.591.799		220.394		1.926.587		0		0.00%		220.394		13.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.876.228		329.967		2.049.620		0		0.00%		329.967		11.47 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 RW		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.405.262		488.647		2.401.406		0		0.00%		488.647		20.32 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 RW		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.011.356		213.092		723.436		0		0.00%		213.092		21.07 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		2 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.155.850		565.222		1.094.727		0		0.00%		565.222		17.91 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		9 RW		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.405.315		1.989.629		2.674.533		0		0.00%		1.989.629		58.43 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 RW		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			563.929		65.151		1.493.755		0		0.00%		65.151		11.55 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		1 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.184.566		416.055		1.949.935		0		0.00%		416.055		19.05 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 RW		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.952.311		305.291		1.941.148		0		0.00%		305.291		15.64 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		3 RW		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.310.806		109.985		1.494.791		0		0.00%		109.985		4.76 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		2 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			934.257		993.220		1.923.244		0		0.00%		993.220		106.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		9 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.560.404		415.811		2.339.027		0		0.00%		415.811		26.65 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		3 RW		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.101.652		63.962		2.116.656		0		0.00%		63.962		5.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		1 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.258.246		332.677		1.972.497		0		0.00%		332.677		26.44 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.267.520		48.940		2.073.961		0		0.00%		48.940		1.15 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		2 RW		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.368.380		32.456		2.273.701		0		0.00%		32.456		1.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		2 RW		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.066.352		37.451		2.486.760		0		0.00%		37.451		1.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		1 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.923.694		115.713		1.789.096		0		0.00%		115.713		6.02 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		1 RW		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.011.339		630.648		2.118.340		0		0.00%		630.648		15.72 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 RW		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.869.453		418.064		2.096.365		0		0.00%		418.064		8.59 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 RW		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.861.720		2.169.484		2.327.664		0		0.00%		2.169.484		44.62 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		2 Unit		25.00 %		2 Unit		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			793.506		553.496		1.391.738		0		0.00%		553.496		69.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		4 RW		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.875.658		1.881.722		1.650.744		0		0.00%		1.881.722		48.55 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		13 RW		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.423.557		114.849		1.702.077		0		0.00%		114.849		2.60 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.481.058		1.875.429		2.162.838		0		0.00%		1.875.429		126.63 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		9 RW		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			642.099		27.003		2.199.479		0		0.00%		27.003		4.21 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.176.870		1.237.717		2.124.502		0		0.00%		1.237.717		23.91 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 RW		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.656.137		752.933		2.684.702		0		0.00%		752.933		16.17 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 RW		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.738.431		177.721		992.520		0		0.00%		177.721		4.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 RW		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.339.186		315.257		2.079.160		0		0.00%		315.257		7.27 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 RW		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.144.651		554.675		2.528.035		0		0.00%		554.675		25.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		8 RW		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.382.471		952.789		1.556.214		0		0.00%		952.789		39.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		6 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.382.471		702.730		2.013.977		0		0.00%		702.730		29.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.144.651		381.940		1.964.145		0		0.00%		381.940		17.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 RW		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.249.664		579.165		3.122.499		0		0.00%		579.165		25.74 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		1 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.392.343		258.878		1.550.689		0		0.00%		258.878		10.82 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		2 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.020.102		620.827		2.294.504		0		0.00%		620.827		20.56 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		9 RW		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.020.102		287.894		2.209.969		0		0.00%		287.894		9.53 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		1 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.298.312		109.273		1.513.145		0		0.00%		109.273		3.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		6 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.761.470		840.479		2.204.558		0		0.00%		840.479		47.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		3 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.046.368		420.410		1.224.017		0		0.00%		420.410		20.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		1 RW		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.422.669		1.336.177		2.158.192		0		0.00%		1.336.177		93.92 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		16 RW		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			499.855		469.607		1.981.858		0		0.00%		469.607		93.95 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		4 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.412.480		1.222.544		2.164.746		0		0.00%		1.222.544		86.55 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 RW		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			307.061		234.403		2.207.258		0		0.00%		234.403		76.34 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		3 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.570.614		1.050.277		2.170.349		0		0.00%		1.050.277		66.87 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		8 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			588.445		512.215		1.692.719		0		0.00%		512.215		87.05 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		8 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			718.802		355.825		1.889.124		0		0.00%		355.825		49.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.449.825		663.014		1.465.669		102.199		6.97%		765.213		52.78 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		3 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.311.429		262.013		1.860.648		0		0.00%		262.013		7.91 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		4 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.829.275		329.910		827.381		0		0.00%		329.910		11.66 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		6 RW		36 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.281.862		423.204		1.640.811		0		0.00%		423.204		12.90 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		11 RW		18 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.679.181		650.381		2.149.378		0		0.00%		650.381		38.73 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		8 RW		29 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.720.121		128.873		294.219		0		0.00%		128.873		4.74 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		11 RW		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.966.850		674.457		1.489.728		0		0.00%		674.457		34.29 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		9 RW		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.875.774		859.800		1.891.884		0		0.00%		859.800		45.84 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.417.269		571.706		1.829.217		0		0.00%		571.706		23.65 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit		8 RW		35 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.170.973		1.276.097		1.489.741		0		0.00%		1.276.097		58.78 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit		10 RW		16 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.775.556		851.477		1.880.889		0		0.00%		851.477		30.68 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		14 RW		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.823.588		817.055		3.423.490		0		0.00%		817.055		16.94 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		14 RW		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.410.138		386.883		2.106.976		0		0.00%		386.883		8.77 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		12 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.422.502		610.488		2.628.191		0		0.00%		610.488		13.80 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		11 RW		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.650.489		903.881		3.257.051		0		0.00%		903.881		16.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		9 RW		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.961.405		180.273		1.500.433		0		0.00%		180.273		3.63 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.537.320		222.008		1.903.294		0		0.00%		222.008		14.44 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 RW		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.119.392		774.031		2.036.144		0		0.00%		774.031		69.15 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.123.349		179.321		2.359.463		0		0.00%		179.321		8.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 RW		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.848.309		326.474		2.076.854		0		0.00%		326.474		11.46 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		5 RW		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.143.111		183.652		1.285.800		0		0.00%		183.652		16.07 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		3.801.582		25.974		0.68%		25.974		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		2 unit		0 unit		0.00 %		0 unit		N/A		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.166.147		485.340		530.353		78.000		14.71%		563.340		48.31 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		6 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.805.410		2.278.572		943.120		149.000		15.80%		2.427.572		134.46 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			918.505		507.783		938.605		114.500		12.20%		622.283		67.75 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.104.769		2.502.487		1.354.137		158.500		11.70%		2.660.987		126.43 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.467.127		1.546.468		2.352.761		144.500		6.14%		1.690.968		115.26 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.250.584		2.821.338		1.836.419		196.000		10.67%		3.017.338		134.07 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		16 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.272.583		1.712.460		1.426.618		135.500		9.50%		1.847.960		81.32 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.479.471		2.120.412		2.443.968		196.000		8.02%		2.316.412		93.42 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		10 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.407.099		2.157.021		1.618.280		219.500		13.56%		2.376.521		98.73 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.574.386		2.094.147		2.133.491		226.000		10.59%		2.320.147		64.91 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		10 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			947.958		637.726		1.111.594		107.000		9.63%		744.726		78.56 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.837.092		1.292.825		1.250.301		166.500		13.32%		1.459.325		79.44 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		11 RW		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842.672		686.089		699.154		70.000		10.01%		756.089		89.73 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			962.895		754.965		988.996		103.000		10.41%		857.965		89.10 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.320.793		1.206.017		691.574		103.500		14.97%		1.309.517		99.15 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.216.778		3.182.696		1.535.145		207.500		13.52%		3.390.196		105.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.103.167		2.045.971		1.638.760		146.500		8.94%		2.192.471		104.25 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.435.573		2.474.280		1.680.909		214.000		12.73%		2.688.280		110.38 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		10 RW		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.160.036		3.974.633		1.973.342		270.500		13.71%		4.245.133		134.34 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		15 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.820.535		1.535.772		1.328.797		163.500		12.30%		1.699.272		93.34 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		13 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.271.557		2.167.832		1.795.284		294.000		16.38%		2.461.832		108.38 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		18 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.071.524		928.858		665.710		94.500		14.20%		1.023.358		95.50 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		7 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.141.471		759.926		1.119.312		98.500		8.80%		858.426		75.20 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.099.598		453.727		837.342		111.500		13.32%		565.227		51.40 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.067.306		774.170		885.909		106.000		11.97%		880.170		82.47 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		6 RW		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.271.723		925.810		751.147		83.500		11.12%		1.009.310		79.37 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		5 RW		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.248.122		989.698		948.884		88.000		9.27%		1.077.698		86.35 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		6 RW		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.394.393		1.113.690		1.077.574		109.000		10.12%		1.222.690		87.69 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		9 RW		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			965.059		1.040.092		1.088.073		73.500		6.76%		1.113.592		115.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986.245		1.200.297		569.424		53.000		9.31%		1.253.297		127.08 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			979.817		782.618		507.666		45.000		8.86%		827.618		84.47 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.643.893		1.158.550		1.634.586		139.500		8.53%		1.298.050		78.96 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			703.767		376.574		550.471		78.500		14.26%		455.074		64.66 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			628.210		518.253		443.551		42.500		9.58%		560.753		89.26 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.131.939		1.100.018		1.491.568		132.000		8.85%		1.232.018		108.84 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.735.397		2.491.825		1.570.181		168.000		10.70%		2.659.825		97.24 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.181.764		794.815		1.333.141		141.000		10.58%		935.815		79.19 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.982.423		1.236.434		1.803.952		173.500		9.62%		1.409.934		71.12 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		19 RW		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.432.113		2.420.122		828.700		165.500		19.97%		2.585.622		106.31 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		5 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.373.294		1.806.682		2.698.557		170.200		6.31%		1.976.882		143.95 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		13 RW		7 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		14.29 %		1 Pokmas / Ormas		14.29 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.164.376		846.473		371.326		36.500		9.83%		882.973		75.83 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.050.663		1.670.880		1.769.317		159.000		8.99%		1.829.880		174.16 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		16 RW		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.332.172		3.832.590		1.748.836		223.500		12.78%		4.056.090		173.92 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		9 RW		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.948.824		796.729		1.867.359		212.500		11.38%		1.009.229		51.79 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		22 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.625.380		1.302.147		1.714.929		149.000		8.69%		1.451.147		89.28 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		24 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.668.532		1.238.000		892.284		126.000		14.12%		1.364.000		81.75 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		14 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.574.842		1.337.494		1.234.148		155.000		12.56%		1.492.494		94.77 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.668.143		778.951		2.064.799		256.500		12.42%		1.035.451		62.07 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas		25 RW		15 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.313.211		1.268.207		1.591.185		138.000		8.67%		1.406.207		107.08 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		14 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.115.318		2.837.999		3.524.501		200.000		5.67%		3.037.999		143.62 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		10 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.963.261		1.174.036		1.399.777		172.500		12.32%		1.346.536		68.59 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		11 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.297.476		1.301.799		1.717.737		95.500		5.56%		1.397.299		107.69 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		5 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.772.012		3.543.705		2.150.877		283.000		13.16%		3.826.705		138.05 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		12 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.091.174		2.150.660		1.624.026		205.000		12.62%		2.355.660		112.65 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.025.727		3.168.712		3.264.592		215.000		6.59%		3.383.712		111.83 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		8 RW		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.025.849		2.127.114		2.307.454		334.000		14.47%		2.461.114		81.34 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		14 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.239.302		2.024.954		2.345.963		321.000		13.68%		2.345.954		72.42 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		12 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.871.745		1.629.287		1.751.977		163.000		9.30%		1.792.287		95.75 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.323.475		1.026.101		1.032.222		125.000		12.11%		1.151.101		86.98 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.101.041		1.074.282		1.430.346		155.000		10.84%		1.229.282		111.65 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.127.615		1.117.277		916.584		129.250		14.10%		1.246.527		110.55 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.027.721		1.489.229		1.319.974		145.000		10.99%		1.634.229		159.01 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		5 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			558.633		497.847		769.492		57.000		7.41%		554.847		99.32 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.669.712		1.895.102		909.159		141.000		15.51%		2.036.102		121.94 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			850.264		539.634		640.388		95.000		14.83%		634.634		74.64 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.466.004		1.036.353		2.226.574		167.000		7.50%		1.203.353		82.08 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.071.548		1.769.328		1.449.000		187.000		12.91%		1.956.328		94.44 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			874.932		801.151		401.372		44.500		11.09%		845.651		96.65 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.768.963		1.567.966		864.953		137.000		15.84%		1.704.966		96.38 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			772.531		831.723		777.104		58.000		7.46%		889.723		115.17 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.497.398		919.642		817.957		61.000		7.46%		980.642		65.49 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.901.301		1.050.197		704.680		102.500		14.55%		1.152.697		60.63 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.911.965		869.596		1.024.390		130.500		12.74%		1.000.096		52.31 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			911.900		978.155		1.756.713		97.500		5.55%		1.075.655		117.96 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.727.658		1.433.298		862.559		135.500		15.71%		1.568.798		90.80 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			885.745		978.308		1.264.757		90.913		7.19%		1.069.220		120.71 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		7 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			962.207		672.529		1.028.347		88.500		8.61%		761.029		79.09 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		7 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.815.890		1.384.112		1.772.748		288.500		16.27%		1.672.612		59.40 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		15 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			810.766		841.789		861.084		73.000		8.48%		914.789		112.83 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		4 RW		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.312.079		1.093.676		820.659		103.000		12.55%		1.196.676		91.20 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.783.596		1.717.274		2.932.514		190.500		6.50%		1.907.774		106.96 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.662.868		1.771.096		1.675.111		269.500		16.09%		2.040.596		76.63 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		13 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.341.718		791.345		771.659		125.000		16.20%		916.345		68.30 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.470.002		1.769.868		1.555.273		137.500		8.84%		1.907.368		129.75 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			413.413		297.742		296.806		34.500		11.62%		332.242		80.37 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		2 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.986.677		2.754.787		3.004.257		194.000		6.46%		2.948.787		148.43 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			557.717		586.660		494.555		37.000		7.48%		623.660		111.82 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			407.201		398.621		523.892		50.801		9.70%		449.422		110.37 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.209.682		1.001.979		933.990		122.500		13.12%		1.124.479		92.96 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.187.055		1.714.354		1.523.257		222.880		14.63%		1.937.234		88.58 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			626.804		621.729		516.941		90.000		17.41%		711.729		113.55 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.133.491		1.141.662		713.079		79.500		11.15%		1.221.162		107.73 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		5 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.043.949		762.358		1.442.051		107.000		7.42%		869.358		83.28 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.756.326		743.304		1.240.389		141.000		11.37%		884.304		50.35 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 RW		12 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.486.122		1.014.047		681.265		79.738		11.70%		1.093.785		73.60 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 RW		7 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.547.999		1.107.908		803.692		66.500		8.27%		1.174.408		75.87 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.080.816		936.557		746.902		67.000		8.97%		1.003.557		92.85 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 RW		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.066.891		1.052.836		2.126.384		224.000		10.53%		1.276.836		61.78 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		14 RW		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			930.189		824.787		699.081		74.000		10.59%		898.787		96.62 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			129.030		963.249		1.328.018		93.000		7.00%		1.056.249		818.61 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		8 RW		6 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.169.320		754.454		1.001.512		88.000		8.79%		842.454		72.05 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		6 RW		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			648.488		725.759		977.607		63.000		6.44%		788.759		121.63 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			667.913		810.171		1.484.621		183.500		12.36%		993.671		148.77 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		13 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			877.868		866.319		1.048.512		167.500		15.98%		1.033.819		117.76 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.241.199		436.740		240.805		44.500		18.48%		481.240		14.85 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.062.865		759.570		1.218.041		244.631		20.08%		1.004.201		94.48 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.224.080		1.440.189		1.831.883		218.500		11.93%		1.658.689		74.58 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		11 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.456.023		2.208.214		2.072.793		208.056		10.04%		2.416.270		98.38 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.675.032		1.211.092		1.878.713		189.000		10.06%		1.400.092		83.59 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.427.230		1.618.171		2.100.024		254.500		12.12%		1.872.671		77.15 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.685.781		1.955.788		1.592.031		222.500		13.98%		2.178.288		81.10 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		11 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.357.204		1.435.698		2.684.597		125.500		4.67%		1.561.198		115.03 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.667.073		2.355.919		1.718.215		179.500		10.45%		2.535.419		95.06 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			702.840		417.936		490.127		87.500		17.85%		505.436		71.91 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.184.061		629.808		1.016.102		118.500		11.66%		748.308		63.20 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		5 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			748.403		610.988		711.999		113.000		15.87%		723.988		96.74 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			699.380		362.423		596.955		94.000		15.75%		456.423		65.26 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			780.674		662.514		1.485.156		70.500		4.75%		733.014		93.90 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		7 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.033.519		1.020.129		773.084		114.500		14.81%		1.134.629		109.78 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.470.386		1.147.293		1.699.000		121.500		7.15%		1.268.793		86.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.167.111		1.243.537		978.278		145.500		14.87%		1.389.037		119.01 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.403.731		1.522.388		1.599.760		140.000		8.75%		1.662.388		118.43 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.206.980		852.900		1.749.067		152.500		8.72%		1.005.400		83.30 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.198.532		565.604		1.083.416		173.440		16.01%		739.044		61.66 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		11 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.518.871		1.202.866		1.452.593		223.000		15.35%		1.425.866		93.88 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		16 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.418.571		638.274		1.418.845		197.000		13.88%		835.274		58.88 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		7 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			833.579		692.415		582.081		78.500		13.49%		770.915		92.48 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		6 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			587.694		556.113		548.413		46.500		8.48%		602.613		102.54 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.878.070		1.697.374		1.134.857		147.000		12.95%		1.844.374		98.21 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			655.157		480.713		951.120		111.000		11.67%		591.713		90.32 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		4 RW		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.088.790		1.164.020		1.239.850		118.500		9.56%		1.282.520		117.79 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		5 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.460.828		1.417.357		644.311		79.000		12.26%		1.496.357		102.43 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		8 RW		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.835.583		1.811.918		1.295.169		120.500		9.30%		1.932.418		105.28 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.452.106		1.586.275		2.201.501		112.000		5.09%		1.698.275		116.95 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.809.622		1.703.195		1.848.487		176.500		9.55%		1.879.695		103.87 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			949.789		1.451.273		1.230.050		166.000		13.50%		1.617.273		170.28 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		10 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.614.622		1.944.417		3.165.141		180.000		5.69%		2.124.417		131.57 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.728.681		1.396.108		1.299.079		131.500		10.12%		1.527.608		88.37 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		9 RW		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.596.717		1.235.085		1.430.238		148.000		10.35%		1.383.085		86.62 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.446.145		2.162.881		1.121.872		114.500		10.21%		2.277.381		93.10 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		7 RW		6 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.158.529		2.244.807		1.756.902		198.000		11.27%		2.442.807		113.17 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		14 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.177.498		2.445.436		1.921.839		149.000		7.75%		2.594.436		81.65 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.445.420		2.394.426		1.798.688		270.510		15.04%		2.664.936		77.35 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		14 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.894.153		2.709.715		2.451.016		379.570		15.49%		3.089.285		106.74 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		16 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.445.420		1.620.413		1.346.522		217.500		16.15%		1.837.913		53.34 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		17 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.445.420		2.856.800		2.471.643		225.000		9.10%		3.081.800		89.45 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		12 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.833.928		2.626.701		2.102.087		220.980		10.51%		2.847.681		155.28 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			709.961		1.156.704		965.842		96.000		9.94%		1.252.704		176.45 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		6 RW		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.975.407		1.399.520		1.148.603		159.368		13.87%		1.558.888		78.91 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			846.811		986.162		1.078.220		149.000		13.82%		1.135.162		134.05 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		12 RW		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.505.548		774.695		1.376.932		96.518		7.01%		871.213		57.87 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.004.486		555.900		692.857		98.647		14.24%		654.547		65.16 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0		0		2.878.691		330.000		11.46%		330.000		0.00 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		0.00 %		0 Pokmas/Ormas		N/A		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			37.564		3.420		32.840		0		0.00%		3.420		9.10 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Kali		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.340		5.700		1.200		0		0.00%		5.700		425.41 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		8 kali		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2.010		9.200		9.200		0		0.00%		9.200		457.75 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.389		3.890		3.560		0		0.00%		3.890		60.88 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		11 kali		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			26.673		14.800		7.200		0		0.00%		14.800		55.49 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		1 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10.853		8.820		9.720		0		0.00%		8.820		81.27 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		12 kali		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.699		9.000		9.000		0		0.00%		9.000		134.34 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		10 kali		8 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			13.399		9.600		7.200		0		0.00%		9.600		71.65 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			33.497		29.800		2.850		0		0.00%		29.800		88.96 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		12 Kali		2 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.072		8.918		7.920		0		0.00%		8.918		831.98 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		12 Kali		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		17.840		12.800		0		0.00%		17.840		59.18 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		10 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.029		4.380		5.379		0		0.00%		4.380		72.64 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			16.528		13.618		15.000		0		0.00%		13.618		82.39 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		10 Kali		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10.049		5.340		5.340		0		0.00%		5.340		53.14 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Kali		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.675		4.320		3.900		0		0.00%		4.320		257.93 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		12 kali		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			40.196		22.050		4.200		0		0.00%		22.050		54.86 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		12 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.675		1.530		1.500		0		0.00%		1.530		91.35 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		8 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		3.780		5.529		0		0.00%		3.780		12.54 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Kali		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		9.120		27.000		0		0.00%		9.120		30.25 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		8 kali		9 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.675		12.000		12.000		0		0.00%		12.000		716.48 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		16 kali		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		9.000		9.000		0		0.00%		9.000		29.85 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		12 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2.680		9.100		6.000		0		0.00%		9.100		339.58 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			26.798		14.300		4.200		0		0.00%		14.300		53.36 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			23.448		21.420		12.600		0		0.00%		21.420		91.35 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.163		2.520		5.520		0		0.00%		2.520		40.89 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.025		5.100		4.500		0		0.00%		5.100		101.50 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			23.448		15.240		13.218		0		0.00%		15.240		65.00 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8.374		7.500		7.500		0		0.00%		7.500		89.56 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		10 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			46.839		17.200		8.306		0		0.00%		17.200		36.72 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		10 kali		7 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			27.783		12.500		24.080		0		0.00%		12.500		44.99 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		10 Kali		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			18.318		5.430		14.800		0		0.00%		5.430		29.64 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 kali		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			6.298.746		477.080		10.766.213		111.739		1.04%		588.819		9.35%		
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga		50 Lembaga		50 Lembaga		12 Lembaga		24.00 %		12 Lembaga		24.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga		N/A		67 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		84 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		27 Pelaku Usaha		27.00 %		27 Pelaku Usaha		27.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha		919 Potensi usaha		50 Potensi usaha		12 Potensi usaha		24.00 %		12 Potensi usaha		24.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga		N/A		26 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga		N/A		124 Lembaga		31 Lembaga		25.00 %		31 Lembaga		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		100 pelaku usaha		100 pelaku usaha		15 pelaku usaha		15.00 %		15 pelaku usaha		15.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	480 Lembaga		N/A		420 Lembaga		105 Lembaga		25.00 %		105 Lembaga		21.88 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga		N/A		21 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	480 Lembaga		478 Lembaga		420 Lembaga		70 Lembaga		16.67 %		70 Lembaga		14.58 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	29 Lembaga		N/A		20 Lembaga		6 Lembaga		30.00 %		6 Lembaga		20.69 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga		N/A		61 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga		N/A		48 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga		242 Lembaga		192 Lembaga		102 Lembaga		53.13 %		102 Lembaga		53.13 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		N/A		44 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga		N/A		38 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga		N/A		50 Lembaga		12 Lembaga		24.00 %		12 Lembaga		24.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha		N/A		140 Unit Usaha		35 Unit Usaha		25.00 %		35 Unit Usaha		25.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		N/A		44 Lembaga		44 Lembaga		100.00 %		44 Lembaga		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		257 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		77 Pelaku Usaha		77.00 %		77 Pelaku Usaha		77.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga		N/A		31 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha		117 pelaku usaha		150 pelaku usaha		30 pelaku usaha		20.00 %		30 pelaku usaha		20.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga		N/A		78 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja		N/A		90 Unit Kerja		23 Unit Kerja		25.56 %		23 Unit Kerja		25.56 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha		N/A		110 Unit Usaha		22 Unit Usaha		20.00 %		22 Unit Usaha		20.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga		N/A		29 Lembaga		29 Lembaga		100.00 %		29 Lembaga		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		90 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		28 Pelaku Usaha		28.00 %		28 Pelaku Usaha		28.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		25.00 %		25 Pelaku Usaha		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha		176 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha		15 Pelaku Usaha		30.00 %		15 Pelaku Usaha		30.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga		N/A		53 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga		N/A		34 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga		N/A		58 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga		116 Lembaga		116 Lembaga		30 Lembaga		25.86 %		30 Lembaga		25.86 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga		N/A		29 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga		N/A		32 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga		N/A		25 Lembaga		5 Lembaga		20.00 %		5 Lembaga		20.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga		139 Lembaga		120 Lembaga		30 Lembaga		25.00 %		30 Lembaga		25.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga		N/A		30 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga		N/A		26 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga		N/A		100 Lembaga		20 Lembaga		20.00 %		20 Lembaga		20.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga		N/A		156 Lembaga		52 Lembaga		33.33 %		52 Lembaga		33.33 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga		293 Lembaga		288 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga		N/A		51 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga		N/A		17 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	62 Unit Usaha		N/A		62 Unit Usaha		17 Unit Usaha		27.42 %		17 Unit Usaha		27.42 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga		N/A		36 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		518 pelaku usaha		100 pelaku usaha		26 pelaku usaha		26.00 %		26 pelaku usaha		26.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga		N/A		52 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga		N/A		34 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Wiyung	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga		N/A		52 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga		N/A		74 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga		N/A		148 Lembaga		39 Lembaga		26.35 %		39 Lembaga		26.35 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	37 Lembaga		N/A		38 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga		N/A		72 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga		N/A		70 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		242 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		25.00 %		25 Pelaku Usaha		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		93 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		24 Pelaku Usaha		24.00 %		24 Pelaku Usaha		24.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga		N/A		48 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga		N/A		25 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha		43 unit usaha		20 unit usaha		5 unit usaha		25.00 %		5 unit usaha		25.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Lembaga yang sarana prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		N/A		44 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha		976 Unit Usaha		116 Unit Usaha		30 Unit Usaha		25.86 %		30 Unit Usaha		25.86 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.03.04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			16.079		9.900		14.400		3.600		25.00%		13.500		83.96 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		55 Kali		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.03.04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			8.039		5.600		10.200		1.500		14.71%		7.100		88.32 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		65 Kali		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.03.04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			9.179		8.640		8.640		2.160		25.00%		10.800		117.66 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Kali		48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.03.04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			15.000		4.050		9.450		1.920		20.32%		5.970		39.80 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		50 Kali		48 Laporan		9 Laporan		18.75 %		9 Laporan		18.75 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.03.04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			51.641		9.000		8.100		0		0.00%		9.000		17.43 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		48 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.03.04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			15.312		14.010		13.500		3.600		26.67%		17.610		115.01 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Kali		48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			19.294		17.640		23.280		4.890		21.01%		22.530		116.77 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		112 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.854		21.030		24.727		4.110		16.62%		25.140		105.39 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		53 Kali		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			25.324		22.920		19.800		8.100		40.91%		31.020		122.49 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		57 Kali		48 Laporan		9 Laporan		18.75 %		9 Laporan		18.75 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			10.049		5.760		9.000		1.800		20.00%		7.560		75.23 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		53 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			42.599		23.760		19.800		4.060		20.51%		27.820		65.31 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		74 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			73.733		37.731		50.956		9.812		19.26%		47.543		64.48 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		51 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			12.863		11.740		11.520		2.880		25.00%		14.620		113.66 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		48 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			10.049		17.280		9.000		1.800		20.00%		19.080		189.87 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		312 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9.647		8.820		8.640		2.100		24.31%		10.920		113.19 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		54 Kali		3 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			12.059		10.920		26.040		4.460		17.13%		15.380		127.54 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		62 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.350		8.810		8.640		2.160		25.00%		10.970		327.49 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		48 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			19.294		14.400		17.280		4.320		25.00%		18.720		97.02 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		82 Kali		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			17.824		15.700		196.812		1.900		0.97%		17.600		98.74 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		59 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.182		7.000		1.950		0		0.00%		7.000		219.97 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		49 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.350		26.039		91.232		6.750		7.40%		32.789		978.86 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Kali		48 Laporan		10 Laporan		20.83 %		10 Laporan		20.83 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			31.822		24.000		32.587		2.700		8.29%		26.700		83.90 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		50 kali		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.854		19.400		20.400		3.850		18.87%		23.250		97.47 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		48 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			16.414		22.200		14.400		3.960		27.50%		26.160		159.38 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		48 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9.647		8.640		8.640		2.160		25.00%		10.800		111.95 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		49 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			16.414		14.940		14.700		3.600		24.49%		18.540		112.96 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		56 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			28.539		15.820		21.780		5.320		24.43%		21.140		74.07 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		49 Kali		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			14.999		19.880		34.111		7.318		21.45%		27.198		181.33 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		127 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			50.246		25.890		12.240		3.060		25.00%		28.950		57.62 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		80 Kali		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.448		8.280		21.000		5.750		27.38%		14.030		59.83 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		68 Kali		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.113		17.280		19.500		2.100		10.77%		19.380		83.85 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		100 kali		48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			71.766		0		81.491		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit		N/A		38 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			281.439		0		262.058		0		0.00%		0		0.00 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit		N/A		70 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			302.442		0		622.762		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit		N/A		197 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			98.701		0		141.647		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit		N/A		50 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			79.720		0		166.551		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit		N/A		94 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			134.419		0		175.380		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit		N/A		59 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			130.218		0		418.807		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit		N/A		328 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			218.430		0		240.293		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		N/A		58 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			184.826		0		176.482		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		N/A		49 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			142.820		0		147.619		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit		N/A		38 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			121.817		0		132.698		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit		N/A		53 Unit		9.67 Unit		18.25 %		9.67 Unit		33.34 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			294.041		0		422.406		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit		N/A		91 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			201.628		0		315.260		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit		N/A		150 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			184.826		0		191.151		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		N/A		51 Unit		14.67 Unit		28.76 %		14.67 Unit		33.34 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			159.622		0		247.835		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit		N/A		54 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			105.015		0		122.955		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit		N/A		67 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			310.843		0		392.303		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit		N/A		95 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			222.631		0		316.115		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit		N/A		89 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			218.430		0		503.318		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		N/A		108 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			193.827		0		562.973		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit		N/A		245 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			184.826		0		221.111		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		N/A		93 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			256.236		0		350.155		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		N/A		183 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			182.218		0		182.218		0		0.00%		0		0.00 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit		N/A		48 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			109.215		0		98.701		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit		N/A		26 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			121.817		0		154.397		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit		N/A		38 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			243.634		0		1.173.227		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit		N/A		464 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			126.017		0		180.137		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit		N/A		119 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			155.422		0		275.743		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	37 Unit		N/A		69 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			142.820		0		560.544		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit		N/A		522 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			151.221		0		393.191		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit		N/A		230 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			327.645		0		754.360		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit		N/A		415 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
141	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.087.451		444.796		10.092.894		1.115.266		11.05%		5.563.226		109.35%		
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		99.34 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		86.30 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		94.38 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Jambangan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Rungkut	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		94.73 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		86.27 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		97.06 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		97.87 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		99.70 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		86.57 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sawahan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.087.451		4.447.960		10.092.894		1.115.266		11.05%		5.563.226		109.35%		
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi		6 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		100.00 %		5 Lokasi		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		25 Lokasi		24 Lokasi		26 Lokasi		108.33 %		26 Lokasi		108.33 %		Kec. Gayungan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan		14 Lokasi		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		13 Lokasi		108.33 %		13 Lokasi		108.33 %		Kec. Lakarsantri	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi		23 Lokasi		22 Lokasi		22 Lokasi		100.00 %		22 Lokasi		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		28 Lokasi		14 Lokasi		29 Lokasi		207.14 %		29 Lokasi		207.14 %		Kec. Sawahan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100.00 %		24 Lokasi		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi		22 Lokasi		21 Lokasi		21 Lokasi		100.00 %		21 Lokasi		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi		N/A		14 lokasi		25 lokasi		178.57 %		25 lokasi		178.57 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		100.00 %		15 lokasi		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		9 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi		43 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi		100.00 %		20 Lokasi		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		49 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100.00 %		24 Lokasi		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		17 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Pakal	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Benowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		15 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Genteng	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	82 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		9.76 %		Kec. Jambangan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		9 Lokasi		112.50 %		9 Lokasi		112.50 %		Kec. Karangpilang	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		100.00 %		10 Lokasi		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi		28 Lokasi		26 Lokasi		26 Lokasi		100.00 %		26 Lokasi		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		16 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi		16 Lokasi		16 Lokasi		16 Lokasi		100.00 %		16 Lokasi		100.00 %		Kec. Semampir	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		29 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi		28 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		100.00 %		17 lokasi		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi		11 Lokasi		11 Lokasi		12 Lokasi		109.09 %		12 Lokasi		109.09 %		Kec. Sukolilo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		16 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		100.00 %		15 lokasi		100.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			155.275		136.533		143.342		35.293		24.62%		171.826		110.66 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		363 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			177.759		138.045		266.120		36.349		13.66%		174.394		98.11 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			262.249		244.917		274.564		28.247		10.29%		273.163		104.16 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			154.683		162.897		245.879		37.142		15.11%		200.039		129.32 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		373 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			169.641		125.513		181.918		30.934		17.00%		156.447		92.22 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			88.039		81.774		216.491		25.565		11.81%		107.339		121.92 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		363 Kali		1 Laporan		25 Laporan		2,500.00 %		25 Laporan		2,500.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			145.639		147.766		203.263		48.882		24.05%		196.648		135.02 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			199.767		171.739		212.564		41.712		19.62%		213.451		106.85 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		360 kali		360 Laporan		90 Laporan		25.00 %		90 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			167.097		155.725		199.957		41.891		20.95%		197.615		118.26 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		355 kali		360 Laporan		89 Laporan		24.72 %		89 Laporan		24.72 %		Kec. Jambangan	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			120.295		110.359		289.465		31.414		10.85%		141.772		117.85 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		361 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			194.561		149.885		481.583		43.268		8.98%		193.153		99.28 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		364 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			157.159		171.817		217.694		34.458		15.83%		206.276		131.25 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			171.867		134.154		194.729		34.928		17.94%		169.082		98.38 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			142.826		128.044		267.857		37.531		14.01%		165.575		115.93 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		364 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			309.309		212.218		259.777		55.528		21.38%		267.746		86.56 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		365 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			146.260		168.006		268.616		55.298		20.59%		223.304		152.68 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		363 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			188.612		134.105		343.285		30.723		8.95%		164.829		87.39 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		394 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			154.049		104.739		276.306		23.192		8.39%		127.932		83.05 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		407 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			131.678		119.309		128.606		31.481		24.48%		150.790		114.51 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		365 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			152.729		129.192		132.624		33.128		24.98%		162.320		106.28 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			152.234		145.816		850.752		37.818		4.45%		183.634		120.63 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		361 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			154.049		151.932		335.385		37.896		11.30%		189.828		123.23 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		408 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			151.735		140.083		303.368		33.413		11.01%		173.497		114.34 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		360 kali		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			157.866		140.685		382.218		39.097		10.23%		179.782		113.88 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			165.164		107.253		1.066.812		31.082		2.91%		138.335		83.76 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		366 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			31.844		75.484		92.242		15.374		16.67%		90.858		285.32 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		365 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			165.173		114.508		365.082		34.052		9.33%		148.560		89.94 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		360 Kali		360 Laporan		88 Laporan		24.44 %		88 Laporan		24.44 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			316.157		240.053		675.177		42.543		6.30%		282.597		89.38 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		365 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			156.952		133.182		804.468		34.492		4.29%		167.674		106.83 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		362 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			129.511		125.209		160.289		33.257		20.75%		158.465		122.36 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		360 Kali		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			117.273		147.019		252.461		39.276		15.56%		186.295		158.86 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
142	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			145.220.138		16.353.181		2.074.387		266.860		12.86%		163.798.665		112.79%		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %		62.30 %		53.19 %		63.92 %		120.17 %		63.92 %		120.17%		Kec. Pakal	
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38 %		40.09 %		23.38 %		74.29 %		317.75 %		74.29 %		317.75%		Kec. Genteng	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Genteng	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		86.72 %		100%		99.95 %		99.95 %		99.95 %		99.95%		Kec. Tambaksari	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45 %		47.33 %		34.45 %		40.99 %		118.98 %		40.99 %		118.98%		Kec. Benowo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		65.34 %		23.36 %		75.09 %		321.45 %		75.09 %		300.36%		Kec. Semampir	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %		66.67 %		23.25 %		61.29 %		263.61 %		61.29 %		263.61%		Kec. Tegalsari	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.27 %		53.93 %		27.27 %		68.22 %		250.17 %		68.22 %		250.17%		Kec. Asemrowo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		77.88 %		100%		99.92 %		99.92 %		99.92 %		99.92%		Kec. Kenjeran	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		75.03 %		100%		98.01 %		98.01 %		98.01 %		98.01%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		79.05 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.94 %		65.67 %		29.54 %		58.97 %		199.63 %		58.97 %		155.43%		Kec. Wonocolo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		90.30 %		100%		99.89 %		99.89 %		99.89 %		99.89%		Kec. Asemrowo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		87.30 %		100%		98.9 %		98.90 %		98.9 %		98.90%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		66.18 %		100%		99.39 %		99.39 %		99.39 %		99.39%		Kec. Bubutan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		94.53 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %		76.27 %		33.33 %		55.98 %		167.96 %		55.98 %		167.96%		Kec. Kenjeran	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		79.96 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sawahan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		87.62 %		100%		99.96 %		99.96 %		99.96 %		99.96%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		62.65 %		100%		99.93 %		99.93 %		99.93 %		99.93%		Kec. Wiyung	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.16 %		47.37 %		37.16 %		53.75 %		144.64 %		53.75 %		144.64%		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		67.56 %		100%		99.71 %		99.71 %		99.71 %		99.71%		Kec. Wonocolo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77 %		52.99 %		30.77 %		91.18 %		296.33 %		91.18 %		296.33%		Kec. Gubeng	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gayungan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		69.72 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		63.22 %		100%		99.78 %		99.78 %		99.78 %		99.78%		Kec. Rungkut	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		43.90 %		23.36 %		64.29 %		275.21 %		64.29 %		257.16%		Kec. Bulak	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		68.29 %		23.82 %		59.17 %		248.40 %		59.17 %		242.80%		Kec. Bubutan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		79.47 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Rungkut	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Benowo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		68.43 %		100%		99.88 %		99.88 %		99.88 %		99.88%		Kec. Jambangan	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%		29.73 %		51%		51.57 %		101.12 %		51.57 %		101.12%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81.7 %		65.99 %		53.35 %		70.09 %		131.38 %		70.09 %		85.79%		Kec. Simokerto	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.87 %		53.74 %		27.71 %		72.73 %		262.47 %		72.73 %		221.27%		Kec. Gayungan	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.11 %		65.44 %		37.11 %		57.22 %		154.19 %		57.22 %		154.19%		Kec. Krembangan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		92.15 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bubutan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bulak	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		69.37 %		23.36 %		76.06 %		325.60 %		76.06 %		304.24%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		82.19 %		100%		99.77 %		99.77 %		99.77 %		99.77%		Kec. Gayungan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Semampir	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		80.72 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.71 %		62.94 %		26.71 %		56.52 %		211.61 %		56.52 %		211.61%		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		79.77 %		100%		99.93 %		99.93 %		99.93 %		99.93%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %		55.74 %		26.32 %		76.29 %		289.86 %		76.29 %		289.86%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		66.21 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		33.46 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %		45.53 %		50.51 %		52.07 %		103.09 %		52.07 %		103.09%		Kec. Tandes	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Jambangan	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20%		67.80 %		15%		55.43 %		369.53 %		55.43 %		277.15%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		82.14 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89.61 %		45.45 %		42.86 %		72.09 %		168.20 %		72.09 %		80.45%		Kec. Sawahan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		84.42 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wiyung	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		79.31 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		67.57 %		100%		99.51 %		99.51 %		99.51 %		99.51%		Kec. Tegalsari	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		56.67 %		24.37 %		64.14 %		263.19 %		64.14 %		263.19%		Kec. Sambikerep	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	65.01 %		54.95 %		20.43 %		68.49 %		335.24 %		68.49 %		105.35%		Kec. Wonokromo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		67.86 %		100%		99.61 %		99.61 %		99.61 %		99.61%		Kec. Krembangan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		90.21 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		77.42 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tandes	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100%		62.22 %		56.45 %		73.86 %		130.84 %		73.86 %		73.86%		Kec. Karangpilang	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47.02 %		79.70 %		47.02 %		47.37 %		100.74 %		47.37 %		100.74%		Kec. Tambaksari	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		74.34 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%		51.90 %		50%		35.78 %		71.56 %		35.78 %		71.56%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31.3 %		50.00 %		25.99 %		62.88 %		241.94 %		62.88 %		200.89%		Kec. Jambangan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Simokerto	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sawahan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pakal	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55.81 %		55.14 %		55.81 %		64.96 %		116.39 %		64.96 %		116.39%		Kec. Wiyung	
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24.73 %		74.02 %		24.73 %		74.51 %		301.29 %		74.51 %		301.29%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40.51 %		54.05 %		40.51 %		60.36 %		149.00 %		60.36 %		149.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		83.28 %		100%		99.67 %		99.67 %		99.67 %		99.67%		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			267.325		108.122		112.128		95.442		85.12%		203.564		76.15%		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		7 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga		10 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		100.00 %		5 lembaga		100.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		12 Lembaga		6 Lembaga		7 Lembaga		116.67 %		7 Lembaga		116.67 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		3 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		7 Lembaga		116.67 %		7 Lembaga		116.67 %		Kec. Genteng	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		7 Lembaga		116.67 %		7 Lembaga		116.67 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan		6 Lembaga		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		12 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		13 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		N/A		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt	2 laporan		N/A		2 laporan		2 laporan		100.00 %		2 laporan		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		7 Lembaga		175.00 %		7 Lembaga		175.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.786		3.840		5.400		2.010		37.22%		5.850		54.24 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		144 Orang		6 Laporan		6 Laporan		100.00 %		6 Laporan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.843		4.500		2.550		2.550		100.00%		7.050		79.72 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		80 orang		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.374		2.580		3.000		3.000		100.00%		5.580		66.63 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		86 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			2.512		1.320		2.250		2.250		100.00%		3.570		142.10 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		44 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.699		3.600		3.600		3.600		100.00%		7.200		107.47 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		120 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			14.739		13.290		9.720		9.720		100.00%		23.010		156.12 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		207 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.752		3.420		3.060		3.060		100.00%		6.480		172.72 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		102 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.108		2.400		3.000		3.000		100.00%		5.400		105.71 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		80 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.967		2.250		2.250		2.250		100.00%		4.500		64.59 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		75 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.374		2.850		3.750		3.750		100.00%		6.600		78.81 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		119 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.048		2.730		2.730		2.730		100.00%		5.460		179.12 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		91 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12.729		3.000		1.950		1.950		100.00%		4.950		38.89 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		100 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.025		2.370		4.500		3.420		76.00%		5.790		115.23 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		76 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.694		2.550		5.100		5.100		100.00%		7.650		134.34 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		85 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.699		3.000		1.650		1.650		100.00%		4.650		69.41 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		100 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4.020		1.500		5.430		5.400		99.45%		6.900		171.66 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		50 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12.394		1.080		1.050		1.050		100.00%		2.130		17.19 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		36 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			15.779		14.432		3.799		3.792		99.81%		18.224		115.49 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		379 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.049		2.340		2.340		2.340		100.00%		4.680		46.57 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		78 Orang		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.852		780		3.450		3.450		100.00%		4.230		109.81 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		55 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.887		2.400		2.400		2.400		100.00%		4.800		44.09 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		79 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.049		3.750		9.000		2.700		30.00%		6.450		64.18 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan		100 Orang		125 Laporan		125 Laporan		100.00 %		125 Laporan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.427		4.950		4.860		4.860		100.00%		9.810		180.78 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		100 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			15.375		600		4.500		3.840		85.33%		4.440		28.88 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		100 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.350		3.060		3.000		1.980		66.00%		5.040		150.46 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan		169 Orang		178 Laporan		178 Laporan		100.00 %		178 Laporan		100.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			16.079		2.100		2.100		2.100		100.00%		4.200		26.12 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		70 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.441		2.130		3.089		1.410		45.65%		3.540		41.94 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		78 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.910		3.900		4.500		1.980		44.00%		5.880		65.99 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		130 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			19.294		6.000		2.700		2.700		100.00%		8.700		45.09 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		200 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.350		3.000		3.000		3.000		100.00%		6.000		179.12 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		100 orang		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.719		0		2.400		2.400		100.00%		2.400		22.39 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		N/A		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			138.837.194		162.708.884		725.518		83.407		11.50%		162.792.291		117.25%		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		100.00 %		220 Lembaga		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		100.00 %		229 Lembaga		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		100.00 %		356 lembaga		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 Lembaga		365 Lembaga		365 Lembaga		364 Lembaga		99.73 %		364 Lembaga		99.73 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		100.00 %		185 Lembaga		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga		211 lembaga		211 lembaga		212 lembaga		100.47 %		212 lembaga		100.47 %		Kec. Wiyung	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	280 Lembaga		280 Lembaga		280 Lembaga		280 Lembaga		100.00 %		280 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga		196 Lembaga		196 Lembaga		196 Lembaga		100.00 %		196 Lembaga		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		100.00 %		480 Lembaga		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga		168 lLmbaga		168 Lembaga		168 Lembaga		100.00 %		168 Lembaga		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		100.00 %		460 Lembaga		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		100.00 %		431 Lembaga		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	200 Lembaga		205 Lembaga		200 Lembaga		205 Lembaga		102.50 %		205 Lembaga		102.50 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		100.00 %		346 Lembaga		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga		376 Lembaga		376 Lembaga		371 Lembaga		98.67 %		371 Lembaga		98.67 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga		188 lembaga		188 lembaga		193 lembaga		102.66 %		193 lembaga		102.66 %		Kec. Benowo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		100.00 %		414 Lembaga		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga		488 Lembaga		497 Lembaga		497 Lembaga		100.00 %		497 Lembaga		101.84 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga		139 Lembaga		139 Lembaga		139 Lembaga		100.00 %		139 Lembaga		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga		260 Lembaga		261 Lembaga		261 Lembaga		100.00 %		261 Lembaga		100.38 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		100.00 %		158 Lembaga		100.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		100.00 %		197 Lembaga		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		100.00 %		364 Lembaga		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga		217 Lembaga		217 Lembaga		217 Lembaga		100.00 %		217 Lembaga		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		100.00 %		627 lembaga		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		100.00 %		636 Lembaga		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga		439 Lembaga		439 Lembaga		439 Lembaga		100.00 %		439 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		100.00 %		323 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	749 Lembaga		749 Lembaga		749 Lembaga		749 Lembaga		100.00 %		749 Lembaga		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		100.00 %		371 lembaga		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		100.00 %		568 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.454.403		3.164.843		12.701		2.117		16.67%		3.166.959		129.03 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		12 Kali		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			6.200.886		7.373.419		31.104		5.184		16.67%		7.378.603		118.99 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.594.402		6.551.703		27.929		0		0.00%		6.551.703		117.11 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.798.635		6.214.010		30.283		4.509		14.89%		6.218.519		107.24 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.890.578		7.302.833		28.447		4.725		16.61%		7.307.558		124.06 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		12 Kali		60 Laporan		15 Laporan		25.00 %		15 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.708.920		5.438.714		23.544		3.845		16.33%		5.442.558		115.58 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.745.070		3.399.276		13.759		2.214		16.09%		3.401.490		123.91 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.852.656		5.839.778		23.587		0		0.00%		5.839.778		120.34 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.686.608		5.794.815		22.421		0		0.00%		5.794.815		86.66 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.876.732		3.298.494		14.148		2.279		16.11%		3.300.773		114.74 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9.280.353		8.270.317		41.155		3.386		8.23%		8.273.703		89.15 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.483.134		3.067.424		11.988		999		8.33%		3.068.423		123.57 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.437.744		6.174.724		26.827		2.236		8.33%		6.176.959		139.19 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.917.046		5.918.785		39.775		14.357		36.10%		5.933.142		120.66 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.427.372		7.193.837		32.206		4.763		14.79%		7.198.600		132.64 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.108.477		2.543.566		10.238		0		0.00%		2.543.566		120.64 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.881.581		2.100.117		9.007		751		8.33%		2.100.867		111.65 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.761.646		3.580.377		14.839		2.144		14.45%		3.582.521		129.72 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			8.285.543		8.931.515		56.001		3.434		6.13%		8.934.950		107.84 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan		12 Kali		30 Laporan		6 Laporan		20.00 %		6 Laporan		20.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9.569.468		10.661.321		48.535		4.045		8.33%		10.665.366		111.45 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.436.619		2.725.459		12.657		1.042		8.23%		2.726.501		111.90 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.411.844		3.411.251		14.062		1.183		8.41%		3.412.434		141.49 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.001.019		6.131.571		23.652		0		0.00%		6.131.571		122.61 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.680.000		2.447.419		10.886		1.814		16.67%		2.449.234		145.79 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.152.648		4.994.101		20.930		1.733		8.28%		4.995.835		120.30 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		12 Kali		60 Laporan		15 Laporan		25.00 %		15 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.859.088		3.446.404		14.806		0		0.00%		3.446.404		120.54 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.600.212		3.139.776		13.241		3.191		24.10%		3.142.968		120.87 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			6.782.123		7.650.143		36.806		5.503		14.95%		7.655.646		112.88 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			3.684.744		4.711.550		18.619		2.387		12.82%		4.713.937		127.93 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			3.422.884		4.835.949		17.323		2.489		14.37%		4.838.438		141.36 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.844.760		6.395.394		24.041		3.078		12.80%		6.398.472		132.07 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			6.115.619		714.800		1.236.742		88.011		7.12%		802.811		13.13%		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	635 Dokumen		N/A		620 Dokumen		21 Dokumen		3.39 %		21 Dokumen		3.31 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		8 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		37.50 %		3 Bidang Urusan		300.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan		N/A		11 Layanan		12 Layanan		109.09 %		12 Layanan		109.09 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen		N/A		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bubutan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		83.33 %		5 Bidang Urusan		83.33 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		50.00 %		3 Bidang Urusan		50.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan		N/A		4 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		100.00 %		4 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		50.00 %		3 Bidang Urusan		50.00 %		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemrintahan terkait pelayanan non perzinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		N/A		30 Dokumen		5 Dokumen		16.67 %		5 Dokumen		16.67 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.03	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**			8.039		7.134		4.735		0		0.00%		7.134		88.74 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.03	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**			8.039		5.714		9.207		0		0.00%		5.714		71.07 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.03	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**			4.020		3.657		3.600		0		0.00%		3.657		90.99 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		8.744		2.520		0		0.00%		8.744		87.01 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3.753		3.194		3.247		0		0.00%		3.194		85.11 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		0		7.500		4.706		62.75%		4.706		46.83 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		3 laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1.102		220		68.750		0		0.00%		220		19.97 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			912		2.844		793		0		0.00%		2.844		311.84 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			13.399		11.545		12.000		0		0.00%		11.545		86.16 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			16.079		2.550		4.643		0		0.00%		2.550		15.86 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		8.900		8.991		0		0.00%		8.900		88.56 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		5 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			18.591		6.716		19.315		0		0.00%		6.716		36.13 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		4 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		5.690		7.200		7.197		99.96%		12.888		160.31 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		7.412		7.106		0		0.00%		7.412		73.76 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			21.494		2.353		2.862		0		0.00%		2.353		10.95 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		5.796		7.200		3.154		43.81%		8.950		111.33 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.594		0		8.235		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.597		5.069		4.440		0		0.00%		5.069		58.96 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12.863		9.929		1.798		0		0.00%		9.929		77.19 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2.043		1.020		1.500		0		0.00%		1.020		49.91 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			128.628		26.468		21.094		0		0.00%		26.468		20.58 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		3 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12.059		12.452		10.791		0		0.00%		12.452		103.26 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		5.554		5.914		0		0.00%		5.554		69.08 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.652		3.871		6.975		0		0.00%		3.871		36.34 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			32.500		14.055		6.037		0		0.00%		14.055		43.25 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		7.937		9.000		0		0.00%		7.937		78.98 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			402		7.775		9.780		0		0.00%		7.775		1,934.33 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			6.699		2.360		6.000		0		0.00%		2.360		35.22 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		3.988		5.381		0		0.00%		3.988		49.60 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.374		7.155		319		0		0.00%		7.155		85.44 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			24.118		8.778		6.439		0		0.00%		8.778		36.40 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		5.493		12.000		0		0.00%		5.493		38.52 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		1964 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		6.127		11.692		0		0.00%		6.127		42.97 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3254 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.020		64.320		1.221		0		0.00%		64.320		1,600.13 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		7397 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			3.753		3.122		3.262		0		0.00%		3.122		83.19 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		11052 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		0		7.500		3.375		45.00%		3.375		33.58 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		15226 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.039		730		12.654		11.736		92.75%		12.466		155.06 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3816 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		1.415		8.991		0		0.00%		1.415		14.08 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		4700 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			13.399		4.179		4.718		0		0.00%		4.179		31.19 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		5239 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		396		23.559		0		0.00%		396		2.78 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		4577 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		9.158		6.000		0		0.00%		9.158		91.14 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		15245 berkas		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			18.591		10.032		30.969		17.770		57.38%		27.802		149.55 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		2686 berkas		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			9.171		7.919		21.978		0		0.00%		7.919		86.35 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3346 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		12.746		7.733		6.689		86.50%		19.435		136.30 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan		2914 berkas		2923 Laporan		754 Laporan		25.80 %		754 Laporan		25.80 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			21.494		16.589		19.786		0		0.00%		16.589		77.18 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		5291 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.809.279		48.224		91.682		0		0.00%		48.224		1.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		10603 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			19.438		7.842		2.000		0		0.00%		7.842		40.35 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		7928 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.913		1.901		3.330		2.198		66.00%		4.098		83.43 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		2392 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		6.937		8.726		0		0.00%		6.937		48.65 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		24141 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			12.075		5.446		12.112		11.402		94.14%		16.848		139.52 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		7579 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			20.098		0		18.000		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan		10397 Berkas		4140 Laporan		1035 Laporan		25.00 %		1035 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			12.059		10.705		10.795		0		0.00%		10.705		88.77 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12655 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.039		7.226		7.160		0		0.00%		7.226		89.88 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		10296 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.652		4.594		11.791		0		0.00%		4.594		43.13 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		4554 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			72.000		22.609		21.585		0		0.00%		22.609		31.40 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan		3974 berkas		4277 Laporan		1134 Laporan		26.51 %		1134 Laporan		26.51 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		2.176		9.000		0		0.00%		2.176		21.65 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		5339 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			402		4.740		21.978		0		0.00%		4.740		1,179.21 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		6468 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		8.037		188.662		12.253		6.49%		20.290		201.91 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		6419 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			2.010		1.760		12.124		2.958		24.40%		4.718		234.76 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		7350 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.374		25.038		9.240		0		0.00%		25.038		298.99 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3797 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			24.118		23.867		58.118		2.220		3.82%		26.087		108.16 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3831 berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			3.350		6.017		3.000		0		0.00%		6.017		179.64 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		10931 Berkas		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		9.999		14.380		0		0.00%		9.999		62.19 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen		28 Berkas		40 Dokumen		8 Dokumen		20.00 %		8 Dokumen		20.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		2.503		8.712		0		0.00%		2.503		15.57 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen		105 berkas		35 Dokumen		8 Dokumen		22.86 %		8 Dokumen		22.86 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.675		1.438		16.819		0		0.00%		1.438		85.84 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		125 Berkas		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.016		7.464		9.000		1.770		19.67%		9.234		92.20 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen		153 berkas		50 Dokumen		9 Dokumen		18.00 %		9 Dokumen		18.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		6.501		14.400		0		0.00%		6.501		40.43 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen		250 berkas		100 Dokumen		41 Dokumen		41.00 %		41 Dokumen		41.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			3.753		3.014		3.247		0		0.00%		3.014		80.31 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen		52 Berkas		20 Dokumen		9 Dokumen		45.00 %		9 Dokumen		45.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		1.987		10.340		0		0.00%		1.987		19.77 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen		117 berkas		24 Dokumen		20 Dokumen		83.33 %		20 Dokumen		83.33 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			13.399		9.395		3.663		0		0.00%		9.395		70.12 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		303 berkas		30 Dokumen		3 Dokumen		10.00 %		3 Dokumen		10.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		1.010		8.640		0		0.00%		1.010		10.05 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		68 berkas		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		1.956		4.544		0		0.00%		1.956		12.16 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		70 Berkas		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.059		6.063		14.986		0		0.00%		6.063		50.28 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		46 berkas		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		10.301		8.999		0		0.00%		10.301		102.51 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		574 berkas		1 Dokumen		2 Dokumen		200.00 %		2 Dokumen		200.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			18.591		9.509		7.404		0		0.00%		9.509		51.15 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		43 berkas		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		1 Dokumen		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		13.990		7.298		0		0.00%		13.990		87.01 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen		49 berkas		42 Dokumen		6 Dokumen		14.29 %		6 Dokumen		14.29 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.340		1.440		5.630		0		0.00%		1.440		107.45 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		237 berkas		48 Dokumen		12 Dokumen		25.00 %		12 Dokumen		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			21.494		6.676		3.497		0		0.00%		6.676		31.06 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		61 Berkas		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			2.456		2.269		369		0		0.00%		2.269		92.37 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen		112 Berkas		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			18.142		5.768		14.000		0		0.00%		5.768		31.80 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		25 Berkas		10 Dokumen		3 Dokumen		30.00 %		3 Dokumen		30.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			13.834		1.956		2.817		0		0.00%		1.956		14.14 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		43 berkas		10 Dokumen		3 Dokumen		30.00 %		3 Dokumen		30.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			9.513		10.522		8.520		178		2.08%		10.700		112.48 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen		75 Berkas		38 Dokumen		18 Dokumen		47.37 %		18 Dokumen		47.37 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			24.118		15.762		21.600		0		0.00%		15.762		65.35 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		109 Berkas		4 Dokumen		3 Dokumen		75.00 %		3 Dokumen		75.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			8.039		7.211		7.200		0		0.00%		7.211		89.69 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen		92 berkas		15 Dokumen		4 Dokumen		26.67 %		4 Dokumen		26.67 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.059		6.655		8.729		0		0.00%		6.655		55.19 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		102 berkas		48 Dokumen		15 Dokumen		31.25 %		15 Dokumen		31.25 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.652		1.304		9.540		0		0.00%		1.304		12.25 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	635 Dokumen		215 berkas		620 Dokumen		21 Dokumen		3.39 %		21 Dokumen		3.31 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.005		837		900		405		45.00%		1.242		123.60 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen		237 Berkas		16 Dokumen		32 Dokumen		200.00 %		32 Dokumen		200.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.863		9.923		12.930		0		0.00%		9.923		77.14 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		66 berkas		48 Dokumen		23 Dokumen		47.92 %		23 Dokumen		47.92 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		0		34.973		0		0.00%		0		0.00 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		64 Berkas		30 Dokumen		12 Dokumen		40.00 %		12 Dokumen		40.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			108.004		12.720		6.808		0		0.00%		12.720		11.78 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		104 Berkas		48 Dokumen		8 Dokumen		16.67 %		8 Dokumen		16.67 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		785		14.400		0		0.00%		785		4.88 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		281 Berkas		30 Dokumen		5 Dokumen		16.67 %		5 Dokumen		16.67 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			24.118		9.371		9.017		0		0.00%		9.371		38.85 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen		82 berkas		35 Dokumen		9 Dokumen		25.71 %		9 Dokumen		25.71 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			9.647		8.248		8.640		0		0.00%		8.248		85.49 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		70 berkas		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
143	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.375.109		1.268.636		13.282.835		910.322		6.85%		13.596.680		94.58%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		94.35 %		100%		96.29 %		96.29 %		96.29 %		96.29%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.120.103		9.175.051		9.897.455		395.524		4.00%		9.570.575		104.94%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.120.103		9.175.051		9.897.455		395.524		4.00%		9.570.575		104.94 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		100%		25 Orang/bulan		26 Orang/bulan		104.00 %		26 Orang/bulan		104.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			191.802		174.147		283.706		20.822		7.34%		194.969		101.65%		
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			191.802		174.147		283.706		20.822		7.34%		194.969		101.65 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		95.83 %		5 Paket		2 Paket		40.00 %		2 Paket		40.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.063.203		3.337.160		3.101.673		493.976		15.93%		3.831.136		75.67%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		94.08 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.063.203		3.337.160		3.101.673		493.976		15.93%		3.831.136		75.67 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		94.08 %		4 Laporan		2 Laporan		50.00 %		2 Laporan		50.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
144	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			846.659		86.801		3.388.665		154.343		4.55%		1.022.354		120.75%		
			Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	94%		87.29 %		91%		95.74 %		105.21 %		95.74 %		101.85%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			846.659		868.011		3.388.665		154.343		4.55%		1.022.354		120.75%		
			Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	291 Lembaga		N/A		298 Lembaga		94 Lembaga		31.54 %		94 Lembaga		32.30 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			846.659		868.011		3.388.665		154.343		4.55%		1.022.354		120.75 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	291 Orang		12 Kali		298 Orang		94 Orang		31.54 %		94 Orang		32.30 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
145	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			8.317.287		1.645.553		20.124.463		13.250		0.07%		16.468.775		198.01%		
			Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%		520.00 %		46%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			8.317.287		16.455.525		20.124.463		13.250		0.07%		16.468.775		198.01%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	70 Lembaga		52 Lembaga		70 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.2.01.04	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**		8.317.287		16.455.525		20.124.463		13.250		0.07%		16.468.775		198.01 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang		154 Orang		140 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
146	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			59.370		5.245		94.383		9.970		10.56%		62.424		105.14%		
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	100%		25.96 %		40%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			59.370		52.454		94.383		9.970		10.56%		62.424		105.14%		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	30 Lembaga		27 Lembaga		31 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01.05	**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**			59.370		52.454		94.383		9.970		10.56%		62.424		105.14 %		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan		2 kali		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
147	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			823.293		68.843		647.120		173.865		26.87%		862.297		104.74%		
			Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			823.293		688.432		647.120		173.865		26.87%		862.297		104.74%		
			Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya	8 Lembaga		9 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		100.00 %		8 Lembaga		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			823.293		688.432		647.120		173.865		26.87%		862.297		104.74 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang		42 Kali		690 Orang		171 Orang		24.78 %		171 Orang		24.78 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
148	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			12.624.896		965.593		30.557.098		2.319.543		7.59%		11.975.476		94.86%		
			Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%		98.59 %		100%		71.43 %		71.43 %		71.43 %		71.43%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			12.624.896		9.655.933		30.557.098		2.319.543		7.59%		11.975.476		94.86%		
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	12 Lembaga		11 Lembaga		12 Lembaga		18 Lembaga		150.00 %		18 Lembaga		150.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	18 Lembaga		10 Lembaga		18 Lembaga		19 Lembaga		105.56 %		19 Lembaga		105.56 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			11.875.472		9.215.506		30.019.104		2.256.054		7.52%		11.471.560		96.60 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Orang		411 Kali		18 Orang		17 Orang		94.44 %		17 Orang		94.44 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			749.424		440.427		537.994		63.489		11.80%		503.916		67.24 %		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan		73 Kali		44 Laporan		12 Laporan		27.27 %		12 Laporan		27.27 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, serta analisis isu pada media sosial menggunakan *big data*, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Perlunya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19;
2. Perlunya percepatan penanganan kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19;
3. Perlunya penanganan terhadap pengangguran terbuka sebagai dampak pandemi Covid-19;
4. Masih perlunya optimalisasi jaringan drainase untuk mengatasi titik genangan dan pencegahan terjadinya banjir;
5. Masih perlunya peningkatan sistem manajemen transportasi serta penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan;
6. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang;
7. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting;
8. Masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta penurunan stunting;
9. Masih perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar.
10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat;
11. Perlunya peningkatan kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata;
12. Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;

13. Perlunya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan terkait pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan;
14. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni;
15. Masih ditemukannya pelanggaran Perda dan kejadian gangguan ketentraman umum;
16. Perlunya upaya peningkatan pemberdayaan pemuda dan penguatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
17. Masih perlunya pendataan, pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik;
18. Masih perlunya peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan dalam mengoptimalkan potensi pemberdayaan masyarakat kewilayahan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

1. Masih terdapat guru SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi;
2. Masih belum optimalnya ketersediaan guru yang sesuai antara kualifikasi mata pelajaran dengan ijazah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan dikarenakan adanya Perpres nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah;
4. Masih terdapat lembaga yang masa berlaku ijin operasionalnya telah berakhir sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BOP;
5. Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan lembaga PAUD/TK;
6. Masih adanya lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi.

2.3.2.2 Kesehatan

1. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan sesuai standar;
2. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain Covid-19, HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dll;

3. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar;
4. Masih perlunya peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah;
5. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi;
6. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan;
7. Perlunya pembangunan rumah sakit untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Surabaya Timur dan/atau Utara;
8. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan;
9. Perlunya optimalisasi rujukan berjenjang;
10. Perlunya optimalisasi pemanfaatan jaminan kesehatan semesta dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan jaminan kesehatan.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB;
2. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal;
3. Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan / atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta;
4. Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota;
5. Adanya jaringan jalan yang v/c rasio-nya masih kurang optimal;
6. Masih tingginya biaya pemeliharaan PJU, sehingga perlunya pemanfaatan energi alternartif untuk mengurangi beban biaya listrik pada PJU.

2.3.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;
2. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni;
3. Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi;
4. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

2.3.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih perlunya upaya peningkatan partisipasi warga dalam mewujudkan Kampung Tangguh Bencana dan Kampung Tangguh Wani Covid-19 (wani sehat, wani jogo, wani sejahtera, dan wani ngandani);
2. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan;
3. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Masih adanya kejadian kebakaran yang antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat.

2.3.2.6 Sosial

1. Perlunya pemutakhiran data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala;
2. Belum optimalnya proses reunifikasi diakibarkan adanya PPKM di daerah asal PMKS;
3. Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum berproduksi;
4. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2.3.2.7 Tenaga Kerja

1. Masih adanya pemutusan hubungan kerja terutama sebagai dampak pandemi Covid- 19;
2. Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran;

3. Masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan;
4. Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi yang belum mendapatkan fasilitasi penyaluran kerja;
5. Pengawasan ketenagakerjaan. perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan.

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh beberapa pemangku kepentingan;
2. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pencapaian indikator Kelurahan/kampung layak anak;
3. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, dilihat dari masih terdapat permasalahan perempuan dan anak antara lain *trafficking* dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2.3.2.9 Pangan

1. Masih ditemukannya bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan karena rendahnya kesadaran masyarakat;
2. Perlunya perluasan kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan;
3. Perlunya optimalisasi potensi *urban farming* baik di masyarakat maupun pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.

2.3.2.10 Pertanahan

1. Masih perlunya pengadaan tanah/bangunan untuk kepentingan umum;
2. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya;
3. Belum optimalnya pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan.

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

1. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penataan Ruang Terbuka Hijau;
2. Masih diperlukan peningkatan asilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R;
3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan;
5. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi;
6. Menurunnya kualitas air baku kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air;
7. Belum optimalnya pelaksanaan penerbitan persetujuan lingkungan dikarenakan adanya transisi perubahan peraturan dengan diterbitkannya PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021 dan adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat.

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih adanya penduduk lahir dan penduduk meninggal yang belum dicatatkan untuk memperoleh akte kelahiran/ akte kematian;
2. Perlunya optimalisasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil secara *online*.

2.3.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perlunya upaya peningkatan cakupan jumlah peserta KB baru;
2. Perlunya upaya peningkatan akses Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP);
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun;

4. Perlunya penguatan dan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam mendukung tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB di tingkat desa/kelurahan.

2.3.2.14 Perhubungan

1. Masih diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah di sekitar Surabaya;
2. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum;
3. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.

2.3.2.15 Komunikasi dan Informatika

1. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan.

2.3.2.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Perlunya optimalisasi penggunaan ePeken oleh masyarakat untuk meningkatkan akses pemasaran produk UMKM dan toko kelontong;
2. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan BPOM;
3. Masih ada koperasi masih belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi;
4. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional.

2.3.2.17 Kepemudaan dan Olahraga

1. Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk;
2. Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlet dan pelatih profesional.

2.3.2.18 Statistik

1. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta yang tervalidasi dan terintegrasi.

2.3.2.19 Persandian

1. Perlunya optimalisasi integrasi sistem antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.2.20 Kebudayaan

1. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal;
2. Perlunya fasilitasi kelompok seni untuk dapat tampil di fasilitas publik;
3. Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal.

2.3.2.21 Perpustakaan

1. Perlunya optimalisasi pemanfaatan Perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

2.3.2.22 Kearsipan

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan;
2. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal.

2.3.2.23 Kelautan dan Perikanan

1. Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan;
2. Perlunya pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan.

2.3.2.24 Pariwisata

1. Menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan pandemi covid-19;
2. Perlunya optimalisasi kawasan wisata dan integrasi antar kawasan wisata;
3. Masih belum optimalnya kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata;

4. Menurunnya jumlah kegiatan seni dan budaya sebagai dampak pandemi covid-19.

2.3.2.25 Pertanian

1. Masih kurang optimalnya penyediaan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian *(urban farming),* peternakan dan perikanan;
2. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan;
3. Perlunya penanganan terhadap dampak munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.

2.3.2.26 Perdagangan

1. Perlunya optimalisasi pengoperasioan sentra dan pasar;
2. Perlunya optimalisasi pengelolaan pasar tradisional.

2.3.2.27 Sekretariat Daerah

1. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah;
3. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat.

2.3.2.28 Perencanaan

1. Masih diperlukannya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi.

2.3.2.29 Keuangan

1. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah karena masa pemulihan akibat dampak Covid-19;
2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
3. Belum validnya pendataan obyek pajak/retribusi yang dinamis;

4. Belum optimalnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dikarenakan petunjuk teknis yang terlambat dan perubahan petunjuk teknis atau kebijakan pada tahun berjalan.

2.3.2.30 Kepegawaian

1. Perlunya optimalisasi sistem merit dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
2. Perlunya penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan secara berkala.

2.3.2.31 Pendidikan dan Pelatihan

1. Perlunya optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai.

2.3.2.32 Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya hasil penelitian dan pengembangan yang belum dimanfaatkan/ ditindaklanjuti.

2.3.2.33 Inspektorat Daerah

1. Perlunya optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah;
3. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.

2.3.2.34 Kecamatan

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya pemberi pelayanan langsung bagi masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di kecamatan dan kelurahan;
3. Perlunya optimalisasi pelaksanaan Dana Kelurahan.

2.3.2.35 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

2. Masih belum tersusunnya perencanaan detail dalam dukungan pelaksanaan pilkada karena belum tersedianya petunjuk teknis dan penjadwalan pilkada bagi Kabupaten/Kota.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi terus pulih sejak tahun 2021 seiring keberhasilan Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah dalam menahan laju penyebaran Covid-19. Pemulihan tersebut ditunjukkan oleh indikator-indikator makro yang mulai tumbuh positif sebagai respon akan optimisme masyarakat terhadap prospek kinerja ekonomi tahun 2021. Optimisme didukung oleh capaian pertumbuhan positif yang terjadi sejak periode triwulan II tahun 2021. Tren positif tersebut berlangsung hingga akhir tahun 2021 dimana pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi Nasional mampu mencapai 3,7 persen. Akibat kondisi ekonomi yang mulai pulih, data kemiskinan juga menunjukkan penurunan. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan tingkat pengangguran yang juga mengalami penurunan. Berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2021 data tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen lebih rendah dibandingkan sebelumnya yakni sebesar 10,19 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 5,98 persen yang mengalami penurunan sebesar 1,37 persen dibanding tahun 2020.

Pemulihan ekonomi tersebut terus berlanjut hingga tahun 2022. Pembukaan kembali sektor-sektor potensial diindikasi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemulihan tersebut juga didukung oleh keberhasilan percepatan pemenuhan vaksinasi yang sesuai target sehingga membentuk kekebalan komunitas. Tren pertumbuhan yang terus membaik tersebut direfleksikan oleh angka capaian pertumbuhan ekonomi nasional di akhir tahun 2022 mencapai 5,31 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 secara keseluruhan ditopang oleh membaiknya konsumsi masyarakat seiring pemulihan ekonomi domestik dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Mempertimbangkan perkembangan perekonomian saat ini, pada tahun 2023 keberlanjutan ekonomi masih diperkirakan terus menguat meskipun masih dihadapkan pada tantangan eksternal. Pemerintah Pusat dan beberapa organisasi

internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tumbuh optimis dengan perkiraan yang cukup variatif pada kisaran sebesar 5 hingga 6 persen. Badan Perencanaan Nasional dalam dokumen RKP 2023 menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 mencapai 5,3-5,5 persen, dengan sasaran laju inflasi terjaga pada kisaran 2,0-4,0 persen. Target pertumbuhan tersebut optimis ditengah kondisi ekonomi global yang berfluktuatif. Arah kebijakan nasional tahun 2023 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi pengeluaran, investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh sektor-sektor potensial yang mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan didorong oleh pemulihan sektor industri makan minum seiring dengan meningkatnya mobilitas dan pemulihan daya beli. Begitu pula dengan sektor pariwisata yang diperkirakan pulih didorong oleh pertumbuhan sektor penyedia akomodasi dan makan minum. Sektor perdagangan juga menggeliat seiring kembalinya daya beli masyarakat seiring peningkatan produktivitas perekonomian.

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh perekonomian Jawa Timur. Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 tumbuh 5,34 persen atau meningkat dibandingkan 2021 yang tumbuh sebesar 3,57 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 secara sektoral dikontribusi oleh sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, serta penyediaan akomodasi makan minum. Dari sisi pengeluaran, peningkatan permintaan domestik masyarakat yang tercermin dari kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan net ekspor antardaerah pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi faktor pendorongnya.

Berlanjutnya perbaikan ekonomi global juga turut mendorong masih kuatnya permintaan eksternal yang tercermin dari masih positifnya ekspor luar negeri Jawa Timur pada tahun 2022. Perbaikan permintaan domestik dan masih kuatnya permintaan eksternal tersebut, serta berlanjutnya proyek strategis Jawa Timur menopang perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2022.

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan berkisar antara 5,0% hingga 6,3%. Arah kebijakan ekonomi yang dirumuskan untuk mencapaian sasaran yang ditargetkan yakni melalui pembangunan infra aksebilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, optimalisasi produksi komoditas-komoditas ekspor utama, penguatan sektor riil melalui peningkatan kualitas produk UMKM, pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan investasi dan ekspor, pemafaatan teknologi informasi sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal serta pemulihan produktivitas pada sektor industri dan perdagangan.

Selaras dengan Nasional dan Jawa Timur, kinerja perekonomian Kota Surabaya menunjukkan tren perbaikan positif. Keberlanjutan pemulihan ekonomi Kota Surabaya dibuktikan dengan performa indikator makro ekonomi yang tumbuh makin tinggi melanjutkan tren pertumbuhan sebelumnya. Pada tahun 2021 perekonomian Kota Surabaya tumbuh sebesar 4,29 persen dan selanjutnya meningkat menjadi 6,51 persen di akhir tahun 2022. Perekonomian Kota Surabaya tersebut juga lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional masing-masing sebesar 5,31 persen dan 5,34 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga merefleksikan peningkatan produktivitas pelaku usaha serta sektor-sektor potensial kembali tumbuh menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi seperti sebelum pandemi.

Sejalan dengan kinerja ekonomi Kota Surabaya, optimisme juga ditunjukkan oleh kinerja makro lainnya yakni tingkat investasi, kinerja indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan. Kinerja investasi berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 mencapai 34 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 29 trilliun atau secara tahunan tumbuh sebesar 19,45 persen. Untuk kinerja pembangunan manusia, pada tahun 2022 nilai IPM Kota Surabaya sebesar 82,74 atau tumbuh sebesar 0,34 poin dibanding tahun

2021. Selain itu, data kemiskinan juga menunjukkan penurunan seiring membaiknya kondisi perekonomian di Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin semakin berkurang sebanyak 4,72 persen di tahun 2022 yang mulanya mencapai 5,23 persen ditahun 2021. Perbaikan juga ditunjukkan oleh kinerja tingkat penganguran Kota Surabaya yang mengalami penurunan di tahun 2022 yakni sebesar 7,62 persen yang semula sebesar 9,68 persen di tahun 2021.

Pada tahun 2023 kondisi ekonomi Kota Surabaya diperkirakan tumbuh optimis lebih baik dibanding tahun sebelumnya.Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan produktivitas dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Surabaya melalui program padat karya yang pemberdayaan keluarga miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan Kota Surabaya di antaranya meliputi pengembangan objek potensial wisata dan penataan kawasan pariwisata yang terintegasi guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Surabaya serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak utama perekonomian kota Surabaya.
2) Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Harapannya, pembangunan yang maju dengan mengutamakan lingkungan yang tetap lestari serta mengantisipasi akibat buruk yang ditimbulkan perubahan iklim dapat terwujud.
3) Pemenuhan kebutuhan dasar diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan sosial. Intervensi yang dilakukan pada ketiga sektor ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan SDM yang berdaya saing sehingga dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dan menyokong pertumbuhan ekonomi.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Surabaya

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keberlanjutan ekonomi yang terus berlanjut salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja peningkatan nilai tersebut besarannya menyerupai kondisi prapandemi Covid19. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh akumulatif meningkatnya nilai tambah hampir seluruh komponen pembentuk PDRB. Perkembangan perekonomian Kota Surabaya tahun tahun 2018 hingga tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2018 s/d Tahun 2022* (dalam juta)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	913.363,56	928.398,16	889.331,91	917.595,42	982.815,39
B	Pertambangan dan Penggalian	32.568,38	33.531,33	31.943,80	32.761,34	33.392,98
C	Industri Pengolahan	101.191.064,52	109.205.137,20	107.416.294,34	113.535.139,44	126.030.898,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.311.134,20	2.362.300,29	2.237.615,57	2.417.167,25	2.742.046,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	771.856,00	791.147,83	824.951,94	872.320,90	932.750,33
F	Konstruksi	52.920.129,31	54.649.310,30	51.969.408,77	55.273.538,87	61.408.502,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.052.226,45	161.032.248,06	149.246.755,05	163.509.913,19	184.610.467,40
H	Transportasi dan Pergudangan	8.811.194,17	31.240.415,60	29.794.090,41	30.518.851,24	36.260.418,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.067.932,46	95.519.341,84	85.618.582,64	91.418.079,71	102.248.698,97
J	Informasi dan Komunikasi	28.390.748,22	30.770.585,80	33.247.669,54	35.273.340,84	36.541.720,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.140.646,05	29.413.339,89	29.183.377,44	30.560.741,63	33.950.422,52
L	Real Estate	13.775.255,11	14.947.568,30	15.354.350,85	15.790.323,11	16.599.139,83
M,N	Jasa Perusahaan	13.571.273,11	14.930.184,77	14.116.912,06	14.543.157,97	15.772.593,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.345.115,74	8.054.990,77	8.238.304,23	8.310.975,30	8.486.026,22
P	Jasa Pendidikan	12.897.475,91	14.007.607,77	14.540.365,94	14.692.371,72	14.866.084,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.053.612,67	4.443.228,45	4.880.587,79	5.220.638,17	5.508.115,81
R,S,T, U	Jasa lainnya	7.599.869,06	8.159.192,66	6.918.915,11	7.340.199,70	8.642.127,81
	Produk Domestik Regional Bruto	**538.845.464,92**	**580.448.529,01**	**554.509.457,38**	**590.227.115,79**	**655.616.221,58**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023
*Catatan : *) data sementara*

Pada Tabel III.1 terlihat bahwa perekonomian Kota Surabaya berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan meski sedikit mengalami kontraksi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pelemahan kinerja perekonomian secara keseluruhan akibat penyebaran Pandemi Covid-19. Pada 2021 mencapai Rp590.227.115,79 juta dan hingga akhir tahun 2022 menghasilkan nilai tambah sebesar Rp655.616.221,58 juta. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Surabaya didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati tiga terbesar pemberi kontribusi tertinggi bagi perekonomian Kota Surabaya. Pada tahun 2021, PDRB lapangan usaha sebagai penyumbang tertinggi adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yakni sebesar Rp163.509.913,19 juta dan hingga periode tahun 2022 sebesar Rp184.610.467,40 juta. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Industri Pengolahan dan diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Selaras dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surabaya yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel III.2, nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 juga mengalami peningkatan, terkecuali tahun 2020. Pada 2021 sebesar Rp407.725.825,13 juta dan hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp434.268.341,12 juta. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnnya, yaitu sebesar Rp114.183.332,30 juta pada tahun 2021 dan sebesar Rp122.122.627,45 hingga akhir tahun 2022. Jumlah ini mewakili kontribusi sebesar 28,12% dari seluruh lapangan usaha penyumbang PDRB Kota Surabaya.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2018 s/d Tahun 2022*

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	581.426,57	57.621,53	547.994,90	554.054,69	573.236,82
B	Pertambangan dan Penggalian	20.762,58	20.782,09	19.464,04	19.479,83	19.094,55
C	Industri Pengolahan	73.322.747,38	77.271.868,81	76.384.521,77	79.366.597,57	84.567.579,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.540.006,38	1.546.272,08	1.449.668,99	1.538.145,94	1.661.665,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	583.121,24	605.979,60	630.336,37	665.833,73	680.003,79
F	Konstruksi	38.480.421,60	40.576.452,62	38.387.739,29	40.070.071,57	42.633.575,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109.848.223,51	116.305.502,48	106.340.867,71	114.183.332,32	122.122.627,45
H	Transportasi dan Pergudangan	19.046.861,58	20.497.977,43	19.477.422,82	19.874.938,33	22.684.941,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.411.739,39	62.898.688,76	56.053.239,21	57.221.633,11	62.076.385,35
J	Informasi dan Komunikasi	25.613.455,86	27.531.903,71	29.511.280,46	31.281.790,23	32.264.418,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.541.116,14	19.187.832,54	19.231.210,98	19.324.709,68	19.648.801,34
L	Real Estate	10.165.858,67	10.784.959,46	11.000.304,15	11.179.684,13	11.634.820,68
M,N	Jasa Perusahaan	8.867.969,79	9.474.538,92	8.801.216,28	8.974.255,48	9.490.093,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.697.025,94	4.867.861,44	4.754.525,35	4.748.920,17	4.756.347,15
P	Jasa Pendidikan	9.064.164,83	9.668.100,19	9.934.443,75	9.993.042,98	10.001.195,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.023.591,50	3.254.593,89	3.539.299,11	3.722.145,29	3.782.452,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.495.449,09	5.821.770,58	4.872.889,81	5.007.190,09	5.671.102,07
	Produk Domestik Regional Bruto	**387.303.942,07**	**410.879.306,14**	**390.936.424,98**	**407.725.825,13**	**434.268.341,12**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah,2033
*Catatan : *) data sementara*

Berdasarkan peranan sektoral, struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Perbaikan kondisi ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2022 untuk keseluruhan ditopang oleh perbaikan permintaan masyarakat, yang ditunjukkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2021 sebesar 28,00 persen menjadi sebesar 28,12 persen hingga akhir tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas lapangan usaha tersebut mengalami peningkatan didorong oleh daya beli yang kembali baik, yang sebelumnya tertahan dari dampak Covid19. Disamping itu, konsumsi masyarakat yang kembali tinggi dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kondisi perekonomian di masa yang akan datang.

Kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga berpengaruh terhadap kinerja lapangan usaha industri pengolahan. Ditambah lagi, kondisi ekonomi mitra dagang domestik maupun luar negeri turut mendorong kinerja industri pengolahan. Kinerja lapangan usaha ini masih memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kota Surabaya, meski kontribusinya selama tahun 2022 besarannya moderat yakni sebesar 19,47 persen.

Kembali membaiknya daya beli masyarakat juga nampak terlihat dari kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2022, lapangan usaha ini menghasilkan peranan yang lebih tinggi yakni 14,29 persen yang sebelumnya sebesar 14,03 persen tahun tahun 2021. Capaian tersebut didorong oleh dampak pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga banyak aktivitas yang kembali normal seperti aktivitas kerja, sekolah, perdagangan, bisnis maupun pariwisata. Kebijakan pelonggaran yang ini mendorong kegiatan operasional hotel dan restoran, dengan kapasitas maksimal menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan sektor ini tumbuh lebih tinggi.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan kontribusi, dimana pada tahun 2021 sebesar 4,87 persen menjadi 5,22 persen. Pelonggaran kebijakan membatasan masyarakat mendorong jam-jam operasional berbagai sektor ekonomi produktif dan pusat perdagangan yang lebih panjang sehingga mendorong kebutuhan pada sektor transportasi dan

pergudangan semakin meningkat. Kembali meningkatnya jam operasional sektor ekonomi juga menstimulus kinerja sektor jasa sebagai sektor pendukungnya. Pada tahun 2022, lapangan usaha jasa lainnya memberikan kontribusi yang meningkat menjadi 1,31 persen yang mulanya sebesar dari 1,23 persen pada tahun 2021.

Lapangan usaha yang berkontribusi yang mulanya tinggi saat pandemi Covid19 mengalami penurunan kontribusi seiring semakin membaiknya kondisi secara keseluruhan yakni sektor Informasi dan Komunikasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kontribusi saat pandemi cukup besar mengingat pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat karena menjadi kebutuhan utama aktivitas *Work From Home* (WFH) dan *School From Home* (SFH). Ditambah lagi, pada tahun 2022 masih berperan tinggi disebabkan permintaaan untuk menunjang aktivitas masyarakat namun kinerjanya pada tahun 2022 tidak setinggi ketika terjadi adanya pandemi Covid-19.

Tabel III.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 s/d Tahun 2022*
(dalam persen)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
		Persen	Persen	Persen	Persen	Persen
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	18,93	18,81	19,54	19,47	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,4	0,38	0,37	0,38	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,94	9,88	9,82	9,83	9,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,36	28,31	27,2	28	28,12
H	Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,99	4,98	4,87	5,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,08	15,31	14,34	14,03	14,29
J	Informasi dan Komunikasi	6,61	6,7	7,55	7,67	7,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	4,67	4,92	4,74	4,52
L	Real Estate	2,62	2,62	2,81	2,74	2,68
M,N	Jasa Perusahaan	2,29	2,31	2,25	2,2	2,19
O	Administrasi Pemerintahan,	1,21	1,18	1,22	1,16	1,10

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
		Persen	Persen	Persen	Persen	Persen
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,35	2,54	2,45	2,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,79	0,91	0,91	0,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,42	1,25	1,23	1,31
	Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2023
*Catatan : *) data sementara*

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selama ini tumbuh positif pada kisaran rata-rata diatas 6 persen. Kondisi yang berbeda terjadi ketika masa pandemi Covid19 yang membuat perekonomian terkontraksi yakni hingga -4,85 persen di tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 perekonomian Kota Surabaya kembali tumbuh positif seiring kebijakan pelonggaran pembatasan masyarakat diterapkan sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,29 persen dan meningkat menjadi 6,51 persen di akhir tahun 2022. Perekonomian Kota Surabaya tersebut juga lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional masing-masing sebesar 5,31 persen dan 5,34 persen. Capaian kinerja ekonomi Kota Surabaya merupakan gambaran keberhasilan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam sinergi pemulihan ekonomi masyarakat Kota Surabaya. Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya menyusun program percepatan pergerakan ekonomi untuk menaikkan kembali kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya yang sempat terpuruk akibat dampak Covid-19. Intervensi diwujudkan melalui pemberdayaan usaha padat karya, perbaikan iklim investasi, penyediaan akses lowongan pekerjaan, serta pemberdayaan UMKM.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2018 - 2022*

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2018	6,19
2019	6,09
2020	-4,85
2021	4,29
2022*	6,51

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2023
**) data sementara*

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dilihat dari sisi penawaran, pada tahun 2022, dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih terkontraksi yakni lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Pertumbuhan tertinggi dikontribusi oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,14 persen dan Jasa Lainnya sebesar 13,26 persen. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya tumbuh pada kisaran 8 persen yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,48 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (8,03 persen), diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor (6,95 persen), Industri Pengolahan (6,55 persen), diikuti Kontruksi (6,40 persen), dan Jasa Perusahan (5,75 persen) dimana lapangan usaha tersebut tumbuh pada kisaran 6 persen selama tahun 2022. Sisanya tumbuh kisaran kurang dari 5 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2022 yakni Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar -1,98 persen.

c. Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar 6,59 persen, yang lebih tinggi dibanding inflasi tahun sebelumnya yakni 2,71 persen. Peningkatan inflasi tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni meningkatnya harga komoditas global yang berdampak terhadap harga-harga produk dalam negeri. Di samping itu, meningkatnya inflasi juga merefleksikan kenaikan harga akibat tingginya permintaan, semakin tinggi permintaan mencerminkan semakin bertambah pula aktivitas ekonomi yang berjalan. Artinya, meningkatnya inflasi Kota

Surabaya merefleksikan kembali normalnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Gambar III.1
Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2018 – Tw I 2023 (persen)

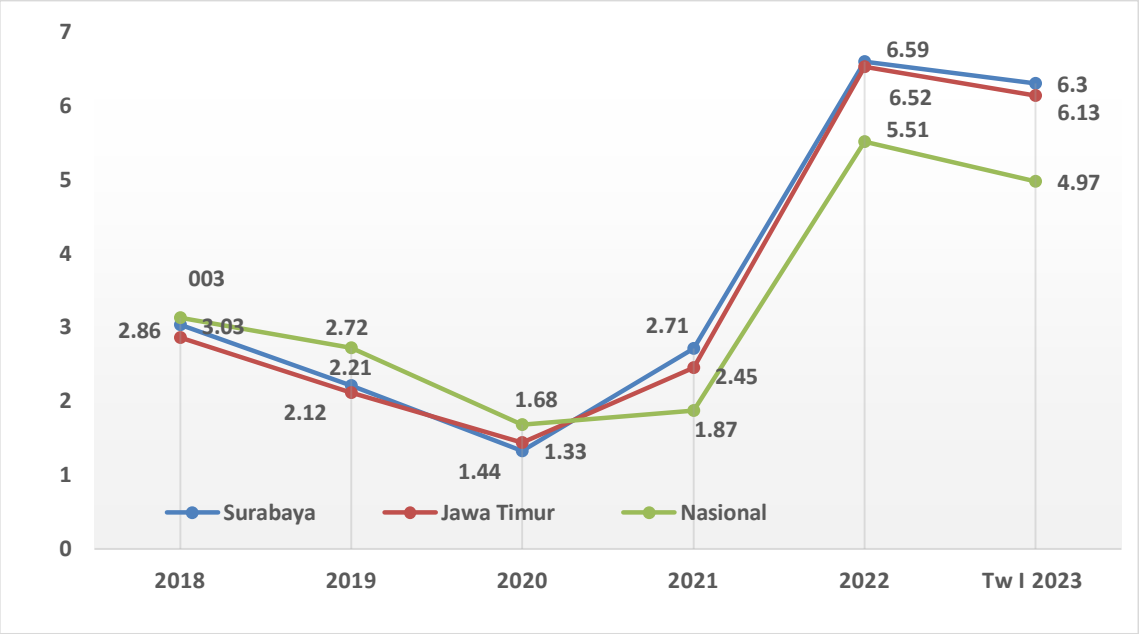

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, 2023, diolah

Dilihat dari kelompok disagregasinya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2022 dikontribusi oleh ketiga pembentuk inflasi, yakni inflasi inflasi kelompok harga diatur pemerintah (*administered price*), inflasi inti (*core inflation*) serta inflasi barang pangan bergejolak (*volatile food*). Inflasi kelompok harga diatur pemerintah disumbang oleh komoditas bensin, angkutan udara, dan rokok kretek filter. Bensin menjadi komoditas terbesar dalam memicu inflasi di Kota Surabaya dipengaruhi oleh nilai bobot yang tinggi serta besarnya permintaan bahan bakar dalam mendukung aktivitas masyarakat di Kota Surabaya. Oleh karena itu, adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar bensin secara otomatis akan berpengaruh besar meningkatkan inflasi Kota Surabaya. Untuk komoditas angkutan udara mengalami inflasi sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap jasa transportasi sebagai dampak relaksasi kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Lebih lanjut komoditas rokok kretek filter menjadi kontributor inflasi seiring kebijakan pemerintah pusat menaikkan cukai rokok yang selanjutnya direspon oleh pelaku usaha dengan penyesuaian harga secara bertahap.

Kelompok *volatile food* juga berkontribusi mendorong inflasi Kota Surabaya tahun 2022 untuk beberapa komoditas seperti beras dan telur ayam ras. Kelompok

volatile food tahun ini mendominasi menjadi penahan laju inflasi Kota Surabaya. Hal itu ditunjukkan dari 10 (sepuluh) komoditas penyumbang tertinggi inflasi Kota Surabaya selama tahun 2022, 7 (tujuh) komoditas merupakan kelompok barang *volatile food*. Komoditas tersebut yakni cabai rawit, cabai merah, tisu, jeruk, minyak goreng dan lada/merica. Deflasi yang terjadi disebabkan oleh melimpahnya stok disertai dengan stabilnya permintaan selama tahun 2022. Penurunan inflasi pada kelompok bumbu-bumbuan yang terjadi pada komoditas sejalan dengan penurunan harga yang didorong oleh melimpahnya stok pasca panen raya pada sentra sentra produksi.

Inflasi Kota Surabaya triwulan I tahun 2023 secara year on year sebesar 6,30 persen. Dari penyusunnya, kelompok yang memberikan andil besar terhadap inflasi Kota Surabaya antara lain kelompok transportasi (15,90 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (9,50 persen) dan kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,80 persen). Kelompok transportasi dikontribusi oleh sub kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi dan jasa angkutan penumpang yakni disumbang oleh komoditi bensin dan tarif angkutan umum. Untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran oleh dikontribusi oleh sub kelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yakni komoditi makanan dan minuman jadi. Sementara kelompok kelompok makanan, minuman dan tembakau dikontribusi oleh sub kelompok rokok dan tembakau yakni meningkatnya bea cukai rokok.

d. Investasi

Komponen investasi meupakan salah satu komponen terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB dari sisi pengeluaran. Peran investasi penting untuk menstimulus perekonomian Kota Surabaya sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel III.5
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2018 –Tahun 2022

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2018	Rp 3.190.545.316.800	Rp 1.549.687.145.643
2019	Rp 16.777.246.236.711	Rp 2.442.653.778.989
2020	Rp 16.356.162.161.751	Rp 1.258.527.150.916
2021	Rp 26.367.999.200.000	Rp 2.847.062.089.924
2022	Rp 32.360.553.538.640	Rp 2.537.261.412.162

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Nilai investasi Kota Surabaya tahun 2022 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 32.360.553.538.640. Sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 2.537.261.412.162. Sehingga total realisasi investasi Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar Rp34.897.814.950.802 atau meningkat sebesar 19,45 persen dibanding tahun 2021. Dengan demikian, PMA dan PMDN terus meningkat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

e. Ekspor

Kinerja ekspor non migas Kota Surabaya selama tahun 2022 menunjukkan kinerja positif, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai realiasi ekspor non migas Kota Surabaya sebesar US$20.735.891.937 atau menurun sebesar 8,98 persen. Lebih rendahnya realisasi ekspor non migas Kota Surabaya dipengaruhi oleh perlambatan kinerja ekonomi mitra dagang Kota Surabaya akibat ancaman resesi global. Disamping itu, adanya kebijakan untuk tarif ekspor maupun bea keluar untuk komoditas-komoditas tertentu turut menjadi faktor yang mempengaruhi turunnya kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2022.

Ditinjau dari komoditasnya, komoditas perhiasan/permata menjadi komoditas tertinggi yang diminati para importir selama tahun 2021. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya ekspor perhiasan/permata, yang mulanya sebesar

US$1.579.696.859 di tahun 2021 menjadi sebesar US$1.910.211.837 di tahun 2022. Kondisi Komoditas ekspor non migas tertinggi selanjutnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perdagangan Kota Surabaya terangkum dalam tabel 1.3. Jika dilihat komposisi, jenis komoditas ekspor non migas Kota Surabaya yang pada tahun 2021 hampir sama dengan jenis komoditas di tahun 2020 namun variasi besaran nilainya yang berbeda.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja impor non migas Kota Surabaya. Realisasi kinerja impor non migas Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar US$21.466.323.294 sementara realiasi pada tahun 2021 menunjukkan angka yang lebih rendah yakni US$19.568.405.393. Artinya, sepanjang tahun 2022 kinerja impor Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 8,84 persen dibanding tahun 2021. Jika dilihat dari komposisinya, komoditas tertinggi masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana komoditas impor non migas Kota Surabaya mayoritas merupakan barang modal maupun inventori bahan baku serta barang konsumsi yang dipenuhi dari luar daerah maupun luar negeri. Adanya peningkatan nilai realisasi impor Kota Surabaya tahun 2022 dapat merefleksikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Surabaya pada tahun 2022 lebih produktif dibanding pada tahun 2022 yang ditunjukkan dari permintaan para pelaku usaha akan input produksi yang menunjang kebutuhan produksi selama tahun 2022.

Tabel III.6
Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

Nilai/Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (US$)	18,120,064,879	17,278,974,907	17,278,974,907	22,780,677,395	20.735.891.937
Impor (US$)	17,368,048,068	15,382,235,848	15,382,235,848	19,568,405,393	21.466.323.294

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2023

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2020 mempunyai tren meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,79 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara

lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (outsourcing), dan faktor pemutusan hubungan kerja yang utamanya banyak terjadi ketika pandemi Covid-19 di tahun 2020- 2021

Berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 7,62 persen dari yang sebelumnya sebesar 9,68 persen pada tahun 2021 atau turun sebesar 2,06 persen. Penurunan TPT Kota Surabaya yang cukup signifikan disebabkan oleh kebijakan pengurangan pengangguran khususnya difokuskan pada pengangguran akibat Covid-19. Penurunan ini merupakan sinyal efektivitas kebijakan yang diterapkan di Kota Surabaya sehingga membuat penduduk angkatan kerja yang sebelumnya terdorong keluar dari pasar kerja, dapat kembali terserap kdalam kategori penduduk yang bekerja dengan kriteria paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir.

Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, nilai TPT Kota Surabaya tahun 2021 didominasi oleh penduduk berpendidikan SMA ke atas. Mutu pendidikan tenaga kerja erat kaitannya dengan nilai produktivitas yang dihasilkan pada suatu wilayah, yakni semakin tinggi tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, semakin tinggi nilai produktivitas yang dihasilkan.

Tabel III.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2021 - 2022

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2018	6,12%
2019	5,87%
2020	9,79%
2021	9,68%
2022	7,62%

Sumber data: BPS Jawa Timur, 2023

3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2023 dan Tahun 2024

Target sasaran pembangunan ke depan ditetapkan menuju ke arah pemulihan yang lebih kuat. Pemulihan diharapkan dapat mengembalikan laju perekonomian kembali ke jalur potensial prapandemi. Sejak pertengahan tahun 2021 hingga akhir tahun 2022, kondisi perekonomian Kota Surabaya trus tumbuh positif dan mengalami pemulihan yang terus menguat secara gradual. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 4,29 persen yang sebelumnya terkontraksi tajam di tahun 2020 sebesar -4,85 persen. Hingga akhir tahun 2022, perekonomian Kota Surabaya trus tumbuh positif mencapai 6,51 persen. Dengan melihat perkembangan terkini, menjadi sangat besar potensialnya untuk dapat kembali ke jalur potensial sebelum terjadi pandemi.

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan lebih kuat dibanding sebelumnya, yakni dikisaran 5,90 persen dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang terjadi. Sasaran pembangunan yang masih difokuskan dalam ragka pemulihan ekonomi menjadi program keberlanjutan pemerintah yang ditargetkan. Di tahun 2023 tekanan dampak Covid-19 juga diperkirakan kecil seiring dengan peralihan status dari pandemi menjadi endemi. Optimisme tersebut dilatarbelakangi oleh faktor-faktor, bergeraknya sektor-sektor riil, kebijakan yang secara mikro dan langsung menyentuh masyarakat terdampak pandemi, ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator-indikator ekonomi yang lain. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2023 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian, utamanya untuk konsumsi *leisure* yang pada tahun sebelumnya tertahan akibat penerapan kebijakan penanganan Covid-19.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha potensial Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih diperkirakan menjadi sektor yang berkontribusi besar menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selain itu, peralihan status dari pandemi menjadi endemi berdampak terhadap meningkatnya mobiltas masyarakat dan khususnya aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif tersebut turut mendorong

kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya.

Selanjutnya, kondisi perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2024 juga diperkirakan semakin baik. Di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan tumbuh di kisaran yakni dikisaran 6,1 persen dengan mempertimbangkan hasil evaluasi 2022 serta ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi perekonomian global dan mungkin terjadi di masa mendatang. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai menjadi sangat penting untuk diprioritaskan sehingga stabilitas dan keberlanjutan sasaran pembangunan pasca pandemi Covid-19 dapat terus dilaksanakan.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 diperkirakan searah dengan sasaran inflasi nasional yakni inflasi pada rentang nilai 3,0 ± 1 persen dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang berpengaruh signifikan. Sementara untuk tahun 2024, inflasi Kota Surabaya diperkirakan lebih terkendali sehingga inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 diperkirakan pada kisaran 2,5 ± 1 persen. Perkiraan tersebut juga telah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2024. Memperhatikan prospek perekonomian Kota Surabaya di masa yang akan datang, arah kebijakan ekonomi yang disusun diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan.

Seiring landainya penyebaran kasus Covid-19 dan momentum pemulihan ekonomi yang cepat di tahun 2022 semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tambah positif di tahun 2023 dan tahun 2024. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Bauran kebijakan transformasi ekonomi yang responsive dan adaptif perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2024 sebagai berikut :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektifitas Kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggarann belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli

masyarakat tetap terjaga;

3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produk komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui standarisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktifitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui Upaya kolaboratif dan optimaliasi teknologi informasi;
7. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan baik bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. Menjaga iklim investasi melalui melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi local melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan

Mengacu pada tema pembangunan nasional dalam RKP Nasional Tahun 2024 yaitu ***"Mempercepat Tranformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** dengan prioritas nasional sebagai berikut :

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5) Memperkuat insfrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transforasi pelayanan publik;

Berikutnya pada Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tema pembangunan tahun 2024 adalah ***"Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transfromasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak"***, dengan priortas pembangunan sebagai berikut :

1) Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2) Penguatan konektifitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4) Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5) Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7) Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro dan diselaraskan dengan arah kebijakan tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ***"Peningkatan Kualitas Tata Kota dan Sistem Transportasi Terpadu Pendukung Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional dan Daerah Sekitar"***. Berdasarkan masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Musrenbang, kebijakan yang tertuang pada rancangan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, maka tema pembangunan pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 yaitu "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia***". dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata dan padat karya;
2. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
7. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12).

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, Pemerintah Kota Surabaya mempersiapkan penyesuaian regulasi pemungutan pendapatan pada tahun 2022 dan 2023.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah tediri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2024 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek terdiri dari:

   a. Kebijakan Pajak Daerah:

1) Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah
2) Penganggaran pajak daerah dengan objek kepemilikan dan atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat
3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi
4) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak
5) Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital.

b. Kebijakan Retribusi Daerah:
1) Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2) Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
3) Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu IMB melalui Perangkat Daerah penghasil dan Kecamatan/Kelurahan, supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan IMB dan membayar retribusi IMB
4) Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi
5) Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengupayakan kerjasama dengan pengelola parkir swasta
6) Meningkatkan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah dengan asuransi kesehatan swasta
7) Optimalisasi layanan RSUD denga layanan Kesehatan dan alat-alat kedokteran yang baru

c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:
   1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah
   2) Kebijakan pengganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain :
      a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah
      b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintahan Daerah
      c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan

d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah

3) Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada BUMD dan BUMN

d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
c) Hasil kerjasama daerah
d) Jasa giro
e) Hasil pengelolaan dana bergulir
f) Pendapatan bunga
g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
k) Pendapatan denda pajak daerah
l) Pendapatan denda retribusi daerah
m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
n) Pendapatan dari pengembalian
o) Pendapatan dari BLUD

p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya.

4) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota

2. Kebijakan Pendapatan Transfer yaitu:

a. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur dana transfer dari Pemerintah Pusat mulai diberlakukan pada tahun 2023. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam aturan tersebut

c. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

d. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan

memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :
   a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
   b. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
   c. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   d. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya
   f. Pengalokasian Dana BOS Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar negeri dan swasta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ada pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan bagian dari pendapatan transfer DAK Non Fisik

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berdasarkan data pendapatan daerah Kota Surabaya sebagaimana terlihat pada Tabel III.8.

Tabel III.8
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
Pendapatan Asli Daerah					
Pajak Daerah	3.649.732.215.700	4.157.521.611.124	5.125.303.235.634	4.651.918.231.958	4.694.574.595.705
Retribusi Daerah	235.591.662.263	269.599.560.046	437.737.274.643	353.079.192.224	338.396.290.695
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	160.867.394.117	233.686.218.755	222.512.698.894	145.841.912.892	269.944.837.076
Lain-Lain PAD yang sah	681.089.357.590	653.887.867.869	810.360.255.515	745.593.643.910	653.599.196.852
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**4.727.280.629.670**	**5.314.695.257.794**	**6.595.913.464.686**	**5.896.432.980.984**	**5.956.514.920.328**
Pendapatan Transfer					
Transfer Pemerintah Pusat	**2.202.536.032.336**	**2.516.292.582.738**	**2.568.523.030.000**	**2.829.451.247.564**	**2.452.416.584.446**
1) Dana Perimbangan	2.154.338.429.336	2.475.155.880.738	2.544.434.929.000	2.788.314.545.564	2.404.218.981.446
2) Dana Insentif Daerah	48.197.603.000	41.136.702.000	24.088.101.000	41.136.702.000	48.197.603.000
Transfer Antar - Daerah	**1.016.416.082.323**	**960.320.838.950**	**1.440.497.069.513**	**1.519.971.069.006**	**1.035.984.967.108**
1) Pendapatan Bagi Hasil	1.013.160.682.323	939.286.438.950	1.439.345.385.270	1.516.127.755.227	1.032.094.550.670
2) Bantuan Keuangan	3.255.400.000	21.034.400.000	1.151.684.243	3.843.313.779	3.890.416.438
Jumlah Pendapatan Transfer	**3.218.952.114.659**	**3.476.613.421.688**	**4.009.020.099.513**	**4.349.422.316.570**	**3.488.401.551.554**
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
Pendapatan Hibah	15.255.315.784	0	0	0	0
Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0
Pendapatan Lainnya	365.390.016.114	0	0	0	405.436.743.546
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**380.645.331.898**	**0**	**0**	**0**	**405.436.743.546**
Jumlah Pendapatan	**8.326.878.076.226**	**8.791.308.679.482**	**10.604.933.564.199**	**10.245.855.297.554**	**9.850.353.215.428**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berikut adalah rekapitulasi pendapatan per OPD Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 seperti tersaji dalam tabel.

Tabel III.9
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Per OPD
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No	Nama OPD	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	Dinas Kesehatan	2.509.328.000	147.501.762.677	127.651.539.432	136.195.857.765	133.545.354.350
2	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	327.392.879.016	209.370.718.921	292.316.171.975	292.316.171.975	286.627.415.909
3	RSUD Bhakti Dharma Husada	204.992.688.699	167.920.381.475	190.946.366.267	160.187.456.740	157.070.053.553
4	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	0	621.111.831	737.805.597	917.808.588	899.947.143
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.590.000	248.226.000	13.000.000	600.000.000	588.323.418
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	3.848.389.155.761	4.456.118.970.963	4.677.909.373.563	4.401.687.134.154
7	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	99.756.045.281	0	0	0	0
8	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	4.713.307.090	0	0	0	0
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	91.645.170.368	101.733.121.281	198.458.489.923	145.797.229.482	142.959.874.066
10	Dinas Perhubungan	38.663.359.372	46.291.695.558	81.112.181.095	48.156.358.757	47.219.189.335
11	Dinas Lingkungan Hidup	0	79.520.392.415	103.108.039.792	95.970.154.571	94.102.482.333
12	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	88.274.192.166	0	0	0	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.459.620.000	1.066.450.000	360.000.000	360.000.000	352.994.051

No	Nama OPD	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
14	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.399.749.300	490.218.000	6.958.043.183	5.400.957.933	5.295.850.056
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	0	3.248.373.740	2.976.092.991	0	0
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	654.215.020	0	0	0	0
17	Dinas Perdagangan	2.182.974.904	0	0	0	0
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	0	7.087.935.150	6.622.290.000	6.882.120.000	6.748.187.274
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	948.884.500	0	0	0	0
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	244.280.000	0	0	0	0
21	Badan Pendapatan Daerah	0	4.177.250.689.693	5.136.854.234.549	4.674.608.224.180	4.572.713.599.065
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	7.457.577.292.611	0	0	0	0
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.485.900	5.319.900	0	0	0
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	444.014.000	563.127.080	700.338.432	553.584.000	542.810.719
Jumlah		**8.326.878.076.226**	**8.791.308.679.482**	**10.604.933.564.199**	**10.245.855.297.554**	**9.850.353.215.427**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Arah kebijakan dalam Dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada berbagai aspek perlu ditindaklanjuti dengan pemulihan kinerja pada berbagai sektor utamanya pada pemulihan ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan dan sistem sosial kemasyarakat. Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2024 yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia"*** diprioritaskan untuk :

1) Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya;
2) Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu;

3) Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
4) Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5) Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah;
6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
7) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik.

Belanja Daerah memperhatikan hal-hal khusus lain, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal Pasal 146 Ayat (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Total belanja pegawai sebesar Rp2.772.417.810.165,- dan Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp227.007.642.000,- sehingga belanja Pegawai setelah dikurangi Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp2.545.410.168.165,- atau 24,31%;
2. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Jumlah alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.206.464.862.727,- atau 21,07%;
3. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting. Jumlah alokasi anggaran fungsi kesehatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.283.238.056.153,- atau 29,02%;
4. Mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebesar 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU

tambahan. Jumlah alokasi anggaran kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebesar Rp 522.835.245.179,- atau 5,4%;

5. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal
6. Mengalokasikan upaya penataan kota yang berkualitas melalui penanganan masalah genangan dan pencegahan banjir
7. Pengintegrasian penataan kota dan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penataan penerangan jalan umum
8. Pengalokasian anggaran sebagai keberlanjutan pekerjaan tahun jamak berupa pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur
9. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dialokasikan belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp93.725.238.166,- dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
10. Pengalokasian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp37.000.000.000,- untuk memenuhi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang
11. Pengalokasian anggaran penyusunan RPJP Kota Surabaya Tahun 2025-2045, RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030 serta RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2030 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
12. Pengalokasian anggaran untuk mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui dukungan anggaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022, Target Tahun 2023 serta proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025 maka Belanja Daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel III.9

Tabel III.9
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
Belanja Operasi					
Belanja pegawai	2,353,630,642,870	2,460,367,884,874	2,786,458,797,519	2,772,417,810,165	2,852,904,019,221
Belanja barang dan jasa	3,911,678,188,866	4,892,062,090,433	5,444,798,389,433	4,882,964,409,307	5,589,036,330,709
Belanja hibah	506,066,200,592	327,011,169,427	340,141,820,479	445,511,977,459	234,611,324,376
Belanja bantuan sosial	58,944,000	0	103,187,106,000	50,559,850,002	0
Jumlah Belanja Operasi	**6,771,433,976,328**	**7,679,441,144,734**	**8,674,586,113,431**	**8,151,454,046,933**	**8,676,551,674,306**
Belanja Modal					
Belanja tanah	171,876,414,740	181,872,132,600	310,666,443,965	294,227,417,802	352,003,948,596
Belanja peralatan dan mesin	163,131,234,366	406,539,524,326	398,128,352,500	238,251,641,310	375,695,089,678
Belanja gedung dan bangunan	345,118,654,570	344,055,978,498	719,377,979,408	594,593,488,688	668,815,758,202
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	329,418,247,818	827,064,729,888	1,151,846,187,540	1,131,520,336,609	844,720,362,284
Belanja aset tetap lainnya	6,791,951,896	4,222,263,480	12,036,390,631	12,332,888,143	20,252,778,090
Belanja aset lainnya	0	2,275,837,736	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	**1,016,336,503,390**	**1,766,030,466,528**	**2,592,055,354,044**	**2,270,925,772,552**	**2,261,487,936,850**
Belanja Tidak Terduga					
Belanja tidak terduga	28,251,407,155	1,702,578,492	37,000,000,000	37,000,000,000	15,000,000,000
Jumlah Belanja Tidak Terduga	**28,251,407,155**	**1,702,578,492**	**37,000,000,000**	**37,000,000,000**	**15,000,000,000**
Belanja Transfer					
Belanja bagi hasil	3,055,434,672	1,062,588,930	750,000,000	0	750,000,000
Belanja bantuan keuangan	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000
Jumlah Transfer	**3,055,434,672**	**1,062,588,930**	**1,250,000,000**	**500,000,000**	**1,250,000,000**
Jumlah Belanja	**7,819,077,321,546**	**9,448,236,778,684**	**11,304,891,467,475**	**10,459,879,819,485**	**10,954,289,611,156**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan,diolah tahun 2023

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2024 diperoleh dari SILPA dan diarahkan untuk penempatan modal / penyertaan modal bagi badan usaha milik negara / daerah dan / atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Sisa penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada BUMD sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan di tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp9.929.481.387,- yang akan dialokasikan pada penyertaan modal Perusahaan Daerah Pasar Surya.

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2021 – 2025) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.10

Tabel III.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
Penerimaan Daerah					
Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	824.424.505.647	157.509.406.446	759.957.903.276	223.954.003.318	1.103.936.395.729
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**824.424.505.647**	**157.509.406.446**	**759.957.903.276**	**223.954.003.318**	**1.103.936.395.729**
Pengeluaran Daerah					
Penyertaan modal	0	10.000.000.000	60.000.000.000	9.929.481.387	0
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**10.000.000.000**	**60.000.000.000**	**9.929.481.387**	**0**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur maka anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) *fiscal engineering* yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*. (2) *Creative Financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
    a. Peningkatan kerjasama swasta dan pemerintah melalui kerjasama pemerintah swasta (KPS) / *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk kerjasama PKS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerjasama seperti *Build Operate and Transfer* (BOT), *Build Transfer Operate* (BTO) maupun bentuk lainnya.

b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR dipandang potensial untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pegolahan, dimana sektor industri pengolahan merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya sehingga telah dibentuk Forum CSR Kota Surabaya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pada tahun 2022, realisasi CSR Kota Surabaya sebesar Rp321.607.059.658,- yang melibatkan 18 perusahaan.

2. Pengembangan kerjasama antar daerah. Kerjasama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerjasama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
3. Kerjasama kemitraan dengan lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
4. Pengembangan kerjasama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, RKP Tahun 2024 serta mendukung pencapaian visi dan misi Presiden-Wakil Presiden dan program strategis Nasional.

RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut mengacu pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ***"Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan".*** Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi

lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel IV.1

Tabel IV.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,1%	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,01%
		Indeks Gini	0,319		Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,96%
					Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	5,37%
					Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,26%
					Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	24,90%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5%	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6,30%
		Persentase Penduduk Miskin	4,01%		Persentase tenaga kerja yang terserap	22,01%
					Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,81
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	83,50	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	79,33
					Angka Harapan Hidup	74,53
					Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,22%
					Skor Pola Pangan Harapan	95,20
				Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,75
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	82,13	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran	Indeks Budaya Lokal	89,70
					Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	64,94
					Indeks Kepedulian Sosial	89,30

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
				terhadap kelestarian lingkungan hidup		
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,734	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,820
					Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,625
					Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,728
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	68,75	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,09
					Indeks Kualitas Udara	90,34
					Indeks Kualitas Lahan	42,72
					Indeks Persampahan	78,13
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	84,21	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	84,02
					Opini BPK	WTP
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,3 (Baik)
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	90,16%
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,87	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,88
				Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,864

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025, strategi dan penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, RKP Tahun 2024 dan Program Strategis Nasional serta strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kota Surabaya yang telah tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat;
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif;
3. Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistim Transportasi Perkotaan Terpadu (*Integrated Transportation System)*;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024, memperhatikan strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi pembangunan ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong",*** dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Gambar IV.1
Visi, Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020

Sembilan Nawacita Misi Presiden terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi pelaksanaan Sembilan Nawacita, Presiden memberikan 5 (lima) arahan, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi misi pembangunan, selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang ingin dicapai antara lain:

1) Tingkat Kemiskinan 6,0-7,0%
2) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,6-4,3 %
3) Rasio Gini 0,360-0,374
4) Indeks Pembangunan Manusia 75,54
5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,3 %
6) Pertumbuhan investasi 6,6-7,0%
7) Tingkat Inflasi 2,7%
8) Rasio Pajak 10,7-12,3 %PDB
9) Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 6,6-7,0%
10) Pertumbuhan Ekspor Non Migas 7,4%
11) Share Industri Pengolahan 21%
12) Defisit Transaksi Berjalan 1,7% ODB

Tema yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah ***"Mempercepat Tranformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan".*** Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
   a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, yang didukung dengan program *Universal Health Coverage* yang telah dicapai Kota Surabaya sejak tahun 2022 yang dianggarkan melalui Dinas Kesehatan
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
b. Insidensi tuberkulosis: 297 per 100.000 penduduk;
c. Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria: 95 kabupaten/kota;
d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kabupaten/kota;
e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yang dilakukan melalui pencegahan penyakit menular dan tidak menular, promosi kesehatan serta penguatan surveiilance yang dianggarkan melalui Dinas Kesehatan
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0) melalui penyediaan pendidikan non formal kesetaraan, BOS dan BOPDA Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan;
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting melalui intervensi terpadu terhadap Balita Stunting, pencegahan terhadap Ibu hamil KEK, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,9%- 20,5% per Target RPJMN 21,0%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

   - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter yang didukung melalui kemudahan akses perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pengawasan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM yang didukung melalui fasilitasi dalam memperolah Nomor Induk Berusaha, akses permodalan dan pemasaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;

- MP Destinasi Pariwisata Prioritas yang didukung melalui pengembangan kawasan wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
- MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), di Kota Surabaya belum terdapat *food estate* dukungan diberikan melalui upaya ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- MP Transformasi Digital yang didukung dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik utamanya penguatan pada pelayanan berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
   b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,08 miliar.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM yang didukung melalui fasilitasi dalam memperolah Nomor Induk Berusaha, akses permodalan dan pemasaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 19,5%

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang didukung melalui perizinan limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup;
   - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi. Belum terdapat program khusus dalam dukungan energi terbarukan, namun penurunan emisi GRK dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah pada Dinas Lingkungan Hidup.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupatenkota: 95%/74%/64%;

b. Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
c. Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
d. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86 % akses layak termasuk 12 % akses aman;
e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 12 lokasi;
f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.400 kwh/kapita.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);
- MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga);
- MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. Kewenangan terhadap pengelolaan Pelabuhan utama terpadu tidak pada lingkup Pemerintah Daerah setingkat Kabupaten/Kota.

7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

   - MP Ibu Kota Nusantara;
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

   - Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka

tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 yang ingin dicapai antara lain:

1) Pertumbuhan Ekonomi 5,3%-5,7%
2) Tingkat Kemiskinan 6,5%-7,5%
3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,0%-5,7%
4) Rasio Gini 0,374-0,377
5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02
6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27%

Serta indikator lainnya yaitu:

1) Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110
2) Nilai Tukar Petani (NTP) 105-108

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 memperhatikan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024.

Visi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"

Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Sedangkan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi pembangunan adalah:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Strategi Pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Guna mendukung pencapaian keempat Misi di atas, maka dilakukan melalui serangkaian Strategi Pembangunan sebagai berikut:

1. **Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit dalam Pembangunan;**
2. **Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (*uncertain future*);**
3. **Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengarusutamaan Gender), perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (*Right Based Development);***
4. **Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya (*Development as Freedom*);**
5. **Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama; dan**
6. **Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis *Information Communication Technology (ICT).***

Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Mengacu pada Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan di atas, maka Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam ilustrasi milestone di bawah ini :

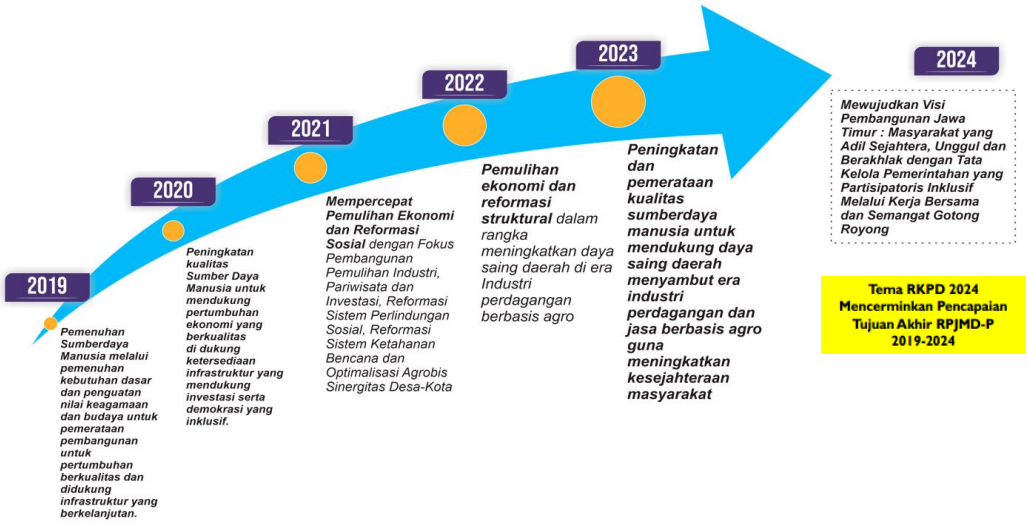

Gambar IV.2 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 diarahkan sesuai dengan tema pembangunan dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yakni

"***Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak***".

Tema dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dijabarkan pada prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrstruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayananan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Surabaya

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024 adalah "***Mempercepat Tranformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan***", tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 "***Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Insklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak***", serta saran masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 15 Maret 2023, maka Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2024 yaitu "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjuta*****n** ***serta Peningkatan Sumber Daya Manusia***". Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, telah diselaraskan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yakni "Peningkatan

kualitas tata kota dan sistem transportasi terpadu pendukung sektor utama yang sinergi dengan kebijakan nasional dan daerah sekitar", mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

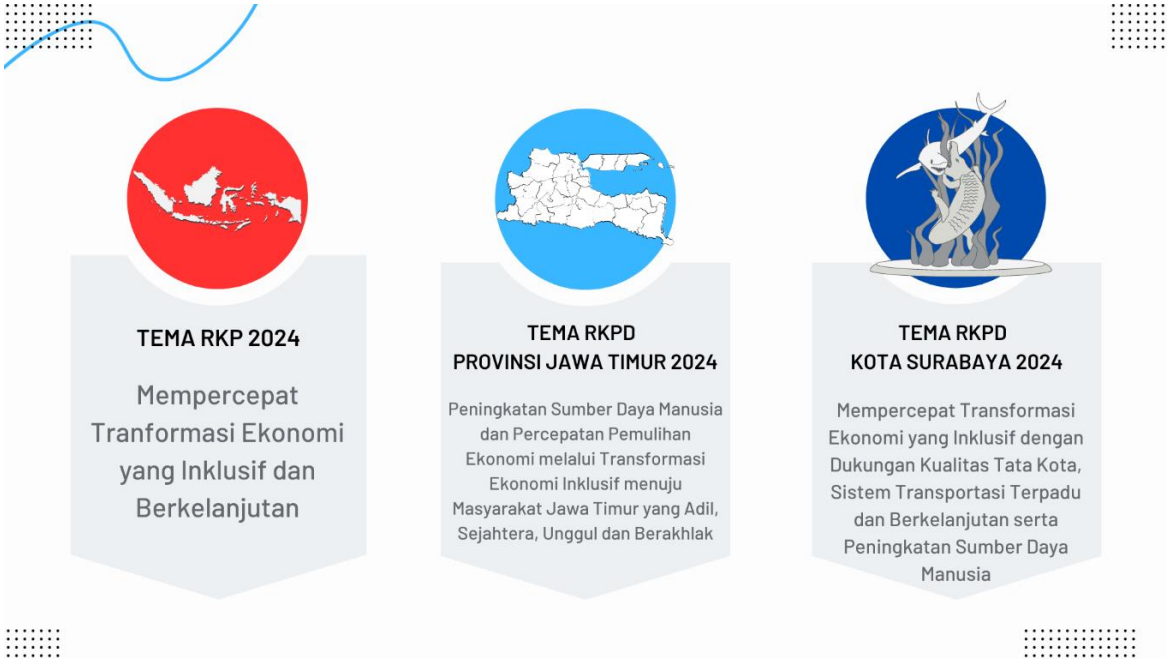

Adapun prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya**

   Pandemi Covid-19 dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dengan diberlakukannya pembatasan pergerakan manusia di masa puncak Pandemi Covid-19 menimbulkan efek negatif bagi berbagai sektor dunia usaha yang berakibat terganggunya kondisi perekonomian masyarakat. Kendati Presiden Joko Widodo telah mencabut status pandemi Covid-19, namun pemulihan perekonomian masyarakat masih membutuhkan dukungan dan stimulasi-stimulasi dari pemerintah. Kebijakan serta inovasi yang akan dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut adalah :

   1) Revitalisasi pasar rakyat / pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya;
   2) Fasilitasi pemasaran produk berbasis digital (*e-peken*) bagi pelaku usaha mikro termasuk usaha toko kelontong dan sentra wisata kuliner;

3) Pelatihan, pembinaan dan pendampingan pedagang di sentra wisata kuliner dan pasar rakyat;
4) Fasilitasi pemasaran produk pelaku usaha mikro di Surabaya Kriya Gallery dan turut hadir disetiap festival dan parade;
5) Meningkatkan keterlibatan pelaku usaha mikro dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada *e-purchasing* di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
6) Sinkronisasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sesuai dengan ketersediaan peluang kerja dan kebutuhan perusahaan-perusahaan;
7) Optimalisasi pemanfaatan tanah dan bangunan aset milik Pemerintah Kota untuk kegiatan ekonomi masyarakat;
8) Bimbingan teknis untuk pemberdayaan masyarakat pada kegiatan ekonomi masyarakat;
9) Penataan, *branding* dan promosi kawasan wisata untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di Kota Surabaya;
10) Penguatan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha di bidang pariwisata;
11) Pelaksanaan festival dan parade sebagai ajang promosi wisata.

2. Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu

Kebijakan serta inovasi yang akan dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Optimalisasi penataan ruang melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2) Pengembangan sistem transportasi umum yang aman, nyaman, handal dan terjangkau;
3) Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya;
4) Pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur untuk kepentingan umum;
5) Optimalisasi dan peningkatan kuantitas pemasangan penerangan jalan umum;
6) Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta konektivitas antar wilayah;
7) Peningkatan sarana dan prasarana drainase kota yang terpadu;

Sebagai dukungan terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo – Lamongan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, telah disusun program yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

a) Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk mendukung proyek pembangunan jalan baru *radial road* di kawasan raya lontar sehingga dapat mengurangi kemacetan;
b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan untuk mendukung Transportasi Publik di Gerbangkertosusila;
c) Program Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk mendukung program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR di Kota Surabaya.

3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Peningkatan jangkauan akses layanan pendidikan khususnya untuk keluarga miskin melalui pemberian beasiswa bantuan biaya pendidikan, tebus ijazah, pemberian seragam, sepatu serta biaya penunjang pendidikan lainnya;
2) Pemerataan kualitas pendidikan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung serta pengembangan inovasi bidang Pendidikan, seperti: Sekolahe Arek Suroboyo, Surabaya Mengajar, Sinau dan Ngaji Bareng, serta program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan;
3) Pengembangan Kota Surabaya sebagai barometer nasional PAUD Holistik Integratif;

4) Peningkatan jangkauan akses layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Baru dengan unggulan ibu dan anak;
5) Percepatan vaksinasi booster untuk memutuskan mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan;
6) Pengembangan 9 (sembilan) tatanan Kota Sehat Surabaya serta penguatan Sistem Kesehatan Kota dengan penguatan kolaborasi pemerintah dan masyarakat melalui Kader Surabaya Hebat guna melakukan deteksi dini atas permasalahan kesehatan di masyarakat serta melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk melakukan pendampingan dan penanganan pada Ibu Hamil Resiko Tinggi (Risti) dan Balita *Stunting*;
7) Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempermudah akses layanan kesehatan masyarakat baik di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut;
8) Pencegahan, pengendalian, dan penanganan Penyakit Menular serta Penyakit Tidak Menular melalui peningkatan upaya promosi kesehatan, surveilans kesehatan, deteksi dini resiko penyakit tidak menular dan pemberian imunisasi dasar lengkap;
9) Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui berbagai inovasi intervensi dan sinergitas antar pemangku kepentingan;
10) Pengembangan Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak Nasional dan Kota Layak Anak Dunia dengan mengutamakan pemenuhan hak anak serta peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan;
11) Pengembangan inovasi di bidang Pendidikan kesetaraan, antara lain: pengembangan sanggar kegiatan belajar bagi anak tidak mampu yang putus sekolah, program kejar paket C plus yang merupakan program kejar paket C dengan sertifikat uji kompetensi kursus dan pelatihan sehingga lulus dapat langsung mendapatkan pekerjaan, gerakan literasi finansial, pelatihan robotika, pembentukan forum komunikasi tutor pengajar pendidikan kesetaraan paket A B dan C, serta pembuatan bank soal standar asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan sehingga kelulusan peserta didik kesetaraan terstandarisasi;

12) Rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan alat disabilitas bagi penyandang disabilitas sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-haknya.

4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Penataan dan pengembangan kawasan dan bangunan cagar budaya;
2) Pelaksanaan festival dan parade dengan tema kebudayaan;
3) Pemberdayaan seniman dan budayawan;
4) Pengembangan dan akreditasi museum;
5) Penanaman nilai moral kebangsaan dan toleransi dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika kepada pemuda melalui sekolah kebangsaan serta festival dan parade dengan tema sejarah dan kebangsaan;
6) Pengembangan iklim industri ekonomi kreatif dengan menyediakan ruang / sarana prasarana rumah kreatif serta kegiatan pelatihan dan tampilan hasil karya ekonomi kreatif.

5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Penerapan *urban farming* di masyakat dengan memanfaatkan lahan perkarangan menjadi lahan produktif budidaya pertanian perkotaan;
2) Penerapan diversifikasi pangan di masyarakat untuk menunjang pemenuhan gizi;
3) Pemanfaatan lahan aset pemerintah kota menjadi lahan produktif budidaya pertanian, peternakan dan perikanan;
4) Pelaksanaan monitoring ketersedian dan harga bahan pangan segar;
5) Penguatan kerjasama dengan daerah penghasil pangan untuk memastikan kelancaran distribusi pangan di Kota Surabaya;
6) Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar di Kota Surabaya.

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Peningkatan kualitas sarana pengolahan air limbah rumah tangga;

2) Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
3) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan layak huni;
4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hemat energi dan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan;
5) Peningkatan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam/ bencana non alam.
6) Sampah 3R;
7) Peningkatan penyediaan RTH publik;
8) Revitalisasi sempadan sungai di Kota Surabaya;
9) Sosialisasi pengelolaan air limbah dan sampah terhadap masyarakat dan kegiatan usaha;
10) Peningkatan pemantauan dan pengawasan pada stasiun pemantauan sebagai pemberi informasi kualitas udara di Kota Surabaya;
11) Sosialisasi program kampung iklim untuk memberikan pengetahuan penghematan energi dan EBT;
12) Pelaksanaan *Car Free Day* sebagai upaya mengurangi tingkat polusi udara di Kota Surabaya;
13) Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor secara rutin dan berkala.

7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Pemantapan pelayanan publik berbasis digital;
2) Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3) Peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan dan penguatan partisipasi masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4) Peningkatan kualitas pelayanan utamanya pada perkantoran yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;
5) Pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme melalui penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan.

Tabel IV.2
Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

RKP 2024	RKPD PROV JATIM 2024	ISU STRATEGIS	RKPD KOTA SURABAYA 2024
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui pengembangan ekonomi inklusif	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Pengembangan infrastruktur hijau dan sistim transportasi perkotaan terpadu (integrated transportation system)	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan bermartabat	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Mewujudkan harmoni sosial, keamanan dan ketentraman wilayah serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui pengembangan ekonomi inklusif.	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan harmoni sosial, keamanan dan ketentraman wilayah serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Jawa Timur	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik

Tabel IV.3
Keselerasan Indikator Makro Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

Indikator Makro	Target Kota Surabaya	Target Provinsi Jawa Timur*	Target Nasional**
Persentase Penduduk Miskin	4,01%	9,90% – 8,80%	6,50% - 7,50%
Indeks Pembangunan Manusia	83,50	72,85 – 74,07	73,99 – 74,02
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,1%	4,71% – 6,34%	5,3% – 5,7%
Indeks Gini	0,319	0,2943 – 0,3678	0,374 – 0,377
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5%	4,95% – 3,81%	5,0% – 5,7%

** : RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024*
*** : RKP Tahun 2024*

Arahan pengembangan wilayah untuk Kota Surabaya tahun 2024 mempedomani RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024, yaitu:

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, real estate, jasa kesehatan dan kegiatan sosial);
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan) menjadi Sektor Unggulan;
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri dan pergudangan) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, jalan tol);
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional;
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, Open Defication Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak;
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana banjir;

8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender;
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan industri di Kota Surabaya;
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024;
13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah;
14. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas.

4.2.3 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

Pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 dijabarkan dalam Tabel IV.4 berikut ini yang memuat indikator sasaran beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dari setiap indikator sasaran tersebut.

Tabel IV.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2024
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,01%
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,96%
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	5,37%
			Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,26%
			Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	24,90%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6,30%
			Persentase tenaga kerja yang terserap	22,01%
			Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,81
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religious, berbudaya dalam bingkai kebhinekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	79,33
			Angka Harapan Hidup	74,53
			Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,22%
			Skor Pola Pangan Harapan	95,20
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,75

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2024
		dan anak		
	Pembentukan karakter masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Budaya Lokal	89,70
			Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	64,94
			Indeks Kepedulian Sosial	89,30
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,820
			Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,625
			Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,728
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,09
			Indeks Kualitas Udara	90,34
			Indeks Kualitas Lahan	42,72
			Indeks Persampahan	78,13
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	84,02
			Opini BPK	WTP
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,3 (Baik)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	90,16%
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks ketentraman dan ketertiban kota	0,88
		Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,864

4.2.4 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan

Dalam menjalankan program Kota Surabaya melalui serangkaian kegiatan dan sub kegiatan telah seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kota Surabaya. Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 telah sesuai dengan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana tindaklanjut Radiogram Ditjen Bangda Kemendagri tanggal 19 Juni 2023 No. 600.2.1/7230/Bangda tentang Diseminasi Permendagri tentang RKPD Tahun 2024.

Tabel IV.5
Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
ketahanan bencana dan perubahan iklim	lingkungan hidup	sistem ketahanan bencana					
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
perubahan iklim							
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
bencana dan perubahan iklim	hidup	bencana	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindung Diri		
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
perubahan iklim					Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
perubahan iklim							
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
iklim			B3)		Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan	Peningkatan ketahanan	Peningkatan kualitas	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	bencana dan kualitas lingkungan hidup	lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PERSAMPAHAN		akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur	Peningkatan kemandirian	Peningkatan ketahanan	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Penangkapan Ikan di	Penjaminan Ketersediaan Sarana	Dinas Ketahanan Pangan dan	Dinas Ketahanan Pangan dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	pangan dan pengelolaan sumber daya energi	pangan dan pengendalian inflasi daerah	PERIKANAN TANGKAP	Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Usaha Perikanan Tangkap	Pertanian	Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur	Peningkatan kemandirian	Peningkatan ketahanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha	Dinas Ketahanan Pangan dan	Dinas Ketahanan Pangan dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	pangan dan pengelolaan sumber daya energi	pangan dan pengendalian inflasi daerah	PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertanian	Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	sumber daya energi	inflasi daerah	PERTANIAN				
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan dasar							
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
yang berkualitas dan berkeadilan	peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya					
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pariwisata	kawasan wisata, dan padat karya					
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan	Pemulihan ekonomi	Peningkatan produktivitas	PROGRAM HUBUNGAN	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Pengesahan Peraturan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	INDUSTRIAL	dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan bagi Perusahaan		Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berkeadilan	sektor sekunder dan pariwisata	pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya		Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pariwisata	kawasan wisata, dan padat karya					
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat	Pemulihan	Peningkatan	PROGRAM	Pengembangan	Pengembangan	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PENGEMBANGAN UMKM	Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Usaha Mikro	Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berkeadilan	nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya		Kabupaten/Kota			Pintu
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata,	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
		dan padat karya					
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	Pemulihan ekonomi kerakyatan	Peningkatan produktivitas ekonomi	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya		Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata	Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkeadilan	sekunder dan pariwisata	mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya					
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat	Pemulihan	Peningkatan	PROGRAM	Pelaksanaan Promosi,	Pemasaran dan	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berkeadilan	nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya		Kabupaten/Kota	Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENUNJANG	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BLUD		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENUNJANG	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BLUD		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENUNJANG	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BLUD		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENUNJANG	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BLUD		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	UMUM	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pembinaan Penyidik	Pengembangan	Satuan Polisi	Satuan Polisi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kapasitas dan Karier PPNS	Pamong Praja	Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintahan Daerah			
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pengelolaan e-	Pengembangan	Dinas Komunikasi	Dinas Komunikasi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	dan Informatika	dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur			yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Pintu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penerbitan Tanda	Fasilitasi Penerbitan	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur			Penjual Langsung Minum di Tempat			
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur			Kabupaten/Kota			
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Administrasi Tata	Pengelolaan	Sekretariat Daerah	Sekretariat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pemerintahan	Administrasi Kewilayahan		Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	RAKYAT				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pengelolaan	Pembinaan dan	Sekretariat Daerah	Sekretariat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengadaan Barang dan Jasa	Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur		KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	TUGAS DAN FUNGSI DPRD		DPRD		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Koordinasi	Koordinasi	Badan	Badan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur		KABUPATEN/KOTA		Daerah		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik		Daerah	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan Pengelolaan	Penagihan Pajak	Badan Pendapatan	Badan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pendapatan Daerah	Daerah	Daerah	Pendapatan Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik			Aparatur	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur			Fungsional	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Inspektorat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian	Inspektorat	Inspektorat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik			Negara/Daerah		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Inspektorat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pendampingan dan	Pendampingan,	Inspektorat	Inspektorat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Asistensi	Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur		KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintahan Daerah	Kantor atau Bangunan Lainnya		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pemeliharaan Barang	Pemeliharaan/Rehabil	Kec. Pakal	Kec. Pakal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur		KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintahan Daerah	Kantor atau Bangunan Lainnya		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Koordinasi	Koordinasi/Sinergi	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				dan Instansi Vertikal Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Koordinasi	Koordinasi/Sinergi	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				dan Instansi Vertikal Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tandes	Kec. Tandes

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Kec. Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyelenggaraan	Peningkatan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur			Daerah yang Ada di Kecamatan	Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PELAYANAN PUBLIK	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyelenggaraan	Peningkatan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kec. Tandes	Kec. Tandes

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur			Daerah yang Ada di Kecamatan	Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kec. Benowo	Kec. Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PELAYANAN PUBLIK	Camat	Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pelaksanaan Urusan	Pelaksanaan Urusan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PELAYANAN PUBLIK	Camat	Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pelaksanaan Urusan	Pelaksanaan Urusan	Kec. Tandes	Kec. Tandes

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PELAYANAN PUBLIK	Camat	Nonperizinan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pelaksanaan Urusan	Pelaksanaan Urusan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PELAYANAN PUBLIK	Camat	Nonperizinan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pelaksanaan Urusan	Pelaksanaan Urusan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulak	Kec. Bulak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PELAYANAN PUBLIK	Camat	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pelaksanaan Urusan	Pelaksanaan Urusan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semampir	Kec. Semampir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PELAYANAN PUBLIK	Camat	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Peningkatan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec. Bulak	Kec. Bulak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				Pembangunan di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Genteng	Kec. Genteng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Peningkatan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec. Semampir	Kec. Semampir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				Pembangunan di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Genting Kalianak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Tambak Sarioso
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pembangunan Sarana	Kec. Benowo	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan		Kandangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Romokalisari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Sememi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Tambak Oso Wilangun

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Alun-Alun Contong
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Jepara
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Tembok Dukuh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Kedung Cowek

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Sukolilo Baru
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Gunungsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Pradah Kalikendal
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pembangunan Sarana	Kec. Gayungan	Kelurahan Dukuh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan		Menanggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Ketintang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Menanggal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Embong Kaliasin
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Kapasari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Ketabang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Peneleh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Airlangga
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Baratajaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Kertajaya
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Pucang Sewu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Gunung Anyar Tambak
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pembangunan Sarana	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan		Rungkut Menanggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Rungkut Tengah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Karah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Kebonsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Pagesangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Karang Pilang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Kebraon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Kedurus
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Waru Gunung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Sidotopo Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Tanah Kali Kedinding
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Bulak Banteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Tambak Wedi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Kemayoran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Dupak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Morokrembangan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pembangunan Sarana	Kec. Krembangan	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan		Krembangan Selatan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Perak Barat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Bangkingan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lidah Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lidah Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Sumurwelut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Dukuh Sutorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kalisari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kejawan Putih Tambak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Manyar Sambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kalijudan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Bongkaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Krembangan Utara
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Nyamplungan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pembangunan Sarana	Kec. Pabean	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan	Cantian	Tanjung Perak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Babat Jerawat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Sumberejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Kalirungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Rungkut Kidul

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Kedung Baruk
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Penjaringansari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Medokan Ayu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Wonorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Lontar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Made
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Beringin
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Putat Jaya
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pembangunan Sarana	Kec. Sawahan	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan		Kupang Krajan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Banyu Urip
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Petemon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Ujung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Sidotopo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Wonokusumo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Ampel
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Kapasan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Sidodadi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Simolawang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Tambakrejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Simokerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Keputih
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Klampis Ngasem
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Medokan Semampir
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pembangunan Sarana	Kec. Sukolilo	Kelurahan Menur

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan		Pumpungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Nginden Jangkungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Semolowaru
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Gebang Putih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Putat Gede
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Simomulyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Simomulyo Baru

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Sonokwijenan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Tanjungsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Dukuh Setro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Gading
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Kapasmadya Baru
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Pacarkeling

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Pacarkembang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Ploso
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Rangkah
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pembangunan Sarana	Kec. Tambaksari	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan		Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Karangpoh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Manukan Wetan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Manukan Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Banjar Sugihan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Keputran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Wonorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Kedungdoro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Dr. Soetomo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Kutisari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Kendangsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Panjang Jiwo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Jajar Tunggal
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pembangunan Sarana	Kec. Wiyung	Kelurahan Balas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan		Klumprik
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Babatan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Sidosermo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Bendul Merisi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Jemur Wonosari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Margorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Darmo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Jagir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Ngagel

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Ngagel Rejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Sawunggaling
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Genting Kalianak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Tambak Sarioso
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pemberdayaan	Kec. Benowo	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan		Kandangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Romokalisari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Sememi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Tambak Oso Wilangun

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Alun-Alun Contong
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Jepara
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Tembok Dukuh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Kedung Cowek
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Sukolilo Baru
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Gunungsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Pradah Kalikendal
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pemberdayaan	Kec. Gayungan	Kelurahan Dukuh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan		Menanggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Ketintang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Menanggal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Embong Kaliasin
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Kapasari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Ketabang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Peneleh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Airlangga
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Baratajaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Kertajaya
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Pucang Sewu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Gunung Anyar Tambak
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pemberdayaan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan		Rungkut Tengah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Rungkut Menanggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Karah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Kebonsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Pagesangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Karang Pilang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Kebraon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Kedurus
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Waru Gunung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Sidotopo Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Tanah Kali Kedinding
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Bulak Banteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Tambak Wedi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Kemayoran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Dupak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Krembangan Selatan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pemberdayaan	Kec. Krembangan	Kelurahan Perak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan		Barat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Morokrembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Bangkingan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lidah Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lidah Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Sumurwelut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Dukuh Sutorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kalisari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kejawan Putih Tambak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Manyar Sambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kalijudan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Bongkaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Krembangan Utara
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Nyamplungan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pemberdayaan	Kec. Pabean	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan	Cantian	Tanjung Perak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Babat Jerawat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Sumberejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Kalirungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Rungkut Kidul

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Kedung Baruk
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Penjaringansari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Medokan Ayu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Wonorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Lontar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Made

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Beringin
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Banyu Urip
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Kupang Krajan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pemberdayaan	Kec. Sawahan	Kelurahan Pakis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Putat Jaya
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Petemon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Ujung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Wonokusumo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Ampel

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Sidotopo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Pegirian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Kapasan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Tambakrejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Sidodadi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Simolawang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Gebang Putih
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Keputih
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Klampis Ngasem
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pemberdayaan	Kec. Sukolilo	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan		Medokan Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Menur Pumpungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Nginden Jangkungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Semolowaru

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Putat Gede
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Simomulyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Simomulyo Baru

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Sonokwijenan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Tanjungsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Dukuh Setro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Gading
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Kapasmadya Baru
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Pacarkeling
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Pacarkembang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Ploso
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Rangkah
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pemberdayaan	Kec. Tambaksari	Kelurahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan		Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Karangpoh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Manukan Wetan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Manukan Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Banjar Sugihan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Keputran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Wonorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Kedungdoro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Dr. Soetomo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Kutisari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Kendangsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Panjang Jiwo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Babatan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Kegiatan	Pemberdayaan	Kec. Wiyung	Kelurahan Jajar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan		Tunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Balas Klumprik
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Jemur Wonosari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Bendul Merisi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Margorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Sidosermo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Darmo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Jagir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Ngagel

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Ngagel Rejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Sawunggaling
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pemberdayaan	Penyediaan Sarana	Kec. Bulak	Kec. Bulak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Genteng	Kec. Genteng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN	Tingkat Kecamatan	Kemasyarakatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pakal	Kec. Pakal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pemberdayaan	Penyediaan Sarana	Kec. Semampir	Kec. Semampir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN	Tingkat Kecamatan	Kemasyarakatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pemberdayaan	Fasilitasi	Kec. Genteng	Kec. Genteng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Kec. Pakal	Kec. Pakal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KELURAHAN	Tingkat Kecamatan	Masyarakat		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pemberdayaan	Fasilitasi	Kec.	Kec.

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Sukomanunggal	Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Koordinasi Upaya	Sinergitas dengan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Koordinasi Upaya	Sinergitas dengan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Benowo	Kec. Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN UMUM	Penugasan Kepala Daerah	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyelenggaraan	Fasilitasi, Koordinasi	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				Ketahanan Nasional		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN UMUM	Penugasan Kepala Daerah	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyelenggaraan	Fasilitasi, Koordinasi	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Benowo	Kec. Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN UMUM	Penugasan Kepala Daerah	Perundang-Undangan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyelenggaraan	Penanganan Konflik	Kec. Pabean	Kec. Pabean

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Cantian	Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan	Kec. Tandes	Kec. Tandes

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN UMUM	Penugasan Kepala Daerah	Perundang-Undangan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
			BUDAYA POLITIK	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur		KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	layanan infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangk	Penguatan	Penataan ruang,	PROGRAM	Penyelenggaraan	Optimalisasi Sistem	Dinas Sumber Daya	Dinas Sumber

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
an wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Air dan Bina Marga	Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah	Penguatan konektivitas	Penataan ruang, infrastruktur, dan	PROGRAM PENATAAN	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di	Pemeliharaan, Perawatan, dan	Dinas Perumahan Rakyat dan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	utilitas kota yang terpadu	BANGUNAN GEDUNG	Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk	Penguatan konektivitas antar wilayah	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	terpadu		Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	Permukiman serta Pertanahan	Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	peningkatan layanan infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	layanan infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangk	Penguatan	Penataan ruang,	PROGRAM	Pencegahan	Perbaikan Rumah	Dinas Perumahan	Dinas Perumahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
an wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah	Penguatan konektivitas	Penataan ruang, infrastruktur, dan	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Pembangunan Prasarana Jalan di	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	utilitas kota yang terpadu	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Kabupaten/Kota		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk	Penguatan konektivitas antar wilayah	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	terpadu	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
kesenjangan dan menjamin pemerataan	pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur		(LLAJ)				
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan menjamin pemerataan	hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur			Daerah Kabupaten/Kota	Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pemerataan	pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur			Kabupaten/Kota	Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	serta peningkatan layanan infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pengelolaan	Pengadaan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Sekolah		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PENDIDIKAN	Menengah Pertama	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ibu Hamil		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ibu Hamil		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang Terduga Tuberkulosis		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tuberkulosis		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang Terduga Tuberkulosis		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tuberkulosis		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terinfeksi HIV		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terinfeksi HIV		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gizi Masyarakat		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gizi Masyarakat		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Surveilans Kesehatan		Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Surveilans Kesehatan		Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Menular		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyakit Menular dan Tidak Menular		Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Menular		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Operasional	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Puskesmas		Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Operasional Pelayanan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Operasional	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Puskesmas		Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Operasional Pelayanan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Laboratorium Kesehatan Daerah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Instalasi Farmasi Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Pengawasan		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pengembangan dan	Bimbingan Teknis dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	BIDANG KESEHATAN	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Daerah Kabupaten/Kota	Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Kabupaten/Kota	(UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pengembangan dan	Bimbingan Teknis dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	BIDANG KESEHATAN	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Daerah Kabupaten/Kota	Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Kabupaten/Kota	(UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Panti Sosial			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penguatan dan	Penguatan Jejaring	Dinas	Dinas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN HAK	Pelembagaan PHA pada Lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	ANAK (PHA)	Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pemetaan Perkiraan	Pengolahan dan	Dinas	Dinas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMBINAAN	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,	Promosi dan KIE Program Bangga	Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KELUARGA BERENCANA (KB)	Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	BERENCANA (KB)	KB (PKB/PLKB)	Lapangan oleh PKB/PLKB	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	BERENCANA (KB)	Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Kesejahteraan Keluarga	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Kesejahteraan Keluarga	Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
				Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Revolusi	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pemberian	Penilaian Kinerja	Dinas Lingkungan	Dinas Lingkungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
mental dan pembangunan kebudayaan	kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hidup	Hidup
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan	Peningkatan kepedulian sosial dan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
kebudayaan	pelestarian nilai-nilai budaya lokal	nilai-nilai budaya lokal			Secara Terpadu	Pariwisata	Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bentuk komitmen/dukungan Pemerintah Kota Surabaya atas kebijakan prioritas nasional tahun 2024 ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.6
Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan (Inklusi)	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Kelulusan (AL) SD/MI** **Angka Kelulusan SMP/MTS** **Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan**	Pemberian BOS juga telah diberikan kepada 50 SD dan 25 SMP yang terdapat program Sekolah Inklusi
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar** **Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan**	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan** **Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu**	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah pertama	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Pertama	yang Mengelola Dana BOS	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
2	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase guru PAUD yang kompeten**	Kota Surabaya telah menyusun rencana aksi Daerah PAUD HI Tahun 2021-2026
				Persentase lembaga PAUD berkualitas	Pembentukan Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif dilakukan melalui Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/541/436.1.2/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD**	
				Laporan penilaian kinerja yang disusun	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	
3	Dukungan pelaksanaan peningkatan pijar (Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja) di Daerah	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Kelulusan (AL) SD/MI**	Seragam gratis untuk 39.911 siswa gamis di SD Negeri dan 11.713 siswa gamis di SD Swasta serta 13.522 siswa gamis di SMP Negeri dan 15.150 siswa gamis di SMP Swasta.
				Angka Kelulusan SMP/MTS	Sekolah gratis bagi seluruh siswa sekolah negeri dan sekolah gratis bagi siswa gamis di sekolah Swasta.
				Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar**	
				Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				BOS	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan**	
				Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
4	Dukungan peningkatan daya saing bangsa serta mendukung pertumbuhan perkonomian nasional melalui Revitalisasi sekolah menengah kejuruan	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalm rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia			Sesuai Instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia pada bagian Kedua butir 12 yang mengatur peran Gubernur untuk memberikan layanan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					pendidikan Kejuruan, menyediakan pendidik, penataan kelembagaan SMK, serta mengembangkan SMK unggulan.
5	Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter;	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase SD terakreditasi minimal B** **Persentase SMP terakreditasi minimal B**	Indikator tersebut masuk ke dalam mata pelajaran PPKn di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
6	Dukungan Pelaksanaan Program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) di Daerah	Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2019 tentag Hari Indonesis Menabung (HIM)	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase SD terakreditasi minimal B** **Persentase SMP terakreditasi minimal B**	Telah disupport oleh subkegiatan minat bakat baik jenjang SD maupun SMP. Di dalam subkegiatan tersebut ada sosialisasi terhadap literasi
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				peningkatan mutu	keuangan yaitu berupa gerakan menabung bagi pelajar jenjang SD dan SMP
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
7	Dukungan terhadap revitalisasi bahasa daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahuun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase SD terakreditasi minimal B**	Telah masuk dalam kurikulum mata pelajaran bahasa daerah
				Persentase SMP terakreditasi minimal B	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
8	Dukungan terhadap penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	Kota Surabaya telah menerapkan PPDB berbasis zonasi dengan penerimaan siswa melalui alamat website ppdb.surabaya.go.id [SMP]
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	ppdbsd.surabaya.go.id [SD]
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ppdbtk.surabaya.go.id [TK] yang dikembangkan pada sub kegiatn penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
9	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak 2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase SD terakreditasi minimal B** **Persentase SMP terakreditasi minimal B**	Sekolah penggerak di Kota Surabaya telah dijalankan pada 152 sekolah dengan guru penggerak 265 orang. Sekolah penggerak dan guru penggerak berfungsi mendukung pengembangan hasil belajar siswa secara
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi	Jumlah Satuan Pendidikan yang	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran	Peserta Didik	Menyelenggarakan Proses Belajar	holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).yang difasilitasi melalui Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik baik tingkat SD maupun SMP
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
10	Dukungan terhadap proses transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD)	1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase guru PAUD yang kompeten** **Persentase SD terakreditasi minimal B**	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 5. SE Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	
11	Dukungan terhadap peserta didik penyandang disabilitas melalui: a) penyediaan anggaran dan/atau bantuan pendanaan b) penyediaan sarana dan prasarana c) penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	Pemberian BOS juga telah diberikan kepada 50 SD dan 25 SMP yang terdapat program Sekolah Inklusi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran**	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	d) penyediaan kurikulum		Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran**	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase SD terakreditasi minimal B**	
				Persentase SMP terakreditasi minimal B	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi	Jumlah Satuan Pendidikan yang	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Peserta Didik	Menyelenggarakan Proses Belajar	
12	Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku 5. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase guru PAUD yang kompeten**	
				Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	Selain penyediaan perpustakaan di Sekolah, budaya membaca di masyarakat juga didorong melalui penyediaan TBM di 530 Lokasi serta penambahan koleksi bacaan sejumlah 448,840 koleksi
				Persentase SD terakreditasi minimal B	
				Persentase SMP terakreditasi minimal B	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir**	
				Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir**	
				Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir**	
				Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			PAUD	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan**	
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Kepuasan Pemustaka**	
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	
13	Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif**	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)**	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			Pengembangan dan	**Jumlah Puskesmas yang**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)**	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
14	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting melalui: 1) peningkatan skrining anemia remaja putri; 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri; 3)konsumsi TTD ibu hamil; 4) pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care); 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu Kurang Energi Kronik (KEK); 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**	
				Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	
				Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas**	
				Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	bulan; 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan stunting); 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan 11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.			**Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif**	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)**	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	**Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Masyarakat (UKBM)**	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
15	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Human lmmunodeficiency Virus (HlV); dan 2) Tuberkulosis (TBC); 3) Malaria 4) Penyakit menular lainnya		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam**	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas**	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Terinfeksi HIV	Pelayanan Sesuai Standar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
16	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: 1) Diabetes Melitus; dan 2) Hipertensi; dan 3) Penyakit tidak menular lainnya.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)**	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)**	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
17	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu**	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan	**Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	daerah (labkesda);		**Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	
18	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	Pada 63 Puskesmas telah didukung oleh 1 Tenaga dengan kompetensi Manajamen Informasi dan 1 Tenaga dengan kompetensi pengelola keuangan serta pengadaan SDM non ASN pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN**	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran**	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi**	
			Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology): 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas & insentif kader posyandu.		Penunjang Pelayanan BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas**	
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan**	
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif**	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)**	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			(UKBM)		
19	Program prioritas bidang kesehatan lainnya. a. Pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan dana DBH-CHT dan pajak rokok tahun 2024 untuk fokus mendanai kegiatan promotif-preventif, pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program transformasi kesehatan, khususnya transfirnasi layanan primer. b. Selain itu dapat juga menggunakan DAU yang ditentukan penggunaanya bidang kesehatan yang daoat mendanai kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)** **Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4** **Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila** **Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)** **Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam** **Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu** **Persentase Jaminan Kesehatan** **Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama**	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir** **Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	diatas termasuk belanja yang terkait dengan: 1) Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan; 2) Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan (maksimal 20%); dan 3) Belanja pemenuhan Jminan Kesehatan Nasional (maksimal 25%) c. Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber pendanaan lain selain dari dana DBH-CHT, pajak rokok untuk mendanai iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage. d. Dalam rangka mencapai target RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 100% Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi: 1) Pemerintah Daerah			**Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani**	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	
				Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	agar mengalokasikan pembiayaan akreditasi Puskemas dan Laboratorium Kesesehatan daerah baik akreditasi perdana re-akreditasi, dengan memaksimalkan pendanaan daeri APBD TA 2023 termasuk memanfaatkan dana kapitasi JKN; 2) Penggunaan dialokasikan untuk persiapan akreditasi, survey akreditasi dan pendampingan pasca akreditasi; 3) Dalam hal target akeditasi tidak dapat tercapai dalam tahun berjalan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali di tahun berikutnya. e. Pemerintah Provinsi harus mengalokasikan anggaran kesehata 10% diluar gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendanai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan			Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	**Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	provinsi: 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi. 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa provinsi.		**Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	
20	Penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu PONEK.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target**	Kota Surabaya memiliki 2 RSUD Tipe B yang telah memenuhi standar sarana prasarana untuk PONEK dan layanan 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology)
				Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi**	
				Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu**	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau**	
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
21	Penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda).		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu** **Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional**	Kota Surabaya memiliki 1 Laboratorium Kesehatan Daerah
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas**	
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Lainnya	Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau**	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	
22	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2024 dalam rangka optimalisasi Kampanye “War On Drugs” dan sinkronisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)** **Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan**	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan**	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	**Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)**	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
23	Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan Program JKN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optmalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai berikut: a. Gubernur untuk: 1) menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program JKN di wilayahnya; 2) memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Jaminan Kesehatan**	Kota Surabaya telah mencapai *Universal Health Coverage*
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda**	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik; 3) memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program JKN; 4) mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program JKN dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara; 5) memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program JKN; 6) memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program JKN;				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Keterangan
	7) memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah; 8) Menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 9) memastikan Bupati/Wali Kota menyediakan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah								

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Kabupaten/Kota sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 10) memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program JKN; 11) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program JKN di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan; 12) melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan PBI Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 13) meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota dalam rangka pelaksanaan program JKN				
24	Para Bupati/Wali Kota untuk: 1) menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program JKN di wilayahnya; 2) memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program JKN; 3) memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Jaminan Kesehatan**	Kota Surabaya telah mencapai Universal Health Coverage
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda**	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	kepesertaan aktif program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik; 4) mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program JKN dalam segmen PPU Penyelenggara Negara; 5) memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program JKN; 6) melakukan pendaftaran, perencanaan, penganggaran, dan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program JKN; 7) Menyusun program,				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	kegiatan, dan sub kegiatan dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 8) memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program JKN; 9) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program JKN di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	kesehatan bersama Kementerian Kesehatan; 10) menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama Kementerian Kesehatan; dan 11) melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
25	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP No 21 Tahun 2021	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pelayanan penataan ruang**	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr)	**Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	**dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan**	
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	
26	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota 3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial** **Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial**	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia**	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 – 2024 4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial**	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial**	
				Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
27	1. Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayananan dasar bidang sosial 2. Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi anggaran untuk pelayanan sosial	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial**	Kota Surabaya memiliki UPTD Dinas Sosial :
				Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	UPTD KANRI & KALIJUDAN
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	UPTD LIPONSOS KEPUTIH
				Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	UPTD GRIYA WREDA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar**	UPTD BABAT JERAWAT

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya		**Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**bagi Anak**	
				Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	
				Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial**	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	
28	Pengalokasian pembiayaan untuk pemutakhiran data	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	Pemutakhiran data dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan dan aplikasi sayang warga
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR**	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
29	Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2O24 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah Provinsi untuk: 1). mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial**	
				Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas**	
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti; b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti; c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti; d) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti; e) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti; f) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;			Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial**	
				Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	
30	1). menyusun program, kegiatan, sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 4). melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: a) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan b) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM. 5). menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial** **Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan**	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial** **Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR**	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	(tiga) bulan sekali. b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk: 1). melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegitan/sub kegiatan antara lain: a) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; b) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; 2). menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan melalui kegitan/sub kegiatan antara lain: a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; dan		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
31	a. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemuktahiran skala besar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemerintah Daerah wajib menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam RKPD. b. penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani; c. rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia serta pemberdayaan untuk lanjut usia aktif sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.			**panti sosial** **Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial** **Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial**	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS** **Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak** **Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia**	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial**	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR**	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Miskin Kabupaten/Kota	
32	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. a. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerjaoleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihankerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; c. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten**	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi**	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan**	
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI**	
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	d. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; e. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; f. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; g. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan; h. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; i. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Migran Indonesia; dan j. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. • Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerjaoleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihankerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; b. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan; g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi. • Pemerintah Daerah kabupaten/ kota memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat; b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia; c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi; d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya; f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota; h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; i. menyediakan dan				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan k. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/ kota.				
33	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** Perluasan Kesempatan Kerja	**Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan** **Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis** Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	melaksanakan Layanan Disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota, menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan fungsi Layanan Disabilitas, dan menyediakan dukungan anggaran pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota untuk pelaksanaan fungsi Layanan Disabilitas				
34	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama**	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	**Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.		**Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	
35	Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: • Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam	a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan**	
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis**	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. • Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. • Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.				
36	pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: 1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	**Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh** **Tingkat Produktivitas Pertanian** **Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani** **Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan** Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kegiatan pengawasan juga melibatkan Aparat Penegak Hukum dengan tujuan peredaran/ distribusi serta penggunaan pupuk dan pestisida tepat guna dan tepat sasaran
37	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024			Kota Surabaya tidak memiliki kebun kelapa sawit

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, gubernur, bupati dan wali kota daerah penghasil sawit menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024				
38	c.fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	**Tingkat Produktivitas Pertanian** **Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani** Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
39	d. peningkatan		**PROGRAM PENYULUHAN**	**Persentase Penyuluh yang**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	produktivitas pertanian yang meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan melalui penerapan Good Agricultural Practice		**PERTANIAN**	**telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh** **Tingkat Produktivitas Pertanian**	
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani** **Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan**	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
40	e. pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan melalui pencegahan, pengobatan dan penanganan dampak.		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan**	
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan**	
			Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah wilayah atau kawasan yang	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Tingkat Produktivitas Pertanian**	
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani**	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
41	Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terorganisasi, melakukan deteksi dini, dan monitoring di area-area yang rawan Hotspot dengan sistem dashboard.		N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
42	melakukan infrastruktur dan monitoring dan pengawasan, memberikan pendidikan yang berkesinambungan kepada masyarakat, perusahaan, dan		N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	koorporasi, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan ekonomi.				berdasarkan kondisi geografis
43	mencegah dan menangani karhutla untuk masa yang akan datang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.		N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
44	Pemerintah Daerah menganggarkan dukungan pembiayaan pengelolaan perhutanan sosial yang bersumber dari APBD dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan Pasal 246	Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.				
45	melakukan kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan berupa hutan dan lahan, ekosistem mangrove dan ekosistem gambut sesuai dengan arahan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.	PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.	N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
46	Melakukan penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) pada KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dalam rangka pengelolaan hutan lestari dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan sesuai arahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.				
47	Mendukung pencapaian NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia dari sektor FOLU (Forest and Others Land Use) melalui aksi pegurangan emisi, mempertahankan serapan, meningkatkan serapan karbon, serta pengembangan kelembagaan.		N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
48	Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan ketahanan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon secara Nasional berdasarkan baseline 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Target penurunan emisi GRK pada 5 (lima) sektor : energi (11%), limbah (0,38%), IPPU (0,1%),	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreeement to the United Climate Charge (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim) c. Peraturan Presiden	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik** **Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu**	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun** **jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Pertanian (0,32%), Dan Kehutanan (17,2%).	Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untUK Pencapaian Target Kontribusi Yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun**	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase kelestarian keanekaragaman hayati**	
			Pengelolaan	**Pertumbuhan luas taman**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi**	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan**	
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan**	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan**	
			Pembinaan dan	**Jumlah obyek kegiatan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya**	
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	
49	KPH efektif dimana KPH yang menjadi kewenangan Pemda akan dinilai oleh KLHK efektif atau tidak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai UPTD Provinsi sekaligus menjadi tolak ukur penyelenggaraan urusan kehutanan di tingkat tapak	PP 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan ditindaklanjuti dengan Permen KLHK Nomor 1 Tahun 2020 yang mengamanatkan agar KPH menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPHJPd)	N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
50	Dalam rangka mendukung 5 (lima) Arahan Presiden RI, diterjemahkan dalam 7		N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	(tujuh) agenda pembangunan yang diturunkan kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas antara lain: a. Agenda 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, melalui peningkatan kuantitas ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan. b. Agenda 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualiatas dan Berdaya Saing, melalui pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu perhutanan sosial. c. Agenda 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, melalui pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu pemulihan				Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	lahan berkelanjutan				
51	a. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui penetapan dan penyelenggaraan CPPD (termasuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran CPPD)	· Undang-undang Nomor18 tahun 2012 tentang Pangan · Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan**	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
52	b. Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemantauan ketersediaan, pasokan dan harga pangan, penyusunan neraca pangan, penguatan sarana prasarana logistik pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan	· Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional · Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras · Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan**	
			Koordinasi dan	Jumlah koordinasi dan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula · Konsumsi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen · Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras	Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
53	c. Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi sebagaidokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kebutuhan dan kecukupan pangan dan gizi di daerah	· Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan**	
			Koordinasi dan	Jumlah koordinasi dan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
54	d. Pengentasan kerawanan pangan dan gizi melalui penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA), intervensi penanganan kerawanan pangan dan gizi,penyelenggaraan Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)	· Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan · Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi · Peraturan Badan Pangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan · Peraturan Badan Pangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan**	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
55	e. Peningkatan Skor PolaPangan Harapan (PPH) melalui penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, analisis situasi konsumsi pangan, pengembangan usaha pangan lokal,	· Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan · Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	perencanaan produksi dan penyediaan pangan		**rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal**	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman**	
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
56	f. Penjaminan keamanan pangan segar melalui pengawasan pre market dan post market, pembinaan kepada pelaku usaha pangan segar usaha kecil dan mikro, peningkatan kompetensi petugas pengawas keamanan pangan, peningkatan sarana prasarana pengawasan dan penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan segar.	· Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan · Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi · Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, · Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan · Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman**	
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
57	g.Penguatan data dan sistem informasi pangan	· Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan · Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi · Peraturan Badan Pangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan**	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Pangan Pokok Strategis	pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
58	Pemerintah Daerah dapat memasukkan program, kegiatan, sub kegiatan dalam RKPD, antara lain: 1) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada Pemerintah Daerah; 2) monitoring dan evaluasi KUR di daerah; 3) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh Pemerintah Daerah; 4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan; dan 5) program One Village One Product (OVOP). Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha**	
				Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan**	
				Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya**	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala	**Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Usaha menjadi Usaha Kecil	**pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha**	
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
59	Pemerintah Daerah juga memasukkan program, kegiatan, sub kegiatan untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam RKPD.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha**	
				Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan**	
				Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	
			Pemberdayaan melalui	Jumlah Unit Usaha yang	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Kemitraan Usaha Mikro	Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya**	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	**Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha**	
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
60	Pemerintah Daerah mengarahkan dukungan kebijakan kepada petani untuk memanfaatkan KUR pertanian yang membantu permodalan dan kemajuan pertanian dengan memperioritaskan pembelian Rice Milling Unit (RMU), pengering (dryer) dan alat panen padi modern lainnya dalam rangka optimalisasi peningkatan sarana pasca		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya**	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	**Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha**	
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	panen pertanian yang modern, meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, dan meningkatkan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional.		Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
61	Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk: 1) mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah dalam RKPD 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan 2) pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha**	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan**	
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya**	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	**Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	dengan kebutuhan. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan 1) pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 2) pelaksanaan kemitraan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi; 3) penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usana Mikro dan usaha Kecil pada infrastruktur publik; dan 4) layanan bantuan dan pendampingan hukum, bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.		**usaha** Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
62	Pengawasan dimaksud meliputi kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) dengan menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) yang sudah berjalan.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha** **Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	kemudahaan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui program/kegiatan meliputi: 1) pendataan; 2) pelatihan dan pendampingan; 3) layanan bantuan dan pendampingan hukum; 4) pemulihan usaha; 5) penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik; 6) dukungan kemitraan; 7) pemberian kemudahan dan insentif bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 8) penyelenggaraan dan pengembangan inkubasi; 9) fasilitasi perizinan berusaha.		**Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya**	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	**Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha**	
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
63	pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan antara lain: 1) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan,		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya**	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	**Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri dan penyandang disabilitas; 2) inkubasi usaha; 3) penguatan kapasitas layanan usaha; 4) pengembangan sentra Industri Kecil dan Menegah (IKM); dan 5) penyediaan insentif fiskal.		**Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	
64	Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan 1) pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 2) pelaksanaan kemitraan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi; 3) penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usana Mikro dan usaha Kecil pada infrastruktur publik; dan 4) layanan bantuan dan pendampingan hukum, bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha**	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan**	
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Pengawasan dimaksud meliputi kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) dengan menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) yang sudah berjalan.		**skala kinerja usahanya**		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	**Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha**	
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
65	Dukungan penganggaran program strategis pada RKPD yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan: a. dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) antara lain: 1) peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen; 2) peningkatan rekening dan penggunaan produk keuangan formal; 3) optimalisasi PTSL; 4) optimalisasi agen bank		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.**	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat**	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	dan titik layanan non bank, peningkatan; dan 5) layanan keuangan digital dan transaksi non tunai, serta penguatan monev inklusif.				
66	b. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk: 1) mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah dalam RKPD 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan 2) pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi**	Kota Surabaya telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah melalui SK Walikota Nomor 188.45/54/436.1.2/2022
			Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase intervensi ketersediaan komoditas**	
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang**	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
67	memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) upaya pelestarian cagar budaya melalui	1. UU No.33/2009 tentang Perfilman 2. UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya 3. UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 4. PP No.66/2015 tentang Museum 5. PP No.87/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 6. PP No.1/2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 7. Perpres No.65/2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; 8. Keppres nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal**	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah**	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil**	
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional**	
			Peningkatan Pendidikan dan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan	Manajemen Talenta Nasional; 9. Perpres No. 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian**	
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian**	
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Persentase museum yang berhasil dikembangkan**	
			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola**	
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	
			Revitalisasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.		Prasarana Museum	Prasarana Museum yang Direvitalisasi	
68	1. Agar Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dapat terintegrasi ke dalam Dokrenda (RPJMD dan RKPD) 2. Agar Daerah Provinsi dapat mendukung dan melaksanakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) setiap tahunnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN). 3. Agar Kebudayaan dapat terintegrasi dalam urusan Pendidikan melalui mata pelajaran muatan lokal kebudayaan.	1. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 2. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan Strategi Kebudayaan 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal**	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah**	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	
69	Dalam rangka pengendalian kawasan budidaya perikanan danau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 angka (5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya, Pemerintah Daerah	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya			Sasaran Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya adalah kawasan Danau Toba dan Kota Surabaya tidak memiliki danau

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Provinsi Sumatera Utara dan 7 (tujuh) kabupaten sekitar danau toba terdiri atas Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Dairi wajib menyusun rencana pengendalian kawasan budidaya perikanan danau termasuk rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) beserta pemberian insentif kepada masyarakat berupa pemberian kompensasi yang dialokasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD.				
70	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Fasilitasi pembuatan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) termasuk migrasi kartu nelayan menjadi kartu KUSUKA dalam rangka membantu	1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya**	**Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai** **Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, sehat dan lain-lain sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.	Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	**yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan**	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan**	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
71	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, SDM pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan, pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta peraturan daerah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) penyusunan dan sosialisasi Perda RZWP-	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan**	
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap**	
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	3-K yang terintegrasi dengan RTRW; 3) monitoring pelaksanaan implementasi RZWP-3-K, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4) Pengadaaan sarana dan prasarana produksi garam, sarana dan prasarana pasca produksi garam, peningkatan kualitas SDM produksi Garam untuk mendukung percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional sesuai dengan Peraturan		Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional; dan 5) Pengelolaan kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.				
72	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun	1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai**	
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap**	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan**	
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan**	
			Pemberian Pendampingan,	Jumlah Kelompok Usaha yang	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.		Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan**	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
73	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan public yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaultan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang	1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara harus memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural 2. Pasal 233 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Pasal 6 PP 12 Tahun 2017 ttg Binwas Pemda 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	**Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas; b. meningkatkan pengembangan SDM aparatur sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa; c. meingkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; d. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola kemanan siber; e. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;dan f. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.		**Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
74	bidang fasilitasi politik dalam negeri: 1) sosialisasi kebijakan dibidang politik dalam negeri. 2) pelaksanaan penyelenggaraan		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) peningkatan kapasitas dan kelembagaan partai politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
75	bidang fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya: 1) implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) antara lain: a) pembentukan tim terpadu P4GN dan PN; b) penyusunan rencana aksi daerah P4GN dan PN; c) pembentukan perda tentang P4GN dan PN; dan d) pelaporan dan evaluasi pelaksanaan P4GN dan PN. 2) koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 antara lain a) pelaksanaan rencana aksi generik;		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	b) pelaksanaan rencana aksi khusus; dan c) pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 3) pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII melalui: a) promosi budaya: b) pagelaran seni dan budaya; c) pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan d) seminar dan lokakarya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4). pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Surat Edaran Menteri				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
76	bidang fasilitasi kewaspadaan nasional 1) penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 3) pendanaan konflik faktual 4) pemetaan daerah rawan konflik sosial hingga tingkat desa/kelurahan; 5) penanganan potensi ancaman, hambatan dan		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti** **Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti**	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional** **Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. 6) penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			**Konflik Sosial**	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	7) penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) penanganan pengungsi luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9) peningkatan efektifitas FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing; 10) peningkatan SDM aparatur kesbangpol di bidang intelijen dan kewaspadaan dini melalui				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 11) pembentukan dan penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menunjang pelaporan secara cepat, tepat, dan akurat terkait situasi kondisi yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; dan 12) Pendanaan pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021.				
77	bidang bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan: 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan**	Sekolah Kebangsaan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan menggandeng Lanudal Juanda yang diikuti oleh siswa dari jenjang SMP hingga SMA/SMK agar menjadi pribadi yang lebih disiplin sekaligus mandiri
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) penyelenggaraan, pembinaan dan penguatan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika terkait tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan bangsa dan politik; 6) pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), optimalisasi dan pemberdayaan FPK dalam bentuk program,				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	kegiatan, sub kegiatan atau dukungan belanja hibah dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, meliputi penguatan kelembagaan, dukungan penganggaran, sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan peran dan fungsi, serta pengawasan dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 7) penyelenggaraan Revitaliasi Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan dalam Penguatan Persatuan dan Kesatuan; dan 8) penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia tentang Hak dan Kewajiban.				
78	1) Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), antara lain: a) pelaksanaan PKBN lingkup pendidikan;		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan**	Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	b) penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat; c) penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan. 2) pengeloaan kompenen pendukung pertahanan negara. 3) Pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan komponen pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta mobilisasi dan demobilisas.				Pertahanan Negara, bahwa pembinaan kesadaran bela negara diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Pembinaan kesadaran bela negara lingkup pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sedangkan untuk pembinaan bela negara lingkup masyarakat dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	**Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Karakter Kebangsaan	**Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase guru PAUD yang kompeten**	
				Persentase SD terakreditasi minimal B	
				Persentase SMP terakreditasi minimal B	
				Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Penyelenggaraan	Jumlah Satuan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
79	peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi pasal 4 bahwa Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahrlan, dan teknologi untuk

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
80	pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1989 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an bahwa pelaksanaan event tersebut dilaksanakan oleh lembaga Kemenag
81	pendanaan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat Ketahanan Pangan, serta Program Peningkatan Konektifitas melalui Pembangunan Infrastruktur Kewenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan negara yang				Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pasal 6 bahwa penyelenggara terkait dengan perbatasan wilayah negara, tingkatan paling bawah adalah gubernur yang memiliki wilayah

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	berkoordinasi dengan BPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.				perbatasan negara
82	pembangunan kawasan perbatasan yang holistik, terintegrasi, dengan fokus potensi unggulan dalam konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berada di kawasan perbatasan negara harus memperhatikan/ menjadikan dasar atau acuan pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024				Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pasal 6 bahwa penyelenggara terkait dengan perbatasan wilayah negara, tingkatan paling bawah adalah gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara
83	a. percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah,				kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	aksesibilitas, dan karakteristik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antar daerah pada kabupaten daerah tertinggal, meliputi penyusunan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT), Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD- PPDT), pelaksanaan reviu dokumen STRADA-PPDT dan RAD-PPDT, penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi STRADA-PPDT dan RAD-PPDT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.				Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Pada 2022 berdasar Indeks Desa Membangun, Jatim dinyatakan bebas desa tertinggal oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI.
84	a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA**	**Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan		**DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**dapat ditingkatkan**	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal.				
85	Pelaksanaan program Sistem Resi Gudang sebagai instrumen sistem pembiayaan perdagangan, pengendalian inflasi dan persediaan nasional dengan mempedomani Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan		**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase ketepatan waktu pelayanan**	
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, bahwa urusan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan sistem resi gudang, antara lain percepatan pelaksanaan sistem resi gudang, pengembangan komoditi unggulan dan penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendorong pengembangan pelaksanaan sistem resi gudang, perlu dilakukan sosialisasi sistem resi gudang, pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan terhadap bangunan serta peralatan dan mesin yang telah menjadi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-				

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	undangan.pelaksanaan perlindungan konsumen melalui: 1) pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan sosial; 2) peningkatan hubungan kerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen; dan 3) koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.				
86	pengujian dan setifikasi mutu dan produk melalui: 1). verifikasi mutu produk; dan 2). pengembangan layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi.		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase pelayanan tera yang tepat waktu**	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal**	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	
87	pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa melalui:		**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase ketepatan waktu pelayanan**	
			Penerbitan Surat Izin	**Jumlah Laporan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	1). peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa; dan 2). fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen.		**Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	
			Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
88	metrologi legal berupa Tera, Tera ulang dan pengawasan melalui: 1). pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera ulang; 2). verifikasi standar ukuran; 3). pengawasan/penyukuhan metrologi legal; dan 4). penyidikan metrologi legal.		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase pelayanan tera yang tepat waktu**	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal**	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	
89	Salah satu agenda pembangunan yang diturunkan ke dalam		**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Urusan Perindustrian: f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 3) speningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran**	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 6) pengembangan industri halal				
90	Salah satu agenda pembangunan yang diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Urusan Perdagangan: g, peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) pengelolaan impor; 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;		**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran**	
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran**	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan 7) peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.				
91	Pendanaan Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum**	
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum**	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
92	Dalam rangka memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguann suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, Pemerintah Daerah agar dapat menyelenggarakan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	a. PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis b. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah c. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase kelestarian keanekaragaman hayati**	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun**	
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	
93	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari**	
			Pengelolaan Sampah	**Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan**	
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
94	Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembanguan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase kelestarian keanekaragaman hayati**	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun**	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.				
95	Dalam rangka Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pemantauan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut	a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik**	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun**	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	(IKAL).	Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
96	Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan**	
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
97	Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional berdasarkan baseline 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C (dua derajat celcius) hingga 1,50C (satu koma lima derajat celcius) dari	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreeement to the United Climate Charge (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim) c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu**	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	tingkat suhu praindustrialisasi dengan memedomani pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional				
98	Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan	a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha**	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan,	**Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro – kecil dan usaha menengah – besar melalui : - Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; - Perluasan kemitraan usaha; dan - Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : - Pendampingan umkm untuk mengakses kredit; dan - Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : - Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; - pengembangan jangkauan dan cakupan usaha; dan - pengembangan inovasi koperasi.	Kewirausahaan Nasional	**Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: - Pelatihan kewirausahaan; - Inkubasi usaha; - Penguatan kapasitas layanan usaha; - Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; - Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial				
99	Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: - 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; - 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; - Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk	PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha**	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan**	
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	pengembangan usaha; 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: - sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; - pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; dan - monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: - Inti plasma; - Subkontrak; - Waralaba; - Perdagangan umum; - Distribusi dan keagenan; - Rantai pasok; dan - Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: - Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan; dan - Penyelenggaraan		dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil				
100	Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui	a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase museum yang berhasil dikembangkan**	
			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola**	
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	
			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.	Strategi Kebudayaan			
101	1. Agar Daerah Provinsi dapat mendukung dan melaksanakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) setiap tahunnya sebagai tindak	a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil**	
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	lanjut dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN). 2. Mendukung penguatan kebudayaan dalam pendidikan melalui integrasi kebudayaan dalam muatan lokal pendidikan.	Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan Strategi Kebudayaan c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	**Kabupaten/Kota** Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	**kesenian tradisional** Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	
10 2	Dalam rangka pengendalian kawasan budidaya perikanan danau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 angka (5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 7 (tujuh) kabupaten sekitar danau toba terdiri atas Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, dan	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya			Bukan termasuk area kewenangan Kota Surabaya

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Kabupaten Dairi wajib menyusun rencana pengendalian kawasan budidaya perikanan danau termasuk rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) beserta pemberian insentif kepada masyarakat berupa pemberian kompensasi yang dialokasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD.				
103	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Fasilitasi pembuatan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) termasuk migrasi kartu nelayan menjadi kartu KUSUKA dalam rangka membantu nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, sehat dan lain-lain sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan	a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan**	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan**	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.				
104	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, SDM pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan, pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta peraturan daerah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) penyusunan dan sosialisasi Perda RZWP-3-K yang terintegrasi dengan RTRW; 3) monitoring pelaksanaan implementasi RZWP-3-K, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan**	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan**	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif**	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah sentra ikan yang dikelola**	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4) Pengadaaan sarana dan prasarana produksi garam, sarana dan prasarana pasca produksi garam, peningkatan kualitas SDM produksi Garam untuk mendukung percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional; dan 5) Pengelolaan kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.				
105	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya,	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan**	
			Pengawasan	**Jumlah Jenis Sarana**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	**Penggunaan Sarana Pertanian**	**Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan**	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
106	Pemerintah Daerah pada tahun 2024 melaksanakan Musrenbang RPJPD 2025-2045	Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat (4)	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan**	
			Penyusunan	**Jumlah dokumen**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Perencanaan dan Pendanaan	**perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan**	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah**	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
107	Pemerintah daerah pada Tahun 2024 menyusun	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun	**PROGRAM PERENCANAAN,**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	RPJMD Teknokratik 2025-2030	2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**dokumen perencanaan**	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan**	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah**	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
108	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan**	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan**	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan**	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Pembangunan Daerah	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
109	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan	a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning**	
			Pengembangan Kompetensi Teknis	**Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis**	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	
			Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah sau syarat pengangkatan dalam jabatan.JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional	Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Keterangan
	binaan Kemendagri melalui pengembangan komptensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data Base Kependudukan, dan Operator sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta Penata Perizinan. 5. Prioritas tata kelola Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan Sistem Pengendalian Intern dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan kompetensi bagi Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD.								

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
110	1. Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan pada masing- masing OPD terkait, dan berdasarkan RPJMN 2020- 2024, fokus pengelolaan kawasan perbatasan berada di 222 Kecamatan yang merupakan Lokasi Prioritas (Lokpri). 2. Dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.	a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; b. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024; c. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.			Kota Surabaya tidak termasuk dalam Kawasan perbatasan Negara

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.7
Keterkaitan Program Pembangunan Nasional dengan RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)		209 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		85997 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
					39574 Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
		-	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)		35 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		-	Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		3135 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		3135 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1013 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		-	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1013 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
			Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B		N/A	sesuai Berita Acara Rakortekbang bidang pendidikan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemda Prov Jatim, indikator ini sudah melebur/update menjadi indikator "Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B"
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
			Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan DIV		N/A	sesuai Berita Acara Rakortekbang bidang pendidikan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemda Prov Jatiml, indikator ini sudah melebur/update menjadi indikator "Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV"

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
			Rasio pengawas PAUD		N/A	sesuai Berita Acara Rakortekbang bidang pendidikan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemda Prov Jatim, indikator ini sudah tidak dimunculkan lagi
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan		2355 Satuan Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
			Minimal Akreditasi B			
		-	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV		3092 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Iklim keamanan SMA	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim keamanan SD		259 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
		Iklim keamanan SMK	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim keamanan SMP		256 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
		Iklim keamanan SDLB	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim kebinekaan SD		259 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
		Iklim keamanan SMPLB	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim kebinekaan SMP		256 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
		Iklim keamanan SMALB	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim inklusivitas SD		259 Satuan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
		Iklim kebinekaan SMA	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim inklusivitas SMP		256 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
		Iklim kebinekaan SMK	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim kebinekaan SDLB	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim kebinekaan SMPLB	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim kebinekaan SMALB	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim Inklusivitas SMA	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim Inklusivitas SMK	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim Inklusivitas SDLB	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi. Kota Surabaya mendukung urusan tersebut pada indikator lainnya
		Iklim inklusivitas SMPLB	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim inklusivitas SMALB	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
2	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
3	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
	Nasional	berdasarkan Asesmen Nasional				
4	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
5	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
6	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
7	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
8	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
9	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
10	ata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
11	Rata-rata kompetensi	Rata-rata	-		N/A	Indikator tersebut merupakan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
	Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional				indikator pada provinsi.
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
13	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
14	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		N/A	sesuai Berita Acara Rakortekbang bidang pendidikan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemda Prov Jatim, indikator ini sudah melebur/update menjadi indikator "Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)"
15	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		N/A	sesuai Berita Acara Rakortekbang bidang pendidikan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemda Prov Jatim, indikator ini sudah melebur/update menjadi indikator "Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)"

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi		Paripurna	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Paripurna	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada
		Persentase FKTP terakreditasi			145 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun
					56%	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama
					56%	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	Persentase Puskesmas tersedia obat esensial		100%	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun		2.038.597 Orang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Presentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)		7,14%	Prevalensi Balita Stunting
		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		56%	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria		10 orang	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
		Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)		60512 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
		Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV		52741 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
		Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap		63 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi
					2 kegiatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas
		Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)		63 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
					2 kegiatan	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas
					0,102%	Prevalensi Balita Gizi Buruk
		Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu		57	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		50 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		N/A	Terkait Penyediaan air minum di kota surabaya ditangani oleh PDAM Surya Sembada
2	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis RTRW		N/A	Target penyelesaian dan penetapan Perda RTRW Tahun 2023
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RDTR		3 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Penetapan RTRW	Penetapan RTRW		N/A	Target penyelesaian dan penetapan Perda RTRW Tahun 2023
		Penetapan RDTR	Penetapan RDTR		3 dokumen	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
3	Terlaksananya	Pelaksanaan	Pelaksanaan Fasilitasi		N/A	Kota Surabaya tidak memiliki

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)			Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun Kota Surabaya melakukan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota guna mencegah adanya Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman		N/A	Terkait Penyediaan air minum dikota surabaya ditangani oleh PDAM Surya Sembada
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan		N/A	inline dengan indikator "Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya" pada Sasaran Dinas Lingkungan Hidup, dengan target 99,82%
5	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Tambahan Debit Air Baku	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi		N/A	Di Kota Surabaya Jaringan Irigasi sudah tidak ada. Sudah berganti menjadi Sistem Drainase
		Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun		N/A	Di Kota Surabaya Jaringan Irigasi sudah tidak ada. Sudah berganti menjadi Sistem

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
						Drainase
		Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provisi			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
6	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah Tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah provinsi			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
7	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota		1.201 lokasi	Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara
					170.000 m2	Luas jalan yang diperbaiki
					19,00%	Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki
					45 KM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin
8	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan and	Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		95%	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni
					400 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		100%	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu (Luas Kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani)	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		N/A	Berdasarkan Berita Acara hasil perhitungan pengurangan luasan kumuh tahun 2019 Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Januari 2019 bahwa pengurangan luasan kumuh di Kota Surabaya terhadap target RPJMN tahun 2015-2019 telah tercapai di tahun 2019 sehingga sisa target luasan kumuh dinyatakan 0 (nol).
		Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang	Luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani		N/A	Luas kawasan kumuh di Kota Surabaya sudah mencapai 0 Ha

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		ditangani				
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
			Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)		95%	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni
					400 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
4	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU		60%	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik
		Jumlah Rumah			N/A	

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar				
5	Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan Penyediaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)			N/A	
		Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan			N/A	
6	Terpenuhinya Rumah Layak dan Terjangkau	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau		95%	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni
					24,59%	Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni
					400 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan			N/A	
		Persentase pemberkasan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana			4230 Objek	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan
					100%	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
		Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur			N/A	
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan			2 Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
		Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional			N/A	

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP			N/A	
		Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional			N/A	
		Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat)			N/A	
		Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam			12 Laporan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		provinsi/kabupaten/kota yang ditangani				Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
					12 Laporan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
					104 Titik/ lokasi	Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada
					100%	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani
		Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota			N/A	
		Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS			4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda
					75 Orang	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas
					100%	Persentase PPNS yang dibina
		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan			978 Orang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		kapasitasnya				Ditingkatkan Kapasitasnya
					192 kali	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
					100%	Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya
2	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah			90 Kegiatan	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi
		Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan			900 Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya
		Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran			900 Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya
		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan			90 Kegiatan	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi
		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya			10 Orang	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					656 Petugas	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih
3	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan			1.650 Kawasan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
					100%	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana			11.000 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
					10 jenis	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					100%	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon kurang dari 7 menit
		Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota			31 Kawasan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
					100%	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai			N/A	

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana				
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana			467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota			1.650 Kawasan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Tersedianya Data Fakir Miskin	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam DTKS			712.975 Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
					12 laporan	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR
					87%	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
						jaminan sosial
		Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center			4716 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
					12 laporan	Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan
		Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		712.975 Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
					12 laporan	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR
					87%	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
		Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan			11 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar				Kabupaten/Kota
					6 jenis	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina
					88,24%	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya		583 Orang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan		12 laporan	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR
2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kab/Kota			N/A	
		Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2			12 laporan	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako			83.899 KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah paket bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak
					12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia
					12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas
		Jumlah Warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan			N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi. Kota Surabaya tidak memiliki Warga KAT (Komunitas Adat Terpencil)
		Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan		11 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah TJSLBU yang mendapatkan pembinaan			363 orang	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan
					88.24 %	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
					11 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)			83899 keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
					87%	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
					88,50%	Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial
		Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha			2229 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar			11 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
					6 jenis	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina
					88,24%	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
		Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial		2229 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional		583 Orang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat			83899 keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
					87%	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
					88,50%	Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial
		Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan		363 orang	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan
					88.24 %	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
					11 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial		88.24 %	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
		Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial		363 orang	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan
					11 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi		23364 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan di rumah singgah/shelter			215 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					130 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					1000 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					31,5%	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia di rumah singgah/shelter			215 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					130 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					1000 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
						pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					31,5%	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang disediakan di luar panti		100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		130 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti		100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	Persentase anak terlantar yang

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		di dalam panti				memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan		291 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
					291 Lembaga	Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme		1.650 Kawasan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
		Jumlah penyandang disabiltas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk	Jumlah penyandang disabiltas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar		100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Kependudukan di dalam panti	panti			
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di luar panti		100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti		100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar		100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia		100%	Persentase lansia terlantar yang

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Terlantar yang menerima paket sandang di luar panti			memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di luar panti		100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		795 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi		23364 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Jumlah Anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga		795 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang	Jumlah Anak Terlantar diluar panti yang mendapatkan akses ke		130 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	layanan pendidikan dan kesehatan dasar			Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Anak Terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		795 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi		23364 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Jumlah alat bantu yang disediakan diluar panti		1000 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar		130 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di luar panti		6 jenis	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		795 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga		795 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti		100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam	Jumlah Lanjut Usia terlantar diluar panti		795 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga			Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi		4716 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		795 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		795 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan		4716 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi		23364 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		standar gizi				
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di luar panti		100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan luar panti		1000 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					215 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial		12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak
		Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi		12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	rehabilitasi sosial			
		Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial		12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial		12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti		100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di luar panti		100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
4	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat	Jumlah korban bencana kelompok rentan			467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Jumlah korban			467	Jumlah Korban Bencana yang

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
	Bencana Daerah Kabupaten/Kota	bencana yang mendapatkan paket permakanan			Orang	Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan			467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					11.000 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
		Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial		11.000 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		100%	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon kurang dari 7 menit
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang	Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan		11.000 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Bantuan Perlindungan Sosial			Bencana
		Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial		31 Kawasan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
6	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya			1.650 Kawasan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya		35,38%	Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja
					30,20%	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya
					1100 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
					720 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
2	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja		1100 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
					720 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
					22,01%	Persentase tenaga kerja yang terserap
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri		22,01%	Persentase tenaga kerja yang terserap
					1950 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL
					250 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
		Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan		30,20%	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya
					22,01%	Persentase tenaga kerja yang terserap
3	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya		12 Laporan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
					250 Orang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak		50 Perkara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah
					110 Perkara	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		hak pekerja dan dialog sosial	pekerja dan dialog sosial			

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		93,75	Indeks Pembangunan Gender
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		64.51 %	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan
					100%	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam
					83,96%	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		83.76 %	Indeks Pemberdayaan Gender
		Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD		100%	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender
					100%	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		1 kegiatan	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak
					3	Kegiatan yang memfasilitasi

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					kegiatan	dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak
					10 Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif		64.51 %	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak
					100%	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam
					83,96%	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		1,22	Indeks Kecukupan Pangan Pokok

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
2	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan		95,2	Skor Pola Pangan Harapan
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		97,89%	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman
3	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	Persentase daerah rentan rawan pangan	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi		96,70%	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi		N/A	Pemerintah Kota Surabaya fokus untuk memanfaatkan semua tanah aset untuk kepentingan umum masyarakat, khususnya untuk program pemberdayaan masyarakat sehingga tidak melaksanakan redistribusi tanah di Kota Surabaya
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria		N/A	Kegiatan AKSES Reforma Agraria dilaksanakan oleh BPN/Kantor Pertanahan sebagai leading sector

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		68,75 Poin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)
2	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan		70%	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan
		Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		70%	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan
3	Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD		3 dokumen	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun
					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		95%	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		95%	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan		95%	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan
		Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan		5 Lembaga	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan
					60%	Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama
					5 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun		4 Informasi	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan
					100%	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun		95%	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar		N/A	
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar		N/A	
		Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa		N/A	
2	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal		N/A	
		Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang		N/A	
		Jumlah Desa	Jumlah Desa Mandiri		N/A	

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Mandiri				
3	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa Maju	Jumlah BUM Desa Maju		N/A	
		Jumlah BUM Desa Berkembang	Jumlah BUM Desa Berkembang		N/A	
4	Meningkatnya status Perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)		N/A	
5	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju		N/A	
		Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang		N/A	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		58.20 %	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)
2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		1.74 %	Angka Kelahiran Total (TFR)

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
	pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		25	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)		84%	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		18.10 %	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Provinsi		60%	Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	On Time Performance Layanan Transportasi	On Time Performance Layanan Transportasi		31%	Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder
					42%	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi		80%	Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan		6.0 %	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		322 Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah		322 Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		dengan jaringan intra pemerintah daerah				
2	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		322 Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda		190 Unit	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi	-	Persentase perangkat daerah yangmendapatkan sosialisasi program inovasi yangmendukung kabupaten/kota cerdas		58 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas		58 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah ASN	-		N/A	Indikator tersebut merupakan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas				indikator pada provinsi.
		-	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas		58 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
5	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi		54%	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)		12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		100%	Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja
		Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi olehDinas Kominfo Provinsi	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota		12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
		Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah		12 Dokumen	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		60%	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha
		Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas		69%	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha		24%	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor		136 Orang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan
					29,86%	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha
					136 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
		Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		N/A	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal		50.5 Triliyun Rupiah	Nilai Investasi Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi	Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
2	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	. terbenuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat provinsi	Terbenuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat provinsi		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Indeks Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda		0,76	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Pemuda				

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah		5 Sektor	Jumlah sektor yang dianalisa
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar		12 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
		Persentase	Persentase Organisasi		12	Jumlah Dokumen Koordinasi

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik		Dokumen	dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D		N/A	Peningkatan kompetensi pengelola keamanan siber tersertifikasi belum dilaksanakan
		Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV	Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV		N/A	Peningkatan kompetensi pengelola keamanan siber tersertifikasi belum dilaksanakan
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT		N/A	Peningkatan kompetensi pengelola keamanan siber tersertifikasi belum dilaksanakan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah		3 kali/per hari	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59		3,3 (Baik)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		895 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		8 Unit	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		895 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		8 Unit	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan		275 lokasi	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		dilestarikan			275 Objek	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
2	Pemajuan Kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan		N/A	
		Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni		60,00%	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		69.4 Nilai	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat
2	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyaraka	Indeks Pembangunan Literasi Masyaraka		69.4 Nilai	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi		8640 Lembar	Arsip yang dialih mediakan
					28,84%	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
					300 Arsip	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa		1.200 Pengguna	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
2	Penerapan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi		7200 item	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
					14,07%	Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
3	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas		54 lembaga	Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup
					76,21%	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					66 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi		70 Lembaga	PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi. Kota Surabaya mendukung urusan tersebut pada indikator lainnya
2	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap		18.330,15 Ton	Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya		18.330,15 Ton	Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan
		Konsumsi ikan	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Kabupaten/Kota pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya		12 Kali	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas	Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas		12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
		POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Kontribusi PDRB Pariwisata	Kontribusi PDRB Pariwisata		5,37%	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum
					5,37%	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara		43,50%	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					29,70%	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai)		18.251 Ton	Jumlah hasil produksi sektor pertanian
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)		18.251 Ton	Jumlah hasil produksi sektor pertanian

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, dan tebu)	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, dan tebu)		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Jumlah produksi daging	Jumlah produksi daging		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Jumlah produksi susu	Jumlah produksi susu		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Jumlah produksi telur	Jumlah produksi telur		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)		N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di RKPD 2024
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		12 Laporan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	-		N/A	Tidak terdapat urusan bidang kehutanan yang diampu oleh Kota Surabaya
2	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	-		N/A	Tidak terdapat urusan bidang kehutanan yang diampu oleh Kota Surabaya

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	-		N/A	Tidak terdapat urusan bidang ESDM yang diampu oleh Kota Surabaya
2	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	-		N/A	Tidak terdapat urusan bidang ESDM yang diampu oleh Kota Surabaya
3	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	-		N/A	Tidak terdapat urusan bidang ESDM yang diampu oleh Kota Surabaya

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas		N/A	
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
3	Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
4	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Tertib Usaha	Tertib Usaha		12 Laporan	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
					12 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
					12 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					12 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
					40 Dokumen	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
					24 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
					24 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
					450 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					60 Dokumen	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang
5	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk		N/A	Tidak ada indikator sesuai di RKPD 2024
6	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok		100%	Persentase intervensi ketersediaan komoditas
					98%	Tingkat stabilitas harga komoditas
7	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan	Inflasi Pangan Bergejolak	Inflasi Pangan Bergejolak		12 Laporan	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang
8	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)	-		N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		3,96%	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB		3,96%	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan
3	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)		N/A	Tidak ada indikator sesuai di RKPD 2024
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)		N/A	Tidak ada indikator sesuai di RKPD 2024
5	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)		N/A	Tidak ada indikator sesuai di RKPD 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi		N/A	Tidak terdapat urusan bidang transmigrasi yang diampu oleh Kota Surabaya
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi		N/A	Tidak terdapat urusan bidang transmigrasi yang diampu oleh Kota Surabaya

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1	Jumlah provinsi dengan indeks kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kategori baik	Jumlah provinsi berkinerja baik	Jumlah provinsi berkinerja baik		N/A	Kewenangan Provinsi
2	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	Rekomendasi kebijakan	Rekomendasi kebijakan		N/A	Kewenangan Provinsi

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
3	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia		30 Lembaga	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
					8 Lembaga	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
					54%	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
					100%	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina
					89,3	Indeks Kepedulian Sosial
					0,88	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					89,3	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan
					4.33 %	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan
					690 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
					60 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
					82,13	Indeks Harmoni Sosial
					89,3	Indeks Kepedulian Sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					95,67%	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan
		Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional		12 Lembaga	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional
					18 Lembaga	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial
					100%	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti
					100%	Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti
					0,88	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota
					4.33 %	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					44 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					18 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					82,13	Indeks Harmoni Sosial
					95,67%	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan
		Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja Ormas		31 Lembaga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
					60%	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan
					0,88	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota
					4.33 %	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan
					2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
					82,13	Indeks Harmoni Sosial
					95,67%	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan

4.2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunananya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Pada tahun 2024 arah kebijakan tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah ***"Peningkatan kualitas tata kota dan sistem transportasi terpadu pendukung sektor utama yang sinergi dengan kebijakan nasional dan daerah sekitar"***. Berdasarkan pertimbangan tersebut penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan program pembangunan Pemerintah Kota yakni penataan Drainase untuk penanganan genangan dan pencegahan banjir serta optimalisasi penerangan jalan umum. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam RKPD Kota Surabaya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.8
Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
Dinas Perhubungan					
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	SAWAHAN BARU 1-2, RT 3-4 kel. petemon kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
2	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	SAWAHAN BARU 2 & 3 WILAYAH SEKOLAH kel. petemon kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
3	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Simo gunung kramat selatan RT 03 / RW 14 kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
4	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Simo Gunung Kramat Barat I kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
5	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	JALAN LAMONGAN RT 01 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
6	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	JALAN LAMONGAN RT 02 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
7	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	JALAN LAMONGAN RT 03 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
8	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	JALAN LAMONGAN RT 06 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
9	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Simo gunung kramat barat RT 7 / RW 14 kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
10	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	simo kwagean kuburan RT 08 kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
11	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	JALAN DONOKERTO RT 02 RW 07 KELURAHAN KAPASAN KECAMATAN SIMOKERTO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
12	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	JALAN JEPARA 4 RT 04 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
13	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	JALAN JEPARA 5 RT 05 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				BUBUTAN, Kota Surabaya	
14	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Putat jaya 3A RT 03 / RW 03 kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
15	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	JALAN JEPARA 6 RT 06 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
16	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JALAN DUPAK MASIGIT 3 RT 01 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
17	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	JALAN DUPAK MASIGIT 14 RT 17 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
18	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	JALAN DUPAK MASIGIT 10 RT 09 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
19	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JALAN DUPAK MASIGIT 11 RT 10 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
20	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JALAN DUPAK MASIGIT 2 RT 19 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
21	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	35 titik	JALAN RAYA PURWODADI RW 04 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
22	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	JALAN DUPAK BARU RT 09 RW 05 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
23	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	JALAN DUPAK JAYA 7 RT 07 RW 07 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
24	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JALAN DUPAK TIMUR 1 RT 01 RW 08 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
25	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	JALAN DUPAK MAGERSARI 1 RT 01 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	JALAN DUPAK MAGERSARI 2 RT 02 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
27	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	JALAN DUPAK MAGERSARI 3 RT 03 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
28	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	JALAN DUPAK MAGERSARI 4 RT 04 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
29	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	JALAN TAMBAK ASRI GANG MELATI 2 RT 04 RW 06 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
30	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	SIMO JAWAR I RW 1 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
31	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	JALAN TAMBAK ASRI GANG MELATI 3 RT 04 RW 06 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
32	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	JL. RAYA SIMOREJOSARI B kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
33	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	JL. RAYA SIMOREJOSARI B GG. 07 RT 03 / RW 07 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
34	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	JL. RAYA SIMOREJOSARI B GG. 08 RT 04 / RW 07 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
35	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	JL. RAYA SIMOREJOSARI B GG. 09 RT 05 / RW 07 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
36	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	JL. RAYA SIMOREJOSARI B GG. 17 RT 09 / RW 07 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
37	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	JL. RAYA SIMOREJOSARI B GG. 14 RT 10 / RW 07 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
38	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	SIMO GUNUNG BARAT TOL II RT 06 / RW 08 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
39	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	BANYU URIP JAYA I/25 RT 01 / RW 05 kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
40	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	BANYU URIP JAYA I/32 RT 02 / RW 05 kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
41	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	BANYU URIP JAYA I/46 RT 02 / RW 05 kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
42	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Dukuh Bulak Banteng Perintis Utama 3/56. Kelurahan Bulak Banteng-Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
43	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Kalimas Baru 3 Gang 1 No. 6 , Kelurahan Tanjung Perak - Pabean Cantian, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
44	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Dukuh Kupang Utara II RT.08 RW.08 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
45	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Pondok Benowo Indah RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
46	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Pondok Benowo Indah RT.02 RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
47	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	Jl. Wonorejo 4 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
48	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	JL. Kraton 3 RW 06, RT 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
49	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jalan Pakal Barat Jaya 1A RT 01 RW 03 Kel. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
50	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jalan Pakal Barat Jaya 1B RT 01 RW 03 Kel. Pakal Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
51	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	5 titik	Jalan Pakal Barat Jaya 1C RT 01 RW 03	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		Kel. Pakal Kec. Pakal, Kota Surabaya	2024
52	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jalan Pakal Barat 1C RT 01 RW 03 Kel. Pakal Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
53	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jalan Pakal Barat Kluwong 2 RT 02 RW 03 Kel. Pakal Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
54	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	20 titik	JL. LEBAK JAYA 2 TENGAH UTARA RT 10 RW 03 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
55	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Pulosari I RT.001 RW.006 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
56	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jalan Wonokitri RT.002 RW.005 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
57	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	Jalan Kencanasari RT.003 RW.006 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
58	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jalan Pulosari 2-i RT.004 RW.002 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
59	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jalan Asemrowo Sentral RT.002 RW.003 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
60	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	Jalan Kebraon RT.001 RW.002 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
61	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jalan Karangpilang RT.002 RW.001 Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
62	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	Jalan Sumberan RT.001 RW.004 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
63	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Jalan Sumberan Makam RW.004 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
64	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	RT 6 RW 3 KEL. KAPASAN, KEC. SIMOKERTO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
65	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	RT 10 RW 1 KEL. BUBUTAN, KEC. BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
66	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	RT 6 RW 7 KEL. SIDODADI, KEC. SIMOKERTO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
67	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	JALAN TAMBAK ASRI BLOK MELATI RT 12 RW 06 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
68	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	JALAN TAMBAK ASRI BLOK MAWAR RT 12 RW 06 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
69	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	JALAN TAMBAK ASRI BLOK KENANGA RT 12 RW 06 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
70	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	JALAN IKAN GURAMI 2 RT 03 RW 06 KELURAHAN PERAK BARAT KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
71	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	JALAN IKAN DORANG BARU RT 09 RW 03 KELURAHAN PERAK BARAT KECAMATAN KREMBANGAN. Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
72	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	17 titik	JL.RAYA SENDANG BULU . RT 6 RW 5. KEL BABAT JERAWAT. Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
73	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Pesapen Gang Musang RT 01 RW 02 Kel. Sumurwelut Kec. Lakarsantri, Kota	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Surabaya	
74	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Pesapen Gang Musholla Al-Marwah RT 01 RW 02 Kel. Sumurwelut Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
75	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Pesapen RT 02 RW 02 Kel. Sumurwelut Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
76	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Pesapen RT 04 RW 02 Kel. Sumurwelut Kec. Lakarsantri , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
77	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Pesapen RT 06 RW 02 Kel. Sumurwelut Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
78	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Pesapen RT 05 RW 02 Kel. Sumurwelut Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
79	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	100 titik	JL. BULAK BANTENG GANG BAROKAH 2 RT 03 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
80	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	REJOSARI JURANG KUPING. RT4 RW3, KEL BENOWO, KEC PAKAL. Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
81	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	JL.REJOSARI GG ANGGREK. RT4 RW3. KEL BENOWO. KEC PAKAL. Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
82	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	REJOSARI GG MAWAR, RT4 RW3. KEL BENOWO. KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
83	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	NGAGEL TIMUR V, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
84	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	SIMOKERTO II , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
85	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Tambak Bayan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
86	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Dupak Bangunsari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
87	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	DONOREJO II, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
88	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	jl.Dupak bangunrejo 4 RT.10 RW.05 surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
89	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	4 titik	jl.Gundih 3 RT.06 RW.01 surabaya	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		, Kota Surabaya	2024
90	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	jl.Gundih 1 RT.01 RW.01 surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
91	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	25 titik	jl.Tambak asri Wijayakusuma raya RT.24 RW.06 surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
92	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	jl.Tambak Asri Melati gg.1,2,3 RT.4 RW.06, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
93	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	jl.Lasem RT.13 RW.05 Dupak krembangan surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
94	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	20 titik	jl.Tambak asri Gading Lebar,1,2&3 RT.23 RW.06, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
95	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	jl.Tambak Asri Gg. 3 , 4 , 5 RT.2 RW.06, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
96	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	RW 03, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
97	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	jl. Pasar Wage RT.09 RW.01 Kelurahan Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
98	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Bulak banteng madya RT.01 RW.09 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran (bagian luar jalan raya), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
99	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Bulak banteng madya Gg.11 RT.11 RW,09 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
100	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Bulak banteng madya Gg.13 RT.11 RW.09 Kel. sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
101	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Bulak banteng madya Gg.14 RT.11 RW.09 Kel. Sidotopo wetan Kec. kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
102	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	10 titik	Bulak banteng madya Gg.15. RT.11	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		RW.09 Kel. sidotopo wetan Kec. kenjeran, Kota Surabaya	2024
103	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Bulak banteng madya Gg tengah RT.11 RW.09 Kel. sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
104	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	DK. Bulak banteng sekolahan 5A RT.06 RW.06 Kel. Bulak banteng Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
105	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	30 titik	RT 01 RW 07, Kalijudan Indah, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
106	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	DK.Bulak banteng Sekolahan 6ART.06.RW.06 Kel. Bulak banteng Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
107	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	DK.Bulak banteng sekolahan Gg.4 RT.01 RW.01 Kel.Bulak banteng Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
108	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	RT 03 RW 07, Kalijudan Indah, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
109	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	18 titik	RT 05 RW 07, Kalijudan Indah, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
110	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	13 titik	RT 02 RW 07, Kalijudan Indah, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
111	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Bulak banteng baru Gg.Tengah RT.01 RW.07 Kel.Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
112	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	18 titik	RT 04 RW 07, Kalijudan Indah, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
113	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	36 titik	Jalan kembar RW 07, Kalijudan Indah, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
114	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak banteng baru Gg. Tanjung RT.02 RW.07 Kel. Sidotopo Wetan Kec.	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Kenjeran, Kota Surabaya	
115	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak banteng baru Gg. Kemuning RT.05 RW.07 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
116	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Bulak banteng baru Gg. Kenanga RT.06 RW.07 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
117	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Bulak banteng baru Gg.Flamboyan RT.03 RW.07 Kel. sidotopo wetan Kec. kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
118	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	21 titik	Jl. Deles gg V, RT 01 RW 04, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
119	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Platuk donomulyo RT.02 RW.13 Kel. sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
120	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Randu Plam RT.01 RW.13 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
121	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Platuk Donomulyo Gg,14A RT.11 RW. 13 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
122	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Platuk Donomulyo Gg.12 RT.12 RW.13 Kel. sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
123	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Platuk Donomulyo Utara 1 RT.14 RW. 13 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
124	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 Tiang/titik	Platuk Donomulyo Utara 2 RT.14 RW.13 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
125	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Platuk Donomulyo Utara 3 RT.14 RW.13 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
126	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 Tiang/titik	Platuk Donomulyo Utara 4 RT. 14 RW.13 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
127	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Platuk Donomulyo Utara 1A RT.12 RW. 13 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
128	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Palatuk Gg. Teladan RT.02 RW. 02 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
129	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Randu Gg.1 RT.08 RW.02 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
130	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Platuk Baru Gg. Buntu RW.02 Kel Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
131	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Randu Agung Gg. Mawar RT.15 RW.10 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
132	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Sawah pulo RW.12 Kel. Ujung Kec. Semampir (Bagian luar jalan jurusan balai RW), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
133	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Sawah Pulo RT.02 RW.12 Kel. Ujung Kec. semampir (Pertigaan jalan Gg.2 dan Gg.6), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
134	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak banteng wetan Gg.5 RT.4 RW.08 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
135	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak banteng wetang Gg.7 RT.06 RW,08 Kel. sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
136	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak banteng wetan Gg. 9 RT.8 RW,08 Kel. sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
137	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak banteng Ga.11 RT.10 RW.08 Kel. sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
138	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak banteng wetan Gg.15 RT.14 RW.08 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
139	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak banteng wetan Gg.08 RT.07 RW.08 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Surabaya	
140	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	14 titik	Penambahan PJU jalan tembusan RW.14 Kel.sidotopo wetan kec. kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
141	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak banteeng wetan Gg.8 RT.07 RW.08 Kel. sidotopo wetan Kec. kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
142	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Gg. Dahlia RW.14 Kel. sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
143	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	14 titik	RT 01 RW 04 gang 6 gang Duku gang 7 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
144	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Klampis Ngasem RT 04 RW 01, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
145	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	jelidro tegal Gang 2 RT 9 RW 1 Sambikerep kec. sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
146	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	jelidro tegal Gang 3 RT 9 RW 1 Sambikerep kec. sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
147	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	sepanjang jalan Jelidro Indah RT 9 RW 1 Sambikerep kec. sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
148	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	42 titik	Jl. Kendalsari, RT 02 RW 03, Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
149	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	RT 06 RW 02, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
150	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Tambak Pring timur 4 RT 04 RW06 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
151	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 Unit	Jl. Pradah Indah Gg. 3 dan Gg. Buntu Dk. Pakis Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
152	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	9 titik	Jl. Klampis Ngasem RT 03 RW 01, Kel.	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	2024
153	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Wiyung RT.03 RW.06 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
154	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Kampung nelayan Tempurejo, Jl. Tempurejo Tanggul, Kel. Tempurejo, Kec. Mulyorejo (Pak Waras - 089612530135), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
155	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Makam Islam RW 04 (Deles), Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo (Pak Eko - 082232923145), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
156	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	makam kebraon gang 5,kelurahan kebraon kecamatan karangpilang.bp. joko 085733777378, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
157	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 unit	Jl. Deles Gg V, RT 01 RW 04, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo (Pak Eko - 082232923145), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
158	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	kemlaten gang 12D,kelurahan kebraon.kecamatan karangpilang..no telp bp sukar 081235601957, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
159	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Deles Gg I, RT 02 RW 04, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo (Pak Eko - 082232923145), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
160	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	kemlaten indah baru blok A-B,kel.kebraon,kec.karangpilang..pemohon bp. robi no telp 089933669299, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
161	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	jl.kemlaten gang 12 E (gang buntu) RT 03 RW 07.kel. kebraon,kec.karangpilang.bp RT Joko no telp 081331852227, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
162	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Uka RT 02 RW 02 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
163	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Nginden 5E dan 5D, RT 04 RW 04, Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
164	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	wisata batas kampung RT 02 RW 04 kel.balas klumprik kec.wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
165	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Nginden VI D, RT 06 RW 04, Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
166	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	RT 03 RW 02, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
167	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	RT 04 RW 02, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
168	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	kebraon MITRA satwa RT 09 RW 03,Kel.kebraon.kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
169	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	29 titik	jl.karang klumprik utara 123 perum.pondok maritim.kel.balas klumprik kec.wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
170	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	RT 02 RW 04 Gang teratai,sumberan.kel.balas klumprik,kec.wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
171	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	29 titik	jl.karang kluprik utara 123,perum.pondok maritim RW/RT 1 dan 2,ke.balas klumprik,kec.wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
172	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Uka Gang 16 RW 02 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
173	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Uka Gang 17 RT 10 RW 02 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
174	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jalan Jugruk Rejosari Gang 2 RT 02 RW 07 Kel. Kandangan Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
175	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jalan Tengger Raya 06 RT 06 RW 02 Kel. Kandangan Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
176	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	KLAKAH REJO RT1 ,RW 8, KEL KANDANGAN, KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
177	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	4 titik	KLAKAH REJO GANG MAKAM RT4	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		RW8, KEL KANDANGAN, KEC BENOWO, Kota Surabaya	2024
178	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Sulung Gang II, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
179	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Sulung Gang III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
180	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Sulung Tengah , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
181	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Sawahan DKA IV RW. 02 Kel. Petemon Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
182	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Banyu Urip Kidul 4A RT. 03 RW. 03 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
183	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Simo Kalangan II RT. 05 RW. 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
184	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	RT.08 RW.04 Jl. Banyu Urip Kidul Molin 2B/94 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
185	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	20 unit	Jl Bulak Kali Tinjang Baru Timur Gg 1 & 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
186	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 unit	Bulak Kali Tinjang Baru RT 05 RW 06 Kel Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
187	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl Bogorami Makam RT 05 RW 03 Kel Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
188	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JL. KALIJUDAN BARAT RT 11 RW 5 KALIJUDAN, MULYOREJO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
189	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	JL. KALIKEPITING 159 B RT 8 RW 5 PACARKEMBANG, TAMBAKSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
190	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Sulung Gang IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
191	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Sulung Gang V, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
192	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Sulung Gang I, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
193	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	7 titik	Sulung Sambongan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)			2024
194	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jalan Johar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
195	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Sulung Sekolahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
196	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Jalan Sulung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
197	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Bronggalan 2F, Kelurahan Pacarkembang - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
198	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Ploso Baru 104, Kelurahan Pacarkembang - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
199	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Bronggalan 2E, Kelurahan Pacarkembang - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
200	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Bronggalan 2G, Kelurahan Pacarkembang - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
201	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Bronggalan 2G , Kelurahan Pacarkembang - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
202	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Dukuh bulak banteng Suropati 5e no 32, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
203	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	20 titik	Dukuh Bulak Banteng printis utama 2A Kelurahan Bulak Banteng - Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
204	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Dukuh Bulak Banteng printis utama 2 Kelurahan Bulak Banteng - Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
205	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	RT.02 RW.04 Jl. Banyu Urip Kidul 1 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
206	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	RT.01 RW.07 Jl. Banyu Urip Wetan Tengah 3 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
207	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	RT.02 RW.06 Jl. Banyu Urip Wetan 1-A Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Surabaya	
208	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	RT.14 RW.04 Jl. Pakis Gunung 1/52 B Kel. Pakis Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
209	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	RT.10 RW.05 Jl. Dukuh Kupang Timur 1 Kel. Pakis Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
210	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	RT.02 RW.04 Jl. Pakis 50 Kel. Pakis Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
211	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	RT.03 RW.06 Jl. Banyu Urip Wetan 1 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
212	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Pondok Benowo Indah RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
213	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 Paket	Keputran 4/4a RT02 .RW01 SBY., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
214	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	SIMO GUNUNG BARU JAYA RT 02 / RW 15 Kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
215	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	SIMO GUNUNG BARU JAYA RT 04 / RW 15 Kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
216	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	DEPAN BALAI RT 02 / RW 04 Kel. putat gede kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
217	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	DUKUH KUPANGGG. XXXI BELAKANG GAPURA UTAMA RT 04 / RW 04 Kel. putat gede kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
218	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	DUKUH KUPANG BARAT GG. XXXI SEBELAH SUNGAI SISI SELATAN RT 04 / RW 04 Kel. putat gede kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
219	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	DUKUH KUPANG BARAT GG. XXXI DEPAN TK PANCA BAKTI RT 04 / RW 04 Kel. putat gede kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
220	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	kedurus gang 3 RT 01 RW 02 kel.kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
221	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	jl kedurus RT 02/RW 02,kel.kedurus kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
222	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	jalan kedurus RT 03 RW 02,kel kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
223	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	jalan kedurus RT 04 RW 02 kel.kedurus kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
224	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	jalan kedurus gang 3 RT 05 RW 02,kel kedurus,kec karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
225	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jalan kedurus gg 3 RT 06 RW 02,kel.kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
226	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	jalan kedurus gg 3 RT 07 RW 02,kelurahan kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
227	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jalan kedurus gg3 RT 08 RRW 02,kel.kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
228	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	20 titik	RT.03 RW.14 Jl. Simo Gunung Kramat Selatan no. 48 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
229	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	jalan kedurus gg 3 RT 09 RW 02,kel.kedurus ,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
230	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	jl.mastrip kedurus gang 3 masjid,kel.kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
231	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	jalan mastrip kedurus bogangin,kel.kedurus,kec karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
232	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	jl. mastrip kedurus dukuh,kel.kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
233	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	10 titik	perumahan taman podok indah	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		wiyung,kel.wiyung,kec.wiyung, Kota Surabaya	2024
234	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	jl. kedurus gg 4 RT 12 RW 03,kel.kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
235	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	jl.mastrip kedurus gang 1 RT 05 RW 01,kel.kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
236	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	50 titik	perumahan gunungsari indah,kel.kedurus kec karang pilang,wil.RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
237	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Tanah Merah sayur 1 Kel Tanah kalikedinding Kec Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
238	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	KLAKAH REJO , JL. NURI. RT2 RW8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
239	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JL. PLOSO TIMUR 1 A, PLOSO, TAMBAKSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
240	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	JL. PLOSO TIMUR 1 E, PLOSO, TAMBAKSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
241	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	JL. PLOSO TIMUR BUNTU, PLOSO, TAMBAKSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
242	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Gading Karya VI & VI-A Kelurahan Gading - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
243	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JL. POGOT BARU 3/8 RT 6 RW 6, TANAH KALI KEDINDING, KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
244	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JL. KAPAS MADYA GANG 3 I RT 13 RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
245	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JL. KAPAS MADYA 1-A-1 RT 10 RW 3, GADING, TAMBAKSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
246	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	JL. KAPAS MADYA 1G NO. 51 RT 9 RW 3, GADING, TAMBAKSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
247	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JL. KAPASMADYA GANG I-C-I, GADING, TAMBAKSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
248	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JL. KAPAS MADYA GANG 3 I RT 13 RW 1, GADING, TAMBAKSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
249	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	perumahan Gunungsari indah blok J-N,M-N,M16 RT 01 Rw 07,kel.kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
250	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Perumahan gunungsari indah RT 02 RW 07,kel.kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
251	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	perumahan gunungsari indah RT 03 RW 07,kel.kedurus,kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
252	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Perumahan gunungsari indah RT 04 RW 07,kel.kedurus.kec.karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
253	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	jl.Tambak Asri Gg.1 & 2 RT.01 RW.06 Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
254	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Tenggumung Wetan Merpati III RT.03 RW.08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
255	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Wonokusumo Jaya Baru III RT.15 RW.11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
256	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Jl. Platuk Donomulyo Utara 1B RT.14 RW.13, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
257	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Jl. PLatuk Donomulyo Utara 2 RT.14 RW.13, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
258	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Jl. Platuk Donomulyo Utara 3 RT.14 RW.13, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
259	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 unit	Jl Gading Indah Utara Gg 1 - Gg 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
260	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl. Tambak Wedi Lama RT.01 RW.02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
261	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	11 titik	Jl. Bulak Banteng 4 RT.01 RW.01, Kota	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		Surabaya	2024
262	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl. Bulak Banteng Sekolahan 5 RT.01 RW.01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
263	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Rusun Tanah Merah RT.06 RW.03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
264	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 unit	Jl Bulak Kali Tinjang Baru 2A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
265	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 unit	Jl Bulak Kali TInjang Gg II, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
266	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	Jl Bulak Kali Tinjang Baru Gg 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
267	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Bulak Kali Tinjang Baru semua blok, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
268	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl Tembusan Bulak Cumpat Barat, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
269	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Nambangan Gg H. Sulaiman, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
270	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	depan balai RW 03 Kel Kedung Cowek, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
271	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl Medayu Utara Gg 13B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
272	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 unit	Jl Medayu Utara Gg 30D, Jl Medayu Utara Gg 30D1, Jl Medayu Utara Gg 30D2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
273	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Buntaran RT.06 RW.01 Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
274	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Putat Gede Barat RT 03/RW 01, kel. Putat Jaya, kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
275	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	KLAKAH REJO RT1 RW8, KEL KANDANGAN, KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
276	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl. Platuk Donomulyo Utara 4 RT.14 RW.13, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
277	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	6 titik	Jl. Tambak Wedi Lama Dalam 4 RT. 02 ,	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		Kota Surabaya	2024
278	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl. Tambak Wedi Tengah Timur (rusun) RT. 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
279	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	JALAN PLEMAHAN 2 RT 02 RW 10 KELURAHAN KEDUNG DORO KECAMATAN TEGALSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
280	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Gemblongan, RT 01, RW 03, Kel. Alun - Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
281	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Gemblongan, RT 03, RW 03, Kel. Alun - Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
282	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Johar, RW 01, Kel. Alun - Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
283	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	20 titik	RT 07, RW 07, Kel. Tembok dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
284	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Praban Kulon 3, RT 02, RW 05, Kel Alun - Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
285	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Praban Kulon 1, RT 1, RW 5, Kel. Alun - Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
286	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Bubutan GG 3, RT 04, RW 05, Kel. Alun - Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
287	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Temanggungan 2, RT 03, RW 05, Kel. Alun - Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
288	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Bubutan gg 4, RT 04, RW 05, Kel. Alun - Alun Contong, Kec Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
289	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	28 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur 1 & 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
290	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Bulak Setro Utara Gg 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
291	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Bulak Setro Utara Gg Makam dan dekat lapangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
292	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	17 titik	RT 5 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
293	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Bulak Setro 1B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
294	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Bulak Cumpat Srono IV, IV A, dan Gg Made, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
295	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	11 titik	RW 1 RT 11 Sememi Gang 9 Kel. Sememi Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
296	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	25 titik	RW 3 RT 1 kel. Sememi Kec Benowo (Penerangan untuk 4 gang), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
297	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	RT 02/RW 04, kel. Simo Mulyo – kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
298	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl Saliman RT 02 RW 07 Komplek AL Kenjeran kel sukolilo baru kec bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
299	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Tanjungsari jaya, RT 14/RW 02 kel. Tanjungsari – kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
300	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	RT 02 RW 06 kuwukan, Kel. lontar kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
301	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	Jalan Sambiroto IX korwil 8 RT 02 RW 07 Kel. Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
302	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Manukan Loka RT 02 RW 02 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
303	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Manukan mulyo RT 03 RW 02 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
304	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Manukan mulyo RT 05 RW 02 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes , Kota	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Surabaya	
305	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Tambak Wedi No. 22 (Balai RW.02) Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
306	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl.Gading Karya VI Kelurahan Gading - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
307	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl.Gading Karya IV Kelurahann Gading - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
308	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl. Lebo Agung VIII RT.05 RW.02 Kel. Gading, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
309	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl. Lebo Agung III RT.05 RW.02 Kel. Gading, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
310	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl. Lebak Arum Barat RT.05 RW.02 Kel. Gading Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
311	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 Unit	Jl Villa kalijudan Indah 35 RT 03 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
312	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	25 titik	Jl Villa kalijudan Indah RW 07 Kel kalijudan kec mulyorejo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
313	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Dk. Sumberejo RT 1 - RT 05 RW 05 Ke. Sumberejo Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
314	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Gading II, Kelurahan Gading - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
315	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Sememi Jaya Selatan 1 Gang Utama RT 10 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
316	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	18 titik	RT 04, RW 04, Kel. Tembok dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
317	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Gading Karya 1 Kelurahan Gading - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
318	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Jambangan Gg. 4 RW II/RT III, Jambangan, Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
319	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	6 titik	RT.04 RW.03 Jl. Simorejo Timur no. 4	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya	2024
320	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Kalisari sayangan, RT 1, RW 10, kelurahan kapasari, kecamatan genteng,, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
321	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	50 titik	RW 05 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
322	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jetis Baru Lebar Gg 4, RT 16/RW 4, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
323	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jetis Baru Lebar Gg 3, RT 16/RW 4, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
324	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jetis Baru Lebar Gg 2, RT 16/RW 4, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
325	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Wonokromo Pasar 6, RT 8/RW 6, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
326	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Wonokromo Tengah 2 RT 9/RW 6, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
327	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Wonokromo Tengah 7 RT 12/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
328	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Wonokromo 5 RT 3/RW6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
329	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Balai RW 6, Wonokromo Pasar Lama, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
330	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Wonokromo 1, RT 4/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
331	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Wonokromo tengah 8, RT 13/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
332	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Wonokromo 3, RT 13/RW 6, Wonokromo, Wonokromo	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				, Kota Surabaya	
333	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Wonokromo Tengah 9, RT 9/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
334	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Wonokromo Tengah 10, RT 14/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
335	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Wonokromo 4, RT 5/RW 6 Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
336	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Wonokromo 5, RT 6/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
337	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Wonokromo 7, RT 7/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
338	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	RT 01 dan RT 07 RW 05 Kampung Malang 8 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari. Pak Purwono (0821 3292 7834), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
339	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Wonokromo Pasar 5, RW 6, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
340	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Wonokromo Pasar 4, RT 6/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
341	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	Kalimir RT 13, RT 10, RT 11, RT 8, RT 9/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
342	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Jetis Kulon Makam dan Jetis Kulon 1, RT 2/RW 4, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
343	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Jetis Kulon Gg 6 & Jl Jetis Kulon 1, RT 4/RW 4, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
344	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	20 titik	semua RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6 RW 5 Pradah kali kendal Kec Dk pakis ,	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Kota Surabaya	
345	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Jetis Baru I, RT 18/RW 4, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
346	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Jetis Baru Gg 1, RT 14/RW 4, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
347	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Jetis Kulon 10/G, 10/H, dan No.75, RT 11/RW 4, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
348	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Ketintang No. 89, RT 19/RW 4, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
349	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Gg Nirwana, RT 12/RW 4 Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
350	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	Jl. Ketintang 177, RT 6/RW 4, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
351	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Jetis Kulon Gg 7, RT 8/RW 4, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
352	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Jl. Jetis Kulon Gg 2, Gg 3, dan Gg 4, RT 5/RW 4, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
353	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 unit	Jl. Bulak Jaya Gg 8 RT.06 RW.15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
354	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Jetis Agraria Gg 1, RT 15/RW 4, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
355	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Makam Islam Jetis, Jl Ketintang, RW 4, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
356	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	Jl. Jetis Kulon 1 gg Tembus, RT 9/RW 4, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
357	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl. Ketintang masjid dan Jl. Ketintang lV F, RT 10/RW 1, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
358	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	jl Ketintang 4B dan ketintang 4C, RT 9/RW 1, Wonokromo, Wonokromo	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				, Kota Surabaya	
359	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl Ketintang 4E dan Jl. Ketintang 1A, RT 6/RW 1, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
360	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Ketintang GG 4A, RT 5/RW 1, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
361	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Ketintang l Masjid, RT 4/RW 1, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
362	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Ketintang 2, RT 3/RW1, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
363	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	16 titik	Jl. Ketintang GG 2, RT 1 dan RT 2/RW1, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
364	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Nginden jaya 1/41A RT 07 RW 05 (Anto, 082134199110), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
365	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl. Nginden Jaya 1/41A RT 09 RW 05 (Anto, 082134199110), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
366	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Makam RW 8, Jl. Karangrejo IV, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
367	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Karangrejo Balong, RT 8/RW 8, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
368	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Pulo Wonokromo 195-241, RT 7/RW 8, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
369	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Karangrejo V, RT 5/RW 8, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
370	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Karangrejo IV, RT 4/RW 8, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
371	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Karangrejo II, RT 2/RW 8, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
372	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Karangrejo I Buntu, RT 1/RW 8, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
373	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Karangrejo I, RT 1/RW 8, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
374	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Balai RW 4, Jl Jetis Kulon 2 No.1, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
375	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Semampir Tengah Gang 8 A RT 11 RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
376	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Jl. Jetis Kulon 1 RT 20/ RW 4, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
377	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	RT 11 RW 07 Taman , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
378	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Jl. Wonokromo Tangkis RT 8, RT 9, dan RT 10/RW 5, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
379	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Jetis Baru Gg 1 RT 14/RW 5, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
380	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	13 titik	Jl. Wonokromo Pasar 4, Pasar 5, dan Wonokromo 5; RT 6/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
381	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Wonokromo tengah Gg. 8, RT 13/RW 6, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
382	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Wonokromo Gg. 1, RT 4/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
383	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Gunung Sari 3, RW IX/RT IV, Sawunggaling, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
384	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	RT XIII/RW VI Jl. Wonokromo Gg.3 dan Jl Wonokromo Tengah Gg. 8, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
385	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	7 titik	Jl. Kupang gunung jaya gg. 8, RT VIII/RT	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		VII, Putat Jaya, Sawahan , Kota Surabaya	2024
386	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Jambangan Gg. 4, RW II/RT IV, Jambangan, Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
387	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Jambangan Sawah (Depan Pos RT IV), RW II/RT IV, Jambangan, Jambangan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
388	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Jambangan 4 A, RW II/RT IV, Jambangan, Jambangan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
389	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Makam Al-Ma'la Jl. Jambangan Sawah, RT 6/RW 2, Jambangan, Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
390	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Jambangan Sawah, RW II/RT II, Jambangan, Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
391	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Jl. Jambangan, RW I/RT I, Jambangan, Jambangan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
392	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Wonokromo Pasar 7 dan Wonokromo Pasar 2, RT 2/RW 6, Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
393	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Wonokusumo Jaya Gg 14 No. 12, RT 5/RW 7, Nyamplungan, Pabean Cantikan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
394	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Johar III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
395	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	24 titik	Bandarejo 2 RT.2 RW.5, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
396	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	Bandarejo 2 RT.8 RW.5, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
397	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Rejosari Baru Gang 1 RT 01 RW 03 Kel.Benowo Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
398	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Rejosari Gang 2 RT 02 RW 03 Kel.Benowo Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
399	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Tambak Wedi Jaya 1 RT 10 RW 02 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
400	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Dukuh Bulak Banteng Suropati 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
401	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	Dukuh Bulak Banteng Suropati 1 Kelurahan Bulak Banteng - Kenjeran , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
402	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Gading Karya 1 Kelurahan Gading - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
403	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl. Kuwukan III RT 04 RW 06, Lontar kec. sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
404	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Kuwukan Lapangan RT 07 RW 06 kuwukan, Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
405	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	jl. Kuwukan Garuda RT 07 RW 06, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
406	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl. kuwukan raya RT 05 RW 06 Kuwukan Kec. sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
407	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl Kalijudan HKSN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
408	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Makam Islam Tambak Dono. RT 4 RW 7. Kel Sumberrejo. Kec Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
409	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	13 titik	Jl. Bulak Jaya Gg 8 RT.06 RW.15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
410	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	Jl. Jambangan Sawah, RW II/RT IV dan RW II/RT V, Jambangan, Jambangan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
411	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl Raya TK, Gg TK2, Gg TK3, Gg Makam1, dan Gg Makam2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
412	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	30 titik	Tambak Medokan Ayu Gg X, XII, XIV, XVI, XI F, XI E, XI G, XIII, XV, Kota	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Surabaya	
413	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	Wonoayu Gg 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
414	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Wonorejo Selatan Gg 3A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
415	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Jl Putra Bangsa III Blok A, Blok F, Blok G, dan pinggir kali, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
416	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl Tambak Medokan Ayu Gg Bumi Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
417	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl Tambak Medokan Ayu Gg IX, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
418	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl Tambak Medokan Ayu Gg 6B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
419	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl Tambak Medokan Ayu Gg X, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
420	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl Tambak Medokan Ayu 6C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
421	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl Wonorejo Rungkut RT 2 RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
422	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Gading Karya 1 Kelurahan Gading - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
423	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Bogen no 15f Kelurahan Ploso - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
424	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl Margorejo II G, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
425	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	RT 2 RW 5 Margorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
426	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl Wonorejo Rungkut RT 2 RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
427	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Bulak Kali Tinjang Baru RT 005 RW 006, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
428	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	Bulak Kalitinjang Baru Jalan Blok F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
429	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	1 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Manggis,	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		Kota Surabaya	2024
430	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
431	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
432	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
433	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
434	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Nanas, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
435	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Mangga, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
436	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Delima, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
437	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Rambutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
438	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Manggis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
439	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Masjid, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
440	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Anggur, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
441	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Arbei, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
442	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	18 titik	Gang 14-B, RT 8 RW 7 Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
443	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jalan Bulak Rukem Timur Gg 2A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
444	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Bulak Rukem Timur Gg 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
445	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 t	Bulak Rukem Timur 1 Raya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
446	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Bulak Rukem Timur jalan tembusan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
447	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	3 titik	Bronggalan Sawah Timur II	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		Kelurahan Pacarkembang - Tambasari, Kota Surabaya	2024
448	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl Keputih Tegal Timur , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
449	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 unit	RT 4 RW 4 Kel Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
450	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 unit	Medokan Ayu Tambak Gang VII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
451	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Wonokusumo Jaya XIV/27, RT 5, RW 7, Pegirian, Semampir, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
452	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Jl. Tanah Merah IIID, RT 10, RW 4, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
453	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Tenggumung Baru Selatan XI, RT 8, RW 10, Pegirian, Semampir, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
454	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Bulak Rukem VII, RT 8, RW 5, Wonokusumo, Semampir, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
455	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Dukuh Tlogo Tanjung RT 05 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
456	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl Panjang Jiwo sdi no.40D RT. 03 RW. 02 PANJANG JIWO TENGGILIS MEJOYO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
457	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. kebondalem 9 Rt 5/ RW 6 Simolawang/simokerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
458	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Jl Kebondalem V di RT 4/RW 6 Simolawang/simokerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
459	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 unit	Jl. Simolawang II RT 8/RW 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
460	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Pragoto RW 3 simolawang/simokerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
461	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 unit	Area Makam Botoputih RW 6 Simolawang/simokerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
462	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	40 titik	SIWALANKERTO PERMAI 4 & 5 RT 6 RW 6	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				SIWALANKERTO WONOCOLO, Kota Surabaya	
463	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	35 titik	SIWALANKERTO PERMAI 1-3 RT 5 RW 6 SIWALANKERTO WONOCOLO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
464	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl kalisari damen no 17-A Rt 01 Rw 03 KALISARI MULYOREJO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
465	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Semolowaru Tengah 7/32 RT. 04 - RW. 04 SEMOLOWARU SUKOLILO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
466	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	19 titik	kalijudan gg 5 RT 02 / RW 02 KALIJUDAN MULYOREJO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
467	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	20 buah	RW 01 Gg Kenanga, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
468	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl. Banowati Gang 4 RT 8 RW 3 Simolawang/simokerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
469	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	20 titik	RT 01 RW 01 Bangkingan Gg Senori, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
470	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 Unit	Tanah Merah Utara 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
471	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 Unit	Bulak Sari 4B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
472	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	27 titik	Kali Kepiting 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
473	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Wonosari Lor Buntu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
474	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Alamat: Keputran Panjunan III/49 , RT/RW: 08/13 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
475	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	20 titik	Alamat: Simolawang II/80C , RT/RW:	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		03/01 , Kecamatan/Kelurahan: Simokerto/Simolawang, Kota Surabaya	2024
476	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	30 titik	Lapangan Kalibokor RW 6 kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
477	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Sedayu 2 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
478	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Sedayu 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
479	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jalan Sedayu IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
480	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Sedayu V, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
481	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Sedayu VII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
482	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl. Sedayu VIII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
483	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl. Sedayu 9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
484	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Kedung Baruk Beringin, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
485	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Kedung Baruk Beringin, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
486	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Wonorejo Permai Selatan II, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
487	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 unit	Alamat: Keputran Kejambon 2/88 , RT/RW: 09/12 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
488	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	14 titik	Wonorejo permai selatan III , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
489	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Wonorejo Permai Selatan IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
490	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Wonorejo Permai Selatan V, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
491	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	15 titik	Kupang gunung timur Gg 4 a, 4c, 5, dan	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)		5a, Putat Jaya, Sawahan , Kota Surabaya	2024
492	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	20 titik	Alamat: Gembong DKA 2/125 , RT/RW: 07/04 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Kapasari , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
493	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Wonorejo Permai Selatan VI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
494	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Wonorejo Permai Selatan VIII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
495	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	kupang gunung timur 7, RT06/RW06, Kel. Putat Jaya, Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
496	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	Wonorejo Permai Selatan XI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
497	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Kupang Gunung Jaya II, RT 02/RW 07, Kel. Putat Jaya, Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
498	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	Wonorejo Permai Selatan XII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
499	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	16 titik	Jalan Pandugo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
500	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	Morokrembangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
501	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Perak Barat, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
502	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Simokerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
503	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	30 titik	Peneleh , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
504	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Dupak Bandarejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
505	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Krembangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
506	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Morokrembangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
507	Pembangunan Prasarana	Penerangan Jalan Umum	2 titik	Jl. Dupak Pasar Baru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(PJU)			2024
508	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Krembangan Bhakti , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
509	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Bringin Telaga, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
510	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	JL sukirno Komp AL Kenjeran rt 3 rw 5 komplek AL Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
511	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Kalijudan 138 Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
512	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Wonorejo IV , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
513	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Manukan Mulyo II Blok 9F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
514	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jln. Manukan Loka IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
515	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Manukan Loka Gg VI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
516	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Manukan Mulyo 9C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
517	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Manukan Loka Gang VI Blok8B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
518	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl. Sikatan XI , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
519	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	14 Unit	JL Kalijudan RW 4 Kel kalijudan kec mulyorejo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
520	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Sikatan X, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
521	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Manukan Krido IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
522	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Manukan Krido VII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
523	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Manukan Krido IX, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
524	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl. Manukan Krido X , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
525	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Manukan Bhakti XI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
526	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Manukan Bhakti XI-A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
527	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Manukan Bhakti XII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
528	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	13 titik	KUPANG INDAH 3 RT 03, RW 05 kel. sonokwijenan kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
529	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Manukan Kulon RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
530	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	13 titik	KUPANG INDAH 5 RT 03, RW 05 kel. sonokwijenan kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
531	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Wonorejo Gg 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
532	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Putat Jaya Langgar 2, RT I/RW III, Kel. Putat Jaya, Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
533	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl. Gadel Sari Madya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
534	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	kupang gunung timur 7, RT 06/RW 06 Putat jaya, Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
535	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	kupang gunung jaya VIII, RT 08/RW 07, Putat jaya, Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
536	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 unit	Jl Pucang Sewu no 25 (lapangan kalibokor), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
537	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 Unit	Jl TambakAsri Gg 26,27,28, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
538	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	26 unit	Jl Karang Menjangan 3 A,B,F dan 3 raya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
539	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	Alamat: Keputran Pasar Kecil 1/45 , RT/RW: 01/11 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
540	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8 titik	Jl Grogol kauman gg 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
541	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl Ngaglik Gg Buntu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
542	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	Jl Krampung Gg Buntu Kleurahan tambak rejo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
543	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	jalan pandugo raya gang 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
544	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	WONOREJO PERMAI SELATAN XII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
545	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	WONOREJO PERMAI SELATAN XI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
546	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	WONOREJO PERMAI SELATAN IX, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
547	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	14 titik	WONOREJO PERMAI SELATAN III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
548	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	KEDUNG BARUK BERINGIN , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
549	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	Sepanjang wilayah RT 08, 45 , Alamat: Baratajaya XXI/31 , RT/RW: 08/03 , Kecamatan/Kelurahan: Gubeng/Baratajaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
550	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	kali rungkut rt 02 rw 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
551	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	kali rungkut rt 08 rw 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
552	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	kedung baruk makam rw04 kelurahan kedung baruk kecamatan rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
553	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	50 titik	pondok nirwana rt 01 rw 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
554	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	kedung baruk gg 2A kecamatan rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
555	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Perum Graha Mas RT 3 RW 1 Kel Balasklumprik KEc Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
556	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	19 titik	Jl. Kupang Praupan Pasar Tegalsari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
557	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Dupak Rukun Gang 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
558	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	Jl. Sambiarum Lor Gang 7, 10, 11 dan 12 RT.08 RW.06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
559	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	Jl. Sambiarum Lor Gang 2, 7, 8 dan 9 RT.07 RW.06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
560	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	JL. Sambi Arum Lor area parkir dan perempatan RT.02 RW.06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
561	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 titik	JL. Sambi Arum Lor area parkir dan perempatan RT.03 RW.06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
562	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	JL. Jelidro Gang Samudera dan GOR RT.05 RW.01 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
563	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Balas Klumprik Gang Puntodewo dan Gang Brotoseno RW.01 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
564	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	17 titik	Jl. Candi Lontar Tengah RT.03 RW.14 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
565	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Makam RW 03, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
566	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 titik	JL. JETIS KULON GANG PERTOLONGAN, RT. 20 RW. 04 KEL. WONOKROMO KEC. WONOKROMO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
567	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Panjang Jiwo gg VA RT4/RW1, Kel. Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
568	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Panjang jiwo gg VIIA, RT4/RW1, Kel. Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo,, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
569	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	RT 05 RW 01, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
570	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Panjang jiwo gg masjid RT4/RW1, Kel. Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
571	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	RT. 05 RW. 05 KEL. KARAH KEC. JAMBANGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
572	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Tanah Merah IIIE, RT 10, RW 4, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
573	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Panjang Jiwo Gg 5A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
574	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Panjang Jiwo Gg 7A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
575	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Tanah Merah IIIF, RT 10, RW 4, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
576	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Panjang Jiwo Gg Masjid, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
577	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Tanah Merah Selatan IIA, RT 18, RW 4, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
578	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Tanah Merah Selatan IIB, RT 18, RW 4, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
579	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl Siwalankerto Gang P. Faiz, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
580	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl Siwalankerto 183, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
581	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Tanah Merah Selatan IIC, RT 18, RW 4, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
582	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9 titik	Jl Siwalankerto Timur 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
583	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl Bogorami Sumber Bening RT 06 RW 03 Kel Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
584	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 unit	Jl Bogorami 5 B RT 06 RW 03 Kel Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
585	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Tambak Wedi Baru XVII, RT 5, RW 4, Tambak Wedi, Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
586	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl Bogorami 6 RT 06 RW 03 Kel Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
587	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl. Medayu Utara XXVII C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
588	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jalan Medayu Utara XXVII D, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
589	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Medayu Utara Gg 27 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
590	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	Jl. Sikatan 3 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
591	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 unit	halaman balai RW 05 Kel Siwalankerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
592	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	Jl. Krembangan Buyut Gg buntu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
593	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Jl. Kutisari Miswanto Telp.082257322508 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
594	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	200 titik	jl banyu urip lor 6 rt 9 rw 06 kelurahan kupang krajan kecamatan sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
595	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	150 titik	jalan putat jaya c barat gg 9 rw 13 kelurahan putat jaya kecamatan sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
596	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Jl. Banyu Urip Lor VI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
597	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	70 titik	jl kupang krajan tengah rt 10 rw 03 kelurahan kupang krajan kecamatan sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
598	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	100 titik	jalan kupang krajan lor 1 rt 3 rw 3 kelurahan kupang krajan kecamatan	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				sawahan, Kota Surabaya	
599	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	jalan banyu urip lor gg tengah rt 10 rw 06 kelurahan kupang krajan kecamatan sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
600	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Panduk Jumagi 081515448113 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
601	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Makam Islam Kendangsari Lebar 154 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
602	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 titik	RT 02 Kendangsari , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
603	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Pondok Benowo Indah RT.04 RW.08 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
604	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 titik	Rungkut Tengah GG 6/31 RT 002/RW 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
605	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 PCS	Rungkut Tengah GG 6-A/5 RT 003/RW 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
606	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Rungkut tengah GG Sawah 14 RT 003/RW 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
607	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	Rungkut Tengah GG Sekolahan 20 RT 004/RW 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
608	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 PCS	Rungkut Tengah 6-B/8 RT 004/RW 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
609	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 titik	rw 3 kelurahan manukan wetan kecamatan tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
610	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 titik	jl wonokitri besar kelurahan pakis kecamatan sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
611	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	RT 01 RW 14 Kel Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
612	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 titik	RT 07 RW 14 Kel Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
613	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Putat Jaya Gang Langgar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
614	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 unit	Jl Bulak Rukem Timur 2I, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
615	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 unit	Jl Bulak Rukem Timur 2AB, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
616	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 unit	Jl Bulak Rukem Timur 2E, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
617	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 unit	Jl Bulak Rukem Timur 2 Gg Tembusan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
618	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 unit	Jl Bulak Rukem Timur 2 Raya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
619	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 unit	Jl Bulak Rukem Timur 1M, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
620	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 titik	Jl Bulak Rukem Timur 1L, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
621	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	70 titik	jl. medokan tambak RT. 12 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
622	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 titik	jl. medokan sawah timur RT. 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga					
623	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	800 m	Jl Kyai Tambak Deres, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
624	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	500 meter	Sepanjang jalan Gubeng Kertajaya 1 sebelah Barat, Alamat: Gubeng Kertajaya 3-E/9 , RT/RW: 03/01 , Kecamatan/Kelurahan: Gubeng/Gubeng , Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
625	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	1100 m	Jl Karang Menjangan sampai Atlas sport, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
626	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	431 Meter	jalan wonorejo selatan XII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
627	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	370 Meter	wonorejo permai timjur, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
628	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	1010 meter	Jl.Raya Tambak Asri RW.06 Kel.Morokrembangan Kec.Krembangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
629	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	998 Meter	RW 09 Tubanan Karang Poh Tandes , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
630	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	264 Meter	pandugo baru rw 01 rt 06 gang 7 kelurahan penjaringan sari kecamatan rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
631	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	392 m2	RT 8 gang XX, XXI dan XXII cp Gunawan alamat Jl Baratajaya XXI/15 Rt 8 RW 3 kelurahan Baratajaya kecamatan Gubeng, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
632	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	376 M2	rungkut menanggal Gg. 6 Rw03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
633	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	300 Meter	Jln. Bulak Rukem Timur I RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
634	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	814 Meter	Jl. Dukuh Kupang Timur XI RT.04 RW.08 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
635	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	642 Meter	JL. Raya Beji. RW4. Kel Pakal, Kec Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
636	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	639 meter	Jl Kembar Komp PBI Kel Babat Jerawat Pakal , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
637	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	300 M	Jl sidotopo jaya 2A RT 06 RW 12 kelurahan sidotopo kec. Semampir , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
638	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	20 m	Jl Siwalankerto Timur 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
639	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	150 M	Jl. Kupang Panjaan 3-A No. 54-A, RT 03, RW 05, Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
640	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	653 Meter	Pondok Benowo Indah RT.03 RW.07 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
641	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	168 m	RT 9 RW 2 Medokan Ayu Blok Raya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
642	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	650 m	Jl Raya Menur - Semolowaru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
643	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	250 Meter	JL. Raya Sendang Bulu. RT 2 RW 5. Kel Babat Jerawat. Kec Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
644	Rehabilitasi Sistem Drainase	Pembangunan Plengsengan	250	di antara Pacarkembang gang IV dan	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Perkotaan	Saluran Batu Kali	meter	Pacarkembang gang III, RT4/RW7, Pacarkembang, Tambaksari, Kota Surabaya	2024
645	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	1300 M	Jl. Kalijudan Indah, RW 07, Kel. Kalijudan, Kec. Sukolilo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
646	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	587 Meter	Sendang Bulu RT 6 RW 5. Kel Babat Jerawat. Kec Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
647	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	566 m	Wonorejo Indah Timur Gg IX, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
648	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	550 m	Gading II, Kelurahan Gading - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
649	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	536 Meter	Jl. Dukuh Kupang Timur VII RT.03 RW.08 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
650	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	425 m	RW 1 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
651	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	200 Meter	Jl Bulak Kalitinjang Baru RT 03 RW 06 kel Bulak Kec Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
652	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	500 Meter	Bumi Sari Praja RT 08 RW 05 Bumi Sari Praja Lontar , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
653	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	203 m	RT 04 RW 01, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
654	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	411 meter	RW 8 KEL. WONOREJO, KEC. TEGALSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
655	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	732 Meter	Jalan Banjar Sugihan Gang I RT.002 RW.004 Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
656	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	406 meter	RAYA DARMO BARU BARAT NO. 8-80 RT 08 / RW 02 kel. sonokwijenan kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
657	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	3238 meter	JL. WONOSARI LOR GG KB RT 09 RW 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
658	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	192 m	Jl. Dupak Bangunsari Gang 4 RT 05 RW 04 Kec. Krembangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
659	Rehabilitasi Sistem Drainase	Pembangunan Saluran U-Ditch	936 m	Jl Wonorejo Selatan IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Perkotaan	dengan Cover			2024
660	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	719 Meter	Dk. LANGKIR. RT 5 RW 5 . Kel Babat Jerawat. Kec Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
661	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	178 m2	RW 03 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
662	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	450 m	Jl Keputih Timur Jaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
663	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	180 meter	Perbatasan RW IX - RW XIV PBI Kel Babat Jerawat - Pakal , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
664	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	220 M3	Sidotopo wetan Gg. 3 RT.07 RW.01 Kel. sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
665	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	650 meter	Kendung Gang 5 RT 03 RW 03 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
666	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	640 meter	Jl. Simo Gunung Kramat Timur gg. 4 A RT I/RW II, Kel. Putat Jaya, Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
667	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	400 Meter	Jl. Raya Bulu Jaya RT.04 RW.04 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
668	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	350 Meter	JALAN KEJAWAN LOR (RT. 01 s/d RT. 05) RT 1-5 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
669	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	200 Ton	Kedinding Tengah Baru 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
670	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	100 meter	Gembong Sawah 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
671	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	382 M	SIWALANKERTO SELATAN RT 2 SIWALANKERTO WONOCOLO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
672	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	150 m	RT 01 RW 01, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
673	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	377 m	Wonorejo Selatan 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
674	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	572 meter	Sememi Jaya 6C Utara Rel RT 06 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Surabaya	
675	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	100 m	RT 03 RW 01, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
676	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	550 m	Bronggalan 2H , Kelurahan Pacarkembang - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
677	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	350 Meter	Jl.Raya Sendang Bulu, RT 4 RW 5. Kel Babat Jerawat. Kec Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
678	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	282 meter	Pakal Madya RT 03 Kel. Pakal Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
679	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	282 meter	JL,RAYA PAKAL MADYA, RT3 RW3, KEL PAKAL. KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
680	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	341 meter	RT 03 RW 01 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
681	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	340 Meter	Jl. Candi Lontar Wetan RT.05 RW.14 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
682	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	272 meter	Jalan Pakal Madya RT 03 RW 02 Kel. Pakal Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
683	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	272 meter	JL.RAYA PAKAL MADYA, RT3 RW2. KEL PAKAL, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
684	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	200 m	RT 9 RW 2 Medokan Ayu Blok A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
685	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	324 meter	RT 05 RW 03 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
686	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	500 meter	Dupak Bangunsari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
687	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	270 m	Jl. Kedinding Tengah Nanas, RT 2, RW 2, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
688	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	180 meter	sukomanunggal baru pjka RW 2 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
689	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	490 m	Medayu Utara Gg 11 & 15 RT 01 RW 12 Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
690	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	485 meter	KLAKAHREJO Gg 6. RT4 RW 8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Surabaya	
691	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	250 Meter	Bulak banteng madya Gg.8 RT.08 RW.09 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
692	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	250 meter	KUPANG BARU 2 RT 08 / RW 05 kel. sonokwijenan kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
693	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	450 m	Jl. Bulak Banteng Lor Bhineka 4 Timur RT. 09 RW. 08 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
694	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	122,4 meter	Simokalangan RT 04/RW 07 kel. Simomulyo, kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
695	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	466 meter	Rejosari Baru Gang 1 RT 01 RW 03 Kel.Benowo Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
696	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	464 meter	SEMEMI JAYA BLOK 5B 1. RT6 RW 1. KEL SEMEMI. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
697	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	232 Meter	Jalan Beni Rahayu RT.001 RW.004 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
698	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	296 Meter	Warugunung Pojokan Balai RT RT.002 RW.003 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
699	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	296 M	semampir barat pondok tanjung permai blok A no 45 MEDOKAN SEMAMPIR, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
700	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	291 meter	SONOREJO SISI UTARA RT 05 / RW 01 kel. sonokwijenan kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
701	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	450 meter	PUTAT GEDE BARU GG. 1 RT 03 / RW 04 Kel. putat gede kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
702	Rehabilitasi Sistem Drainase	Pembangunan Saluran U-Ditch	450 m	JL. BULAK CUMPAT UTARA GG. 3, Kota	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Perkotaan	dengan Cover		Surabaya	2024
703	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	450 M2	BULAK CUMPAT UTARA I-A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
704	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	106 meter	SIMO GUNUNG BARU JAYA BLOK C RT 02 / RW 15 Kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
705	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	180 m	Jl karang Menjangan 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
706	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	431 meter	SEMEMIMJAYA BLOK 5B 2. RT6 RWI. KEL SEMEMI. KEC BENOWO. Penguwsul: SULAIMAN, HP O81357819158., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
707	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	500 m	Jl. Kedinding Tengah IVD, RT 2, RW 2, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
708	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	276 meter	RT 02 RW 03 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
709	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	428,3 meter	RW 3 RT 1 Sememi Gang 1C kel. Sememi, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
710	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	275 meter	Sememi Jaya Baru X RT 07 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
711	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	200 m	simorejo 11 barat surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
712	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	380 meter	BANYU URIP WETAN IV - C kel. banyu urip kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
713	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	265 meter	RT 04 RW 02 Jeruk Lakarsantri (Banjar Mlati), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
714	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	337 meter	jalan raya warugunung RW.1-3 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
715	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	104 meter	RW 4 RT 3 Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
716	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	106 M	RT 03, RW 02, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
717	Rehabilitasi Sistem Drainase	Pembangunan Saluran U-Ditch	402	BANDARREJO SASRI Gg 5. RT10 RW 5.	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Perkotaan	dengan Cover	meter	KEL SEMEMI KEC BENOWO, Kota Surabaya	2024
718	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	402 meter	Putat Jaya C Timur 2, RT 01 RW 12 Kel. Putat Jaya, Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
719	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	400 meter	Jalan Tengger Raya II RT 1 RW 2 Kel. Kandangan Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
720	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	400 m	Bagong Ginayan RT 04 , 05 ,07 RW 03 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
721	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	750 meter	PANDEGILING RT3 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
722	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	255 Meter	Jl. Kuwukan Lapangan RT 07 RW 06 kuwukan, Lontar , Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
723	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	3238 meter	JL. SUROPATI 5 RT 11 RW 07 KEL BULAK BANTENG, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
724	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	210 Meter	Pondok Benowo Indah RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
725	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	393 Meter	Pondok Benowo Indah Blok RT.08 RW.07 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
726	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	125 Meter	Bulak banteng madya Gg.2 RT.02 RW.09 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
727	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	- meter	Jalan Pakal Timur I Veteran RT 01 RW 02 Kel. Pakal Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
728	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	380 meter	Uka Gang 18 RT 11 RW 02 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
729	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	245 M	JALAN RAYA SIWALANKERTO SELATAN SIWALANKERTO WONOCOLO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
730	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	95 meter	Jl. sememi jaya utara Gg. III blok A-B RT 03 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
731	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	370 Meter	Pondok Benowo Indah RT.04 RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
732	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	325 m	Jl. Bulak Banteng Lor Bhineka 1 Timur RT. 04 RW. 08 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
733	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	229 Meter	banyu urip kidul raya BANYU URIP SAWAHAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
734	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	354 meter	SAWAHAN BARU 1-2, RT 1-2 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
735	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	165 meter	Jalan sukomanunggal gang 7 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
736	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	350 m	Gading I, Kelurahan Gading - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
737	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	350 meter	Jln. Rungkut Tengah Gg 6 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
738	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	346 meter	Putat Jaya C Timur 1, RT 04 RW 12 Kel. Putat Jaya, Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
739	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	345 m2	Jl. Kendalsari Gg II, RT 02 RW 03, Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
740	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	344 meter	Sememi Jaya 6B Utara Rel RT 06 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
741	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	73 Meter	Jl. Sambikerep V Gg. Jeruk RT 02 RW0 4 kec. sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
742	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	216 Meter	Jalan Sumberan RW.004 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
743	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	213 Meter	Alamat: Keputran Kejambon 1/43 , RT/RW: 03/12 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
744	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	330 meter	Jalan Klakah Rejo Lor Gang IV-A RT 6 RW 9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
745	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	320 Meter	Bandarejo , JL. Protokol, RT 11 RW 5. Kel Sememi. Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
746	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	315 meter	PBI RT 07 RW 08 Kelurahan Babat Jerawat Blok BE - BF RT 07 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
747	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	315 Meter	Pondok Benowo Indah RT.05 RW.07 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
748	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	314 meter	SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT 2A RT 01 / RW 14 kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
749	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	199,6 meter	SIMOREJO SARI A GANG 9 RT 05 / RW 06 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
750	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	225 meter	Pesapen RT 06 RW 2 Kel. Sumurwelut Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
751	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	1200 Meter	rungkut menanggal harapan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
752	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	197 Meter	Jl. Sambikerep Gg. Mangga RT 06 RW 04 kec. Sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
753	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	194 M	Kecamatan Krembangan, Kelurahan Kemayoran, RW 02, RT 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
754	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	300 meter	PUTAT GEDE BARU GG. 3 RT 03 / RW 04 Kel. putat gede kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
755	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	300 Meter	RT 03 RW 09 PBI Kel Babat Jerawat Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
756	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	125 meter	Alamat: Simolawang II/80C , RT/RW: 03/01 , Kecamatan/Kelurahan: Simokerto/Simolawang , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
757	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	100 M	Sidotopo jaya 5 Rt 09 Rw 12 kel. Sidotopo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
758	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	192 meter	JL.BEJI ASPOL KP3. RT3 RW4. KEL PAKAL, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
759	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving	130 m	RT.07 RW.02 Jl. Simorejo 27/7 Kel. Simomulyo Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
760	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	150 m	Jl. Tambak Wedi Tengah Timur (rusun) RT. 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
761	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	292 meter	Kupang Gunung Jaya II, RT 02/RW 07, Kel. Putat Jaya, Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
762	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	100 meter	Jl Ketintang RT 8 dan 4 RW 1, Kel. Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
763	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	287 meter	Sememi Jaya Baru XI RT 05 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
764	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	286 m	Jl Tambak Medokan Ayu Gang 9, RT 8 RW 2 Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
765	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	4 M	Tambak Wedi Barat 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
766	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	60 m2	jelidro tegal Gang 3 RT 9 RW 1 Sambikerep kec. Sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
767	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	272 meter	DEPAN BALAI RT 02 / RW 04 Kel. putat gede kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
768	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	10 meter	Panduk Jumagi 081515448113 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
769	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	200 Meter	DK.Bulak banteng sekolahan Gg.2 RT.02 RW.01 Kel. Bulak banteng Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
770	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	175 Meter	Jl. Sambikerep Gg. III RT 06 RW 04 Sambikerep kec. sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
771	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	500 m	Jl. Kedinding Tengan VIIIA, RT 10, RW 2, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Surabaya	
772	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	120 meter	KLAKAH REJO Gang 2B,RT2 RW8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
773	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	269 m2	Bangkingan RT 02 RW 01 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Lokasi usulan di gang Dalia, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
774	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving	150 meter	Jl. Bagong Tambangan 2, Ngagel - Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
775	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	170 meter	SIMO HILIR TIMUR 1D RT 07 /RW 03 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
776	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	170 meter	Manukan Dadi RT 4 RW 7 Manukan Kulon, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
777	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	250 m	Jl. Bulak Banteng Lor Bhineka 3 RT. 09 RW. 08 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
778	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	250 m	Jl. Bulak Banteng Lor Bhineka 3 Timur RT. 09 RW. 08 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
779	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	260 meter	KLAKAHREJO Gg 5. RT4 RW 8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
780	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	258 meter	Tengger Raya IV RT 3 RW 2 Kel. Kandangan Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
781	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	120 meter	RW 1 (Belakang terminal Benowo) Kel Benowo Kec Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
782	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	255 meter	Kendung Jaya Gang 7 RT 04 RW 06 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
783	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	120 m2	jelidro tegal Gang 2 RT 9 RW 1 Sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
784	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	250 meter	Kendung Jaya Gang 11 RT 04 RW 06 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
785	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving	148 meter	JL. KETINTANG BARAT GANG V, RT. 03 RW. 02 KEL. KETINTANG KEC. GAYUNGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
786	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving	750 Meter Persegi	JL. KAPAS MADYA 4J NO. 11 RT 10 RW 2, GADING, TAMBAKSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
787	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	100 meter	Jl.Tenggilis Kauman gg 2 Tembusan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
788	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	240 M	JL. KALIJUDAN 1 RT 20 RW 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
789	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	857 meter	Sulung Sambongan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
790	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	140 m2	jelidro tegal Gang 4 RT 9 RW 1 Sambikerep kec. sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
791	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	117 m	RT 9 RW 2 Medokan Ayu Blok B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
792	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	150 Meter	Jl. Dukuh Sambisari RT.02 RW.03 Kelurahan Lontar kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
793	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	150 meter	Pesapen RT 4 RW 2 Kel. Sumurwelut Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
794	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	150 Meter	Bulak banteng wetan Gg.17 RT.15 RW.08 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
795	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	600 Meter persegi	JALAN GENTENG BANDAR GANG 2 RT 02 RW 09 KELURAHAN GENTENG KECAMATAN GENTENG, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
796	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	224 meter	simo gunung kramat barat gang 4-A RT 06 kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
797	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	220 meter	Sememi Jaya 8 RT 01 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
798	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	140 Meter	Jl. Lontar Gg Sumur RT.01 RW.02 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
799	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	215 meter	Rejosari Gang Pesantren 4A RT 08 RW 03 Kel.Benowo Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
800	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	120 Meter	Bulak banteng baru Gg. Mawar 1 RT.06 RW.14 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
801	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	210 meter	Putat Jaya C Timur 5, RT 06 RW 12 Kel. Putat Jaya, , Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
802	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	209 meter	SAWAHAN BARU 1-2, RT 3-4 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
803	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	204 Meter	Jalan Warugunung RW.3 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
804	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	305 meter	PAKAL BARAT LAPANGAN GG 3. RT4 RW3. KEL PAKAL KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
805	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	130 meter	RT 02 RW 04 gan kamboja Sumberan,kel.balas klumprik,kec.wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
806	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	100 Meter	Sawah pulo Gg.3 RT. 08 RW. 12 Kel. Ujung Kec. Semampir, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
807	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	200 meter	Sememi Jaya 8B RT 01 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
808	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	198,6 meter	SIMO HILIR TIMUR XIV BLOK D RT 05 / RW 03 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
809	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving	102,3 M	JL. KETINTANG BARAT GANG III RT. 05 RW. 06 KEL. KETINTANG KEC. GAYUNGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
810	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	195 meter	SIMOREJO SARI A GANG 8 RT 06 / RW 06 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
811	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	195 meter	SIMO HILIR TIMUR XIV BLOK C RT 05 / RW 03 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
812	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving	100 meter	JL. KETINTANG BARAT GANG BUNTU, RT. 05 RW. 06 KEL. KETINTANG KEC. GAYUNGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
813	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	188,8 meter	Putat Jaya C Timur V, RT 02 RW 12 Kel. Putat Jaya, Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
814	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	120 m	Jl. Bulak Banteng Lor Bhineka A RT. 05 RW. 08 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
815	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	455 M	Jl. Praban Kulon GG 2, RT 02, Rw 05, Kel. Alun - Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
816	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	93 Meter	Tanjung sari gang langgar, RT.013 RW.002, Kelurahan Tanjung sari, Kecamatan Sukomanunggal	Teralokasi pada TA 2024
817	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	171 M	JALAN LAMONGAN LAPANGAN/JALAN LAMONGAN DIPO 9 RT 01 RW 03 KELURAHAN GUNDIH KECAMATAN BUBUTAN. CP : MOCH ANAM 085706673480, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
818	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	70 Meter	Jl. Semampir AWS V RW 06 Kel Medokan Semampir Kec Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
819	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	50 meter	Jl. Jetis Kulon Pertolongan RT17/RW04, Kel. Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
820	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	174 meter	DEPAN' POS RT 03 / RW 04 KEL. PUTAT JAYA kel. putat jaya kec. sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
821	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	174 Meter	Pandugo Timur VII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
822	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	150 meter	Johar III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
823	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	217 m	Jl Margorejo II G, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
824	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	110 meter	RT 6 RW 7 KEL. SIDODADI, KEC. SIMOKERTO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
825	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	90 meter	Jl jeruk Gg. buntu RT 05 RW 02 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
826	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	160 meter	Jl. Sambikerep Gg. V RT12 RW 04 kec. sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
827	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	190 meter	RT 02 RW 03 Kebraon Karang pilang , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
828	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	167 meter	SIMO HILIR TIMUR 1E RT 07 / RW 03 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
829	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	107 meter	Banjar Melati Gang 1 RT 03 RW 03 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
830	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	107 meter	Banjar Melati Gang 1 RT 01 RW 03 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
831	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	165 Meter	Kendung Jaya Gang Utama wilayah RT 1 dan RT 2 RW 06 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
832	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	156 Meter	DukuhKali Kendal Gg. Gereja II RT 5 RW 2 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
833	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	155 Meter	DukuhKali Kendal Gg. Gereja I RT 5 RW 2 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
834	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	105 M2	rungkut menanggal rw 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
835	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	159 Meter	Jl. Semampir Barat IV RT 04 RW 04 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
836	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving	220 M	JALAN UNDAAN PENELEH 4 RT 04 RW 05 KELURAHAN PENELEH KECAMATAN GENTENG, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
837	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	350 M	Jl. Kupang panjaan 3B (RT 004 & RT 005), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
838	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving	260	DUKUH BULAK BANTENG TIMUR	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
		dan Saluran	meter persegi	BUNTU RT 01 RW 04 Kel. BULAK BANTENG Kec. KENJERAN, Kota Surabaya	2024
839	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	2 meter	Jemur wonosari gg I sisi barat , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
840	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	10 meter	Jl. Sidosermo 4 Gang Pondok , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
841	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	100 meter	Panduk Jumagi 081515448113 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
842	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	100 Meter	JL. Kuwukan lapangan RT 05 RW 06 Kuwukan, lontar , Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
843	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	100 m	Jl. SImogunung Kramat Timur IVA RT 1 RW 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
844	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	151,8 meter	SIMO HILIR TIMUR XIV BLOK B RT 05 / RW 03 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
845	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	150 Meter	Jl. Lontar RT.04 RW.02 Gg Musholla Bidayatul Hidayah Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
846	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	125 m	Jl Grogol kauman Gg 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
847	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	800 meter	RT 1 RW 4 KEL. KAPASAN, KEC. SIMOKERTO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
848	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	96 meter	Kupang segunting 1. , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
849	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	140 m2	jelidro tegal Gang 1 RT 9 RW 1 Sambikerep kec. Sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
850	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	92,5 Meter	Jalan Asemrowo Sentral RT.002 RW.003 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
851	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	145 Meter	JL. Kuwukan lapangan RT 06 RW 06 Kuwukan, lontar , Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
852	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	368 M	Jl. Bubutan 3, Rt 04, RW 05, Kel. Alun - Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
853	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	4 M	Bulak Sari 4B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
854	Pembangunan Jalan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	91 Meter	medayu utara no 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
855	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	50 Meter	Platuk Gg. Buntu RT.08 RW.02 Kel. Sidotopo wetan Kec.Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
856	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	3238 meter	JL WONOSARI LOR GG KB III RT 09 RW 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
857	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	380 M	JL. POGOT BARU 3/8 RT 6 RW 6, TANAH KALI KEDINDING, KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
858	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	5 meter	Jl. Wonokromo Pasar Lama No.3, RT1/RW 6, Kel. Wonokromo, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
859	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	130 Meter	Jalan Sambiroto VII korwil 10 RT 02 RW 07 Kel. Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
860	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	135,4 meter	SIMOREJO SARI A GANG 11 RT 07 / RW 06 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
861	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	135 meter	SEMEMI JAYA GG 5A.RT6 RW1. KEL SEMEMI KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
862	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	135 Meter	JL. Kuwukan lapangan RT 05 RW 06 Kuwukan, lontar , Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
863	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	252 M	JL. Bubutan 2, RT 04, RW 05, Kel. Alun - Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
864	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	133 m	RT 01 RW 14 Kel Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
865	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	132 meter	KANDANGAN REJO Gg MUSHOLLA. RT6 RW1 , KEL KANDANGAN KEC	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				BENOWO, , Kota Surabaya	
866	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	250 m	Jl. Tambak Wedi Jaya 3B RT. 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
867	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	85 m	Jl Medayu Utara Gg 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
868	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	170 meter	Jl.Tenggilis Kauman gg 2 A & B , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
869	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	130 meter	BANDAREJO ASRI Gg 8. RT 10 RW 5. KEL SEMEMI KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
870	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	130 Meter	Jalan Kebraon RT.001 RW.002 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
871	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	130 meter	KLAKAHREJO Gg 3 . RT3 RW8. KEL KANDANGAN . KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
872	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	59 meter	Jl. Zamhuri 14 RT 001/RW 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
873	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	12 Meter	Jl. Lontar RT.05 RW.02 Gg Pondok Indah Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
874	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	500 Meter	Sepanjang jalan Gembong Alamat: Gembong DKA 2/125 , RT/RW: 07/04 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Kapasari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
875	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	126 meter	Gang Wesi RT 04 RW 03 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
876	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	75 m	Jl. Tenggumung Baru Selatan XI, RT 8, RW 10, Pegirian, Semampir, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
877	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	360 m	Jl Kedung Tarukan baru Gg 1 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
878	Rehabilitasi Sistem Drainase	Pembangunan Saluran U-Ditch	75 meter	Jl. Jambangan Gg. 4A, RW II/RT IV,	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Perkotaan	dengan Cover		Jambangan, Jambangan , Kota Surabaya	2024
879	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	100 196	gayungan 1 rt 03 rw 01 sby, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
880	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	78 meter	RT 06 RW 03 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
881	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	78 m2	RT 04 RW 03 Banjar Mlati, Jeruk, Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
882	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	12 meter	Jeruk III Lakarsantri / Gg Sawah , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
883	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	120 meter	SIMOREJO SARI A GANG 10 RT 07 / RW 06 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
884	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	120 meter	KLAKAHREJO Gg 4 RT4 RW 8 . KEL KANDANGAN . KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
885	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	119 meter	SIMOREJO SARI A GANG 7 RT 06 / RW 06 kel. simomulyo baru kec. sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
886	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	100 meter	Kendangsari Gang Masjid , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
887	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	70 Meter	Platuk Gg.Rela RT.06 RW.02 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
888	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	60 meter	JL.PERUM GRAHA SURYA NATA, [PINTU UTAMA]. RT5 RW5. KEL SUMBERREJO, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
889	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	- meter	Kndung 10B RT08 RW 3 Kel Sememi Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
890	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	110 meter	Rejosari Gang Jeruk RT 02 RW 03 Kel.Benowo Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
891	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	70 meter	Jl. Sambikerep V Gg. Durian RT 02 RW 04 kec. sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
892	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	2 meter	Kendangsari Gang Lebar No. 88 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
893	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	200 meter	Jalan Beji Gang Masjid RT 03 RW 04 Kel. Pakal Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
894	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	120 m	RT 05 RW 01, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Jl. Manyar Tirtoyoso Selatan 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
895	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	2 meter	Makam Islam Kendangsari Lebar 154 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
896	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	99,4 meter	Putat Jaya C Timur 3, RT 05 RW 12 Kel. Putat Jaya, Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
897	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	80 meter	RT 02 RW 04 Gang Matahari,sumberan,kel.balas klumprik,kec.wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
898	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	95,3 m	RT 9 RW 2 Medokan Ayu Blok E, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
899	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	50 Meter	Jl. Sambikerep I RW 04 Sambikerep , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
900	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	100 Meter	Bulak banteng baru Gg. Terartai 2 RT. 01 RW 14 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
901	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	90 meter persegi	J;.masjid nurul islam gg tembusan,sumberan,kel.balas klumprik,kec.wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
902	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	85 Meter	DukuhKali Kendal Gg. Mushola RT 5 RW 2 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
903	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	80 meter	KANDANGAN REJO Gg 8. RT 6 RW 1. KEL KANDANGAN KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
904	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	160 meter	KLAKAHREJO Gg 3B, RT 4 RW 8, KEL KANDANGAN KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
905	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	82 Meter	Jl. raya dukuh kali kendal Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
906	Rehabilitasi Sistem Drainase	Pembangunan Saluran U-Ditch	86 meter	KLAKAHREJO 7. RT4 RW 8 . KEL	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Perkotaan	dengan Cover		KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	2024
907	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	80 Meter	JL. Kuwukan lapangan RT 05 RW 06 Kuwukan, Kec. sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
908	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	54 Meter	Jl. Kendalsari RT 02 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
909	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	175 m	Jl. Bulak Banteng Lor Garuda RT. 02 RW. 08 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
910	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	44 meter	Jalan Sidorejo 3A RT 03 RW 01 Kel. Pakal Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
911	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	150 Meter	JL.KENDUNG GG 8, RT 6 RW 3. KEL SEMEMI, KEC BENOWO. , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
912	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	81 m	RT 9 RW 2 Medokan Ayu Blok G, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
913	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	80 meter	Kandangan Gunung Tangsi 2B RT 09 RW 01 Kel. Kandangan Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
914	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	79 m	RT 9 RW 2 Medokan Ayu Blok F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
915	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	140 meter	KLAKAHREJO Gg 3C. RT 4 RW 8. KEL KANDANGAN KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
916	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran	600 Meter persegi	JALAN BLAURAN KIDUL 1 DEPAN LANGGAR NURUL IMAN RT 03 RW 02 KELURAHAN GENTENG KECAMATAN GENTENG, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
917	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	150 M	JALAN UNDAAN PENELEH 4 RT 04 RW 05 KELURAHAN PENELEH KECAMATAN GENTENG, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
918	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	74 meter	RT 3 RW 1 KEL. BUBUTAN, KEC. BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
919	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	68 Meter	jl medayu utara gang VI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
920	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	115 m	Jl Amir Mahmud Gg 1 (RT 08 RW 02 Kel Gunung Anyar), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
921	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	200 meter	JL. GAYUNGAN PTT, RT. 06 RW. 02 KEL. GAYUNGAN KEC. GAYUNGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
922	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	129 meter	BANDAREJO ASRI GG ASRI 9. RT10 RW5. KEL SEMEMI KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
923	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	45 Meter	JL. Kuwukan lapangan RT 05 RW 06 Kuwukan, lontar , kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
924	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	68 meter persegi	RT 02 RW04.sumberan,kel.balas klumprik ,kec.wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
925	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	125 meter	JALAN PAKAL BARAT LAPANGAN 2A. RT 4 RW 3. KEL PAKAL KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
926	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	120 meter	PAKAL BARAT KLUWUNG 2. RT2 RW3 . KEL PAKAL KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
927	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	125 m	Jl Amir Mahmud Gg 1 (RT 06 RW 02 Kel Gunung Anyar), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
928	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	65 m	Jl Amir Mahmud Gg 1 RT 05 RW 02 Kel Gunung Anyar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
929	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	70 meter	RT XIII/RW VI Jl. Wonokromo Gg.3 dan Jl Wonokromo Tengah Gg. 8, Kel. Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
930	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	60 meter	RT 01 RW 02 Jeruk Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
931	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	57 Meter	Jalan Sumberan gang teratai RT.001 RW.004 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
932	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	102 Meter	Bandarejo Gg Sedap Malam, RT 11 RW 5. Kel Sememi, Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
933	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	102 Meter	Bandarejo Gang Sakura, RT11 Rw 5, kel Sememi . Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
934	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	55 meter	KLAKAHREJO Gg8, RT4 RW 8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
935	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	110 meter	KLAKAHREJO Gg 9 . RT 4 RW 8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
936	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	100 meter	PAKAL BARAT KLUWUNG 3. RT 2 RW 3. KEL PAKAL KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
937	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	100 Meter	Bandarejo Gang Nusa Indah, RT 11 RW 5. Kel Sememi , kec Benowo. , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
938	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	49,7 Meter	Tambak Pring timur 4 RT 04 RW06 Asemrowo Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
939	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	50 meter	Pesapen Gang 2 Utama RT 02 RW 02 Kel. Sumurwelut Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
940	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	90 Meter	Bandarejo Gang Teratai, RT 11 Rw 5. Kel Sememi. Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
941	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	43 M	JALAN LAMONGAN RT 01 RW 03 KELURAHAN GUNDIH KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
942	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	45 m	Bogen No 15 Kelurahan Ploso - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
943	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	80 meter	kedurus 1c rt 3 rw 01 gang buntu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
944	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	80 meter	Rejosari Gang Kamboja RT 08 RW 03 Kel.Benowo Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
945	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	1960 m	Jl Mulyorejo Barat-Selatan dan Tengah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
946	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	65 meter	Kandangan Gunung Pertiwi 1A RT 09 RW 01 Kel. Kandangan Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
947	Rehabilitasi Sistem Drainase	Pembangunan Saluran U-Ditch	- meter	BANDAREJO ASRI Gg ASRI JAYA1.	Teralokasi pada TA

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Perkotaan	dengan Cover		RT10 RW5 KEL SEMEMI KEC BENOWO, Kota Surabaya	2024
948	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	32 m	Jl.Gundih lapangan RT.10 RW.01 Kel.Gundih Kec.Bubutan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
949	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	57 meter	PAKAL BARAT KLUWUNG 1. RT2 RW3. KEL PAKAL KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
950	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	- meter	BANDAREJO ASRI Gg ASRI JAYA2. RT10 RW10. KEL SEMEMI KEC SEMEMI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
951	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	45 meter	Tambak bayan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
952	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	45 Meter	KLAKAH REJO GG BUNTU C. RT1 RW8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
953	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	40 m	Jl Gunung Anyar Tengah 7B RT10 RW 02 Kel Gunung Anyar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
954	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	5 ton	Jl Pagesangan GG II A. Kel. Pagesangan Kec. Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
955	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	40 meter	KLAKAH REJO Gg 3A. RT 4 RW 8 , KEL KANDANGAN KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
956	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	4 M	JALAN DUPAK MAGERSARI RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
957	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	35 Meter	KLAKAH REJO GG BUNTU F. RT1 RW8. KEL KANDANGAN . KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
958	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	34 meter	KLAKAH REJO GG BUNTU B, RT1 RW8, KEL KANDANGAN, KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
959	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	33 meter	KLAKAH REJO GG BUNTU A, RT 1 RW 8. KEL KANDANGAN, KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
960	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	35 meter	KLAKAH REJO GG BUNTU K , RT1 RW8 , KEL KANDANGAN, KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
961	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	30 m	Jl Amir Mahmud Gg 4D RT 10 RW 02 Kel Gunung Anyar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
962	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	30 Meter	KLAKAH REJO GG BUNTU D. RT1 RW8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
963	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	30 Meter	KLAKAH REJO GG BUNTU G. RT1 RW8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
964	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	30 Meter	KLAKAH REJO GG BUNTU H. RT1 RW8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
965	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	20 m	dari Jl Bulak Cumpat Timur ke Jl Kyai Tambak Deres, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
966	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	28 meter	KLAKAH REJO GG BUNTU I. RT1 RW 8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
967	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	25 meter	KLAKAH REJO GG BUNTU J. RT1 RW8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
968	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	23 Meter	KLAKAH REJO GG BUNTU E. RT1 RW8. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
969	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	20 meter	KLAKAH REJO GG BUNTU L, RT1 RW8 . KEL KANDANGAN, KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
970	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	6 Meter	gadukan baru RT 08 rw04 morokrembangan kecamatan krembangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024
971	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch dengan Cover	5 Meter	gadukan baru rt 08 rw 04 kelurahan morokrembanhgan kecamatan krembangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2024

4.2.6 Inovasi Unggulan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peranan inovasi daerah ini sangat penting dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sesuai dengan tema RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 *"**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia**",* pada tahun 2024 akan dilaksanakan beberapa inovasi unggulan guna mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2024, antara lain :

1. Optimalisasi e-Peken, Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN) berbentuk aplikasi yang dapat diakses melalui *website* maupun playstore pada android. Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi media transaksi untuk toko kelontong, UMKM dan Sentra Wisata Kuliner. Pada tahun 2024, beberapa inovasi yang akan ditambahkan salah satunya fitur *tracking* pengiriman yang akan bekerjasama dengan jasa pengiriman instan, selain itu Rumah Potong Hewan (RPH) yang menjual daging dan olahannya sudah difasilitasi di e-Peken maka kedepannya akan difasilitasi juga pedagang dari pasar binaan Pemerintah Kota Surabaya dengan kategori *fresh market* atau sayur mayur. E-Peken akan dikolaborasikan dengan hasil Program Padat Karya berupa *voucher* jasa atau belanja makanan minuman di Rumah Padat Karya Pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan omset pada toko kelontong, UMKM dan Sentra Wisata Kuliner serta hasil dari pemberdayaan program lain di Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkat. Dengan adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dan Pengadaan Barang/Jasa e-Peken maka e-Peken tidak hanya sebagai meningkatkan omset dari pelaku UMKM saja namun juga mendukung optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, serta untuk menstimulan ekonomi rakyat;

2. ASSIK dan Program Padat Karya, terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan meningkatnya pengangguran terbuka di Kota Surabaya. Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi mulai selaras dengan pengurangan pengangguran terbuka di Kota Surabaya. Program ASSIK yang merupakan sinergi antara kebutuhan perusahaan-perusahaan di Kota Surabaya dengan Pencari Kerja, baik berupa peningkatan *softskill*, keterampilan, pelatihan maupun bimbingan teknis yang telah diserap pada sektor formal dan informal akan tetap dilanjutkan dengan menambah fitur *link and match* sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu Program Padat Karya tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja namun juga pada pengurangan kemiskinan ekstrem sesuai Surat Keputusan Walikota 188.45/556/436.1.2/2022 tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem beserta Surat Edaran Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Program Padat Karya mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin. Pemerintah Kota Surabaya akan mengoptimalkan Program Padat Karya dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk memproduksi atau jasa yang setiap tahunnya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, agar keluarga miskin hasil pelatihan pada Program Padat Karya memiliki penghasilan dan mentas dari kemiskinan ekstrem;
3. Dandan Omah, merupakan program perbaikan rumah tidak layak huni yang dalam prosesnya untuk sarana percepatan dan transparansi disinergikan dengan kemudahan teknologi antar OPD yaitu usulan dari Kader Surabaya Hebat (KSH) melalui aplikasi Sayang Warga, proses verifikasi dan monitoring pelaksanaan pekerjaan dengan e-Housing / e-Rutilahu, dan mengintervensi tenaga kerja melalui aplikasi Padat Karya;
4. Paving GePREK (Gotong Royong, Pemberdayaan Dan Ekonomi Kerakyatan) yang bertujuan mensinergikan upaya pembangunan infrastruktur dengan pemulihan perekonomian di Kota Surabaya. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan permukiman perkampungan pada beberapa lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya menggunakan bahan material paving dipenuhi melalui pemberdayaan warga yang berasal dari keluarga miskin. Hal ini dimulai dari pelatihan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan

akses pemasaran yang pada akhirnya meningkatkan pemberdayaan warga yang berpartisipasi serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

5. Penataan, *branding* dan promosi kawasan wisata juga merupakan program unggulan untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di Kota Surabaya. Program ini dilaksanakan untuk mengembalikan lagi geliat ekonomi di Kota Surabaya pasca Pandemi Covid-19 melanda. Dengan menciptakan daya tarik wisata baru di Kota Surabaya tentunya akan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung Kembali ke Kota Surabaya. Meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Surabaya akan berdampak kepada transaksi ekonomi khususnya di sektor usaha hotel, restoran dan kafe;
6. Sekolahe Arek Suroboyo (SAS), merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk peningkatan mutu sekolah secara keseluruhan dan penerapan pendidikan karakter melalui ekosistem lingkungan sekolah yang aman, rekreatif, edukatif dan kegotong-royongan antar pemangku kepentingan. SAS mengembangkan sekolah berbasis kearifan dan keunggulan sekolah dan menguatkan partisipasi masyarakat secara bergotong-royong untuk mewujudkan pembelajaran bersama masyarakat.
7. Beasiswa Pemuda Tangguh, merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat usia sekolah di Kota Surabaya. Program ini tentunya diprioritaskan kepada masyarakat yang terdata sebagai keluarga miskin. Beasiswa ini diberikan mulai dari jejang Pendidikan SD/SMP/SMA sampai dengan jenjang Perguruan Tinggi. Adapun rincian beasiswa yang diberikan antara lain biaya pendidikan, biaya pendukung pendidikan, seragam, serta sepatu. Tata cara pemberian beasiswa ini tercantum di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;
8. KECAPIN MAMS (Kelas Calon Pengantin & Mama Menyusui), merupakan program di Bidang Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin dan Ibu menyusui sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya bayi dengan status gizi buruk, stunting, masalah tumbuh

kembang bayi lainnya serta kehamilan resiko tinggi yang dapat mengakibatkan kematian Ibu dan bayi;

9. E-Me Health merupakan aplikasi layanan berobat dan konsultasi permasalahan psikologi atau gejala gangguan mental umum seperti kecemasan, depresi serta gejala somatik lainnya. Inovasi ini untuk mendekatkan dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan akses kesehatan jiwa;
10. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan, program ini berupaya memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan pemerintah utamanya administrasi kependudukan. Upaya yang akan dilakukan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dalam lingkup kerja Kelurahan;
11. SIGAP (Sistem Informasi Infrastruktur Kedaruratan Gempa), merupakan pusat informasi infrastruktur yang bekerja sama dengan pihak ITS Surabaya dan berguna pada saat kondisi darurat becana khususnya gempa bumi. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat mengenai kejadian gempa yang terjadi serta menunjukkan akses menuju posko atau fasilitas kesehatan / kedaruratan terdekat;
12. Wira-Wiri Surabaya merupakan Layanan angkutan pengumpan / *Feeder* yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat sampai ke kawasan lingkungan.

4.2.7 Kebijakan Pencapaian SPM

4.2.7.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan meliputi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.

Penjabaran terkait SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.9
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp2.062.732.388.962** dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.10
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran	PD Pengampu
KOTA SURABAYA				**2.026.732.388.962**	Dinas Pendidikan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**979.471.854.910**	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.315.456.892	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.315.456.892	
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		697.501.642	
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	697.501.642	
	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.701.848.599	
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.701.848.599	
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.323.195.103	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.087.933.153	
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.235.261.950	
	5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		956.433.852.674	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	956.433.852.674	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran	PD Pengampu
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**1.016.459.544.377**	
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		527.719.338.519	
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.232.773.903	
		2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.629.947.404	
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	280.613.689.166	
		4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	
		5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.647.876.435	
		6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	931.075.192	
		7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	141.661.600	
		8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	215.450.220.000	
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.801.843.819	
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	270.251.000	
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		292.413.017.599	
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.789.331.114	
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.631.934.795	
		3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.111.450.070	
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	144.503.700.195	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	
		5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.912.957.598	
		6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	830.799.895	
		7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	262.123.182	
		8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	127.225.000.000	
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	145.720.750	
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		123.826.771.930	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	495.649.942	
		1	Pengadaan Perlengkapan PAUD	380.281.594	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.884.900.900	
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	51.267.153.994	
		4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.577.655.500	
		5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	277.650.000	
		6	Pengelolaan Dana BOP PAUD	61.943.480.000	
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		72.500.416.329	
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	3.380.560.275	
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	6.464.350	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	76.703.075	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran	PD Pengampu
			Nonformal/Kesetaraan		
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	122.630.000	
		5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.539.360.000	
		6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	211.997.579	
		7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	64.162.701.050	
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**30.800.989.675**	
	1		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.800.989.675	
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	801.289.675	
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.999.700.000	

4.2.7.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- Pelayanan kesehatan balita;
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Penjabaran terkait SPM Urusan Kesehatan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.11
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Kesehatan				
1	Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar	100%	Setiap Tahun
2	Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%	Setiap Tahun
3	Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	Setiap Tahun
4	Kesehatan Balita	Cakupan balita usia 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar	100%	Setiap Tahun
5	Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%	Setiap Tahun
6	Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
7	Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
8	Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
9	Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
10	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
11	Kesehatan Orang dengan	Persentase jumlah orang	100%	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	TB	yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		
12	Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp477.316.916.544** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.12
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran	PD Pengampu
	KOTA SURABAYA			**477.316.916.544**	Dinas Kesehatan
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**477.316.916.544**	
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		477.316.916.544	
		1	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.926.263.427	
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	6.151.694.320	
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	125.000.000	
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	1.442.858.005	
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	112.094.700	
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	133.956.869	
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.542.638.291	
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.601.283.390	
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	774.536.860	
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	32.885.690.827	
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.088.434.516	
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	461.197.505	
		13	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.358.665.879	
		14	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	2.639.490.935	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Nilai Anggaran	PD Pengampu
		Menular		
	15	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	363.453.138.795	
	16	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	0	
	17	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	773.046.203	
	18	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	977.288.400	
	19	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	841.879.501	
	20	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	27.758.121	

4.2.7.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/ORT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Miimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Rumah Tangga. terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota. terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Penjabaran terkait SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.13
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp8.023.257.004** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.14
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran	PD/Instansi Pengampu
	KOTA SURABAYA			**8.023.257.004**	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**8.023.257.004**	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		8.023.257.004	
		1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	6.255.026.693	
		2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.768.230.311	

4.2.7.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/ORT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Mniimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Penjabaran terkait SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.15
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp83.609.917.055** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.16
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nilai Anggaran	PD Pengampu
	KOTA SURABAYA	**83.609.917.055**	Dinas Perumahan Rakyat dan
1	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**34.083.883.755**	
	1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	34.083.883.755	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran	PD Pengampu
		dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha			Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	34.083.883.755	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**20.336.915.154**	
	1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		20.336.915.154	
		1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	20.336.915.154	
3	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**29.189.118.146**	
	1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		29.189.118.146	
		1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	29.189.118.146	

4.2.7.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- Pelayanan kerugian materil;
- Pelayanan pengobatan

Penerima jenis pelayanan dasar sub-urusan Trantibum sebagaimana dimaksud yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Penjabaran terkait SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.17
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp139.646.864.735** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.18
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nilai Anggaran	PD Pengampu
	KOTA SURABAYA	**139.646.864.735**	
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**38.879.014.677**	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.927.491.211	
	1 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	764.811.430	
	2 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	891.468.303	
	3 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	172.020.000	
	4 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	28.302.509.678	
	5 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.593.595.300	
	6 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	203.086.500	
	2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6.757.857.866	
	1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.103.960.258	
	2 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.807.071.208	
	3 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	846.826.400	
	3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	193.665.600	
	1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	193.665.600	
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.082.595.540**	
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.009.931.767	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.009.931.767	
	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.792.320.710	
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.792.320.710	
	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.280.343.063	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nilai Anggaran	PD Pengampu
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.280.343.063	
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**48.849.458.393**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.894.911.101	
	1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.785.521.604	
	2 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8.005.882.869	
	3 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	744.256.012	
	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	10.359.250.616	
	2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	563.940.376	
	1 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	563.940.376	
	3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	390.606.916	
	1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	390.606.916	
4	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**22.835.796.125**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.142.127.284	
	1 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	312.981.000	
	2 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	401.156.706	
	3 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.427.989.578	
	2 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20.693.668.841	
	1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	18.368.885.711	
	2 enyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.324.783.130	

4.2.7.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;

- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

- Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;

Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota.

Penjabaran terkait SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.19
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
1	Pelayanan sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
5	Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp86.931.373.545** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.20
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran	PD Pengampu
	KOTA SURABAYA			**86.931.373.545**	Dinas Sosial
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**86.931.373.545**	
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		70.733.296.633	
		1	Penyediaan Permakanan	56.556.190.002	
		2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	630.148.300	
		3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.378.403.584	
		4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.202.337.263	
		5	Pemberian Layanan Rujukan	966.217.484	
	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		16.198.076.912	
		1	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.535.442.814	
		2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	13.662.634.098	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program

Rencana Program Tahun 2024 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024, yang mempertimbangkan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025 serta RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 serta penelaahan atas rancangan Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2024. Pada RKPD Tahun 2024 terdapat penyesuaian terhadap output pada level kegiatan dan subkegiatan yang di dalamnya terdapat perbedaan output dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4) dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42) sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian output pada Renstra 3 sentra menjadi 2 sentra disebabkan 1 sentra (sentra ikan bulak) pemindahan pengelolaan kepada oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian output pada Renstra 13 laporan menjadi 2 laporan disebabkan adanya pergeseran pengelolaan hutan raya dari Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya ke Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya pada kegiatan Pengembangan Sarana Pertanian;

3. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaa, Dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota pada pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 24 jenis menjadi 23 jenis disebabkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa kegiatan pembinaan paskibraka dilaksananakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 157 lokasi menjadi 314 lokasi disebabkan penambahan target pemeliharaan lapangan olahraga;
5. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 8 lokasi menjadi 9 lokasi disebabkan penambahan pengelolaan obyek museum (rumah lahir Bung Karno);
6. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada Inspektorat output pada Renstra 65 lembaga menjadi 60 lembaga sesuai dengan jumlah Perangkat Daerah
7. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada Inspektorat target output dari 65 lapora menjadi 60 laporan sesuai dengan jumlah Perangkat Daerah;
8. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup output pada Renstra 3 stasiun menjadi 2 stasiun sesuai dengan SPKUA (Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya;
9. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan pada Kecamatan Pabean Cantian output pada Renstra 376 lembaga menjadi 371 lembaga disebabkan adanya penyesuaian jumlah RT/RW dan LPMK;
10. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Kecamatan

Lakarsantri output pada Renstra 200 lembaga menjadi 205 lembaga disebabkan adanya penyesuaian jumlah RT/RW dan LPMK;

11. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Kecamatan Wonocolo output pada Renstra 280 lembaga menjadi 281 lembaga disebabkan adanya penyesuaian jumlah RT/RW dan LPMK;
12. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Asemrowo output pada Renstra 62 unit usaha menjadi 288 unit usaha disebabkan penyesuaian dengan pemutakhiran data unit usaha;
13. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Kecamatan Pabean Cantian output pada Renstra 5 Kelurahan menjadi 4 Kelurahan disebabkan adanya penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur menjadi Kelurahan Tanjung Perak;
14. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 6 Kecamatan menjadi 5 kecamatan disebabkan penyesuaian lokasi/wilayah pembangunan lapangan olahraga;
15. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk indikator persentase realisasi bagi hasil retribusi output pada Renstra 100% menjadi 0 disebabkan subkegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota tidak digunakan lagi di tahun 2024 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Lampiran huruf O bahwa Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dalam Pengelolaan Pemerintah Pusat sehingga dilakukan proses Peralihan Kewenangan Pengelolaan Terminal Purabaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 551.22 / 5713 / 436.7.12 / 2022 - Nomor : HK.201 / 4 / 2 / DJPD / 2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penyerahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

16. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian output pada Renstra 250 pelaku usaha menjadi 180 pelaku usaha disebabkan Jumlah pelaku usaha di Sentra Ikan Hias Gunungsari sebanyak 172 pelaku usaha dan Sentra Ikan Romokalisari (Adventure Land Romokalisari) sebanyak 8 pelaku usaha;
17. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian output pada Renstra 5 laporan menjadi 16 laporan disebabkan adanya pergeseran anggaran Taman Hutan Raya dari Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
18. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian output pada Renstra 13 unit menjadi 2 unit dikarenakan adanya pergeseran pengelolaan taman hutan raya ke Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 13 unit adalah 11 unit tahura dan 2 kebun raya;
19. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 500 orang menjadi 700 orang untuk kebutuhan jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
20. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 15.649 orang menjadi 3.186 orang disebabkan Program pemberian beasiswa kepada siswa SMA/SMK/MA sederajat dipindahkan / dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan;
21. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 820 Orang menjadi 825 Orang disebabkan penyesuaian kebutuhan jumlah peserta;
22. Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

output pada Renstra 810 Orang menjadi 925 Orang disebabkan penyesuaian kebutuhan jumlah peserta;

23. Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 157 unit menjadi 456 unit disebabkan penyesuaian target pemeliharaan lapangan olahraga;
24. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 54 Unit menjadi 21 unit disebabkan penyesuaian target pembangunan mempertimbangkan jumlah lapangan olahraga yang telah terbangun dan termanfaatkan;
25. Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 8 unit menjadi 9 unit disebabkan penambahan target output menyesuaikan dengan bertambahnya jumlah lokasi yaitu Rumah Lahir Bung Karno (RLBK);
26. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata output pada Renstra 1 objek menjadi 2 objek disebabkan penambahan objek pemajuan kebudayaan yakni sedekah bumi (ritus);
27. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan output pada Renstra 100 pengguna menjadi 1.200 pengguna disebabkan Khasanah Arsip yang diunggah di SIKN JIKN kurang lebih 100 item setiap bulan;
28. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat output pada Renstra 65 laporan menjadi 60 laporan menyesuaikan jumlah PD;
29. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat output pada Renstra 65 laporan menjadi 60 laporan menyesuaikan jumlah PD;
30. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Inspektorat output pada Renstra 10 perangkat daerah menjadi 60 perangkat daerah menyesuaikan jumlah PD;

31. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada Kecamatan Asemrowo output pada Renstra 34 orang menjadi 82 orang disebabkan tahun 2024 akan diikuti oleh 41 orang RT di Kelurahan Asemrowo sebanyak 2 kali kegiatan;
32. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah output pada Renstra 4.497 orang menjadi 11.000 orang dikarenakan realisasi capaian indikator Sub Kegiatan sampai dengan bulan April 2023 mencapai 5.128 Orang sehingga diperlukan perubahan target output untuk tahun berikutnya;
33. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Dinas Pendidikan output pada Renstra 15 unit menjadi 7 unit dikarenakan penyesuaian prioritas lokasi pembangunan sekolah yang membutuhkan intervensi, lokasi sebagai berikut: 1. SDN Pacar Kembang I 2. SDN Alun-Alun Contong/ SDN Sulung 3. SDN Asemrowo 4. SDN Wonokromo III 5. SDN Kapasan III 6. SDN Simomulyo VIII 7. SDN Rungkut Menanggal II.
34. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Sekretariat Daerah output pada Renstra 1600 unit menjadi 1500 unit dikarenakan menyesuaikan jumlah pengadaan peralatan untuk Perangkat Daerah
35. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah output pada Renstra 20 dokumen menjadi 98 dokumen dikarenakan adanya penambahan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa.
36. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Dinas Sosial output pada Renstra 1.100 orang menjadi 1.000 orang dikarenakan menyesuaikan jumlah penghuni yang telah diintervensi melalui kegiatan pemulangan atau reunifikasi.

Dibandingkan dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024, pada RKPD Tahun 2024 terdapat penambahan sub kegiatan berdasarkan usulan dari RSUD dr.M.Soewandie serta mempertimbangkan pencapaian target program terkait ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr.M.Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit, maka terdapat penambahan 1 (satu) subkegiatan yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan output 1 unit.

Pendanaan Daerah Tahun 2024 diarahkan sebagai berikut :

1. Alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru sebesar Rp2.545.410.168.165,- atau 24,31%;
2. Alokasi anggaran Pendidikan sebesar Rp2.206.464.862.727,- atau 21,07%;
3. Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp2.283.238.056.153 atau 29,02%. termasuk di dalamnya pekerjaan lanjutan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Baru Surabaya Timur;
4. Anggaran Dana Kelurahan sebesar Rp 522.835.245.179,- atau 5,4%;
5. Pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM;
6. Pendanaan penanganan masalah genangan dan pencegahan banjir;
7. Pengintegrasian penataan kota dan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penataan penerangan jalan umum
8. Alokasi hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp93.725.238.166,-;.
9. Pengalokasian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp37.000.000.000;
10. Pengalokasian anggaran penyusunan RPJP Kota Surabaya Tahun 2025-2045, RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030 serta RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2030 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
11. Pengalokasian anggaran untuk mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui dukungan anggaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 beserta tolok ukur Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel V.1 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel V.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2024

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6,465,058,873,624**	**6,513,070,515,488**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**2,026,732,388,962**	**2,399,431,335,109**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92.54%	**979,471,854,910**	**1,039,029,915,965**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	**1,315,456,892**	**4,247,086,113**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1,315,456,892	4,247,086,113	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**956,433,852,674**	**1,004,298,708,241**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6352 Orang/bulan	956,433,852,674	1,004,298,708,241	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**697,501,642**	**1,294,247,974**	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	697,501,642	1,294,247,974	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**3,701,848,599**	**4,803,417,831**	
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	976 Unit	3,701,848,599	4,803,417,831	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Bangunan Lainnya yang Disediakan				
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**17,323,195,103**	**24,386,455,806**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2,087,933,153	2,423,025,311	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15,235,261,950	21,963,430,495	Dinas Pendidikan
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	**1,016,459,544,377**	**1,232,506,317,644**	
			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%			
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			
			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%			
			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	38%			
			Persentase lembaga PAUD berkualitas	84,58 %			
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	89,21 %			
			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	90%			
			Persentase SD terakreditasi minimal B	94,14 %			
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	96,79 %			
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan	1 Laporan	**527,719,338,519**	**620,489,175,423**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			karir				
			Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan			
			Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga			
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan			
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	12,232,773,903	95,824,507,666	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	2,629,947,404	7,127,164,788	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik	280,613,689,166	304,572,192,135	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	73986 Peserta Didik	2,647,876,435	5,842,962,460	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	931,075,192	29,253,046,110	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan	141,661,600	180,232,167	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan	215,450,220,000	148,041,273,856	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155 Unit	12,801,843,819	26,577,158,157	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	649 Satuan Pendidikan	270,251,000	307,104,748	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		0	2,763,533,336	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**292,413,017,599**	**349,025,854,856**	
			Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga			
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan			
			Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan			
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	6,789,331,114	63,883,005,111	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	6,631,934,795	17,718,092,499	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2,111,450,070	6,582,897,829	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39574 Peserta Didik	144,503,700,195	160,990,452,784	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.	Pembinaan Minat, Bakat dan	Dinas	Jumlah Siswa yang Mengikuti	2122 Peserta	3,912,957,598	4,408,303,050	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0038	Kreativitas Siswa	Pendidikan	Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Didik			Pendidikan
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	830,799,895	12,817,626,527	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	256 Satuan Pendidikan	262,123,182	420,749,489	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	127,225,000,000	80,428,476,854	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39248 Satuan Pendidikan	145,720,750	232,837,924	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		0	1,543,412,789	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**123,826,771,930**	**151,425,104,353**	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan			
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan			
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	495,649,942	516,041,633	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	380,281,594	720,079,268	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik	3,884,900,900	160,194,108	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88778 Peserta Didik	51,267,153,994	72,266,182,445	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang	5,577,655,500	8,060,822,300	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	277,650,000	687,384,599	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan	61,943,480,000	69,014,400,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**72,500,416,329**	**111,566,183,012**	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan			
			Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari			
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35 Peserta Didik	3,380,560,275	808,045,603	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	6,464,350	198,970,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	76,703,075	109,741,898	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang	293 Satuan Pendidikan	122,630,000	130,646,362	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Nonformal/Kesetaraan		Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan	4,539,360,000	6,787,337,663	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	211,997,579	288,447,940	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2802 Peserta Didik	64,162,701,050	103,242,993,546	Dinas Pendidikan
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1:20	**30,800,989,675**	**127,895,101,500**	
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	1:20			
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**		Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	**30,800,989,675**	**127,895,101,500**	
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang			
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	801,289,675	929,981,916	Dinas Pendidikan
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	29,999,700,000	126,965,119,584	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,283,238,056,153**	**1,953,322,859,189**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	**1,202,845,487,994**	**1,082,168,564,094**	
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82,90 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,90 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%			
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**445,375,879,384**	**362,608,202,434**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1150 Orang/bulan	287,598,154,200	260,871,349,055	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	203 Orang/bulan	59,776,563,704	34,030,972,947	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	415 Orang/bulan	98,001,161,480	67,705,880,432	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	**818,571,086**	**7,168,300,104**	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 Unit	818,571,086	7,168,300,104	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**169,057,646,843**	**259,105,144,866**	
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	165,634,390,590	125,928,675,743	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,608,000,000	42,918,283,227	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,815,256,253	71,536,597,375	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	18,721,588,521	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	3 jenis	**587,593,390,681**	**453,286,916,690**	
			Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%			
			Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Asemrowo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,284,175,898	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	652,235,848	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Balongsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,876,812,047	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bangkingan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	695,754,479	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,771,794,430	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Benowo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,804,495,404	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,800,300,115	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,229,792,750	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,625,247,125	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dupak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,308,620,857	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gading	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,547,938,298	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gayungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,003,988,283	15,995,090	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gundih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,698,692,558	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,825,249,170	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jagir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,995,084,903	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jemursari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,040,842,130	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jeruk	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,147,695,990	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kalijudan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,727,718,272	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,081,974,168	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kebonsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,138,550,159	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,337,378,529	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kedurus	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,638,918,282	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kenjeran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,047,013,708	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Keputih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,548,253,241	15,995,090	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ketabang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,200,347,327	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,397,807,062	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,204,398,293	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,380,708,596	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Lontar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,768,572,434	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Made	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,028,247,913	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,926,374,332	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,419,122,713	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Menur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,092,054,900	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Mojo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,139,781,460	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,147,713,135	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,111,616,268	15,995,090	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,169,677,744	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,650,022,123	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pakis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,571,922,129	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pegirian	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,501,946,499	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Peneleh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,809,763,297	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Perak Timur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,449,970,726	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,564,123,965	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,125,634,280	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Rangkah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,024,255,748	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sawahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,588,530,487	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,573,786,703	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sememi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,965,209,555	15,995,090	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sidosermo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,542,780,038	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sidotopo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,343,137,043	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,220,593,607	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Simolawang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,300,979,234	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Simomulyo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,636,708,945	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	980,125,316	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,850,024,987	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,007,271,510	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,120,093,475	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,277,927,398	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,702,196,567	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tenggilis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,187,820,904	15,995,090	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Wiyung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,462,526,094	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Wonokromo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,067,124,716	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,530,337,799	15,995,090	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	159,543,956,740	160,506,531,062	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	292,179,671,975	291,772,694,958	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	**934,634,090,396**	**796,127,645,743**	
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,05 %			
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,55 %			
			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,19 %			
			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%			
			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	80,95 %			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase Jaminan Kesehatan	97,30 %			
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%			
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%			
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%			
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08 %			
			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%			
			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	56%			
			Persentase Rumah Sehat	88,20 %			
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%			
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,102 %			
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen	**454,941,823,057**	**258,965,012,225**	
			Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	16 unit			
			Jumlah Puskesmas yang	64 Unit			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan				
			Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit			
			Persentase Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas	100%			
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%			
			Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%			
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	320,672,224,624	75,000,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	7,145,500,914	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	71,200,000	96,248,743	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	9,937,028,949	62,846,859,333	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinas	Jumlah Sarana , Prasarana	2 Unit	447,448,197	920,453,353	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01.0010	Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kesehatan	dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				Kesehatan
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	2,952,681,000	1,391,824,549	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	53,714,562,091	9,717,928,540	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1,628,127,275	1,776,782,318	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	4,926,025,570	20,223,672,792	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	37,606,381,712	139,323,058	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	15,840,642,725	9,092,667,596	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0	683,977,980	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		0	76,721,271,913	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		0	275,941,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		0	78,061,050	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	145 Dokumen	**477,547,916,544**	**483,118,534,697**	
			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan			
			Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan			
			Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan			
			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan			
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di puskesmas	2 kegiatan			
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia	2 kegiatan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Produktif di puskesmas				
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan			
			Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut di puskesmas	1 kegiatan			
			Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan			
			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan			
			Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi			
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit			
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas			
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas			
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas			
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan	63 Puskesmas			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			imunisasi				
			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas			
			Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43725 Orang	5,099,466,945	8,684,687,955	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	742 Orang	16,530,901	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223 Orang	16,537,117	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Balongsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543 Orang	16,537,116	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	932 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Benowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	828 Orang	16,526,307	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	16,525,765	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	763 Orang	16,524,685	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1032 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dupak	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	363 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gading	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1289 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gayungan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gundih	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	598 Orang	16,526,307	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	972 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jagir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	816 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jemursari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	280 Orang	16,525,225	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jeruk	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	822 Orang	16,537,116	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	849 Orang	16,526,307	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	860 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580 Orang	16,526,307	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kedurus	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1112 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	689 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Keputih	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	609 Orang	16,524,684	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ketabang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	406 Orang	16,521,981	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	603 Orang	16,525,225	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	402 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Lontar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	701 Orang	16,526,307	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Made	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang	16,526,305	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	851 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	902 Orang	16,532,792	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Menur	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	462 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Mojo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1161 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	824 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	619 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	847 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	758 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pakis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pegirian	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	418 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Peneleh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	613 Orang	16,526,307	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1081 Orang	16,524,684	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	645 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	787 Orang	16,524,684	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Rangkah	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	539 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sawahan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	706 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	458 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sememi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1350 Orang	22,550,000	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	621 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	791 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1054 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Simolawang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	607 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1167 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	248 Orang	16,526,307	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	589 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	945 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	357 Orang	21,399,009	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	722 Orang	16,526,307	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	735 Orang	16,526,307	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wiyung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	849 Orang	16,526,307	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	16,670,000	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1126 Orang	16,526,306	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41739 Orang	125,000,000	3,209,449,359	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2038597 Orang	1,442,858,005	3,036,562,748	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	325983 Orang	112,094,700	3,700,745,306	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	747207 Orang	133,956,869	18,866,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	60512 Orang	3,451,207,438	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tuberkulosis		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang	19,722,631	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 Orang	11,551,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Balongsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	707 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 Orang	11,547,350	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Benowo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1179 Orang	16,998,980	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712 Orang	19,698,198	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1164 Orang	19,723,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	1216 Orang	14,187,530	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dupak	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang	11,550,955	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gading	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1879 Orang	19,723,278	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gayungan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	887 Orang	11,551,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gundih	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 Orang	19,722,631	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 Orang	19,723,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jagir	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1273 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jemursari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	423 Orang	11,542,810	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jeruk	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	16,999,278	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	16,998,738	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1067 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 Orang	19,723,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 Orang	19,721,000	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kedurus	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 Orang	19,576,036	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	16,998,738	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Keputih	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 Orang	14,274,846	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Ketabang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 Orang	11,550,954	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 Orang	14,223,500	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Orang Terduga	593 Orang	11,550,954	3,276,600	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0011	Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Lidah Kulon	Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Lontar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 Orang	14,275,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Made	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	298 Orang	11,550,980	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1323 Orang	19,723,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Menur	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1010 Orang	16,999,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Mojo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1649 Orang	19,722,631	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 Orang	19,723,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	843 Orang	14,274,845	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	1137 Orang	16,998,673	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tuberkulosis		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang	16,974,305	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pakis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 Orang	11,551,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pegirian	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 Orang	19,723,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Peneleh	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	798 Orang	19,722,631	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1535 Orang	19,686,020	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1115 Orang	19,722,631	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	945 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Rangkah	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1444 Orang	19,723,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sawahan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	1127 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	680 Orang	19,722,631	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sememi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1383 Orang	19,764,500	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 Orang	14,274,846	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1018 Orang	19,723,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1246 Orang	19,673,765	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Simolawang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1562 Orang	19,722,631	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	14,250,415	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang	11,557,000	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1194 Orang	19,723,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 Orang	24,258,000	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1176 Orang	19,722,630	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 Orang	14,274,847	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wiyung	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1196 Orang	16,999,279	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 Orang	11,582,000	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1404 Orang	19,722,980	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	823 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Orang Terduga	249 Orang	5,112,800	3,276,600	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0012	Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Balas Klumprik	Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Balongsari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1416 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Benowo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	912 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	732 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	922 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1224 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Dupak	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	465 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Puskesmas Gading	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	1420 Orang	5,068,917	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Risiko Terinfeksi HIV		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gayungan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gundih	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1109 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Jagir	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	924 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Jemursari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	333 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Jeruk	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	792 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	882 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1217 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	949 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2175 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kedurus	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1287 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	696 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Keputih	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	664 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Ketabang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 Orang	5,068,917	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	462 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	447 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Lontar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	754 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Made	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	290 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	971 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Menur	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Mojo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1430 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	879 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	670 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	948 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	832 Orang	5,068,917	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Orang Terduga	592 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0012	Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pakis	Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pegirian	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	490 Orang	5,068,917	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Peneleh	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	687 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1436 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	700 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	966 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Rangkah	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	803 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sawahan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	951 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Puskesmas Sememi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	1638 Orang	10,466,500	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Risiko Terinfeksi HIV		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	686 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	861 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Simolawang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	666 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1277 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	613 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	1037 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	795 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	944 Orang	5,068,919	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Wiyung	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	952 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	667 Orang	5,115,000	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1235 Orang	5,068,918	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52741 Orang	1,276,453,998	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	774,536,860	169,202,380	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	31,583,723,784	4,212,254,888	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0015	Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	20,140,632	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,938,171	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	26,188,203	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	22,268,707	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	18,764,359	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	45,744,493	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	17,010,848	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	20,271,577	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	34,644,584	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	15,907,827	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19,998,771	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	23,643,524	24,574,500	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0015	Kesehatan Gizi Masyarakat	Gayungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	16,639,348	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	23,389,360	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	26,606,634	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,248,795	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	16,742,615	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	20,438,478	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	21,094,820	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	23,816,510	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	10,723,513	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	30,992,830	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	27,432,950	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	20,243,265	24,574,500	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0015	Kesehatan Gizi Masyarakat	Keputih	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19,872,839	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19,388,896	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	20,327,749	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19,016,272	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19,584,918	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	16,326,675	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	28,799,649	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	22,681,239	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19,839,734	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	20,315,227	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	14,452,355	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	19,813,266	24,574,500	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0015	Kesehatan Gizi Masyarakat	Mulyorejo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19,518,233	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	18,086,193	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	17,102,084	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,970,624	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19,813,874	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	31,032,445	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	23,173,897	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	14,057,906	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	21,555,206	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	22,959,145	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,708,716	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	33,743,600	24,574,500	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0015	Kesehatan Gizi Masyarakat	Sememi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	22,879,753	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	6,419,243	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	16,700,904	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19,618,052	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	34,834,841	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,854,387	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	26,518,545	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,161,498	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,127,150	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19,962,800	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	20,447,783	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	26,884,122	24,574,500	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0015	Kesehatan Gizi Masyarakat	Tenggilis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	21,244,103	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,158,398	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	17,123,908	24,574,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	411,164,557	2,878,672,317	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	43,213,625	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	29,753,493	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	54,393,626	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	30,489,266	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	37,696,656	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	53,955,182	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	37,764,118	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	35,758,249	42,595,800	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0017	Kesehatan Lingkungan	Dr. Soetomo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	45,375,298	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	30,453,227	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	47,829,742	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	41,166,050	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	33,281,137	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	49,321,134	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	51,859,428	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	35,358,940	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	29,486,813	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	43,640,775	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	48,759,343	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	48,051,520	42,595,800	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0017	Kesehatan Lingkungan	Kebonsari	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	32,399,761	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	62,548,300	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	41,837,499	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	38,717,433	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	30,628,613	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	39,082,921	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	45,785,019	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	30,410,026	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	41,817,567	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	32,594,469	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	52,303,306	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	50,960,229	42,595,800	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0017	Kesehatan Lingkungan	Medokan Ayu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	38,835,004	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	45,902,204	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	35,631,202	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	47,627,899	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	72,752,500	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	45,155,690	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	32,068,817	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	31,820,567	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	28,997,236	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	53,576,480	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	53,352,771	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	31,960,036	42,595,800	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0017	Kesehatan Lingkungan	Putat Jaya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	48,123,091	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	36,401,701	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	31,447,963	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	110,479,600	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	45,104,722	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	37,728,522	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	44,534,198	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	37,799,427	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	43,043,479	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	34,012,227	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	44,498,332	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	30,618,384	42,595,800	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0017	Kesehatan Lingkungan	Tambak Wedi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	34,915,711	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	38,464,326	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	44,010,333	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	48,882,614	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	42,765,475	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	38,501,191	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	41,565,492	42,595,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	461,197,505	308,268,781	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	42,600,000	428,543,116	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	46,506,621	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	67,385,232	6,553,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kesehatan				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	69,367,329	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	164,515,680	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	111,779,640	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	70,120,828	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	211,601,946	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	71,240,862	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	67,480,179	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	49,472,398	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	86,822,084	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	138,468,772	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	124,646,228	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	128,985,914	6,553,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kesehatan				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	41,301,666	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	85,714,109	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	132,214,469	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	23,815,450	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	108,395,986	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	63,984,775	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	61,068,861	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	101,612,359	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	286,290,162	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	489,926,880	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	96,917,909	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	114,224,309	6,553,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kesehatan				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	46,089,044	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	89,059,383	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	117,233,946	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	93,580,819	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	110,712,578	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	145,409,559	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	88,729,693	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	85,780,593	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	62,694,530	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	30,403,910	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	66,067,580	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	69,918,736	6,553,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kesehatan				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	62,407,229	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	126,319,575	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	72,587,802	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	133,098,767	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	106,557,090	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	151,372,753	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	101,037,986	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	154,023,244	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	57,948,363	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	37,536,940	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	72,736,600	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	60,771,847	6,553,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kesehatan				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	165,593,372	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	65,339,649	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	91,805,172	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	67,315,792	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	82,369,339	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	77,977,432	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	76,353,000	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	146,690,360	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	134,827,800	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	27,497,295	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	24,244,555	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	91,464,161	6,553,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kesehatan				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	108,648,737	6,553,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1,156,910,840	19,053,330,702	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	22,992,738	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,065,712	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,065,872	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,173,400	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,064,800	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,002,350	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,092,800	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pelayanan Kesehatan Penyakit	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	23,061,387	15,303,200	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0025	Menular dan Tidak Menular	Bulak Banteng	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,053,150	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,050,306	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,063,009	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,065,709	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,041,870	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,063,550	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,049,650	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,044,520	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	25,216,619	15,303,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,065,872	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,045,712	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,054,900	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,011,117	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,173,400	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,065,711	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,068,954	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,004,435	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	12 Dokumen	23,065,709	15,303,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Menular				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,065,711	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,047,873	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,007,873	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	9,660,000	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,065,710	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,048,415	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,054,900	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,054,899	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,041,870	15,303,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,041,870	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,064,090	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,018,684	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,011,115	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,062,000	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,087,874	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,085,997	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,065,711	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,049,730	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pelayanan Kesehatan Penyakit	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	23,014,901	15,303,200	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0025	Menular dan Tidak Menular	Putat Jaya	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,054,900	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,074,036	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,017,603	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	64,455,696	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,018,684	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,041,871	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,011,115	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,090,576	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	23,060,847	15,303,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,038,684	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,093,820	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,038,684	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,038,847	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,038,684	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	22,980,846	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,036,320	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,043,007	15,303,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	12 Dokumen	23,173,400	15,303,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Menular				
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	363,453,138,795	426,817,673,903	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	971,936,727	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	515,153,015	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	633,708,719	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	567,675,438	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	758,307,242	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	851,069,618	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	949,526,066	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	780,121,159	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	652,564,979	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	791,810,338	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,000,090,815	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	721,624,021	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	663,055,611	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	845,808,381	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,108,244,536	12,014,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	568,337,263	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	770,688,959	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	624,365,207	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	962,670,095	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	814,539,271	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	822,239,813	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	930,770,689	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	826,721,939	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	679,121,911	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	688,082,949	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	555,478,399	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	932,729,076	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	667,010,577	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	838,132,033	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	570,129,966	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	717,300,023	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Operasional Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	756,248,527	12,014,200	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0033	Puskesmas	Medokan Ayu	Pelayanan Puskesmas				Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	659,146,449	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	726,961,049	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,013,918,882	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	748,675,080	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	980,391,941	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	776,647,853	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	654,225,478	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	671,852,889	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	616,165,745	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,058,575,788	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	622,691,504	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,081,344,745	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	671,275,050	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	478,549,324	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	634,683,658	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	975,422,040	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	880,091,470	12,014,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,320,694,582	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,061,154,215	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	709,182,585	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,120,671,206	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	806,796,879	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	826,323,969	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	789,872,628	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,262,470,129	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	915,577,244	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	953,351,097	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	889,177,453	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	890,686,301	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	527,599,217	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,066,823,615	12,014,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (sub alternatif)	Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	115,500,000	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (sub	Instalasi Farmasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	12 Dokumen	115,500,000	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	alternatif)	Kesehatan	Kesehatan Lainnya				
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	773,046,203	433,338,210	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (sub alternatif)	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	666 Orang	977,288,400	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (sub alternatif)	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	841,879,501	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (sub alternatif)	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	27,758,121	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Balongsari	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan		0	1,638,300	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Benowo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Dupak	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Gading	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Gayungan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Gundih	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai		0	1,638,300	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Standar				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Jagir	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Jemursari	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Jeruk	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kedurus	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Keputih	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Ketabang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Lontar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Made	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia		0	1,638,300	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.06	Kesehatan pada Usia Produktif	Menur	Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Mojo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Pakis	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Pegirian	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Peneleh	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan		0	1,638,300	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Rangkah	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sawahan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sememi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai		0	1,638,300	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Standar				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Simolawang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Wiyung	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	1,638,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Balongsari	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Benowo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut		0	3,276,600	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.07	Kesehatan pada Usia Lanjut	Dupak	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Gading	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Gayungan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Gundih	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Jagir	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Jemursari	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Jeruk	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut		0	3,276,600	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.07	Kesehatan pada Usia Lanjut	Kedurus	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Keputih	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Ketabang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Lontar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Made	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Menur	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut		0	3,276,600	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.07	Kesehatan pada Usia Lanjut	Mojo	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Pakis	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Pegirian	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Peneleh	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Rangkah	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut		0	3,276,600	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.07	Kesehatan pada Usia Lanjut	Sawahan	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sememi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Simolawang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut		0	3,276,600	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.07	Kesehatan pada Usia Lanjut	Tanjungsari	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Wiyung	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	3,276,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		0	2,865,893,032	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	**123,973,202**	**330,989,299**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	123,973,202	330,989,299	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	**2,020,377,593**	**53,713,109,522**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	1,831,712,000	44,234,925,233	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan	12 Dokumen	188,665,593	9,478,184,289	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kesehatan Rujukan		Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	50,17 %	**949,862,450**	**7,114,726,378**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan realisasi penyediaan SDM Kesehatan di Puskesmas yang bersumber dari dana APBN	1 laporan	**949,862,450**	**7,114,726,378**	
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang			
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	949,862,450	3,647,496,006	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Balongsari	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas		0	12,540,152	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Benowo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Dupak	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Gading	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Gayungan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Gundih	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Jagir	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Jemursari	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Jeruk	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang		0	12,540,152	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Sesuai Standar		Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kedurus	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Keputih	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Ketabang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0	12,540,152	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			(Fasyankes)				
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Lontar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Made	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Menur	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber	Puskesmas	Jumlah Sumber Daya		0	12,540,152	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.02	Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Mojo	Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Pakis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Pegirian	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Peneleh	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas		0	12,540,152	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Rangkah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sawahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sememi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Simolawang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang		0	12,540,152	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Sesuai Standar		Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Wiyung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	12,540,152	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0	12,540,152	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			(Fasyankes)				
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0	2,677,200,796	Dinas Kesehatan
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	**476,543,155**	**2,527,805,349**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		**0**	**52,218,000**	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		0	52,218,000	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	**476,543,155**	**2,475,587,349**	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	476,543,155	2,475,587,349	Dinas Kesehatan
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**		Persentase Upaya Kesehatan	100%	**144,332,072,158**	**65,384,117,625**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Bersumber Daya Masyarakat Aktif				
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	**181,415,081**	**9,898,011,963**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	181,415,081	9,898,011,963	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan	**144,150,657,077**	**55,486,105,662**	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas			
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	142,064,856,300	52,834,943,070	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	20,013,063	39,745,158	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	39,200,000	38,270,688	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	12 Dokumen	35,737,612	38,270,688	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(UKBM)		(UKBM)				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	38,737,837	53,736,240	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	40,526,576	49,083,468	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12,076,126	38,926,008	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	20,013,062	41,940,480	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,025,000	43,316,652	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	40,526,576	33,945,576	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	60,730,405	26,147,268	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	23,431,982	50,459,640	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
03.0001	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bulak Banteng	Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	45,495,000	62,910,720	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	29,130,180	52,589,430	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	25,711,261	48,329,850	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	32,549,099	47,707,296	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	39,077,252	37,844,730	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	43,296,397	46,789,848	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	12 Dokumen	32,888,513	62,550,294	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	41,666,216	53,343,048	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	34,057,883	32,536,638	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8,616,666	33,126,426	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	17,733,783	35,583,876	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	33,118,918	66,449,448	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	54,772,072	23,329,392	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	36,537,838	21,822,156	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	45,575,675	47,608,998	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	29,620,720	45,872,400	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	17,163,964	32,667,702	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	23,922,521	45,511,974	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	23,692,117	54,915,816	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	39,877,477	36,730,686	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	19,933,783	44,430,696	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	12 Dokumen	27,911,261	39,122,604	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8,616,665	22,117,050	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	37,028,378	34,731,960	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	25,141,442	24,672,798	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	23,279,955	49,378,362	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	49,073,872	67,137,534	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	49,564,413	29,423,868	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	12 Dokumen	26,050,675	49,804,320	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(UKBM)		(UKBM)				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	37,107,657	45,446,442	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	37,447,072	29,882,592	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	31,409,459	45,970,698	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	16,594,144	52,229,004	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	39,307,658	49,116,234	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	10,895,945	47,150,274	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	40,216,892	48,198,786	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	17,163,963	40,859,202	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
03.0001	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Tanjungsari	Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	37,107,657	24,050,244	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	43,635,810	34,568,130	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	41,017,117	42,923,460	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	46,145,494	57,111,138	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	38,165,540	42,628,566	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	46,794,594	59,699,652	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	12 Dokumen	29,620,720	49,083,468	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	78,804,000	0	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	44,381,306	37,386,006	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	20,582,883	38,205,156	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	26,281,081	51,213,258	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	26,620,495	36,140,898	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	64,149,325	41,973,246	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	16,933,559	23,853,648	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	40,296,171	50,590,704	Dinas Kesehatan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1,713,883,968,292**	**1,601,858,423,647**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	93%	**115,412,317,257**	**132,061,646,556**	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,25 %			
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	**96,945,920**	**328,287,807**	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	96,945,920	328,287,807	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**44,692,142,278**	**56,924,071,335**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184 Orang/bulan	44,692,142,278	56,924,071,335	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	**5,932,424,345**	**10,276,516,862**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5,932,424,345	10,276,516,862	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.	**Pemeliharaan Barang Milik**		Jumlah Kendaraan dinas	325 unit	**64,690,804,714**	**64,532,770,552**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
09	**Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak				
			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%			
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	243 Unit	14,113,705,301	14,351,180,199	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	74 Unit	15,791,835,030	16,706,912,341	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	34,785,264,383	33,474,678,012	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	**46,479,414,562**	**48,900,075,333**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	62 unit	**46,479,414,562**	**48,900,075,333**	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	270 Unit	46,479,414,562	48,900,075,333	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	**8,023,257,004**	**8,996,614,169**	
			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	911 m3			
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	**8,023,257,004**	**8,996,614,169**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis			
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	6,255,026,693	6,891,764,028	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	1,768,230,311	2,104,850,141	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	**747,471,358,221**	**538,255,266,414**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	**747,471,358,221**	**538,255,266,414**	
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1170 lokasi			
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi			
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	193,704,135,106	103,539,079,515	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	12 Sistem Drainase Perkotaan	9,468,941,531	9,848,888,367	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	12 Sistem Drainase Perkotaan	100,023,953,967	86,754,859,639	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	12 Sistem Drainase Perkotaan	365,431,439,489	231,907,155,121	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.	Penyusunan Rencana,	Dinas Sumber	Jumlah Dokumen Rencana,	50 Dokumen	7,586,663,619	7,794,208,091	Dinas Sumber

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01.0030	Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Daya Air dan Bina Marga	Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	15 Sistem Drainase Perkotaan	71,256,224,509	98,411,075,681	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**		Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9%	**2,825,318,234**	**3,025,828,673**	
			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%			
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	**2,825,318,234**	**3,025,828,673**	
			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen			
1.03.07.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit	1,909,714,634	1,682,155,958	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.07.2.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit	915,603,600	1,343,672,715	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		Persentase bangunan yang ber IMB	2,35 %	**210,018,184,360**	**271,836,402,941**	
			Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,73 %			
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	85%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	244 Bangunan	**210,018,184,360**	**271,836,402,941**	
			Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1747 Berkas			
			Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen			
			Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1882 Lokasi			
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	138 Bangunan Gedung	157,135,222,324	217,063,795,335	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	158 Bangunan Gedung	42,805,754,262	36,486,891,431	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	519,412,500	708,564,127	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	61 Dokumen	5,376,667,400	8,365,190,316	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1861 Orang	1,416,314,585	3,343,448,376	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	2,764,813,289	5,868,513,356	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		Luas jalan yang diperbaiki	170.000 m2	**572,914,358,599**	**584,237,794,263**	
			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.400 meter			
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen	**572,914,358,599**	**584,237,794,263**	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan	325 lokasi			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dan kelengkapannya yang dibangun				
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1.201 lokasi			
			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi			
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen	6,978,681,024	7,177,692,137	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	11.4 KM	13,226,088,637	13,836,605,468	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dibangun	11.4 KM	259,686,400,038	264,926,510,640	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	2 KM	212,600,252,369	208,031,617,544	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM	5,549,312,092	5,688,044,894	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	45 KM	74,873,624,439	84,577,323,580	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	95%	**618,022,074**	**935,057,892**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	**618,022,074**	**935,057,892**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	110 Lembaga	618,022,074	935,057,892	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		Persentase pelayanan penataan ruang	95%	**10,121,737,981**	**13,609,737,406**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota**		Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	**3,685,318,932**	**3,871,072,228**	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3,685,318,932	3,871,072,228	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	**6,436,419,049**	**9,738,665,178**	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	728,718,788	2,573,292,242	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.	Sistem informasi dan	Dinas	Jumlah sistem informasi dan	1 Dokumen	5,707,700,261	7,165,372,936	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
03.0006	komunikasi penataan ruang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	komunikasi penataan ruang				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**120,026,764,522**	**207,849,885,597**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88,5 %	**35,129,668,880**	**54,887,954,036**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**42,488,000**	**115,776,367**	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	42,488,000	115,776,367	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**25,294,817,594**	**42,179,266,167**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	25,294,817,594	42,179,266,167	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	**7,159,976,750**	**9,311,828,135**	
1.04.01.2.	Penyediaan Peralatan dan	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan	15 Paket	7,159,976,750	9,311,828,135	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
06.0002	Perlengkapan Kantor	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	**2,632,386,536**	**3,281,083,367**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	2,632,386,536	3,281,083,367	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%	**20,336,915,154**	**36,723,291,997**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**		Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5157 Unit Hunian	**20,336,915,154**	**36,723,291,997**	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 Dokumen	20,336,915,154	36,723,291,997	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	95%	**34,083,883,755**	**17,662,087,526**	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	**34,083,883,755**	**17,662,087,526**	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	400 Unit Rumah	34,083,883,755	17,662,087,526	Dinas Perumahan Rakyat dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kawasan Permukiman serta Pertanahan					Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%	**29,189,118,146**	**97,379,952,200**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi	**29,189,118,146**	**97,379,952,200**	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	9 Unit Rumah	29,189,118,146	97,379,952,200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	60%	**1,287,178,587**	**1,196,599,838**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen	**1,287,178,587**	**1,196,599,838**	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	1,287,178,587	1,196,599,838	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**185,649,985,431**	**241,981,077,726**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**		Tingkat kepuasan pegawai	97%	**75,085,716,236**	**94,751,188,626**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		terhadap pelayanan kesekretariatan				
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%			
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94%			
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**63,317,012,462**	**77,778,041,080**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	9,952,179,909	11,970,724,450	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	28,354,900,786	36,669,236,889	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	25,009,931,767	29,138,079,740	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	**5,522,829,180**	**8,008,739,321**	
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%			
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1,907,707,942	1,558,555,915	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	822,800,528	689,326,697	Dinas Pemadam Kebakaran dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penyelamatan					Penyelamatan
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,792,320,710	5,760,856,709	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket	**6,245,874,594**	**8,964,408,225**	
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%			
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,690,615,250	1,845,777,024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,274,916,281	3,849,112,245	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,280,343,063	3,269,518,956	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	**38,879,014,677**	**35,208,549,371**	
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%			
			Persentase PPNS yang dibina	100%			
			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%			
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Perda dan Perkada				
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	**31,927,491,211**	**32,948,135,278**	
			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	104 Titik/Lokasi			
			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali			
			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1280 Orang			
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	978 Orang	764,811,430	929,750,032	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	891,468,303	502,601,975	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2 Dokumen	172,020,000	57,582,324	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui	12 laporan	28,302,509,678	29,273,804,752	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	1,593,595,300	2,063,473,768	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	203,086,500	120,922,427	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	**6,757,857,866**	**2,150,358,956**	
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek			
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (sub alternatif)	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	3,103,960,258	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	2,807,071,208	1,754,939,559	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.	Pengawasan Atas Kepatuhan	Satuan Polisi	Jumlah Laporan Hasil	12 Laporan	846,826,400	395,419,397	Satuan Polisi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0012	Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pamong Praja	Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Pamong Praja
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	75 Orang	**193,665,600**	**110,055,137**	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	193,665,600	110,055,137	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	**22,835,796,125**	**48,619,867,646**	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%			
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**		Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	**2,142,127,284**	**19,450,790,856**	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	31 Kawasan	312,981,000	16,073,017,683	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	401,156,706	217,542,721	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	1.650 Kawasan	1,427,989,578	3,160,230,452	Badan Penanggulangan Bencana

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Daerah	Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				Daerah
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	**20,693,668,841**	**29,169,076,790**	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	11.000 Orang	18,368,885,711	26,953,545,668	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang	2,324,783,130	2,215,531,122	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47	**48,849,458,393**	**63,401,472,083**	
			Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%			
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas	**47,894,911,101**	**62,332,016,910**	
			Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%			
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	Dinas Pemadam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan	28,785,521,604	40,485,392,269	Dinas Pemadam

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kabupaten/Kota	Kebakaran dan Penyelamatan	Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	8,005,882,869	8,291,081,278	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	744,256,012	961,072,226	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	845 Unit	10,359,250,616	12,594,471,137	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	480 Berkas	**563,940,376**	**495,444,220**	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	563,940,376	495,444,220	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui	90 Kegiatan	**390,606,916**	**574,010,953**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			sosialisasi dan simulasi				
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang	390,606,916	574,010,953	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**135,527,710,264**	**108,626,934,221**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	**18,248,661,427**	**23,452,121,571**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15,245,396,073**	**18,758,272,738**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	15,245,396,073	18,758,272,738	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	**1,764,245,082**	**2,297,714,470**	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,764,245,082	2,297,714,470	Dinas Sosial
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	**1,239,020,272**	**2,396,134,363**	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,239,020,272	2,396,134,363	Dinas Sosial
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88.24%	**5,235,405,395**	**8,096,247,876**	
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi	86.96%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial				
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	6 jenis	**5,235,405,395**	**8,096,247,876**	
			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	363 orang			
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	583 Orang	4,289,440,874	6,598,029,492	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lembaga	945,964,521	1,498,218,384	Dinas Sosial
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	**86,931,373,545**	**64,814,309,975**	
			Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			
			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar**		Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	**70,733,296,633**	**43,432,529,814**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Panti Sosial						
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali			
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali			
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali			
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan (sub alternatif)	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	23364 Orang	56,556,190,002	0	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	630,148,300	466,164,505	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	215 Orang	9,378,403,584	35,700,582,820	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	3,202,337,263	5,688,987,387	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	966,217,484	1,576,795,102	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	**16,198,076,912**	**21,381,780,161**	
			Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	2,535,442,814	4,477,196,858	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	13,662,634,098	16,904,583,303	Dinas Sosial
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	**23,803,859,785**	**10,367,320,090**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	**23,803,859,785**	**10,367,320,090**	
			Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan			
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	712975 Orang	4,017,010,580	4,458,923,437	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	264931 Keluarga	643,918,171	136,135,723	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83899 Keluarga	14,809,933,730	5,658,305,551	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2229 Orang	4,332,997,304	113,955,379	Dinas Sosial
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%	**1,308,410,112**	**1,896,934,709**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional**		Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam	3 Jenis	**1,308,410,112**	**1,896,934,709**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kabupaten/Kota		Pahlawan				
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	1,308,410,112	1,896,934,709	Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,660,343,810,764**	**1,964,564,974,029**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**28,141,437,650**	**30,726,064,869**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**13,366,223,800**	**14,223,928,263**	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**11,765,626,420**	**12,391,823,635**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	11,765,626,420	12,391,823,635	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	**1,600,597,380**	**1,832,104,628**	
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan			
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	314,555,474	307,105,999	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,286,041,906	1,524,998,629	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	81,02 %	**10,065,133,832**	**10,881,259,888**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,5 %			
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan	**6,607,478,610**	**6,622,859,143**	
			Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan			
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	6,057,782,043	6,200,224,268	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	549,696,567	422,634,875	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	**316,442,470**	**291,880,070**	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	316,442,470	291,880,070	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	**3,141,212,752**	**3,966,520,675**	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	3,141,212,752	3,966,520,675	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	3%	**2,801,315,986**	**3,507,376,274**	
2.07.04.2.	**Pelayanan antar Kerja di Daerah**		Jumlah laporan	9 laporan	**1,974,331,551**	**2,154,384,505**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01	**Kabupaten/Kota**		penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis				
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1950 Orang	256,752,856	23,239,442	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1100 Orang	671,665,562	1,070,051,441	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	1,045,913,133	1,061,093,622	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	5 Laporan	**363,702,448**	**330,052,260**	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	363,702,448	330,052,260	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	5 Laporan	**463,281,987**	**1,022,939,509**	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	250 Orang	463,281,987	1,022,939,509	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	13,77 %	**1,908,764,032**	**2,113,500,444**	
			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	40%			
2.07.05.2.	**Pengesahan Peraturan**		Jumlah Laporan Pengesahan	12 Laporan	**1,102,537,251**	**1,293,867,798**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01	**Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan	52,298,400	60,463,198	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	1,050,238,851	1,233,404,600	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	**806,226,781**	**819,632,646**	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	371,854,478	501,271,463	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	434,372,303	318,361,183	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**22,171,543,281**	**26,526,002,620**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**13,998,307,030**	**17,123,805,319**	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**11,184,675,931**	**12,652,515,524**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	11,184,675,931	12,652,515,524	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**2,272,803,053**	**3,902,865,450**	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,272,803,053	3,902,865,450	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat	100%	**540,828,046**	**568,424,345**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Daerah				
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	540,828,046	568,424,345	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	**1,584,150,489**	**2,238,330,002**	
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%			
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	**586,142,736**	**753,478,983**	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah	586,142,736	753,478,983	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	**416,538,453**	**449,463,917**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	416,538,453	449,463,917	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	**581,469,300**	**1,035,387,102**	
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	581,469,300	1,035,387,102	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**597,542,389**	**684,623,414**	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	64.51%			
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan		**0**	**59,174,811**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	59,174,811	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	**188,400,000**	**203,392,252**	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	188,400,000	101,561,688	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	101,830,564	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Keluarga Berencana					dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	20 kecamatan	**409,142,389**	**422,056,351**	
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	409,142,389	422,056,351	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	246	**1,239,560,164**	**589,528,007**	
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	**1,239,560,164**	**589,528,007**	
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	1,239,560,164	589,528,007	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	**270,982,327**	**449,683,488**	
2.08.05.2.	**Pengumpulan, Pengolahan**		Jumlah perangkat daerah	58 Lembaga	**270,982,327**	**449,683,488**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01	**Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		yang mempunyai data gender dan anak				
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	270,982,327	449,683,488	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		Persentase Kelurahan Layak Anak	79.87%	**3,330,540,663**	**3,743,914,966**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	**817,567,210**	**871,931,044**	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	817,567,210	871,931,044	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	**2,512,973,453**	**2,871,983,922**	
2.08.06.2.	Penyediaan Layanan	Dinas	Jumlah Anak yang	10 Orang	1,430,671,463	1,500,976,643	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0001	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,082,301,990	1,371,007,279	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**1,150,460,219**	**1,696,117,424**	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	64.51%			
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**0**	**116,288,678**	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0	116,288,678	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	20 lembaga	**1,150,460,219**	**1,487,308,521**	
			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus			
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	150 Orang	1,060,943,969	1,297,251,050	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Orang	89,516,250	190,057,471	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat**		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan		**0**	**92,520,225**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah Kabupaten/Kota		Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0	92,520,225	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**25,796,322,025**	**29,144,389,135**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	**23,238,048,585**	**26,114,459,834**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,732,989,752**	**21,632,303,502**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	18,732,989,752	21,632,303,502	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**4,505,058,833**	**4,482,156,332**	
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,615,673,368	949,831,008	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,889,385,465	3,532,325,324	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN**		Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,22	**1,626,190,614**	**2,093,585,420**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PANGAN MASYARAKAT						
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis	**641,917,788**	**891,922,780**	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan	641,917,788	891,922,780	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis	**984,272,826**	**1,201,662,640**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	984,272,826	1,201,662,640	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,89 %	**932,082,826**	**936,343,881**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	**932,082,826**	**936,343,881**	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	932,082,826	936,343,881	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**83,397,427,101**	**155,410,326,474**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk	43.886,90 M2	**83,397,427,101**	**155,410,326,474**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kepentingan umum				
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi	**83,397,427,101**	**155,410,326,474**	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83,397,427,101	155,410,326,474	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**524,618,255,967**	**666,694,532,925**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86%	**56,820,008,952**	**95,997,952,841**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**43,253,696,964**	**79,743,175,864**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 Orang/bulan	43,253,696,964	79,743,175,864	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**13,147,271,167**	**15,042,830,925**	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13,147,271,167	15,042,830,925	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	**419,040,821**	**1,211,946,052**	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	419,040,821	1,211,946,052	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	46%	**3,610,493,750**	**6,607,691,318**	
			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	86%			
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	**2,474,064,628**	**2,832,192,465**	
			jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan			
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	755,498,273	946,450,116	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1,718,566,355	1,885,742,349	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	**1,136,429,122**	**3,775,498,853**	
			Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	100%			
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1,136,429,122	1,403,828,232	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.	Penghentian Pencemaran	Dinas	Jumlah Sumber Pencemar		0	2,371,670,621	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.03	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				Lingkungan Hidup
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99,49 %	**83,994,083,527**	**109,108,439,323**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen	**83,994,083,527**	**109,108,439,323**	
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2,83 Ha			
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	310,101,390	334,522,025	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275,86 Ha	62,142,542,478	84,206,386,636	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	8,240,938,682	9,353,468,715	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	143,26 Unit	13,300,500,977	15,214,061,947	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	**3,813,686,552**	**4,989,295,313**	
			Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	90%			
2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**		Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	**429,872,423**	**738,667,409**	
2.11.05.2.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen	Dinas	Jumlah Fasilitasi	255 Dokumen	429,872,423	738,667,409	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01.0001	Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Lingkungan Hidup	Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	**3,383,814,129**	**4,250,627,904**	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	3,383,814,129	4,250,627,904	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	70%	**2,525,224,787**	**3,841,562,410**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek	**2,525,224,787**	**3,841,562,410**	
			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	300 Dokumen	1,476,032,269	2,313,001,817	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha	1,049,192,518	1,528,560,593	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	61,04 %	**3,062,775,376**	**7,957,424,148**	
			Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	59,77 %			
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis	**3,062,775,376**	**7,957,424,148**	
			Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali			
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1,847,642,557	7,092,628,145	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1615 Orang	1,215,132,819	864,796,003	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	71,20 %	**4,602,407,552**	**666,080,075**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	**4,602,407,552**	**666,080,075**	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	4,602,407,552	666,080,075	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	48 obyek	**502,028,092**	**708,602,839**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	**502,028,092**	**708,602,839**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	48 Pengaduan	502,028,092	708,602,839	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5,12 %	**365,687,547,379**	**436,817,484,658**	
			Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88,01 %			
			Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	51%			
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**		Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang	3 jenis	**365,687,547,379**	**436,817,484,658**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dilakukan				
			Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis			
			Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis			
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	226 Unit	19,869,703,282	39,402,332,117	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	515238 Ton	126,389,723,359	177,285,022,289	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	650430 Ton	219,428,120,738	220,130,130,252	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**58,709,881,707**	**34,287,240,714**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	86.68%	**50,206,353,966**	**26,183,980,571**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**13,000,000**	**15,995,090**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	13,000,000	15,995,090	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.	**Administrasi Keuangan**		Persentase ketepatan waktu	100%	**41,555,425,126**	**15,320,036,889**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02	**Perangkat Daerah**		pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191 Orang/bulan	41,555,425,126	15,320,036,889	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	**7,739,625,012**	**10,018,234,091**	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7,739,625,012	10,018,234,091	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**898,303,828**	**829,714,501**	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	898,303,828	829,714,501	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%	**3,353,469,492**	**3,314,238,311**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	**2,439,930,741**	**2,528,310,073**	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	2,439,930,741	2,528,310,073	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang	156000 berkas	**913,538,751**	**785,928,238**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			diterbitkan				
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	913,538,751	785,928,238	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	**2,005,194,095**	**1,875,156,329**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	**1,489,691,388**	**1,450,661,440**	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	1,489,691,388	1,450,661,440	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	**515,502,707**	**424,494,889**	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	515,502,707	424,494,889	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	71%	**3,022,599,154**	**2,828,968,479**	
			Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	60%			
			Persentase kesesuaian data penduduk antara Data	97%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan				
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	8000 data	**473,690,923**	**411,351,573**	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	473,690,923	411,351,573	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	**816,211,236**	**622,711,005**	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	375,638,296	276,975,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen	440,572,940	345,735,805	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	**1,732,696,995**	**1,794,905,901**	
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	1,732,696,995	1,794,905,901	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	**122,265,000**	**84,897,024**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**		Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen	4 Informasi	**122,265,000**	**84,897,024**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Profil Perkembangan Kependudukan				
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	122,265,000	84,897,024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**953,142,847**	**0**	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%	**953,142,847**	**0**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Kegiatan	**953,142,847**	**0**	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (sub alternatif)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	953,142,847	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**29,741,854,719**	**14,510,044,829**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	63.06%	**756,779,853**	**380,744,476**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	160 Orang	**309,937,084**	**225,665,357**	
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	80 Satuan Pendidikan	309,937,084	225,665,357	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	**446,842,769**	**155,079,119**	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (sub alternatif)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	64,200,000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (sub alternatif)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	232,800,000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	149,842,769	141,202,718	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		0	13,876,401	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.10%	**11,751,221,240**	**9,711,611,664**	
			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	84%			
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai**		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	**753,000,000**	**350,049,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kearifan Budaya Lokal						
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80,000,000	175,024,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	403,000,000	175,024,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (sub alternatif)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150,000,000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (sub alternatif)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	31 Organisasi	120,000,000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stakeholders dan Mitra Kerja				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	**1,330,063,000**	**2,570,135,540**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	308,000,000	1,743,310,415	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (sub alternatif)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	31 Organisasi	48,000,000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	1 Laporan	974,063,000	826,825,125	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Keluarga Berencana	Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417003 Orang	**9,178,658,240**	**4,312,056,664**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1,864,930,240	2,243,739,187	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	6,426,473,000	1,662,316,596	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	832,955,000	406,000,881	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Keluarga Berencana					dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (sub alternatif)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	54,300,000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	**489,500,000**	**2,479,370,460**	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (sub alternatif)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	9,000,000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31 Kampung	480,500,000	2,479,370,460	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Berencana					Berencana
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun	**17,233,853,626**	**4,417,688,689**	
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.56%			
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	47.50%			
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	42%			
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	**17,233,853,626**	**4,417,688,689**	
			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan			
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan			
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan			
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	936,140,461	1,389,316,073	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.	Pengadaan Sarana Kelompok	Dinas	Jumlah Unit Sarana Kelompok	38 Unit	360,000,000	403,664,729	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01.0018	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	852 Orang	915,355,280	574,141,339	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	6642 Orang	13,948,200,000	966,749,016	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan	54 Kelompok	1,074,157,885	1,083,817,532	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Keluarga Berencana	Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				dan Keluarga Berencana
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**531,865,876,668**	**558,626,555,610**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	**73,612,498,884**	**91,348,187,382**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**57,387,724,780**	**71,258,850,067**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 Orang/bulan	57,387,724,780	71,258,850,067	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	**6,729,789,704**	**5,832,306,297**	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	6,729,789,704	5,832,306,297	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	**9,494,984,400**	**14,257,031,018**	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	9,494,984,400	14,257,031,018	Dinas Perhubungan
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/jam	**451,140,015,962**	**458,231,271,973**	
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70 %			
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%			
			Persentase kepuasan	80%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya				
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	**298,916,615,822**	**312,757,928,203**	
			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi			
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	100,061,206,410	110,931,514,684	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	11,811,174,722	28,759,501,310	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	99252 Unit	159,773,364,316	138,989,068,587	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9.000 Unit	27,270,870,374	34,077,843,622	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	**20,484,848,712**	**27,689,266,644**	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit	20,484,848,712	27,689,266,644	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	**27,193,784,681**	**19,482,835,608**	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	27,193,784,681	19,482,835,608	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.	**Pengujian Berkala Kendaraan**		Jumlah Kendaraan Bermotor	134.525 Unit	**8,791,245,852**	**9,393,355,671**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
05	**Bermotor**		yang Lulus Uji KIR				
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	8,791,245,852	9,393,355,671	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis	**17,701,339,208**	**19,930,390,771**	
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi			
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	14,215,268,374	15,986,931,034	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	13 Laporan	3,486,070,834	3,943,459,737	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	**74,647,817,752**	**64,114,956,319**	
			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang			
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	34,373,087,497	32,536,066,786	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	72 Unit	40,274,730,255	31,578,889,533	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				
2.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	**3,404,363,935**	**4,862,538,757**	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	3,404,363,935	4,862,538,757	Dinas Perhubungan
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	**2,699,837,211**	**3,416,491,259**	
2.15.03.2.04	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	**2,699,837,211**	**3,416,491,259**	
2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2,699,837,211	3,416,491,259	Dinas Perhubungan
2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	**4,413,524,611**	**5,630,604,996**	
2.15.05.2.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**		Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali	**4,413,524,611**	**5,630,604,996**	
2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	4,413,524,611	5,630,604,996	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**92,086,834,425**	**106,740,337,129**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,56 %	**15,548,022,889**	**17,978,012,542**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**13,043,863,086**	**14,956,293,420**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	13,043,863,086	14,956,293,420	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1,646,622,943**	**1,890,828,128**	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,646,622,943	1,890,828,128	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**857,536,860**	**1,130,890,994**	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	857,536,860	1,130,890,994	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	87%	**15,531,989,896**	**15,971,002,647**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	**15,531,989,896**	**15,971,002,647**	
			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12,480,779,314	12,261,701,645	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	1,169,295,592	816,076,555	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	1,881,914,990	2,893,224,447	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	**61,006,821,640**	**72,791,321,940**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%	**53,299,638,314**	**30,735,177,424**	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	322 Unit	53,299,638,314	30,735,177,424	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%	**7,707,183,326**	**42,056,144,516**	
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%			
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan	58 Dokumen	416,892,245	523,770,903	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kabupaten/Kota		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	3,370,205,064	5,465,223,740	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	190 Unit	1,440,375,979	6,201,251,286	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen	2,479,710,038	29,865,898,587	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**34,171,318,898**	**47,266,427,143**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**28,009,540,192**	**39,773,478,002**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,868,704,713**	**33,301,414,180**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	23,868,704,713	33,301,414,180	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**4,140,835,479**	**6,472,063,822**	
			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Perlengkapan Kantor				
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,005,231,393	984,886,154	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,135,604,086	5,487,177,668	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**		Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	30%	**485,855,185**	**716,904,847**	
2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	**485,855,185**	**716,904,847**	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	485,855,185	716,904,847	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	69%	**797,118,233**	**1,010,587,616**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan**		Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	**797,118,233**	**1,010,587,616**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha	797,118,233	1,010,587,616	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	43%	**374,136,355**	**544,696,854**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang	**374,136,355**	**544,696,854**	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	374,136,355	544,696,854	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	60%	**427,099,351**	**532,786,951**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	**427,099,351**	**532,786,951**	
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	Dinas Koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,	83 Unit Usaha	427,099,351	532,786,951	Dinas Koperasi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	29,86 %	**2,903,018,315**	**3,215,460,337**	
			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%			
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang	**2,903,018,315**	**3,215,460,337**	
			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra			
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	280,842,612	357,665,256	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	2,622,175,703	2,857,795,081	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		dan Perdagangan					dan Perdagangan
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	76%	**1,174,551,267**	**1,472,512,536**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**		Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang	**1,174,551,267**	**1,472,512,536**	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha	1,174,551,267	1,472,512,536	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**19,324,010,114**	**23,516,023,378**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**13,076,477,583**	**15,437,187,863**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**9,526,850,124**	**13,215,149,327**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	9,526,850,124	13,215,149,327	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	**3,549,627,459**	**2,222,038,536**	
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%			
2.18.01.2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	179,401,070	180,186,668	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
08.0003	Perlengkapan Kantor	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,370,226,389	2,041,851,868	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		Jumlah Investor PMA/PMDN	190 Perusahaan	**609,002,361**	**635,019,971**	
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	74%	**609,002,361**	**635,019,971**	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	609,002,361	635,019,971	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	55%	**765,417,014**	**694,510,379**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	250 Calon Investor / Investor	**765,417,014**	**694,510,379**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	765,417,014	694,510,379	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	100%	**3,597,469,538**	**5,363,410,534**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			lingkup penanaman modal				
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	90.000 berkas	**3,597,469,538**	**5,363,410,534**	
			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	11.500 Kegiatan usaha			
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12.000 Pelaku Usaha	2,688,860,314	4,323,479,781	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	11.500 Kegiatan Usaha	908,609,224	1,039,930,753	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	44%	**1,061,317,443**	**1,005,605,182**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.300 perusahaan	**1,061,317,443**	**1,005,605,182**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	270 Pelaku Usaha	317,982,878	271,867,020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2900 Kegiatan Usaha	743,334,565	733,738,162	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	**214,326,175**	**380,289,449**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	400 perusahaan	**214,326,175**	**380,289,449**	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	214,326,175	380,289,449	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**121,299,754,216**	**145,216,009,106**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	24%	**43,440,059,161**	**48,600,265,755**	
			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	24%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47,23 %			
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis	**43,440,059,161**	**48,600,265,755**	
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	23 jenis			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan			
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	824,636,360	1,690,950,092	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	825 Orang	413,112,722	1,655,537,179	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	3.186 Orang	40,631,324,050	42,741,906,088	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Berprestasi	dan Olah Raga serta Pariwisata					dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	925 Orang	1,570,986,029	2,391,594,478	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan		0	120,277,918	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	185 medali	**77,859,695,055**	**96,615,743,351**	
			Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	18%			
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	5 kecamatan	**13,741,689,968**	**41,540,635,959**	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	21 Unit	13,741,689,968	41,540,635,959	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga	**35,118,398,694**	**20,328,411,426**	
2.19.03.2.	Pembinaan dan Pengembangan	Dinas	Jumlah Atlet Berprestasi	661 Orang	35,118,398,694	20,328,411,426	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
03.0003	Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen	**28,999,606,393**	**34,746,695,966**	
			Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	314 lokasi			
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7 Dokumen	3,781,787,200	7,221,286,323	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	456 Unit	25,217,819,193	27,525,409,643	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**511,833,819**	**663,636,328**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	**511,833,819**	**663,636,328**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	**511,833,819**	**663,636,328**	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	511,833,819	663,636,328	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**				**4,702,467,787**	**6,940,181,827**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PERSANDIAN						
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	27%	**4,702,467,787**	**6,940,181,827**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	**2,837,382,321**	**4,326,138,676**	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	2,837,382,321	4,326,138,676	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	**1,865,085,466**	**2,614,043,151**	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	1,865,085,466	2,614,043,151	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**46,785,443,943**	**64,273,233,075**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**26,909,518,316**	**49,793,422,818**	
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,075,974,003**	**31,340,938,665**	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	21,075,974,003	31,340,938,665	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	**5,833,544,313**	**18,452,484,153**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%			
2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	902,028,122	1,644,789,015	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,931,516,191	16,807,695,138	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	80%	**9,264,218,570**	**6,090,750,006**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	460 kali	**9,264,218,570**	**6,090,750,006**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	9,264,218,570	6,090,750,006	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	60,00 %	**1,665,507,514**	**2,333,586,252**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen	**1,665,507,514**	**2,333,586,252**	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	895 Orang	1,665,507,514	2,333,586,252	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pariwisata					Pariwisata
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		Persentase siswa yang memahami materi sejarah	76%	**1,115,389,302**	**1,258,700,436**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	**1,115,389,302**	**1,258,700,436**	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	1,115,389,302	1,258,700,436	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04 %	**1,170,285,436**	**1,446,800,044**	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	275 lokasi	**1,170,285,436**	**1,446,800,044**	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	275 Objek	1,170,285,436	1,446,800,044	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	**6,660,524,805**	**3,349,973,519**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**		Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	9 lokasi	**6,660,524,805**	**3,349,973,519**	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit	450,849,060	220,268,067	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.	Peningkatan Pelayanan dan	Dinas	Jumlah Pelayanan dan Akses	8 Unit	807,608,640	417,145,787	Dinas

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01.0003	Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Masyarakat Terhadap Museum				Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	241,542,300	131,681,494	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	5,160,524,805	2,580,878,171	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**32,666,693,255**	**50,907,515,075**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,04 %	**16,388,877,960**	**18,757,232,353**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14,043,674,739**	**15,517,850,710**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	14,043,674,739	15,517,850,710	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**246,085,822**	**223,533,644**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	246,085,822	223,533,644	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.	**Pengadaan Barang Milik Daerah**		Persentase Pengadaan	100%	**414,247,856**	**757,105,996**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
07	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	414,247,856	757,105,996	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**1,684,869,543**	**2,258,742,003**	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	295,352,450	210,132,114	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,389,517,093	2,048,609,889	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		Persentase event literasi yang diselenggarakan	58,8 %	**16,277,815,295**	**32,150,282,722**	
			Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	59,92 %			
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	78.14%			
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	**15,618,795,444**	**31,458,163,736**	
			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	200 Lembaga			
			Tingkat Kepuasan Pemustaka	82,5 nilai			
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional	1500 Perpustakaan	13,718,875,171	29,274,069,543	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	64,575,000	74,270,012	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan	355,178,600	230,735,476	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	266,171,069	261,225,258	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	1,213,995,604	1,617,863,447	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah bibit penulis dan pendongeng	5461 orang	**659,019,851**	**692,118,986**	
2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	250 Lokus	659,019,851	692,118,986	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**3,399,712,342**	**3,116,453,793**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	28,84 %	**3,294,921,010**	**2,943,978,210**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	76,21 %			
			Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	14,07 %			
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	**799,153,999**	**910,793,797**	
			Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	54 lembaga			
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas	554,260,316	759,550,360	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	244,893,683	151,243,437	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar	**1,810,758,955**	**1,659,542,837**	
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	1,810,758,955	1,659,542,837	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	7200 item	**685,008,056**	**373,641,576**	
			PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	70 Lembaga			
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1.200 Pengguna	457,139,464	230,650,174	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	70 Laporan	227,868,592	142,991,402	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	59,97 %	**104,791,332**	**172,475,583**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**		Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	**104,791,332**	**172,475,583**	
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip	104,791,332	172,475,583	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**60,373,180,808**	**116,493,125,155**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**5,717,861,672**	**51,908,791,335**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	40%	**1,984,922,441**	**3,908,737,941**	
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	**1,984,922,441**	**3,908,737,941**	
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	60 Unit	1,984,922,441	3,908,737,941	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi	30 orang/kelomp	**1,739,361,485**	**1,619,355,500**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			konsisten dengan hasil layak dipasarkan	ok			
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	36 kali	**442,447,200**	**364,981,670**	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	442,447,200	364,981,670	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	**1,296,914,285**	**1,254,373,830**	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58 Unit	1,296,914,285	1,254,373,830	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL kasus	**224,605,226**	**45,581,723,002**	
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**		Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	**224,605,226**	**45,581,723,002**	
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	224,605,226	45,581,723,002	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang	70%	**1,768,972,520**	**798,974,892**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			produktif				
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		Jumlah sentra ikan yang dikelola	2 sentra	**1,768,972,520**	**798,974,892**	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	180 Pelaku Usaha	1,768,972,520	798,974,892	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**13,577,793,328**	**15,198,845,215**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	50%	**6,506,215,601**	**6,152,245,465**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	**5,580,829,666**	**5,054,373,512**	
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	5,580,829,666	5,054,373,512	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 lokasi	**925,385,935**	**1,097,871,953**	
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	239,141,256	373,982,866	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	550,968,679	578,604,849	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan	135,276,000	145,284,238	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	43,5 %	**5,380,707,179**	**6,364,885,407**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis	**5,380,707,179**	**6,364,885,407**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	5,380,707,179	6,364,885,407	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	80%	**1,690,870,548**	**2,681,714,343**	
			Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	24%			
			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	60%			
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis	**548,893,656**	**788,493,615**	
			Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat	1 laporan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	60 Orang	276,760,044	381,224,791	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	250 Orang	272,133,612	407,268,824	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	4 Produk	**1,141,976,892**	**1,893,220,728**	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	220 Orang	1,141,976,892	1,893,220,728	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**25,864,736,930**	**31,710,939,322**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	35 Orang	**7,305,100,085**	**7,415,213,678**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	**3,934,305,246**	**6,578,547,211**	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (sub alternatif)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	130,000,000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana	4 Laporan	3,804,305,246	6,578,547,211	Dinas Ketahanan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pangan dan Pertanian	Pendukung Pertanian				Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	**3,370,794,839**	**836,666,467**	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	3,370,794,839	836,666,467	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	24 Lokasi	**13,453,618,833**	**20,469,353,287**	
			Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha			
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	**6,627,869,202**	**1,267,668,253**	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	6,627,869,202	1,267,668,253	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	2 Laporan	**6,825,749,631**	**19,201,685,034**	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	6,825,749,631	19,201,685,034	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT**		Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	6 kelompok	**2,353,956,306**	**1,095,372,582**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	VETERINER						
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,5 %			
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	**1,160,881,582**	**809,882,931**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	1,160,881,582	809,882,931	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	35 Unit	**1,193,074,724**	**285,489,651**	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	35 Unit Usaha	1,193,074,724	285,489,651	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	**55,288,410**	**110,503,961**	
3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%	**55,288,410**	**110,503,961**	
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	55,288,410	110,503,961	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	**2,696,773,296**	**2,620,495,814**	
			Tingkat Produktivitas	5,9 ton/ha			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pertanian				
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali	**2,696,773,296**	**2,620,495,814**	
			Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang			
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1,312,597,358	958,630,999	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	1,384,175,938	1,661,864,815	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**13,488,506,884**	**16,578,396,975**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		Persentase ketepatan waktu pelayanan	94%	**1,120,777,506**	**1,795,215,383**	
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**		Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	**309,347,982**	**477,982,602**	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	309,347,982	477,982,602	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**		Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan	**310,809,095**	**559,848,430**	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Koperasi	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen	310,809,095	559,848,430	Dinas Koperasi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan					Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan	**100,203,594**	**122,440,655**	
3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	100,203,594	122,440,655	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.04	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri**		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan	**46,500,000**	**122,440,655**	
3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	46,500,000	122,440,655	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan	**353,916,835**	**512,503,041**	
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman	Dinas Koperasi	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer	40 Dokumen	353,916,835	512,503,041	Dinas Koperasi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Beralkohol Golongan B dan C	Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	**4,168,427,947**	**4,828,297,851**	
3.30.03.2.02	**Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**		Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	**4,168,427,947**	**4,828,297,851**	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	4,168,427,947	4,828,297,851	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	**1,002,278,920**	**1,252,080,946**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	**1,002,278,920**	**1,252,080,946**	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan			
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	640,705,781	844,130,473	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	361,573,139	407,950,473	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	**828,559,680**	**2,118,213,968**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	**828,559,680**	**2,118,213,968**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	23.340 Unit	713,402,086	1,977,374,059	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang	115,157,594	140,839,909	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	**6,368,462,831**	**6,584,588,827**	
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	**6,368,462,831**	**6,584,588,827**	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan	5220 UMKM	6,368,462,831	6,584,588,827	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Menengah dan Perdagangan	dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				Menengah dan Perdagangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**1,724,281,994**	**1,096,152,308**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	20%	**879,150,545**	**573,305,627**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	**879,150,545**	**573,305,627**	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (sub alternatif)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	117,840,932	0	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	761,309,613	573,305,627	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	85%	**476,240,184**	**318,187,984**	
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	**476,240,184**	**318,187,984**	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang	12 Dokumen	476,240,184	318,187,984	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	**368,891,265**	**204,658,697**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	1 Laporan	**368,891,265**	**204,658,697**	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	368,891,265	204,658,697	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**548,877,415,655**	**578,097,885,053**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**329,814,786,142**	**325,279,572,527**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	**194,852,533,399**	**255,398,891,794**	
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%			
			Persentase paket pengadaan	94%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja				
			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	85%			
			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	69,44 %			
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%			
			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%			
			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%			
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**65,540,248,165**	**89,393,831,054**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	163 Orang/bulan	65,540,248,165	89,393,831,054	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	12 laporan	**1,767,285,000**	**3,973,768,831**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelengkapannya				
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1,767,285,000	3,973,768,831	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	**16,909,752,218**	**32,894,084,724**	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1500 Unit	16,909,752,218	32,894,084,724	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%	**80,225,508,531**	**61,754,173,591**	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%			
			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%			
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,712,905,023	4,828,852,189	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,130,115,468	5,700,268,635	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74,382,488,040	51,225,052,767	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%	**9,665,470,422**	**9,302,988,321**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	200,688,613	1,230,107,941	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	9,464,781,809	8,072,880,380	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	**2,961,956,800**	**3,545,860,943**	
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi			
			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit			
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1,100,418,878	868,709,148	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	990,742,995	1,206,668,029	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	870,794,927	1,470,483,766	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	**17,782,312,263**	**54,534,184,330**	
			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%			
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	16,997,132,505	52,627,492,052	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	785,179,758	1,906,692,278	Sekretariat Daerah
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	**115,379,558,590**	**37,074,997,146**	
			Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari			
			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	95%			
			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	85%			
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%			
			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	58,37 %			
			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	98,5 %			
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	83,87 %			
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%			
			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%			
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%			
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	108 Lembaga	**7,830,397,051**	**13,019,333,214**	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen			
			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	26 Kecamatan			
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	2,298,122,819	4,332,174,656	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	2,306,743,973	3,768,405,189	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	3,225,530,259	4,918,753,369	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	**96,540,067,059**	**4,775,479,760**	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan			
			Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan			
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	30,492,176,214	3,008,943,238	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen	666,582,716	1,667,491,646	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	65,381,308,129	99,044,876	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	**8,562,657,258**	**16,366,818,045**	
			Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum			
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum			
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	4,689,174,601	6,791,665,244	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	2,197,507,144	7,695,703,825	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	1,675,975,513	1,879,448,976	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	31 Lembaga	**2,446,437,222**	**2,913,366,127**	
			Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga			
			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	768,604,434	991,963,320	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1,207,676,588	1,758,700,559	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	470,156,200	162,702,248	Sekretariat Daerah
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	**19,582,694,153**	**32,805,683,587**	
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85%			
			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	85%			
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	**3,446,702,503**	**4,387,132,321**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1,223,199,997	2,159,694,436	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	1,518,699,806	1,715,890,163	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	704,802,700	511,547,722	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	**11,694,223,853**	**15,434,863,395**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	4,746,317,529	7,257,553,286	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	6,947,906,324	8,177,310,109	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	94%	**4,340,367,797**	**12,892,629,745**	
			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%			
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	98 Dokumen	4,009,167,797	1,756,421,579	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	331,200,000	11,136,208,166	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	**101,400,000**	**91,058,126**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	101,400,000	91,058,126	Sekretariat Daerah
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**219,062,629,513**	**252,818,312,526**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**164,774,294,267**	**203,673,425,966**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**13,286,501,928**	**15,589,752,335**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	13,286,501,928	15,589,752,335	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**30,015,546,769**	**31,633,819,518**	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	30,015,546,769	31,633,819,518	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari	**4,758,661,576**	**5,333,566,626**	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	4,758,661,576	5,333,566,626	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	**70,614,840,698**	**93,231,743,354**	
4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	70,614,840,698	93,231,743,354	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	**45,146,688,296**	**54,522,056,860**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	45,146,688,296	54,522,056,860	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**		Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	**952,055,000**	**3,362,487,273**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan	952,055,000	3,362,487,273	Sekretariat DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	**54,288,335,246**	**49,144,886,560**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang	6 Dokumen	**3,294,368,763**	**4,983,862,640**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dibahas				
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	3,294,368,763	4,983,862,640	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	**18,199,711,510**	**23,401,479,747**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	1,200,000,000	1,876,347,250	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	16,999,711,510	21,525,132,497	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	**28,112,551,144**	**15,935,378,895**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	28,112,551,144	15,935,378,895	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**		Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	**4,681,703,829**	**4,824,165,278**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	4,681,703,829	4,824,165,278	Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**251,143,735,376**	**343,726,376,126**	
5.01	**PERENCANAAN**				**37,148,875,642**	**48,418,510,497**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,55 %	**27,221,725,657**	**34,233,092,114**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**279,615,776**	**201,484,356**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	279,615,776	201,484,356	Badan Perencanaan Pembanguna

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Daerah, Penelitian dan Pengembangan					n Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,730,424,086**	**30,424,950,345**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	23,730,424,086	30,424,950,345	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**3,211,685,795**	**3,606,657,413**	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	437,240,848	511,682,407	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,774,444,947	3,094,975,006	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	**3,345,831,529**	**3,758,658,436**	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%			
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen	**1,357,757,983**	**1,342,263,496**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1,357,757,983	1,342,263,496	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	**1,210,962,183**	**1,455,312,933**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	1,210,962,183	1,455,312,933	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	**777,111,363**	**961,082,007**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	777,111,363	961,082,007	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,43 %	**6,581,318,456**	**10,426,759,947**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	**2,296,624,900**	**2,688,591,860**	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	984,096,780	989,198,880	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1,312,528,120	1,699,392,980	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	**1,919,608,194**	**3,331,863,621**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	982,196,483	1,796,911,583	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	2 Laporan	937,411,711	1,534,952,038	Badan Perencanaan Pembanguna

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah Bidang SDA	Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Bidang SDA				n Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	**2,365,085,362**	**4,406,304,466**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1,217,395,539	2,337,135,068	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	1,147,689,823	2,069,169,398	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.02	**KEUANGAN**				**182,004,425,346**	**260,193,436,176**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	**89,267,682,445**	**154,053,168,198**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**68,042,033,062**	**135,209,874,852**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang/bulan	38,814,715,121	102,761,349,623	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	29,227,317,941	32,448,525,229	Badan Pengelolaan Keuangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Aset Daerah					dan Aset Daerah
5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	**277,294,041**	**287,841,875**	
5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	277,294,041	287,841,875	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	**517,309,950**	**1,364,422,636**	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	517,309,950	1,364,422,636	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**15,042,792,397**	**8,506,703,486**	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%			
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,566,987,097	238,708,962	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	435,179,900	51,843,269	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,797,454,662	5,520,391,540	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,243,170,738	2,695,759,715	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	**5,388,252,995**	**8,684,325,349**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.520 Unit	5,388,252,995	8,684,325,349	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	**44,484,381,566**	**22,691,990,748**	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%			
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen	**3,511,753,208**	**2,280,879,688**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	775,251,900	543,948,919	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	837,851,900	551,051,201	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	849,062,895	571,496,874	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1,049,586,513	614,382,694	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	94731 berkas	**2,383,317,386**	**3,025,664,032**	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen			
			Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang	244 Dokumen			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dikelola				
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	633,730,239	595,380,887	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	384,045,210	361,256,053	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	94731 Dokumen	1,365,541,937	2,069,027,092	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	**1,089,310,972**	**1,135,447,028**	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	1,089,310,972	1,135,447,028	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	**37,500,000,000**	**16,250,000,000**	
			Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%			
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Daerah
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	37,000,000,000	15,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		0	750,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,3 %	**28,255,408,924**	**46,929,752,818**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	**28,255,408,924**	**46,929,752,818**	
			Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%			
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	6,639,086,533	8,875,625,706	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1,948,586,130	25,384,739,283	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	7.679 Dokumen	17,604,330,111	9,625,524,896	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Daerah				
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	2,063,406,150	3,043,862,933	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	83%	**19,996,952,411**	**36,518,524,412**	
			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	69%			
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%			
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	**19,996,952,411**	**36,518,524,412**	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan			
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19.814 Objek Pajak			
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	6,165,028,801	16,751,917,593	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19.814 Obyek Pajak	5,765,304,077	13,061,689,447	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	3,677,182,561	4,665,605,797	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	4,035,571,774	1,377,122,027	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	353,865,198	662,189,548	Badan Pendapatan Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**24,525,927,049**	**25,320,881,337**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**18,483,038,027**	**18,313,644,246**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,925,745,791**	**16,266,401,667**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	16,925,745,791	16,266,401,667	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1,028,773,267**	**1,367,639,084**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	1,028,773,267	1,367,639,084	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam	100%	**528,518,969**	**679,603,495**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kondisi baik				
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	528,518,969	679,603,495	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	**6,042,889,022**	**7,007,237,091**	
			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	93%			
			Persentase pegawai yang disiplin	96.74%			
			Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	32.43%			
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	92%	**2,231,160,514**	**2,731,161,199**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	288,892,142	311,987,508	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1,514,493,189	1,956,634,338	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembanga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	427,775,183	462,539,353	Badan Kepegawaian dan Pengembang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		n Sumber Daya Manusia					an Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**		Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas	**1,310,890,934**	**1,857,675,179**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	392,371,843	629,822,665	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	493,260,030	664,203,193	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	425,259,061	563,649,321	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	**2,500,837,574**	**2,418,400,713**	
			Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis			
			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis			
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5797 Dokumen	658,115,384	656,433,800	Badan Kepegawaian dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pengembangan Sumber Daya Manusia					Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1,056,707,460	877,802,083	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	786,014,730	884,164,830	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**5,633,798,783**	**9,136,282,780**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	95%	**5,633,798,783**	**9,136,282,780**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang	**2,878,416,733**	**1,846,676,067**	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang	2,878,416,733	1,846,676,067	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi**		Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi	168 orang	**2,755,382,050**	**7,289,606,713**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Manajerial dan Fungsional		Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2,755,382,050	7,289,606,713	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1,830,708,556**	**657,265,336**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	**1,830,708,556**	**657,265,336**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	**1,830,708,556**	**657,265,336**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	892,004,289	379,887,490	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	938,704,267	277,377,846	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**28,762,477,761**	**33,974,441,786**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**28,762,477,761**	**33,974,441,786**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**		Tingkat kepuasan pegawai	100%	**25,046,347,961**	**30,533,139,166**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		terhadap pelayanan kesekretariatan				
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,749,958,240**	**26,894,766,262**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	22,749,958,240	26,894,766,262	Inspektorat
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**599,572,701**	**820,389,279**	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	599,572,701	820,389,279	Inspektorat
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1,696,817,020**	**2,817,983,625**	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,696,817,020	2,817,983,625	Inspektorat
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	**1,900,943,200**	**2,459,989,000**	
			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%			
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%			
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	**1,214,629,100**	**1,887,669,143**	
			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	142 Rekomendasi			
			Jumlah lembaga yang	60 lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dilakukan pengawasan internal				
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	293,992,600	523,327,658	Inspektorat
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	293,998,400	38,669,419	Inspektorat
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	293,983,100	35,207,709	Inspektorat
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	142 Dokumen	332,655,000	1,290,464,357	Inspektorat
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	**686,314,100**	**572,319,857**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	343,642,600	34,869,702	Inspektorat
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	342,671,500	537,450,155	Inspektorat
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	**1,815,186,600**	**981,313,620**	
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%			
			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%			
6.01.03.2.	**Perumusan Kebijakan Teknis di**		Jumlah Kebijakan teknis di	4 dokumen	**623,608,200**	**462,987,469**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01	**Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan				
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	313,743,000	385,866,337	Inspektorat
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	309,865,200	77,121,132	Inspektorat
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**		Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	45 Kali	**1,191,578,400**	**518,326,151**	
			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan			
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 perangkat daerah	327,887,400	384,299,521	Inspektorat
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60 perangkat daerah	287,897,000	63,919,670	Inspektorat
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	267,097,000	35,134,014	Inspektorat
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	10 perangkat daerah	308,697,000	34,972,946	Inspektorat

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Integritas				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1,262,343,122,244**	**1,369,434,615,661**	
7.01	**KECAMATAN**				**1,262,343,122,244**	**1,369,434,615,661**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,42 %	**726,493,630,464**	**609,036,960,200**	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,98 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.06%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,70 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.78%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,88 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.96%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.97%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,06 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,11 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.24%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,30 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.30%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.34%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,40 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,50 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.50%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,67 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,80 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,88 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.91%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.03%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,10 %			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,15 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.39%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,41 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.72%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.81%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.90%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,94 %			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.77%			
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**567,557,245,952**	**532,810,172,169**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Asemrowo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	14,659,425,958	13,655,695,007	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	16,658,600,968	15,234,293,644	Kec. Benowo
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	18,202,093,970	15,568,014,433	Kec. Bubutan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	16,243,031,334	16,412,203,602	Kec. Bulak
7.01.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kec. Dukuh	Jumlah Orang yang Menerima	57	16,140,545,167	15,381,735,472	Kec. Dukuh

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0001	ASN	Pakis	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			Pakis
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gayungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	17,952,709,448	15,797,620,465	Kec. Gayungan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Genteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	18,410,820,896	16,065,297,456	Kec. Genteng
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gubeng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	20,696,863,306	18,954,349,528	Kec. Gubeng
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	15,035,155,685	14,784,955,022	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jambangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	18,262,010,370	14,668,542,833	Kec. Jambangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangpilang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	16,444,517,275	15,537,188,320	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenjeran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	15,490,454,380	16,372,584,822	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Krembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	16,230,937,677	17,356,693,900	Kec. Krembangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lakarsantri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	21,891,191,758	17,623,010,275	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	21,160,604,472	19,784,937,580	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	16,106,132,116	17,040,453,832	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	16,002,477,440	15,424,370,043	Kec. Pakal
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	20,421,734,803	19,482,348,831	Kec. Rungkut
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	15,485,765,192	14,736,434,535	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sawahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	20,215,833,763	19,722,123,382	Kec. Sawahan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	18,255,608,016	17,726,000,154	Kec. Semampir
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Simokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	17,725,376,350	15,552,166,977	Kec. Simokerto
7.01.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kec. Sukolilo	Jumlah Orang yang Menerima	79	23,162,710,241	21,244,665,085	Kec. Sukolilo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0001	ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	19,662,442,712	18,652,505,691	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	25,512,962,329	24,822,639,462	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tandes	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	21,490,675,827	19,801,774,600	Kec. Tandes
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tegalsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	18,031,596,130	16,537,173,435	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	15,515,431,467	15,355,400,441	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wiyung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	16,157,875,048	15,223,333,217	Kec. Wiyung
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	18,507,084,589	17,166,112,275	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonokromo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	21,824,577,265	21,125,547,848	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	**154,176,378,694**	**71,085,969,889**	
			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket			
			Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket			
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Asemrowo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,687,567,687	787,100,967	Kec. Asemrowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Benowo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3,611,448,782	687,865,750	Kec. Benowo
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bubutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	4,781,131,163	1,481,557,000	Kec. Bubutan
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4,661,304,437	3,398,015,429	Kec. Bulak
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,696,146,190	4,068,547,181	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gayungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	3,962,260,833	1,740,296,595	Kec. Gayungan
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Genteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,117,440,398	2,629,798,918	Kec. Genteng
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gubeng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5,007,445,983	915,390,575	Kec. Gubeng
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	4,355,860,220	5,919,530,808	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jambangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	3,820,892,413	964,344,832	Kec. Jambangan
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karangpilang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	4,728,993,967	2,131,211,724	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenjeran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5,659,133,473	1,057,529,077	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Krembangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	5,935,697,626	2,063,378,836	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lakarsantri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,512,396,433	2,097,689,992	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mulyorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	5,930,303,252	2,963,400,000	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,028,187,560	1,660,209,637	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pakal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket	4,636,277,521	1,154,948,785	Kec. Pakal
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rungkut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,892,088,315	1,774,362,273	Kec. Rungkut
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambikerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	4,558,267,465	7,245,622,695	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sawahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	6,515,657,340	2,346,294,352	Kec. Sawahan
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Semampir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4,867,707,617	3,034,840,209	Kec. Semampir
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Simokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	4,299,150,024	1,748,370,124	Kec. Simokerto
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukolilo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6,249,090,430	2,474,278,159	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5,550,873,418	1,811,103,819	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tambaksari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8,097,291,247	4,692,431,679	Kec. Tambaksari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tandes	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5,576,480,633	1,747,474,654	Kec. Tandes
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tegalsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	5,491,467,350	2,856,796,435	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	4,620,946,073	1,410,123,190	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wiyung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,410,099,049	1,670,921,364	Kec. Wiyung
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonocolo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	4,320,598,206	1,744,523,963	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonokromo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	5,594,173,589	808,010,867	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit	**4,760,005,818**	**5,140,818,142**	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit			
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%			
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			disediakan				
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	129,400,200	131,476,257	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	158,441,117	163,194,350	Kec. Benowo
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	58,394,040	156,241,309	Kec. Bubutan
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	190,656,617	245,056,480	Kec. Bulak
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	94,947,600	96,412,800	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	180,045,100	147,008,506	Kec. Gayungan
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	126,924,708	163,716,380	Kec. Genteng
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	108,862,799	108,862,800	Kec. Gubeng
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	52,806,700	105,600,000	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Jambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	131,682,249	116,561,776	Kec. Jambangan
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karangpilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	137,569,260	125,777,503	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	191,608,004	160,370,000	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Krembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	197,185,982	198,695,533	Kec. Krembangan
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	119,119,284	158,605,220	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	198,813,709	198,809,901	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	108,596,600	175,350,021	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	207,981,000	138,436,607	Kec. Pakal
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	101,566,386	138,009,381	Kec. Rungkut
7.01.01.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kec.	Jumlah Sarana dan Prasarana	50 Unit	123,489,082	95,505,600	Kec.

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
09.0010	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sambikerep	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Sambikerep
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	120,559,200	133,053,106	Kec. Sawahan
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	266,935,794	297,141,304	Kec. Semampir
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	138,868,769	139,473,014	Kec. Simokerto
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukolilo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	93,427,884	209,219,577	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	228,618,301	169,576,346	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	232,979,740	232,979,740	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	149,644,613	161,727,489	Kec. Tandes
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	240,308,320	301,148,338	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	30 Unit	145,556,568	146,890,802	Kec. Tenggilis Mejoyo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	109,970,392	110,275,113	Kec. Wiyung
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	208,524,900	221,835,824	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	206,520,900	193,807,065	Kec. Wonokromo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**2,821,273,890**	**144,242,008,306**	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%			
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%			
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%			
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	17%			
			Persentase usulan	23.25%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan				
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,71 %			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27 %			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,76 %			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.15%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.34%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45%			
			Persentase usulan	35.29%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan				
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,11 %			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51 %			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02 %			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55,81 %			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	58,44 %			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	67,53 %			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89.10%			
			Persentase usulan	37,16 %			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan				
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38%			
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24,73 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**141,606,839**	**256,084,517**	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan			
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga			
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga			
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga			
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga			
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt	2 laporan			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,450,000	3,768,090	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,192,424	5,308,092	Kec. Benowo
7.01.02.2.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan	1 Laporan	4,500,000	4,914,900	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01.0001	dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	4,807,800	6,553,200	Kec. Bulak
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,000,000	8,191,500	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,650,000	6,553,200	Kec. Gayungan
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,887,875	4,996,787	Kec. Genteng
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	1 Laporan	3,000,000	8,191,500	Kec. Gubeng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2,400,000	10,485,120	Kec. Gunung Anyar
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan	2,160,000	3,276,600	Kec. Jambangan
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,200,000	15,727,680	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,220,000	2,457,450	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	2 Laporan	2,700,000	8,650,224	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	2,250,000	10,550,652	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,600,000	6,553,200	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,430,000	3,931,920	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,700,000	9,829,800	Kec. Pakal
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,050,000	12,123,420	Kec. Rungkut

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,448,840	5,570,220	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,916,732	2,981,706	Kec. Sawahan
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15,096,240	15,434,658	Kec. Semampir
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,000,000	3,276,600	Kec. Simokerto
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	13,230,000	13,106,400	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kec. Sukomanungg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	8,077,104	8,257,032	Kec. Sukomanung

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	al	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				gal
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,000,000	15,039,594	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12,000,000	18,873,216	Kec. Tandes
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan	9,000,000	9,829,800	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,000,000	12,451,080	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	2,250,000	6,815,328	Kec. Wiyung

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,800,000	8,715,756	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,589,824	3,669,792	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	**1,293,389,649**	**137,865,836,418**	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan	188 lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			urusan pemerintahan				
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	219 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga			
			Jumlah lembaga	439 Lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan				
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	749 Lembaga			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7,506,000	1,877,575,889	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.	Peningkatan Efektifitas	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	10,422,000	2,434,885,526	Kec. Benowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0003	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22,356,000	4,434,175,940	Kec. Bubutan
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	71,067,805	2,106,601,556	Kec. Bulak
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	153,388,491	2,449,425,175	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10,638,000	2,597,528,064	Kec. Gayungan
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	443,960,337	4,846,355,335	Kec. Genteng
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25,920,000	6,195,456,184	Kec. Gubeng
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	11,826,000	2,408,568,154	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kecamatan		Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9,072,000	1,680,000,000	Kec. Jambangan
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11,880,000	2,856,695,089	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24,840,000	5,795,549,826	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	23,274,000	5,587,613,383	Kec. Krembangan
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11,070,000	2,740,338,211	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18,684,000	5,950,741,895	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20,034,000	4,912,250,459	Kec. Pabean Cantian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12,366,000	2,707,496,050	Kec. Pakal
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26,946,000	5,419,735,213	Kec. Rungkut
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	14,094,000	3,410,331,718	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	110,035,990	9,246,874,948	Kec. Sawahan
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	34,344,000	8,274,246,496	Kec. Semampir
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19,846,710	4,702,363,464	Kec. Simokerto
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	23,814,000	5,880,616,396	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kec. Sukomanungg	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	60 Laporan	17,442,000	4,149,753,360	Kec. Sukomanung

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	al	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				gal
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40,446,000	9,562,935,247	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20,034,000	4,840,225,988	Kec. Tandes
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19,710,000	4,983,514,790	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9,990,000	2,478,928,362	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11,394,000	2,871,168,696	Kec. Wiyung
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26,316,316	3,681,175,940	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	30,672,000	6,782,709,064	Kec. Wonokromo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kecamatan				
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan	**1,386,277,402**	**6,120,087,371**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang	625 Dokumen			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dilaksanakan				
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen			
			Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan			
			Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan			
			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Asemrowo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9,230,976	9,436,608	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Benowo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	7,692,480	7,863,840	Kec. Benowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bubutan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	14,400,000	15,727,680	Kec. Bubutan
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bulak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	1,174,800	1,801,800	Kec. Bulak
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	4,832,806	15,727,680	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gayungan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	5,630,364	1,310,640	Kec. Gayungan
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Genteng	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	11,538,720	11,795,760	Kec. Genteng
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gubeng	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	15,038,776	15,727,680	Kec. Gubeng
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	625 Dokumen	10,192,536	10,419,588	Kec. Gunung Anyar
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Jambangan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen	32,345,250	982,980	Kec. Jambangan
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Karangpilang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	11,618,228	12,582,144	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.	Pelaksanaan Urusan	Kec. Kenjeran	Jumlah Dokumen Non	100 Dokumen	15,183,246	15,727,680	Kec. Kenjeran

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
04.0001	Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Krembangan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	8,556,092	9,272,778	Kec. Krembangan
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Lakarsantri	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen	11,091,564	15,727,680	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	10,256,400	13,106,400	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	3,485,999	21,024,850	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pakal	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	1,680,540	13,270,230	Kec. Pakal
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rungkut	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	777,000	15,727,680	Kec. Rungkut
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sambikerep	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	9,102,768	9,305,544	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sawahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	9,615,600	9,829,800	Kec. Sawahan
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Kec. Semampir	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang	10 Dokumen	14,000,000	57,213,205	Kec. Semampir

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Dilaksanakan				
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Simokerto	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	3,196,800	3,651,851	Kec. Simokerto
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukolilo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	8,948,798	11,107,674	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	43,380,000	9,829,800	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tambaksari	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	6,000,000	11,795,760	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tandes	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	22,822,918	23,591,520	Kec. Tandes
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tegalsari	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	16,593,901	23,591,520	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3,016,980	18,185,130	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wiyung	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9,615,600	9,829,800	Kec. Wiyung
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kec. Wonocolo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	13,201,066	104,806,918	Kec. Wonocolo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Non Usaha						
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonokromo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	2,221,286	1,638,300	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,606,570	11,748,633	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,692,480	7,863,840	Kec. Benowo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12,000,000	13,769,712	Kec. Bubutan
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4,107,000	4,804,800	Kec. Bulak
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,300,032	13,769,712	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,001,800	8,852,148	Kec. Gayungan
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,538,720	7,863,840	Kec. Genteng
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12,000,000	13,769,712	Kec. Gubeng
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,427,289	10,419,588	Kec. Gunung Anyar
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan	18,057,375	72,000,000	Kec. Jambangan
7.01.02.2.	Pelaksanaan Urusan	Kec.	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	333,000	393,192	Kec.

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
04.0002	Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Karangpilang	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				Karangpilang
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	29,878,596	4,805,735,103	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,500,000	9,272,778	Kec. Krembangan
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan	13,053,389	13,769,712	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	49,338,445	13,106,400	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	26,672,667	21,024,850	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	76,250,961	8,060,436	Kec. Pakal
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,218,355	13,769,712	Kec. Rungkut
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,166,766	3,276,600	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	9,615,600	9,829,800	Kec. Sawahan
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	15,000,000	18,455,850	Kec. Semampir
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,284,426	3,651,851	Kec. Simokerto
7.01.02.2.	Pelaksanaan Urusan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	227,963,818	9,829,800	Kec. Sukolilo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
04.0002	Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,690,000	9,829,800	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4,830,677	11,795,760	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	78,916,223	23,591,520	Kec. Tandes
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan	18,195,525	19,659,600	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	17,788,860	18,185,130	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,615,600	9,829,800	Kec. Wiyung
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,923,120	1,965,960	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,829,500	3,931,920	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	12,307,968	12,582,144	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,692,480	7,863,840	Kec. Benowo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	12 Laporan	7,602,612	7,863,840	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Dilimpahkan				
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5,874,000	7,207,200	Kec. Bulak
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	15,335,538	15,727,680	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,200,000	7,863,840	Kec. Gayungan
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	27,760,356	1,072,615	Kec. Genteng
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,692,480	7,863,840	Kec. Gubeng
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9,540,000	10,419,588	Kec. Gunung Anyar
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	26,695,000	32,500,000	Kec. Jambangan
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,949,040	393,192	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,200,000	7,863,840	Kec. Kenjeran

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Dilimpahkan						
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	8,545,124	9,272,778	Kec. Krembangan
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,615,600	9,829,800	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	12,820,800	13,106,400	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4,789,672	21,024,850	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,756,584	8,060,436	Kec. Pakal
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,692,480	7,863,840	Kec. Rungkut
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,955,150	1,998,715	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	9,615,600	9,829,800	Kec. Sawahan
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,573,750	10,362,511	Kec. Semampir

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3,196,800	3,651,851	Kec. Simokerto
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,000,000	9,829,800	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,615,600	9,829,800	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	11,492,296	11,795,760	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20,776,980	23,591,520	Kec. Tandes
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	24,242,400	125,821,440	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	17,788,860	18,185,130	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	721,944	888,122	Kec. Wiyung
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	6,390,000	6,553,200	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.	Pelaksanaan Urusan	Kec.	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan	3,600,000	3,931,920	Kec.

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
04.0003	Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Wonokromo	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				Wonokromo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50%	**528,086,257,228**	**609,988,182,096**	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50%			
			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%			
			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**523,245,898,526**	**603,822,139,243**	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan			
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan			
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan			
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan			
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan			
			jumlah kelurahan yang	4 kelurahan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi				
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan			
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan			
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga			
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan			
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan			
			jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2 Lembaga Kemasyarakatan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pembangunan di Kelurahan				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	9,829,800	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Benowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	28,846,800	29,489,400	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bubutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	32,840,000	36,558,798	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bulak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,128,320	5,570,220	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4,800,000	1,965,960	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gayungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7,200,000	13,106,400	Kec. Gayungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Genteng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	17,319,055	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gubeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	29,489,400	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	22,436,400	22,936,200	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Jambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,500,000	1,638,300	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7,200,000	2,621,280	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	6,028,944	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Krembangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13,250,000	29,489,400	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Kec. Lakarsantri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	10 Lembaga Kemasyaraka	3,600,000	6,101,136	Kec. Lakarsantri

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	tan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,900,000	1,638,300	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	16,080,000	6,553,200	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pakal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	26,212,800	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Rungkut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3,300,000	32,766,000	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,807,800	4,914,900	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sawahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10,384,848	10,616,184	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Semampir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	12 Lembaga Kemasyarakatan	24,080,000	26,991,126	Kec. Semampir

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Simokerto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	28,797,100	44,850,403	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	21,000,000	22,936,200	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	67,380,000	29,489,400	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	1,638,300	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tandes	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	27,100,000	39,319,200	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	8,191,500	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7,200,000	26,091,328	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.	Peningkatan Partisipasi	Kec. Wiyung	Jumlah Lembaga	4 Lembaga	1,282,080	1,310,640	Kec. Wiyung

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0001	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5,400,000	17,546,460	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2,640,000	1,048,512	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,525,420,510	3,977,150,449	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,098,008,917	546,920,073	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,098,008,917	715,688,514	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,894,065,383	2,485,308,839	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,756,814,268	717,331,651	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,569,992,362	3,017,996,883	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,098,008,917	723,221,945	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,729,364,045	2,700,155,087	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,552,870,733	3,569,528,159	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3,184,225,860	2,719,504,006	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,168,567,612	3,545,160,957	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,992,074,300	3,420,196,443	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,894,065,383	1,392,818,111	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,098,008,917	352,921,285	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,098,008,917	660,713,679	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,564,662,707	1,039,469,890	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,325,489,700	956,321,033	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,839,353,422	1,129,464,047	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,733,420,829	904,725,184	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,894,065,383	1,034,016,859	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,344,551,611	1,993,612,995	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,019,781,348	2,225,632,326	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ketintang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,869,856,709	2,225,632,480	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,894,065,383	1,993,613,013	Kec. Gayungan
7.01.03.2.	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	66 Unit	1,144,486,553	1,347,679,386	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0002	Prasarana Kelurahan	Embong Kaliasin	Kelurahan yang Terbangun				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	1,887,981,779	958,100,239	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	2,213,921,242	1,507,394,702	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ketabang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	109,928,731	4,660,585,499	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Peneleh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	479,796,851	1,783,126,078	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Airlangga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,360,719,172	3,474,833,851	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Baratajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,058,766,720	3,089,053,218	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,859,633,891	2,785,240,260	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kertajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,360,719,172	3,621,274,771	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mojo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,497,970,287	4,308,456,244	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,111,835,300	2,929,984,076	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,372,511,147	1,479,663,660	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,235,260,032	612,502,741	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,714,771,592	647,134,010	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,593,436,305	1,476,185,155	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,729,364,045	911,470,283	Kec. Jambangan
7.01.03.2.	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	7 Unit	2,580,320,956	1,550,537,228	Kec.

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0002	Prasarana Kelurahan	Jambangan	Kelurahan yang Terbangun				Jambangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebonsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,262,710,255	1,074,782,710	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pagesangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,262,710,255	930,806,955	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,059,426,011	774,152,271	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	2,196,017,835	3,780,815,253	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1,701,913,822	1,444,934,991	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,210,028,238	626,438,346	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	2,348,832,232	3,672,439,110	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,177,728,258	3,599,086,984	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	862,784,383	1,795,745,787	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,564,662,707	1,406,198,274	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3,348,927,198	3,156,391,571	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dupak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,177,603,080	3,210,437,830	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,537,355,263	3,756,419,172	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,196,017,835	2,930,910,599	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Perak Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,433,569,478	2,991,853,301	Kec. Krembangan
7.01.03.2.	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	33 Unit	1,258,138,092	716,396,136	Kec.

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0002	Prasarana Kelurahan	Bangkingan	Kelurahan yang Terbangun				Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jeruk	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,002,191,497	510,519,149	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,415,619,618	497,724,329	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1,894,065,383	1,393,200,746	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,427,411,593	743,626,016	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sumurwelut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,756,814,268	393,696,944	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,701,913,822	2,838,685,014	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,894,065,383	1,833,876,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,690,121,848	1,833,876,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,427,411,593	916,938,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,058,766,720	2,292,345,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,717,572,071	2,292,345,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bongkaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	879,205,473	2,098,617,306	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,911,449,390	2,593,272,116	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,188,675,638	2,162,010,229	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub alternatif)	Kelurahan Tanjung Perak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,963,848,591	0	Kec. Pabean Cantian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	2,497,970,287	4,843,142,908	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,086,216,943	1,221,172,475	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,552,870,733	1,909,003,203	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1,894,065,383	875,855,876	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,196,017,835	3,601,703,820	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,483,767,974	2,998,847,415	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,729,364,045	2,832,984,527	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,786,582,881	3,058,322,580	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,168,567,612	2,940,333,531	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,212,957,352	2,831,401,392	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,363,928,640	1,391,525,219	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,439,917,780	488,929,038	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,105,518,578	1,381,668,850	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,223,468,058	300,362,793	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,827,372,962	3,150,602,130	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,827,372,962	3,364,664,012	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4,117,909,031	3,722,292,939	Kec. Sawahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,497,970,287	3,666,228,257	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,158,984,374	3,793,621,874	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Petemon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,479,324,059	3,165,227,188	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,497,970,287	4,650,145,500	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,168,567,612	4,251,561,600	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,827,372,962	4,391,839,561	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,118,035,670	5,447,313,300	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,031,316,497	4,915,868,100	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,223,468,058	1,816,179,337	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidodadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,223,468,058	1,727,323,986	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simolawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	1,774,227,516	2,117,727,131	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2,482,387,095	2,015,323,500	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,866,615,160	2,605,161,757	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Keputih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,894,065,383	2,168,212,963	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,058,766,720	2,305,743,764	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,581,535,929	2,910,917,565	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Menur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,058,766,720	2,776,815,463	Kec. Sukolilo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pumpungan					
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,098,034,843	2,910,917,563	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Semolowaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,524,020,807	1,697,551,078	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,218,042,655	1,732,503,309	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,921,515,605	1,473,814,738	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,058,766,720	2,273,450,833	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,026,533,663	3,242,708,245	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,479,779,771	1,904,614,471	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,535,021,656	1,825,533,401	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,701,395,501	2,175,284,545	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,031,316,497	4,431,451,196	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1,839,164,937	4,431,451,196	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,168,567,612	4,431,451,196	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,360,719,172	4,431,451,196	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	11 Unit	3,174,529,584	4,558,064,087	Kec.

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0002	Prasarana Kelurahan	Pacarkembang	Kelurahan yang Terbangun				Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,800,310,702	4,110,952,160	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,729,364,045	4,431,451,196	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,184,225,860	4,431,451,196	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,548,603,260	2,250,226,902	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karangpoh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,388,169,395	1,599,256,728	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Balongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,431,553,931	1,343,702,312	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,377,341,723	1,018,068,354	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,635,221,402	4,614,767,586	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,121,191,543	2,391,514,695	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,025,256,222	2,376,971,496	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Keputran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	2,223,468,058	2,007,467,901	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2,031,316,497	2,596,067,692	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	3,731,202,214	2,499,697,091	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2,854,823,185	2,157,541,814	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kutisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,388,169,395	1,557,799,506	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	1,399,961,370	1,433,979,490	Kec. Tenggilis

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0002	Prasarana Kelurahan	Kendangsari	Kelurahan yang Terbangun				Mejoyo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,399,961,370	1,447,359,128	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,783,178,029	1,644,179,856	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,415,619,618	1,291,494,672	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,235,260,032	1,515,124,893	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,223,468,058	1,517,349,548	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Babatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,031,316,497	2,016,411,359	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,917,357,970	1,503,774,170	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,399,961,370	1,088,938,964	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,046,974,746	2,065,653,216	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,537,212,484	2,692,467,151	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,399,961,370	1,118,167,439	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Darmo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,196,017,835	2,069,275,522	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jagir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,701,913,822	2,966,683,525	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngagel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,058,766,720	2,786,270,234	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,129,325,415	4,502,305,992	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,690,121,848	3,562,506,396	Kec. Wonokromo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	3,550,902,754	4,962,777,853	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Asemrowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,683,613,673	1,948,456,215	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	732,005,945	846,208,260	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	732,005,945	755,341,562	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,262,710,255	1,437,925,283	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,171,209,512	404,392,370	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,090,037,363	1,943,326,565	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	732,005,945	545,547,606	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,152,909,363	1,140,700,764	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	1,701,913,822	2,222,994,009	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,122,817,240	2,425,367,558	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,445,711,741	2,140,522,615	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,994,716,200	3,496,390,989	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	732,005,945	1,105,559,972	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	732,005,945	1,421,760,164	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,043,108,472	1,805,261,399	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,262,710,255	1,815,386,871	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,105,788,167	926,889,212	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,689,933,363	1,047,763,912	Kec. Dukuh Pakis

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	599,848,120	1,116,311,888	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,262,710,255	1,075,360,716	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	635,730,714	687,503,427	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gayungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,960,500,977	1,158,224,588	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ketintang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	737,914,470	732,072,080	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,262,710,255	684,119,215	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,286,791,314	1,780,132,380	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	719,789,400	911,167,723	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,171,606,253	2,073,523,492	Kec. Genteng
7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas	2 Pokmas /	2,497,842,448	1,451,245,492	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0003	Kelurahan	Ketabang	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Peneleh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,631,228,415	2,221,393,793	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Airlangga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,573,812,782	1,391,952,310	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Baratajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,372,511,147	1,679,607,774	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gubeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	748,137,288	1,245,802,381	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kertajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,573,812,782	1,693,501,684	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mojo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,665,313,525	2,528,359,225	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,221,433,650	1,273,944,004	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	915,007,431	1,830,745,764	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas / Ormas	823,506,688	640,422,601	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tambak	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	739,832,644	1,062,953,955	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	618,497,358	1,430,140,607	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	1,152,909,363	1,718,002,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1,720,213,971	1,453,694,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	841,806,837	1,316,148,116	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pagesangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	841,806,837	1,123,309,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	770,588,851	634,337,878	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,464,011,890	653,339,020	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	2 Pokmas / Ormas	1,134,609,215	858,712,785	Kec. Karangpilang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	267,000,000	2,748,272,967	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3,141,212,355	2,959,823,324	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,037,814,100	3,168,618,979	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,248,240,883	1,830,902,906	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,043,108,472	4,008,744,199	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2,232,618,132	1,939,164,957	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dupak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,207,924,415	2,379,042,539	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1,464,011,890	1,343,328,150	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Perak Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2,049,966,935	1,027,736,925	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,253,417,402	2,281,282,327	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangkingan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	571,876,770	944,000,454	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jeruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	827,823,365	964,724,200	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,610,413,079	958,437,100	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,262,710,255	1,608,021,320	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	951,607,728	688,410,709	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumurwelut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,171,209,512	614,502,218	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,134,609,215	1,077,015,453	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,262,710,255	1,103,010,145	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas	2 Pokmas /	1,793,414,565	1,005,295,478	Kec.

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0003	Kelurahan	Kalisari	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas			Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	951,607,728	546,443,574	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,372,511,146	1,633,278,070	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,811,714,714	831,711,199	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bongkaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	950,809,388	1,107,239,073	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3,121,091,482	2,675,708,822	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	968,100,000	1,155,977,468	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub alternatif)	Kelurahan Tanjung Perak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,702,689,308	0	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,665,313,525	1,982,147,247	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,390,811,295	903,490,777	Kec. Pakal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	1,701,912,822	1,088,813,840	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,262,710,255	991,542,489	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,464,011,890	1,850,383,521	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,398,505,434	1,543,278,177	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,152,909,363	1,584,250,164	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,324,442,385	1,495,292,967	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1,445,711,741	1,583,881,047	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	845,809,368	1,246,877,226	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	1,348,359,630	1,472,516,429	Kec. Sambikerep

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,182,000,000	1,387,617,000	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	488,106,000	806,139,400	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,482,312,039	574,869,900	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,665,313,525	3,054,290,200	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	914,631,841	1,996,930,819	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,884,915,308	2,312,545,637	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,884,915,308	3,000,414,596	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,324,552,039	1,728,574,904	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petemon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,638,209,381	2,156,814,627	Kec. Sawahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,665,313,525	3,321,532,500	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,274,000,000	2,790,087,300	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,210,998	3,321,532,500	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,445,711,741	3,321,532,500	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,884,915,308	1,767,985,319	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,482,312,039	1,741,701,241	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	903,140,400	1,621,959,084	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidodadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	1,482,312,039	2,451,606,306	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simokerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,244,410,106	2,174,786,693	Kec. Simokerto
7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas	3 Pokmas /	1,611,299,979	3,108,185,901	Kec.

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0003	Kelurahan	Simolawang	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas			Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	435,478,895	763,639,376	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Keputih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,262,710,255	1,010,967,338	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,372,511,147	1,383,933,921	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,078,493,796	1,141,644,145	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,372,511,147	1,322,907,748	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,463,985,964	1,180,643,380	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Semolowaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,038,000,000	1,172,379,257	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,281,010,404	398,315,573	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,372,511,147	1,198,142,925	Kec. Sukomanung

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				gal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,587,745,690	2,139,332,575	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	676,995,867	613,126,507	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,072,749,523	1,108,383,961	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,455,380,137	1,021,169,804	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,210,998	1,039,672,475	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,226,109,958	2,175,549,810	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,445,711,741	2,402,431,018	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,573,812,782	1,638,482,127	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	2 Pokmas / Ormas	1,812,260,916	2,374,266,390	Kec. Tambaksari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,362,973,110	2,627,175,472	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,152,909,363	1,327,588,731	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,122,817,240	2,608,876,345	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tandes	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	784,665,690	892,002,283	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangpoh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,592,112,930	1,680,929,976	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Balongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	725,221,707	866,417,280	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	681,424,997	941,211,248	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,756,814,268	2,797,093,036	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,310,086,324	793,074,665	Kec. Tandes

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,131,519,416	1,795,529,493	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Keputran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,482,312,039	1,420,420,139	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,210,998	1,770,134,852	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,301,338,658	1,793,734,740	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,903,215,457	1,579,389,693	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kutisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,592,112,930	1,044,016,889	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kendangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	933,307,580	1,231,657,165	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	933,307,580	1,208,799,258	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,197,104,296	1,350,461,681	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas	4 Pokmas /	1,354,210,998	1,797,005,359	Kec. Wiyung

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.0003	Kelurahan	Babatan	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,610,413,079	824,284,676	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	823,506,688	941,884,370	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wiyung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,482,312,039	1,291,972,942	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,062,924,355	694,469,270	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,024,808,323	1,932,302,371	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,031,316,497	827,951,568	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	933,307,580	1,493,351,393	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	933,307,580	1,002,663,855	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Darmo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	1,464,011,890	2,069,160,314	Kec. Wonokromo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jagir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,134,609,215	1,920,421,749	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngagel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,372,511,147	1,269,164,753	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,086,216,943	2,711,464,660	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,793,414,565	2,045,543,518	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokromo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,710,389,976	2,959,704,371	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Perak Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	2,391,862,815	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Perak Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	2,556,491,179	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Perak Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0	1,358,675,274	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Perak Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0	2,379,115,600	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat	17 Lembaga	**4,840,358,702**	**6,166,042,853**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			disediakan				
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana	37 Lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan				
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga			
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	440 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	15 Lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	288 Unit Usaha			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	440 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit	53,779,500	70,190,711	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	82,251,000	98,701,200	Kec. Benowo
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	139,194,000	180,794,328	Kec. Bubutan
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	66,433,500	79,720,200	Kec. Bulak
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit	98,068,500	127,377,822	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit	94,905,000	123,268,860	Kec. Gayungan
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	192,973,500	250,646,682	Kec. Genteng
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	164,502,000	213,666,024	Kec. Gubeng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	91,741,500	119,159,898	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Jambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	82,251,000	106,833,012	Kec. Jambangan
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	91,741,500	119,159,898	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	120,213,000	156,140,556	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Krembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	139,194,000	180,794,328	Kec. Krembangan
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit	101,232,000	131,486,784	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	167,665,500	217,774,986	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	158,175,000	213,666,024	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	107,559,000	139,704,708	Kec. Pakal
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit	234,099,000	304,063,188	Kec. Rungkut
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	37 Unit	120,213,000	152,031,594	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit	227,772,000	295,845,264	Kec. Sawahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	221,445,000	287,627,340	Kec. Semampir
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	151,848,000	182,217,599	Kec. Simokerto
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit	211,954,500	275,300,454	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit	113,886,000	147,922,632	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit	246,753,000	320,499,036	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit	161,338,500	194,650,938	Kec. Tandes
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	151,848,000	197,230,176	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit	79,087,500	102,724,050	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	107,559,000	139,704,708	Kec. Wiyung
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	139,194,000	180,794,328	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit	183,483,000	238,319,796	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	8,640,000	9,436,608	Kec. Asemrowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	15,705,480	16,055,340	Kec. Benowo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	14,400,000	15,727,680	Kec. Bubutan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2,403,900	2,785,110	Kec. Bulak
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	14,000,000	7,863,840	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	11,520,000	11,795,760	Kec. Gayungan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	16,500,000	17,212,140	Kec. Genteng
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14,700,000	16,055,340	Kec. Gubeng
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	5,760,000	9,829,800	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	12,000,000	15,000,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3,600,000	49,881,774	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	27,430,000	14,999,161	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	20,400,000	23,110,020	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	8,783,036	8,978,689	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	21,060,000	49,149,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	47,866,200	67,969,807	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	21,154,320	22,280,880	Kec. Pakal
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9,000,000	9,829,800	Kec. Rungkut
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	14,651,610	14,977,993	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	9,230,976	9,436,608	Kec. Sawahan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	17,280,000	18,873,216	Kec. Semampir
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	19,800,000	41,266,107	Kec. Simokerto
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	22,394,400	23,110,020	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	22,436,400	22,936,200	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	25,500,000	31,127,700	Kec. Tambaksari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	22,000,000	18,873,216	Kec. Tandes
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	22,530,000	23,591,520	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	21,280,000	26,737,056	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	11,520,000	12,582,144	Kec. Wiyung
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	45,812,380	3,276,600	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	8,640,000	3,276,600	Kec. Wonokromo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**4,190,945,435**	**4,943,900,176**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	**4,190,945,435**	**4,943,900,176**	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi			
			Objek yang berpotensi	21 Lokasi			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan				
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi			
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	120,841,152	125,063,712	Kec. Asemrowo
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	149,066,789	159,216,552	Kec. Benowo
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	12 Laporan	112,524,000	150,266,352	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30,664,876	31,239,076	Kec. Bulak
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	143,065,152	147,287,712	Kec. Dukuh Pakis
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	174,316,800	152,294,592	Kec. Gayungan
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	141,186,000	251,620,752	Kec. Genteng
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138,771,486	147,611,155	Kec. Gubeng
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	64,020,000	153,829,800	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	149,908,800	160,402,272	Kec. Jambangan
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	148,471,200	152,711,712	Kec. Karangpilang
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	134,124,000	163,185,584	Kec. Kenjeran
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93,735,000	172,047,852	Kec. Krembangan
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	125,449,152	141,191,712	Kec. Lakarsantri
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12 Laporan	154,682,872	154,682,872	Kec. Mulyorejo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kecamatan		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	111,265,200	161,402,304	Kec. Pabean Cantian
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	111,625,152	115,847,712	Kec. Pakal
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	153,615,600	153,829,800	Kec. Rungkut
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	150,299,200	192,510,312	Kec. Sambikerep
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	115,459,200	147,786,912	Kec. Sawahan
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	12 Laporan	134,285,520	138,444,960	Kec. Semampir

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	131,917,380	127,033,455	Kec. Simokerto
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	165,693,600	182,479,632	Kec. Sukolilo
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	196,197,000	187,444,478	Kec. Sukomanunggal
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	201,196,800	287,414,400	Kec. Tambaksari
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	150,657,600	137,341,152	Kec. Tandes
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	244,617,600	297,653,616	Kec. Tegalsari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	113,353,200	83,591,712	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	115,459,200	148,281,912	Kec. Wiyung
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	107,278,704	160,097,856	Kec. Wonocolo
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	107,197,200	160,088,256	Kec. Wonokromo
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**751,015,227**	**1,223,564,883**	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%			
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	**751,015,227**	**1,223,564,883**	
			Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	12 Laporan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Babinsa/Babinkamtibmas				
			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	29 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	33 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang	45 Kasus			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas				
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus			
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus			
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik			
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	2 Topik			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Asemrowo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82 Orang	4,460,000	4,914,900	Kec. Asemrowo
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	15,705,480	16,055,340	Kec. Benowo
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	14,400,000	15,727,680	Kec. Bubutan
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	2,403,900	2,457,450	Kec. Bulak
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	15,384,960	15,727,680	Kec. Dukuh Pakis
7.01.05.2.	Fasilitasi, Koordinasi dan	Kec.	Jumlah Orang yang Mengikuti	230 Orang	6,900,000	31,161,000	Kec.

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
01.0002	Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Gayungan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Gayungan
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Genteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	58 Orang	14,000,000	11,474,760	Kec. Genteng
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Gubeng	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 Orang	5,720,000	16,055,340	Kec. Gubeng
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	5,000,000	9,829,800	Kec. Gunung Anyar
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Jambangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	20,160,000	22,018,752	Kec. Jambangan
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Karangpilang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang	6,400,000	6,553,200	Kec. Karangpilang
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Kec. Kenjeran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	418 Orang	11,680,000	7,863,840	Kec. Kenjeran

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Krembangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	15,548,800	17,468,824	Kec. Krembangan
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Lakarsantri	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	7,110,000	9,174,480	Kec. Lakarsantri
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	54 Orang	7,180,000	13,106,400	Kec. Mulyorejo
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	15,485,000	26,212,800	Kec. Pabean Cantian
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang	5,715,600	9,829,800	Kec. Pakal
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	120 Orang	6,200,000	9,829,800	Kec. Rungkut

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	9,200,000	15,727,680	Kec. Sambikerep
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sawahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	93 Orang	23,204,100	23,894,414	Kec. Sawahan
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	15,000,000	16,383,000	Kec. Semampir
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Simokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	53 Orang	6,400,000	7,685,397	Kec. Simokerto
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sukolilo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	15,383,655	17,468,824	Kec. Sukolilo
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	160 Orang	9,600,000	9,829,800	Kec. Sukomanunggal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Nasional		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang	20,560,000	31,368,160	Kec. Tambaksari
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tandes	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 Orang	5,900,000	23,168,244	Kec. Tandes
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tegalsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang	7,200,000	50,787,300	Kec. Tegalsari
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	9,615,600	9,829,800	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wiyung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	9,615,600	9,829,800	Kec. Wiyung
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	35 Orang	20,000,000	22,949,520	Kec. Wonocolo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonokromo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	25,000,000	28,686,900	Kec. Wonokromo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	14,018,880	14,764,680	Kec. Asemrowo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	15,705,480	16,055,340	Kec. Benowo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7,692,480	7,863,840	Kec. Bubutan
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	3,205,200	3,276,600	Kec. Bulak
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7,692,480	7,863,840	Kec. Dukuh Pakis
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7,151,490	6,970,190	Kec. Gayungan
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	20,521,200	12,598,794	Kec. Genteng
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	12 Laporan	15,705,480	16,055,340	Kec. Gubeng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12,715,400	13,106,400	Kec. Gunung Anyar
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	33 Laporan	17,169,600	22,018,752	Kec. Jambangan
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	32,193,000	101,574,600	Kec. Karangpilang
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7,200,000	7,863,840	Kec. Kenjeran
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	6,438,600	28,474,740	Kec. Krembangan
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	7,692,480	7,863,840	Kec. Lakarsantri
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	12,519,500	13,106,400	Kec. Mulyorejo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	11,248,800	52,425,600	Kec. Pabean Cantian
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	12 Laporan	9,615,600	9,829,800	Kec. Pakal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Undangan				
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	9,615,600	9,829,800	Kec. Rungkut
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	7,692,480	7,863,840	Kec. Sambikerep
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	19,626,432	20,670,576	Kec. Sawahan
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	23,364,800	24,607,800	Kec. Semampir
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	2,073,456	2,248,376	Kec. Simokerto
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	23,311,194	28,474,740	Kec. Sukolilo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	9,615,600	9,829,800	Kec. Sukomanunggal
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	25,200,000	26,570,940	Kec. Tambaksari
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	25,754,400	95,063,760	Kec. Tandes

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	8,942,500	101,574,600	Kec. Tegalsari
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	9,615,600	9,829,800	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	4,292,400	9,829,800	Kec. Wiyung
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan	13,000,000	15,580,500	Kec. Wonocolo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	4,292,400	6,807,270	Kec. Wonokromo
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**182,977,203,253**	**34,927,677,858**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**182,977,203,253**	**34,927,677,858**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**12,640,548,176**	**13,675,921,973**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**9,685,922,611**	**8,897,661,633**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	9,685,922,611	8,897,661,633	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**99,259,500**	**208,490,060**	
8.01.01.2.	Penyediaan Peralatan dan	Badan	Jumlah Paket Peralatan dan	5 Paket	99,259,500	208,490,060	Badan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
06.0002	Perlengkapan Kantor	Kesatuan Bangsa dan Politik	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**2,855,366,065**	**4,569,770,280**	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,855,366,065	4,569,770,280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	92%	**8,257,681,890**	**807,373,334**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	291 Lembaga	**8,257,681,890**	**807,373,334**	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	291 Orang	8,257,681,890	807,373,334	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	54%	**130,474,599,596**	**8,309,062,249**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,**		Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	30 Lembaga	**130,474,599,596**	**8,309,062,249**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Orang	130,474,599,596	8,309,062,249	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	60%	**35,828,932**	**58,119,898**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	**35,828,932**	**58,119,898**	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	35,828,932	58,119,898	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan	100%	**611,805,623**	**784,188,182**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			narkoba yang dibina				
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8 Lembaga	**611,805,623**	**784,188,182**	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	611,805,623	784,188,182	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	**30,956,739,036**	**11,293,012,222**	
			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%			
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	12 Lembaga	**30,956,739,036**	**11,293,012,222**	
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	18 Lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Orang	30,499,619,942	10,558,779,130	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	457,119,094	734,233,092	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL					**10,459,879,819,485**	**10,954,289,611,156**	

5.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan hasil analisa keuangan dengan mempertimbangkan regulasi dan kondisi terkini terkait pandemi Covid-19. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja Daerah disajikan dalam Tabel V.2 tentang Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2024.

Tabel V.2
Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2024

NO	URAIAN		PROYEKSI 2024
A	**PENDAPATAN**		**10,245,855,297,554**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**5,896,432,980,984**
	a	Pajak Daerah	4,651,918,231,958
	b	Retribusi Daerah	353,079,192,224
	c	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	145,841,912,892
	d	Lain-Lain PAD yang sah	745,593,643,910
2	**PENDAPATAN TRANSFER**		**4,349,422,316,570**
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		**2,829,451,247,564**
	a	1) Dana Perimbangan	2,788,314,545,564
	b	2) Dana Insentif Daerah	41,136,702,000
	Transfer Antar - Daerah		**1,519,971,069,006**
	a	1) Pendapatan Bagi Hasil	1,516,127,755,227
	b	2) Bantuan Keuangan	3,843,313,779
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		**-**
	a	Pendapatan Hibah	-
	b	Pendapatan Dana Darurat	-
	c	Pendapatan Lainnya	-
B	**BELANJA**		**10,459,879,819,485**
	BELANJA OPERASI + BELANJA MODAL		**10,422,379,819,485**
1	**BELANJA OPERASI**		**8,151,454,046,933**
	a	Belanja Pegawai	2,772,417,810,165
	b	Belanja Barang dan Jasa	4,882,964,409,307
	c	Belanja Bunga	
	d	Belanja Subsidi	
	e	Belanja Hibah	445,511,977,459
	f	Belanja Bantuan Sosial	50,559,850,002
2	**BELANJA MODAL**		**2,270,925,772,552**
	a	Belanja Modal Tanah	294,227,417,802
	b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238,251,641,310
	c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	594,593,488,688
	d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,131,520,336,609
	e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12,332,888,143
	f	Belanja Modal Aset Lainnya	
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**		**37,000,000,000**
	a	Belanja Tidak Terduga	37,000,000,000
4	**BELANJA TRANSFER**		**500,000,000**
	a	Belanja Bagi Hasil	-
	b	Belanja Bantuan Keuangan	500,000,000

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (diolah tahun 2023).

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Surabaya terkait pembangunan manusia, nilai tambah barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, garis atau batas kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan sosial. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban, tenaga kerja, pengarustamaan gender, pangan, pertanahan, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga bencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, penanaman modal, kebudayaan, kearsipan, kelautan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang

berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan
4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan										
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Kondisi Awal**	**Target Indikator Tujuan**						**Kondisi Akhir**
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,85%	6,3%-6,8% 2,71%-5,00%*	2,96%	3,21%	3,46%*** * 6,1%****	3,71%	3,96%	3,96%
		Indeks Gini	0,344	0,38-0,37 0,334*	0,328	0,323	0,319	0,315	0,311	0,311
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,79%	6,30%-5,90% 9,00%-5,90%*	8,99%	8,26%	6,93%*** * 4,5%****	6,50%	6,00%	6,00%
		Persentase Penduduk Miskin	5,02%	4,71%-4,60%	4,62%	4,31%	4,01%	3,71%	3,42%	3,42%
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	82,23	81-82	82,50	82,50	83,50	83,50	83,50	83,50
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	73,99	75,05**	76,69	79,41	82,13	84,85	87,57	87,57
Misi 3 : Memantapkan penataan	Terpenuhinya penataan kota	Indeks	0,600	0,606**	0,626	0,678	0,734	0,79	0,854	0,854

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan										
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Kondisi Awal**	**Target Indikator Tujuan**						**Kondisi Akhir**
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Infrastruktur Kota						3		
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,10	68,32	68,54	68,75	68,97	69,18	69,18
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	78,13	81,81	82,61	83,41	84,21	85,01	85,81	85,81
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,77	0,81**	0,83	0,85	0,87	0,90	0,92	0,92

Keterangan :

1. Untuk IKLH memiliki kondisi awal = 66,99 dan target pada Tahun 2021-2026 adalah 66,99 ; 67,00 ; 67,02 ; 67,03 ; 67,05 ; 67,06 secara berturut-turut.
2. *) penyesuaian target pada Tahun 2021 dengan kondisi saat proses penyusunan
3. **) merupakan indikator baru atau menggunakan cara perhitungan yang berbeda, kondisi awal pada Tahun 2020 dan target pada Tahun 2021 merupakan proyeksi.
4. ***) terdapat penyesuaian pada RKPD 2024 dengan mempertimbangkan evaluasi tahun 2022 serta proyeksi di masa mendatang pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi 6,1% dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,5%

6.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. IKK membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana tujuan dan target pembangunan daerah telah tercapai. Tujuan dalam penetapan IKK Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKK Kepala PD dapat dilihat pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
	1	Indeks Gini	0,344	0,38-0,37 0,334*	0,328	0,323	0,319	0,315	0,311	0,311	Indeks
	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,85%	6,3%-6,8% 2,71%-5,00%*	2,96%	3,21%	3,46% 6,1%***	3,71%	3,96%	3,96%	%
	3	Persentase Penduduk Miskin	5,02%	4,71%-4,60%	4,62%	4,31%	4,01%	3,71%	3,42%	3,42%	%
	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,79%	6,30%-5,90% 9,00%-5,90%*	8,99%	8,26%	6,93% 4,5%***	6,50%	6,00%	6,00%	%
	5	Indeks Pembangunan Manusia	82,23	81-82	82,50	82,50	83,50	83,50	83,50	83,50	Indeks
	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,10	68,32	68,54	68,75	68,97	69,18	69,18	Indeks
	7	Indeks Reformasi Birokrasi	78,13	81,81	82,61	83,41	84,21	85,01	85,81	85,81	Indeks
	8	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,77	0,81**	0,83	0,85	0,87	0,90	0,92	0,92	Indeks
B.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
	1	Indeks Harmoni Sosial	73,99	75,05**	76,69	79,41	82,13	84,85	87,57	87,57	Indeks
	2	Indeks Infrastruktur Kota	0,600	0,606**	0,626	0,678	0,734	0,793	0,854	0,854	Indeks

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
	Layanan Urusan Wajib Dasar									
	1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									
	1.1. Indeks Pendidikan	76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks
	2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
	2.1. Angka Harapan Hidup	74,18	74,04 74,27*	74,36	74,44	74,53	74,62	74,70	74,70	Tahun
	2.2. Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	2.2.1. Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	3.1. Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,748	0,754**	0,770	0,800	0,820	0,860	0,890	0,890	Indeks
	3.2. Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks
	3.2.1. Indeks Penataan Ruang	0,282	0,283**	0,285	0,286	0,288	0,292	0,294	0,294	Indeks
	4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	4.1. Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks
	4.1.1. Indeks Keciptakaryaan	0,035	0,038**	0,070	0,170	0,270	0,370	0,500	0,500	Indeks
	5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	5.1. Indeks Penanggulangan Bencana	0,732	0,765**	0,792	0,828	0,864	0,899	0,935	0,935	Indeks
	5.2. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,81	0,85**	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90	Indeks

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		5.2.1.	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	65,68%	74,20%**	76,39%	78,58%	80,77%	82,96%	85,15%	85,15%	%
	6	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**										
	6.1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan		0,87	0,87**	0,85	0,83	0,81	0,79	0,77	0,77	Indeks
	6.2.	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk		2,46%	2,41%**	2,35%	2,28%	2,22%	2,16%	2,10%	2,10%	%
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
	1	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**										
	1.1.	Persentase tenaga kerja yang terserap		20,28%	20,71%**	21,14%	21,57%	22,01%	22,45%	22,83%	22,83%	%
	2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
	2.1.	Indeks Pembangunan Gender		93,58	93,70	93,73	93,74	93,75	93,77	93,78	93,78	Indeks
	3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**										
	3.1.	Skor Pola Pangan Harapan		96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
	4	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**										
	4.1.	Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan		0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks
		4.1.1.	Indeks Pertanahan	0,012	0,018**	0,024	0,047	0,067	0,089	0,100	0,100	Indeks
	5	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**										
	5.1.	Indeks Kualitas Air		56,05	56,06	56,07	56,08	56,09	56,10	56,11	56,11	Indeks
	5.2.	Indeks Kualitas Udara		90,31	90,31	90,32	90,33	90,34	90,35	90,36	90,36	Indeks
	5.3.	Indeks Kualitas Lahan		42,63	42,63	42,66	42,69	42,72	42,75	42,78	42,78	Indeks
	5.4.	Indeks Persampahan		75,84	75,90	76,95	77,54	78,13	78,71	79,29	79,29	Indeks

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	5.5.	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	39,49	42,97**	47,97	56,46	64,94	73,43	81,91	81,91	Indeks
	6	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
	6.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
		6.1.1. Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	7	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
	7.1.	Angka Harapan Hidup	74,18	74,04 74,27*	74,36	74,44	74,53	74,62	74,70	74,70	Tahun
		7.1.1. Indeks Bangga Kencana	61,23%	63,14%**	65,05%	66,96%	68,87%	70,78%	72,69%	72,69%	%
	8	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**									
	8.1.	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,673	0,676**	0,680	0,690	0,728	0,745	0,768	0,768	Indeks
	9	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**									
	9.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
	10	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**									
	10.1.	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	0,00%	0,24%**	8,30%	16,60%	24,90%	33,20%	41,50%	41,50%	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	11	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**									
	11.1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	2,71%	4,25%**	4,60%	5,50%	6,30%	6,90%	7,40%	7,40%	%
	11.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
		11.2.1. Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	12	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**									
	12.1.	Indeks Pendidikan	76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks
		12.1.1. Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan	0,69	0,70**	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,82	Indeks
	13	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**									
	13.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
		13.1.1. Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100,00 %	100,00%**	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	%
	14	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**									
	14.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
		14.1.1. Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100,00 %	100,00%**	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	15	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**									
	15.1.	Indeks Budaya Lokal	88,56	81,50 88,60*	88,90	89,30	89,70	90,10	90,50	90,50	Indeks
	16	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**									
	16.1.	Indeks Pendidikan	76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks
		16.1.1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67,40	67,90**	68,40	68,90	69,40	69,90	70,40	70,40	Nilai
	17	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**									
		17.1.1. Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	0,00%	61,54%**	69,23%	76,92%	84,62%	92,31%	100,00 %	100,00 %	%
	Layanan Urusan Pilihan										
	1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**									
	1.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	-10,87%	4,40%**	4,87%	5,18%	5,37%	5,87%	6,51%	6,51%	%
	2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**									
	2.1.	Skor Pola Pangan Harapan	96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
		2.1.1. Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	0,00%	5,00%**	10,00%	16,00%	22,00%	28,00%	34,00%	34,00%	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	3	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**									
	3.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-8,57%	3,30%**	3,65%	3,86%	4,01%	4,12%	4,58%	4,58%	%
	3.2.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	-1,15%	3,50%**	3,61%	3,70%	3,96%	3,81%	4,10%	4,10%	%
	3.3.	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,23%	5,23%**	5,24%	5,25%	5,26%	5,27%	5,28%	5,28%	%
	4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**									
	4.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	-1,15%	3,50%**	3,61%	3,70%	3,96%	3,81%	4,10%	4,10%	%
		4.1.1. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	70,00%	73,00%**	75,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	80,00%	%
	5	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**									
	5.1.	Skor Pola Pangan Harapan	96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
		5.1.1. Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	1,90%	2,00%**	2,50%	5,10%	8,20%	12,00%	16,00%	16,00%	%
	Penunjang Urusan										
	1	**Perencanaan**									
	1.1.	Nilai SAKIP	75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
		1.1.1. Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	21,68	22,00**	23,62	23,93	24,23	24,53	24,84	24,84	Nilai

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	2	**Keuangan**									
	2.1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai
		2.1.1. Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	91,13%	88,03%**	90,87%	88,88%	89,50%	89,92%	90,35%	90,35%	%
	3	**Kepegawaian**									
		3.1.1. Indeks Kualitas Pegawai	76,69%	78,69%**	79,20%	79,64%	80,24%	81,03%	81,73%	81,73%	%
	4	**Pendidikan dan Pelatihan**									
		4.1.1. Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	68,90%	75,38%**	76,38%	77,14%	78,28%	79,52%	80,30%	80,30%	%
	5	**Penelitian dan pengembangan**									
	5.1.	Nilai SAKIP	75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
		5.1.1. Nilai Indeks Inovasi Daerah	52,90	54,00**	55,00	58,00	61,00	64,00	67,00	67,00	Indeks
	6	**Sekretariat Daerah**									
	6.1.	Nilai SAKIP	75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
	7	**Sekretariat DPRD**									
		7.1.1. Persentase pelaksanaan fungsi DPRD	100,00 %	100,00%**	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	8	**Inspektorat Daerah**									
	8.1.1.	Indeks kualitas pengawasan	76,89	78,19	79,23	81,60	83,55	85,93	87,88	87,88	Indeks
	9	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
	9.1.	Indeks Kepedulian Sosial	89,00	89,00**	89,10	89,20	89,30	89,40	89,50	89,50	Indeks
	9.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,81	0,85**	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90	Indeks
	9.2.1.	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	95,35%	95,43%**	95,51%	95,59%	95,67%	95,75%	95,83%	95,83%	%
	10	**Kecamatan**									
	10.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	10.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%

Keterangan :

1. Untuk IKLH memiliki kondisi awal = 66,99 dan target pada Tahun 2021-2026 adalah 66,99 ; 67,00 ; 67,02 ; 67,03 ; 67,05 ; 67,06 secara berturut-turut.
2. Skor Pola Pangan Harapan pada Tahun 2021 ditargetkan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi awal dikarenakan turunnya daya beli masyarakat terhadap keberagaman kelompok pangan akibat Pandemi Covid-19.
3. Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup pada kondisi awal berada pada nilai 0 (nol) dikarenakan merupakan
4. indikator baru yang belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya.
5. *) penyesuaian target pada Tahun 2021 dengan kondisi saat proses penyusunan.
6. **) merupakan indikator baru, kondisi awal pada Tahun 2020 dan target pada Tahun 2021 merupakan proyeksi.
7. ***) terdapat penyesuaian indikator pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2024

BAB VII
PENUTUP

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

RKPD Kota Surabaya tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan Provinsi Jawa Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, perumusan rencana kerja program dan pendanaan serta tindak lanjut Rekomendasi Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 berdasarkan surat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 050/ 10.750 /201.2/2023 tanggal 22 Juni 2023.

WALIKOTA SURABAYA

ERI CAHYADI